Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 69 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA SURABAYA TAHUN 2024

WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 69 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan prioritas pembangunan daerah serta kerangka ekonomi dan keuangan daerah Tahun 2024 dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

24. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

26. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

28. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

30. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);

31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

35. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

44. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721);

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

47. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);

49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

50. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

51. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

52. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

53. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);

54. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);

55. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);

56. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 39 Seri E);

57. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);

58. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2024);

59. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 20 Seri E);

60. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);

61. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

62. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

63. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4);

64. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembara Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 8);

65. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 42);

66. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 69);

67. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 135 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 135 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 69 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 69) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 11 Juli 2024

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di .....

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 11 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H.
NIP. 197803072005011004

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar xv
BAB I PENDAHULUAN ..... I - 1
1.1 Latar Belakang ..... I - 1
1.2 Dasar Hukum ..... I - 4
1.3 Hubungan Antar Dokumen ..... I - 13
1.4 Maksud dan Tujuan ..... I - 15
1.5 Sistematika Dokumen RKPD ..... I - 16
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2024 . II - 1
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah ..... II - 1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ..... II - 1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II - 27
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ..... II - 54
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ..... II - 180
2.1.5 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ..... II - 195
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ..... II - 196
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ..... II - 521
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ..... II - 521
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah ..... II - 522
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH ..... III - 1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... III - 1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Kota Surabaya ..... III - 4
3.1.2 Prospek Ekonomi Tahun 2023 dan Tahun 2024 ..... III - 20
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... III - 25

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..... III - 27
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ..... III - 41
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ..... III - 46
3.2.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah ..... III - 48
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..... IV - 1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ..... IV - 1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024 ..... IV - 5
4.2.1 Isu Strategis ..... IV - 5
4.2.2 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah, Provinsi Jawa Timur dan Nasional ..... IV - 15
4.2.3 Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2024 yang Mendukung Prioritas Pembangunan ..... IV - 25
4.2.4 Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024 ..... IV- 698
4.2.5 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD IV-728
4.2.6 Inovasi Unggulan IV-728
4.2.7 Kebijakan Pencapaian SPM IV-731
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... V - 1
5.1 Program dan Kegiatan Rancangan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 ..... V - 1
5.2 Kerangka Pendanaan Rancangan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 ..... V - 209
BAB VI PENUTUP ..... VII- 1

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Sistem Drainase di Kota Surabaya II–3

Tabel II.2 Persebaran Situs, Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya Tiap Kecamatan II–14

Tabel II.3 Luasan Kawasan Strategis Lingkungan Hidup Tahun 2020 – 2024 (TW 2) II–15

Tabel II.4 Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–21

Tabel II.5 Kelurahan Tangguh Bencana Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–21

Tabel II.6 Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–22

Tabel II.7 Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan II–23

Tabel II.8 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah Tahun 2023 ..... II–24

Tabel II.9 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Agama II–25

Tabel II.10 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2023 ..... II–26

Tabel II.11 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023 ..... II–27

Tabel II.12 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2019 – 2023 ..... II–28

Tabel II.13 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019 – 2023 (dalam persen) II–29

Tabel II.14 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2019 – 2023 (dalam Juta Rp) II–31

Tabel II.15 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2019 – 2023 (dalam Juta Rp)..... II–32

Tabel II.16 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) II–33

Tabel II.17 PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–35

Tabel II.18 Indeks Gini Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)..... II–37

Tabel II.19 Angka dan Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–38

Tabel II.20 Tren IPM Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–39

Tabel II.21 Perkembangan Umur Harapan Hidup Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–40

Tabel II.22 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–40

Tabel II.23 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2019 – 2023..... II–40

Tabel II.24 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–41

Tabel II.25 Indeks Harmoni Sosial Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–43

Tabel II.26 Perkembangan AMH Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)..... II–44

Tabel II.27 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)..... II–44

Tabel II.28 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Terhadap Laki-Laki Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–45

Tabel II.29 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–45

Tabel II.30 Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–46

Tabel II.31 Perkembangan Balita Gizi Buruk Kota Surabaya (menurut Kecamatan) Tahun 2019 – 2023 ..... II–47

Tabel II.32 Prevalensi Balita Gizi Kurang Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–49

Tabel II.33 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–49

Tabel II.34 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–49

Tabel II.35 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–51

Tabel II.36 TPT Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019 – 2023 ..... II–52

Tabel II.37 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–52

Tabel II.38 Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kota Surabaya Tahun 2023 ..... II–54

Tabel II.39 Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2021 – 2023 ..... II–72

Tabel II.40 Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Per Kecamatan Tahun 2023 ..... II–73

Tabel II.41 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2023 ..... II–75

Tabel II.42 Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Tahun 2019 – 2023 ..... II–77

Tabel II.43 Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS)
Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–78

Tabel II.44 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–78

Tabel II.45 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2024 (TW II) II–79

Tabel II.46 Jumlah Guru dan Murid Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–81

Tabel II.47 Jumlah Guru PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang
Pendidikan Tahun 2023 ..... II–81

Tabel II.48 Jumlah Guru Non PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang
Pendidikan Tahun 2023 ..... II–82

Tabel II.49 Jumlah Guru Kota Surabaya Bersertifikat Pendidik
Tahun 2023 ..... II–82

Tabel II.50 Jumlah Kasus Penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular
Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–83

Tabel II.51 Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani Kurang
Dari 24 Jam Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–83

Tabel II.52 Daftar Kampung Tangguh Covid-19 Kota Surabaya
Tahun 2024 (TW II) II–84

Tabel II.53 Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2020 – 2024 (TW II) .. II–86

Tabel II.54 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–86

Tabel II.55 Cakupan kunjungan bayi Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–86

Tabel II.56 Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan
Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–87

Tabel II.57 Jumlah Posyandu dan Balita Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–87

Tabel II.58 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–88

Tabel II.59 Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–88

Tabel II.60 Jumlah Dokter Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–89

Tabel II.61 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Capaian Pemenuhan SPM Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–90

Tabel II.62 Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–91

Tabel II.63 Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Higienis Sanitasi Tahun 2019 – 2023 ..... II–92

Tabel II.64 Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2021 – 2023 ..... II–93

Tabel II.65 Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–94

Tabel II.66 Cakupan Penduduk dengan Akses Air Bersih, Sanitasi, Air Minum Layak Tahun 2019 – 2023 ..... II–95

Tabel II.67 Penyusunan Rencana Induk Kota Surabaya Tahun 2015 – 2024 (TW II) II–96

Tabel II.68 IMB yang diterbitkan Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–97

Tabel II.69 Penertiban Bangunan Yang Tidak Sesuai IMB Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–97

Tabel II.70 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–98

Tabel II.71 Jumlah Pemohon Rumah Susun di Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–99

Tabel II.72 Jumlah dan Lokasi Persebaran Rusunawa II–100

Tabel II.73 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II)..... II–103

Tabel II.74 Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II)..... II–103

Tabel II.75 Rasio Kejadian Unjuk Rasa Yang Mengarah Tindakan Anarkis
Tahun 2020 – 2024 (TW II)..... II–104

Tabel II.76 Kejadian Kebakaran per Penyebab
Tahun 2020 – 2024 (TW II)..... II–105

Tabel II.77 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)
Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–105

Tabel II.78 Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–106

Tabel II.79 Penanganan PPKS Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II)..... II–107

Tabel II.80 PPKS Penduduk non Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)..... II–108

Tabel II.81 PSKS Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–108

Tabel II.82 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya
Tahun 2019 – 2023..... II–109

Tabel II.83 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II)..... II–110

Tabel II.84 Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Terakhir II–110

Tabel II.85 Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II)..... II–111

Tabel II.86 Penempatan Kerja Peserta Peningkatan Kompetensi Sesuai
Pasar Kerja Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–111

Tabel II.87 Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Surabaya
Tahun 2019 – 2023..... II–112

Tabel II.88 Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–113

Tabel II.89 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–113

Tabel II.90 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–114

Tabel II.91 KDRT Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–114

Tabel II.92 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II).. II–115

Tabel II.93 Jejaring Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–116

Tabel II.94 Perempuan Mengikuti Pemberdayaan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–116

Tabel II.95 Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)..... II–117

Tabel II.96 Pola Pangan Harapan Tahun 2019 – 2023 ..... II–117

Tabel II.97 Keamanan Pangan Segar Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)..... II–118

Tabel II.98 Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Tersertifikat Tahun 2020 – 2024 (TW II)..... II–119

Tabel II.99 Luas Lahan Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Bersertifikat Tahun 2020 – 2024 (TW II)..... II–120

Tabel II.100 Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Infrastruktur dan Non Infrastruktur Tahun 2019 – 2024 (TW II) II–121

Tabel II.101 Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)..... II–121

Tabel II.102 Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–122

Tabel II.103 Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS)
Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–122

Tabel II.104 Peran Serta Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan
Kebersihan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–123

Tabel II.105 Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–124

Tabel II.106 Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–125

Tabel II.107 Ketaatan/Kepatuhan Kegiatan/Usaha Terhadap Aspek
Lingkungan Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–126

Tabel II.108 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Tahun 2019 – 2023 ..... II–127

Tabel II.109 Indeks Penyusun IKLHS Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–127

Tabel II.110 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kota Surabaya
Tahun 2019 – 2023 ..... II–130

Tabel II.111 Penerapan Upaya Penerapan Konservasi Energi
Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–131

Tabel II.112 Jumlah Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki KTP
Berbasis NIK Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–132

Tabel II.113 Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–132

Tabel II.114 Rasio Akseptor KB Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–134

Tabel II.115 Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–135

Tabel II.116 Partisipasi KB dari Pasangan Usia Subur (PUS) Kota
Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–135

Tabel II.117 Total Fertility Rate (TFR) Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 . II–136

Tabel II.118 Keluarga Miskin yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–137

Tabel II.119 Jumlah Terminal dan Angkutan Darat Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)..... II–138

Tabel II.120 Rasio Izin Trayek Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) . II–138

Tabel II.121 Rata-Rata Waktu Tunggu Angkutan Umum Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)..... II–139

Tabel II.122 Rata-Rata Load Factor Angkutan Umum Tahun 2020 – 2024 (TW II)..... II–139

Tabel II.123 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)..... II–140

Tabel II.124 Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)..... II–140

Tabel II.125 Weather Information Display Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)..... II–141

Tabel II.126 Operasional Perlintasan Sebidang Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)..... II–141

Tabel II.127 Jaringan Komunikasi Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)..... II–142

Tabel II.128 Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Daring Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)..... II–142

Tabel II.129 Pertumbuhan Anggota Koperasi Tahun 2019 – 2023..... II–143

Tabel II.130 Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–144

Tabel II.131 Koperasi per Jenis Usaha di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–144

Tabel II.132 Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi Aktif di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–145

Tabel II.133 Pembinaan dan Pengembangan UMKM Kota Surabaya Berdasarkan Intervensi Tahun 2019 – 2023 ..... II–146

Tabel II.134 Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–147

Tabel II.135 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–148

Tabel II.136 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–148

Tabel II.137 Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–149

Tabel II.138 Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–152

Tabel II.139 Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi Kota Surabaya Tahun 2021 – 2024 (TW II) II–152

Tabel II.140 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–153

Tabel II.141 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–154

Tabel II.142 Jumlah Kelompok Seni Binaan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–155

Tabel II.143 Jumlah Perpustakaan dan Pustakawan Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–156

Tabel II.144 Jumlah Koleksi dan Pengunjung Perpustakaan Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–157

Tabel II.145 Perangkat Daerah (PD), Unit Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang Tertib Sistem Tata Kearsipan Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–159

Tabel II.146 Produksi Perikanan Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–160

Tabel II.147 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara
ke Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–161

Tabel II.148 Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata
Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–161

Tabel II.149 Jumlah Kesepakatan Dengan Stakeholder Bidang Pariwisata
Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–163

Tabel II.150 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya
Per Hektar Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–164

Tabel II.151 Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota
Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–164

Tabel II.152 Intervensi Hewan Ternak Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–164

Tabel II.153 Jumlah Pasar Modern di Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–165

Tabel II.154 Pasar yang Dibangun Oleh Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–165

Tabel II.155 Jumlah Pasar PD Pasar Surya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–166

Tabel II.156 Jumlah Usaha Berdasarkan Ijin yang Berlaku Di Kota
Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–166

Tabel II.157 Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya
Tahun 2019 – 2022 ..... II–167

Tabel II.158 Persentase Jenis Pelayanan yang Memiliki SOP
Tahun 2019 – 2023 ..... II–168

Tabel II.159 SOP Dievaluasi Tahun 2019 – 2023 ..... II–168

Tabel II.160 Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan
Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–168

Tabel II.161 Rekap Hasil Audit Kinerja BUMD Kota Surabaya
Tahun 2019 – 2023 ..... II–169

Tabel II.162 Survei Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya
Tahun 2019 – 2023 ..... II–170

Tabel II.163 MoU Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga
Tahun 2023 – 2024 (TW II) II–171

Tabel II.164 MoU Kerjasama Luar Negeri Tahun 2023 – 2024 (TW II) II–171

Tabel II.165 MoU Kerjasama Kota Surabaya yang Dievaluasi
Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–171

Tabel II.166 Dokumen Perencanaan Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–173

Tabel II.167 Penjabaran Program RPJMD Dalam RKPD Kota Surabaya
Tahun 2019 – 2023 ..... II–174

Tabel II.168 Tingkat Capaian Keberhasilan Program Pembangunan
Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–174

Tabel II.169 Rata – Rata Penyerapan Anggaran Kegiatan Pemerintah
Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–175

Tabel II.170 Jumlah Pegawai Yang Berkompeten Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–175

Tabel II.171 Persentase Pejabat Struktural yang telah Mengikuti Diklat
Struktural Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–176

Tabel II.172 Penegasan Wilayah Kecamatan Kota Surabaya
Tahun 2019 – 2023 ..... II–177

Tabel II.173 Pelanggaran Tata Kelola Administrasi Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–177

Tabel II.174 Rekapitulasi Sanksi Disiplin Terhadap Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–178

Tabel II.175 Jumlah Ormas Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–179

Tabel II.176 Jumlah Potensi Konflik Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–179

Tabel II.177 Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–180

Tabel II.178 Produktivitas Ekonomi di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 .. II–180

Tabel II.179 Perkembangan PDRB Kategori Transportasi dan Pergudangan Tahun 2019 – 2023 ..... II–181

Tabel II.180 Indeks Infrastruktur Kota Surabaya Tahun 2022 – 2023 ..... II–181

Tabel II.181 Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–182

Tabel II.182 Rasio Luas Wilayah Industri Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–183

Tabel II.183 Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–183

Tabel II.184 Rata-rata V/C Ratio Jalan di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–184

Tabel II.185 Derajat Kejenuhan Lalu Lintas (V/C Rasio) Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–184

Tabel II.186 Angka Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–186

Tabel II.187 Rata-rata Lama Genangan Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–186

Tabel II.188 Rata-rata Tinggi Genangan Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–187

Tabel II.189 Luas Wilayah Genangan di Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–187

Tabel II.190 Pemasangan Penerangan Jalan Umum
Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–188

Tabel II.191 Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–189

Tabel II.192 Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya
Tahun 2019 – 2023 ..... II–190

Tabel II.193 Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya
Tahun 2019 – 2023 ..... II–190

Tabel II.194 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Surabaya
Tahun 2019-2023 ..... II–191

Tabel II.195 Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi
yang Ditamatkan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–192

Tabel II.196 Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi
yang Ditamatkan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–192

Tabel II.197 Tingkat Pengganggguran Terbuka Kota Surabaya Menurut
Jenis Kelamin Tahun 2019 – 2023 ..... II–193

Tabel II.198 Tingkat Pengganggguran Terbuka Kota Surabaya Menurut
Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2019 – 2023 ..... II–193

Tabel II.199 Rasio Ketergantungan Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II) II–194

Tabel II.200 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Surabaya
Tahun 2023 ..... II–195

Tabel II.201 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai
Dengan Triwulan II Tahun 2024 Kota Surabaya II–200

Tabel III.1 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya Tahun
2019 s/d Tahun 2023* (dalam juta) III-5

Tabel III.2 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya Tahun 2019 s/d Tahun 2023*..... III-8

Tabel III.3 Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019 s/d Tahun 2023* (dalam persen)..... III-10

Tabel III.4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2019 - 2023*..... III-11

Tabel III.5 Realisasi Nilai Investasi Kota Surabaya Tahun 2019 –Tahun 2023..... III-17

Tabel III.6 Ekspor Impor Non Migas Kota Surabaya Tahun 2012 – 2022 .... III-18

Tabel III.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... III-20

Tabel III.8 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2021 s.d Tahun 2025..... III-35

Tabel III.9 Realisasi dan Target/Proyeksi Belanja Kota Surabaya Tahun 2022 s.d Tahun 2025..... III-45

Tabel III.10 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 s.d Tahun 2025 ..... III-47

Tabel IV.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 3

Tabel IV.2 Keterkaitan Isu Strategis Kota Surabaya dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur 22

Tabel IV.3 Keselarasan Indikator Makro Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2024..... 23

Tabel IV.4 Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2024 yang Mendukung Prioritas Pembangunan..... 25

Tabel IV.5 Tindak Lanjut Dukungan Pemerintah Daerah Atas Kebijakan Prioritas Nasional Tahun 2024..... 558

Tabel IV.6 Keterkaitan Program Pembangunan Nasional dengan RKPD Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024..... 604

Tabel IV.7 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024 698

Tabel IV.8 Perubahan Target Sasaran PD Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 700

Tabel IV.9 Perubahan Target Kegiatan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 701

Tabel IV.10 Perubahan Target Sub Kegiatan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 705

Tabel IV.11 Indikator SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 732

Tabel IV.12 Alokasi Anggaran Pendukung Pencapaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2024 732

Tabel IV.13 Indikator SPM Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 736

Tabel IV.14 Alokasi Anggaran Pendukung Pencapaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2024 737

Tabel IV.15 Indikator SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 739

Tabel IV.16 Alokasi Anggaran Pendukung Pencapaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2024 739

Tabel IV.17 Indikator SPM Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 740

Tabel IV.18 Alokasi Anggaran Pendukung Pencapaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 741

Tabel IV.19 Indikator SPM Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 743

Tabel IV.20 Alokasi Anggaran Pendukung Pencapaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 743

Tabel IV.21 Indikator SPM Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 747

Tabel IV.22 Alokasi Anggaran Pendukung Pencapaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2024..... 748

Tabel V.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024 ..... V-2

Tabel V.2 Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024 ..... V-210

Tabel V.3 Hubungan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran V-878

Tabel V.4 Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Kota Surabaya Tahun 2024..... V-885

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Alur Penyusunan RKPD I–14
Gambar II.1 Grafik Curah Hujan dan Kelembaban Udara Kota Surabaya II–2
Gambar II.2 Peta Penggunaan Lahan Kota Surabaya II–11
Gambar II.3 Peta Kawasan Strategis Kota Surabaya..... II–12
Gambar II.4 Kondisi Instrusi Air Laut di Kawasan Mangrove Pamurbaya II–16
Gambar II.5 Peta Sesar Kendeng II–18
Gambar II.6 Peta Rawan Genangan Banjir Rob Wilayah Surabaya Utara..... II–19
Gambar II.7 Peta Kawasan Genangan Di Kota Surabaya..... II–19
Gambar II.8 Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran di Kota Surabaya .. II–20
Gambar II.9 Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia..... II–24
Gambar II.10 Inflasi Kota Surabaya (*year-to-date*) Tahun 2020 – 2024 (TW II)..... II–36
Gambar II.11 Prevalensi Balita Stunting Tahun 2020 – 2024 (TW II)..... II–50
Gambar II.12 Perkembangan Indeks Budaya Lokal Tahun 2019–2022..... II–53
Gambar II.13 Persentase Rumah Sehat Kota Surabaya 2024 (TW II)..... II–85
Gambar II.14 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi per Kecamatan Tahun 2024 (TW II)..... II–87
Gambar II.15 Jumlah Puskesmas Berdasarkan Status Akreditasi Tahun 2024 (TW II)..... II–91
Gambar II.16 Persentase Atlet Berprestasi II–150
Gambar II.17 Nilai Terhadap Pelayanan dan Kemampuan Petugas TBM/Perpusatakaan dalam Membimbing Bibit Penulis dan Pendongeng II–158
Gambar II.18 Perangkat *Smart Water Level* II–187
Gambar III.1 Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018 – 2022 (persen) ..... III - 10
Gambar IV.1 Visi, Misi, Arahan dan Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024..... IV - 6
Gambar IV.2 Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur ..... IV - 14

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 59 Tahun 2024
TANGGAL : 11 Juli 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 mempedomani pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan tahapan :

a. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD;
b. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD; dan
c. Penetapan.

Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024, selain berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Berdasarkan pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, Perubahan RKPD dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan
b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan;

   yang menimbulkan penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD tahun 2024.

Muatan dalam dokumen Perubahan RKPD merupakan penjabaran secara operasional per tahun dari dokumen RPJMD, yang juga memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, dan juga berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Tahun 2024 merupakan tahun percepatan untuk pemulihan terhadap dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sejak semester pertama tahun 2020. Setelah pertumbuhan ekonomi terkontraksi pada -4,85% di tahun 2020, selaras dengan

penanganan pandemi Covid-19 baik melalui upaya kuratif maupun pencegahan penularan melalui pembatasan dan vaksinasi yang masif, pemulihan ekonomi terus dilakukan. Upaya tersebut membawa dampak positif dengan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik hingga pada tahun 2021 tumbuh pada angka 4,29% dan pada tahun 2022 tumbuh 6,51%. Tahun 2023, walaupun mengalami perlambatan namun perekonomian di Kota Surabaya terus tumbuh 5,7%. Kondisi perekonomian terus bertumbuh sesuai dengan prediksi dalam penyusunan RPJMD Kota Surabaya tahun 2021-2026 bahwa perekonomian akan terus pulih pada tahun 2024, membawa pada proyeksi positif di tahun 2024 sehingga pemulihan ekonomi yang telah menjadi tema dan prioritas sejak tahun 2021 hingga 2023 dapat diperkuat dengan dukungan peningkatan kualitas tata Kota, sistem transportasi terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya tahun 2021-2026. Di sisi lain, persentase kemiskinan yang meningkat selama terjadinya pandemi Covid-19 terus membaik menjadi 4,65% di tahun 2023 terus membaik dibandingkan tahun 2022 yang berada pada angka 4,72% namun belum sepenuhnya pulih seperti sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dimana pada tahun 2019 berada pada angka 4,52%. Demikian pula pada tingkat pengangguran terbuka yang terus menunjukkan kinerja membaik di tahun 2023 menjadi 6,76% dibandingkan tahun 2022 sebesar 7,62% namun belum kembali pulih pada sebelum terjadinya pandemi di tahun 2019 sebesar 5,47%. Oleh sebab itu pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tetap harus dilakukan di tahun 2024. Terjadinya pandemic Covid-19 yang disikapi dengan pembelajaran jarak jauh telah meningkatkan risiko terjadnya *learning loss* pada siswa yakni berkurangnya pengetahuan dan keterampilan secara akademis, hal ini sejalan dengan data Indeks Pembangunan Manusia di Kota Surabaya yang sejak tahun 2020 bertumbuh dengan lambat. Berdasarkan pertimbangan atas kondisi di Kota Surabaya tersebut, maka pada tahun 2024 penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya diarahkan untuk mencapai tema pembangunan tahun 2024 yakni "***Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dengan Dukungan Kualitas Tata Kota, Sistem Transportasi Terpadu dan Berkelanjutan serta Peningkatan Sumber Daya Manusia".***

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Neara Republik Indoensia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1516);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
25. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
27. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
31. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);
32. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

36. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan

Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

45. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender DaIlam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
48. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
51. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
52. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
53. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

54. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
55. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
56. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
57. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 39 Seri E);
58. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
59. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2024)
60. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 20 Seri E);
61. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);

62. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);
63. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
64. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4);
65. Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembara Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 8);
66. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 42);
67. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 69);
68. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 135 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan

Walikota Surabaya Nomor 135 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 51).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen Perubahan RKPD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025, RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021- 2026, dan RKPD Provinsi Jawa Timur. RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, serta atas-bawah dan bawah-atas. RKPD menjadi pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD kota serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Secara substansial, Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah pada tahun 2024.

Adapun gambaran tentang hubungan antara RKPD Kota Surabaya dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.

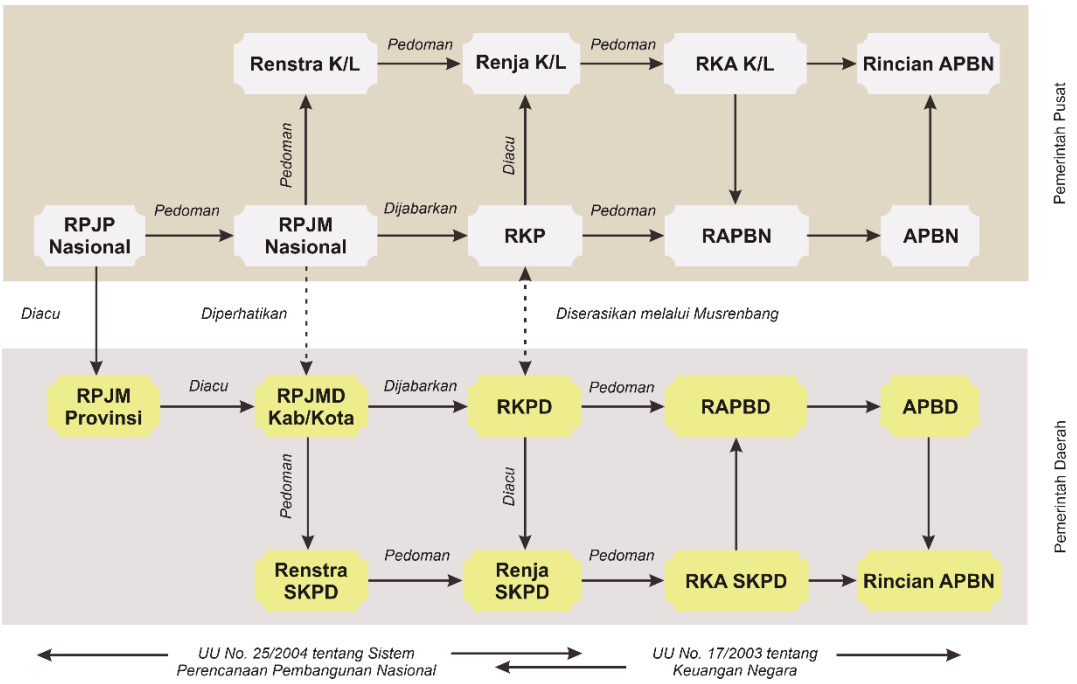

Gambar I.1
Alur Penyusunan RKPD

Sumber : UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 17 tentang Keuangan Negara

Perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah berpedoman Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, RPJPD, Perubahan RPJMD Provinsi Tahun 2019-2024, program prioritas nasional dalam RKP 2024, hasil evaluasi capaian kinerja RKPD sampai dengan triwulan 2

Tahun 2024, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan 2 Tahun 2024, visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran.

Muatan dalam dokumen RKPD merupakan penjabaran secara operasional per tahun dari dokumen RPJMD, yang juga memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, dan juga berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2024 adalah untuk:

1. Menjaga konsistensi antara substansi rencana jangka panjang, substansi rencana jangka menengah dengan substansi rencana jangka pendek;
2. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi serta urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
3. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagai penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional;
4. Memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2024;

5. Penyesuaian perubahan prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD dengan perkembangan kondisi saat ini;
6. Menjadi dasar penggunaan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Nomor : 84/S-HP/XVIII.SBY/05/2024 tanggal 2 Mei 2024, untuk pendanaan kegiatan tahun 2024;
7. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024;
8. Menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran SementaraTahun 2024.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 disusun dengan sistematika yang disesuaikan dengan Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan RKPD, latar belakang penyusunan Perubahan RKPD serta proses penyusunan Perubahan RKPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional, provinsi maupun kota.

1.3 Hubungan antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/Program Strategis Nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/Kota.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan secara ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen Perubahan RKPD dan sasaran penyusunan dokumen Perubahan RKPD.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2024

Evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan II menguraikan hasil evaluasi RKPD Tahun 2024 Triwulan II, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dan dokumen RKPD Tahun 2024 sebagai bahan acuan.

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Menjelaskan mengenai kondisi geografi daerah, kondisi demografi, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap

perumusan ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Menjelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Menjelaskan telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan Nasional/Provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah.

III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi permasalahan ditingkat Daerah dan Nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD Kota Surabaya pada tahun 2024, dengan memperhatikan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 dan RPJMN 2020-2024, mempertimbangkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil. Penentuan prioritas tersebut dilakukan melalui sinkronisasi keselarasan tema dan prioritas pada RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur, dengan tema dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah pada tahun rencana. Pada Perubahan RKPD juga didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Selain itu, dijabarkan juga kebijakan dan inovasi yang akan dilakukan untuk mendukung prioritas tersebut, sasaran pembangunan, serta inovasi unggulan.

V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

VI. PENUTUP.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2024

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur yang terletak antara 07°9' s.d. 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' s.d. 112°54' Bujur Timur.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau bahwa luas wilayah Kota Surabaya seluas 335,925 km^2. Batas wilayah Kota Surabaya yaitu batas sebelah utara adalah Laut Jawa dan Selat Madura, batas sebelah selatan merupakan Kabupaten Sidoarjo, batas sebelah barat merupakan Kabupaten Gresik, serta batas sebelah timur adalah Selat Madura.

Secara topografi, sebagian besar wilayah Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian tanah antara 0-20 meter di atas permukaan laut, sedangkan pada daerah pantai ketinggiannya berkisar antara 1-3 meter di atas permukaan laut. Wilayah barat Kota Surabaya memiliki kemiringan sebesar 12,77 persen dan sebelah selatan sebesar 6,52 persen. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 persen.

Jenis batuan yang ada terdiri dari 4 jenis yang pada dasarnya merupakan tanah liat atau unit-unit pasir. Sedangkan jenis tanah, sebagian besar berupa tanah alluvial, selebihnya tanah dengan kadar kapur yang tinggi (daerah perbukitan). Sebagaimana daerah tropis lainnya, Surabaya mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Di tahun 2023, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari, yakni sebesar 487,1 milimeter dengan temperatur berkisar antara 20°C hingga 36°C, dan kelembapan udara juga mencapai puncak tertingginya di tahun itu, yakni pada 83,2 persen. Sedangkan untuk data tahun 2024, masih harus menunggu rilis BPS untuk Surabaya Dalam Angka Tahun 2025. Gambar II.1 menunjukkan grafik hubungan curah hujan dengan kelembapan udara di Kota Surabaya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

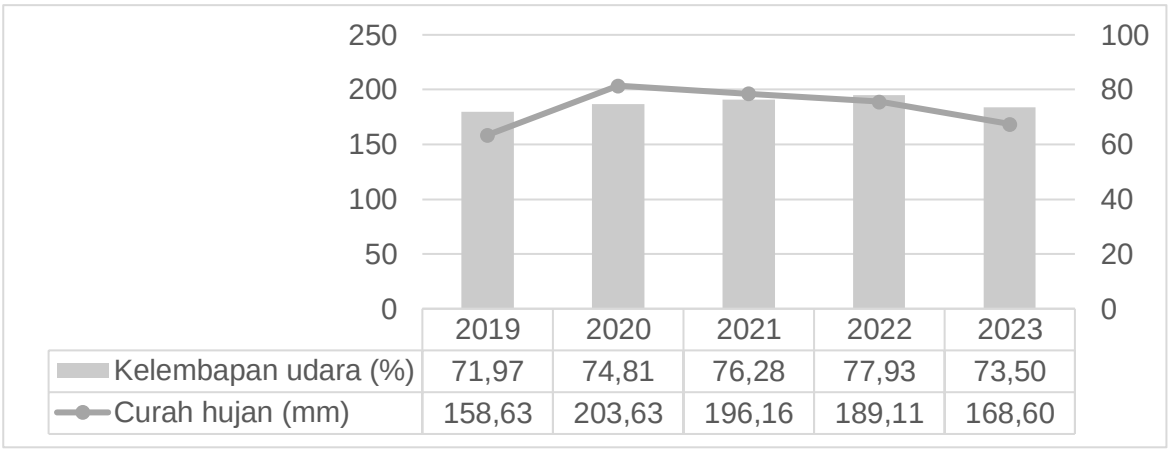

	2019	2020	2021	2022	2023
Kelembapan udara (%)	71,97	74,81	76,28	77,93	73,50
Curah hujan (mm)	158,63	203,63	196,16	189,11	168,60

Gambar II.1 Grafik Curah Hujan dan Kelembaban Udara Kota Surabaya

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2024

Berdasarkan pencatatan data kelembaban udara di Kota Surabaya tersebut serta rata-rata tingkat kelembaban udara keseluruhan setiap bulannya dalam kurun waktu tahun 2019-2023 menunjukkan nilai yang tidak jauh berbeda. Tinggi rendahnya kelembaban udara sangat bergantung pada beberapa faktor, yaitu suhu, tekanan udara, pergerakan angin, kuantitas dan kualitas penyinaran dan vegetasi. Rata-rata kelembaban tertinggi berada pada angka 77,93 persen dan kelembaban terendah berada pada 71,97 persen.

Secara geografis, Kota Surabaya terletak di hilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, yaitu Kali Surabaya, Kali Mas, Kali Jagir, dan Kali Lamong. Sebagai daerah hilir, Kota Surabaya sehingga dengan sendirinya Kota Surabaya merupakan daerah limpahan debit air dari sungai yang melintas sehingga rawan banjir pada musim penghujan. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, terjadi penurunan debit air di Kali Surabaya yang disebabkan oleh mundurnya musim hujan, dari bulan November 2023 ke Januari 2024, dan bergesernya titik hujan dengan intensitas tinggi, dari hulu ke hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas. Kondisi ini menyebabkan debit air di Kali Surabaya menjadi sangat kecil yang berdampak pada tingginya kandungan zat pencemar dalam air baku seperti nitrit, amonia, dan bahan organik. Untuk mengatasi hal ini, PDAM Surya Sembada melakukan berbagai upaya, antara lain meningkatkan dosis disinfektan (hingga empat kali lipat), menambahkan absorben, menggunakan koagulan baru, memodifikasi sistem, serta mengoptimalkan proses produksi dan distribusi. Selain itu, Perum Jasa Tirta (PJT) I membantu dengan mengatur aliran air dan menggunakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau hujan buatan untuk menambah debit pada bendungan tahunan di hulu DAS Brantas.

Sebagai upaya mengatasi potensi banjir, Kota Surabaya memiliki sistem drainase yang terintegrasi dan dirancang untuk mengelola limpasan air hujan secara efektif. Sistem drainase ini mencakup saluran primer, sekunder, dan tersier yang membagi Kota Surabaya menjadi 30 sistem drainase dengan *catchment area* seluas 31.881,1 Ha. Saluran primer berfungsi mengalirkan air dari daerah tangkapan besar ke sungai-sungai utama, sementara saluran sekunder dan tersier berfungsi mengalirkan air dari lingkungan permukiman dan jalan-jalan. Upaya pembangunan dan pemeliharaan rutin terhadap sistem drainase ini terus dilakukan untuk memastikan efektivitasnya dalam mencegah banjir dan mengurangi dampak genangan air di berbagai wilayah.

Tabel II.1
Sistem Drainase di Kota Surabaya

No.	Nama Sistem Drainase	Luas Sistem (m^2)	Saluran Primer	Saluran Sekunder
1	Saluran Perbatasan	10.166.967	Saluran Perbatasan	Saluran Dukuh Menanggal
				Saluran Menanggal Indah
				Saluran Cabang Menanggal Indah
				Saluran Tengah A. Yani Selatan
				Saluran Siwalankerto Permai
				Saluran Siwalankerto Selatan
				Saluran Cabang Siwalankerto
				Saluran Siwalankerto
				Saluran Kutisari Indah
				Saluran Rungkut Industri Selatan
				Saluran Rungkut Barat
				Saluran Rungkut Industri II
				Saluran Cabang Rungkut Industri II
				Saluran Tengah MERR
				Saluran Rungkut Barata
				Saluran Rungkut Menanggal
				Saluran Cabang Amir Mahmud
				Saluran BP2IP
2	Kebon Agung	16.795.892	Saluran Kebon Agung	Saluran Kebon Agung
				Saluran Gayungan Peternakan I
				Saluran Gayungan Peternakan II
				Saluran Gayung Kebonsari
				Saluran Gayungsari
				Saluran Jemur Andayani
				Saluran Kutisari XII
				Saluran Kutisari IV
				Saluran Kutisari Utara I
				Saluran Gunung Anyar
				Saluran Gunung Anyar Jaya
				Saluran Rungkut Kidul
				Saluran Rungkut Harapan
				Saluran Medokan Asri

No.	Nama Sistem Drainase	Luas Sistem (m^2)	Saluran Primer	Saluran Sekunder
				Saluran Wiguna Timur
				Saluran Medayu Selatan
				Saluran Gunung Anyar Mas
3	Kali Sumo	3.834.787	Saluran Kali Sumo	Saluran Ngagel Jaya Tengah Barat
				Saluran Ngagel Jaya Tengah Timur
				Saluran Ngagel Jaya Selatan Barat
				Saluran Ngagel Jaya Selatan Timur
				Saluran Bratang Perintis VI
4	Avoor Wonorejo	19.539.892	Saluran Avoor Wonorejo	Saluran Jambangan
				Saluran Bibis Karah
				Saluran Karah Agung
				Saluran Ketintang Selatan
				Saluran Prof Supomo
				Saluran Ketintang Wiyata
				Saluran Ketintang
				Saluran Jemur Gayungan
				Saluran Tengah A. Yani Utara
				Saluran Wonokromo
				Saluran Cabang Wonokromo
				Saluran Wonocolo
				Saluran Raya Panjang Jiwo
				Saluran Kalirejo
				Saluran Tenggilis Kauman
				Saluran Rungkut
				Saluran Sidosermo
				Saluran Sidosermo Indah
				Saluran Drasimo
				Saluran Panjang Jiwo
				Saluran Rungkut Waru
				Saluran Cabang Rungkut Waru
				Saluran Kedung Asem
				Saluran Nirwana
				Saluran Penjaringan Timur
				Saluran Kendal Sari
				Saluran Nirwana Eksekutif
				Saluran Wonorejo Permai
				Saluran Wonorejo Permai Utara VIII
				Saluran Rungkut Jaya
				Saluran Wonorejo Rungkut I
5	Jagir Kalimir	2.701.859	Saluran Jagir Kalimir	Saluran Karang Rejo
				Saluran Bendul Merisi
6	Rungkut	7.789.178	Saluran Rungkut	Saluran Rungkut Asri
				Saluran Rungkut Asri Utara
				Saluran Rungkut Medokan
				Saluran Medokan Timur
				Saluran Medokan Asri
				Saluran Medokan Asri Selatan
7	Medokan	19.504.694	Saluran Medokan	Saluran Manyar Indah

No.	Nama Sistem Drainase	Luas Sistem (m^2)	Saluran Primer	Saluran Sekunder
	Semampir		Semampir	Saluran Wisma Mukti
				Saluran Klampis Indah 4
				Saluran Semolo Waru Utara
				Saluran Semolo Waru
				Saluran Araya Barat
				Saluran Araya Timur
				Saluran Suko Semolo
				Saluran Semolo Waru Bahari
				Saluran Araya Selatan
				Saluran Semampir Tengah
				Saluran Semolo Waru Timur
				Saluran Nginden Jangkungan
				Saluran Brimob
				Saluran Medokan Semampir Baru
				Saluran Medokan Semampir Baru I
				Saluran Medokan Semampir Tengah
				Saluran Keputih Tegal
8	Kalidami	15.111.012	Saluran Kalidami	Saluran Pucang Anom timur
				Saluran Pucang Adi
				Saluran Kertajaya X
				Saluran Srikana
				Saluran Karang Menjangan
				Saluran Dharmahusada Indah
				Saluran Wisma Permai II
				Saluran Mleto
				Saluran Raya ITS / Sawahan
				Saluran ITS Barat
				Saluran Bhaskara
9	Kalibokor	11.363.661	Saluran Kalibokor	Saluran Manyar Tirtosari
				Saluran Manyar Tirtomoyo
				Saluran Manyar Tirtoyoso
				Saluran Klampis Ngasem
				Saluran UPB
				Saluran ITS Tengah
				Saluran ITS selatan
				Saluran Laguna Utara
				Saluran Keputih Barat
				Saluran Keputih Tengah
				Saluran Keputih Timur
				Saluran Marina Barat
				Saluran Marina Tengah
				Saluran Marina Timur
				Saluran Laguna Selatan
10	Jeblokan	6.985.578	Saluran Jeblokan	Saluran Jolotundo
				Saluran Gersikan
				Saluran Rangkah
11	Pegirian	9.847.074	Saluran Pegirian	Saluran Bulak Banteng
				Saluran Bulak Banteng Tengah

No.	Nama Sistem Drainase	Luas Sistem (m^2)	Saluran Primer	Saluran Sekunder
				Saluran Sidotopo Lor
				Saluran Tenggumung Karya
				Saluran Wonosari Lor
				Saluran Simolawang
				Saluran Simokerto/Donokerto
				Saluran Sawah Pulo
				Saluran Wonosari Wetan
				Saluran Gembong III
				Saluran Gembong
				Saluran Kemuning
				Saluran Kalisari THR
				Saluran Kalisari Timur
				Saluran Jatisrono
				Saluran Mrutu - Kalianyar
12	Kenjeran	4.975.012	Saluran Kenjeran - Larangan	Saluran Kenjeran Utara I
				Saluran Lebak Arum
				Saluran Karang Empat
				Saluran Kalijudan
13	Tambak Wedi	7.223.897	Saluran Tambak Wedi	Saluran Bandar Rejo
				Saluran Tambak Wedi Utara
				Saluran Bulak Banteng Timur
				Saluran Tambak Wedi Barat
				Saluran Bulak Banteng Tengah Selatan
				Saluran Randu Barat
				Saluran Randu Timur
				Saluran Tanah Merah
				Saluran Kapas Madya Timur
				Saluran Kapas Madya
				Saluran Tambak Sari
14	Kali Kepiting (Kalisari)	7.400.810	Saluran Kalisari	Saluran Pacar Kembang
				Saluran Mulyorejo
				Saluran Sutorejo
				Saluran Prima
				Saluran Babatan Pantai
				Saluran Kenjeran Lama
				Saluran Mulyosari
15	Lebak Indah	5.131.741	Saluran Lebak Indah	Saluran Gading
				Saluran Lebak Jaya Utara
				Saluran Kenjeran
				Saluran Larangan Barat
				Saluran Komplek Kenjeran
				Saluran Pantai Ria
				Saluran Kyai Tambak Deres
				Saluran Bulak Setro
				Saluran Cumpat Kulon
16	Greges	14.608.194	Saluran Greges	Saluran Surabayan
				Saluran Tempel Sukorejo
				Saluran Kedung Anyar Wetan

No.	Nama Sistem Drainase	Luas Sistem (m^2)	Saluran Primer	Saluran Sekunder
				Saluran Kedung Anyar
				Saluran Margorukun
				Saluran Genie Pelajar
				Saluran Petemon V
				Saluran Petemon Sidomulya
				Saluran Petemon Kali
				Saluran Pacuan Kuda
				Saluran Asem Bagus
				Saluran Kedung Doro
				Saluran Tembok Gede
				Saluran Semarang
				Saluran Pasar Turi
				Saluran Dupak Timur
				Saluran Dupak
				Saluran Rembang
				Saluran Krembangan Baru
				Saluran Indrapura I
				Saluran Jepara
				Saluran Pesapen Kali
				Saluran Pesapen Selatan
				Saluran Moro Krembangan
				Saluran Ikan Mungsing
				Saluran Ikan Mungsing Selatan
				Saluran Johar
				Saluran Indrapura II
				Saluran Pasar Loak
				Saluran Asem Mulya
				Saluran Simo
17	Darmokali	2.754.455	Saluran Darmokali	Saluran Ciliwung
				Saluran Gajah Mada
				Saluran Hayam Wuruk
				Saluran Perwira
				Saluran Brawijaya
18	Dinoyo	2.612.612	Saluran Kupang	Saluran Dr Wahidin
				Saluran Dinoyo
				Saluran Ir Anwari
				Saluran Sriwijaya
				Saluran Kartini
				Saluran Kupang Panjaan
				Saluran Jenggolo
				Saluran Sambas-Untung Suropati
				Saluran Keputran
19	Kayun	1.550.764	-	Saluran Embong Sawo Barat
				Saluran Grahadi
				Saluran RRI
				Saluran Embong Ploso Barat
				Saluran Embong Tanjung Timur
				Saluran Kenongo Timur

No.	Nama Sistem Drainase	Luas Sistem (m^2)	Saluran Primer	Saluran Sekunder
				Saluran Embong Malang sisi Utara
				Saluran Embong Malang sisi Selatan
20	Balong	7.683.763	Saluran Kali Balong	Saluran Tengah Margomulyo
				Saluran Margomulyo Gendong
21	Kalianak	2.377.255	Saluran Kalianak	Saluran Kalianak Timur
22	Krembangan	10.292.349	Saluran Kali Krembangan	Saluran Tanjungsari
				Saluran Suko Manunggal Utara
				Saluran Tambak Mayor
				Saluran Tambak Mayor PJKA
23	Diversi Gunungsari	44.145.581	Saluran Diversi Gunungsari	Saluran Putat Jaya
				Saluran Simo Gunung
				Saluran Simo Mulyo Barat
				Saluran Simo Pomahan
				Saluran Kupang Jaya
				Saluran Darmo Satelit
				Saluran Darmo Harapan
				Saluran Darmo Indah
				Saluran Karangpoh
				Saluran Tubanan
				Saluran Balongsari
				Saluran Gadelsari
				Saluran Manukan Madya
				Saluran Manukan Kulon
				Saluran Manukan Kasman
				Saluran Manukan Mulyo
				Saluran Manukan Lor
				Saluran Sambikerep
				Saluran Sawo 1
				Saluran Sawo 2
				Saluran Made
				Saluran Citra Raya
				Saluran Sememi
				Saluran Kendung
				Saluran Babat Jerawat
				Saluran Mayjen Sungkono Utara
				Saluran Mayjen Sungkono Selatan
				Saluran Kencanasari
24	Kali Kandangan	8.391.999	Saluran Kali Kandangan	Saluran Grand Pakuwon Barat
25	Sememi	9.591.308	Saluran Sememi	Saluran Sememi Baru
				Saluran Babat Buran
26	Tambakdono	6.420.706	Saluran Tambakdono	Saluran Kauman
				Saluran Sumber Rejo 1
				Saluran Sukodono Tambakdono
27	Romo Kalisari	11.448.422	Saluran Romo Kalisari	Saluran Romo Kalisari
28	Sumberrejo	4.236.633	Saluran Sumberrejo	Saluran Beji

No.	Nama Sistem Drainase	Luas Sistem (m^2)	Saluran Primer	Saluran Sekunder
				Saluran Benowo
				Saluran Singgapur
				Saluran Sumber Rejo 2
				Saluran Jawu Kidul
29	Kalimakmur	38.088.100	Saluran Kalimakmur	Saluran Bukit Golf
				Saluran Jajar Tunggal
				Saluran Raya Menganti
				Saluran Kedurus Indah Tengah
				Saluran Kramat
				Saluran Bukit Golf Graha Family
				Saluran Wiyung/Kali Kendal
				Saluran Babatan Indah
				Saluran Babatan
				Saluran Babatan Mukti
				Saluran Lidah Harapan
				Saluran Lidah Wetan
				Saluran Lidah Kulon
				Saluran Raya Pakuwon
				Saluran Pakuwon
				Saluran Perum Lidah Kulon
				Saluran Banjar Mlati
				Saluran Banjar Mlati Tengah
				Saluran Banjar Mlati Barat
				Saluran Raya Lakarsantri
				Saluran Lakarsantri
				Saluran Bangkingan
				Saluran Pondok Manggala
				Saluran Pondok Maritim
				Saluran Pondok Bogangan
				Saluran Kebraon Manis Barat
				Saluran Kebraon Manis Selatan
				Saluran Kebraon Utara
				Saluran Kebraon Selatan
				Saluran Kemlaten Baru
				Saluran Kemlaten
				Saluran Pesapen
				Saluran Sumur Welut
				Saluran Pondok Maritim Indah Barat
30	Karangpilang	6.236.895	-	Saluran Ksatria
				Saluran Karangpilang Barat
				Saluran Karangpilang Bromo
				Saluran Karangpilang Bagong
				Saluran Karangpilang Pdam
				Saluran Warugunung Suparma
				Saluran Warugunung Makam
				Saluran Warugunung Perbatasan

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2024

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, serta Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggabungan Kelurahan Perak Utara Dan Kelurahan Perak Timur Pada Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, bahwa wilayah Kota Surabaya terbagi menjadi 31 kecamatan, 153 kelurahan, 1.360 rukun warga (RW) dan 9.149 rukun tetangga (RT). Kota Surabaya adalah kota metropolitan yang secara pola ruang perkembangannya terbagi menjadi:

1. Area permukiman vertikal baik berupa rumah susun (sederhana) maupun apartemen atau kondominium tersebar di hampir seluruh penjuru Kota Surabaya, sedangkan area permukiman diarahkan berkembang ke arah barat, timur dan selatan kota.
2. Area untuk kegiatan jasa dan perdagangan yang dipusatkan di kawasan pusat kota dan pusat-pusat sub kota dan unit pengembangan serta di kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan strategis ekonomi antara lain di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan kawasan Teluk Lamong;
3. Area untuk kegiatan industri dan pergudangan terkonsentrasi di kawasan pesisir utara di kawasan sekitar Pelabuhan Tanjung Perak dan Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong, dan kawasan selatan kota yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gresik dan Sidoarjo;
4. Wilayah pesisir khususnya ruang darat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi antara lain permukiman nelayan, tambak garam dan ikan, pergudangan, militer, industri kapal, pelabuhan, wisata pesisir sampai dengan fungsi kawasan lindung di Pantai Timur Surabaya serta terdapat aksesibilitas berupa jalan dan jembatan yang menghubungkan Kota Surabaya dan Pulau Madura (Jembatan Suramadu) dan Jembatan Suroboyo yang membuka akses di kawasan sisi timur laut Kota Surabaya;
5. Wilayah Ruang laut Surabaya selain dimanfaatkan untuk kegiatan pelayaran baik interinsulair maupun internasional, juga dikembangkan untuk kegiatan penangkapan ikan tradisional, wisata pantai di Kenjeran dan sekitarnya dan kawasan lindung laut di sekitar Pantai Timur Surabaya.

2.1.1.1 Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis pada skala nasional sebagai pusat pelayanan kegiatan Indonesia Timur, dan pada skala regional sebagai kota perdagangan dan jasa yang pada simpul transportasi (darat, udara dan laut) nasional dan internasional sehingga memberi peluang bagi Kota Surabaya untuk meningkatkan perannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Letak Kota Surabaya sangat strategis, menghubungkan antara Kota Surabaya dengan kota-kota di sekitarnya yaitu kota/kabupaten yang ada dalam Gerbangkertosusilo, sehingga sangat mendukung percepatan pembangunan di Kota Surabaya. Demikian juga sebaliknya, pertumbuhan Kota Surabaya juga berpengaruh pada perkembangan kota/kabupaten di sekitarnya, secara sektoral maupun keruangan.

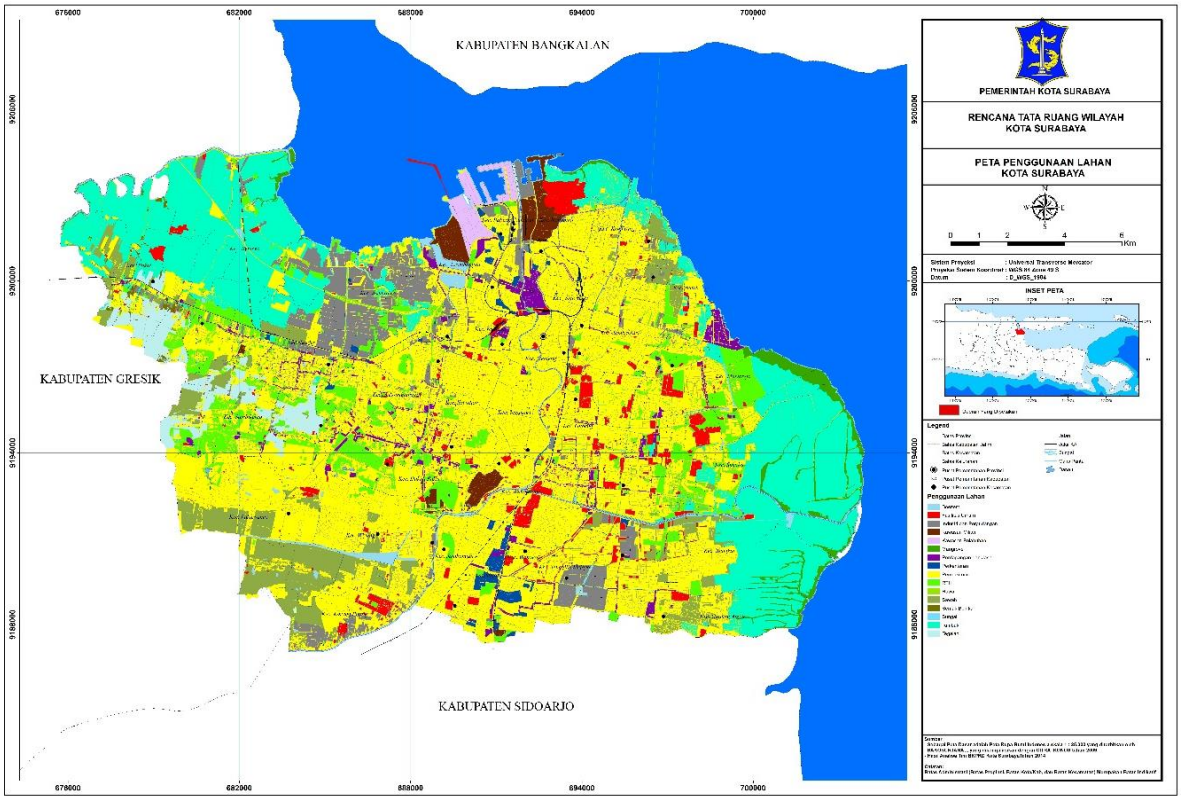

Gambar II.2 Peta Penggunaan Lahan Kota Surabaya

Berdasarkan peta penggunaan lahan di atas, permukiman menjadi yang terbesar, yakni sebanyak 48% atau 16.057 hektar. Kota Surabaya memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah kota di masa mendatang. Gambar II.2 menunjukkan Peta Kawasan Strategis Kota Surabaya.

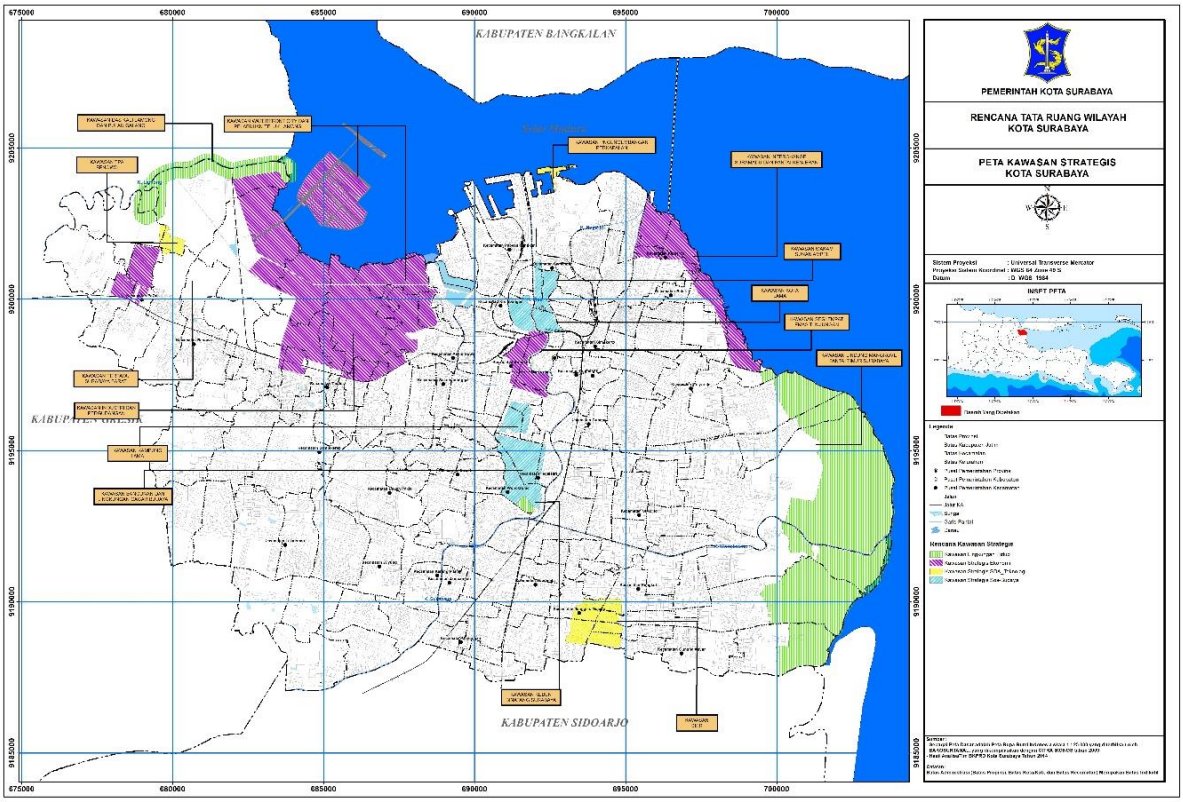

Gambar II.3 Peta Kawasan Strategis Kota Surabaya

Kota Surabaya memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah kota di masa mendatang, di antaranya adalah :

a) Kawasan Strategis untuk Pendukung Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan-kawasan yang akan dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah :

- Kawasan Pergudangan dan Industri Margomulyo di Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun. Ditinjau dari aksesibilitas karena letaknya berdekatan dengan pelabuhan Tanjung Perak dan Jalan Tol Sidoarjo–Surabaya–Gresik, Kawasan Industri dan Pergudangan Margomulyo merupakan kawasan strategis untuk dioptimalisasi dan dikembangkan dengan orientasi pada *industry smart and clean* dengan didukung oleh infrastruktur yang memadai.
- Kawasan Tunjungan dan sekitarnya di Kecamatan Bubutan berada di Unit Pengembangan VI Tunjungan. Sebagai kawasan pusat perdagangan dan perkantoran, kawasan Tunjungan merupakan salah satu pusat kota yang sangat potensial untuk terus dikembangkan karena memiliki sejarah dan mengalami masa keemasan pada dekade 1940 hingga akhir 1970-an dengan karakteristik *shopping-street* dan *shopping arcade*, sehingga dikenal

dan menjadi salah satu *icon* kota Surabaya dengan Jargon “Rek Ayo Rek Mlaku – Mlaku nang Tunjungan”. Kawasan ini memerlukan penanganan dan pengelolaan yang optimal untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya.

- Kawasan Kaki Jembatan Wilayah Suramadu-Pantai Kenjeran dan Kawasan Kota Tepi Pantai (*Waterfront City*) di Kecamatan Bulak berada di Unit Pengembangan III Tambak Wedi, merupakan kawasan strategis ditinjau dari lokasinya yang berada di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan pesisir Pantai Bulak - Kenjeran yang memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai wisata pesisir dan laut. Keberadaan Jembatan Suramadu dan Pantai Kenjeran diharapkan dapat memberikan peningkatan potensi dan peran Kota Surabaya, sebagai pusat kegiatan regional. Dengan adanya Sentra Ikan Bulak, kawasan ini, khususnya Kecamatan Bulak pada kategori Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menyumbang sebesar 33% dari total PDRB Kecamatan Bulak, diikuti kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor sebesar 26% dari total PDRB Kecamatan Bulak.
- Kawasan Kota Tepi Pantai (*Waterfront City*) di Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan strategis dengan konsep pengembangan penggunaan lahan *mixed-use* pendukung kawasan pelabuhan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong sebagai kawasan pelabuhan penunjang Pelabuhan Utama Tanjung Perak. Kawasan Terpadu Surabaya Barat di Kecamatan Pakal di Unit Pengembangan XII Sambikerep dan Benowo di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangon, merupakan kawasan terpadu yang pusatnya akan dikembangkan di Stadion Gelora Bung Tomo sebagai pusat olahraga berskala internasional dan akan terintegrasi dengan pengembangan fungsi perdagangan dan jasa di sekitarnya.

b) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan yang dikembangkan dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah kawasan adat tertentu, kawasan dan konservasi warisan budaya. Kawasan strategis sosial-budaya yang ada di Kota Surabaya adalah :

- Kawasan Makam Sunan Ampel di Kecamatan Semampir berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak, yang merupakan kawasan cagar budaya

dengan karakter dan daya tarik kuat sebagai obyek wisata ziarah di Indonesia yang berkembang tidak hanya sebagai kampung budaya yang khas dengan beragam aktivitasnya tetapi juga memiliki kultur religi yang kuat.

- Kawasan Kota Lama Surabaya di Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan Semampir dan Kecamatan Bubutan berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak dan Unit Pengembangan VI Tunjungan. Kawasan ini merupakan kawasan yang pada era kolonial terdelienasi sebagai kawasan eropa, kawasan arab dan kawasan cina.
- Bangunan dan lingkungan pada kawasan Darmo-Diponegoro serta kawasan kampung lama Tunjungan di Kecamatan Tegalsari berada di Unit Pengembangan VI Tunjungan yang merupakan kawasan bangunan dan lingkungan cagar budaya.

Tabel II.2
Persebaran Situs, Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya Tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Situs Cagar Budaya
1	Genteng	67
2	Krembangan	57
3	Pabean Cantian	28
4	Tegalsari	28
5	Wonokromo	27
6	Bubutan	25
7	Gubeng	11
8	Simokerto	9
9	Semampir	12
10	Sawahan	9
11	Tambaksari	7
12	Lakarsantri	2
13	Gayungan	1
14	Bulak	1
15	Dukuhpakis	1
16	Wonocolo	1
Jumlah		**286**

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2024

c) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Penyelamatan Lingkungan Hidup

Kawasan yang dikembangkan untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kota Surabaya adalah:

- Kawasan Kebun Binatang Surabaya (KBS) di Kecamatan Wonokromo berada di Unit Pengembangan VII Wonokromo, merupakan hutan kota di kawasan Wonokromo dengan luas lahan 15,3 Ha yang berfungsi sebagai

tempat perlindungan satwa, hutan kota dan rekreasi alam, juga berperan dalam mengatur iklim mikro di Kota Surabaya. Melihat nilai strategis sebagai kawasan wisata dalam kota, maka keberadaan KBS harus dipertahankan dan dijaga kelestariannya.

- Kawasan Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) di Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Mulyorejo, yang berada di Unit Pengembangan I Rungkut dan Unit Pengembangan II Kertajaya merupakan kawasan lindung alam berupa vegetasi mangrove yang berada di pesisir timur Kota Surabaya. Kawasan Mangrove Pamurbaya sangat berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan sebagai *barrier* alami dari proses abrasi dan intrusi air laut. Luasan kawasan tersebut ditampilkan pada Tabel II.2. Kondisi instrusi air laut di kawasan mangrove Pamurbaya dapat dilihat pada peta berikut ini.

Tabel II.3
Luasan Kawasan Strategis Lingkungan Hidup Tahun 2020 – 2024 (TW 2)

No	Jenis RTH	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kawasan lindung dan pesisir timur	4.570,33	4.570,33	4.570,33	4.600,33	4.600,33
2	Hutan kota	66,03	66,03	66,03	66,03	66,03
Total (Ha)		4.636,36	4.636,36	4.636,36	4.666,36	4.666,36

Sumber: Bappedalitbang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, diolah, 2024

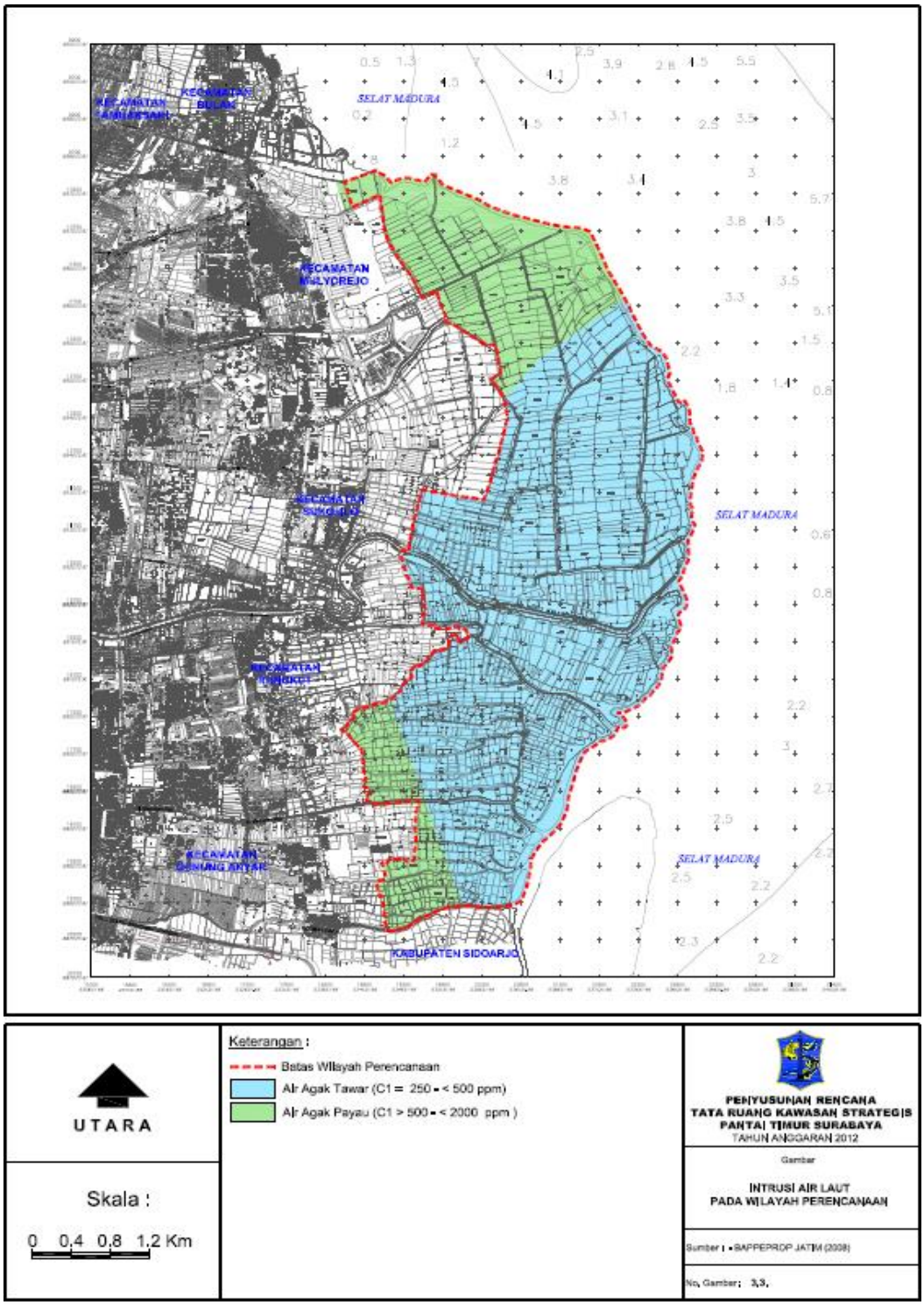

Gambar II.4 Kondisi Instrusi Air Laut di Kawasan Mangrove Pamurbaya

- Kawasan sekitar Kali Lamong di Kecamatan Benowo dan Kecamatan Pakal yang berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun dan Unit Pengembangan Sambikerep XII, merupakan kawasan perlindungan setempat/sempadan sungai yang dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), penyediaan vegetasi, dan pendukung utilitas kota. Luasan kawasan tersebut ditampilkan pada Tabel II.2.

d) Kawasan Strategis Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi

Kawasan strategis dari sudut kepentinganpendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) da-tau teknologi tinggi adalah penghasil SDA yang sangat potensial untuk kepentingan masyarakat beserta perangkat atau instalasi pengolahannya atau kawasan khusus untuk pengembangan teknologi untuk kepentingan strategis negara dan kepentingan umum. Kawasan strategis SDA dan Teknologi Tinggi di Kota Surabaya adalah:

- Kawasan Industri Pengembangan Perkapalan di Kecamatan Pabean Cantian berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak, merupakan salah satu kawasan yang digunakan dalam pengembangan teknologi perkapalan tingkat nasional. Sebagai industri perkapalan nasional, kawasan industri ini memiliki nilai strategis dan diperlukan upaya dalam menjaga dan meningkatkan nilai atau potensi kawasan tersebut.
- Kawasan industri/*industrial estate* di Kecamatan Rungkut berada di Unit Pengembangan I Rungkut, merupakan kawasan industri dan pergudangan yang telah lama berdiri di Kota Surabaya dan diarahkan menjadi kawasan industri dengan teknologi tinggi yang ramah lingkungan.
- Kawasan Depo dan Pengolahan BBM, berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak yang memiliki fungsi sebagai penyimpanan bahan bakar minyak dan pengelolaan BBM, sehingga kawasan ini memiliki nilai strategis dalam kaitannya dengan sistem energi di Kota Surabaya dan sekitarnya.
- Kawasan pengelolaan sampah teknologi tepat guna penghasil energi pada TPA Benowo di Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan yang digunakan untuk pemrosesan akhir sampah di Kota Surabaya dengan konsep: *"Waste to Energy".*

Selain potensi pengembangan kawasan strategis, perkembangan Kota Surabaya juga didukung oleh pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang meliputi:

1. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak untuk Terminal Peti Kemas/ Reklamasi di Teluk Lamong.
2. Pengembangan jaringan jalan arteri yang menghubungkan antar pusat utama kota dengan pusat kota di kabupaten yang berbatasan langsung.
3. Pengembangan jalur komuter/kereta api *double track* serta angkutan massal dan prasarana pendukungnya yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan kota.

2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Lokasi geografis Kota Surabaya tidak berhadapan langsung dengan samudera sehingga “relatif aman“ dari bencana alam laut seperti tsunami. Namun pada perkembangannya sesuai dengan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditemukan potensi sumber gempa tektonik terbaru dari pergerakan Sesar Kendeng dari Surabaya ke arah barat sampai Jawa Tengah yang sebelumnya tidak teridentifikasi sebagaimana pada Gambar II.5.

Gambar II.5
Peta Sesar Kendeng
Sumber: (http://www.pu.go.id/main/view_pdf/11270)

Di samping itu Kota Surabaya diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan genangan air dari limpahan debit air sungai dan saluran pada musim penghujan serta banjir rob khususnya wilayah pesisir pantai Surabaya utara. Kawasan rawan genangan dan banjir rob di Kota Surabaya seperti dalam gambar peta sebagai berikut.

Gambar II.6 Peta Rawan Genangan Banjir Rob Wilayah Surabaya Utara

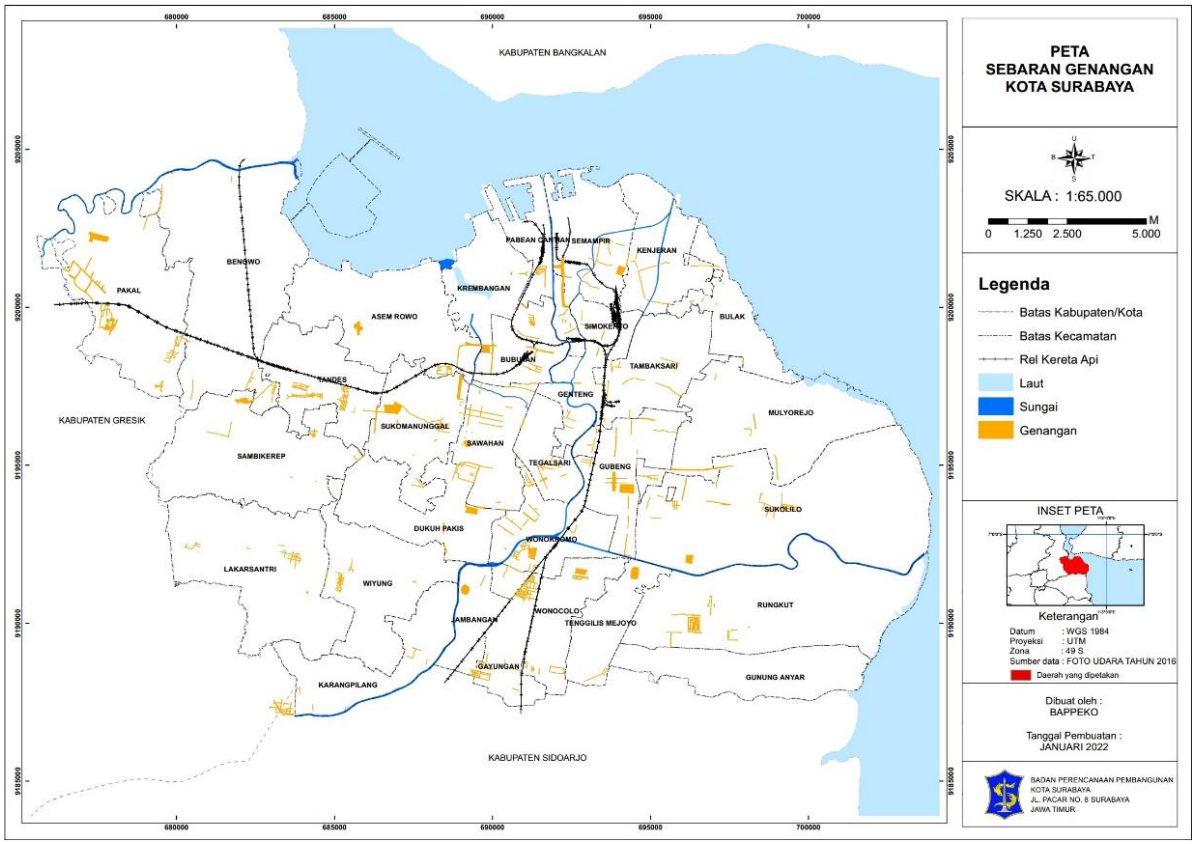

Gambar II.7 Peta Kawasan Genangan Di Kota Surabaya

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2022

Jenis bencana lainnya adalah kebakaran. Kejadian kebakaran adalah jenis bencana yang tidak dapat diprediksi akan tetapi dapat dicegah. Penentuan daerah rawan kebakaran di Kota Surabaya didasarkan atas kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, data kejadian kebakaran, kondisi bangunan dan proporsi kegiatan terbangun dengan luas lahan. Berdasarkan klasifikasi kerawanan, maka

kriteria yang dimaksud antara lain Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Kawasan rawan bencana kebakaran tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

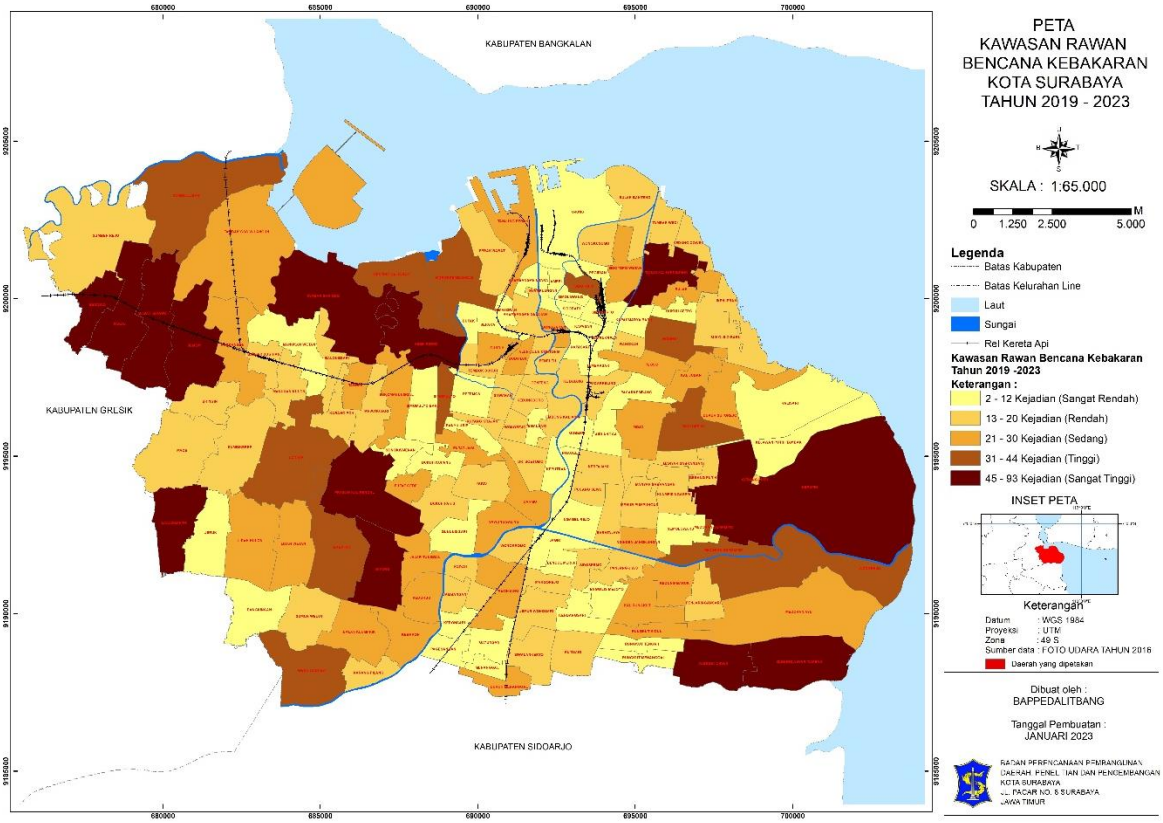

Gambar II.8 Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran di Kota Surabaya

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2024

Dalam rangka mengantisipasi kejadian bencana di kota Surabaya diperlukan antisipasi dini dan kesiapsiagaan komponen masyarakat dan pemerintah agar sejalan dengan semangat untuk memberikan perlindungan dan rasa aman yang layak dan bermartabat kepada masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan beberapa strategi dalam pengendalian, pengurangan, serta penanggulangan bencana kebakaran. Salah satu strategi efektif yang dilakukan dalam pengendalian dan pencegahan risiko bencana kebakaran adalah dengan memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat. Selain itu, dalam rangka mengurangi kejadian bencana kebakaran pada bangunan gedung, perlu dilakukan proteksi terhadap bangunan gedung terutama pada wilayah dengan intensitas pemanfaatan bangunan yang cukup tinggi. Untuk itu, upaya aktif yang dilakukan adalah dengan melakukan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran pada bangunan gedung, baik milik

swasta maupun milik Pemerintah Kota Surabaya. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah kejadian bencana di Kota Surabaya.

Tabel II.4
Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Banjir/ Pasang Air Laut	0	0	0	0	0
2	Angin Puting Beliung	2	4	0	0	0
3	Kebakaran	608	705	589	771	112
4	Gempa Bumi	0	0	0	0	0
5	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	0	0	0	0	0
6	Cuaca Ekstrim	0	0	0	0	0
7	Kekeringan	0	0	0	0	0
8	Tsunami	0	0	0	0	0
9	Epidemi dan Wabah Penyakit	0	0	0	0	0
10	Likuifaksi	0	0	0	0	0
11	Kegagalan Teknologi	0	0	0	0	0
Total		**610**	**709**	**589**	**771**	**112**

Sumber: BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa bencana gempa bumi, gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ekstrim, kekeringan, tsunami, epidemi dan wabah penyakit, likuifaksi, serta kegagalan teknologi sepanjang tahun 2020-2024 Triwulan II belum pernah terjadi di Kota Surabaya.

Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 2019 telah membentuk 154 kelurahan tangguh bencana. Ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam di Kota Surabaya, yakni mengantisipasi terjadinya bencana dan mengurangi dampak bencana. Pada tahun 2023, jumlah kelurahan tangguh bencana berkurang disebabkan adanya penggabungan 2 kelurahan menjadi satu. Data kelurahan tangguh bencana tahun 2020 – 2024 (TW II) bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.5
Kelurahan Tangguh Bencana Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	154	154	154	153	153

Sumber: BPBD Kota Surabaya, 2024

Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan mitigasi bencana dengan melakukan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kepada seluruh elemen masyarakat serta penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana. Terkait dengan tanggap darurat bencana, Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan kapasitas Command Center 112 dan menyediakan 7 lokasi posko terpadu dan 34 lokasi pos pantau yang dapat memaksimalkan penanganan

kejadian kedaruratan sampai dengan 7 menit, serta melakukan kegiatan pasca bencana dengan memberikan bantuan logistik kepada korban bencana yang membutuhkan.

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan tingkat risiko bencana tiap-tiap Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai dengan bahaya (*hazard*) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (*multi-hazard*) tersebut dengan tingkatan, seperti nilai 1 untuk rendah, 2 untuk sedang, dan 3 untuk tinggi. Berikut adalah kondisi kinerja historis Pemerintah Kota Surabaya melalui IRB selama 5 tahun.

Tabel II.6
Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Risiko Bencana	150,34	150,34	136,36	124,93	113,31

Sumber: BNPB dan BPBD Provinsi Jawa TImur, 2023

Capaian di atas menunjukkan bahwa IRB Kota Surabaya sejak tahun 2019 mengalami tren menurun, hingga tahun 2023 berada di *level* 113,31. Meski demikian, penyelenggaraan urusan kebencanaan pada periode mendatang akan memiliki tantangan yang cukup besar, terdapat potensi bencana akibat perubahan iklim, serta dampak dari pertambahan penduduk yang berpotensi besar menjadi penyebab bencana lingkungan. Di sisi lain permasalahan birokrasi dan tata kelola kebencanaan harus dapat terselesaikan, Perangkat Daerah belum sinkron serta sinergis dalam rangka mendukung ketahanan daerah, peralatan kebencanaan yang sesuai dengan standar masih belum tercukupi, aparatur serta perangkat kebencanaan yang belum merata memiliki kompetensi memadai dalam penanganan kedaruratan. Permasalahan dan tantangan tersebut selanjutnya menjadi isu yang perlu dioptimalkan dengan penyiapan dan penguatan ketangguhan serta ketahanan kota yang berkelanjutan. Upaya yang akan dilakukan untuk menanggulangi potensi bencana di Surabaya adalah melakukan pelatihan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat, penguatan kapasitas petugas Kelurahan Tangguh Bencana, dan memonitoring secara berkala peralatan kesiapsiagaan bencana.

2.1.1.3 Kondisi Demografis

Keberadaan penduduk sangat penting dalam proses pembangunan, karena itu penduduk akan menjadi menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola

dengan baik. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Surabaya memiliki penduduk yang ber-NIK per 31 Desember Tahun 2023 sebesar 3.009.286 jiwa di 31 wilayah kecamatan. Rincian kepadatan penduduk per kecamatan ditunjukkan pada Tabel II.6. Perkembangan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Terdapat 7 kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan lebih dari 20.000 jiwa/km^2 yaitu Kecamatan Bubutan, Kenjeran, Sawahan, Semampir, Simokerto, Tambaksari, dan Tegalsari. Oleh karenanya, program-program terkait dengan penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan, keluarga berencana, sanitasi dan air bersih dapat diarahkan ke wilayah-wilayah yang padat penduduk sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan, sosial maupun ekonomi warganya. Pembangunan juga diarahkan pada wilayah dengan kepadatan penduduk sedang dan rendah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Tabel II.7
Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)	No	Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)
1	Asem Rowo	15,0083	48.022	3.200	17	Pakal	18,5756	62.715	3.376
2	Benowo	26,6462	73.306	2.751	18	Rungkut	22,9428	121.941	5.315
3	Bubutan	3,9060	97.273	24.904	19	Sambikerep	17,4166	67.943	3.901
4	Bulak	6,2363	47.082	7.550	20	Sawahan	7,1563	199.336	27.855
5	Dukuh Pakis	10,2708	59.532	5.796	21	Semampir	9,0671	182.371	20.113
6	Gayungan	5,9121	43.999	7.442	22	Simokerto	2,6300	92.683	35.241
7	Genteng	4,0919	58.742	14.356	23	Sukolilo	30,1774	115.099	3.814
8	Gubeng	7,9291	133.804	16.875	24	Sukomanunggal	9,4023	104.786	11.145
9	Gunung Anyar	10,1527	61.565	6.064	25	Tambaksari	8,9657	226.995	25.318
10	Jambangan	4,1191	54.200	13.158	26	Tandes	9,9805	91.922	9.210
11	Karang Pilang	9,3896	75.572	8.048	27	Tegalsari	4,3334	98.317	22.688
12	Kenjeran	8,5193	181.300	21.281	28	Tenggilis Mejoyo	5,8085	58.990	10.156
13	Krembangan	8,6046	115.320	13.402	29	Wiyung	12,3170	75.382	6.120
14	Lakarsantri	18,6939	64.062	3.427	30	Wonocolo	6,5445	79.986	12.222
15	Mulyorejo	17,3741	87.556	5.039	31	Wonokromo	8,2768	154.995	18.726
16	Pabean Cantian	5,4765	74.490	13.602	**Total**		**335,925**	**3.009.286**	**8.958**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024, diolah

Jumlah penduduk Kota Surabaya Tahun 2023 berdasarkan jenis kelamin, meliputi 1.518.928 jiwa atau 50,47% penduduk perempuan dan 1.490.358 jiwa atau 49,53% penduduk laki-laki. Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia, atau lebih dikenal sebagai piramida penduduk, dapat dilihat pada Gambar II.9.

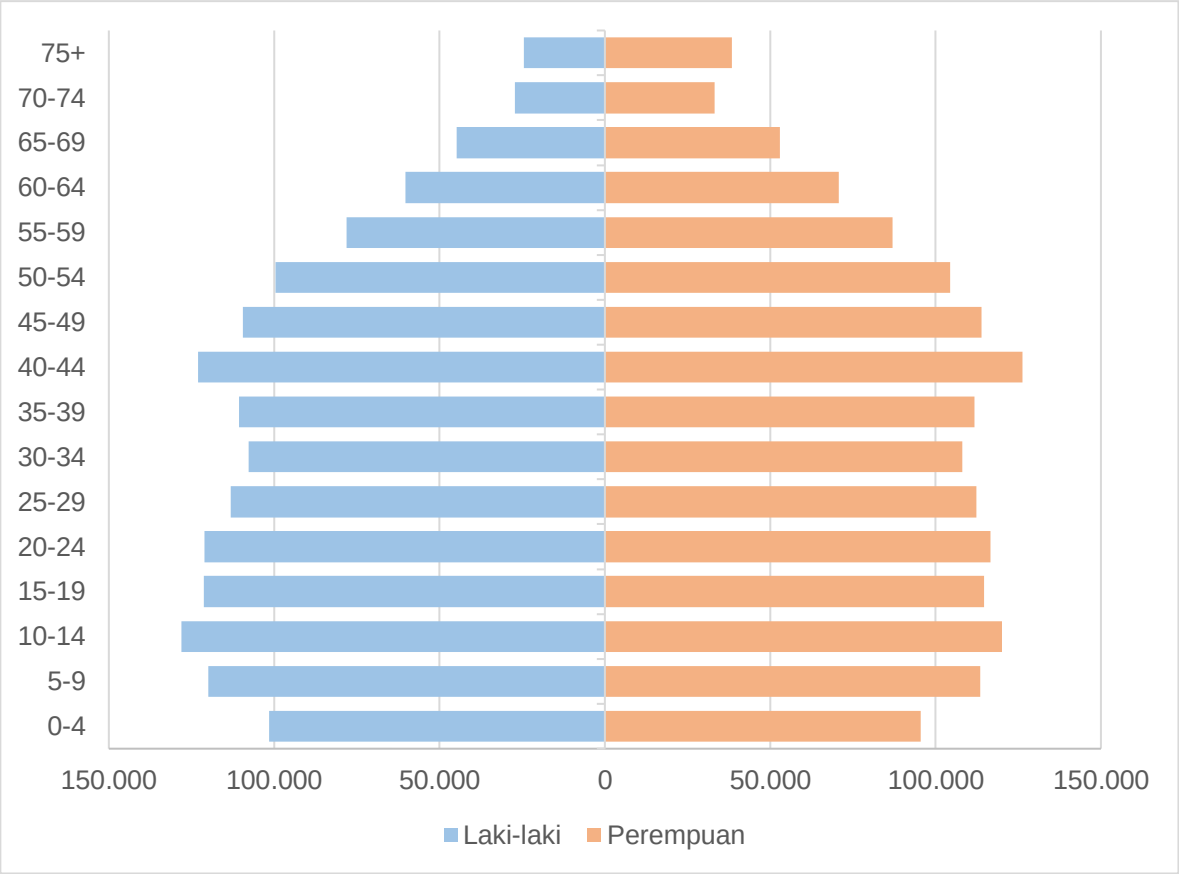

Gambar II.9 Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024, diolah

Komposisi penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah pada tahun 2023 yaitu usia 3-6 tahun sebanyak 180.354 jiwa, usia 7-12 tahun sebanyak 292.229 jiwa, usia 13-15 tahun sebanyak 147.594 jiwa dan usia 16-18 tahun sebanyak 139.165 jiwa. Rincian data penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah pada Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II.8
Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah Tahun 2023

No	Kecamatan	3-6 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
1	Asemrowo	3.433	5.044	2.546	2.408
2	Benowo	4.479	7.459	3.832	3.610
3	Bubutan	5.750	9.257	4.708	4.536
4	Bulak	3.066	4.771	2.461	2.360
5	Dukuh Pakis	3.400	5.694	2.786	2.655
6	Gayungan	2.470	4.135	2.144	2.020
7	Genteng	3.229	5.420	2.802	2.749
8	Gubeng	7.166	11.826	6.120	5.942
9	Gunung Anyar	3.755	6.105	2.965	2.703
10	Jambangan	3.309	5.466	2.682	2.537
11	Karangpilang	4.472	7.162	3.479	3.511
12	Kenjeran	12.782	19.316	9.541	8.703

No	Kecamatan	3-6 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
13	Krembangan	7.109	11.449	5.799	5.290
14	Lakarsantri	3.942	6.255	3.223	3.065
15	Mulyorejo	4.911	8.022	4.012	3.961
16	Pabean Cantian	4.658	7.175	3.749	3.491
17	Pakal	3.898	6.188	3.142	3.046
18	Rungkut	7.209	11.899	5.761	5.424
19	Sambikerep	4.092	6.587	3.311	3.150
20	Sawahan	11.090	18.843	9.696	9.213
21	Semampir	12.631	19.730	9.801	8.847
22	Simokerto	5.641	9.113	4.485	4.162
23	Sukolilo	6.863	11.056	5.505	5.178
24	Sukomanunggal	6.218	10.201	4.963	4.716
25	Tambaksari	12.970	21.477	10.984	10.098
26	Tandes	5.314	9.158	4.775	4.446
27	Tegalsari	5.509	9.241	4.722	4.319
28	Tenggilis Mejoyo	3.506	5.520	2.828	2.652
29	Wiyung	4.286	7.060	3.469	3.502
30	Wonocolo	4.763	7.595	3.891	3.683
31	Wonokromo	8.433	14.005	7.412	7.188
Jumlah		**180.354**	**292.229**	**147.594**	**139.165**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024, diolah

Data penduduk usia sekolah berdasarkan usia sekolah seperti tertuang pada tabel di atas diperlukan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk menyediakan maupun meningkatkan akses pelayanan pendidikan. Fasilitas pendidikan yang ada diharapkan mampu menampung jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut. Komposisi penduduk Kota Surabaya berdasarkan agama yang dipeluk untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pada tabel berikut.

Tabel II.9
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Agama

Agama	2019	2020	2021	2022	2023
1. Islam	85,51%	85,70%	85,83%	85,99%	86,05%
2. Kristen	8,89%	8,75%	8,68%	8,59%	8,56%
3. Katholik	3,91%	3,90%	3,87%	3,83%	3,83%
4. Budha	1,42%	1,40%	1,37%	1,34%	1,32%
5. Hindu	0,24%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%
6. Konghuchu	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
7. Lainnya	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Tabel di atas menunjukkan, bahwa pada tahun 2023, Kota Surabaya masih didominasi oleh penduduk yang beragama Islam yaitu sebesar 86,05% sedangkan sisanya sebesar 13,95% adalah penduduk beragama Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu dan lainnya. Keanekaragaman agama dan budaya yang ada di

Kota Surabaya harus mampu dipelihara dan diwujudkan dalam toleransi kehidupan beragama dan sosial agar tidak terjadi konflik di masyarakat. Salah satu prasyarat agar pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik adalah terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan pekerjaan, penduduk Kota Surabaya cenderung tersebar di seluruh jenis pekerjaan. Dari 81 jenis pekerjaan, yang paling banyak adalah Karyawan swasta, sebesar 56,13 persen. Posisi kedua ditempati oleh penduduk dengan status Mengurus rumah tangga yakni sebesar 14,09 persen, dan di posisi ketiga adalah Wiraswasta sebesar 11,79 persen. Komposisi penduduk Kota Surabaya menurut pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.10
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2023

No	Pekerjaan	Jumlah	%
1	Karyawan Swasta	567.576	56,12990
2	Mengurus Rumah Tangga	142.536	14,09596
3	Wiraswasta	119.205	11,78867
4	Pelajar Mahasiswa	42.222	4,17551
5	Belum/Tidak Bekerja	36.636	3,62308
6	Pegawai Negeri Sipil	24.137	2,38701
7	Pensiunan	15.216	1,50477
8	Tentara Nasional Indonesia	9.977	0,98667
9	Guru	9.937	0,98271
10	Pedagang	5.877	0,58120
11	Buruh Harian Lepas	4.481	0,44314
12	Karyawan BUMN	4.261	0,42139
13	Kepolisian RI	3.840	0,37975
14	Dosen	3.769	0,37273
15	Dokter	3.118	0,30835
16	Petani Pekebun	2.356	0,23299
17	Perdagangan	2.055	0,20323
18	Sopir	1.850	0,18295
19	Karyawan Honorer	1.420	0,14043
20	Tukang Batu	1.322	0,13074
21	Nelayan/Perikanan	1.012	0,10008
22	Perawat	779	0,07704
23	Karyawan BUMD	450	0,04450
24	Pendeta	400	0,03956
25	Mekanik	379	0,03748
26	Tukang Jahit	329	0,03254
27	Industri	328	0,03244
28	Pelaut	323	0,03194
29	Pembantu Rumah Tangga	298	0,02947
30	Tukang Kayu	259	0,02561
31	Buruh Tani/Perkebunan	255	0,02522
32	Transportasi	247	0,02443
33	Konstruksi	234	0,02314
34	Pengacara	223	0,02205
35	Wartawan	189	0,01869
36	Tukang Las/Pandai Besi	146	0,01444
37	Biarawati	142	0,01404
38	Seniman	129	0,01276
39	Konsultan	127	0,01256
40	Notaris	121	0,01197
41	Bidan	119	0,01177
42	Tukang Listrik	114	0,01127
43	Apoteker	104	0,01028
44	Arsitek	94	0,00930
45	Buruh Nelayan Perikanan	82	0,00811
46	Ustadz Mubaligh	58	0,00574
47	Juru Masak	56	0,00554
48	Tukang Sol Sepatu	49	0,00485
49	Tukang Cukur	40	0,00396
50	Peneliti	31	0,00307
51	Penata Rias	30	0,00297
52	Penata Rambut	27	0,00267
53	Akuntan	26	0,00257
54	Pastor	26	0,00257
55	Peternak	25	0,00247
56	Psikiater Psikolog	20	0,00198
57	Pilot	16	0,00158

No	Pekerjaan	Jumlah	%
58	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	13	0,00129
59	Imam Masjid	13	0,00129
60	Tabib	10	0,00099
61	Buruh Peternakan	9	0,00089
62	Anggota DPRD Provinsi	8	0,00079
63	Penterjemah	7	0,00069
64	Penyiar Radio	7	0,00069
65	Penata Busana	6	0,00059
66	Perancang Busana	5	0,00049
67	Perangkat Desa	5	0,00049
68	Tukang Gigi	4	0,00040
69	Anggota DPR RI	4	0,00040
70	Pialang	3	0,00030
71	Penyiar Televisi	2	0,00020
72	Paraji	2	0,00020
73	Anggota Kabinet Kementerian	2	0,00020
74	Paranormal	2	0,00020
75	Promotor Acara	2	0,00020
76	Gubernur	2	0,00020
77	Kepala Desa	2	0,00020
78	Walikota	1	0,00010
79	Wakil Walikota	1	0,00010
80	Wakil Bupati	1	0,00010
81	Lainnya	1.994	0,19719

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Berdasarkan pendidikan, komposisi penduduk Kota Surabaya ditampilkan pada tabel di bawah ini. Penduduk Kota Surabaya paling banyak (28,33 persen), merupakan penduduk yang tidak/belum sekolah. Posisi kedua adalah penduduk lulusan SMA sederajat sebesar 27,07 persen dan posisi selanjutnya adalah lulusan SD sederajat sebanyak 13,45 persen.

Tabel II.11
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023

Pendidikan	Jumlah Penduduk	%
Tidak/Belum Sekolah	852.636	28,33
Belum Tamat SD/setara	211.367	7,02
Tamat SD/setara	404.803	13,45
SMP/setara	347.677	11,55
SMA/setara	814.649	27,07
D1/D2	16.669	0,55
D3/Sarjana Muda	41.118	1,37
D4/S1	297.446	9,88
S2	21.304	0,71
S3	1.617	0,05
Total	**3.009.286**	**100,00**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya

Kota Surabaya sebagai salah satu ibu kota Provinsi yang memiliki fungsi strategis dalam perekonomian Indonesia memiliki beragam infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi termasuk aktivitas perdagangan, baik perdagangan

antar pulau maupun perdagangan antar Negara. Kinerja laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi per kategori lapangan usaha menunjukkan pergerakan yang beragam, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II.11. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tahun 2023, terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali pada kategori pertambangan dan penggalian. Jika dirinci, kategori lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tinggi hingga 2 digit pada masa akhir pandemi ini di antaranya kategori transportasi dan pergudangan; serta pengadaan listrik dan gas.

Adapun kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang rendah yaitu kategori pertambangan dan penggalian; kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; kategori pertanian, kehutanan dan perikanan; kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; serta kategori real estate. Berdasarkan rinciannya, hampir seluruh kategori lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Surabaya mengalami pertumbuhan yang positif terkecuali kategori pertambangan dan penggalian. Kategori tersebut mengalami pertumbuhan yang negatif di tahun ini dikarenakan semakin terbatasnya lahan pertambangan dan penggalian yang ada di Surabaya.

Tabel II.12
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2019 – 2023

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,90	-4,90	1,11	3,46	0,51
B	Pertambangan dan Penggalian	0,09	-6,34	0,08	-1,98	-6,54
C	Industri Pengolahan	5,43	-1,15	3,90	6,55	3,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,41	-6,25	6,10	8,03	30,84
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,92	4,02	5,63	2,13	2,41
F	Konstruksi	5,45	-5,39	4,38	6,40	5,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,89	-8,57	7,37	6,95	5,48
H	Transportasi dan Pergudangan	7,62	-4,98	2,05	14,14	11,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,67	-10,87	2,08	8,48	7,84
J	Informasi dan Komunikasi	7,49	7,19	6,00	3,14	6,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,49	0,23	0,49	1,68	4,05
L	Real Estate	6,09	2,00	1,63	4,07	2,42
M,N	Jasa Perusahaan	6,84	-7,11	1,97	5,75	8,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,64	-2,33	-0,12	0,16	0,06
P	Jasa Pendidikan	6,66	2,75	0,59	0,08	4,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,64	8,75	5,17	1,62	3,97
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,94	-16,30	2,76	13,26	9,28
PDRB		**6,10**	**-4,85**	**4,29**	**6,51**	**5,70**

*Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2024. *)data sementara. **)data sangat sementara.*

Kondisi pandemi *Covid-19* yang terjadi di awal tahun 2020, memaksa perlambatan ekonomi yang sangat signifikan di angka -4,85 persen. Namun seiring dengan melandainya jumlah kasus penularan yang terjadi di Surabaya Raya, dan didukung oleh kerjasama antar pemangku kepentingan untuk mengakselerasi kembalinya perekonomian masyarakat dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, hal tersebut dapat membantu menghidupkan kembali aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat di normal yang baru dengan inovasi berupa pemanfaatan teknologi informasi, di antaranya *online marketplace* seperti ePeken.

Secara keseluruhan laju pertumbuhan PDRB Kota Surabaya bergerak positif sehingga pada tahun 2022 tercapai pada angka 6,51%. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan PDRB Kota Surabaya tercapai pada angka 5,70% yang mengindikasikan bahwa ekonomi di Kota Surabaya tetap mengalami pertumbuhan namun lebih rendah dari target sebesar 5,90%. Kendati pertumbuhan diproyeksikan bergerak positif, upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan utamanya pada sektor yang menyerap banyak tenaga kerja.

Berdasarkan data rilis BPS, perekonomian nasional dan provinsi pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan dan terlepas dari kontraksi sebagaimana terjadi di tahun 2020 yang lalu. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir tahun 2023 di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional sedikit mengalami penurunan. Data selengkapnya ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.13
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2019 – 2023 (dalam persen)

Pertumbuhan Ekonomi	2019	2020	2021	2022	2023*
Surabaya	6,09	-4,85	4,29	6,51	5,70
Jawa Timur	5,53	-2,33	3,56	5,34	4,95
Nasional	5,02	-2,07	3,7	5,31	5,05

*Sumber data: BPS Jawa Timur dan BPS Kota Surabaya, 2024. *) data sementara*

2.1.2.1.1.1 PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB umumnya digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu negara. Dasar perhitungan PDRB saat ini tidak lagi menggunakan angka tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka tahun dasar 2010, mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tabels* (SUT).

Salah satu implikasi perubahan ini adalah meningkatnya nominal PDRB dan perubahan struktur ekonomi yang mulanya 9 sektor ekonomi menjadi 17 kategori lapangan usaha.

Nilai PDRB Kota Surabaya atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2023, sebesar Rp715.294.707,23 juta, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2022, sebesar Rp655.616.221,58 juta. Kinerja sektor tertinggi yang berkontribusi terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya tahun 2023 adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp201.432.925,47 juta atau sebesar 28,16%. Selanjutnya diikuti oleh sektor industri pengolahan dengan nilai kontribusi sebesar Rp135.434.984,12 juta atau sebesar 18,93% sebagai sektor yang berkontribusi paling tinggi kedua dalam pembentuk PDRB ADHB Kota Surabaya, seperti yang dapat dilihat pada Tabel II.13.

Sama halnya dengan PDRB ADHB Kota Surabaya, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 PDRB ADHK Kota Surabaya sebesar Rp434.268.341,12 juta meningkat menjadi sebesar Rp459.030.719,58 juta di tahun 2023. Kategori lapangan usaha yang paling besar menghasilkan PDRB ADHK tahun 2023 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar Rp128.814.587,77 juta diikuti oleh sektor Industri Pengolahan sebesar Rp87.392.236,59 juta serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar Rp66.946.110,99 juta seperti dapat dilihat pada Tabel II.14 berikut.

Tabel II.14
Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2019 – 2023 (dalam Juta Rp)

Kategori	Uraian	2019		2020		2021		2022*		2023**	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	928.398,16	0,16	889.331,91	0,16	917.595,42	0,16	982.815,39	0,15	1.026.186,70	0,14
B	Pertambangan dan Penggalian	33.531,33	0,01	31.943,8	0,01	32.761,34	0,01	33.392,98	0,01	32.513,35	0,00
C	Industri Pengolahan	109.245.937,20	18,81	107.416.294,34	19,37	113.544.581,14	19,24	126.030.898,75	19,22	135.434.984,12	18,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.362.300,29	0,41	2.237.615,57	0,40	2.417.167,25	0,41	2.742.046,30	0,42	3.728.710,22	0,52
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	791.147,83	0,14	824.951,94	0,15	872.320,90	0,15	932.750,33	0,14	968.113,96	0,14
F	Konstruksi	54.649.310,30	9,41	51.969.408,77	9,37	55.273.538,87	9,36	61.408.502,94	9,37	64.940.579,25	9,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	161.141.233,33	27,75	149.246.755,05	26,92	163.509.913,19	27,70	184.610.467,40	28,16	201.432.925,47	28,16
H	Transportasi dan Pergudangan	31.240.415,60	5,38	29.794.090,41	5,37	30.520.260,56	5,17	36.260.418,47	5,53	42.834.312,86	5,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	95.537.038,24	16,45	85.618.582,64	15,44	91.418.079,71	15,49	102.248.698,97	15,60	114.627.560,20	16,03
J	Informasi dan Komunikasi	30.770.585,80	5,30	33.247.669,54	6,00	35.273.340,84	5,98	36.541.720,23	5,57	39.290.062,52	5,49
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	29.413.339,89	5,06	29.183.377,44	5,26	30.560.741,63	5,18	33.950.422,52	5,18	35.852.303,70	5,01
L	Real Estate	14.947.568,30	2,57	15.354.350,85	2,77	15.790.323,11	2,68	16.599.139,83	2,53	17.213.531,88	2,41
M,N	Jasa Perusahaan	14.930.184,77	2,57	14.116.912,06	2,55	14.543.157,97	2,46	15.772.593,51	2,41	17.530.932,18	2,45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.154.990,77	1,40	8.238.304,23	1,49	8.310.975,30	1,41	8.486.026,22	1,29	8.533.021,21	1,19
P	Jasa Pendidikan	14.007.607,77	2,41	14.540.365,94	2,62	14.682.371,72	2,49	14.866.084,13	2,27	15.784.480,73	2,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.443.228,45	0,77	4.880.587,79	0,88	5.220.638,17	0,88	5.508.115,81	0,84	5.958.216,19	0,83
R,S,T,U	Jasa lainnya	8.159.192,66	1,40	6.918.915,11	1,25	7.340.199,70	1,24	8.642.127,81	1,32	10.106.272,69	1,41
Produk Domestik Regional Bruto		**580.756.010,69**	**100**	**554.509.457,38**	**100**	**590.227.966,81**	**100**	**655.616.221,58**	**100**	**715.294.707,23**	**100**

*Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2024. *)data sementara. **)data sangat sementara.*

Tabel II.15
Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2019 – 2023 (dalam Juta Rp)

Kategori	Uraian	2019		2020		2021		2022*		2023**	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	576.221,53	0,14	547.994,9	0,14	554.054,70	0,14	573.236,82	0,13	1.026.186,70	0,14
B	Pertambangan dan Penggalian	20.782,09	0,01	19.464,04	0,00	19.479,80	0,00	19.094,55	0,01	32.513,35	0,00
C	Industri Pengolahan	77.312.368,81	18,81	76.384.521,77	19,54	79.366.597,60	19,47	84.567.579,11	19,47	135.434.984,12	18,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.546.272,08	0,38	1.449.668,99	0,37	1.538.145,90	0,38	1.661.665,76	0,38	3.728.710,22	0,52
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	605.979,60	0,15	630.336,37	0,16	665.833,70	0,16	680.003,79	0,16	968.113,96	0,14
F	Konstruksi	40.576.452,62	9,87	38.387.739,29	9,82	40.070.071,60	9,83	42.633.575,68	9,82	64.940.579,25	9,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	116.343.590,22	28,31	106.340.867,71	27,20	114.183.332,30	28,00	122.122.627,45	28,12	201.432.925,47	28,16
H	Transportasi dan Pergudangan	20.497.977,43	4,99	19.477.422,82	4,98	19.875.912,40	4,87	22.684.941,35	5,22	42.834.312,86	5,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	62.898.688,76	15,30	56.053.239,21	14,34	57.221.633,10	14,03	62.076.385,35	14,29	114.627.560,20	16,03
J	Informasi dan Komunikasi	27.531.903,71	6,70	29.511.280,46	7,55	31.281.790,20	7,67	32.264.418,48	7,43	39.290.062,52	5,49
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	19.187.832,54	4,67	19.231.210,98	4,92	19.324.709,70	4,74	19.648.801,34	4,52	35.852.303,70	5,01
L	Real Estate	10.784.959,46	2,62	11.000.304,15	2,81	11.179.684,10	2,74	11.634.820,68	2,68	17.213.531,88	2,41
M,N	Jasa Perusahaan	9.474.538,92	2,31	8.801.216,28	2,25	8.974.255,50	2,20	9.490.093,03	2,19	17.530.932,18	2,45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.867.861,44	1,18	4.754.525,35	1,22	4.748.920,20	1,16	4.756.347,15	1,10	8.533.021,21	1,19
P	Jasa Pendidikan	9.668.100,19	2,35	9.934.443,75	2,54	9.993.043,00	2,45	10.001.195,71	2,30	15.784.480,73	2,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.254.593,89	0,79	3.539.299,11	0,91	3.722.145,30	0,91	3.782.452,79	0,87	5.958.216,19	0,83
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.821.770,58	1,42	4.872.889,81	1,25	5.007.190,10	1,23	5.671.102,07	1,31	10.106.272,69	1,41
Produk Domestik Regional Bruto		**410.969.893,87**	**100**	**390.936.424,98**	**100**	**407.726.799,20**	**100**	**434.268.341,12**	**100**	**715.294.707,23**	**100**

*Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2024. *)data sementara. **)data sangat sementara.*

Tabel II.16
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Kategori	Uraian	2019		2020		2021		2022*		2023**	
		ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,16	0,14	0,16	0,14	0,16	0,14	0,15	0,13	0,14	0,13
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	18,81	18,81	19,37	19,54	19,24	19,47	19,22	19,47	18,93	19,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,41	0,38	0,40	0,37	0,41	0,38	0,42	0,38	0,52	0,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,14	0,15	0,15	0,16	0,15	0,16	0,14	0,16	0,14	0,15
F	Konstruksi	9,41	9,87	9,37	9,82	9,36	9,83	9,37	9,82	9,08	9,75
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	27,75	28,31	26,92	27,20	27,70	28,00	28,16	28,12	28,16	28,06
H	Transportasi dan Pergudangan	5,38	4,99	5,37	4,98	5,17	4,87	5,53	5,22	5,99	5,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,45	15,30	15,44	14,34	15,49	14,03	15,60	14,29	16,03	14,58
J	Informasi dan Komunikasi	5,30	6,70	6,00	7,55	5,98	7,67	5,57	7,43	5,49	7,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,06	4,67	5,26	4,92	5,18	4,74	5,18	4,52	5,01	4,45
L	Real Estate	2,57	2,62	2,77	2,81	2,68	2,74	2,53	2,68	2,41	2,60
M,N	Jasa Perusahaan	2,57	2,31	2,55	2,25	2,46	2,20	2,41	2,19	2,45	2,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,40	1,18	1,49	1,22	1,41	1,16	1,29	1,10	1,19	1,04
P	Jasa Pendidikan	2,41	2,35	2,62	2,54	2,49	2,45	2,27	2,30	2,21	2,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,77	0,79	0,88	0,91	0,88	0,91	0,84	0,87	0,83	0,86
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,40	1,42	1,25	1,25	1,24	1,23	1,32	1,31	1,41	1,35
Produk Domestik Regional Bruto		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

*Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2024. *)data sementara. **)data sangat sementara.*

Struktur ekonomi Kota Surabaya masih memiliki pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana kategori yang mendominasi dalam berkontribusi terhadap perekonomian Kota Surabaya yaitu kategori perdagangan besar dan

eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor, industri pengolahan serta akomodasi, serta makanan minuman. Tingginya kontribusi ketiga kategori tersebut selaras dengan maraknya aktivitas perdagangan barang dan jasa yang terus tumbuh pesat di Kota Surabaya. Di samping itu, daya dukung seperti padatnya jumlah penduduk Kota Surabaya disertai tingginya tingkat konsumsi membuat Kota Surabaya memiliki nilai tambah lebih besar bagi pelaku pasar.

Selama tahun 2019-2023 kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor memberikan kontribusi terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya sebesar 26-28 persen setiap tahunnya. Sebagai penggerak utama perekonomian Kota Surabaya, pesatnya aktivitas perdagangan tersebut tentunya menjadi pengungkit (*multiplier effect*) bagi aktivitas lapangan usaha lainnya seperti aktivitas industri, penyediaan akomodasi dan makanan minuman serta aktivitas jasa lainnya. Hal itu terjadi karena semakin meningkatnya aktivitas perdagangan maka semakin meningkat pula permintaan barang dan jasa pada aktivitas industri. Berdasarkan keterkaitan tersebut menjadikan kategori industri pengolahan sebagai kategori lapangan usaha paling dominan kedua dengan nilai kontribusi 18-19 persen terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya setiap tahunnya.

Kategori tertinggi selanjutnya yaitu akomodasi dan makanan minuman dengan kontribusi rata-rata sebesar 14-16 persen terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya. Potensi aktivitas akomodasi dan makanan minuman di Kota Surabaya sangatlah besar. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh pembangunan hotel, wisma/penginapan, serta tempat makan mulai dari warung kecil hingga restoran yang terus bermunculan mengikuti pesatnya perkembangan ekonomi Kota Surabaya. Ditambah lagi, semakin modernnya perilaku hidup masyarakat Kota Surabaya turut mendukung tumbuhnya aktivitas kategori akomodasi dan makanan minuman dari tahun ke tahun.

2.1.2.1.1.2 PDRB Per Kapita

Kinerja ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai ukuran. Secara umum, kinerja tersebut diukur melalui sebuah besaran yaitu PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan konsep yang paling sering dipakai sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. PDRB per kapita ADHB untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah.

Besaran PDRB per kapita diperoleh dari *output* yang dihasilkan pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu wilayah dari tahun ke tahun. Dengan melakukan perbandingan seperti itu, kita dapat mengamati apakah kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah secara rata-rata telah meningkat. Berikut rangkuman data yang menggambarkan tingkat pendapatan perkapita penduduk di Kota Surabaya tahun 2019 – 2023.

Tabel II.17
PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya
Tahun 2019 – 2023

Tahun	2019	2020	2021	2022*	2023**
ATAS DASAR HARGA BERLAKU					
PDRB (Milyar Rp)	580.488,53	554.509,46	590.227,97	655.616,22	715.294,71
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	200,43	193,01	204,92	227,08	245,72
ATAS DASAR HARGA KONSTAN					
PDRB (Milyar Rp)	410.879,31	390.936,42	407.726,80	434.268,34	459.030,72
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	141,87	136,07	141,56	150,41	157,69
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (ribu orang)	2.897	2.873	2.880	2.887	2.911

*Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2024. *)data sementara. **)data sangat sementara.*

Pada tabel di atas, PDRB per kapita Kota Surabaya, dapat dilihat bahwa ADHB dan ADHK menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya, meski mengalami penurunan pada tahun 2020, hal ini karena dampak adanya pandemi Covid-19, sedangkan pada tahun 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan. Peningkatan PDRB perkapita harus diiringi dengan peningkatan dan pemerataan pendapatan penduduk sehingga tujuan pembangunan untuk masyarakat sejahtera dapat terwujud.

2.1.2.1.2 Tingkat Inflasi

Pada tahun 2024, sampai dengan bulan Mei, tingkat inflasi Kota Surabaya sebesar 1,09% (*year-to-date*). Angka tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi pada periode yang sama di tahun 2023 sebesar 1,40% sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

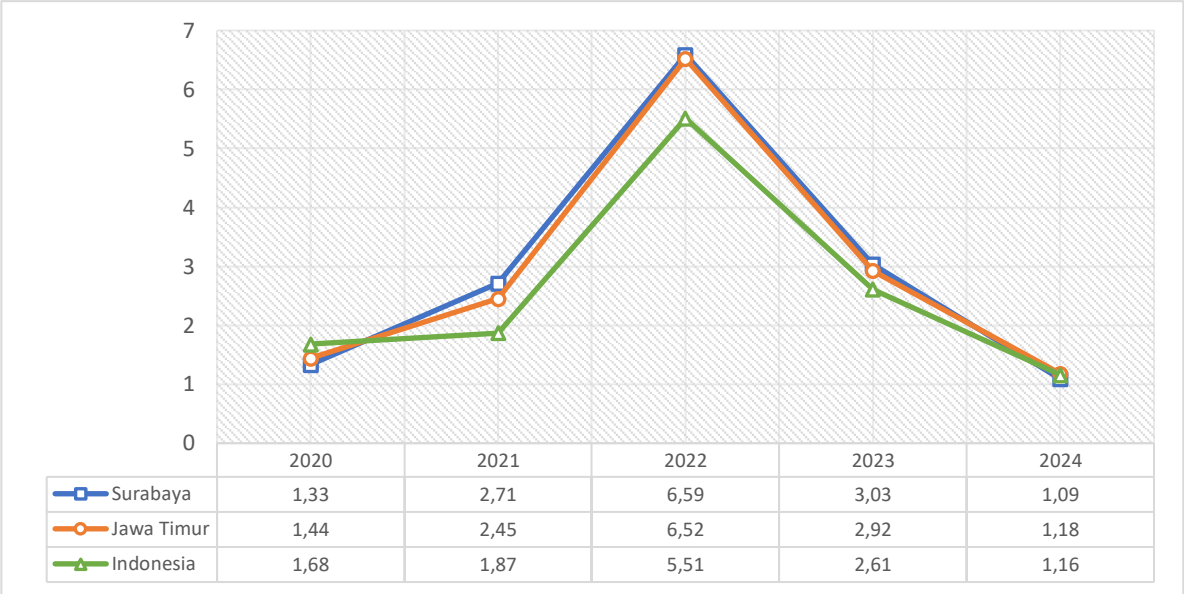

	2020	2021	2022	2023	2024
Surabaya	1,33	2,71	6,59	3,03	1,09
Jawa Timur	1,44	2,45	6,52	2,92	1,18
Indonesia	1,68	1,87	5,51	2,61	1,16

Gambar II.10
Inflasi Kota Surabaya (*year-to-date*) Tahun 2020 – 2024 (TW II)
Sumber: BPS Kota Surabaya, Mei 2024

Bila dibandingkan dengan kondisi di Jawa Timur dan Nasional, Pergerakan inflasi Kota Surabaya dari tahun ke tahun selalu selaras dengan inflasi Jawa Timur dan Nasional sebagaimana terangkum dalam grafik di atas. Sejak tahun 2021, rata-rata inflasi Kota Surabaya cenderung lebih tinggi dibandingkan angka inflasi nasional maupun provinsi, tingginya nilai inflasi tersebut berpotensi melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu dilakukan kontrol berkala terhadap komoditas-komoditas penyumbang inflasi di Kota Surabaya.

Peningkatan inflasi tahun 2022 salah satunya dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa peningkatan inflasi global akibat meningkatnya harga komoditas global yang selanjutnya kemudian berdampak terhadap harga-harga produk dalam negeri. Namun pada tahun 2023 dan berlanjut di tahun 2024 sampai dengan bulan Mei, angka tersebut berhasil dikendalikan, salah satunya karena upaya Pemerintah Kota Surabaya melalui TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) untuk memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi, serta tetap menjaga komunikasi yang efektif bersama.

2.1.2.1.3 Indeks Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien Gini bernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar merata, dan mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata. bayBerdasarkan nilai *gini ratio*, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu:

ketimpangan tinggi jika nilai koefisien *gini ratio* 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

Nilai Indeks Gini Kota Surabaya selama kurun waktu 5 tahun berada pada kisaran 0,3 – 0,4 yang tergolong dalam kategori sedang. Jika dibandingkan dengan indeks gini Provinsi Jawa Timur dan Nasional yang dirilis BPS, indeks gini Kota Surabaya memiliki angka yang cenderung lebih tinggi dibandingkan keduanya, kecuali kondisi pada tahun 2020 dan 2021. Sedangkan pada tahun 2023, peningkatan indeks gini di Kota Surabaya cukup signifikan.

Oleh sebab itu, tingkat pemerataan distribusi pendapatan selalu menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang terlalu tinggi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik, karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk pemerataan ekonomi melalui peningkatan produktivitas usaha masyarakat. Saat ini, Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk menurunkan angka rasio gini, dengan strategi yang berfokus pada upaya untuk menuntaskan masalah kemiskinan melalui fasilitasi kesempatan berusaha, penciptaan lapangan pekerjaan dan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin untuk peningkatan pendapatan dan pengurangan beban pengeluaran.

Tabel II.18
Indeks Gini Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Indeks Gini	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Surabaya	0,344	0,351	0,388	0,423	N/A
Jawa Timur	0,366	0,374	0,371	0,387	0,372
Nasional	0,381	0,384	0,384	0,388	0,379

Sumber data: BPS, 2024 (versi data Maret)

2.1.2.1.4 Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Meski garis kemiskinan setiap tahun cenderung meningkat mengikuti inflasi, namun angka dan jumlah penduduk miskin harus semakin menurun. Pada periode pandemi Covid-19, tahun 2020 dan 2021, angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin naik cukup signifikan sebagai dampak dari pembatasan sosial dalam skala besar. Namun, di tahun 2022 dan 2023, angka kemiskinan berhasil diturunkan berturut-turut menjadi 4,72 dan 4,65 sebagai

dampak dari berbagai intervensi kemiskinan yang dilakukan secara masif oleh Pemerintah Kota Surabaya. Selengkapnya angka dan garis kemiskinan serta jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.19
Angka dan Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin
Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	Lingkup	2019	2020	2021	2022	2023*
Angka Kemiskinan (persen)	Surabaya*	4,51	5,02	5,23	4,72	4,65
	Jawa Timur	10,20	11,46	10,59	10,49	10,35
	Nasional	9,22	10,19	9,71	9,57	9,36
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)	Surabaya*	567.474	592.137	611.466	652.540	718.370
	Jawa Timur	404.172	418.228	445.139	487.908	507.286
	Nasional	440.538	458.947	486.168	535.547	550.458
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Surabaya*	130,55	145,67	152,489	138,21	136,37
	Jawa Timur	4.056,00	4.585,97	4.259,60	4.236,51	4.188,81
	Nasional	24.785,87	27.549,69	26.503,65	26.363,27	25.898,55

*Sumber: BPS, 2024 (versi data Sept). *) versi data Maret*

Program dan kegiatan berbagai sektor yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya bertujuan untuk meringankan beban penduduk miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan maupun program dan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan skill melalui pelatihan, pemberdayaan UKM serta inkubasi dan klinik usaha mandiri. Intervensi tersebut diharapkan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat, bahwa pengentasan kemiskinan dilakukan secara terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran melalui kolaborasi intervensi, sehingga kemiskinan ekstrem dapat mencapai tingkat 0% (nol persen) pada 2024. Kemiskinan ekstrem yang dimaksud mengacu pada definisi yang digunakan oleh Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu rumah tangga yang mendapatkan penghasilan sebesar 1,9 USD PPP (*Purchasing Power Parity)* per hari. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 69.330 jiwa (2,39%), terus menurun di tahun 2021, sebanyak 35.020 jiwa (1,20%), hingga tahun 2022, sebanyak 23.530 jiwa (0,80%). Kota Surabaya sedang berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem, di antaranya dengan menetapkan data kemiskinan ekstrem melalui SK Walikota No. 188.45/556/436.1.2/2022 tentang Data Sasaran Keluarga Miskin Ekstrem Kota Surabaya Tahun 2022, yakni sejumlah 23.530 jiwa pada 5.310 KK. Salah satu bentuk intervensi bagi mereka adalah dengan mendorong pembukaan lapangan kerja padat karya untuk peningkatan kemandirian ekonomi.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita.

Pada tahun 2023, angka IPM mengalami *update* data Umur Harapan Hidup, yang sebelumnya dihitung menggunakan proyeksi hasil Sensus Penduduk 2010, dimutakhirkan menggunakan hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020. *Update* angka umur harapan hidup tersebut mengakibatkan penyesuaian angka IPM sejak tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya.

Secara umum, Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya terus mengalami peningkatan selama periode 2020 hingga 2023. IPM Kota Surabaya meningkat dari 82,76 pada tahun 2020 menjadi 83,99 pada tahun 2023. Selama periode tersebut, IPM Kota Surabaya rata-rata tumbuh sebesar 0,49% per tahun. Keberhasilan dalam meningkatkan IPM secara berkelanjutan tersebut telah mampu meningkatkan standar kualitas pembangunan manusia Kota Surabaya menjadi kategori sangat tinggi, meski hanya merupakan angka tertinggi kedua untuk tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur setelah Kota Malang (84,00). Tren IPM Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Nasional selama 5 tahun terakhir, ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.20
Tren IPM Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019*	2020	2021	2022	2023
IPM Kota Surabaya	82,22	82,76	82,94	83,32	83,99
IPM Provinsi Jawa Timur	71,5	73,04	73,48	74,05	74,65
IPM Nasional	71,92	72,81	73,16	73,77	74,39

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024. *)dihitung menggunakan basis data SP2010*

2.1.2.2.1.1 Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur panjang dan hidup sehat dapat diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH). Pada tahun 2023, data UHH yang sebelumnya dihitung menggunakan proyeksi hasil Sensus Penduduk 2010, dimutakhirkan menggunakan hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020, sehingga mengakibatkan perubahan angka UHH sejak tahun 2020 hingga tahun-tahun berikutnya. Perkembangan UHH Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.21
Perkembangan Umur Harapan Hidup Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Umur Harapan Hidup (UHH)	2019*	2020	2021	2022	2023
Kota Surabaya (tahun)	74,13	75,24	75,43	75,62	75,82
Provinsi Jawa Timur (tahun)	71,18	74,21	74,28	74,57	74,87
Nasional (tahun)	71,34	73,37	73,46	73,7	73,93

*Sumber: BPS, 2024. *)dihitung menggunakan basis data SP2010*

UHH penduduk Kota Surabaya pada tahun 2020 sebesar 75,24 tahun dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 75,43 tahun meski di tengah kondisi pandemi. Kemudian di tahun 2022, UHH penduduk Kota Surabaya kembali meningkat menjadi 75,62 tahun. Sedangkan pada tahun 2023 UHH penduduk Kota Surabaya terus meningkat menjadi 75,82 tahun. Perkembangan yang positif ini tidak lepas dari komitmen Pemerintah Kota Surabaya untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh warganya melalui UHC (*universal health coverage*), yang didukung oleh para pemangku kepentingan pelayanan kesehatan di Kota Surabaya, seperti rumah sakit, klinik, serta fasilitas kesehatan milik swasta lainnya.

2.1.2.2.1.2 Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan diukur melalui RLS (rata-rata lama sekolah) dan HLS (harapan lama sekolah). Rata-rata lama sekolah menurut BPS adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 21 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Data perkembangan rata-rata lama sekolah Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.22
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	2019	2020	2021	2022	2023
RLS Kota Surabaya (tahun)	10,47	10,49	10,50	10,51	10,70
RLS Provinsi Jawa Timur (tahun)	7,59	7,78	7,88	8,03	8,11
RLS Nasional (tahun)	8,34	8,48	8,54	8,69	8,77

Sumber: BPS, 2024

Angka harapan lama sekolah menurut BPS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Data perkembangan angka harapan lama sekolah Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.23
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2019 – 2023

Harapan Lama Sekolah (HLS)	2019	2020	2021	2022	2023
HLS Kota Surabaya (tahun)	14,79	14,80	14,81	14,83	14,85
HLS Provinsi Jawa Timur (tahun)	13,16	13,19	13,36	13,37	13,38
HLS Nasional (tahun)	12,95	12,98	13,08	13,10	13,15

Sumber: BPS, 2024

Data di atas menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Surabaya di tahun 2023 berharap mengenyam pendidikan melebihi jenjang menengah atau SMA, yakni melebihi tingkat Diploma-3 (D3) namun masih belum mencapai Diploma-4 (D4) atau Strata-1 (S1). Adapun penyebab utama yang secara signifikan dapat mempengaruhi HLS dan RLS antara lain karena faktor tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi dan tempat tinggal yang secara jarak menurut pengukuran zonasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tidak terjangkau dari lokasi satuan pendidikan. Penyebab anak tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi di antaranya karena menikah/mengurus rumah tangga, merasa pendidikan cukup dan telah bekerja. Untuk faktor tempat tinggal yang jauh dari lokasi satuan pendidikan, dialami oleh kebanyakan anak pada usia 16 tahun ke atas atau usia belajar setingkat SMA/SMK sesuai dengan data rata-rata lama sekolah siswa di Surabaya yang pendidikannya terhenti saat usia 16-17 tahun. Hal ini tentu saja membutuhkan kerjasama dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menambah jumlah satuan pendidikan setingkat SMA/SMK. Saat ini Ketersediaan jumlah 22 sekolah SMA dan 10 sekolah SMK negeri yang terbatas sehingga jumlah satuan pendidikan ini tidak mencukupi dengan lulusan kelas 9 dari SMP negeri maupun swasta.

Meski mengalami peningkatan setiap tahunnya, rata-rata lama sekolah masih belum dapat memenuhi harapan lama sekolah. Karena itu, Pemerintah Kota Surabaya terus mendorong pelaksanaan pemberian beasiswa bagi pelajar SMA/SMK, bahkan hingga Perguruan Tinggi, sehingga diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan indeks pendidikan warga Kota Surabaya. Langkah yang paling efektif adalah dengan memastikan tidak ada siswa yang putus sekolah, sehingga nilai Harapan Lama Sekolah akan naik serta memperhatikan penduduk produktif usia 25 tahun ke atas yang tidak/putus sekolah agar bisa kembali sekolah dan memiliki ijazah sebagai suatu langkah menaikan nilai Rata rata Lama Sekolah.

2.1.2.2.1.3 Dimensi Standar Hidup Layak

Standar hidup layak didapat melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita masyarakat di kota Surabaya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.24
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Pengeluaran Per Kapita	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Surabaya (Rp .000)	17.854	17.755	17.826	18.345	18.977
Provinsi Jawa Timur (Rp .000)	11.739	11.601	11.707	11.992	12.421
Nasional (Rp .000)	11.299	11.013	11.156	11.479	11.899

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2024

Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita masyarakat di Kota Surabaya mencapai 18,977 juta rupiah per tahun. Tentu angka tersebut lebih tinggi dari Provinsi dan Nasional, karena tingginya kebutuhan hidup di kota besar yang selaras dengan perkembangan kemajuan taraf hidup dan kesejahteraan penduduknya.

2.1.2.2.2 Indeks Harmoni Sosial

Indeks Harmoni Sosial merupakan indikator baru dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 yang merupakan indikator komposit yang terdiri dari Indeks Budaya Lokal, Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Indeks Kepedulian Sosial. Indeks ini menekankan pada keselarasan perpaduan antara keyakinan dan tingkah laku, menghormati, menyayangi apa yang ada, merangkum, mensinergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial yang ditandai dengan adanya solidaritas dalam masyarakat yang beragam tersebut. Indeks Budaya Lokal disusun oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal (mengenai jenis seni budaya dan cagar budaya) dan tingkat kepedulian masyarakat dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan. Sedangkan Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan merupakan indeks komposit yang tersusun atas 4 komponen, yakni: (1) persentase masyarakat yang pemahaman lingkungan hidupnya meningkat, (2) jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diusulkan, (3) peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan, dan (4) persentase rumah sehat. Kemudian, Indeks Kepedulian Sosial merupakan indeks yang ditentukan dengan hasil survei terhadap partisipasi masyarakat dalam aspek sosial, kemanusiaan, toleransi beragama dan kebangsaan.

Nilai Indeks Budaya Lokal dapat menggambarkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal dan tingkat kepedulian masyarakat dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan. Sementara itu, Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dapat menggambarkan tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Sedangkan Indeks Kepedulian Sosial dapat menggambarkan tingkat kepedulian antar masyarakat dalam lingkup sosial sehari-hari. Nilai-nilai tersebut dianggap penting dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat terutama pada zaman modernisasi sekarang, di mana dengan berkembangnya teknologi informasi sangat

mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, beserta lingkungan hidup yang mendukung aktivitas masyarakat.

Tabel II.25
Indeks Harmoni Sosial Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Harmoni Sosial	N/A	N/A	N/A	80,08	82,70
1.a	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	N/A	N/A	N/A	48,01	56,51
1.b	Indeks Kepedulian Sosial	N/A	N/A	N/A	97,67	97,86
1.c	Indeks Budaya Lokal	82,42	88,56	89,67	89,97	89,99

Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2023

Nilai Indeks Harmoni Sosial Kota Surabaya tahun 2024 masih dalam proses pengambilan sampel responden dan direncanakan selesai di medio Triwulan 4 Tahun 2024. Sedangkan pencapaian Indeks Harmoni Sosial tahun 2023 yang sebesar 82,70 tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota dalam meningkatkan ragam dan frekuensi *event* budaya lokal, kepedulian lingkungan, serta penguatan karakter kebangsaan dan kerukunan antar masyarakat di Kota Surabaya. Keberhasilan tersebut di antaranya merupakan hasil dari rutinnya pelaksanaan event, festival serta parade dengan tema seni dan budaya serta sejarah yang diadakan di Kota Surabaya, seperti Parade Juang, Festival Rujak Uleg, Perobekan Bendera, *Heroic Track*, Sekolah Kebangsaan, Surabaya Vaganza, Cak dan Ning, Parade Budaya serta Sedekah Bumi. Selain itu, keberhasilan tersebut juga didukung oleh upaya edukasi lingkungan kepada masyarakat, baik pelajar maupun pelaku usaha mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk di antaranya pembinaan bank sampah di 470 lokasi dan 40 kampung *zero waste*, serta diadakannya perlombaan lingkungan seperti Surabaya *Smart City*, ECO school, ECO campus dan ECO pesantren. Kemudian, pencapaian Indeks Harmoni Sosial tersebut juga terwujud melalui upaya pemantapan karakter kebangsaan dan ideologi pancasila, serta penguatan kerukunan antar masyarakat melalui forum kerukunan umat beragama, mediasi konflik umat beragama, serta sosialisasi anti narkotika dan koordinasi operasi gabungan pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Seiring dengan upaya dalam mengurangi potensi konflik, Pemerintah Kota Surabaya juga senantiasa berupaya penuh dalam meningkatkan nilai kesalehan sosial dalam bermasyarakat. Salah satu langkah strategis dalam meraih hal tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kepedulian sosial di masyarakat yang diukur dalam Indeks Kepedulian Sosial. Indeks Kepedulian Sosial merupakan suatu

sinergi yang menggabungkan antara nilai sosial kemanusiaan, ketuhanan, budi pekerti serta kepatuhan terhadap peraturan negara.

2.1.2.2.3 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya meliputi angka melek huruf, angka partisipasi murni, dan angka partisipasi kasar.

Angka melek huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. AMH penduduk Kota Surabaya sudah sebesar 100 persen sejak tahun 2016. Rekapitulasi data perkembangan AMH Kota Surabaya mulai tahun 2020 hingga tahun 2024 (triwulan II) disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.26
Perkembangan AMH Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bisa Membaca dan Menulis	2.460.443	2.295.394	2.300.947	2.330.830	2.330.830
2	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas	2.460.443	2.295.394	2.300.947	2.330.830	2.330.830
3	Angka Melek Huruf (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Dari data pada tabel di atas, penduduk Kota Surabaya usia 15 tahun ke atas seluruhnya telah mampu membaca dan menulis.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator yang melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar usia siswa di jenjang tersebut. Perkembangan APM Kota Surabaya tahun 2020-2024 (Triwulan 2) disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.27
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	APM SD/MI (persen)	98,46	100,82	91,37	95,08	95,56
1.1	Jumlah Siswa SD/MI yang berusia 7-12 Tahun	295.357	299.814	269.289	277.858	279.258

No.	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	299.966	297.369	294.723	292.229	292.229
2	APM SMP/MTs (persen)	87,58	87,34	80,77	96,17	96,31
2.1	Jumlah Siswa SMP/MTs yang berusia 13-15 Tahun	126.874	129.763	119.705	141.948	142.151
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	144.872	148.573	148.205	147.594	147.594

Sumber: Dinas Pendidikan dan Dispendukcapil Kota Surabaya, 2024

Peningkatan APM SD/MI dan SMP/MTs di tahun 2024 tersebut dikarenakan tingginya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs serta menjadi tolak ukur keberhasilan atas penambahan daya tampung ruang kelas baru di beberapa sekolah. Sedangkan manfaat pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) bagi siswa mampu membantu peningkatan perekonomian dan meringankan biaya pendidikan bagi siswa itu sendiri.

Adapun rasio perempuan terhadap laki-laki untuk APM Kota Surabaya pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs, dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.28
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Terhadap Laki-Laki Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio APM SD/MI (persen)	94,34	92,73	99,80	94,04	100,15
2.	Rasio APM SMP/MTs (persen)	100,04	90,59	103,13	94,00	101,63

Sumber: Dinas Pendidikan, 2024

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Rekap data perkembangan APK Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (Triwulan II) disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.29
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	APK PAUD (persen)	69,36	69,59	75,56	77,57	75,38
1.1	Jumlah Seluruh Siswa PAUD	124.883	123.269	102.666	105.998	102.988
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 4-6 Tahun	180.053*	177.135*	135.876	136.632	136.632

No.	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
2.	APK SD/MI (persen)	104,30	106,90	106,37	109,89	103,72
2.1	Jumlah Seluruh Siswa SD/MI	312.873	317.885	313.505	321.128	303.100
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	299.966	297.369	294.723	292.229	292.229
3.	APK SMP/MTs (persen)	98,93	110,64	108,47	110,53	101,04
3.1	Jumlah Seluruh Siswa SMP/MTs	143.329	164.376	160.764	163.134	149.129
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	144.872	148.573	148.205	147.594	147.594

*Sumber: Dinas Pendidikan, 2024. *)data menggunakan kelompok usia 3-6 tahun.*

Rendahnya APK SD/MI dan APK SMP/MTs dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat yang sudah berusia di atas jenjang SD/MI atau SMP/MTs belum bekerja namun masih belum menuntaskan pendidikan / Tamat Belajar jenjang SD/MI atau SMP/MTs maupun bagi yang sudah bekerja namun tidak ada waktu maupun keinginan untuk melakukan pembaruan status tamat belajar mereka yang belum lulus SD/MI atau SMP/MTs.

2.1.2.2.4 Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah salah satunya dapat diukur dengan status gizi masyarakat. Utamanya pada balita di Kota Surabaya secara umum terus menunjukkan kemajuan signifikan yang ditandai dengan menurunnya angka prevalensi gizi buruk pada balita. Persentase balita gizi buruk pada tahun 2019 yang sebesar 0,12 persen, berhasil diturunkan menjadi 0,03 persen di triwulan 2 tahun 2024, seperti dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel II.30
Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah balita dengan status gizi buruk	196	148	123	118	38
2	Jumlah balita yang ditimbang	178.043	148.720	126.113	149.899	148.917
3	Prevalensi balita gizi buruk (%)	0,11	0,10	0,10	0,08	0,03

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

Tabel II.31
Perkembangan Balita Gizi Buruk Kota Surabaya (menurut Kecamatan) Tahun 2019 – 2023

No	Kecamatan	2019			2020			2021			2022			2023		
		Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk
1	Kec. Asemrowo	3	3.228	0,09%	3	2.875	0,10%	12	3.257	0,37%	4	3.504	0,11%	0	3.523	0,00%
2	Kec. Benowo	4	4.392	0,09%	1	4.577	0,02%	1	3.475	0,03%	3	3.017	0,10%	6	5.112	0,02%
3	Kec. Bubutan	1	5.793	0,02%	3	5.567	0,05%	4	5.008	0,08%	5	4.212	0,12%	8	4.418	0,05%
4	Kec. Bulak	5	2.802	0,18%	2	2.774	0,07%	6	2.645	0,23%	4	2.458	0,16%	1	2.543	0,07%
5	Kec. Dukuh Pakis	3	3.148	0,10%	1	3.084	0,03%	6	2.167	0,28%	5	1.771	0,28%	3	2.505	0,05%
6	Kec. Gayungan	4	2.249	0,18%	1	2.210	0,05%	1	1.828	0,05%	3	1.501	0,20%	1	2.130	0,00%
7	Kec. Genteng	11	3.265	0,34%	7	3.211	0,22%	5	3.181	0,16%	1	2.850	0,04%	0	2.351	0,00%
8	Kec. Gubeng	0	7.592	0,00%	2	6.878	0,03%	1	6.056	0,02%	2	3.506	0,06%	3	5.950	0,04%
9	Kec. Gunung Anyar	0	4.087	0,00%	2	3.895	0,05%	0	3.383	0,00%	2	1.305	0,15%	2	2.543	0,00%
10	Kec. Jambangan	0	3.529	0,00%	2	3.479	0,06%	0	3.280	0,00%	0	1.838	0,00%	0	3.206	0,04%
11	Kec. Karang Pilang	5	4.372	0,11%	5	4.390	0,11%	0	4.552	0,00%	3	1.982	0,15%	3	4.050	0,49%
12	Kec. Kenjeran	15	14.034	0,11%	12	13.647	0,09%	8	10.635	0,08%	10	9.711	0,10%	8	10.884	0,03%
13	Kec. Krembangan	2	7.832	0,03%	4	7.480	0,05%	3	6.197	0,05%	11	6.068	0,18%	7	5.690	0,07%
14	Kec. Lakarsantri	4	4.158	0,10%	4	4.209	0,10%	5	2.857	0,18%	3	2.952	0,10%	3	3.722	0,09%
15	Kec. Mulyorejo	0	5.616	0,00%	4	5.513	0,07%	3	2.368	0,13%	1	2.158	0,05%	0	4.678	0,00%
16	Kec. Pabean Cantian	2	4.249	0,05%	1	4.195	0,02%	1	3.478	0,03%	2	3.980	0,05%	0	3.708	0,00%
17	Kec. Pakal	36	4.093	0,88%	20	3.895	0,51%	8	3.841	0,21%	2	3.793	0,05%	1	3.434	0,00%

No	Kecamatan	2019			2020			2021			2022			2023		
		Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk
18	Kec. Rungkut	8	7.163	0,11%	5	7.154	0,07%	2	5.186	0,04%	6	3.056	0,20%	12	5.146	0,16%
19	Kec. Sambikerep	5	3.400	0,15%	2	4.350	0,05%	4	3.317	0,12%	2	2.960	0,07%	4	3.995	0,1%
20	Kec. Sawahan	15	12.064	0,12%	21	11.869	0,18%	10	10.349	0,10%	3	10.046	0,03%	7	10.456	0,05%
21	Kec. Semampir	21	11.680	0,18%	10	11.719	0,09%	11	9.578	0,11%	12	8.537	0,14%	18	8.542	0,13%
22	Kec. Simokerto	8	3.626	0,22%	3	3.754	0,08%	7	4.887	0,14%	4	4.102	0,10%	5	4.254	0,1%
23	Kec. Sukolilo	3	6.845	0,04%	7	6.760	0,10%	1	4.759	0,02%	5	2.879	0,17%	1	5.190	0,03%
24	Kec. Sukomanunggal	59	6.405	0,92%	43	6.387	0,67%	22	5.558	0,40%	1	5.156	0,02%	0	5.340	0,02%
25	Kec. Tambaksari	6	11.963	0,05%	9	12.227	0,07%	6	10.767	0,06%	9	8.616	0,10%	8	10.103	0,05%
26	Kec. Tandes	4	6.263	0,06%	5	6.125	0,08%	2	5.864	0,03%	2	4.066	0,05%	0	4.951	0,00%
27	Kec. Tegalsari	7	5.646	0,12%	7	5.594	0,13%	12	3.960	0,30%	3	3.906	0,08%	1	5.187	0,00%
28	Kec. Tenggilis Mejoyo	0	3.058	0,00%	1	2.947	0,03%	0	2.714	0,00%	0	2.376	0,00%	6	2.827	0,41%
29	Kec. Wiyung	3	4.316	0,07%	1	4.324	0,02%	3	2.395	0,13%	6	3.132	0,19%	5	3.214	0,23%
30	Kec. Wonocolo	4	4.925	0,08%	3	4.959	0,06%	2	4.261	0,05%	1	4.262	0,02%	0	4.082	0,00%
31	Kec. Wonokromo	4	8.535	0,05%	5	7.995	0,06%	2	6.917	0,03%	8	6.413	0,12%	5	6.165	0,06%
Total		**242**	**180.328**	**0,13%**	**196**	**178.043**	**0,11%**	**148**	**148.720**	**0,10%**	**123**	**126.113**	**0,10%**	**118**	**149.899**	**0,08%**

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2024

Selain itu prevalensi balita gizi kurang pada tahun 2020 sebesar 8,21, berhasil diturunkan menjadi 1,98 pada akhir tahun 2023, seperti dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel II.32
Prevalensi Balita Gizi Kurang Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah balita dengan status gizi kurang	14.617	6.200	2.501	2.332	950
2	Jumlah balita yang ditimbang	178.043	148.720	126.113	149.899	148.917
3	Prevalensi balita gizi kurang (%)	8,21	4,17	1,98	1,56	1,56

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

Keberhasilan penurunan Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang ini didukung oleh pelaksanaan intervensi penurunan yang masif mulai dari penguatan skrining balita, optimalisasi pemantauan wilayah setempat (PWS) untuk bayi dan balita melalui Sistem Aplikasi Sayang Warga, pemanfaatan alat antropometri untuk pemantauan tumbuh kembang balita, hingga pemberian PKMK (Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus).

Di sisi lain, capaian indikator Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel II.33
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Ibu melahirkan yang meninggal	24	17	16	13	0
2	Kelahiran Hidup	41.814	40.158	40.012	39.891	36.208
3	AKI per 100.000 KH	57,40	42,33	39,99	32,59	0

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

Usaha Pemerintah Kota Surabaya dalam menurunkan AKI dan AKB secara signifikan ini terjadi dikarenakan adanya penguatan intervensi yang tepat sasaran, antara lain terkait upaya 1 puskesmas 1 dokter spesialis obgyn (1P 1O), pendampingan calon pengantin dan ibu hamil oleh Kader Surabaya Hebat (KSH) hingga PMT Lokal untuk Ibu Hamil KEK Risiko Tinggi dan pemberian permakanan Ibu Hamil KEK. Sedangkan dalam kasus kematian bayi, penyebab terbanyaknya adalah bayi berat lahir rendah (BBLR), asfiksia dan kelainan bawaan.

Tabel II.34
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah bayi lahir meninggal	208	199	174	161	2
2	Kelahiran Hidup	41.814	40.158	40.012	39.891	36.208
3	AKB per 1.000 KH	4,97	4,96	4,35	4,04	0,06

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

Dari data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Prevalensi Balita Gizi Buruk, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Balita gizi Buruk di Kota Surabaya telah mengalami penurunan setiap tahunnya, sedangkan prevalensi balita kurang gizi di bawah target bahkan capaiannya telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Meskipun capaiannya telah mencapai target yang telah ditetapkan, namun dari jumlah kasus kejadian masih cukup besar dan diupayakan menurun setiap tahunnya.

Selain permasalahan di atas, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah *stunting* (kerdil) di mana kondisi balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Balita *stunting* termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi.

Prevalensi Balita *Stunting* menunjukkan perkembangan yang makin baik dari tahun 2020 sebesar 7,18 persen menjadi hanya 0,66 persen pada tahun 2023. Hal ini tidak terlepas dari upaya pencegahan dan penurunan *stunting* yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Program pencegahan dan penanganan balita *stunting* termasuk balita gizi buruk dan gizi kurang di Kota Surabaya berjalan dengan baik, didukung dengan adanya pemanfaatan Kader Surabaya Hebat dalam melaksanakan monitoring dan pendampingan setiap balita yang mengalami gizi buruk dan gizi kurang, juga didukung dengan adanya sistem Aplikasi Sayang Warga yang memudahkan pendataan dan monitoring secara *realtime* perkembangan balita dari waktu ke waktu. Namun demikian, Pemerintah Kota Surabaya tetap berkomitmen meningkatkan pelayanan kesehatan guna mewujudkan *zero stunting* di Kota Surabaya, seperti dapat dilihat pada gambar berikut.

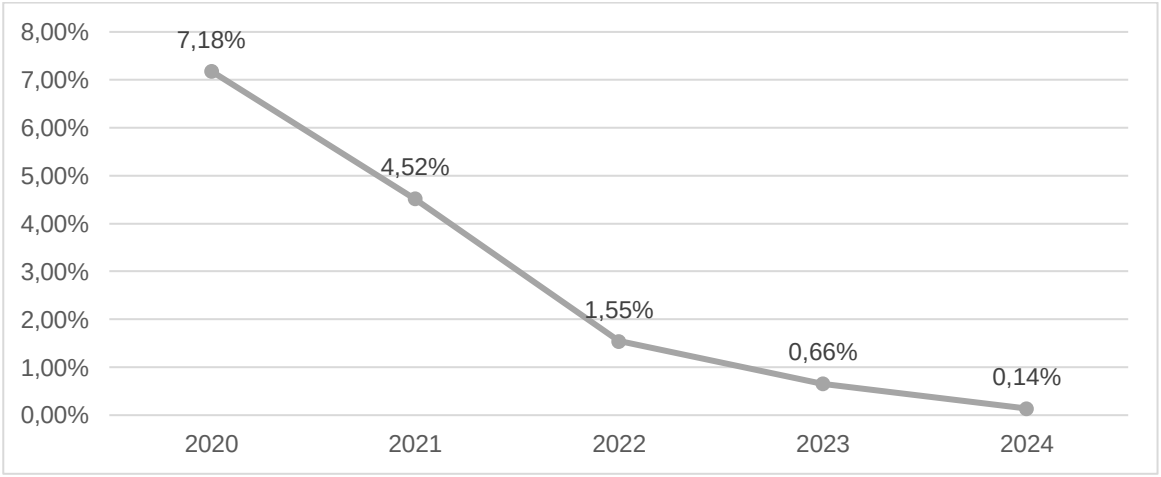

Gambar II.11 Prevalensi Balita *Stunting* Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

2.1.2.2.5 Ketenagakerjaan

Dengan semakin bertambahnya penduduk maka tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun hal ini belum diiringi dengan perkembangan lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2021 mempunyai tren meningkat dengan angka tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 yaitu sebesar 9,68 persen. Beberapa faktor yang menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran di Kota Surabaya antara lain faktor kependudukan yang terdiri dari jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi namun tidak dibekali dengan ketrampilan dan mental kerja, tingkat pendidikan rendah, tingkat urbanisasi yang tinggi serta faktor jumlah lapangan kerja yang terbatas, faktor tenaga kerja kontrak (*outsourcing*), dan faktor pemutusan hubungan kerja yang utamanya banyak terjadi ketika pandemi Covid-19 di tahun 2020-2021. Namun pada tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 6,76 persen, hal ini tidak terlepas dari peran Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi pengangguran akibat terjadinya pandemi Covid-19 dengan melakukan penguatan sektor UMKM, peningkatan kualitas SDM angkatan kerja melalui program pelatihan dan sertifikasi kompetensi, kepemulihan sektor pariwisata, dan program padat karya. Berikut adalah rekapitulasi data tentang tingkat pengangguran terbuka tahun 2019–2023.

Tabel II.35
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja	91.557	154.933	152.273	125.276	106.120
2	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	1.590.651	1.582.564	1.572.888	1.643.314	1.569.714
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	5,76	9,79	9,68	7,62	6,76

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2024

Jumlah angkatan kerja di Kota Surabaya mengalami penurunan dari tahun 2019 jumlah angkatan kerja di Kota Surabaya sebesar 1.590.651 menjadi 1.569.714 di tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2020, adanya pandemi Covid-19 berdampak pada naiknya TPT Kota Surabaya sampai dengan 9,79 persen. Rendahnya penyerapan tenaga kerja dan banyaknya karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja merupakan akibat dari terdampaknya perekonomian Kota Surabaya, Indonesia dan global secara umum karena pembatasan sosial dalam skala besar. Meski kondisi pandemi masih berlanjut di tahun 2021 dan 2022,

namun TPT Kota Surabaya dapat diturunkan menjadi 7,62 persen di akhir tahun 2022, sehingga pada Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2023 dilakukan penyesuaian target menjadi 5% dari semula pada RKPD Kota Surabaya Tahun 2023 sebesar 8,26%. Sementara itu, pada tahun 2023 TPT Kota Surabaya semakin menurun di angka 6,76%.

Tabel II.36
TPT Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019 – 2023

TPT	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Surabaya	5,76	9,79	9,68	7,62	6,76
Jawa Timur	3,82	5,84	5,74	5,49	4,88
Nasional	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32

Sumber data: BPS, 2023 (versi data Agustus).

Dalam kurun 5 tahun terakhir angka TPT Kota Surabaya cukup fluktuatif, utamanya disebabkan adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan 2021, meningkatkan jumlah pengangguran. Namun pada tahun 2022 dan 2023 angka TPT berhasil diturunkan cukup signifikan, meski belum mencapai di angka sebelum pandemi. Angka TPT di Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada periode yang sama juga mengalami hal serupa meski dengan derajat yang berbeda. Di tahun 2024, dengan masih fokusnya pemulihan ekonomi sebagai tema pembangunan, di antaranya melalui program padat karya dan penyelenggaraan *job fair*, tentu diharapkan dapat menurunkan kembali angka TPT di Kota Surabaya.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari proses pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi. Di samping itu, pembangunan seni, budaya dan olahraga juga dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan eksistensi bangsa melalui pembinaan prestasi yang setinggi-tingginya. Data perkembangan seni, budaya dan olahraga Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.37
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Capaian Pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Grup Kesenian	771	743	806	715	715
2	Jumlah Gedung Kesenian	4	4	4	4	4
3	Jumlah Klub Olahraga	42	42	45	49	58

No.	Capaian Pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024
4	Jumlah Gedung Olahraga	4	5	5	5	5

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2024

Dasar pembangunan seni budaya tentu adalah minat masyarakat kota Surabaya terhadap seni budaya itu sendiri, terutama minat akan budaya lokal. Salah satu wadah untuk menyalurkan minat terhadap budaya lokal adalah melalui kelompok/grup kesenian. Jumlah grup kesenian yang ada di Kota Surabaya tahun 2020 sebanyak 771 grup kesenian, dan sampai dengan triwulan 2 tahun 2024 jumlah grup kesenian yang ada di Kota Surabaya tercatat berkurang menjadi 715 grup kesenian, yang di dalamnya termasuk seniman dan budayawan sebanyak 872 orang. Pembinaan seni dan budaya juga dilakukan dengan kegiatan pelatihan dan pelaksanaan penampilan/pertunjukan seni di ruang publik. Adapun even pertunjukan seni dan budaya yang diadakan di antaranya Festival Rujak Uleg, Parade Surabaya Juang, Sedekah Bumi, Festival Cipta Karya Tari, Festival Seni Lintas Budaya, Surabaya Vaganza, *Night At The Museum*, Surabaya *Art & Culture* Festival, Pemilihan Duta Wisata Cak dan Ning Suroboyo serta fasilitasi tampilan seni di ruang-ruang publik lainnya.

Selain itu, dalam melestarikan budaya lokal, dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam memahami dan menciptakan rasa memiliki disertai kepedulian terhadap nilai-nilai kebangsaan. Hal ini diukur dalam indeks budaya lokal yang dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dari hasil survei tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal, serta tingkat kepedulian masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan bernilai kebangsaan. Adapun pencapaian indeks budaya lokal pada tahun 2019 hingga 2023, dapat dilihat pada gambar berikut.

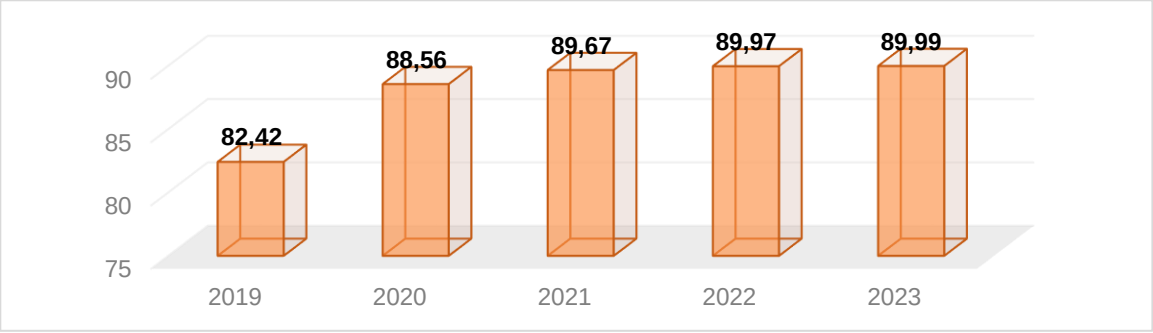

Gambar II.12 Perkembangan Indeks Budaya Lokal Tahun 2019–2023

Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2024

Pencapaian Indeks Budaya Lokal Kota Surabaya tahun 2023 realisasinya 89,99%. Angka realisasi tersebut terus meningkat dari realisasi tahun 2019 sebesar

82,42%. Peningkatan Indeks Budaya Lokal tersebut menunjukkan penguatan nilai-nilai budaya lokal yang semakin membaik.

Jumlah cabang olahraga yang dibina sampai dengan tahun 2023 sebanyak 49 cabang olahraga. Pada tahun 2023, jumlah prestasi atlet di tingkat regional, nasional dan/atau internasional sebanyak 398 prestasi dengan total medali yang diraih sebanyak 1.389 medali dari 781 atlet yang dikirim ke kejuaraan skala provinsi, nasional dan internasional. Dengan keterbatasan even kejuaraan pada tahun 2022 akibat pandemi Covid-19, capaian tersebut cukup memuaskan. Untuk memberikan fasilitasi pembinaan cabang olahraga tersebut, diperlukan gedung olahraga yang baik dan memadai. Sampai dengan tahun 2023, gedung olahraga yang merupakan aset milik Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 5 unit antara lain Gelanggang Remaja, Gelora 10 Nopember, Gelora Bung Tomo, dan gedung indoor *Surabaya Sport Center* (SSC), serta Gelora Pancasila. Selain itu, lapangan olahraga juga tersebar di permukiman penduduk maupun sekolah-sekolah, baik itu lapangan olahraga yang dibangun pemerintah kota maupun milik swasta. Sampai dengan tahun 2023 lapangan olahraga yang telah dibangun oleh pemerintah Kota Surabaya berjumlah 618 lapangan terdiri dari lapangan berbagai macam cabang olahraga termasuk olahraga renang dan panjat tebing. Pembinaan atlet juga dilakukan melalui kegiatan pendampingan, pemusatan latihan dan pelaksanaan even kejuaraan tingkat kota seperti Piala Walikota.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Pemenuhan standar pelayanan minimal untuk tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel II.38
Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kota Surabaya Tahun 2023

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
URUSAN PENDIDIKAN KOTA SURABAYA						**99,68%**
1	**Pendidikan Anak Usia Dini**					**99,34%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang terlayani	yang belum terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	Orang	90.917	90.917	0	100%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19,34%**
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Capaian
	1. Angka partisipasi sekolah	%	100	100	0	100%
	2. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	37,36	47,01	-9,65	100%
	3. Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	79,58	55,85	23,73	70,18%
	4. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	0,42	0,44	-0,02	100%
	5. Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	0	100%
	6. Indeks distribusi guru	%	100	100	0	100%
	7. Proporsi PTK bersertifikat	%	24,94	29,7	-4,76	100%
	8. Proporsi PTK penggerak	%	2,2	3,33	-1,13	100%
	9. Pengalaman pelatihan guru	%	100	100	0	100%
2	**Pendidikan Dasar**					**99,69%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Capaian
	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	Orang	440.149	440.149	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19,69%**
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM		Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Capaian
	SD					
	1. Angka partisipasi kasar	%	103,78	103,91	-0,13	100%
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	100	0	100%
	3. Angka partisipasi murni	%	98,81	95,02	3,79	96,16%
	4. Kemampuan literasi	Nilai	65,76	83,93	-18,17	100%
	5. Kemampuan numerasi	Nilai	47,13	65,63	-18,5	100%
	6. Perbedaan Skor Literasi	Nilai	1,86	1,86	0	100%
	7. Perbedaan Skor numerasi	Nilai	0,76	0,76	0	100%
	8. Indeks iklim keamanan	Nilai	76,53	72,99	3,54	95,37%
	9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	67,36	64,57	2,79	95,86%
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	52,06	50,91	1,15	97,79%
	11. Indeks distribusi guru	%	61,77	60,43	1,34	97,83%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	23,52	29,79	-6,27	100%
	13. Proporsi PTK penggerak	%	5,96	7,59	-1,63	100%
	14. Pengalaman pelatihan guru	%	100	100	0	100%
	SMP					
	1. Angka partisipasi kasar	%	99,01	106,27	-7,26	100%
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	100	0	100%
	3. Angka partisipasi murni	%	87,34	95,82	-8,48	100%
	4. Kemampuan literasi	Nilai	78,51	87,07	-8,56	100%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	5. Kemampuan numerasi	Nilai	77,76	69,24	8,52	89,04%
	6. Perbedaan skor literasi	Nilai	5,71	5,71	0	100%
	7. Perbedaan skor numerasi	Nilai	1,3	1,3	0	100%
	8. Indeks iklim keamanan	Nilai	76	72,66	3,34	95,61%
	9. Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas	%	66,03	58,91	7,12	89,22%
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	52,61	69,22	-16,61	100%
	11. Indeks distribusi guru	%	62,32	77,57	-15,25	100%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	45,15	48,26	-3,11	100%
	13. Proporsi PTK penggerak	%	8,06	10,78	-2,72	100%
	14. Pengalaman pelatihan guru	%	100	100	0	100%
3	**Pendidikan Kesetaraan**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan	Orang	4.749	4.749	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Capaian
	1. Angka partisipasi kasar	%	100	100	0	100%
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	100	0	100%
	6. Perbedaan skor literasi	Nilai	5,04	5,04	0	100%
	7. Perbedaan skor numerasi	Nilai	2,35	2,35	0	100%
	11. Indeks distribusi guru	%	100	100	0	100%
	14. Pengalaman pelatihan guru	%	100	100	0	100%
URUSAN KESEHATAN KOTA SURABAYA						**99,97%**
1	**Pelayanan kesehatan ibu hamil**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	44.057	44.057	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	4.406	4.406	0	100%
	2. Tablet tambah darah	Tablet	3.965.130	3.965.130	0	100%
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	44.057	44.057	0	100%
	4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	44.057	44.057	0	100%
	5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	44.057	44.057	0	100%
	6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	6.609	6.609	0	100%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	7. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	44.057	44.057	0	100%
	8. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	32.619	32.619	0	100%
	9. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang	3.606	3.606	0	100%
	10. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.812	1.812	0	100%
	11. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.389	10.389	0	100%
	12. Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	Orang	44.057	44.057	0	100%
2	**Pelayanan kesehatan ibu bersalin**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan	Orang	41.893	41.893	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Formulir Partograf	Formulir	41.893	41.893	0	100%
	2. Kartu ibu (rekam medis)	Paket	44.057	44.057	0	100%
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	32.619	32.619	0	100%
	4. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang	3.606	3.606	0	100%
	5. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.812	1.812	0	100%
	6. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.389	10.389	**0**	**100%**
3	**Pelayanan kesehatan bayi baru lahir**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan	Orang	41.804	41.804	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Vaksin Hepatitis B0	Vaksin	41.804	41.804	0	100%
	2. Vitamin K1 injeksi	Ampul	41.804	41.804	0	100%
	3. Salep/tetes mata antibiotik	Orang	41.804	41.804	0	100%
	4. Formulir bayi baru lahir	Formulir	41.804	41.804	0	100%
	5. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang	125.412	125.412	0	100%
	6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	32.619	32.619	0	100%
	7. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang	3.588	3.588	0	100%
	8. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.812	1.812	0	100%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	9. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.389	10.389	0	100%
4	**Pelayanan Kesehatan Balita**					**99,65%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**79,76%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	164.508	164.023	485	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19,46%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	164.508	164.023	485	99,71%
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	164.508	164.023	485	99,71%
	3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku	32.619	32.619	0	100%
	4. Vitamin A Biru	Kapsul	33.117	30.186	2.931	91,15%
	5. Vitamin A Merah	Kapsul	131.030	126.402	4.628	96,47%
	6. Vaksin imunisasi dasar: HBO	Vaksin	41.020	41.020	0	100%
	7. Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	13.460	13.460	0	100%
	8. Vaksin imunisasi dasar: Polio	Orang	41.388	41.388	0	100%
	9. Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	10.282	10.282	0	100%
	10. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	10.345	10.345	0	100%
	11. Vaksin imunisasi dasar: Campak	Vaksin	10.359	10.359	0	100%
	12. Vaksin imunisasi dasar: Rubella	Vaksin	10.359	10.359	0	100%
	13. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	10.497	10.497	0	100%
	14. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	Vaksin	10.513	10.513	0	100%
	15. Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	Vaksin	10.513	10.513	0	100%
	16. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	786.722	786.722	0	100%
	17. Peralatan Anafilaktik	Paket	11.654	11.654	0	100%
	18. Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	3.588	3.588	0	100%
	19. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.812	1.812	0	100%
	20. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.389	10.389	0	100%
	21. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	492	492	0	100%
	22. Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	28.256	28.256	0	100%
	23. Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	Orang	11.943	11.943	0	100%
5	**Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar**					**100%**

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan		398.238	398.238	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Buku raport kesehatanku	Buku	398.238	398.238	0	100%
	2. Buku pemantauan kesehatan	Buku	65	65	0	100%
	3. Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	398.238	398.238	0	100%
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Dokumen	756	756	0	100%
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	756	756	0	100%
	6. Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang	3.283	3.283	0	100%
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.812	1.812	0	100%
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.389	10.389	0	100%
	9. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	492	492	0	100%
	10. Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang	291	291	0	100%
	11. Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	28.256	28.256	0	100%
	12. Tenaga Non kesehatan : Guru	Orang	25.764	25.764	0	100%
6	**Pelayanan kesehatan pada usia produktif**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	2.155.512	2.155.512	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	126	126	0	100%
	2. Alat ukur berat badan	Unit	780	780	0	100%
	3. Alat : Alat ukur tinggi badan	Unit	780	780	0	100%
	4. Alat : Alat ukur lingkar perut	Unit	780	780	0	100%
	5. Alat : Tensimeter	Unit	780	780	0	100%
	6. Alat : Glukometer	Unit	2.173	2.173	0	100%
	7. Alat : Tes strip gula darah	Unit	19.293	19.293	0	100%
	8. Alat : Lancet	Unit	8.900	8.900	0	100%
	9. Alat : Kapas alkohol	Unit	7.197	7.197	0	100%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	10. Alat : KIT IVA Tes	Unit	63	63	0	100%
	11. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	756	756	0	100%
	12. Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	3.283	3.283	0	100%
	13. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.812	1.812	0	100%
	14. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.389	10.389	0	100%
	15. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	492	492	0	100%
	16. Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	291	291	0	100%
	17. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	27.489	27.489	0	100%
7	**Pelayanan kesehatan pada usia lanjut**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	326.681	326.681	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Paket	326.681	326.681	0	100%
	2. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Paket	326.681	326.681	0	100%
	3. Buku kesehatan lansia	Buku	43.025	43.025	0	100%
	4. Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	3.672	3.672	0	100%
	5. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.812	1.812	0	100%
	6. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.389	10.389	0	100%
	7. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	492	492	0	100%
	8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	291	291	0	100%
	9. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	27.489	27.489	0	100%
8	**Pelayanan kesehatan penderita hipertensi**					100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80,00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani **:**		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan		761.441	761.441	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	126	126	0	100%
	2. Tensimeter	Unit	780	780	0	100%
	3. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	756	756	0	100%
	4. Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	3.672	3.672	0	100%
	5. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.812	1.812	0	100%
	6. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.389	10.389	0	100%
	7. Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	291	291	0	100%
	8. Obat Hipertensi	Paket	761.441	761.441	0	100%
9	**Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	113.970	113.970	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Alat : Glukometer	Unit	2.173	2.173	0	100%
	2. Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit	19.293	19.293	0	100%
	3. Alat : Kapas Alkohol	Unit	7.197	7.197	0	100%
	4. Alat : Lancet	Unit	8.900	8.900	0	100%
	5. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	756	756	0	100%
	6. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	126	126	0	100%
	7. Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	3.283	3.283	0	100%
	8. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.812	1.812	0	100%
	9. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.389	10.389	0	100%
	10. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	492	492	0	100%
	11. Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	291	291	0	100%
	12. Obat Diabetes Melitus	Paket	113.970	113.970	0	100%
10	**Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan	Orang	5.766	5.766	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	63	63	0	100%
	2. Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Paket	3	3	0	100%
	3. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Orang	756	756	0	100%
	4. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	63	63	0	100%
	5. Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	63	63	0	100%
	6. Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang	63	63	0	100%
	7. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	63	63	0	100%
11	**Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga Negara terduga tubercolusis yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	89.139	89.139	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19,68%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media	63	63	0	100%
	2. Reagen Zn TB	Paket	1.783	1.783	0	100%
	3. Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Paket	8.976	8.976	0	100%
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	10.138	10.138	0	100%
	5. Catridge tes cepat molekuler	Paket	69.610	69.610	0	100%
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	63	63	0	100%
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	63	63	0	100%
	8. Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	3.799	3.799	0	100%
	9. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.389	10.389	0	100%
	10. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	912	912	0	100%
	11. Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	Orang	442	442	0	100%
	12. Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	291	291	0	100%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	13. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	27.489	27.489	0	100%
12	**Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan Layanan Kesehatan	Orang	66.001	66.001	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	66.001	66.001	0	100%
	2. Tes cepat HIV (RDT) pertama	Paket	60.175	60.175	0	100%
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	66.001	66.001	0	100%
	4. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	63	63	0	100%
	5. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	3.797	3.797	0	100%
	6. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.389	10.389	0	100%
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.812	1.812	0	100%
	8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	912	912	0	100%
	9. Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	291	291	0	100%
	10. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	27.489	27.489	0	100%
URUSAN PEKERJAAN UMUM KOTA SURABAYA						**97,88%**
1	**Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari**					**98,49%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**79,88%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari	Orang	2.913.208	2.913.208	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**18,61%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	1. Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah/ SR	609.486	610.219	-733	100,12%
	2. Jaringan Perpipaan	Sambungan Rumah/ SR	609.486	610.219	-733	100,12%
2	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik**					**97,28%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**79,69%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Orang	2.880.284	2.880.284	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**17,59%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	577.832	577.832	0	100%
	2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	5.110	5.110	0	100%
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT KOTA SURABAYA						**100%**
1	**Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni		Tidak Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/ kota	1	1	0	100%
2	**Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. **Jumlah yang Harus Dilayani :**		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase Capaian

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
			344	344	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan		39	39	0	100%
	2. Subsidi Uang Sewa		-	-	-	-
	3. Penyediaan rumah layak huni		95	95	0	100%
URUSAN TRANTIBUM KOTA SURABAYA						**100%**
1	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
			1.150	1.150	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	284	284	0	100%
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	46	46	0	100%
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	978	978	0	100%
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	0	0	0	0%
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0	0	0	0%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0	0	0	0%
2	**Pelayanan Informasi Rawan bencana**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase Capaian
			732.605	732.605	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1	1	0	100%
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	730.728	730.728	0	100%
	3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	1.877	1.877	0	100%
	4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	1	1	0	100%
3	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase Capaian
			500	500	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana	unit	7	7	0	100%
	2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	500	500	0	100%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
4	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase Capaian
			1.060	1.060	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	1.060	1.060	0	100%
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	1.060	1.060	0	100%
	3. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	431	431	0	100%
	4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	431	431	0	100%
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	1.060	1.060	0	100%
5	**Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**					**99,03%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase Capaian
			793	793	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19,03%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	793	793	0	100%
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	21	21	0	100%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	uinit	24	23	1	95.83%
	4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	810	768	42	94.81%
	5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	793	793	0	100%
	6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	112	112	0	100%
URUSAN SOSIAL KOTA SURABAYA						**100%**
1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	orang	56	56	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	1	1	0	100%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	5	5	0	100%
	3. Penyediaan permakanan	Orang	56	56	0	100%
	4. Penyediaan sandang	Orang	56	56	0	100%
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	7	7	0	100%
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	56	56	0	100%
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	56	56	0	100%
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	2	2	0	100%
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	56	56	0	100%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	56	56	0	100%
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2	2	0	100%
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2	2	0	100%
	13. Layanan rujukan	Orang	7	7	0	100%
2	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang	91	91	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	1	1	0	100%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	5	5	0	100%
	3. Penyediaan permakanan	Orang	91	91	0	100%
	4. Penyediaan sandang	Orang	91	91	0	100%
	5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	91	91	0	100%
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	91	91	0	100%
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	3	3	0	100%
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	91	91	0	100%
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	91	91	0	100%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	3	3	0	100%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	3	3	0	100%
	12. Layanan rujukan	Orang	1	1	0	100%
3	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang	221	221	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	1	1	0	100%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	5	5	0	100%
	3. Penyediaan permakanan	Orang	221	221	0	100%
	4. Penyediaan sandang	Orang	221	221	0	100%
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	27	27	0	100%
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	221	221	0	100%
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	221	221	0	100%
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	Orang	5	5	0	100%
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	Orang	221	221	0	100%
	10. Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	Orang	39	39	0	100%
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	5	5	0	100%
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	5	0	100%
	13. Layanan rujukan	Orang	8	8	0	100%
4	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Orang	1217	1217	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	1	1	0	100%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	5	5	0	100%
	3. Penyediaan permakanan	Orang	1217	1217	0	100%
	4. Penyediaan sandang	Orang	1217	1217	0	100%
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1217	1217	0	100%
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1217	1217	0	100%
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	374	374	0	100%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	546	546	0	100%
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	113	113	0	100%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	260	260	0	100%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	490	490	0	100%
	12. Layanan rujukan	Orang	839	839	0	100%
5	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota		810	810	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM)		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota	1	1	0	100%

Sumber: Sekretariat Daerah, 2024

Meski SPM Kota Surabaya Tahun 2023 secara rata-rata pada 6 urusan tercapai 99,67% (meningkat dari tahun 2022 yang tercapai 99,14%), namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki, di antaranya adalah diperlukannya perbaikan komunikasi dan kerjasama antar perangkat instansi pemerintahan, baik di internal Pemerintah Kota Surabaya maupun dengan instansi pemerintahan lainnya.

2.1.3.1.1 Pendidikan

Untuk mewujudkan SDM yang berkualitas, salah satunya dilakukan melalui pelayanan bidang pendidikan yang merupakan pelayanan dasar. Kota Surabaya menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan dasar

tersebut kepada seluruh warga, khususnya di bidang pendidikan. Pada tahun 2023, Kota Surabaya mencapai target 100% di hampir semua indikator SPM Bidang Urusan Pendidikan. Pencapaian ini tidak lepas dari kerja sama yang baik antara Pemerintah Kota, tenaga pendidik dan kependidikan, serta berbagai pemangku kepentingan. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan komitmen pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas pendidikan tetapi juga menunjukkan efektivitas program dan kebijakan serta inovasi yang telah diterapkan.

Tabel II.39
Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2021 – 2023

No.	Jenis Layanan SPM	2021	2022	2023
1	Pendidikan Anak Usia Dini	100%	97,15%	99,34%
2	Pendidikan Dasar	100%	99,83%	99,69%
3	Pendidikan Kesetaraan	100%	98,65%	100%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 2024

Meski demikian, beberapa indikator masih perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Surabaya. Salah satunya pada jenjang Pendidikan PAUD adalah pertumbuhan pendidik PAUD dengan kualifikasi S1 yang masih berada pada angka 70,18%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian pendidik PAUD belum memiliki kualifikasi pendidikan yang diharapkan. Pemerintah Kota Surabaya berupaya meningkatkan kualifikasi pendidik PAUD dengan memberikan beasiswa S1 untuk tenaga pendidik PAUD. Selain itu, indeks distribusi guru SD yang hanya mencapai 97,84% menunjukkan bahwa masih adanya ketimpangan dalam distribusi guru di berbagai wilayah di Kota Surabaya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Peningkatan indeks distribusi guru diupayakan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan memanfaatan program kemitraan dengan Perguruan Tinggi melalui program Surabaya Mengajar, Program Pendidikan Profesi Guru, Mahasiswa Kampus Mengajar serta pengangkatan guru melalui seleksi ASN PPPK formasi umum.

Di samping itu, kemampuan numerasi siswa SMP yang tercatat pada angka 89,04% juga masih memerlukan perhatian khusus untuk memastikan bahwa semua siswa mencapai kompetensi minimum yang diharapkan. Hal ini diintervensi dengan penyediaan rumah matematika di Kota Surabaya. Terakhir, angka partisipasi murni dalam pendidikan kesetaraan yang masih berada di angka 80% menandakan bahwa terdapat sebagian warga yang belum terlayani secara optimal dalam program pendidikan kesetaraan, yang dapat berdampak pada kesempatan

mereka untuk memperoleh pendidikan yang setara dengan jenjang pendidikan formal.

2.1.3.1.1.1 Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Data APM per kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.40
Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Per Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	APM SD/MI			APM SMP/MTS		
	Penduduk usia 7-12 tahun	Siswa SD/MI yang berusia 7-12 tahun	APM	Penduduk usia 13-15 tahun	Siswa SMP/MTs yang berusia 13-15 tahun	APM
Asemrowo	5.044	4.172	82,71%	2.546	1.855	72,86%
Benowo	7.459	6.841	91,71%	3.832	3.760	98,12%
Bubutan	9.257	8.541	92,27%	4.708	2.039	43,31%
Bulak	4.771	6.046	126,72%	2.461	2.737	111,21%
Dukuh Pakis	5.694	5.945	104,41%	2.786	3.818	137,04%
Gayungan	4.135	5.397	130,52%	2.144	2.434	113,53%
Genteng	5.420	5.762	106,31%	2.802	5.604	200,00%
Gubeng	11.826	12.849	108,65%	6.120	4.858	79,38%
Gunung Anyar	6.105	4.781	78,31%	2.965	2.174	73,32%
Jambangan	5.466	4.999	91,46%	2.682	4.131	154,03%
Karangpilang	7.162	6.119	85,44%	3.479	3.311	95,17%
Kenjeran	19.316	17.608	91,16%	9.541	9.779	102,49%
Krembangan	11.449	12.494	109,13%	5.799	8.036	138,58%
Lakarsantri	6.255	8.734	139,63%	3.223	5.124	158,98%
Mulyorejo	8.022	10.442	130,17%	4.012	6.312	157,33%
Pabean Cantian	7.175	4.213	58,72%	3.749	1.650	44,01%
Pakal	6.188	7.324	118,36%	3.142	3.560	113,30%
Rungkut	11.899	10.861	91,28%	5.761	5.208	90,40%
Sambikerep	6.587	6.702	101,75%	3.311	4.561	137,75%
Sawahan	18.843	14.537	77,15%	9.696	4.854	50,06%
Semampir	19.730	18.945	96,02%	9.801	5.768	58,85%
Simokerto	9.113	6.688	73,39%	4.485	3.565	79,49%
Sukolilo	11.056	12.033	108,84%	5.505	7.625	138,51%
Sukomanunggal	10.201	9.853	96,59%	4.963	6.522	131,41%
Tambaksari	21.477	16.236	75,60%	10.984	6.569	59,81%
Tandes	9.158	10.751	117,39%	4.775	3.786	79,29%
Tegalsari	9.241	9.215	99,72%	4.722	2.838	60,10%
Tenggilis Mejoyo	5.520	5.074	91,92%	2.828	2.906	102,76%

Kecamatan	APM SD/MI			APM SMP/MTS		
	Penduduk usia 7-12 tahun	Siswa SD/MI yang berusia 7-12 tahun	APM	Penduduk usia 13-15 tahun	Siswa SMP/MTs yang berusia 13-15 tahun	APM
Wiyung	7.060	6.769	95,88%	3.469	3.030	87,35%
Wonocolo	7.595	7.250	95,46%	3.891	5.119	131,56%
Wonokromo	14.005	10.677	76,24%	7.412	8.415	113,53%
Total	**292.229**	**277.858**	**95,08%**	**147.594**	**141.948**	**96,17%**

Sumber: Dinas Pendidikan, diolah, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa aksesibilitas layanan pendidikan sudah baik namun perlu dilakukan upaya pemerataan fasilitas layanan pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

2.1.3.1.1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Data APK per kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Dari data di bawah terdapat beberapa kecamatan yang memiliki APK lebih dari 100%, kondisi ini menunjukkan bahwa di wilayah tersebut jumlah sekolah lebih banyak dari wilayah lain dan sekolah-sekolahnya memiliki kualitas lebih baik, sehingga menjadi tujuan bagi penduduk usia sekolah di wilayah kecamatan lainnya untuk bersekolah di wilayah tersebut. Sebaliknya kecamatan yang memiliki APK 100% menunjukkan kondisi bahwa di wilayah kecamatan tersebut ketersediaan atau jumlah sekolah sedikit dan kualitas sekolah masih kurang sehingga menyebabkan penduduk usia sekolah cenderung memilih bersekolah di luar wilayah kecamatan. Aspek yang mendorong tingginya nilai APK dan APM adalah sarana prasarana, fasilitas, kualitas tenaga pendidik dan penerapan kurikulum.

Tabel II.41
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	APK PAUD			APK SD/MI			APK SMP/MTS		
	Penduduk usia 3-6 tahun	Siswa di jenjang PAUD	APK	Penduduk usia 7-12 tahun	Siswa di jenjang SD/MI	APK	Penduduk usia 13-15 tahun	Siswa di jenjang SMP/MTS	APK
Asemrowo	3.433	1.691	49,69%	5.044	4.730	76,29%	2.546	2.142	58,73%
Benowo	4.479	2.970	67,66%	7.459	7.940	88,27%	3.832	4.315	83,54%
Bubutan	5.750	3.040	52,84%	9.257	9.880	87,19%	4.708	2.384	36,66%
Bulak	3.066	1.852	60,32%	4.771	6.984	121,13%	2.461	3.095	95,31%
Dukuh Pakis	3.400	2.471	70,80%	5.694	6.790	98,37%	2.786	4.479	114,39%
Gayungan	2.470	1.507	61,11%	4.135	6.264	123,96%	2.144	2.824	94,49%
Genteng	3.229	2.295	71,12%	5.420	6.758	101,95%	2.802	6.518	164,77%
Gubeng	7.166	4.395	62,16%	11.826	14.958	101,46%	6.120	5.573	62,70%
Gunung Anyar	3.755	2.820	73,72%	6.105	5.473	72,74%	2.965	2.509	59,15%
Jambangan	3.309	1.742	50,98%	5.466	5.701	86,81%	2.682	4.697	128,00%
Karangpilang	4.472	2.907	65,01%	7.162	7.070	81,84%	3.479	3.801	76,90%
Kenjeran	12.782	6.285	50,06%	19.316	20.382	88,37%	9.541	11.309	86,41%
Krembangan	7.109	3.884	53,81%	11.449	14.291	103,24%	5.799	9.238	117,81%
Lakarsantri	3.942	2.678	66,50%	6.255	9.949	130,04%	3.223	5.953	130,40%
Mulyorejo	4.911	4.268	85,73%	8.022	11.916	119,93%	4.012	7.290	128,64%
Pabean Cantian	4.658	1.857	40,59%	7.175	4.857	54,83%	3.749	1.895	37,22%
Pakal	3.898	2.778	72,07%	6.188	8.517	114,11%	3.142	4.051	94,99%
Rungkut	7.209	4.775	63,85%	11.899	12.601	87,63%	5.761	5.949	77,31%
Sambikerep	4.092	2.322	57,15%	6.587	7.561	93,61%	3.311	5.219	114,70%
Sawahan	11.090	5.529	49,77%	18.843	17.010	71,95%	9.696	5.487	40,69%
Semampir	12.631	5.362	43,05%	19.730	21.844	90,39%	9.801	6.623	50,29%

Kecamatan	APK PAUD			APK SD/MI			APK SMP/MTS		
	Penduduk usia 3-6 tahun	Siswa di jenjang PAUD	APK	Penduduk usia 7-12 tahun	Siswa di jenjang SD/MI	APK	Penduduk usia 13-15 tahun	Siswa di jenjang SMP/MTS	APK
Simokerto	5.641	3.725	68,45%	9.113	7.698	69,64%	4.485	4.078	65,33%
Sukolilo	6.863	4.326	60,78%	11.056	13.868	104,71%	5.505	8.690	114,95%
Sukomanunggal	6.218	3.990	62,57%	10.201	11.328	90,99%	4.963	7.547	110,22%
Tambaksari	12.970	7.053	52,95%	21.477	19.193	71,99%	10.984	7.548	49,59%
Tandes	5.314	4.275	80,66%	9.158	12.457	110,12%	4.775	4.308	65,76%
Tegalsari	5.509	2.878	51,70%	9.241	10.729	94,22%	4.722	3.256	52,02%
Tenggilis Mejoyo	3.506	2.231	61,72%	5.520	5.869	85,89%	2.828	3.341	84,80%
Wiyung	4.286	2.997	69,18%	7.060	7.713	91,70%	3.469	3.544	72,17%
Wonocolo	4.763	2.581	55,54%	7.595	8.432	88,98%	3.891	5.890	113,39%
Wonokromo	8.433	4.514	53,13%	14.005	12.365	70,78%	7.412	9.581	91,16%
Total	**180.354**	**105.998**	**58,77%**	**292.229**	**321.128**	**109,89%**	**147.594**	**163.134**	**110,53%**

Sumber: Dinas Pendidikan, 2023 diolah

2.1.3.1.1.3 Angka Kelulusan (AL)

Angka Kelulusan (AL) dihitung berdasarkan jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan yang lulus dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir. AL untuk jenjang SD/MI tahun 2019 mencapai angka 100 persen dan konsisten sebesar 100 persen sampai dengan tahun 2023. Sedangkan AL untuk jenjang SMP/MTs tahun 2019 sebesar 100 persen, dan konsisten sebesar 100 persen sampai dengan akhir tahun 2023. Perkembangan Angka Kelulusan jenjang pendidikan dasar Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.42
Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Tahun 2019 – 2023

No.	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	AL SD/MI (persen)	100	100	100	100	100
1.1	Jumlah Siswa SD/MI yang Lulus	46.127	41.677	41.182	44.039	44.930
1.2	Jumlah Siswa SD/MI Kelas 6	46.127	41.677	41.182	44.039	44.930
2.	AL SMP/MTs (persen)	100	100	100	100	100
2.1	Jumlah Siswa SMP/MTs yang Lulus	40.965	38.403	37.413	38.131	40.218
2.2	Jumlah Siswa SMP/MTs Kelas 9	40.965	38.403	37.413	38.131	40.218

Sumber: Dinas Pendidikan, 2024

Kelulusan siswa ditentukan oleh masing-masing sekolah, alat ukur kelulusan tidak lagi berdasarkan Nilai Ujian Nasional, akan tetapi juga ditentukan poses pembelajaran dan prestasi siswa selama bersekolah di jenjang masing-masing.

2.1.3.1.1.4 Angka Putus Sekolah (APS)

Angka Putus Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah anak-anak usia sekolah yang sudah tidak lagi bersekolah atau yang tidak menamatkan pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok usia sekolah. Jadi semakin rendah APS, maka kondisi pendidikan menjadi semakin baik. Saat ini, penyebab utama putus sekolah lebih disebabkan karena kurangnya kesadaran orang tua maupun anak yang bersangkutan akan pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan, baik karena dari dalam diri anak yang bersangkutan merasa malas untuk pergi ke sekolah, terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang tidak mendukung untuk menempuh pendidikan, maupun karena menikah sehingga tidak lagi menganggap pendidikan sebagai prioritas.

Pada tahun 2020 APS di jenjang SD/MI sebesar 0% dan konsisten sampai

dengan triwulan pertama tahun 2024. Begitu pula dengan APS SMP/MTs pada tahun 2020 sebesar 0% dan konsisten sampai dengan triwulan pertama tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada anak putus sekolah jenjang pendidikan dasar di Kota Surabaya yang tidak ditangani dengan menyekolahkan kembali dan mendampingi hingga tuntas masa pendidikannya. Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.43
Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	APS SD/MI (persen)	0	0	0	0	0
1.1.	Jumlah Siswa putus sekolah di jenjang SD/MI	0	0	0	0	0
1.2.	Jumlah Siswa SD/MI	312.873	317.885	313.505	321.128	292.229
2.	APS SMP/MTs (persen)	0	0	0	0	0
2.1.	Jumlah Siswa putus sekolah di jenjang SMP/MTs	0	0	0	0	0
2.2.	Jumlah Siswa SMP/MTs	143.329	156.083	160.764	163.134	147.594

Sumber: Dinas Pendidikan, 2024

Pada tahun 2020, APS di jenjang SD/MI sebesar 0% dan konsisten sampai dengan triwulan pertama tahun 2024. Begitu pula dengan APS SMP/MTs pada tahun 2020 sebesar 0% dan konsisten sampai dengan triwulan pertama tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada anak putus sekolah jenjang pendidikan dasar di Kota Surabaya yang tidak ditangani dengan menyekolahkan kembali dan mendampingi hingga tuntas masa pendidikannya.

2.1.3.1.1.5 Rasio Ketersediaan Sekolah dibanding Penduduk Usia Sekolah

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan faktor penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan sekolah, kelas ataupun guru. Dengan demikian jika ketersediaan ruang kelas dan guru pengajar masih kurang memadai maka dibutuhkan perhatian untuk memperlancar proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar.

Data ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (triwulan 2) disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.44
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio Ketersediaan SD/MI	1:325	1:358	1:358	1:355	1:355
1.1.	Jumlah gedung sekolah	857	831	823	823	823
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	278.601	297.369	294.723	292.229	292.229
2.	Rasio Ketersediaan SMP/MTs	1:357	1:372	1:371	1:387	1:387
2.1.	Jumlah gedung sekolah	413	399	399	381	381

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	147.458	148.573	148.205	147.594	147.594

Sumber : Dinas Pendidikan, 2024

Tabel II.45
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2024 (TW II)

Kecamatan	SD/MI					SMP/MTs				
	Jumlah SD	Jumlah MI	Total	Jumlah Penduduk Usia 7-12	Rasio	Jumlah SMP	Jumlah MTs	Total	Jumlah Penduduk Usia 13-15	Rasio
Asemrowo	7	8	15	5.044	1:336	3	3	6	2.546	1:424
Benowo	14	5	19	7.459	1:392	4	2	6	3.832	1:638
Bubutan	28	2	30	9.257	1:308	8	0	8	4.708	1:588
Bulak	12	6	18	4.771	1:265	4	2	6	2.461	1:410
Dukuh Pakis	21	1	22	5.694	1:259	11	1	12	2.786	1:232
Gayungan	14	1	15	4.135	1:276	5	1	6	2.144	1:357
Genteng	20	1	21	5.420	1:258	11	0	11	2.802	1:255
Gubeng	24	5	29	11.826	1:408	13	0	13	6.120	1:471
Gununganyar	15	1	16	6.105	1:381	9	1	10	2.965	1:296
Jambangan	7	5	12	5.466	1:455	6	3	9	2.682	1:298
Karangpilang	12	3	15	7.162	1:477	8	0	8	3.479	1:435
Kenjeran	18	21	39	19.316	1:495	12	7	19	9.541	1:502
Krembangan	31	7	38	11.449	1:301	17	2	19	5.799	1:305
Lakarsantri	23	5	28	6.255	1:223	11	2	13	3.223	1:248
Mulyorejo	24	0	24	8.022	1:334	15	0	15	4.012	1:267
Pabean Cantian	14	4	18	7.175	1:399	5	0	5	3.749	1:750
Pakal	15	6	21	6.188	1:295	7	3	10	3.142	1:314
Rungkut	24	5	29	11.899	1:410	10	2	12	5.761	1:480
Sambikerep	16	6	22	6.587	1:299	15	4	19	3.311	1:174
Sawahan	41	0	41	18.843	1:459	13	1	14	9.696	1:692
Semampir	34	28	62	19.730	1:318	15	10	25	9.801	1:392
Simokerto	18	6	24	9.113	1:380	9	3	12	4.485	1:374
Sukolilo	32	1	33	11.056	1:335	16	2	18	5.505	1:305
Sukomanunggal	27	1	28	10.201	1:364	15	2	17	4.963	1:292
Tambaksari	36	10	46	21.477	1:467	17	3	20	10.984	1:549
Tandes	21	10	31	9.158	1:295	12	2	14	4.775	1:341
Tegalsari	29	2	31	9.241	1:298	8	0	8	4.722	1:590
Tenggilis Mejoyo	18	1	19	5.520	1:290	7	0	7	2.828	1:404
Wiyung	16	1	17	7.060	1:415	10	0	10	3.469	1:347
Wonocolo	17	2	19	7.595	1:340	8	1	9	3.891	1:432
Wonokromo	33	8	41	14.005	1:341	18	2	20	7.412	1:371
Total	**661**	**162**	**823**	**292.229**	**1:356**	**322**	**59**	**381**	**147.594**	**1:388**

Sumber: Dinas Pendidikan, 2024

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kebutuhan akan ketersediaan sekolah baik di jenjang SD dan di jenjang SMP semakin meningkat di setiap tahunnya. Namun jika dilihat rasio ketersediaan sekolah, ada beberapa wilayah kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan sekolah tinggi dan ada beberapa wilayah kecamatan dengan rasio ketersediaan sekolah rendah. Kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan sekolah jenjang SD/MI tertinggi adalah Kecamatan Lakarsantri dengan nilai rasio sebesar 1:223, sedangkan kecamatan yang memiliki rasio terkecil adalah Kecamatan Kenjeran dengan nilai rasio sebesar 1:495. Pada tingkat SMP/MTs Kecamatan Sambikerep memiliki rasio tertinggi yaitu 1:174 dan Kecamatan Pabean Cantian merupakan Kecamatan dengan rasio terendah yaitu 1:750.

Kecamatan yang rasio ketersediaan sekolahnya tinggi menjadi tujuan bagi penduduk usia sekolah di wilayah kecamatan lain untuk sekolah di wilayah tersebut sehingga menyebabkan APK dan APM di wilayah kecamatan tersebut tinggi. Sedangkan untuk wilayah yang memiliki rasio ketersediaan sekolahnya rendah perlu direncanakan penyediaan fasilitas pendidikan baru atau mengembangkan daya tampung sekolah yang ada agar penduduk usia sekolah dapat tertampung pendidikannya.

Selain ketersediaan sekolah, kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh mutu lembaga pendidikan yang dapat dilihat dari akreditasi lembaga pendidikan tersebut. Akreditasi memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektifitas, efisiensi, produktifitas dan inovasinya. Selain itu akreditasi juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa sekolah sudah memenuhi standar yang ditetapkan.

Dari data Dinas Pendidikan tahun 2023 terdapat 367 sekolah SMP/sederajat yang telah terakreditasi, terdiri dari 234 sekolah yang terakreditasi A, 120 sekolah terakreditasi B dan terdapat 13 sekolah yang terakreditasi C. Sedangkan untuk sekolah SD/sederajat terdapat 802 sekolah yang terakreditasi, terdiri dari 515 sekolah yang terakreditasi A, 251 sekolah terakreditasi B dan 36 sekolah SD/MI yang terakreditasi C. Sedangkan untuk lembaga kursus/pelatihan, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Tahun 2023, terdapat 17 lembaga kursus/pelatihan, yang telah terakreditasi 13 lembaga, dan sebanyak 4 lembaga sisanya belum terakreditasi. Fakta bahwa masih adanya sekolah di jenjang SD maupun SMP yang terakreditasi C, kemudian masih adanya lembaga kursus/pelatihan yang belum

terakreditasi ini penting untuk diperbaiki kembali guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan untuk menjawab tantangan global seperti saat ini.

Di samping pendidikan di sekolah dan lembaga kursus/pelatihan juga terdapat Pusat Kegiatan Belajar Mengajar yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan berupa kejar paket A, B dan C. Berdasarkan data Dinas Pendidikan tahun 2022 dari PKBM yang tersebar di kecamatan terdapat peserta pendidikan kesetaraan Paket A sebanyak 1.742 peserta, sebanyak 441 peserta mengikuti ujian dengan tingkat kelulusan 100%. Sedangkan peserta pendidikan kesetaraan Paket B sebanyak 2.369 peserta, sebanyak 801 peserta mengikuti ujian dengan tingkat kelulusan 100%. Dan untuk peserta pendidikan kesetaraan Paket C terdapat 4.854 peserta, sebanyak 3.012 peserta mengikuti ujian dan seluruhnya lulus.

2.1.3.1.1.6 Rasio Guru dibanding Murid

Kebutuhan guru yang memenuhi kualifikasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Dengan pendidikan guru yang sesuai dengan standar kualifikasi maka diharapkan akan mampu menghasilkan kualitas siswa didik yang lebih berkualitas pula, dan tentunya juga dibutuhkan ketersediaan guru yang berkompetensi di setiap sekolah.

Tabel II.46
Jumlah Guru dan Murid Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio Guru SD/MI	1:24	1:23	1:23	1:23	1:23
1.1.	Guru SD/MI	12.806	13.725	13.340	14.024	11.437
1.2.	Murid SD/MI	312.873	317.885	313.505	321.128	258.667
2.	Rasio Guru SMP/MTs	1:23	1:23	1:25	1:22	1:21
2.1.	Guru SMP/MTs	6.250	6.862	6.512	7.346	6.347
2.2.	Murid SMP/MTs	143.329	156.083	160.764	163.134	135.327

Sumber : Dinas Pendidikan, 2024

Terkait dengan kualitas guru dapat dilihat dari jenjang pendidikan guru dan sertifikasi guru sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.47
Jumlah Guru PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2023

Jenjang	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Total
TK	4	0	6	0	0	115	20	0	145
SD	28	1	26	3	3	3.078	481	1	3.621
SMP	0	1	2	5	1	1.074	359	1	1.443

Jenjang	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Total
Total	32	2	34	8	4	4.267	860	2	5.209

Sumber: Dinas Pendidikan, 2024

Tabel II.48
Jumlah Guru Non PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2023

Jenjang	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Total
TK	605	34	86	40	5	3.911	135	0	4.816
SD	168	8	37	23	12	8.655	410	5	9.318
SMP	20	2	3	14	4	4.556	451	3	5.053
Total	793	44	126	77	21	17.122	996	8	19.187

Sumber: Dinas Pendidikan, 2024

Pada tabel jumlah guru di atas, dapat dilihat bahwa masih terdapat sejumlah pengajar yang belum memenuhi kesesuaian akademik, sehingga masih sangat penting bagi Pemerintah Kota untuk meningkatkan kualitas para pengajar baik PNS maupun Non PNS di jenjang pendidikan TK, SD, maupun SMP.

Tabel II.49
Jumlah Guru Kota Surabaya Bersertifikat Pendidik Tahun 2023

No	Jenjang	Guru Bersertifikat Pendidik			Jumlah Total Guru			Guru Yang Belum Sertifikasi		
		PNS	Non PNS	Jumlah	PNS	Non PNS	Jumlah	PNS	Non PNS	Jumlah
1	SD	3.003	2.816	5.819	3.749	9.318	13.067	746	6.502	7.248
2	SMP	1.328	1.818	3.429	1.521	5.053	6.574	193	3.235	3.428
Jumlah		**4.331**	**4.947**	**9.709**	**5.270**	**14.371**	**19.641**	**939**	**9.737**	**10.676**

Sumber: Dinas Pendidikan, 2024

Dari data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa masih ada 7.248 guru SD/MI/setara dan 3.428 guru SMP/MTs/setara yang belum sertifikasi. Hal ini disebabkan banyaknya guru non PNS yang tidak dapat didaftarkan sertifikasi mengingat terbatasnya kuota sertifikasi guru dari Pemerintah Pusat dan syarat guru yang diajukan untuk sertifikasi adalah guru PNS.

2.1.3.1.2 Kesehatan

Kualitas SDM salah satunya dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan perilaku masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan AHH, salah satunya melalui penanganan terhadap penderita penyakit menular dan tidak menular yang dapat dilihat pada tabel berikut. Meski semua penderita telah ditangani, namun tingginya jumlah penderita dari tahun ke tahun, utamanya penyakit hipertensi dan diabetes melitus, serta penyakit menular covid-19, menunjukkan masih diperlukannya perbaikan di bidang pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Data penderita penyakit menular dan tidak menular selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.50
Jumlah Kasus Penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular
Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No	Penyakit	2020	2021	2022	2023	2024
1.	TBC	4.151	4.628	8.218	9.198	2.072
2.	COVID-19	18.164	67.073*	77.739	4.580	N/A
3.	HIV/AIDS	786	749	828	1.260	183
4.	Kusta	47	45	91	93	N/A
5.	DBD	73	111	195	191	178
6.	Hipertensi	724.582*	737.258	740.719	761.441	206.789
7.	Diabetes Melitus	94.624	96.279	96.773	113.970	79.171

*Sumber: Dinas Kesehatan, 2024. Keterangan: *) dihitung berdasarkan estimasi.*

Jumlah kasus penderita penyakit menular dan tidak menular secara umum mengalami penurunan. Sampai dengan Triwulan II tahun 2024 belum ditemukan laporan penderita kusta dan covid-19. Penurunan jumlah kasus penyakit menular dan tidak menular secara umum didukung oleh adanya pelaksanaan skrining dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui 63 Puskesmas yang tersebar di wilayah Kota Surabaya serta dengan diresmikannya 153 Integrasi Layanan Primer di Kota Surabaya.

Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan UHH, melakukan berbagai upaya, yang salah satunya melalui layanan cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani kurang dari 24 jam serta layanan kesehatan ibu dan anak yaitu cakupan pelayanan ibu nifas, cakupan kunjungan bayi, balita gizi buruk yang mendapat perawatan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.51
Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani Kurang Dari 24 Jam
Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam	154	154	154	153	153

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2	Jumlah kelurahan yang mengalami KLB	154	154	154	153	153
3	Persentase (persen)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

Kejadian Luar Biasa tahun 2020 dan 2021 adalah pandemi COVID-19 yang terjadi di 154 kelurahan. Sedangkan Kejadian Luar Biasa pada tahun 2023 adalah kasus Demam Berdarah, HIV serta penyakit menular lainnya yang terjadi di 153 kelurahan. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 sesuai Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2022-2026, target penanganan KLB telah ditingkatkan menjadi kurang dari 20 jam.

Untuk kasus Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 dan 2021, 31 Kecamatan di kota Surabaya telah membentuk Kampung Tangguh Wani Covid-19 di tiap RW-nya sebagai upaya untuk mendukung program Pemerintah dalam pencegahan persebaran Covid-19. Data Kampung Tangguh bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.52
Daftar Kampung Tangguh Covid-19 Kota Surabaya 2024 (TW II)

No	Kecamatan	Jumlah Kampung Tangguh
1	Asemrowo	17
2	Benowo	26
3	Bubutan	44
4	Bulak	21
5	Dukuh Pakis	31
6	Gayungan	28
7	Genteng	51
8	Gubeng	51
9	Gunung Anyar	29
10	Jambangan	26
11	Karangpilang	29
12	Kenjeran	37
13	Krembangan	43
14	Lakarsantri	29
15	Mulyorejo	52
16	Pakal	26
17	Pabean Cantian	52
18	Rungkut	74
19	Sambikerep	31
20	Sawahan	68
21	Simokerto	48
22	Semampir	49
23	Sukolilo	67
24	Sukomanunggal	36
25	Tambaksari	73

No	Kecamatan	Jumlah Kampung Tangguh
26	Tandes	51
27	Tegalsari	48
29	Tenggilis Mejoyo	25
29	Wiyung	34
30	Wonocolo	44
31	Wonokromo	58

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya, 2023

Kesehatan masyarakat juga diupayakan melalui terwujudnya rumah sehat. Kriteria rumah sehat yang digunakan meliputi tujuh kriteria, yaitu atap berplafon, dinding permanen (tembok/papan), jenis lantai bukan tanah, tersedia jendela, ventilasi cukup, pencahayaan alami cukup, dan tidak padat huni (lebih besar atau sama dengan 8 m^2/orang). Selain itu, sarana sanitasi seperti sarana air bersih, jamban, sarana pembuangan air limbah dan sarana pembuangan sampah serta perilaku hidup sehat penghuni rumah menjadi pertimbangan dalam penilaian rumah sehat.

Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dimulai dari lingkungan yang terkecil. Lingkungan terkecil dan efektif untuk mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat adalah rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat, yaitu memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Persentase rumah sehat dapat dilihat pada gambar di bawah dan diharapkan setiap tahun jumlah rumah sehat meningkat dan derajat kesehatan masyarakat semakin baik.

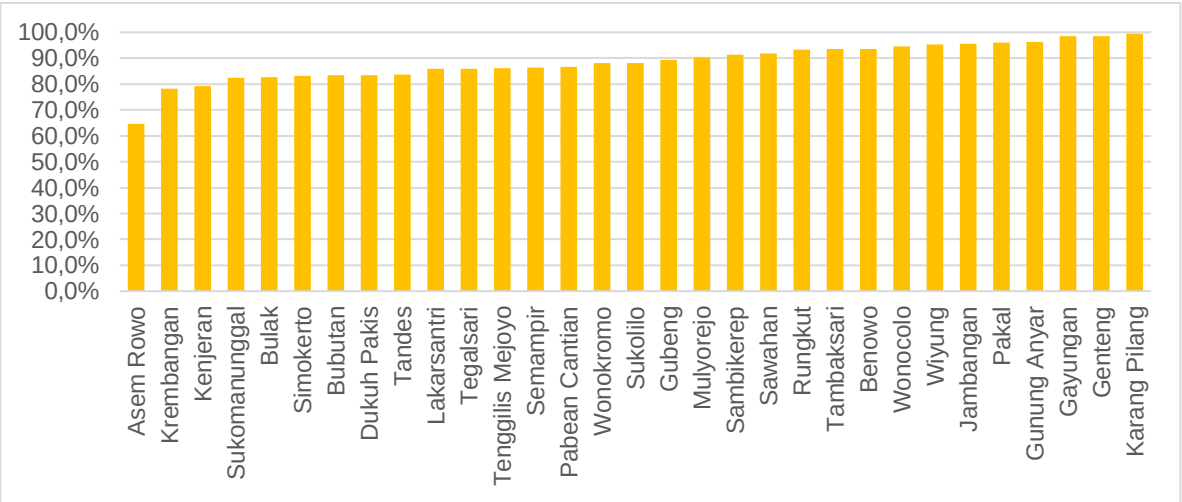

Gambar II.13
Persentase Rumah Sehat Kota Surabaya 2024 (TW II)
Sumber : Dinas Kesehatan, diolah, 2024

Pembentukan kelurahan siaga aktif dan pengembangan Pembinaan Terpadu (Bindu) juga menjadi upaya pemerintah kota Surabaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan kesehatan, secara mandiri. Pada tahun 2024 seluruh kelurahan memiliki Bindu. Persentase kelurahan siaga aktif kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.53
Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelurahan siaga aktif	154	154	154	153	153
2	Jumlah kelurahan siaga	154	154	154	153	153
3	Persentase (persen)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Kelurahan siaga aktif mulai tahun 2020 hingga tahun 2023 konsisten terpenuhi di seluruh kelurahan yang ada di Kota Surabaya. Hal ini didukung oleh adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik antara Dinas Kesehatan dan Kecamatan/Kelurahan yang ada di Kota Surabaya, serta pelaksanaan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) oleh 63 Puskesmas di Kota Surabaya.

Tabel II.54
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan	35.657	42.100	42.019	41.893	13.006
2	Jumlah sasaran ibu nifas	43.904	42.164	42.014	41.885	37.187
3	Persentase (persen)	81,22	99,85	100,01	100,02	34,97

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

Cakupan pelayanan Ibu Nifas dari tahun 2020 sebesar 81,20 mengalami peningkatan hingga 100% pada tahun 2023. Hal ini didukung oleh adanya pendampingan yang dilakukan oleh kader surabaya hebat kepada sasaran ibu nifas yang ada di Surabaya, serta upaya 1 puskesmas 1 dokter spesialis *obgyn* yang berdampak pada terpantaunya secara rutin ibu-ibu hamil hingga melahirkan dan memasuki masa nifasnya.

Tabel II.55
Cakupan kunjungan bayi Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas sesuai standar	40.448	42.248	41.931	37.349	13.356
2	Jumlah sasaran bayi	42.034	42.708	41.901	41.180	35.148
3	Cakupan kunjungan bayi (persen)	96,23	98,92	100,1	90,70	37,99

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

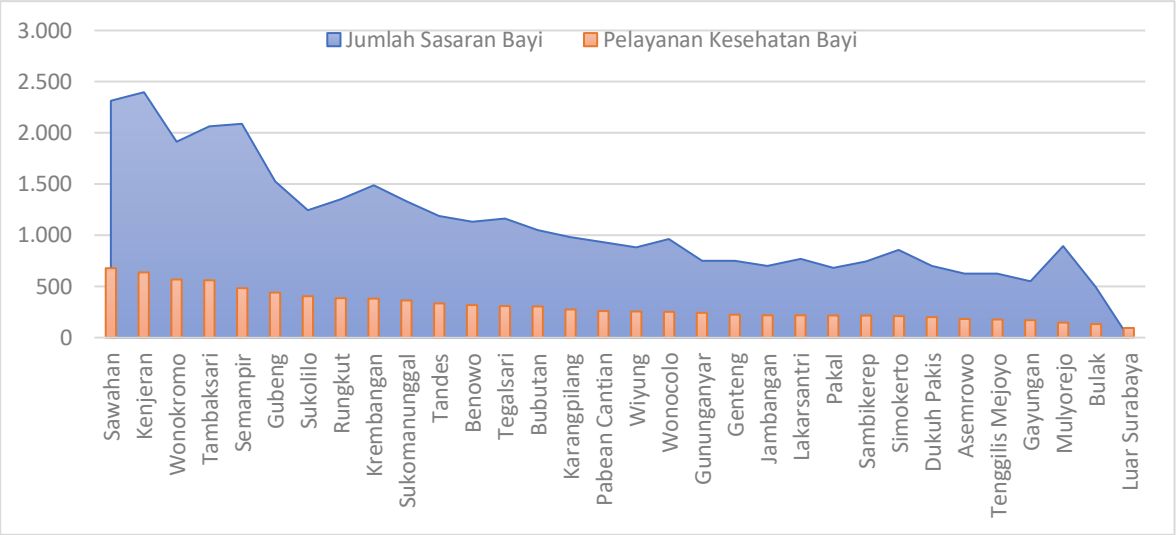

Gambar II.14
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi per Kecamatan 2024 (TW II)
Sumber : Dinas Kesehatan, diolah, 2024

Sampai dengan triwulan 2 tahun 2024, pelayanan kesehatan bayi per kecamatan paling banyak sesuai gambar di atas adalah di Kecamatan Sawahan. Sedangkan pelayanan kesehatan bayi per kecamatan paling sedikit ada di Kecamatan Bulak.

Tabel II.56
Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan	196	148	123	63	38
2	Jumlah balita gizi buruk	196	148	123	63	38
3	Persentase (persen)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2024

Akses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah maupun upaya-upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat melalui posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Sejak tahun 2018 jumlah posyandu balita mengalami penurunan karena terdapat penggabungan beberapa posyandu yang menyesuaikan jumlah balita di wilayahnya masing-masing. Di tahun 2020 dan 2021 jumlah posyandu balita sebanyak 2.764 dan 2.734. Sedangkan pada tahun 2022, jumlah posyandu balita sebanyak 2.731, dan pada tahun 2023 jumlah posyandu sebanyak 2.682. Sedangkan pada tahun 2024 sampai dengan triwulan 2 jumlah posyandu masih tetap (2.682 posyandu). Perkembangan dan cakupan posyandu dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.57
Jumlah Posyandu dan Balita Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah posyandu	2.764	2.734	2.731	2.682	2.682

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2	Jumlah sasaran balita	207.881	208.175	206.810	205.688	206.810
3	Rasio posyandu per 1.000 balita	13,30	13,1	13,2	13,04	12,96

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2024

Dari data tabel di atas, menunjukkan bahwa rasio posyandu per 1.000 penduduk berkisar angka 12-13. Keberadaan posyandu sangatlah penting karena merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, bersama masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan dasar di Kota Surabaya yang terus meningkat, maka Pemerintah Kota meningkatkan pelayanan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap. Pada tahun 2024 sampai dengan triwulan 1, dari 63 Puskesmas induk, sebanyak 23 Puskesmas merupakan puskesmas rawat inap, dan terdapat puskesmas pembantu sebanyak 58 puskesmas. Jika ditinjau dari skala wilayah Kota Surabaya dengan data jumlah penduduk Kota Surabaya sampai dengan akhir tahun 2023 sejumlah 3.009.286 jiwa, maka 1 Puskesmas kurang lebih melayani 47.766 jiwa. Apabila dibandingkan dengan standar nasional bahwa 1 Puskesmas melayani 30.000 jiwa, maka pada saat ini sarana kesehatan dasar di Kota Surabaya belum mencukupi.

Jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, dan klinik tahun 2019 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.58
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)
Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah puskesmas	63	63	63	63	63	63
2	Jumlah klinik	286	348	358	442	352	352
3	Jumlah pustu	59	59	59	59	58	58

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

Sebagai fasilitas kesehatan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit berperan dalam memberikan layanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Data rumah sakit di Kota Surabaya dapat dilihat di bawah ini.

Tabel II.59
Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penduduk	2.970.730	2.970.952	2.987.863	3.009.286	3.009.286
2.	Rumah Sakit Umum (Pemerintah/	5	5	5	5	5

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Provinsi)					
3.	Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah/ Provinsi	4	3	3	3	3
4.	Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	7	7	7	7	7
5.	Rumah Sakit Daerah	2	2	2	2	2
6.	Rumah Sakit Swasta	42	43	43	43	45
Jumlah Rumah Sakit (Terakreditasi)		**59 (N/A)**	**60 (N/A)**	**60 (56)**	**60 (59)**	**62 (62)**
Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk		**0,0187**	**0,0209**	**0,0209**	**0,0199**	**0,0206**

Sumber : Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah SDM tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan di masyarakat. Pada tahun 2019, jumlah dokter sebanyak 2.093 orang, dengan rasio 0,66 per 1000 penduduk. Pada tahun 2020, jumlah dokter sebanyak 2.066 orang, dengan rasio 1,44 per 1000 penduduk. Pada Tahun 2021 , jumlah dokter sebanyak 7.484, dengan rasio 2,52 per 1000 penduduk. Sedangkan pada Tahun 2022 , jumlah dokter sebanyak 8.158, dengan rasio 2,73 per 1000 penduduk. Kemudian pada tahun 2023, jumlah dokter sebanyak 8.826, dengan rasio 2,95 per 1000 penduduk. Apabila dibandingkan dengan rasio jumlah dokter di Indonesia berdasarkan Sistem Kesehatan Nasional tahun 2012 sebesar 19 dokter per 100.000 penduduk, maka pada saat ini jumlah dokter di Kota Surabaya masih belum mencukupi. Selain kecukupan kuantitas SDM Kesehatan, kualitas SDM Kesehatan juga mutlak diperlukan dalam menunjang percepatan pembangunan kesehatan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.60
Jumlah Dokter Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk	3.159.481	2.970.730	2.970.952	2.987.863	3.009.286
2	Jumlah dokter	2.093	1.561	7.484	8.158	8.826
3	Rasio dokter per 1.000 penduduk	0,66	0,53	2,52	2,73	2,93

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2023

Pemberian layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah berupaya untuk terus ditingkatkan. Hal ini dapat diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Pencapaian SPM di 2 (dua) rumah sakit umum pemerintah yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.61
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Capaian Pemenuhan SPM Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Instansi	2019	2020	2021	2022	2023
IKM RSUD Bhakti Dharma Husada	86,43	88,76	79,89	87,46	93,67
IKM RSUD dr. Mohamad Soewandhie	88,80	83,48	88,85	87,49	91,89
SPM RSUD Bhakti Dharma Husada	77,98	81,55	86,39	86,87	92,59
SPM RSUD dr. Mohamad Soewandhie	83,67	82,83	84,85	91,57	86,87

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2023

Dari tabel pencapaian nilai IKM dan SPM di RSUD Bhakti Dharma Husada dan RSUD dr. Mohamad Soewandhie di atas, dapat dinilai masih tergolong baik, namun cenderung tidak stabil dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya proses renovasi gedung yang menghambat pelayanan kesehatan. Meski begitu, tentu hal ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Selain itu, peningkatan mutu pelayanan kesehatan juga diupayakan melalui akreditasi fasilitas kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang mengamanatkan bahwa puskesmas wajib terakreditasi. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2016 terdapat 16 puskesmas telah dilakukan akreditasi di antaranya yaitu Puskesmas Pucang Sewu, Puskesmas Dupak, Puskesmas Jagir, Puskesmas Simomulyo, Puskesmas Sawahan, Puskesmas Tanah Kali Kedinding, Puskesmas Balongsari, Puskesmas Medokan Ayu, Puskesmas Gunung Anyar, Puskesmas Keputih, Puskesmas Pegirian, Puskesmas Jeruk, Puskesmas Tenggilis, Puskesmas Putat Jaya, Puskesmas Wonokromo dan Puskesmas Dukuh Kupang. Sampai dengan akhir tahun 2021 telah dilaksanakan penilaian akreditasi di semua puskesmas. Untuk rumah sakit umum daerah, pada tahun 2017 RSUD dr. Mohamad Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada telah diakreditasi dengan hasil akreditasi paripurna. Hasil akreditasi puskesmas Kota Surabaya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar II.15
Jumlah Puskesmas Berdasarkan Status Akreditasi Tahun 2024 (TW II)

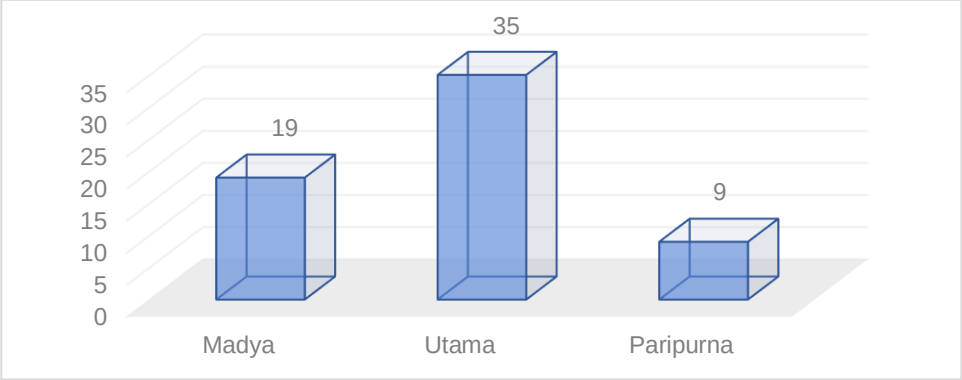

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024 diolah

Selain peningkatan mutu, aksesibilitas pelayanan kesehatan, juga diupayakan melalui pemberian jaminan kesehatan, terutama kepada warga miskin. Sehubungan dengan hal tersebut, sejak tahun 2019 telah ditetapkan jumlah masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan survei yang dilakukan secara berkala untuk memperbarui data tersebut. Pada tahun 2020 terdata sebanyak 822.105 orang MBR dan lebih dari 92 persennya telah mendapatkan jaminan kesehatan. Lalu di tahun 2021, cakupan jaminan kesehatan untuk MBR mengalami penurunan menjadi 69,80 persen, ini disebabkan penambahan jumlah data MBR juga dilakukan pembaruan menjadi 1.566.307 orang. Kemudian di tahun 2022, berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 117 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022, tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin, istilah MBR diperbarui menjadi anggota keluarga miskin (gakin), yakni 219.427 orang, sehingga pada tahun tersebut cakupan jaminan kesehatan bagi keluarga miskin meningkat menjadi 100 persen. Dan di akhir tahun 2023 jumlah anggota keluarga miskin kembali diperbarui menjadi 193.786 orang, sehingga pada tahun tersebut cakupan jaminan kesehatannya tetap 100 persen. Pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II, jumlah anggota keluarga miskin diperbarui menjadi 97.836 orang, dengan cakupan jaminan kesehatan yang konsisten di 100 persen. Ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kota untuk menjamin akses hidup sehat bagi penduduknya. Selengkapnya tentang data perkembangan cakupan jaminan kesehatan bagi keluarga miskin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.62
Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No	Uraian	2020*	2021*	2022	2023	2024
1	Jumlah anggota keluarga miskin	822.105	1.566.307	219.427	193.786	97.836

No	Uraian	2020*	2021*	2022	2023	2024
2	Jumlah anggota keluarga miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan	760.882	1.093.374	219.427	193.786	97.836
3	Persentase anggota keluarga miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan (%)	92,55	69,80	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2024

**)Data 2020-2021 merupakan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)*

Dalam rangka mencapai Bebas BABS (Buang Air Besar Sembarangan), Pemerintah Kota Surabaya terus berusaha meningkatkan capaian kelurahan yang bebas BABS. Peningkatan yang terjadi, dari tahun 2017 sebanyak 35 persen atau sejumlah 54 kelurahan, hingga tahun 2023 telah seluruhnya atau sejumlah 153 kelurahan bebas BABS. Permasalahan yang paling sering ditemui adalah banyaknya rumah yang berada pada tanah ilegal dan tidak adanya lahan yang tersedia untuk dilakukan pembangunan jamban sehat sehingga sulit untuk dilakukan intervensi dalam memperoleh bantuan baik dari pemerintah dan/atau swasta.

Pelayanan kesehatan juga dilakukan untuk menjamin makanan olahan yang dijual di masyarakat memenuhi syarat kebersihan (higienis sanitasi). Hasil pengawasan TPM (Tempat Pengolahan Makanan) selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.63
Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Higienis Sanitasi
Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah TPM	1.834	1.846	1.797	2.369	43
2	Jumlah TPM memenuhi syarat higienis sanitasi	1.380	1.408	1.532	2.104	43
3	Persentase (%)	75,25	76,27	85,25	88,81	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2024

Adapun capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan di Kota Surabaya Tahun 2020 hingga 2023 pada tabel di bawah ini, secara umum, mengalami peningkatan. Meski demikian, masih terdapat kendala terkait masih adanya balita yang tidak terlaporkan pelayanan kesehatannya dikarenakan domisili penduduk ber-KTP Surabaya tersebut yang berada di luar Kota Surabaya. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan sosialisasi dan himbauan bagi warga tersebut untuk menyesuaikan lokasi dokumen administrasi kependudukannya dengan domisili tetapnya saat ini.

Tabel II.64
Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2021 – 2023

No	Nama Indikator	2021			2022			2023		
		Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	44.174	43.901	99,38	44.012	44.182	100,39	43.881	44.057	100,40
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	42.164	42.008	99,63	42.014	42.019	100,01	41.885	41.893	100,02
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	40.158	41.967	104,50	40.012	41.930	104,79	39.891	41.804	104,80
4	Pelayanan kesehatan balita	165.467	151.550	91,59	164.909	160.663	97,43	164.508	164.023	99,71
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	333.018	358.605	107,68	331.551	415.739	125,39	330.258	398.238	120,58
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	2.042.911	1.804.530	88,33	2.042.586	2.081.701	101,91	2.041.119	2.155.512	105,60
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	292.030	316.075	108,23	303.328	313.027	103,20	314.690	326.681	103,81
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	737.254	625.943	84,90	740.719	708.121	95,60	744.436	761.441	102,28
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	96.280	103.819	107,83	96.732	106.860	110,47	104.362	113.970	109,21
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	5.545	4.605	83,05	7.320	6.226	85,05	5.580	5.766	103,33
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	54.422	68.623	126,09	60.804	83.577	137,45	63.879	89.139	139,15
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	49.084	52.598	107,16	51.607	61.726	119,61	52.741	66.001	125,14

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2024

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.3.1 Pekerjaan Umum

Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mendasar dalam segala aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Pemerintah Kota Surabaya berupaya penuh dalam pelaksanaan pengembangan jaringan jalan sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat segera terlaksana. Pada tahun 2021, rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk Kota Surabaya adalah 0,54 yakni jalan Kota Surabaya sepanjang 1.697,39 kilometer melayani jumlah penduduk sebesar 2.970.952 orang.

Jalan dianggap dalam kondisi baik jika masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang mendasar. Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan jalan kota serta mengoptimalkan jalan yang mengalami *bottleneck* di Kota Surabaya yang terintegrasi dengan jaringan jalan regional dan nasional.

Pada tahun 2019, jalan kondisi baik sepanjang 1.683,11 km dari total panjang jalan 1.694,38 km, dengan persentase 99,33%. Sedangkan pada tahun 2020, jalan kondisi baik juga meningkat menjadi 1.686,88 km dari total panjang jalan 1.697,39 km, dengan persentase 99,38%. Pada tahun 2021, akibat pandemi covid-19 tidak ada penambahan panjang jalan dari tahun 2020. Namun pada tahun 2022 hingga 2023, penambahan jalan baru dapat terlaksana dengan persentase jalan kondisi baik berturut-turut sebesar 99,54% dan 99,55%. Persentase panjang jalan kondisi baik di Kota Surabaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal tersebut tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas jalan melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan, yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.65
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Panjang jalan dalam kondisi baik (km)	1.683,11	1.686,88	1.686,88	1.692,19	1.693,42
Panjang jalan (km)	1.694,38	1.697,39	1.697,39	1.699,95	1.701,12
Persentase jalan kondisi baik (%)	99,33	99,38	99,38	99,54	99,55

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2023

Selain infrastruktur jalan dan jembatan, bidang pekerjaan umum juga dituntut untuk menyediakan layanan air bersih, sanitasi, dan air minum layak di

kawasan permukiman penduduk. Untuk meningkatkan pelayanan sanitasi, diperlukan upaya pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat. Sedangkan untuk meningkatkan pelayanan air bersih, bekerjasama dengan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.

Meskipun pada akses berkelanjutan terhadap air bersih mengalami penurunan pada tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini disebabkan oleh banyaknya pembangunan kawasan permukiman penduduk yang status pengelolaannya masih milik pengembang, sehingga PDAM Surya Sembada tidak dapat melakukan intervensi lebih jauh. Program Sanitasi dan Kebersihan Kota Surabaya juga melibatkan pengembangan fasilitas umum seperti toilet umum yang bersih dan mudah diakses terutama di area publik. Upaya untuk meningkatkan sanitasi ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lebih nyaman bagi warga kota, serta mengurangi risiko penyakit disebabkan sanitasi yang buruk. Data cakupan penduduk dengan akses air bersih, sanitasi dan air minum layak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.66
Cakupan Penduduk dengan Akses Air Bersih, Sanitasi, Air Minum Layak
Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Penduduk dengan Akses Sanitasi Layak	98,10%	98,27%	98,27%	99,62%	100,0%
Cakupan Penduduk dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak	99,48%	99,12%	99,12%	99,85%	100,0%
Cakupan Penduduk dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Bersih	99,90%	99,46%	99,46%	99,67%	100,0%

Sumber: DSDABM dan PDAM Surya Sembada, 2024

Adapun pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kota Surabaya Tahun 2023 sebesar 100% dengan rincian Jenis Layanan Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 100% dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik sebesar 100%. Secara umum, Pemerintah Kota Surabaya telah berhasil mengupayakan pemenuhan kebutuhan dan mutu minimal layanan di bidang urusan Pekerjaan Umum. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian terhadap aspek mutu yaitu 1) kuantitas kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari dan pemenuhan kebutuhan jaringan perpipaan air minum, serta 2) adanya Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) juga telah terpenuhi 100%.

2.1.3.1.3.2 Penataan Ruang

Kota Surabaya merupakan kota yang berkembang secara pesat dan dinamis, sehingga membutuhkan dasar terkait arah dan pedoman pemanfaatan ruang yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan rencana rincinya. Kota Surabaya telah memiliki RTRW yang berupa Perda No. 12 tahun 2014 tentang RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034 dan perlu didetailkan dalam rencana rinci. Dengan pesatnya perkembangan kota, maka kualitas perencanaan ruang perlu ditingkatkan melalui integrasi RTRW dengan rencana induk dan rencana-rencana sektoral lainnya.

Rencana induk sektoral mutlak dibutuhkan untuk menjawab perkembangan kota yang pesat dan dinamis. Sepanjang periode 2016-2024, rencana induk yang telah disusun, beserta kebutuhan rencana induk yang masih diperlukan untuk disusun ke depannya, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.67
Penyusunan Rencana Induk Kota Surabaya Tahun 2015 – 2024 (TW II)

Uraian	Tahun Penyusunan
1. Rencana Induk Air Minum	2015
2. Rencana Induk Kereta Api	2015
3. Rencana Induk Pelabuhan	2015
4. Rencana induk Bandara	2015
5. Masterplan Permakaman	2016
6. Masterplan RTH	2016
7. Masterplan Permukiman (RP3KP)	2016
8. Masterplan Sarpras Kebakaran	2016
9. Masterplan Drainase	2017
10. Masterplan Air Limbah	2018
11. Masterplan Transportasi	2019
12. Masterplan RPPLH	2020
13. Masterplan Energi	2021
14. Masterplan Persampahan	*(belum disusun)*
15. Masterplan Industri	*(belum disusun)*
16. Strategi Sanitasi Kota	2022
17. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan	2023
18. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum	2015
19. Rencana Induk Sistem Drainase Lingkungan di Perkotaan	*(belum disusun)*

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2024

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan ruang, upaya yang telah dilakukan antara lain adalah dengan melakukan integrasi rencana tata ruang dengan rencana sektoral lainnya dan meningkatkan koordinasi penataan ruang

melalui optimalisasi peran Forum Penataan Ruang (FPR) Kota Surabaya. Sedangkan dalam rangka peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang kota, upaya yang telah dilakukan antara lain menggunakan referensi tunggal dalam penyusunan peta rencana tata ruang yang kemudian menjadi dasar bagi perizinan pemanfaatan ruang kota. Peta rencana tata ruang kota tersebut berbasis GIS dan dapat diakses langsung oleh masyarakat dalam aplikasi perizinan *Surabaya Single Window* (SSW).

Rencana tata ruang wilayah kota dan rencana rincinya menjadi dasar untuk penerbitan perizinan pemanfaatan ruang dan administrasi pertanahan. Penerbitan perizinan pemanfaatan ruang berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang kota. Berdasarkan jenisnya, terdapat 3 (tiga) jenis IMB yang diterbitkan Pemerintah Kota Surabaya yaitu IMB rumah tinggal, IMB non rumah tinggal serta IMB Reklame. Jumlah IMB yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.68
IMB yang diterbitkan Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rumah Tinggal	5.783	6.615	5.983	5.687	1.505
2	Non Rumah Tinggal	1.807	1.572	1.616	1.881	811
3	Reklame	436	101	105	53	14
Total		8.026	8.288	3.238	7.568	2.330

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2024

Tabel II.69
Penertiban Bangunan Yang Tidak Sesuai IMB Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah bangunan yang dikenakan sanksi administratif	9 persil	401 persil	412 persil	150 persil	62 persil	118 persil

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2024

Meningkatnya upaya pengendalian pemanfataan ruang kota dapat diindikasikan dengan jumlah izin mendirikan bangunan yang diterbitkan. Penerbitan izin tersebut telah sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kota.

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan penduduk secara pesat terutama di perkotaan umumnya merupakan akibat dari urbanisasi, sehingga menimbulkan ancaman meluasnya lingkungan hunian atau permukiman kumuh di perkotaan. Permasalahan di

kawasan perumahan dan permukiman, yaitu masih terdapat kawasan yang kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana-prasarananya kurang. Berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/433/436.1.2/2019 tentang Hasil Penanganan Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman di Kota Surabaya, bahwa total luas penanganan kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman di Kota Surabaya sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 145,89 Ha (nol kumuh).

Dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan kegiatan "Dandan Omah" yaitu perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat Kota Surabaya. Sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022, kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni bertujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal melalui perbaikan kondisi rumah menjadi layak huni, sehat dan aman dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, keswadayaan dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat. Kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni merupakan kegiatan pembangunan berdasarkan partisipasi warga (*community-based development*), yang pelaksanaan kegiatannya dioptimalkan melalui pemberdayaan warga setempat. Perbaikan rumah tidak layak huni ini setiap tahunnya mengalami peningkatan yaang cukup signifikan, hal ini dikarenakan adanya koordinasi yang baik dan pendampingan secara berkala oleh Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR), Kelurahan dan Dinas dalam upaya percepatan pelaksanaan pekerjaan perbaikan rutilahu. Sedangkan untuk tahun 2020 mengalami penurunan karena masih terdapat beberapa rumah yang masih perlu diklarifikasi legalitasnya. Mulai dari tahun 2020 sampai dengan triwulan II tahun 2024 terdapat total kebutuhan rumah tidak layak huni (rutilahu) sejumlah 10.424 unit dan telah dikerjakan sampai dengan triwulan II tahun 2024 sejumlah 6.853 unit, sehingga sisa yang belum dikerjakan yaitu 3.571 unit dan akan dikerjakan di tahun selanjutnya. Data terkait jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.70
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1.551	2.174	3.103	5.990	6.853
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	4.550	4.550	4.550	9.772	10.424

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase perbaikan rumah tidak layak huni (%)	34,09	47,78	68,20	61,30	65,74

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2024

Salah satu upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal tempat tinggal yang layak dengan lingkungan yang sehat adalah melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan yang kurang atau *backlog* di Kota Surabaya pada tahun 2023 adalah sebanyak 87.259 unit, hal ini antara lain disebabkan karena terbatasnya ketersediaan lahan. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam menanggulangi *backlog* adalah mengembangkan skema pembiayaan alternatif yang dapat digunakan untuk mendukung program rehabilitasi, peremajaan dan permukiman kembali serta pengadaan PSU perumahan dan kawasan permukiman; mengembangkan skema pembiayaan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam menyediakan rumah susun milik atau sewa yang layak dan terjangkau, khususnya bagi keluarga miskin; dan mengaplikasikan prinsip subsidi silang untuk membiayai perawatan dan pemeliharaan gedung Rusunawa melalui skema hunian campuran yang mana Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) baru tidak hanya dapat dihuni oleh masyarakat miskin saja, melainkan juga masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah bahkan masyarakat berpenghasilan menengah. Secara rinci jumlah pemohon rumah susun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.71
Jumlah Pemohon Rumah Susun di Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pemohon Rusun	2.105	1.141	1.234	363	10	0

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2024

Dari tabel di atas dapat dilhat bahwa pemohon rusun pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibadingkan tahun sebelumnya hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah antrian dan ketersediaan unit hunian yang terbatas sehingga pendaftaran permohonan pemakaian rumah susun sewa melalui aplikasi di tutup. Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tinggal yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sampai dengan tahun 2017 Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan 85 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 17 lokasi. Pada tahun 2018, penyediaan rumah susun mengalami peningkatan menjadi 93 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 17 lokasi, hingga pada tahun 2023, penyediaan rumah susun mengalami peningkatan

menjadi 109 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 23 lokasi yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Surabaya seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.72
Jumlah dan Lokasi Persebaran Rusunawa

No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan / Kecamatan	Tipe	Blok	Luas Lahan (m^2)	Keterangan
1	URIP SUMOHARJO	Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng	21	3	± 3.500	Dibangun 1983 (APBN)
2	DUPAK BANGUNREJO	Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan	18	6	± 3.000	Dibangun 1992 (APBN)
3	SOMBO	Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto	18	8	± 41.044	Dibangun 1993 (APBN)
		Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto	24	2		Dibangun 2020 (APBD)
4	PENJARINGANSARI	Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut (Tahap I)	18	3	± 32.350	Dibangun 1995 (APBN)
		Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut (Tahap II)	21	6		Dibangun 2003 (APBN)
		Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut (Tahap III)	24	2		Dibangun 2009 (APBN)
		Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut (Tahap IV)	24	2		Dibangun 2018 (APBD)
5	WARUGUNUNG	Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karangpilang	21	10	± 29.845	Dibangun 1996 (APBD)
6	WONOREJO	Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut (Tahap I)	21	2	± 5.466	Dibangun 2003 (APBN)
		Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut (Tahap II)	21	4		Dibangun 2006 (APBN)
7	TANAH MERAH	Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran (Tahap I)	21	4	± 28.810	Dibangun 2007 (APBN)
		Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran (Tahap II)	24	4		Dibangun 2009 (APBN)
8	RANDU	Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran	21	6	± 44.290	Dibangun 2007 (APBN)
9	GRUDO	Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari	24	2	± 5.000	Dibangun 2011 (APBN)
10	PESAPEN	Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan	24	1	± 2.500	Dibangun 2011 (APBN)
11	JAMBANGAN I	Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan	24	1	± 2.977	Dibangun 2011 (APBN)
12	JAMBANGAN II	Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan	24	1		Dibangun 2017 (APBD)
13	SIWALANKERTO	Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo (Tahap I)	24	2	± 8.000	Dibangun 2012 (APBN)
		Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo (Tahap II)	24	2		Dibangun 2018 (APBD)
14	ROMOKALISARI	Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo (Tahap I)	24	4	± 25.000	Dibangun 2012 (APBN)
		Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo (Tahap II)	24	4		Dibangun 2013 (APBN)
		Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo (Tahap III)	24	2		Dibangun 2014 (APBN)
15	BANDAREJO	Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo	24	2	± 4.320	Dibangun 2012 (APBN)
16	DUKUH MENANGGAL	Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan (Tahap I)	24	2	± 14.388	Dibangun 2016 (APBN)

No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan / Kecamatan	Tipe	Blok	Luas Lahan (m^2)	Keterangan
		Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan (Tahap II)	36	2		Dibangun 2020 (APBN)
17	KEPUTIH	Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo (Tahap I)	36	4	± 258.140	Dibangun 2016 (APBN)
		Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo (Tahap II)	36	2		Dibangun 2017 (APBN)
		Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo (Tahap III)	36	2		Dibangun 2018 (APBN)
18	TAMBAK WEDI	Jalan Tambak Wedi, Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran	36	2	±	Dibangun 2017 (APBN)
19	TAMBAK WEDI II	Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran	36	2	±	Dibangun 2020 (APBN)
20	INDRAPURA	Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian	24	2	± 5.466	Dibangun 2019 (APBD)
21	BABAT JERAWAT	Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal	24	2	± 4.129	Dibangun 2019 (APBD)
22	GUNUNGANYAR SAWAH	Jalan Gununganyar Sawah, Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar	24	2	± 14.150	Dibangun 2019 (APBD)
		Jalan Gununganyar Sawah, Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar (Blok B)	36	2		Dibangun 2020 (APBD)
23	PAKAL BENOWO	Jalan Kauman Baru, Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal	24	2	± 29.900	Dibangun 2022 (APBD)
JUMLAH				**109**		

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2024

Pada tahun 2023, Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat sebesar 100% melalui pemenuhan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota. Selain itu, keberhasilan ini juga ditunjukkan dengan cakupan penduduk yang yang memperoleh fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan sebesar 100%, serta cakupan pemenuhan penyediaan rumah layak huni juga tercapai 100%.

2.1.3.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perda, penyelesaian pelanggaran K3, pencegahan

dan penanggulangan kebakaran serta upaya-upaya lainnya terkait pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

Pemerintah Kota berkomitmen tinggi dalam perwujudan ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakat. Dalam hal ini, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketentraman dan ketertiban umum menjadi salah satu pengendalian dalam pelayanan ketentraman dan ketertiban umum. Melalui beberapa indikator kinerja dalam setiap layanannya, Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan kualitas sarana dan prasarana layanan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam penegakan peraturan daerah, pelaksanaan penanganan unjuk rasa serta pelaksanaan operasi kawasan yang memiliki potensi tinggi akan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum pada Tabel II.37 di atas, upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator kinerja SPM, antara lain:

1) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani sebanyak 14.818 orang melalui aktivitas penegakan perda sesuai SOP menggunakan sarana prasarana serta SDM Satpol PP sesuai standar.
2) Pelayanan Informasi Rawan Bencana dengan cara melakukan identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana kepada sejumlah 56.328 orang dan melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana kepada 820 orang.
3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana kepada sebanyak 324 orang. Aktivitas yang mendukung pelayanan tersebut antara lain, pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana, melakukan respon cepat kejadian kedaruratan dan respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (*Command Center* 112), serta pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana.

4) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, antara lain melalui layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak sebanyak 38 orang. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan sebanyak 8 orang.

2.1.3.1.5.1 Penegakan Perda

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan. Data jumlah Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.73
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	781	783	978	978	1.504
2	Jumlah penduduk	2.970.730	2.970.952	2.987.863	3.009.286	3.009.286
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	2,62	2,63	3,27	3,25	4,99

Sumber :Satuan Polisi Pamong Praja, 2024

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya memberikan ketentuan bahwa Satpol PP bertugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Salah satu upaya untuk melaksanakan tugas tersebut melalui patroli dalam rangka pemantauan dan penertiban pelanggaran perda atau Ketertiban, Keamanan dan Keindahan (K3).

Tabel II.74
Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3	5.274	4.124	10.736	13.102	3.692
2	Jumlah pelanggaran K3	5.274	4.124	13.261	16.420	5.558
3	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (%)	100	100	80,96	79,79	66,43

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2024

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan. Pelanggaran perda/K-3, antara lain, pelanggaran HO, IMB, Reklame, Kebersihan, Parkir Umum, Anjal/Gepeng, PKL, PSK dan Perda lainnya. Pada tahun 2020, sebanyak 5.274 pelanggaran K3 telah diselesaikan atau sebesar 100 persen, dan pada tahun 2021, jumlah pelanggaran menurun menjadi 4.124 dan seluruhnya telah diselesaikan 100 persen. Sedangkan pada tahun 2022, jumlah pelanggaran meningkat signifikan sebanyak 13.261 dan diselesaikan 80,96 persen. Sedangkan pada tahun 2023, jumlah pelanggaran kembali meningkat sebanyak 16.420 dan dapat diselesaikan sebanyak 79,79 persen. Meningkatnya pelanggaran K3 di tahun 2022 dan 2023 disebabkan mulai normalnya aktivitas masyarakat dari dampak pandemi Covid-19, sehingga mulai banyak pelanggaran yang terjadi di tempat umum seperti berjualan asongan, kaki lima, maupun pengamen jalanan.

Tabel II.75
Rasio Kejadian Unjuk Rasa Yang Mengarah Tindakan Anarkis
Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kejadian Unjuk Rasa	215	297	403	309	196
2	Jumlah Kejadian Unjuk Rasa yang Mengarah Kejadian Anarkis	10	8	5	7	2

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2024

Masih terdapat kejadian unjuk rasa yang mengarah pada tindakan anarkis. Sepanjang tahun 2020 hingga triwulan II tahun 2024, jumlah kejadian unjuk rasa yang mengarah pada anarkisme cenderung menurun. Hal ini tidak lepas dari kerjasama dan koordinasi yang baik dari para pemangku kepentingan, serta didukung dengan pendekatan persuasif dari petugas lapangan guna mencegah dan meminimalisasi kondisi unjuk rasa menjadi tidak terkendali. Selain itu, juga diperlukan kapasitas dan kesiagaan petugas Satpol PP di Kota Surabaya.

2.1.3.1.5.2 Penanganan Bencana Kebakaran

Pesatnya pembangunan yang diikuti oleh arus urbanisasi yang meningkat menimbulkan potensi munculnya kawasan-kawasan padat penduduk dengan sarana dan prasarana/infrastruktur yang belum memadai. Umumnya pemasangan dan pemeliharaan listrik rumah tangga yang belum sesuai ketentuan menjadi salah

satu penyebab bencana kebakaran yang merupakan salah satu bencana perkotaan, di samping kejadian bencana lainnya.

Tabel II.76
Kejadian Kebakaran per Penyebab Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No	Penyebab	2020	2021	2022	2023	2024
1	Hubungan Listrik	157	200	219	95	34
2	Api Terbuka	220	246	212	247	24
3	Api Mekanis	0	0	0	0	0
4	Dalam Penyelidikan	241	257	158	429	54
5	Tidak Ada Keterangan	0	2	0	0	0
Total		617	705	589	771	112

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2024

Penyebab kebakaran di triwulan II tahun 2024, dari total 112 kejadian, sebagian besarnya karena kelalaian manusia. Dari sumber api terbuka sebanyak 24 kejadian, sebagian besar disebabkan karena kelalaian dalam meninggalkan sisa pembakaran sampah atau terdapat puntung rokok yang dibuang sembarangan. Sedangkan dari sumber listrik sebanyak 34 kejadian, sebagian besarnya karena hubungan arus pendek.

Penanggulangan bencana kebakaran dilakukan Pemerintah Kota dengan merespon laporan kejadian kebakaran hingga siap sampai di tempat tujuan dalam jangka waktu maksimal 15 menit. Waktu tanggap ini dapat terlaksana didukung oleh upaya dan kesigapan kerja tim pemadam kebakaran serta ketersediaan sarana prasarana pemadam kebakaran yang optimal, termasuk operasional Command Center 112 yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan segala kejadian kedaruratan sehingga pelayanan secara keseluruhan menjadi lebih baik. Sampai dengan triwulan II tahun 2024, rata-rata pemenuhan waktu tanggap Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kejadian kebakaran telah mencapai 100 persen. Rincian tingkat waktu tanggap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.77
Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap maksimal 15 menit	617	705	589	771	112
2	Jumlah Kejadian Kebakaran	617	705	589	771	112
3	Persentase penanganan waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, 2024

Cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II) dapat dilihat bahwa jumlah pos pemadam kebakaran sebanyak 21 unit didesain untuk dapat mencakup jumlah penduduk Kota Surabaya sesuai dengan waktu respon yang telah ditentukan.

Tabel II.78
Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	86	86	86	86	86
2	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran	21	21	21	21	21
3	Jumlah Penduduk	2.970.730	2.970.952	2.987.863	3.009.286	3.009.286
4	Cakupan Pelayanan WMK	95,6%	95,6%	95,6%	96%	96%

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan & Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2024

Berikut adalah beberapa kondisi yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar penanggulangan kebakaran dapat berjalan dengan optimal di masing-masing WMK:

a. Cakupan layanan WMK belum merata, tetapi terdapat kawasan yang cakupan layanannya saling berhimpit dan tumpang tindih.
b. Terdapat kawasan yang belum dilayani WMK pos kebakaran pembantu (2,5 km), memiliki beberapa lapangan sebagai tempat evakuasi, terjadi kebakaran cukup sering namun tanpa ada sumber air sama sekali (atau tidak dilalui sungai).
c. Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk sedang dan tinggi, jumlah kejadian kebakaran banyak, kawasan kumuh luas, titik kemacetan banyak, tidak ada lapangan dan taman sebagai tempat evakuasi, tetapi memiliki jumlah sumur kebakaran banyak dan dilalui sungai.
d. Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk rendah, jumlah kejadian kebakaran banyak, tidak ada kawasan kumuh, titik kemacetan sedang, tidak ada lapangan dan taman sebagai tempat evakuasi, memiliki jumlah sumur kebakaran sedikit bahkan tidak ada sama sekali tetapi dilalui sungai.

2.1.3.1.6 Sosial

Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya untuk menangani permasalahan sosial khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu

hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Bentuk penanganan yang diterima PPKS antara lain berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan, pemulangan PPKS ke daerah asal, perbaikan rumah tidak layak huni, pemberian permakanan, pembinaan mental, pemberian beasiswa,dan pelayanan di 5 (lima) UPTD Dinas Sosial, yaitu UPTD Griya Werdha melayani dan menangani lanjut usia miskin dan terlantar, UPTD Kampung Anak negeri yang melayani dan menangani anak jalanan, anak nakal dan anak terlantar, UPTD Babat Jerawat melayani dan menangani eks penderita kusta, UPTD Ponsos Kalijudan melayani dan menangani anak berkebutuhan khusus dan pengasramaan mahasiswa miskin berprestasi serta UPTD Liponsos Keputih yang melayani dan menangani gelandangan, penderita psikotik dan PPKS hasil penertiban.

Tabel II.79
Penanganan PPKS Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PPKS yang ada	73.176	62.243	64.933	54.916	26.521
2	Jumlah PPKS yang ditangani	44.435	31.516	34.180	25.562	8.335
3	Persentase PPKS yang ditangani (%)	60,72	50,63	52,63	46,55	31,43

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2024

Secara umum, jumlah PPKS menurun dari tahun 2020 sebanyak 73.176 orang menjadi 54.916 orang di tahun 2023, dengan persentase penanganan sebesar 46,55 persen. Sementara sampai dengan triwulan 2 tahun 2024, sebanyak 26.521 orang PPKS yang ditangani, atau 31,43 persennya. PPKS yang ditangani yang dimaksud yakni PPKS yang ada di UPTD yang dimiliki Dinas Sosial dan mendapat penanganan mulai dari permakanan hingga penanganan sosial lainnya. Hal tersebut tidak lepas dari upaya pengentasan PPKS dilakukan melalui pemulangan ke daerah asal dan pelatihan PPKS usia produktif. Namun demikian, adanya jenis PPKS yang secara status tidak dapat berubah, misalnya penyandang cacat, lansia dan orang dengan gangguan mental tetap ditangani Dinas Sosial melalui pemberian permakanan, pembinaan maupun pelayanan mental di UPTD terkait.

Selain PPKS dari penduduk Kota Surabaya sebagaimana tabel di atas, di Kota Surabaya juga terdapat PPKS dari penduduk non Surabaya. Mayoritas PPKS ini merupakan pendatang dari luar Kota Surabaya. Banyaknya pendatang ini rentan

menimbulkan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial. Jumlah PPKS dari penduduk non Surabaya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.80
PPKS Penduduk non Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PPKS non Surabaya	1.137	1.252	1.409	419	396

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa penanganan PPKS oleh Pemerintah Kota Surabaya perlu dioptimalkan, didukung dengan ketersediaan data PPKS yang terverifikasi serta keterlibatan dan peran serta PSKS dalam penanganan PPKS. PPKS merupakan komponen masyarakat yang dapat diandalkan sebagai mitra kerja Pemerintah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Peran aktif PPKS dapat dilihat dari berkurangnya PPKS. Jumlah PSKS aktif bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.81
PSKS Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Total PSKS	1.090	1.159	3.855	2.160	315
PSKS Aktif	645	996	2.443	1.747	114

Sumber: Dinas Sosial, 2024

Kota Surabaya telah mencapai keberhasilan signifikan dalam bidang sosial pada tahun 2023, dengan semua target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang urusan sosial mencapai 100%. Pencapaian ini mencakup berbagai program rehabilitasi sosial dasar yang diberikan kepada kelompok-kelompok rentan di luar panti sosial. Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial berhasil menjangkau seluruh penyandang disabilitas terlantar, memberikan dukungan dan layanan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial juga mencapai target 100%, memastikan bahwa semua anak terlantar menerima perawatan, pendidikan, dan dukungan sosial yang memadai. Upaya rehabilitasi bagi lanjut usia terlantar di luar panti sosial juga tidak ketinggalan, dengan pencapaian 100% yang menunjukkan bahwa setiap lanjut usia terlantar mendapatkan perhatian dan pelayanan yang layak. Program Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial, khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial, juga telah berhasil sepenuhnya, memastikan bahwa mereka menerima bantuan sosial yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi hidup mereka. Keberhasilan ini

mencerminkan komitmen kuat pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan layanan sosial yang inklusif dan merata, serta memastikan bahwa semua warganya, terutama yang berada dalam kondisi paling rentan, mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan.

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Analisis terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar.

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Surabaya cenderung meningkat hingga tahun 2019. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan angkatan kerja usia 15 tahun ke atas seiring dengan peningkatan jumlah penduduk angkatan kerja, yaitu sebesar 1.520.041 pada tahun 2018 menjadi 1.566.846 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 menjadi 1.582.564. Pada tahun 2021 jumlah penduduk angkatan kerja usia 15 tahun ke atas mengalami penurunan menjadi 1.572.888 hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah penduduk angkatan kerja usia 15 tahun ke atas meningkat menjadi 1.643.314. Sementara itu, pada tahun 2023, rasio angkatan kerja berada pada angka sekitar 0,67 dengan komposisi jumlah angkatan kerja 15 tahun keatas sebanyak 1.569.714 jiwa. Secara rinci, rasio angkatan kerja 15 tahun keatas terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.82
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angkatan Kerja 15 Tahun Keatas	1.566.846	1.582.564	1.572.888	1.643.314	1.569.714
2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	2.283.861	2.325.749	2.337.229	2.348.058	2.330.830
3	Rasio angkatan kerja	0,69	0,68	0,67	0,69	0,67

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2024

2.1.3.2.1.1 Sengketa Pengusaha dan Pekerja

Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara pekerja dengan pengusaha antara lain adanya pengaduan terkait masalah jamsostek, masalah upah pekerja, dan sistem kontrak kerja waktu tertentu. Secara rinci rasio jumlah

sengketa pekerja pengusaha terhadap jumlah perusahaan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.83
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Sengketa Pekerja Pengusaha	347	283	120	176	36
2	Jumlah Sengketa Selesai	125	117	120	116	36
3	Jumlah Perusahaan	12.782	12.782	10.592	10.592	10.592
4	Rasio sengketa	2,72	2,21	1,13	1,66	0.34

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2024

Pada tahun 2019 terdapat 235 sengketa, yang sebagian besarnya dipicu oleh kenaikan UMK yang menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan adanya hak-hak pekerja yang belum terpenuhi. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah kasus meningkat tajam menjadi 347 kasus, hal ini dipicu oleh gelombang PHK yang cukup besar dikarenakan banyak perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 dan pada tahun 2021 jumlah sengketa mengalami penurunan menjadi sebesar 283 sengketa. Kemudian pada tahun 2022 jumlah sengketa menurun kembali menjadi 120 sengketa. Namun pada akhir tahun 2023 jumlah sengketa meningkat menjadi 176 sengketa, dengan 116 di antaranya dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama.

2.1.3.2.1.2 Pencari Kerja yang Ditempatkan dan Difasilitasi

Dalam data pengangguran terbuka, kontribusi terbesar adalah penduduk yang mempunyai pendidikan terakhir SMA maupun SMK, sehingga perlu dilakukan upaya sinkronisasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja khususnya untuk penyiapan tenaga kerja siap pakai. Data pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.84
Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Tahun 2023
1	Tidak/belum pernah sekolah	13.829
2	Tidak/belum tamat SD	
3	Sekolah Dasar	
4	SMP	16.187
5	SMA	63.306
6	SMK	
7	Diploma I/II/III/Akademi	12.798
8	Universitas	

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

Untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengurangi angka tersebut dengan cara memfasilitasi para pencari kerja dengan kegiatan pelatihan keterampilan kerja, sertifikasi, pemagangan, bimbingan keterampilan *softskill*, bursa kerja, dan sebagainya. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran.

Tabel II.85
Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pencari Kerja yang Difasilitasi dan berhasil ditempatkan	2.570	2.815	7.291	7.760	2.624
2	Jumlah Pencari Kerja yang difasilitasi	4.507	5.132	7.291	7.760	3.818

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2024

Relatif rendahnya jumlah pencari kerja yang difasilitasi maupun ditempatkan disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi hampir di sepanjang tahun 2020 dan juga di tahun 2021 yang berdampak pada turunnya permintaan tenaga kerja dari perusahaan. Namun pada tahun 2022 hingga 2024 (TW II), kegiatan fasilitasi pencari kerja terus ditingkatkan pelaksanaanya oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Diharapkan dengan keahlian yang telah diperoleh dari fasilitasi oleh Pemerintah Kota Surabaya pencari kerja juga mampu dengan cepat menempati lowongan kerja yang ada, maupun membuka lapangan pekerjaan yang baru dari sektor informal agar mampu mengurangi jumlah pengangguran terbuka di Kota Surabaya.

Salah satu hal yang masih menjadi fokus Pemerintah Kota Surabaya adalah pemenuhan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Data peserta yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai pasar kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.86
Penempatan Kerja Peserta Peningkatan Kompetensi Sesuai Pasar Kerja Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah peserta yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai pasar kerja	126	441	732	1.117	36

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2024

2.1.3.2.1.3 Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Keselamatan dan perlindungan tenaga Kerja merupakan aspek yang penting terkait ketenagakerjaan. Dengan adanya keselamatan dan perlindungan tenaga

kerja atau Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan (K3), dapat memberikan manfaat dalam menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja melalui jaminan keselamatan kerja. Persentase perusahaan yang menerapkan K3 mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2021. Secara rinci rekap data presentase perusahaan yang menerapkan K3 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.87
Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Surabaya
Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	7.801	9.335	12.746	8.573	7.560
2	Jumlah Perusahaan	12.782	12.782	12.780	10.592	10.592
3	Persentase Perusahaan yang Menerapkan K3	61,03	73,03	99,73	80,94	71,37

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2024

Pada tahun 2019, jumlah perusahaan yang menerapkan K3 meningkat menjadi 7.801 perusahaan atau 61,03% dari total perusahaan yang terdaftar. Pada tahun 2020, jumlah perusahaan yang menerapkan K3 meningkat menjadi 9.335 perusahaan atau 73,03% dari total perusahaan yang terdaftar. Selanjutnya tahun 2021 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 meningkat menjadi 12.780 perusahaan atau 99,73% dari total perusahaan yang terdaftar. Untuk tahun 2022 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 menurun menjadi 8.573 perusahaan atau 80,94% dari total perusahaan yang terdaftar. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 menurun menjadi 7.560 perusahaan atau 71,37% dari total perusahaan yang terdaftar.

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak. Indikator untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dan hak anak adalah jumlah perempuan yang bekerja, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan, dan jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Keseluruhan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam bidang pengarusutamaan gender sejatinya dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, nilai IPG cenderung meningkat karena keterkaitannya dengan nilai IPM

di Kota Surabaya yang semakin meningkat. Sedangkan nilai IDG dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan karena IDG menitikberatkan pada partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Sejauh ini, di Kota Surabaya, pembentukan nilai IDG lebih banyak dipengaruhi faktor alami dari kemampuan individu. Karenanya masih diperlukan strategi-strategi khusus dalam percepatan partisipasi perempuan di sektor ekonomi dan politik.

Tabel II.88
Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Kota Surabaya
Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,60	93,58	93,90	94,21	94,36
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	83,88	82,86	82,82	83,20	85,29

Sumber : BPS, 2024

2.1.3.2.2.1 Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Surabaya

Pada tahun 2019 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 13.342 orang dan di tahun 2020, jumlah pekerja perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 13.433 orang. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah pekerja perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 14.903 orang. Kemudian di tahun 2022 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 14.828 orang. Data partisipasi perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.89
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pekerja Perempuan	617.965	600.845	312.338	632.797	629.533
2	Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Surabaya	13.342	13.433	14.903	14.828	15.660
3	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah kota (%)	2,16	2,24	4,77	2,34	2,49

Sumber: Badan Pusat Statistik, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia & Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2024

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa banyak perempuan yang bekerja di luar sektor pemerintahan, dan persentasenya mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

2.1.3.2.2.2 Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Surabaya pada tahun 2019, sebesar 617.965 orang atau 94,05% dari jumlah angkatan kerja perempuan dan menurun di tahun 2020 menjadi sebesar 600.845 orang. Kemudian di tahun 2021 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 312.338 orang atau 53,43%. Salah satu penyebabnya adalah dampak pandemi Covid-19 yang memaksa banyak perusahaan untuk melakukan PHK atau merumahkan pekerjanya. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Surabaya sebesar 632.797 orang atau 95,38%. Kondisi sebaliknya terjadi pada tahun 2023, di mana tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan menurun sekitar 1,42% menjadi 93,96%. Data partisipasi angkatan kerja perempuan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.90
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah angkatan kerja perempuan	657.039	655.746	584.465	663.404	669.988
2.	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	617.965	600.845	312.338	632.797	629.533
3.	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	94,05	91,63	53,43	95,38	93,96

Sumber : BPS dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2024

2.1.3.2.2.3 Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kasus KDRT secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.91
KDRT Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Tangga	957.188	974.298	974.298	1.011.183	1.011.183
2	Jumlah KDRT	13	33	75	103	49
3	Rasio KDRT	1:73.630	1:29.524	1:12.991	1:9.817	1:20.636

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB, 2024

Fenomena KDRT ibarat fenomena gunung es, kasus yang terlaporkan dengan fakta yang ada di masyarakat berbeda. Data pada tabel di atas jumlah KDRT pada tahun 2020 sebanyak 13 kejadian. Akan tetapi di tahun 2021 hingga

tahun 2023 jumlah kasusnya cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan kesadaran dan keberanian masyarakat yang meningkat untuk melaporkan tindak kekerasan di lingkungannya. Pada tahun 2023 resmi berdiri UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sehingga pelaksanaan penanganan kasus lebih masif, serta adanya peran aktif jejaring UPTD PPA dan Konselor untuk penanganan pengaduan yang masuk, serta masyarakat lebih mudah dalam mengakses pelayanan. Masyarakat juga telah mengenal adanya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Balai RW yang memfasilitasi untuk konseling dan pengaduan, sehingga jangkauan ke masyarakat lebih intens sampai dengan level RW.

Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dalam indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), non KDRT dan *trafficking* (perdagangan orang), untuk rekap data penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.92
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	342	235	138	192	264	140
2	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang Terselesaikan	342	235	138	192	264	140
3	Penyelesaian pengaduan (persen)	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB, 2024

Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan fasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, hukum berupa konsultasi hukum serta pendampingan ke Polisi, Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN), psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, *home visit*, *outreach*, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan keterampilan) dan pemberdayaan di *shelter* (rumah aman). Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan penguatan terhadap peran jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak sebagai salah satu upaya untuk menekan angka

permasalahan perempuan dan anak. Jumlah jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak pada bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.93
Jejaring Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak
Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak (lembaga)	63	70	75	662	671

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB, 2024

Dalam hal pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap anak Pemerintah Kota berupaya untuk mewujudkan Kecamatan yang Responsif Gender dan Kelurahan Ramah Anak. Pada tahun 2020 terdapat 31 kecamatan sudah responsif gender dan 119 kelurahan ramah anak. Sampai dengan tahun 2023, seluruh 31 kecamatan sudah responsif gender dan 153 kelurahan ramah anak. Salah satu upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk mendukung pengarusutamaan gender adalah pemberdayaan ekonomi bagi perempuan usia produktif. Jumlah perempuan usia produktif yang mengikuti pemberdayaan ekonomi bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.94
Perempuan Mengikuti Pemberdayaan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah perempuan mengikuti pemberdayaan ekonomi	197	0	50	14	68

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB, 2023

2.1.3.2.3 Pangan

Ketahanan pangan diukur dari ketersediaan pangan utama (beras), dibandingkan dengan tingkat konsumsi pangan utama (beras). Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama di Kota Surabaya pada tahun 2019 sebesar 310,95 kg/kapita/th. Selanjutnya pada tahun 2020 menjadi 216,55 kg/kapita/th, kemudian pada tahun 2021 menjadi 248,28 kg/kapita/th, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 210,75 kg/kapita/th, dan pada tahun 2023 sebesar 115,93 kg/kapita/th. Hal tersebut dikarenakan produksi beras dari daerah penghasil pangan menurun. Pada triwulan 2 tahun 2024, ketersediaan pangan utama di Kota Surabaya tercatat mencapai 181,57 kg/kapita/th.

Tabel II.95
Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Kg)	643.307.412	737.617.453	629.700.570	348.867.348	546.408.480
Jumlah Penduduk (jiwa)	2.970.730	2.970.952	2.987.863	3.009.286	3.009.286
Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita/th)	216,55	248,28	210,75	115,93	181,57

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dan Dispendukcapil, 2024

Selain diukur dari ketersediaan pangan utama, ketahanan pangan diukur juga dengan menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH adalah indikator untuk mengukur pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan gizi yang cukup dan seimbang. Semakin tinggi skor pola pangan menunjukkan satuan pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya.

Berdasarkan tabel di bawah ini, dapat disampaikan bahwa Pola Pangan Harapan masyarakat kota Surabaya pada tahun 2019 mencapai 96,1. Sedangkan pada tahun 2020 PPH masyarakat Kota Surabaya meningkat menjadi 96,25. Namun kemudian pada tahun 2021 kembali menurun menjadi menjadi 94,48 dan pada tahun 2022 kembali turun menjadi 94,16. Hal ini dikarenakan ada pergeseran pola konsumsi pangan kota Surabaya dari yang semula mengutamakan sumber energi karbohidrat (padi-padian dan umbi-umbian) menjadi sumber protein. Sedangkan pada akhir tahun 2023, PPH masyarakat Kota Surabaya meningkat menjadi 94,34.

Tabel II.96
Pola Pangan Harapan Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Pola Pangan Harapan	96,1	96,25	94,48	94,16	94,34

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2024

Selain permasalahan ketahanan pangan, Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan perhatian terhadap keamanan pangan segar yang dikonsumsi oleh masyarakat Surabaya. Setiap tahun dilakukan survei dan pengambilan sampel pangan segar untuk memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi aman. Hasil pengambilan sampel pangan segar Kota Surabaya pada tahun 2020 – 2024 (TW II) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.97
Keamanan Pangan Segar Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah sampel pangan segar	2.060	2.061	1.500	1.668	260
Jumlah sampel tidak memenuhi syarat keamanan	44	149	60	12	0

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2024

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan utama yang berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang pangan antara lain perlunya perluasan kerjasama penyediaan pangan dengan daerah-daerah penghasil bahan pangan, hal ini harus dilakukan untuk mendukung stabilitas harga pangan di Kota Surabaya. Kota Surabaya merupakan kota besar dengan karakter pasokan pangan yang sangat bergantung kepada daerah penghasil pangan.

Selanjutnya adalah optimalisasi potensi *urban farming* di masyarakat sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan. Dengan keterbatasan lahan di perkotaan, Pemerintah Kota tetap berupaya untuk meningkatkan produksi pangan di dalam kota sendiri. Memanfaatkan teknologi *urban farming* dan juga memanfaatkan semaksimal mungkin lahan-lahan aset pemerintah yang tidak produktif serta menarik minat generasi muda untuk berpartisipasi.

Selanjutnya masalah bahan pangan segar dan makanan olahan yang belum memenuhi syarat keamanan makanan. Permasalahan ini akan terus diawasi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi pangan segar yang aman. Selain itu juga pemerintah akan terus melaksanakan pengawasan pangan segar yang beredar dan melakukan pemeriksaan sampel secara acak dan rutin setiap bulannya.

2.1.3.2.4 Pertanahan

Seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Surabaya, maka kebutuhan akan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan masyarakat akan semakin meningkat pula. Penyediaan sarana dan prasarana yang akan dilakukan meliputi penyediaan sarana penunjang kegiatan masyarakat, sistem jaringan jalan dan drainase yang membutuhkan ruang dan lahan. Namun ketersediaan lahan aset Pemerintah Kota Surabaya yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kebutuhan masyarakat sangatlah terbatas. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut melalui pengadaan lahan untuk merealisasikan rencana pembangunan sehingga

dapat terwujud sarana, prasarana dan fasilitas yang terpadu dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya memiliki cukup banyak aset khususnya aset tak bergerak berupa tanah yang tersebar di tiap-tiap wilayah Kota Surabaya yang pemanfaatannya dapat dimaksimalkan dan disesuaikan dengan arahan pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya dan Rencana Rincinya. Hingga tahun 2019, tanah aset selain jalan dan saluran yang bersertifikat telah mencapai 29,94 persen dari total tanah aset Pemerintah Kota. Selanjutnya pada tahun 2020, tanah aset yang bersertifikat selain jalan dan saluran telah mencapai 30,77 persen dari total tanah aset Pemerintah Kota selain jalan dan saluran. Sedangkan untuk tahun 2021 tanah aset selain jalan dan saluran yang bersertifikat telah mencapai 35,12 persen dari total tanah aset Pemerintah Kota selain jalan dan saluran. Pada tahun 2022, tanah aset selain jalan dan saluran yang bersertifikat telah mencapai 46,55 persen dari total tanah aset Pemerintah Kota selain jalan dan saluran, serta terus mengalami peningkatan menjadi 50,16 persen di akhir tahun 2023 dan 50,52 persen hingga triwulan II tahun 2024. Pengamanan administrasi berupa pencatatan/inventarisasi aset, sertifikasi dan pengamanan fisik berupa pemasangan pagar, papan, patok merupakan upaya yang terus menerus dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam meningkatkan pengelolaan tanah aset bagi pembangunan untuk kepentingan umum, namun masih terdapat aset tanah maupun bangunan yang belum diamankan secara administrasi dan fisik.

Tabel II.98
Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Tersertifikat
Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Uraian	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*
Jumlah Aset Pemerintah yang telah bersertifikat	1.162	1.408	1.889	2.255	2.271
Total aset pemerintah	3.776	4.008	4.058	4.495	4.495
Persentase Aset Pemerintah yang telah bersertifikat (%)	30,77	35,12	46,55	50,16	50,52

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2024
*Total aset adalah aset tanah dan bangunan selain jalan dan saluran

Sementara itu, luas lahan aset Pemerintah Kota Surabaya yang bersertifikat sampai dengan tahun 2020, luas lahan aset yang bersertifikat mencapai 16.331.209 m^2 dan sampai dengan tahun 2021 luas lahan aset yang bersertifikat meningkat menjadi 17.296.108 m^2. Kemudian pada tahun 2022, luas lahan aset

yang bersertifikat kembali bertambah menjadi seluas 18.905.062 m^2 dan sampai dengan akhir tahun 2023 bertambah lagi menjadi seluas 20.247.009 m^2 lahan aset yang bersertifikat. Data luas lahan aset Pemerintah Kota Surabaya tahun 2020 hingga Triwulan I tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.99
Luas Lahan Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Bersertifikat
Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Uraian	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*
Akumulasi Luas Lahan Aset Bersertifikat (m^2)	16.331.209	17.296.108	18.905.062	20.247.009	20.299.367
Luas Lahan Aset (m^2)	37.809.031	38.012.923	38.165.116	38.005.231	38.055.231
Persentase Luas Lahan Aset Bersertifikat (%)	43,19	45,50	49,53	53,20	53,34

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2024
*Total aset adalah aset tanah dan bangunan selain jalan dan saluran

Sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat ke depannya, terdapat peningkatan aktivitas pergerakan orang atau barang di Kota Surabaya. Aktivitas pergerakan tersebut memerlukan sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas dan kuantitas. Untuk mendorong pengembangan perekonomian dan pusat-pusat pertumbuhan baru di Kota Surabaya, diperlukan pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur bagi kepentingan umum seperti pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat, Jalan Lingkar Luar Timur, Kebun Raya Mangrove di Wonorejo dan Gunung Anyar, TPA Benowo, serta Makam Waru Gunung.

Untuk mewujudkan pembangunan sarana prasarana bagi kepentingan umum tersebut, perlu dilakukan pengadaan tanah. Hingga akhir tahun 2020, Pemerintah Kota Surabaya telah membebaskan lahan seluas 12,3 Ha untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat dan lahan seluas 11,8 Ha untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur. Untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat dan Jalan Lingkar Luar Timur tidak terlepas dari kontribusi pengembang yang terkena rencana pembangunan tersebut. Adapun untuk RTH Kebun Raya Mangrove Wonorejo luas yang telah dibebaskan sebesar 2,08 Ha dan untuk Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar sebesar 2,24 Ha. Lahan yang telah dibebaskan hingga akhir tahun 2020 untuk sarana kebersihan TPA Benowo seluas 22,6 Ha. Adapun lahan yang telah dibebaskan untuk lokasi makam Waru Gunung seluas 3,31 Ha.

Luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dibagi menjadi dua, yaitu Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur dan Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk non

infrastruktur. Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur di antaranya pemanfaatan tanah untuk jalan, jembatan, dan saluran. Selanjutnya, Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk non infrastruktur di antaranya pemanfaatan tanah untuk makam, lapangan olahraga, taman, dan lain-lain. Berikut adalah tabel luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur dan luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk non infrastruktur.

Tabel II.100
Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Infrastruktur dan Non Infrastruktur Tahun 2019 – 2024 (TW II)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur (Ha)	8,37	7,93	1,92	1,74	0
Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur (Ha)	2,75	1,41	0,78	0,82	0,031

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2024

Realisasi luasan pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur bersifat fluktuatif karena menyesuaikan skala prioritas pembangunan kota. Sedangkan realisasi luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk non infrastruktur pada tahun 2019 sangat besar, yang disebabkan adanya percepatan proses untuk pembebasan lahan seperti di eks lokalisasi, TPA Benowo, Pamurbaya dan Waru Gunung. Sedangkan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami penurunan karena adanya lokasi rencana yang masih dalam proses verifikasi dan validasi status tanah sehingga berpengaruh terhadap luasan yang dibebaskan.

Tabel II.101
Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Kasus yang Terdaftar	33	44	30	30	30
2.	Jumlah Kasus yang Diselesaikan	2	28	16	30	7
3.	Persentase Kasus yang Diselesaikan (%)	6,06	63,64	53,33	100	23,33

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2024

Kasus tanah di atas merupakan kasus terkait kepemilikan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang ditangani/terdaftar di pengadilan. Kasus yang belum selesai di tahun terdaftar masih terus berlanjut di tahun berikutnya (ditambahkan dalam jumlah kasus terdaftar di tahun berikutnya).

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Pertumbuhan kota dan penduduk Kota Surabaya, menyebabkan terjadinya peningkatan pembangunan dan penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi pemicu terjadinya pencemaran lingkungan, antara lain tingginya produksi sampah kota serta pencemaran udara dan air, sehingga pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan persampahan dan optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau menjadi upaya yang utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

2.1.3.2.5.1 Persampahan

Volume produksi sampah Kota Surabaya didasarkan pada asumsi timbulan sampah yang dihasilkan tiap orang per hari. Volume produksi sampah Kota Surabaya sejak tahun 2021 hingga saat ini cenderung meningkat seiring bertambahnya penduduk dan aktivitasnya selepas pandemi Covid-19, sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.102
Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Volume Produksi Sampah (ton/hari)	2.222,62	1.752,50	1.792,72	1.800,04	1.805,57
2	Jumlah Sampah yang ditangani di TPA (ton/hari)	1.958,41	1.585,26	1.601	1.536,76	1.530,64

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Peningkatan volume produksi sampah antara lain disebabkan karena belum optimalnya kegiatan pengurangan sampah dari sumber sampah Seiring dengan peningkatan volume produksi sampah diperlukan adanya peningkatan daya tampung TPS yang dapat melayani pertumbuhan penduduk dan perlunya upaya pengoptimalan fungsi TPS dalam mereduksi volume sampah yang akan diangkut ke TPA melalui pembangunan TPS 3R. Data terkait jumlah TPS tahun 2020 – Triwulan II 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.103
Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk	3.159.481	2.970.730	2.970.952	2.987.863	3.009.286	3.009.286
2	Jumlah TPS (unit)	187	187	190	190	190	190
3	Jumlah TPS 3R	4	9	9	9	9	9

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Jumlah TPS sebanyak 190 unit telah merata di setiap kelurahan di Kota Surabaya. Meski demikian, Pemerintah Kota Surabaya terus mengoptimalkan pembangunan maupun peningkatan kualitas operasional TPS 3R secara bertahap sebagai bentuk optimalisasi reduksi volume sampah yang masuk ke TPA.

Perlunya pengetahuan tentang peduli lingkungan oleh masyarakat, hal ini ditunjukkan pada peran serta kelompok masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan. Kondisi lingkungan yang kurang baik akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Peran serta kelompok masyarakat dalam pengelolaan kebersihan jika dilihat pada tabel di bawah naik setiap tahunnya. Namun tetap diperlukan adanya peningkatan kerjasama dalam pengembangan pemasaran daur ulang maupun peningkatan gerakan terhadap pengelolaan sampah plastik.

Tabel II.104
Peran Serta Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Kebersihan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kelompok masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan kebersihan	1.028	1.082	909	1.113	818

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2024

2.1.3.2.5.2 Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Di samping masalah persampahan dalam pengelolaan lingkungan hidup terkait pemenuhan kebutuhan terhadap Ruang Terbuka Hidup (RTH) perlu diperhatikan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang seimbang baik secara fisik, ekologis, maupun sosial bagi warga kota maka keberadaan RTH terutama RTH Publik di perkotaan sangat diperlukan. Karena kebutuhan kota terhadap RTH tersebut maka penyediaan dan pengelolaan RTH harus dilakukan secara proporsional terhadap pembangunan infrastruktur fisik kota. Selain itu, RTH memiliki berbagai manfaat antara lain meningkatkan kualitas lingkungan hidup (pengurangan polusi); mendukung perekonomian daerah (penciptaan lapangan kerja); mendorong pembangunan berkelanjutan (penggunaan energi terbarukan); dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (peningkatan taraf hidup).

Luasan RTH publik Kota Surabaya sampai dengan tahun 2018 mencapai 21,88 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.321,93 Ha yang meliputi RTH makam, RTH lapangan, RTH telaga/waduk/boezem, RTH dari penyerahan fasum dan fasos, RTH kawasan lindung, RTH hutan kota, RTH taman dan jalur hijau. Pada tahun 2019 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,91 persen

dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.329,82 Ha. Sedangkan pada tahun 2020 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,99 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.356,96 Ha. Untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 (TW II) luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 22,01 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.392,11 Ha. Secara rinci luasan RTH publik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.105
Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Jenis RTH Publik	2020	2021	2022	2023	2024
1	RTH makam	283,53	284,95	284,95	284,95	284,95
2	RTH lapangan dan stadion	360,58	361,08	361,08	363,42	363,42
3	RTH telaga/ waduk/ boezem	198,23	198,23	198,23	198,23	198,23
4	RTH dari fasum dan fasos permukiman	205,50	205,50	205,50	205,50	205,50
5	RTH kawasan lindung dan pesisir timur	4.570,33	4.570,33	4.570,33	4.600,33	4.600,33
6	RTH hutan	66,03	66,03	66,03	66,03	66,03
7	RTH taman dan jalur hijau (JH)	1.672,75	1.672,75	1.673,65	1.673,65	1.673,65
Jumlah Luasan RTH Publik total (Ha)		**7.356,96**	**7.358,87**	**7.359,77**	**7.392,11**	**7.392,11**
Luas Kota Surabaya		**33.451**	**33.451**	**33.451**	**33.592**	**33.592**
Persentase luas RTH terhadap luas kota (persen)		**21,99**	**22,00**	**22,00**	**22,01**	**22,01**

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2023

Secara kuantitas, proporsi dan jumlah RTH publik di Kota Surabaya telah memenuhi standar minimum kebutuhan RTH publik suatu kota, namun sebagian besar dari RTH publik tersebut masih perlu untuk dimanfaatkan atau difungsikan secara optimal sebagai paru-paru kota. Upaya yang dilakukan dalam penyediaan, pengelolaan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara umum diarahkan optimalisasi fungsi, kualitas dan distribusi RTH publik secara proporsional di seluruh Kota Surabaya serta melibatkan partisipasi/peran serta masyarakat dan pihak swasta dengan menjalin kerjasama secara komprehensif dengan berbagai *stakeholder*.

2.1.3.2.5.3 Kepatuhan Usaha Terhadap Aspek Lingkungan

Keberadaan industri dan tempat usaha yang semakin pesat di kota Surabaya berkaitan dengan adanya pencemaran lingkungan berupa pencemaran air, saluran drainase, polusi udara, dan kebisingan. Di Kota Surabaya kasus dugaan pencemaran lingkungan masih terjadi. Pada tahun 2019, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 59 kasus, dan

sebanyak 59 kasus dapat ditangani. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 43 kasus, dan sebanyak 43 kasus dapat ditangani. Pada tahun 2021, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 51 kasus, dan sebanyak 51 kasus dapat ditangani. Sedangkan pada tahun 2022, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 44 kasus, dan sebanyak 44 kasus dapat ditangani. Kemudian pada tahun 2023, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 24 kasus, dan sebanyak 24 kasus dapat ditangani. Kemudian pada triwulan II tahun 2024 jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 21 kasus, dan sebanyak 21 kasus dapat ditangani. Rekapitulasi data persentase penyelesaian permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.106
Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah permasalahan lingkungan	43	51	44	51	21
2	Jumlah permasalahan lingkungan yang diselesaikan Pemerintah Kota	43	51	44	51	21
3	Persentase permasalahan lingkungan yang ditangani (persen)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah permasalahan lingkungan dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Meskipun jumlah permasalahan lingkungan naik dan turun, tetapi dapat ditangani seluruhnya. Hal ini tidak lepas dari peran Pemerintah kota dalam melakukan penanganan pengaduan lingkungan hidup dan koordinasi dengan instansi kewilayahan, Perangkat Daerah, dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup.

Dampak dari tercemarnya lingkungan hidup adalah rusaknya ekosistem alami, lingkungan tersebut tercemar akibat kegiatan manusia, baik melalui kegiatan industri ataupun kegiatan rumah tangga yang menghasilkan limbah dan sampah. Berikut merupakan ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan di kota Surabaya. Pada tabel berikut menunjukkan bahwa dengan terus meningkatnya ketaatan/kepatuhan para pengusaha terhadap aspek lingkungan serta meningkatnya kualitas sistem pengawasan dampak lingkungan oleh pemerintah Kota Surabaya.

Tabel II.107
Ketaatan/Kepatuhan Kegiatan/Usaha Terhadap Aspek Lingkungan
Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kegiatan usaha yang diawasi	200	200	254	241	99
Jumlah kegiatan usaha yang memenuhi aspek administrasi dan teknis	180	190	129	122	57

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2024

2.1.3.2.5.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (dan Persampahan)

Terjadinya permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya disebabkan oleh berbagai jenis kegiatan usaha yang berbeda-beda baik dalam bentuk industri, rumah sakit, hotel, *mall*, apartemen, maupun kantor. Dari jenis kegiatan usaha tersebut bisa ditentukan limbah apa yang dihasilkan baik padat, cair, dan udara. Limbah padat yaitu berupa sampah domestik maupun sampah B3. Limbah cair dihasilkan dari kegiatan usaha yang menggunakan air, baik itu domestik maupun air proses. Sedangkan pencemaran udara antara lain berupa gas buang hasil dari pembakaran seperti adanya *boiler*, *genset*, *furnace*, *dryer*, serta suara kebisingan dari kegiatan usaha. Dengan adanya beragam aktivitas dari kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, maka perlu adanya tolak ukur kesadaran masyarakat pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Di antara pelaku usaha ada yang sudah melakukan seluruh pengelolaan lingkungan dengan baik, dan juga ada yang belum melakukan seluruhnya. Oleh karena itu untuk menginventarisir penaatan pengelolaan lingkungan dapat dilakukan suatu upaya pengawasan dan pemantauan yang diwujudkan dalam bentuk penilaian ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan antara lain aspek administrasi (aspek ini meliputi perizinan dan rekomendasi dokumen lingkungan) dan aspek teknis (aspek ini meliputi pengendalian pencemaran air bagi yang berpotensi menghasilkan limbah cair, pengendalian pencemaran udara bagi yang menggunakan alat penghasil emisi, pengelolaan TPS Limbah B3). Nilai inilah yang nantinya bisa dijadikan sebagai target pencapaian dan sistem kontrol bersama.

Pembuangan limbah domestik dan industri di sepanjang Kali Surabaya mengakibatkan kondisi fisik sungai mengalami pencemaran yang akan semakin berat. Keberadaan Kali Surabaya penting bagi keberlangsungan perekonomian dan kelangsungan hidup bagi masyarakat, industri, dan niaga di sekitar bantaran kali. Selain itu Kali Surabaya menjadi sumber air baku PDAM Surabaya dan konsumen PDAM Surabaya bergantung pada kondisi kualitas air Kali Surabaya. Menurunnya

kualitas air baku Kali Surabaya menyebabkan menurunnya kualitas air bersih dan menurunnya kualitas jaringan pipa distribusi air bersih yang mengakibatkan rawan kebocoran air, panjang pipa PDAM di Kota Surabaya adalah 5.812,62 km^2.

Penyelesaian permasalahan lingkungan hidup tersebut dapat diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH dapat digunakan sebagai bahan evaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang difokuskan pada media lingkungan air, udara, dan tutupan lahan. Perhitungan IKLH terdiri atas tiga komponen, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Namun pada tahun 2018 terdapat surat edaran Menteri LHK Nomor 5.318/PPKL/SFT/REN.0/12/2020 perihal metode perhitungan IKLH 2020-2024 dimana komponen IKTL digantikan dengan komponen IKL (Indeks Kualitas Lahan).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang telah dicapai kota Surabaya pada tahun 2021 sebesar 67,78 masih menggunakan metode lama. Sedangkan nilai IKLH Provinsi Jawa Timur dan Nasional, yang telah menggunakan metode baru, masing-masing sebesar 68,49 dan 71,45. Sedangkan di tahun 2022, IKLH Kota Surabaya telah menggunakan metode baru yang mencapai 55,97, lebih rendah dari capaian IKLH Provinsi Jawa Timur dan Nasional yang masing-masing sebesar 69,92 dan 72,42. Kemudian di tahun 2023, IKLH Kota Surabaya mencapai 54,52 dan IKLH Provinsi Jawa Timur dan Nasional yang masing-masing sebesar 69,59 dan 72,54. Selengkapnya nilai IKLH Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Nasional dalam 5 tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.108
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021		2022	2023
IKLH Kota Surabaya	61,43	60,96	67,78	N/A*	55,97*	54,52*
IKLH Provinsi Jawa Timur	67,10	67,70	-	68,49*	69,92*	69,59*
IKLH Nasional	66,55	70,27	-	71,45*	72,42*	72,54*

*Sumber data: DLH Surabaya, 2024. *) hasil perhitungan KLHK metode baru*

Kota Surabaya menambahkan indikator persampahan dalam perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup sehingga menjadi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS). Berikut merupakan pencapaian IKLHS Kota Surabaya pada tahun 2020 hingga Tahun 2024 (TW II).

Tabel II.109
Indeks Penyusun IKLHS Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Indeks	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air (IKA)	56,05	58,18	57,91	58,50	59,72

Indeks	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,35	90,28	90,55	86,61	82,83
Indeks Tutupan Hutan (ITH)	42,63	42,63	42,64	42,65	42,65
Indeks Persampahan	75,84	76,62	82,91	83,79	83,79
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	65,08	65,71	70,82	70,35	69,72

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, diolah, 2024

Pengukuran indikator Kualitas Air Sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Indeks Kualitas Udara dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara. Indeks kualitas udara dipantau pada kepadatan transportasi tinggi, kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan area sekolah sehingga dapat mewakili kualitas udara ambien di Kota Surabaya

Perhitungan indeks tutupan hutan merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administratif kota. Karena Kota Surabaya tidak memiliki hutan maka untuk menghitung indeks tutupan lahan digunakan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/ atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Indikator di bidang persampahan mencakup:

1. Pengurangan sampah yang terdiri atas peran serta masyarakat dan pengurangan sampah skala kawasan dan perkotaan;
2. Tingkat pelayanan persampahan yang mencakup sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
3. Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Kondisi lingkungan hidup Kota Surabaya semakin membaik dari tahun 2019 sampai 2022, di mana pada tahun 2019 IKLHS sebesar 64,97 dan terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2023 IKLHS telah mencapai 70,35. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Surabaya telah cukup berhasil dalam meningkatkan

kualitas lingkungannya, baik melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang bagus serta manajemen pengelolaan persampahan, ruang terbuka hijau dan pengawasan serta pengendalian dampak lingkungan yang sangat baik. Pada tahun 2022, IKLHS mengalami kenaikan yang signifikan karena salah satu unsur pembentuk nilai KLHS yaitu indeks persampahan mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan beroperasinya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan secara optimal terutama di TPA Benowo meliputi PSEL, *Buffer zone*, IPAL, dan penutupan membran pada area *landfill*. Sedangkan pada tahun 2023 hingga 2024 (sampai dengan triwulan II), IKLHS Kota Surabaya mengalami penurunan karena Indeks Kualitas Udara (IKU) mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya faktor iklim (kemarau panjang), sehingga suhu dan debu meningkat, serta semakin meningkatnya jumlah kendaraan dan belum disertai penyediaan dan pemanfaatan transportasi umum yang optimal.

2.1.3.2.5.5 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Perubahan iklim sebagai perubahan yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat dibandingkan adalah definisi perubahan iklim yang diberikan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kerangka Kerja Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change*/UNFCCC). Komposisi atmosfer global yang dimaksud adalah komposisi material atmosfer bumi berupa Gas Rumah Kaca (GRK) yang meliputi karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya. Pada dasarnya, Gas Rumah Kaca diperlukan untuk menjaga kestabilan suhu bumi. Namun, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca menyebabkan penebalan atmosfer. Semakin banyak yang terperangkap di atmosfer bumi, menyebabkan kenaikan suhu bumi yang dikenal dengan pemanasan global.

Gas rumah kaca (GRK) adalah gas di atmosfer yang menyerap radiasi infra merah dan juga menentukan suhu atmosfer. Dampak aktivitas manusia terhadap emisi gas rumah kaca ke atmosfer telah meningkat secara signifikan, terutama sejak era pra-industri, meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Hal ini menimbulkan masalah pemanasan global dan perubahan iklim. Ada enam jenis yang dapat digolongkan sebagai gas rumah kaca, yaitu karbondioksida (CO_2), gas metan (CH_4), dinitrogen oksida (N_2O), sulfurheksafluorida (SF_6), perfluorokarbon (PFCS) dan hidrofluorokarbon (HFCS). Selain itu, beberapa gas yang juga dihitung

sebagai gas rumah kaca, yaitu karbonmonoksida (CO), nitrogen oksida (NOX), klorofluorokarbon (CFC), dan gas organik volatil non logam. Gas rumah kaca yang paling berkontribusi terhadap gejala pemanasan global adalah CO_2, CH_4, N_2O, NOX, CO, PFC dan SF_6.

Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2011 tentang Inventarisasi Gas Rumah Kaca. Inventarisasi GRK dilakukan melalui pemantauan dan pengumpulan data tentang aktivitas sumber emisi, kemudian melakukan perhitungan emisi dan serapan GRK untuk mendapatkan data *real-time* mengenai tingkat, status, dan tren perubahan emisi GRK dari berbagai sumber emisi dan sarapan, termasuk penyimpanan karbon. Dalam mereferensikan peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya, melakukan analisis secara rutin terhadap emisi/serapan gas rumah kaca setiap tahun sejak tahun 2019, yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.110
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO_2 *eq*)	630	47.611,15	0	124.601,46	366,67

Sumber: Aksara Bappenas, 2024

2.1.3.2.5.6 Konservasi Energi

Berdasarkan undang-undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi pasal 25 menyatakan bahwa konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat, mencakup seluruh tahap pengelolaan energi. Dalam undang-undang ini juga disebutkan dalam pasal 21 bahwa Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Listrik.

Konversi energi adalah perubahan bentuk energi dari yang satu menjadi bentuk energi lain. Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan

mengurangi jumlah penggunaan energi. Pemerintah Kota Surabaya memulai upaya konversi dan konservasi energi dengan cara penerapan *solar cell*, pemasangan PJU dengan LED, mengkonversi gas metan dari sampah organik menjadi listrik di rumah kompos/TPS dan TPA Benowo dan penggunaan BBG untuk kendaraan roda empat yang terdaftar pada tahun 2015 sebanyak 257 mobil. Selain itu, dibangun juga kincir angin di beberapa titik lokasi. Namun, upaya memulai konversi dan konservasi energi ini belum diterapkan oleh masyarakat Surabaya secara keseluruhan. Penerapan teknologi dan pengembangan pemanfaatan energi alternatif terbarukan pada gedung Pemerintah Kota Surabaya antara lain di Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) dan area Balai Kota Surabaya, sedangkan pada gedung swasta antara lain Intiland Tower, Esa Sampoerna Center, dan Graha Wonokoyo, sehingga masih diperlukan optimalisasi penerapan teknologi dan pengembangan pemanfaatan energi alternatif terbarukan baik pada sektor pemerintah maupun swasta.

Tabel II.111
Penerapan Upaya Penerapan Konservasi Energi Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Penerapan Konservasi Energi	Satuan	Jumlah (titik) s.d. Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PJU LED	Unit	20.598	20.598	96.252	105.846	105.846
Solar cell di Sekolah Adiwiyata	Unit	29	29	29	29	29
Solar cell di gedung pemerintah	Lokasi	35	40	40	40	40
Kincir Angin	Unit	8	8	8	8	8
Warning Light (APIL) *Solar Cell*	Unit	4	8	21	21	21
Traffic Light (APIL) *Solar Cell*	Unit	71	77	77	77	77

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2024

Selanjutnya, dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tersebut, Pemerintah Kota Surabaya berusaha untuk melanjutkan upaya konversi dan konservasi energi dengan mendorong pihak swasta atau masyarakat umum untuk ikut berpartisipasi. Untuk pengusahaan konservasi energi oleh kegiatan/usaha swasta sudah mulai didorong mulai tahun 2017, dengan 11 kegiatan/usaha yang diaudit di tahun tersebut. Selanjutnya pada tahun 2018 hingga 2023, setiap tahunnya menambahkan 11 kegiatan/usaha yang telah diaudit penerapan konservasi energinya. Tentunya hal ini masih jauh dari pengawasan yang menyeluruh dikarenakan jumlah kegiatan/usaha yang masih sedikit. Sehingga diharapkan ke depannya dapat meningkat.

Namun, dalam hal pemanfaatan energi terbarukan bagi sektor swasta masih belum mempunyai payung hukum. Karena itu, perlu diciptakan instrumen pendukung di antaranya berupa peraturan daerah dalam rangka mendorong percepatan dimulainya upaya pemanfaatan energi terbarukan ini oleh masyarakat Surabaya secara keseluruhan.

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan bagi penduduk yang wajib ber-KTP adalah kepemilikan KTP. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk PAD secara Nasional, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 KTP non elektronik tidak berlaku lagi dan hanya berlaku KTP elektronik. Data penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.112
Jumlah Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki KTP Berbasis NIK
Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Tahun	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP
2019	2.355.489	2.108.476
2020	2.188.680	2.147.337
2021	2.217.423	2.181.345
2022	2.251.947	2.204.168
2023	2.280.865	2.033.593
2024	2.280.865	2.033.593

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2024.

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP yang salah satunya disebabkan karena kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan.

Tabel II.113
Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian
Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelahiran (berdasarkan data SIAK)	51.368	75.253	40.012	90.577	30.678
2	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	51.368	75.253	40.012	90.577	30.678
3	Jumlah kematian (berdasarkan data SIAK)	23.212	42.717	30.960	27.503	13.807
4	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	23.212	42.717	30.960	27.503	13.807

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024.

Berdasarkan tabel penerbitan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian) di atas, menunjukkan bahwa seluruh penduduk lahir berdasarkan data SIAK memperoleh akta kelahiran, dimana anak yang dilahirkan di seluruh rumah sakit, puskesmas, dan beberapa bidan di Kota Surabaya (yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) akan otomatis mendapatkan akta kelahiran. Untuk anak yang dilahirkan di luar kota Surabaya dan selain rumah sakit, puskesmas, dan bidan di kota Surabaya, maka akta kelahiran anak tersebut diurus secara pribadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemerintah Kota Surabaya memberikan kemudahan dalam pengurusan akta kelahiran yaitu dengan menyediakan fasilitas pelayanan publik di Siola dan mobil pelayanan keliling oleh dispendukcapil yang beroperasi di beberapa titik lokasi, antara lain: di RT, RW, kantor kelurahan, kantor kecamatan, dan taman kota (tempat publik). Hal yang sama juga berlaku pada penduduk yang meninggal, di mana penduduk meninggal dapat diurus di kantor kelurahan/kecamatan.

Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2019 adalah 8.592 jiwa, dari jumlah anak berusia kurang dari 17 tahun yaitu 829.725 jiwa. Selanjutnya kepemilikan KIA sampai tahun 2020 yaitu 204.245 jiwa, dari jumlah anak berusia kurang dari 17 tahun yaitu 752.020 jiwa. Pada tahun 2021 kepemilikan KIA bertambah menjadi 371.971 jiwa, dari jumlah anak berusia kurang dari 17 tahun sejumlah 768.210 jiwa. Pada tahun 2022, kepemilikan KIA menjadi 449.728 jiwa, dari jumlah anak berusia kurang dari 17 tahun, yakni 735.900 jiwa. Pada tahun 2023, kepemilikan KIA menjadi 594.772 jiwa, dari jumlah anak berusia kurang dari 17 tahun, yakni 776.830 Jiwa. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, kepemilikan KIA bertambah menjadi 739.456 jiwa, atau 96,43% dari jumlah anak berusia kurang dari 17 tahun yaitu 776.830 jiwa.

2.1.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dilakukan melalui pengendalian angka kelahiran dan pendampingan keluarga.

2.1.3.2.7.1 Jumlah Akseptor KB

Akseptor KB merupakan akseptor KB baru yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) yang pertama kali menggunakan alat kontrasepsi atau PUS yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah mengalami keguguran/ melahirkan. Pada tahun 2020, jumlah akseptor KB sebesar 82,37 persen dari PUS (528.086).

Sedangkan tahun 2021, jumlah akseptor KB sedikit menurun menjadi sebesar 429.350 atau 81,33 persen. Pada tahun 2022, jumlah akseptor KB sebesar 309.150 atau 95 persen. Kemudian pada tahun 2023, jumlah akseptor KB sebesar 307.775 atau 83,05 persen dari total PUS. Sementara sampai dengan triwulan 2 tahun 2024, jumlah akseptor KB sebesar 74,13 persen dari PUS (347.519). Selengkapnya untuk data pasangan usia subur dan jumlah akseptor KB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.114
Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	528.086	527.912	325.405	370.601	347.519
2	Jumlah Akseptor KB	434.983	429.350	309.150	307.775	257.601
3	Rasio Akseptor KB (persen)	82,37	81,33	95	83,05	74,13

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB, 2024

Adapun angka *Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) dari tahun 2020 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Tahun 2020 sebanyak 434.983 pasangan, lalu meningkat di tahun 2021 menjadi sebanyak 435.479 pasangan. Sedangkan untuk tahun 2022 angka *Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) adalah 303.968 pasangan, dan pada tahun 2023 angka *Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) adalah 206.196 pasangan. Sementara sampai dengan triwulan 2 tahun 2024, angka mCPR adalah 255.485 pasangan.

Sedangkan angka *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) mengalami fluktuasi dari tahun 2017 hingga 2019. Tahun 2017 mencapai 13,62; Tahun 2018 mencapai 21,98; dan Tahun 2019 mencapai 19,88. Sedangkan data ASFR untuk tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 juga belum dapat disajikan pada *web* resmi BPS Kota Surabaya.

2.1.3.2.7.2 Jumlah Cakupan Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif merupakan PUS yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Peserta KB aktif mengalami penurunan dari tahun ke tahun yang diakibatkan oleh adanya angka *drop out* peserta KB jenis pil, suntik dan kondom. Upaya yang dilakukan untuk menekan turunnya angka peserta KB aktif adalah revitalisasi Keluarga Berencana melalui pembinaan kelompok KB pria dan pembentukan Kampung KB. Selengkapnya untuk data jumlah pasangan usia subur dan jumlah peserta program KB aktif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.115
Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	528.086	527.912	325.405	370.601	347.519
2	Jumlah Peserta Program KB Aktif	434.983	429.350	306.896	307.610	255.485
3	Cakupan Peserta KB Aktif	82,37	81,33	94,31	83,03	73,52

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB, 2024

Sehubungan dengan upaya pengendalian penduduk melalui pelayanan KB, maka salah satu targetnya adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yaitu wanita usia 15-49 tahun yang telah menikah. Cakupan peserta KB Aktif dari tahun 2020 hingga tahun 2024 triwulan 2 cenderung fluktuatif.

Program KB bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat akan terciptanya keluarga sejahtera. Keberhasilan implementasi program dapat dilihat dari tingkat kepesertaan masyarakat pada program KB. Jika dilihat pada tabel di bawah ini. Jumlah peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi, Jumlah pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan ber KB (*unmet need*), dan Jumlah pasangan usia subur yang usia istrinya kurang dari 20 tahun semakin menurun dari tahun ke tahun, namun mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 dikarenakan dampak pandemi Covid-19 dengan banyak fasilitas kesehatan yang membatasi layanannya, sekaligus banyak peserta KB yang membatasi interaksi dengan orang lain.

Tabel II.116
Partisipasi KB dari Pasangan Usia Subur (PUS) Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah peserta KB aktif yang *drop out* kontrasepsi	712	937	627	371	303
2	Jumlah pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan ber KB	93.103	98.562	69.610	61.899	45.615
3	Jumlah pasangan usia subur yang usia istrinya kurang dari 20 tahun	12	14	204	29	26

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB, 2024

Keberhasilan program Keluarga Berencana, salah satunya diukur dari indikator *Total Fertility Rate* (TFR) yang merupakan indikator untuk melihat jumlah nak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Fungsi TFR yaitu untuk membantu para perencana program pembangunan dalam meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan Ibu hamil dan perawatan

anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Capaian TFR Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.117
***Total Fertility Rate* (TFR) Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Total Fertility Rate (TFR)	1,729	1,705	1,73	1,831	1,70

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB, 2023 (diolah). Catatan: Tahun 2019 merupakan data olahan Susenas.

2.1.3.2.7.3 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penyediaan pelayanan KB gratis bagi masyarakat yang berasal dari Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I). Selain itu, secara mikro, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas keluarga dengan kecilnya jumlah anggota suatu keluarga diharapkan dapat meningkatkan gizi, tingkat kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya.

Dalam hal mewujudkan keluarga yang sejahtera, maka memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, utamanya kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Pada tahun 2019 terdapat 1000 BKB, 233 BKR dan 100 BKL yang aktif melakukan kegiatan. Sedangkan sampai dengan tahun 2023 terdapat 856 BKB, 124 BKR, dan 306 BKL yang aktif melakukan kegiatan.

2.1.3.2.7.4 Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat. Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari a) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain; b) Lembaga Adat; c) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan; d) RT/RW; e) Karang Taruna; f) Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Jumlah lembaga LKMK di Kota Surabaya sebanyak 153 lembaga. Selain itu, komitmen Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat digambarkan dari seberapa banyak jumlah Keluarga Miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif. Pada tahun 2019,

terdapat 190 keluarga miskin yang dilatih untuk melakukan produksi, dan pada tahun 2020 terdapat pendampingan peningkatan produksi untuk 23 keluarga miskin. Pada tahun 2021, dilaksanakan pendampingan untuk 50 keluarga miskin. Sedangkan pada tahun 2022, terdapat kenaikan yang cukup signifikan dengan terdapatnya dukungan bantuan modal usaha serta adanya pelatihan berusaha melalui program Padat Karya yang dilaksanakan secara sinergi oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan memanfaatkan lahan aset Pemerintah Kota yang belum termanfaatkan, yang diberikan kepada 924 keluarga miskin di tahun 2022, dan 1.499 keluarga miskin pada tahun 2023. Data keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.118
Keluarga Miskin yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif
di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019*	2020*	2021*	2022**	2023**
Jumlah Keluarga Miskin yang telah Melakukan Usaha Ekonomi Produktif	190	23	50	924	1.499

*Sumber: * Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB*
***Dinas Sosial*

Kelompok keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif akan tetap diupayakan diberikan pendampingan agar memenuhi kriteria bagi Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pembinaan ke arah peningkatan usaha dan omzet bagi kelompok usaha keluarga miskin yang telah berjalan.

2.1.3.2.8 Perhubungan

Kota Surabaya sampai dengan saat ini memiliki total 15 terminal angkutan darat yang melayani angkutan umum dengan jenis bus dan/atau angkutan kota (angkot). Jumlah angkutan darat di Kota Surabaya sendiri terus menurun sejak tahun tahun tahun 2020 menjadi 1.999 kendaraan, berlanjut ke tahun 2021 menjadi 1.870 kendaraan, kemudian pada tahun 2022 ini menjadi 1.051 kendaraan, sedangkan pada tahun 2023 juga mengalami penurunan menjadi 373 kendaraan akibat banyaknya angkutan umum yang dinonaktifkan dan semakin menurun pada triwulan II tahun 2024 menjadi 244 kendaraan. Dalam rangka peningkatkan pelayanan angkutan umum di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan restrukturisasi angkutan kota (mikrolet dan bus kota) agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di bidang transportasi. Detil jumlah terminal dan angkutan darat di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.119
Jumlah Terminal dan Angkutan Darat Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Terminal Tipe A (Bus)	2	2	2	1	1
2	Jumlah Terminal Tipe B	1	1	1	1	1
3	Jumlah Terminal Tipe C	11	11	13	13	13
4	Jumlah Angkutan Darat	1.999	1.870	1.051	373	244

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2024

Dalam merealisasikan restrukturisasi angkutan kota tersebut, Pemerintah Kota Surabaya masih menjamin pelayanan transportasi (angkutan umum dalam trayek dan tidak dalam trayek) eksisting. Salah satu contohnya adalah pemberian izin trayek yang dikeluarkan kepada pemilik angkutan umum. Dalam pemberian izin trayek tersebut, angkutan umum harus memenuhi syarat laik jalan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel II.120
Rasio Izin Trayek Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk	2.970.730	2.970.952	2.987.863	3.009.286	3.009.286
2	Jumlah Izin Trayek yang Dikeluarkan	3.257	2.869	563	188	125
3	Rasio Izin Trayek	0,001096	0,000966	0,000188	0,000062	0,00041

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2024

Tren penurunan jumlah izin trayek yang dikeluarkan ini disebabkan oleh banyaknya kendaraan angkutan umum yang sudah berakhir masa berlaku pajaknya tidak bisa balik nama kendaraan, dikarenakan persyaratan wajib berbadan usaha. Penyebab berikutnya adalah menurunnya jumlah penumpang angkutan umum setiap tahun diakibatkan banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi serta persaingan dengan kendaraan berbasis aplikasi sehingga membuat pendapatan pemilik dan pengemudi angkutan hanya mencukupi untuk pemenuhan bahan bakar, sehingga pemilik tidak mampu melakukan perawatan kendaraan yang berakibat pada angkutan umum yang tidak laik jalan. Penurunan jumlah kendaraan yang melakukan pengurusan izin trayek disebabkan juga oleh banyaknya kendaraan taksi dan angkot yang berubah menjadi plat hitam, yakni sebanyak 16 dan 23 kendaraan angkutan umum pada tahun 2018 dan 2019 secara berurutan.

Meskipun terjadi penurunan jumlah kendaraan yang melakukan pengurusan izin trayek, Pemerintah Kota Surabaya selalu berusaha meningkatkan kualitas

layanan angkutan umum dari tahun ke tahun. Salah satunya dengan memperpendek waktu tunggu kendaraan umum di terminal atau halte. Rata-rata waktu tunggu angkutan umum di Kota Surabaya dari tahun ke tahun diharapkan semakin singkat. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan waktu tunggu angkutan kota karena banyak masyarakat pengguna angkutan umum eksisting dan kendaraan pribadi beralih menggunakan *trunk* dan *feeder* dikarenakan faktor kenyamanan dan ketepatan waktu. Rata-rata waktu tunggu kendaraan umum di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.121
Rata-Rata Waktu Tunggu Angkutan Umum Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata waktu tunggu angkutan kota (menit)	12,61	12,61	12,71	14	14
Rata-rata waktu tunggu bus (menit)	13,00	13	18,95	15	15

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2024

Selain itu, untuk memberikan kenyamanan pada pengguna angkutan umum, Pemerintah Kota Surabaya juga memperhatikan *load factor* angkutan umum. *Load factor* adalah rasio jumlah penumpang dengan kapasitas tempat duduk per satuan waktu tertentu. *Load factor* menggambarkan kebutuhan/*demand* dibandingkan kapasitas yang tersedia. Semakin tinggi angka *load factor* kendaraan umum maka semakin efisien pula biaya operasionalnya. Pada tahun 2020 nilai *load factor* angkutan kota mengalami penurunan yang cukup siginifikan akibat menurunnya jumlah penumpang/pengguna angkutan umum karena penerapan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19. Namun pada tahun 2021 nilai *load factor* angkutan kota mengalami kenaikan dan berlanjut di tahun 2023 juga mengalami kenaikan menjadi 44,86. Akan tetapi mengalami penurunan pada triwulan II tahun 2024 menjadi 37,95. Begitu pula dengan nilai *load factor* bus, yang menunjukkan tren serupa. Data terkait *load factor* kendaraan umum di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.122
Rata-Rata Load Factor Angkutan Umum Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Load factor angkutan kota (persen)	29,69	33,02	33,92	44,86	37,95
Load factor bus (persen)	40,58	44,65	57,45	55,21	37,77

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2024

Untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum (baik penumpang dan barang) di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya melalui

pemeriksaan kendaraan melalui Uji KIR yang berada di UPTD PKB Tandes dan Wiyung. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara berkala selama tiap hari kerja. Dari tahun 2021, jumlah kendaraan umum yang lulus uji terus menurun menjadi sebanyak 123.196 kendaraan sampai dengan akhir tahun 2023. Penurunan tersebut dikarenakan berkurangnya minat masyarakat untuk melakukan uji KIR sebagai syarat kendaraan untuk beroperasional di jalan, serta banyak kendaraan angkutan umum yang beroperasi melebihi umur kendaraan. Rekapitulasi jumlah kendaraan yang lulus uji dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.123
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah uji kir angkutan umum	45.582	43.135	43.870	42.770	17.765
2	Jumlah kendaraan wajib uji kir	159.116	151.064	143.605	136.367	53.535
3	Jumlah kendaraan yang diuji kir	147.708	142.532	136.735	126.819	51.436
4	Jumlah kendaraan lulus uji kir	141.663	135.905	132.719	123.196	49.741

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2024

Selain itu, untuk memberikan kenyamanan demi menjaga kondisi lalu lintas di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan setiap tahunnya, yang salah satunya berupa pemasangan rambu-rambu baik rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. Dengan adanya penambahan jumlah rambu tersebut, diharapkan mampu mengubah perilaku berkendara para pengguna kendaraan serta menjadi lebih taat dan tertib terhadap peraturan.

Tabel II.124
Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	17.439	18.140	19.261	1.296	0

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2024

Selain memberikan kenyamanan dan keselamatan transportasi darat Pemerintah Kota Surabaya melakukan pemasangan dan pemeliharaan peralatan informasi cuaca (*Weather Information Display*) yang dapat digunakan oleh nelayan-nelayan di pesisir Kota Surabaya sebagai pertimbangan ketika akan berlayar. Peralatan tersebut telah bekerja sama dengan BMKG untuk memberikan data cuaca secara riil yang bertujuan untuk menunjang keselamatan kepada nelayan. Pemasangan peralatan informasi cuaca (*Weather Information Display*) telah dilaksanakan pada tahun 2018 dipasang sejumlah 3 unit, kemudian pada tahun

2019 sejumlah 3 unit lagi sehingga menjadi 6 unit dan sampai dengan akhir tahun 2023 jumlahnya masih tetap 6 unit. Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan pelatihan keselamatan kepada nelayan agar tetap menjaga keselamatan ketika berlayar.

Tabel II.125
***Weather Information Display* Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah *Weather Information Display*	6	6	6	6	6

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2024

Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan perhatian terhadap keselamatan perlintasan sebidang karena kondisi rel kereta api di Kota Surabaya akan menjadi jalur ganda (*Double Track*) secara keseluruhan yang akan meningkatkan frekuensi jadwal dari kereta api. Tahun 2018, Pemerintah Kota Surabaya melakukan pemeliharaan dan operasional perlintasan sebidang pada lokasi Margorejo, Tandes (1 pos), dan A. Yani - Royal Plaza. Pada tahun 2019, bertambah 2 lokasi perlintasan yaitu Ketintang dan Singapur. Pada tahun 2022 bertambah 1 lokasi lagi yaitu Pakal. Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan pelatihan keselamatan kepada operator perlintasan sebidang serta masyarakat agar tetap memperhatikan keselamatan di perlintasan sebidang.

Tabel II.126
Operasional Perlintasan Sebidang Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Lokasi Perlintasan Sebidang yang dioperasikan	5	5	6	6	6

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2024

2.1.3.2.9 Komunikasi dan Informatika

Guna mendukung jangkauan jaringan komunikasi, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informasi telah melakukan pemeliharaan terhadap sejumlah jaringan fiber optik (FO) yang tersebar di berbagai lokasi dan alat komunikasi HT (*handy talkie*) pada tiap SKPD. Selain menggunakan alat komunikasi berupa HT (*handy talkie*), untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan infrastruktur TIK khususnya jangkauan jaringan, Pemerintah Kota Surabaya juga menggunakan sejumlah infrastruktur lain maupun bekerjasama dengan pihak ketiga.

Tabel II.127
Jaringan Komunikasi Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Alat Komunikasi HT (unit)	2.753	2.838	2.938	2.978	2.978
Jaringan Fiber Optik (kilometer)	237,67	248,84	285,93	285,93	285,93

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

Pemerintah Kota Surabaya sejak awal telah memiliki situs resmi yang dapat diakses pada alamat *http://www.surabaya.go.id*. Selain halaman utama, juga terdapat beberapa sub domain dalam website tersebut yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Karena media komunikasi bukan hanya melalui internet, Pemerintah Kota juga melakukan sejumlah upaya untuk mengelola dan membangun komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan tatap muka secara langsung seperti dialog melalui media massa maupun beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informasi berusaha meningkatkan pelayanan publiknya dengan mendayagunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Selain menggunakan *website* resmi milik Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya juga menggunakan aplikasi/sistem pelayanan perizinan sebagai sarana untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kota telah membangun 30 sistem informasi pelayanan perizinan dan 10 sistem informasi pelayanan non perizinan. Sedangkan pada tahun 2018 hingga triwulan II tahun 2024, setiap tahunnya terdapat 10 sistem informasi pelayanan perizinan dan 5 sistem informasi pelayanan non perizinan yang terbangun. Karena masih banyak terdapat layanan perizinan dan non perizinan yang belum berbasis TIK maka Pemerintah Kota terus mengupayakan untuk membangun aplikasi guna meningkatkan jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang berbasis TIK seperti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.128
Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Daring Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	10	10	10	10	10
2	Sistem Informasi Pelayanan Non Perizinan	5	5	5	5	5

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

2.1.3.2.10 Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) serta Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian. Daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif di Kota Surabaya adalah daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi. UMK menjadi satu sektor yang memiliki peran strategis terhadap perekonomian Kota Surabaya, yang antara lain ditunjukkan dengan penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDRB Kota Surabaya melaui peningkatan produktivitas usaha.

2.1.3.2.10.1 Koperasi

Peningkatan jumlah koperasi di Kota Surabaya disertai dengan peningkatan pertumbuhan jumlah anggota koperasi, hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dikatakan berhasil. Pada tahun 2019 jumlah anggota koperasi mencapai 271.267 orang, sedangkan pada tahun 2020 jumlah anggota koperasi turun menjadi 221.968 orang. Namun pada tahun 2021 jumlah anggota koperasi mengalami peningkatan menjadi 256.946 orang. Pada tahun 2022 mengalami penurunan karena menggunakan sumber data yang berbeda dari tahun sebelumnya yaitu *online data system* (ODS) Kementerian Koperasi dan UKM sehingga jumlah anggota koperasi aktif menjadi 153.809 dengan rincian jenis kelamin laki-laki sejumlah 88.038 orang dan perempuan sejumlah 65.771 orang. Sedangkan pada tahun 2023, jumlahnya meningkat menjadi 150.327 orang. Secara rinci pertumbuhan anggota koperasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.129
Pertumbuhan Anggota Koperasi Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah anggota koperasi	271.267	221.968	256.946	153.809	150.327

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2024

Pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dikatakan cukup berhasil, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah koperasi aktif. Pada tahun 2019 jumlah koperasi sebanyak 1.784 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.521 koperasi. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah koperasi mengalami peningkatan menjadi 1.817 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.554 koperasi. Untuk tahun 2021 jumlah koperasi kembali meningkat sebanyak 1.834 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.571 koperasi. Namun

pada tahun 2022 jumlah koperasi menurun menjadi sebanyak 2.002 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 598 koperasi. Kemudian pada tahun 2023 jumlah koperasi sebanyak 2.009 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 596 koperasi. Secara rinci presentase koperasi aktif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.130
Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah koperasi	1.784	1.817	1.834	2.002	2.009
2	Jumlah koperasi aktif	1.521	1.554	1.571	598	596
3	Persen koperasi aktif	85,26	85,52	85,66	29,87	29,67

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2024

Distribusi jumlah koperasi di Tahun 2023 adalah 295 koperasi berjenis koperasi jasa, 1.396 koperasi berjenis koperasi konsumen, 31 koperasi berjenis koperasi pemasaran, 129 koperasi berjenis koperasi produsen dan 167 koperasi berjenis koperasi simpan pinjam. Distribusi jumlah koperasi di Tahun 2023 adalah 295 koperasi berjenis koperasi jasa, 1.396 koperasi berjenis koperasi konsumen, 31 koperasi berjenis koperasi pemasaran, 129 koperasi berjenis koperasi produsen dan 167 koperasi berjenis koperasi simpan pinjam. Sedangkan jumlah koperasi per jenis usaha di Kota Surabaya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.131
Koperasi per Jenis Usaha di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jasa Angkutan Darat	13	13	13	17	17
Jasa Angkutan Laut	1	1	1	0	0
Jasa Lain-Lain	90	91	105	681	693
KJKS	23	23	23	18	16
Kopinkra	7	7	7	7	7
Kopkar	326	327	328	377	372
Kopma	21	21	21	22	22
Koppas	21	24	24	15	16
Koppontren	22	22	22	23	23
Kopwan	171	171	171	142	142
KPRI	185	185	186	183	182
KSP	107	108	110	114	113
KSU	639	666	665	238	238
KUD	5	5	5	5	5
Pemuda	4	4	4	6	6
Pertanian	4	4	4	5	5
PK 5	33	33	33	26	26
Primkopabri	12	12	12	12	12
Primkopad	18	18	18	18	18
Primkopal	17	17	17	17	17

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Primkopau	1	1	1	1	1
Primkoppol	11	11	11	11	11
Primkoptama	30	30	30	30	30
Profesi	18	18	18	26	27
Sekunder	1	1	1	1	1
Nelayan	4	4	4	5	5
Tenaga Kerja Bongkar	-	-	-	2	2
TOTAL	**1.784**	**1.817**	**1.834**	**2.002**	**2.007**

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Surabaya, 2024

Rasio volume usaha koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi aktif pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 volume usaha koperasi mencapai 2.128 milyar dari 1.521 koperasi. Sedangkan pada tahun 2020 volume usaha koperasi turun menjadi 1.864 milyar dari 1.554 koperasi dan pada tahun 2021 volume usaha koperasi meningkat menjadi 2.147 milyar dari 1.571 koperasi. Pada tahun 2022 volume usaha koperasi turun menjadi 1.412 milyar karena jumlah koperasi aktif RAT mengalami penurunan menjadi 488 koperasi aktif namun secara rasio meningkat menjadi 2,89. Pada tahun 2023, rasio volume usaha koperasi aktif mengalami peningkatan menjadi 3,12 dengan nilai volume usaha koperasi aktif sebesar 1.419 Milyar dari 455 koperasi aktif ber-RAT. Secara rinci rasio volume usaha koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.132
Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi Aktif di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Koperasi Aktif	1.521	1.554	1.571	488	455
Volume Usaha Koperasi Aktif (Rp. Milyar)	2.128	1.864	2.147	1.412	1.419
Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif	1,40	1,20	1,37	2,36	3,12

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2024

2.1.3.2.10.2 Usaha Mikro dan Kecil

Dasar perekonomian juga ditunjukkan dengan peningkatan jumlah UMKM. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan fasilitasi pemasaran dan kemitraan terhadap 5.363 pelaku usaha mikro dengan berbagai macam intervensi di antaranya pendampingan pengurusan merek 125 usaha mikro, pendampingan sertifikasi halal 100 usaha mikro, pelatihan 62 usaha mikro, fasilitasi kemitraan/kerjasama 136 usaha mikro, fasilitasi pemasaran berupa pameran/bazar/gelar produk 2.188 UMKM, dan pemasaran secara online melalui e-

Peken 2.752 usaha mikro. Sedangkan, pada tahun 2023 fasilitasi pemasaran dan kemitraan usaha mikro dilakukan kepada 6.600 pelaku usaha mikro berupa pemberian pelatihan dan pendampingan bagi usaha mikro, pemberian sertifikasi, pemberian surat keterangan pendaftaran merek dan halal, pemasaran secara online melalui e-Peken hingga fasilitasi pemasaran pada berbagai *event* di Kota Surabaya. Fasilitasi pemasaran dan kemitraan usaha mikro Kota Surabaya yang dilakukan setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.133
Pembinaan dan Pengembangan UMKM Kota Surabaya Berdasarkan Intervensi Tahun 2019 – 2023

Intervensi	2019	2020	2021	2022	2023
Merek	250	140	200	125	156
Halal	200	70	165	100	265
Pelatihan UMKM	769	88	505	62	1.086
Fasilitas Kemitraan/Kerjasama	45	187	260	136	136
Pameran/Bazar/Gelar Produk	893	9	346	2.188	2.012
Pemasaran Online Peken	-	-	-	2.752	2.945
Total	**2.157**	**494**	**1.476**	**5.363**	**6.600**

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2024

Pemberdayaan UMKM Kota Surabaya dilakukan secara kolaboratif oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan berbagai pihak terkait seperti perbankan, e-commerce, kampus, dan lainnya. Intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya berfokus pada legalisasi, peningkatan kualitas produk, dan pemasaran. Sepanjang tahun 2023, sebanyak 6.600 UMKM diintervensi dalam rangka pengembangan UMKM yang berdaya saing dengan omzet mencapai Rp52.956.901.699, dengan cara:

1. Penguatan produk yang dilakukan melalui fasilitasi pengurusan merek dan sertifikat halal, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas UMKM atas kualitas sebuah produk yang dihasilkan;
2. Peningkatan manajemen kelembagaan melalui pelatihan, yang akan meningkatkan kualitas SDM dan pengetahuan dalam mengelola dan mengembangkan UMKM;
3. Peningkatan permodalan dengan fasilitasi kemitraan/ kerjasama;
4. Peningkatan pemasaran dengan pameran/ bazar/ gelar produk dan pemasaran *online* e-Peken.

Di samping itu, Pemerintah Kota Surabaya juga menggandeng pihak lain dalam mengembangkan UMKM terutama berkaitan dengan permodalan. Sampai

dengan triwulan II tahun 2024, sebanyak 33.766 UMKM mendapat fasilitasi permodalan perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat. Diharapkan hal ini dapat mewujudkan peningkatan akses keuangan daerah secara signifikan.

2.1.3.2.11 Penanaman Modal

Pengaruh penanaman modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat dilihat melalui *multiplier effect* yang ditimbulkannya. *Multiplier effect* atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi.

2.1.3.2.11.1 PMA dan PMDN

Penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal langsung (*direct investment*) maupun penanaman modal portofolio surat berharga (*portofolio investment*). Berikut ini tabel realisasi penanaman modal langsung PMDN dan PMA di Kota Surabaya.

Tabel II.134
Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Proyek PMDN	466	1.310	63.360	147.254	2.212
Jumlah Proyek PMA	122	177	340	677	269
Total	**588**	**1.487**	**63.700**	**147.931**	**2.481**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

Penanaman Modal di Kota Surabaya menunjukkan bahwa investasi di Kota Surabaya pada tahun 2020 tercatat sejumlah 588 proyek, dan pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan menjadi 1.487 proyek. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah proyek PMA/PMDN adalah 63.700 proyek. Kemudian pada akhir tahun 2023 jumlah proyek PMA/PMDN adalah 147.931 proyek dan pada triwulan II tahun 2024 mencapai 2.481 proyek. Peningkatan signifikan jumlah proyek tersebut di antaranya disebabkan oleh mudahnya perizinan melalui OSS (*Online Single Submission*) dan didukung oleh adanya layanan Klinik Investasi yang diinformasikan dan dilakukan secara masif sebagai komitmen Surabaya Ramah Investasi.

Sedangkan untuk nilai realisasi investasi PMA dan PMDN, pada tahun 2020 sebesar Rp22.152,03 Miliar. Di tahun 2023 nilai realisasi investasi tersebut meningkat menjadi sebesar Rp37.573,89 Miliar. Angka ini diperkirakan terus meningkat pada tahun 2024. Pada triwulan II tahun 2024, nilai realisasi investasi PMA dan PMDN telah mencapai masing-masing sebesar Rp6.531,56 Miliar.

Menurut jenisnya, realisasi investasi lebih banyak berasal dari investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dibanding dengan Penanaman Modal Asing (PMA). Kinerja investasi yang relatif baik tidak terlepas prospek perekonomian domestik yang dipersepsikan masih cukup baik disertai iklim usaha yang kondusif.

Laporan realisasi Penanaman Modal di Surabaya merupakan potret atas aktivitas penanaman modal berdasarkan persetujuan perizinan baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.135
Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persetujuan (USD Juta)	2.046,22	6.337,45	-	-	-
1.1	Jumlah Proyek	588	31.467	117.580	134.984	52.507
1.2	Nilai Investasi (Rp Milyar)	22.152,03	65.888,88	151.959,88	115.914,68	15.299,82
2	Realisasi (USD Juta)	2.046,22	2.810,02	-	-	-
2.1	Jumlah Proyek	588	1.487	63.700	147.931	2.481
2.2	Nilai Investasi (Rp Milyar)	22.152,03	29.215,06	34.897,81	37.573,89	6.531,56

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

Adanya investasi PMA dan PMDN di Kota Surabaya menimbulkan dampak positif terhadap tingkat tenaga kerja di Surabaya. Peningkatan nilai dan proyek investasi PMA dan PMDN berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru yang berkaitan dengan daya serap tenaga kerja sebagai dampak investasi langsung, yang dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel II.136
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PMA/PMDN	348	961	30.304	70.817	2.481
2	Jumlah Tenaga Kerja Yang Bekerja Pada Perusahaan PMA/PMDN	4.862	13.496	92.707	199.420	8.902
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	13,97	14,04	3,06	2,81	3,59

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

Sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, pada sisi penawaran tingginya investasi akan meningkatkan kapasitas barang dan jasa yang dihasilkan sementara pada sisi permintaan peran investasi juga akan menciptakan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, realisasi investasi, baik dari penanaman PMA dan PMDN, pada tahun 2019 menyerap sebanyak 36.626 tenaga kerja dari 353 proyek, dengan nilai rasio investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya terhadap daya serap tenaga

kerja sebesar 103,76. Untuk tahun 2021, terdapat peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 13.496 orang dari 961 proyek maka nilai rasio investasi terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 14,04. Tahun 2022 kembali terdapat peningkatan baik jumlah proyek maupun jumlah tenaga kerja yang terserap masing-masing 30.304 proyek dan 92.707 tenaga kerja dengan rasio 3,06. Kemudian pada tahun 2023 jumlah tenaga kerja yang terserap kembali meningkat sebanyak 199.420 orang dari 70.817 proyek maka nilai rasio investasi yang ditanamkan terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 2,81. Peningkatan nilai rasio daya serap tenaga kerja terjadi pada triwulan II tahun 2024 yaitu sebesar 3,59.

2.1.3.2.12 Kepemudaan dan Olah Raga

Pencapaian prestasi olahraga tidak terlepas dari fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi pelaku olahraga. Prasarana olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya bersifat terbuka *(outdoor)* maupun tertutup *(indoor*) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya di antaranya adalah Lapangan Atletik THOR, Lapangan Softball dan Hockey Dharmawangsa, Gelora 10 Nopember, dan Gelora Bung Tomo. Sampai dengan tahun 2020, total lapangan olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya adalah sejumlah 665 lapangan yang berada di atas lahan fasilitas umum perumahan dan permukiman maupun di tanah aset BTKD di wilayah kota Surabaya. Jumlah tersebut cenderung fluktuatif disebabkan peningkatan kualitas lapangan yang membuat beberapa lapangan digabung menjadi satu. Hingga sampai dengan triwulan 2 tahun 2024 jumlah lapangan olahraga menjadi 632 lapangan olahraga. Rincian jumlah lapangan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.137
Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah lapangan olahraga	665	665	603	632	632
2	Jumlah penduduk	2.970.730	2.970.952	2.987.863	3.009.286	3.009.286
3	Rasio lapangan olahraga	1:4.467	1:4.467	1:4.955	1:4.762	1:4.762

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil & Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2024

Dengan penyediaan fasilitas tersebut diharapkan masyarakat Kota Surabaya khususnya generasi muda, dapat memanfaatkan waktu luang untuk diarahkan untuk kegiatan yang positif. Hal ini juga akan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat Kota Surabaya secara umum dan menumbuhkan bibit-bibit

atlet olahraga secara khusus. Cakupan pembinaan olahraga di Kota Surabaya menyeluruh meliputi semua cabang olahraga prestasi dan induk olahraga rekreasi dan tradisional. Pembinaan olahraga tersebut bersinergi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Surabaya dan juga dengan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI). Di bawah komite tersebut bernaung cabang-cabang olahraga yang didukung Pemerintah Kota Surabaya, mulai dari kegiatan pembibitan, pelatihan rutin, pelatihan terpusat, pengiriman atlet untuk lomba, penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta memberikan penghargaan kepada atlet-atlet yang berprestasi. Pembibitan atlet muda dilaksanakan secara profesional di cabang olahraga masing-masing. Untuk meningkatkan kompetensi pelatih, Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan kegiatan pelatihan untuk pelatih. Hal ini dilakukan agar proses pembibitan atlet terlaksana dengan baik dan berkualitas.

Pada tahun 2019, nilai persentase atlet yang berprestasi mencapai 98,04%, dengan rincian terdapat 2.852 orang atlet yang dibina dan sejumlah 2.796 orang di antaranya berhasil meraih prestasi olahraga di tingkat regional, nasional maupun internasional. Selanjutnya pada tahun 2020, nilai persentase atlet yang berprestasi mencapai 91,32%. Pada tahun 2021 tidak ada agenda kejuaraan olahraga dikarenakan pandemi Covid-19. Kemudian pada tahun 2022 nilai persentase atlet yang berprestasi mencapai 91,16%. Pada tahun 2023, sejumlah 781 orang atlet mendapatkan pembinaan dari pemerintah kota, 689 orang atlet di antaranya berhasil menorehkan prestasi, sehingga nilai persentase atlet yang berprestasi menjadi 88,22%. Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2023, Pemerintah Kota Surabaya selalu menjadi juara umum di acara Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (Porprov Jatim). Hal ini dapat diraih tidak terlepas dari dukungan dan keseriusan Pemerintah Kota Surabaya dalam hal pembangunan olahraga secara menyeluruh.

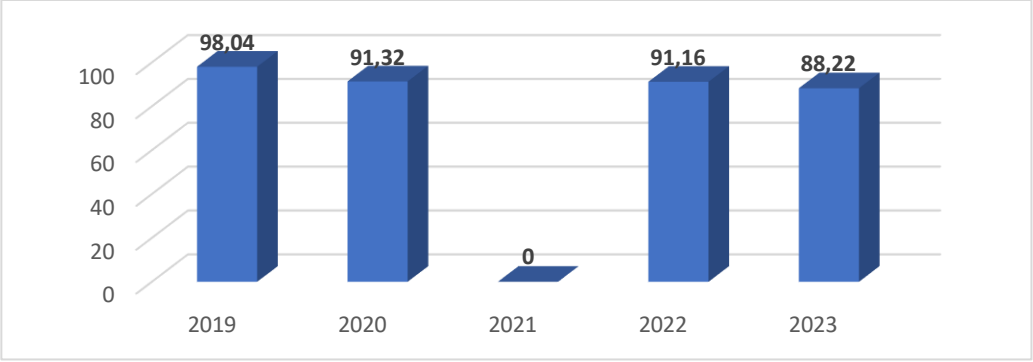

Gambar II.16 Persentase Atlet Berprestasi

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2024

Dalam bidang kepemudaan, Pemerintah Kota Surabaya juga memiliki program dan kegiatan khusus terkait pembinaan kepemudaan diantaranya adalah pembentukan pemuda kader anti kenakalan remaja (anti narkoba dan peduli HIV AIDS). Pada tahun 2019 terdapat sejumlah 1.732 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya. Selanjutnya, sampai dengan tahun 2020 terdapat sejumlah 799 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk. Untuk tahun 2021 terdapat sejumlah 1.000 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk, dan terdapat tambahan 170 pemuda yang menjadi kader anti kenakalan remaja di tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023, jumlah pemuda yang dibina menjadi kader anti kenakalan remaja sebanyak 777 orang. Pemerintah Kota Surabaya juga memiliki program wirausaha bagi pemuda. Pada tahun 2019 terdapat sejumlah 395 pemuda yang mendapatkan pelatihan wirausaha. Pada tahun 2020 jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan wirausaha menurun menjadi 200 pemuda. Pada tahun 2021 jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan wirausaha meningkat menjadi 282 pemuda. Pada tahun 2022 jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan wirausaha kembali meningkat menjadi sejumlah 567 pemuda. Selanjutnya pada tahun 2023 terdapat 472 pemuda yang mendapatkan pelatihan wirausaha. Pelatihan ini juga dilanjutkan dengan fasilitasi magang wirausaha. Pemuda terpilih yang telah mendapatkan pelatihan juga akan ditempatkan di beberapa perusahaan sebelum mereka benar-benar menjadi wirausahawan mandiri.

2.1.3.2.13 Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar untuk Statistik dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Kinerja urusan statistik dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya antara lain melalui pengumpulan dan pengelolaan data statistik sektoral di seluruh Perangkat Daerah yang dipublikasikan secara rutin setiap tahun. Data statistik sektoral yang dimaksud antara lain data sektor penduduk dan tenaga kerja, sektor sosial budaya, sektor keuangan, sektor industri dan sektor perdagangan Pemerintah Kota Surabaya telah menyusun buku Statistik Sektoral Kota Surabaya sebagai bagian dari diseminasi dan informasi penyelenggaraan statistik sektoral yang dapat menjadi bahan rujukan dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.

Tabel II.138
Hasil Analisis Data yang Terpublikasi Tahun 2022-2024 (TW 2)

Uraian	2022	2023	2024
Persentase hasil analisa data yang terpublikasi (%)	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, 2024

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan data statistik sektoral skala kota, maka pada data yang dikumpulkan oleh Walidata, yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dilakukan analisis dan publikasi. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, telah dilakukan analisis dan publikasi data sebesar 100% yang terdiri dari data sektor penduduk dan tenaga kerja, sektor sosial budaya, sektor keuangan, sektor industri, dan sektor perdagangan. Sebagai upaya mendukung pemenuhan kebutuhan perencanaan sektoral di masing-masing Perangkat Daerah, serta kebutuhan masyarakat akan informasi secara umum, Pemerintah Kota Surabaya juga telah mengembangkan sistem terintegrasi antara *ePlanning* dan portal satu data (satudata.surabaya.go.id), yang di dalamnya mencakup *Open Data* dan Peta *Digital* serta Statistik Sektoral Kota Surabaya.

Dengan memperhatikan urgensi data dan informasi pembangunan dalam perencanaan seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota perlu mengupayakan kualitas data dan informasi pembangunan daerah yang ditunjukkan melalui penyediaan data dan informasi yang valid untuk mendukung pengukuran indikator kinerja seperti yang tertuang pada Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 maupun RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026.

2.1.3.2.14 Persandian

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar Persandian dilaksanakan utamanya untuk menjamin keamanan data dan sistem informasi yang mendukung pelayanan publik, serta seluruh proses pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya secara berkala melakukan pengawasan sistem keamanan informasi untuk melindungi sistem informasi yang ada.

Tabel II.139
Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi Kota Surabaya
Tahun 2021 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah serangan	56	240	270	160
2	Jumlah penanganan serangan	56	240	270	160

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024
3	Persentase penanganan serangan	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Dalam pelaksanaannya sistem keamanan informasi Kota Surabaya dapat menangani serangan *cyber* dengan perangkat teknologi yang dimiliki, namun seiring perkembangan teknologi sistem keamanan informasi perlu terus ditingkatkan untuk menjaga keamanan infomasi.

2.1.3.2.15 Kebudayaan

Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka mendukung bidang kepariwisataan banyak mengadakan kegiatan festival seni dan budaya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah kota maupun pihak swasta.

2.1.3.2.15.1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya bertujuan untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan serta memberi kesempatan pada seniman-seniman kota Surabaya untuk menampilkan karyanya. Di sisi lain, banyaknya penyelenggaran festival seni dan budaya dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi kelompok seni di Surabaya, Oleh karena itu diperlukan kerja sama dengan *stakeholder* untuk meningkatkan jumlah penyelenggaraan seni dan budaya. Perkembangan penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.140
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	520	4	454	521	54

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2024

Tahun 2020, festival seni dan budaya yang dilaksanakan di kota Surabaya sebanyak 520 festival. Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi hanya 4 festival yang diselenggarakan, dikarenakan pandemi Covid-19. Sedangkan pada tahun 2022 penyelenggaraan festival seni budaya meningkat menjadi 454 kali, dan pada tahun 2023 penyelenggaraan festival seni budaya meningkat menjadi 521 kali. Sampai dengan triwulan 2 tahun 2024, baru 54 festival seni dan budaya yang diselenggarakan. Promosi pelaksanaan festival seni dan budaya di Kota Surabaya dilakukan secara masif, baik di media cetak maupun melalui media

elektronik, termasuk di dalamnya berbagai *platform* media sosial, seperti instagram sparklingsurabaya dan *website* tiketwisata.surabaya.go.id.

2.1.3.2.15.2 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung perkembangan kesenian menyediakan sarana berupa gedung/tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan kesenian/berekspresi di THP Kenjeran, Wisata Air Kalimas, Balai Pemuda, Balai Kota, Wisata Pecinan Kembang Jepun, Serambi Ampel serta di Lokasi Wisata Tunjungan Romansa.

2.1.3.2.15.3 Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya yang ada di Kota Surabaya, pemerintah kota melakukan upaya perlindungan dan pelestarian dalam bentuk pemberian penetapan terhadap benda, situs dan kawasan sebagai cagar budaya dan pengawasan agar jika ada proses renovasi tidak sampai merubah bentuk aslinya. Jumlah benda, situs dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2019 terdapat 277 benda, situs dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pada tahun 2020 terdapat 288 benda, situs dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan. dan sampai dengan tahun 2021 tidak ada penambahan cagar budaya yang ditetapkan. Pada tahun 2022 jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya berkurang menjadi yaitu sejumlah 286 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Hal ini disebabkan oleh terdapat 2 bangunan cagar budaya yang dievaluasi, dimana dari hasil evaluasi status cagar budaya pada bangunan tersebut dicabut. Pada tahun 2023, jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di Kota Surabaya tetap sejumlah 286 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Saat ini seluruh benda, situs, bangunan dan Kawasan ini dalam kondisi baik. Dalam upaya pelestarian seluruh benda, situs, bangunan dan Kawasan ini rutin diawasi oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Tim Ahli Cagar Budaya Kota Surabaya. Selain itu Pemerintah Kota Surabaya juga aktif melakukan revitalisasi kawasan cagar budaya menjadi destinasi wisata yang dapat menarik kunjungan wisatawan. Adapun kawasan yang sedang direvitalisasi antara lain kawasan kota lama terdiri dari zona eropa, zona pecinan dan zona arab. Dengan adanya revitalisasi ini tentu akan memberikan dampak positif khususnya bagi pemilik bangunan cagar budaya. Tujuan akhir yang akan dituju adalah terlestarikannya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Rekapitulasi data

jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada di bawah ini.

Tabel II.141
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Total Benda, Situs dan Kawasan yang Dimiliki Daerah	277	288	288	289	286	286
2	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	277	288	288	289	286	286
3	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2024

Karya seni tidak sebatas fenomena keindahan saja, tetapi juga adalah sebuah ekspresi, tepatnya objektifikasi manusia pada ruang dan waktu di mana ia berada. Segala bentuk hasil cipta manusia adalah fakta budaya yang seharusnya dapat dipahami oleh masyarakat luas melalui suatu pagelaran budaya. Kelompok seni sebanyak 498 pada tahun 2019, yang selanjutnya dilatih dan dibimbing hingga 399 di antara kelompok seni tersebut layak tampil di depan publik. Kelompok seni layak tampil dari tahun 2019 hingga akhir tahun 2023 mengalami kenaikan, yang menunjukkan adanya perkembangan di bidang seni dan minat seni masyarakat di Kota Surabaya. Adapun kelompok seni yang telah dibina dan layak tampil dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.142
Jumlah Kelompok Seni Binaan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kelompok seni layak tampil	399	406	415	423	428
Jumlah kelompok seni belum layak tampil	99	92	92	292	287
Jumlah kelompok seni binaan	498	498	507	715	715

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2024

2.1.3.2.16 Perpustakaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2022, perpustakaan terdiri atas perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan khusus, taman baca, dan sudut baca.

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya dalam mengembangkan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat dengan menyediakan layanan perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Kecamatan, Kelurahan, RW, Rumah Sakit, Puskesmas, Taman, Dinas, Rusun, Liponsos dan Terminal yang tersebar secara merata; menyediakan Sumber Daya Manusia dan biaya operasional pada layanan perpustakaan dan TBM; menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan dan TBM; menyelenggarakan perpustakaan keliling yang menggunakan sarana angkutan yang melayani di sekolah dan taman kota; melaksanakan promosi budaya gemar membaca dengan mengadakan pameran buku, bedah buku, lomba-lomba pemasyarakatan perpustakaan, seminar, lokakarya, penyebarluasan informasi melalui brosur/l*eaflet*, spanduk, *banner, billboard*, media cetak dan elektronik; melaksanakan kerjasama dan jaringan antar perpustakaan; melaksanakan bimbingan teknis kepada tenaga pengelola perpustakaan serta melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Perpustakaan di Kota Surabaya milik Pemerintah Kota sampai dengan triwulan II tahun 2024 berjumlah sama yaitu 2 perpustakaan yang didukung dengan 530 taman dan sudut baca masyarakat, serta 84 perpustakaan keliling. Selain itu terdapat 65 Perpustakaan milik non Pemda Kota Surabaya yang diselenggarakan masyarakat dan Perguruan Tinggi, serta instansi pemerintahan lainnya. Data yang tercatat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.143
Jumlah Perpustakaan dan Pustakawan Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perpustakaan Umum Daerah Milik Pemda Kota Surabaya (unit)	2	2	2	2	2
1.a	Jumlah taman dan sudut baca (unit)	530	530	530	530	530
1.b	Jumlah perpustakaan keliling (unit)	84	85	84	84	84
2	Jumlah Perpustakaan Milik Non Pemda Kota Surabaya (unit)	61	61	65	65	65
3	Jumlah Tenaga Perpustakaan di Perpustakaan Milik Pemda Kota Surabaya (orang)	N/A	N/A	502	506	511
4	Jumlah Pustakawan di Perpustakaan Milik Pemda Kota Surabaya (orang)	4	4	6	6	25

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

Sebagai upaya meningkatkan literasi masyarakat Kota Surabaya, selain mengembangkan fasilitas perpustakaannya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya juga melakukan pembinaan serta sertifikasi pada tenaga perpustakaan di perpustakaan maupun TBM guna peningkatan kapasitas setiap tahunnya. Mulai tahun 2022 hingga 2024 target tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya adalah seluruhnya. Dari jumlah tenaga perpustakaan yang terus meningkat diharapkan dapat memberikan dampak positif pada peningkatan pelayanan perpustakaan.

Salah satu indikator kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam bidang Perpustakaan berdasarkan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 adalah nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat. Keberhasilan pembangunan dan pengembangan perpustakaan yang dilakukan pada periode sebelumnya ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah kunjungan. Pada tahun 2021, jumlah pengunjung layanan baca tercatat 13.504 per bulannya, dan terus meningkat hingga tahun 2023 menjadi 176.637 orang per bulannya. Peningkatan kunjungan tersebut tidak lepas dari terus bertambahnya koleksi buku yang dimiliki layanan baca milik Pemerintah Kota yang didukung oleh kegiatan-kegiatan literasi yang diselenggarakan di layanan baca. Pengunjung perpustakaan ini antara lain merupakan pengunjung perpustakaan daerah, taman bacaan masyarakat, maupun perpustakaan keliling. Jumlah koleksi buku dan kunjungan di layanan baca milik Pemerintah Kota Surabaya ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel II.144
Jumlah Koleksi dan Pengunjung Perpustakaan Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah koleksi buku (eksemplar)	533.361	537.571	541.781	541.781	541.781
Jumlah pengunjung layanan baca per bulan (orang)	N/A	13.504	87.515	176.637	80.138

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

Mengacu kepada sasaran pembangunan Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, meningkatkan kualitas pembangunan manusia dilakukan salah satunya dengan meningkatkan minat baca masyarakat. Dan pada tahun 2023, Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan pengembangan minat dan budaya baca melalui peningkatan kualitas dan kuantitas even literasi, di antaranya Bercerita Surabaya, kegiatan mendongeng siswa SD, kegiatan bedah buku, festival budaya pustaka dan pameran buku.

Barometer keberhasilan perpustakaan adalah dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan tepat guna. Hal ini sangat dipengaruhi oleh prosedur di dalam perpustakaan tersebut sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik. Adapun hasil survei Bidang Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2022 adalah 97,5. Survei pelayanan kearsipan ini dilaksanakan secara langsung kepada responden melalu *Google Form.*

Gambar II.17
Nilai Terhadap Pelayanan dan Kemampuan Petugas TBM/Perpusatakaan dalam Membimbing Bibit Penulis dan Pendongeng

2.1.3.2.17 Kearsipan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta pendampingan dan monitoring penerapan penggunaan sistem pola baru yang dikembangkan dengan sistem aplikasi kearsipan berbasis IT.

Kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam bidang Kearsipan salah satunya diukur dari ketertiban Perangkat Daerah terhadap sistem tata kearsipan. Perangkat Daerah diarahkan untuk tertib sistem tata kearsipan sesuai Ketentuan, yaitu: 1) Adanya SDM Tenaga Pengelola Arsip/Arsiparis; 2) Menggunakan program/aplikasi dalam pengelolaan arsip; 3) Tertib penataan pemberkasan arsip dan pembuatan Daftar Arsip; 4) Tersedianya Sarana Prasarana kearsipan Arsip Aktif (*Filing*

Cabinet, Map gantung, Buku daftar Pengendali) dan Arsip Inaktif (Rak Arsip/Mobil File, Box Arsip, Folder Besar) serta 5) Adanya Ruang Simpan Arsip/Depo.

Data Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.145
Perangkat Daerah (PD), Unit Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang Tertib Sistem Tata Kearsipan Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	580	583	78	70	24
2.	Jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan	531	583	78	70	24
3.	Persentase Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan (%)	91,55	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

Pada tahun 2020 sebanyak 531 Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan. Pada tahun 2021, jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan terus meningkat menjadi 583 lembaga. Sedangkan, pada tahun 2022, jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan menurun menjadi 78 lembaga. Kemudian pada tahun 2023, jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan menurun menjadi 70 lembaga dan persentasenya menjadi 100 persen. Kemudian pada tahun 2024 sampai dengan triwulan 2, jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang didampingi masih 24 instansi dan 100% sistem tata kearsipannya telah sesuai ketentuan.

Dalam rangka penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah, maka dilaksanakan juga akuisisi arsip, yaitu proses penambahan khasanah arsip statis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari Perangkat Daerah pencipta arsip kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pada tahun 2021, 100 persen arsip telah terakuisisi.

2.1.3.3 Urusan Pilihan Pemerintahan

Analisis gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan, yaitu urusan:

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Perkembangan kelautan dan perikanan di Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.146
Produksi Perikanan Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Jenis Usaha	Jumlah Produksi (ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Perikanan Laut	8.057,63	7.805,50	8.057,49	8.295,33	1.006,90
2.	Perikanan Tambak	8.442,47	9.054,27	9.349,56	9.508,29	2.804,14
Jumlah		**15.670,22**	**16.500,11**	**17.407,05**	**17.803,62**	**3.811,04**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2024

Pada tabel di atas dapat dilihat untuk jumlah produksi perikanan laut dan tambak mengalami kenaikan di tahun 2022 dan 2023, hal ini dikarenakan adanya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam budidaya perikanan melalui pelatihan, fasilitasi sarana dan pemasaran bagi pembudidaya ikan.

Di sektor perikanan tangkap, selain bergantung kepada kondisi cuaca, hasil tangkapan nelayan juga dipengaruhi oleh kondisi peralatan tangkap yang digunakan oleh nelayan. Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk memenuhi sarana perikanan tangkap yang dibutuhkan oleh nelayan, mulai dari perahu, mesin perahu, alat tangkap serta alat pendukung lainnya seperti papan seluncur lumpur, tali, serta senter. Apabila cuaca tidak memungkinkan untuk melaut, nelayan juga diberikan keterampilan untuk pengolahan hasil laut yang dapat dijadikan produk turunan dari hasil tangkapan. Di sektor perikanan budidaya selain bantuan sarana dan prasarana, pembudiya perikanan juga rutin dibekali dengan pelatihan terkait penerapan teknologi tepat guna, agar hasil budidaya dapat maksimal. Masing-masing pembudidaya juga rutin mendapatkan pendampingan oleh penyuluh. Selain itu, Pemerintah Kota juga memfasilitasi pemasaran produk nelayan melalui ePeken.

2.1.3.3.2 Pariwisata

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan daya tarik obyek-obyek wisata sehingga mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2019, kunjungan wisatawan ke

Kota Surabaya sebanyak 28.827.160 kunjungan dengan perincian sebanyak 1.901.671 kunjungan wisatawan mancanegara dan sebanyak 26.925.489 kunjungan wisatawan nusantara. Kemudian pada tahun 2020, adanya pandemi virus Covid-19, membuat kunjungan wisatawan menurun drastis menjadi sebanyak 10.681.318 kunjungan saja, dengan perincian jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 319.082 dan wisatawan nusantara sebanyak 10.362.236 kunjungan. Pada tahun 2021, kunjungan wisatawan sebanyak 9.335.841 kunjungan dengan perincian sebanyak 100.767 kunjungan wisatawan mancanegara dan sebanyak 9.235.074 kunjungan wisatawan nusantara. Pada tahun 2022, kunjungan wisatawan sebanyak 14.237.215 dengan perincian sebanyak 565.998 kunjungan wisatawan mancanegara dan sebanyak 13.671.217 kunjungan wisatawan nusantara. Sedangkan pada tahun 2023, kunjungan wisatawan sebanyak 17.425.476 dengan perincian sebanyak 1.285.905 kunjungan wisatawan mancanegara dan sebanyak 16.139.571 kunjungan wisatawan nusantara. Dengan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik, diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perkembangan perekonomian kota Surabaya dan *multiplier effect* bagi kesejahteraan masyarakat. Berikut tabel mengenai jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke Kota Surabaya.

Tabel II.147
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	1.901.671	319.082	100.767	565.998	1.285.905
2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	26.925.489	10.362.236	9.235.074	13.671.217	16.139.571
Jumlah		**28.827.160**	**10.681.318**	**9.335.841**	**14.237.215**	**17.425.476**

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata, 2024

Pariwisata merupakan integral pembangunan yang semakin dipertimbangkan oleh negara-negara di seluruh dunia. Pengaruh pembangunan pariwisata terhadap perkembangan regional, terutama peningkatan percepatan pembangunan dan perekonomian wilayah cukup besar. Hal ini menyebabkan pembangunan pariwisata menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas, khususnya di Surabaya.

Tabel II.148
Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah ODTW yang berhasil dikembangkan	11	13	5	6	6
Jumlah ODTW yang dikelola	14	14	14	14	14

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata, 2024

Pengembangan obyek daya tarik wisata pada tahun 2020 ke tahun 2021 tampak menurun karena pengertian pengembangan lebih spesifik yang semula hanya sebatas adanya penambahan wahana baru di ODTW yang dikelola pemerintah Kota Surabaya, kemudian menjadi ditingkatkan kualitasnya sesuai standar berdasarkan kriteria yang ditetapkan (sapta pesona). Terdapat 10 kampung wisata dan 4 destinasi wisata yang menjadi sasaran. Pada tahun 2021, terdapat 1 kampung dan 1 kawasan yang berhasil dikembangkan memenuhi kriteria sapta pesona, yakni Kampung Lawas Maspati dan Kawasan Tunjungan yang dikenal sekarang dengan Tunjungan Romansa. Pada tahun 2022, terdapat 3 destinasi wisata yang berhasil dikembangkan antara lain, wisata perahu kalimas, kawasan kota lama, serta THP Kenjeran. Pada tahun 2023 terdapat tambahan 1 kampung yang berhasil dikembangkan dengan kriteria sapta pesona yakni kampung wisata peneleh. Sampai dengan tahun 2023 terdapat 6 destinasi wisata yang berhasil dikembangkan dengan standar kriteria sapta pesona. 6 destinasi wisata ini juga berhasil menarik kunjungan wisatawan dalam negeri maupun manca negara.

Untuk menggerakan roda perekonomian Kota Surabaya, pemerintah terus menerus melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Salah satu fokus pembangunan di Kota Surabaya yang memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sektor pariwisata. Pariwisata memiliki perananan penting dalam meningkatkan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan serta dapat mengentaskan kemiskinan. Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya cukup besar, hal ini dapat dilihat dari nilai perolehan pajak hotel pada tahun 2023 yang nilainya mencapai Rp365.525.262.323 atau 6,33% dari total nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023 yakni sebesar Rp5.771.818530.453. Nilai perolehan pajak restoran pada tahun 2023 juga tinggi yakni mencapai Rp613.372.251.383 atau 10,63% dari total nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023. Selain itu perolehan pajak hiburan pada tahun 2023 juga mencapai Rp76.778.370.378 atau 1,33% dari total nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023. Jika digabungkan 3 jenis perolehan pajak ini, nilainya mencapai 18,29% dari total nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023.

Pembangunan sektor pariwisata di Kota Surabaya saat ini menggunakan pendekatan kepariwisataan inklusif. Hal itu dituangkan dalam sasaran pembangunan pariwisata tahun 2019 oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Tujuan dari sasaran pembangunan pariwisata inklusif yakni meningkatkan usaha lokal dalam perindustrian pariwisata dan meningkatkan jumlah tenaga kerja lokal.

Sinergitas dalam kolaborasi yang dilakukan oleh para *stakeholder* di Surabaya tentu memberikan dampak yang besar terhadap pembangunan dan pengembangan objek wisata. Kolaborasi antar *stakeholder* tersebut merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengedepankan kepentingan masyarakat. Hingga tahun 2022 terjadi peningkatan kesepakatan *stakeholder* di bidang pariwisata Surabaya yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Selain itu Pemerintah Kota Surabaya juga fokus untuk mengembangkan industri ekonomi kreatif di Kota Surabaya. Terdapat beberapa program kegiatan yang disiapkan untuk mewujudkan hal tersebut diantaranya pendampingan, fasilitasi kerjasama, fasilitasi sarana dan prasarana, branding dan promosi serta penyediaan ruang-ruang kreatif yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat Kota Surabaya seperti di Balai Pemuda, *coworking space* (koridor siola) serta di ruang-ruang terbuka kota yang tersebar di seluruh wilayah. *Event-event* pertunjukan hasil produk ekonomi kreatif juga rutin dilaksanakan untuk membantu branding dan promosi produk. Dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada, pada tahap awal Pemerintah Kota Surabaya memprioritaskan subsektor Film, Animasi, Video, Musik, *Fashion* serta Aplikasi untuk dikembangkan di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya juga membantu memfasilitasi pelaku usaha kreatif untuk berkembang melalui kerja sama antar pihak baik itu pemerintah maupun swasta. Terdapat beberapa kesepakatan di Bidang Pariwisata yang berhasil dilaksanakan, tentunya kerjasama ini sangat berdampak bagi pelaku usaha kreatif.

Tabel II.149
Jumlah Kesepakatan Dengan Stakeholder Bidang Pariwisata
Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Akumulasi jumlah kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan	7	9	14	22	22

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata, 2024

2.1.3.3.3 Pertanian

Perkembangan pertanian di Surabaya dapat dilihat dari produktivitas serta hasil produksi pertanian di Kota Surabaya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.150
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar
Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ton)	12.042,85	8.082,50	6.156,69	7.150,88	1.002,2
2.	Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ha)	1.854,90	1.242,8	955,15	1.090,74	1.136,61
3.	Produktivitas (ton/ha)	6,49	6,51	6,45	6,56	0,9

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2024

Pada tabel di bawah ini disajikan data bahwa jumlah produksi padi/bahan pangan utama lainnya di Kota Surabaya dari tahun 2020 – 2024 (TW II).

Tabel II.151
Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Produksi Padi (ton)	12.042,85	8.076,12	8.156,78	7.150,88	1.002,2
2.	Jumlah Produksi Jagung (ton)	323,86	162,219	154,95	158,35	37,45
3.	Jumlah Produksi Lombok (ton)	307,33	N/A	37,48	32,10	15,54
4.	Jumlah Produksi Sayur (ton)	855,91	202,8	151,55	480,61	45,78
5.	Jumlah Produksi Buah (ton)	3.781,61	6.763,71	10.111,78	9.717,68	3.387,53

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2024

Produksi hasil pertanian menurut jenis komoditi (padi, jagung, lombok, sayur dan buah) dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Pada tahun 2022 komoditi yang mengalami peningkatan produksi yaitu padi dan buah, sedangkan produksi sayur dan jagung mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2023 komoditi yang mengalami peningkatan produksi adalah padi, jagung, dan sayur. Data perkembangan produksi hasil pertanian menurut jenis komoditi disajikan sebagaimana tabel di atas.

Untuk menjamin kualitas dan kesehatan hewan ternak, Pemerintah Kota Surabaya membuka pelayanan untuk pengobatan hewan ternak di Kota Surabaya. Selain itu untuk meningkatkan mutu dan keamanan produk daging halal, Rumah Potong Hewan Pegirian telah memperoleh sertifikat halal. Pada tahun 2024 telah dibangun rumah potong hewan baru khusus babi di Banjarsugihan, Kecamatan

Tandes dan di masa mendatang Rumah Potong Hewan untuk Sapi direncanakan akan dipindahkan ke kawasan Tambak Osowilangun dengan kawasan yang lebih luas dan sistem instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang lebih lengkap sehingga diharapkan dapat semakin meningkatkan mutu dan keamanan produk serta dapat menaikkan omzet dari PD Rumah Potong Hewan Surabaya. Data intervensi pengobatan dan vaksin hewan ternak dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.152
Intervensi Hewan Ternak Kota Surabaya 2020 – 2024 (TW II)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah ternak (ekor)	91.609	23.870	21.753	16.381	1.486
Jumlah ternak diintervensi (ekor)	81.398	21.128	19.509	14.666	1.228
Persentase ternak yang diintervensi (%)	88,85	88,51	89,68	89,53	82,64

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2024

Di Kota Surabaya, kontribusi sektor pertanian memang relatif kecil, namun demikian sektor ini berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan penduduk dan menyediakan bahan baku bagi industri pengolahan makanan di Kota Surabaya, sehingga di masa mendatang tetap dibutuhkan upaya berkelanjutan untuk memajukan sektor pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi *urban farming*, penguatan kelembagaan pertanian, serta pengembangan investasi industry pengolahan hasil pertanian.

2.1.3.3.4 Perdagangan

Perdagangan di Surabaya merupakan salah satu sektor/kategori yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Kota Surabaya yaitu lebih dari 26 persen, hal ini ditunjukkan dengan perkembangan jumlah pasar modern, pasar tradisional yang dikelola PD Pasar dan pembangunan pasar oleh pemerintah kota sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.153
Jumlah Pasar Modern di Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No	Jenis Pasar Modern	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Supermarket	63	83	83	90	90	90
2	Minimarket	601	709	709	573	573	573
3	Departement Store	12	13	13	16	16	16
4	Mall/Plaza	34	34	34	38	38	38
Total		**728**	**839**	**839**	**717**	**717**	**717**

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Surabaya, 2024

Perkembangan pasar modern yang cukup pesat perlu adanya upaya untuk melakukan pengendalian agar tidak mematikan pasar tradisional dan usaha kecil. Kehadiran toko modern diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan daya saing UMK (Usaha Mikro Kecil). Untuk menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan pembangunan pasar-pasar tradisional, serta berupaya meningkatkan peran PD Pasar Surya untuk mengoptimalkan pengelolaan pasar-pasar tradisional yang dikelola.

Tabel II.154
Pasar yang Dibangun Oleh Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	2020	2021	2022	2023	2024
1	-	-	Pasar Sememi	Pasar Kutisari (rehab)	Pasar Keputran (rehab)
2			Gunung Anyar	Pasar Gununganyar (rehab)	Pasar Pabean (rehab)
3			Pegirian	Pasar Nambangan (rehab)	Pasar Nambangan (rehab)
4			Keputih	Pasar Keputih (rehab)	
5			Burung Dolly (lanjutan)	Pasar Dukh Menanggal (rehab)	
6			Jambangan	Pasar Sememi (rehab)	
7			Gembong Asih	Pasar Raci (rehab)	
8			Penjaringan Sari	Pasar Jambangan (rehab)	
9			Dupak	Pasar Rakyat Jambangan (Rehab)	
10			Kutisari	Pasar Simo (rehab)	
11			Nambangan (lanjutan)		

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2024

Tabel II.155
Jumlah Pasar PD Pasar Surya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Selatan	17	17	17	17	17
Timur	22	22	22	22	22
Utara	28	28	28	28	28
Total	**67**	**67**	**67**	**67**	**67**

Sumber : Sekretariat Daerah, 2024

Perkembangan sektor perdagangan selain ditunjukkan dengan perkembangan pasar modern, juga dapat dilihat dari pertumbuhan izin usaha perdagangan dan industri, yang baru dimulai di tahun 2021 menggunakan OSS-RBA terpusat, sehingga data jumlah usaha menjadi lebih akurat. Sebagaimana pada tabel berikut, dapat dilihat bahwa jumlah usaha di tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Tabel II.156
Jumlah Usaha Berdasarkan Ijin yang Berlaku Di Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No	Jenis Perusahaan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perdagangan	13.562	691	1.054	56.201	23.780
2	Industri	253	208	356	25.476	24.209
Total		**13.815**	**899**	**1.410**	**81.677**	**47.989**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

Dalam upaya mewujudkan Kota Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional yang berdaya saing global, dilakukan integrasi fasilitas pendukung perdagangan dan jasa (termasuk di dalamnya pelabuhan laut dan udara, pergudangan, kawasan industri, kawasan perdagangan, terminal dan stasiun) melalui implementasi manajemen logistik kota/*city logistic*.

2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.1.3.4.1 Sekretariat Daerah

2.1.3.4.1.1 Tata Kelola Pemerintahan

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja. Penilaian evaluasi SAKIP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.157
Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2019 – 2022

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	A	A
2.	Nilai Evaluasi SAKIP	73,47	75,13	75,34	80,31	83,92

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2024

Pada tahun 2018, penilaian evaluasi SAKIP untuk Kota Surabaya mengalami peningkatan menjadi 70,03 dengan tingkat akuntabilitas kinerja BB. Sejak tahun 2018 hingga tahun 2021, Pemerintah Kota Surabaya selalu mendapatkan predikat kinerja tingkat BB. Kemudian pada tahun 2022 dan 2023, Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan predikat kinerja tingkat A. Meski demikian, nilai evaluasi SAKIP terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini diupayakan melalui perbaikan indikator kinerja utama Walikota dan Kepala Perangkat Daerah, dan akan terus ditingkatkan melalui proses penyusunan rencana kerja, pelaksanaan serta evaluasi hasil rencana yang lebih baik dan terintegrasi.

Dari segi ketatalaksanaan, perangkat daerah menjalankan ketatalaksanaan dengan berpedoman pada *standard operational procedure* (SOP). Dalam hal ini, perangkat daerah perlu melakukan pemrosesan produk inti atau rancangan SOP sampai ditetapkan dalam Peraturan Walikota maupun surat keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pada tahun 2021 hingga tahun 2023 Pemerintah Kota Surabaya menjalankan ketatalaksanaan pelaksanaan pemerintahan dengan berpedoman pada adanya *standard operational procedure* (SOP) pada setiap jenis pelayanan. Pada tahun 2021 sebanyak 361 jenis pelayanan, dan 215 jenis pelayanan atau 59,56 persen telah memiliki *standard operational procedure* (SOP). Kemudian pada tahun 2022 terdapat sebanyak 215 jenis pelayanan dan 131 jenis pelayanan atau 60,93 persen telah memiliki *standard operational procedure* (SOP). Sedangkan pada tahun 2023 terdapat sebanyak 215 jenis pelayanan dan 143 jenis pelayanan (60,93 persen) telah memiliki *standard operational procedure* (SOP).

Tabel II.158
Persentase Jenis Pelayanan yang Memiliki SOP Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah jenis pelayanan	329	329	361	215	215
2.	Jumlah jenis pelayanan yang memiliki SOP	172	182	215	131	143
3.	Persentase jenis pelayanan yang memiliki SOP (%)	52,28	55,32	59,56	60,93	66,51

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2024

Sedangkan untuk SOP yang dievaluasi tiap tahun bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.159
SOP Dievaluasi Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah SOP	868	868	906	1.446	1.536
SOP dievaluasi	561	10	68	123	556

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2024

Dari keseluruhan 868 SOP yang ada, 561 di antaranya telah dilakukan evaluasi pada tahun 2019. Selanjutnya di tahun 2020 ada 10 SOP dievaluasi, di tahun 2021 ada 68 SOP yang dievaluasi, dan di tahun 2022 dari 1.446 SOP telah dilakukan evaluasi sebanyak 123 SOP. Sedangkan pada tahun 2023, dari 1.536 SOP telah dilakukan evaluasi sebanyak 556 SOP.

Pemerintah Kota Surabaya juga berkomitmen untuk terus melakukan sinkronisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundangan di atasnya. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penyelesaian rancangan produk hukum dan evaluasi

terhadap produk hukum yang sudah ada. Sejak tahun 2018 hingga 2021, setiap tahunnya terdapat 12 produk hukum yang dievaluasi. Sementara itu, produk hukum baru yang diselesaikan tiap tahunnya mencapai 100% terhadap rancangan produk hukum di tahun tersebut. Jumlah keseluruhan produk hukum baru yang bisa diselesaikan pada tahun 2020 hingga tahun 2024 (TW II) selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.160
Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah rancangan produk hukum	72	149	155	30	37
2.	Jumlah rancangan produk hukum yang diselesaikan	72	149	155	30	37
3.	Persentase rancangan produk hukum yang diselesaikan	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2024

Selain itu, pengawasan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi hal yang penting dalam rangka mendukung pelayanan pada masyarakat sekaligus sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Rekap kinerja BUMD Kota Surabaya sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.161
Rekap Hasil Audit Kinerja BUMD Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Nama BUMD	2019	2020	2021	2022	2023
PDAM Surya Sembada	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
PD Pasar Surya	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
PD Rumah Potong Hewan	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP
PT Bank SAU (Surya Artha Utama)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
PT Surya Karsa Utama	WDP	WDP	TMP	WDP	-

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2024

Dari data di atas dapat dilihat bahwa masih ada beberapa BUMD milik Pemerintah Kota Surabaya yang kinerjanya belum maksimal. Beberapa BUMD yang telah memiiki kinerja baik yang ditunjukkan dengan hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 antara lain PDAM Surya Sembada, PDTS Kebun Binatang Surabaya, dan PT Bank SAU (Surya Artha Utama).

2.1.3.4.1.2 Pelayanan Publik

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara

kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Hasil SKM menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.162
Survei Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata nilai SKM Pelayanan	82,43	86,05	88,37	90,76	95,82

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2024

Pelaksanaan *survey* kepuasan masyarakat telah mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada unit penyelenggara pelayanan adalah unit yang memberikan pelayanan kepada masyarakat (31 Kecamatan, 153 Kelurahan, 63 Puskesmas, 2 Rumah Sakit Umum Daerah, PTSP Surabaya Timur, PTSP Surabaya Pusat (Siola), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Laboratorium Kesehatan Daerah). Rata-rata nilai SKM sepanjang tahun 2023, mayoritas berada di atas nilai 90, yakni “Sangat Baik”. Meski demikian, nilai tersebut selalu naik dan turun setiap tahunnya. Artinya, masih dibutuhkan usaha yang lebih inovatif lagi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat supaya dapat mencapai kategori “Sangat Baik”.

2.1.3.4.1.3 Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik kerjasama antar pemerintah daerah maupun kerjasama dengan pihak luar negeri merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dilaksanakan guna mengembangkan dan meningkatkan kerjasama, antara lain dengan perluasan jaringan kerjasama Kota Surabaya dengan mitra kerjasama di dalam dan di luar negeri serta peningkatan kualitas upaya tindak lanjut kerjasama guna menciptakan integrasi antar daerah dalam menyelesaikan permasalahan lintas sektor.

Pada tahun 2023 terdapat 20 MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga. Dari jumlah tersebut sebanyak 20 MoU atau 100% terealisasi dan memberikan

manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya. Untuk kerjasama luar negeri, terdapat 11 MoU dan keseluruhan 11 MoU memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya.

Tabel II.163
MoU Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga Tahun 2023 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2023	2024
1.	Jumlah bidang MoU kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	20	7
2.	Jumlah bidang MoU kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga keseluruhan	20	7
3.	Persentase bidang MoU kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	100%	100%

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2024

Tabel II.164
MoU Kerjasama Luar Negeri Tahun 2023 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2023	2024
1.	Jumlah bidang MoU kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti	11	5
2.	Jumlah bidang MoU kerjasama luar negeri keseluruhan	11	5
3.	Persentase bidang MoU kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti	100%	100%

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2024

Dari beberapa Kerjasama tersebut, setiap tahunnya dilakukan evaluasi. Data jumlah kerjasama yg dievaluasi bisa dilihat di tabel berikut.

Tabel II.165
MoU Kerjasama Kota Surabaya yang Dievaluasi Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kerjasama dievaluasi	29	21	36	31	12

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2024

2.1.3.4.1.4 Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Di samping menjalankan bisnis secara profesional, BUMD juga dituntut untuk dapat berkontribusi dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan Pemerintah Kota Surabaya. Beberapa BUMD yang berkontribusi pada tahun 2019 – 2023, yakni:

1) PDAM Surya Sembada

   Pada tahun 2023, PDAM Surya Sembada berkomitmen secara berkala menyelenggarakan program Satria Surya Sembada Mengajar kepada siswa dan mahasiswa.

2) PT BPR Surya Artha Utama (SAU)

Sejak tahun 2021, PT BPR Surya Artha Utama mendukung upaya penguatan UMKM di Kota Surabaya sebagai bagian dari langkah percepatan pemulihan ekonomi di masa pandemi, melalui pemberian kredit kepada UMKM dengan suku bunga 3% per tahun dengan plafon Rp2.500.000, melalui Program PUSPITA dan SI KUMIS. Selain itu, di tahun 2022, PT BPR-SAU mendukung pengembangan pasar melalui bantuan pemasangan *signage* di Pasar Penjaringan Sari dan Pasar Keputih.

3) PT SIER (*Surabaya Industrial Estate Rungkut*)

Meski Pemerintah Kota Surabaya hanya memiliki 25% saham, PT SIER tetap berkomitmen melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk memberikan bantuan dalam rangka percepatan pemulihan Kota Surabaya di masa pandemi melalui bantuan alat kesehatan senilai Rp203.000.000. Selain itu, PT SIER juga secara rutin memberikan beasiswa kepada warga Kota Surabaya yang berpenghasilan rendah dalam rangka mendukung program pendidikan di Kota Surabaya. Selain itu, PT SIER juga secara konsisten mendukung pemulihan ekonomi melalui pembinaan bagi warga sekitar kawasan industri SIER.

4) PT BPD Jatim

Meski Pemerintah Kota Surabaya hanya memiliki 2,13% saham, PT BPD Jatim, sejak 2021, juga memberikan bantuan kepada usaha mikro kecil binaan Pemerintah Kota Surabaya berupa barang dan uang. PT BPD Jatim juga mendukung digitalisasi transaksi daerah melalui kerjasama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan dalam hal pembayaran ePeken melalui QRIS. Selain itu, PT BPD Jatim juga mendukung percepatan pemulihan ekonomi melalui pembinaan UMKM oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya melalui pemberian bantuan CSR berupa alat jahit. Dalam hal mendukung digitalisasi, PT BPD Jatim menyerahkan bantuan CSR sebanyak 120 Unit *Personal Computer* (PC) kepada Pemerintah Kota Surabaya. PT BPD Jatim juga bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam penerapan sistem pembayaran parkir nontunai.

2.1.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.5.1 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

Perencanaan Pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh PD, yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

RPJMD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dalam hal ini, rencana program pembangunan daerah merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Melalui RKPD, Renstra serta Renja PD, program-program pembangunan pada RPJMD dijabarkan secara operasional menjadi rencana kegiatan yang dilaksanakan di setiap tahun. Sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap keberhasilan perencanaan pembangunan, maka kinerja program dan kegiatan diukur secara periodik untuk memastikan kegiatan yang direncanakan secara efektif menunjang pencapaian keberhasilan program.

Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Surabaya telah menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 tahun 2012. Sedangkan di tahun 2021, disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021, sehingga dengan ditetapkan dokumen perencanaan tersebut dalam peraturan daerah, Pemerintah Kota telah memiliki dokumen perencanaan yang memiliki kekuatan hukum. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.166
Dokumen Perencanaan Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Jenis Dokumen	2020	2021	2022	2023	2024
1	RPJPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	RPJMD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rencana capaian kinerja program pembangunan yang dijabarkan melalui program dan

kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Program-program pembangunan yang dituangkan di dalam dokumen RPJMD merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan dilaksanakan melalui program pembangunan daerah. Pada tahun 2020, telah dilakukan *review* terhadap RPJMD 2016-2021 untuk dilaksanakan di tahun 2020 dan 2021, namun dengan adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka khusus untuk tahun 2021 dilaksanakan pemetaan program sesuai dengan ketentuan tersebut, sehingga terdapat perubahan jumlah program dalam RPJMD Tahun 2021. Akan tetapi, meski jumlah program berkurang, namun esensi program, berupa indikator-indikator versi *Review* RPJMD 2016-2021, seluruhnya tetap dimasukkan ke 121 program hasil konversi.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dengan program-program pembangunan telah mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur. Sehingga pada tahun 2022 jumlah program pembangunan pada RKPD adalah sebanyak 123 program.

Tabel II.167
Penjabaran Program RPJMD Dalam RKPD Kota Surabaya
Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan	177	177	123	123	123
2	Jumlah Program RKPD	177	121	124	124	124
3	Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100*	100*	100*	100*

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2023
*Keterangan: *) Jumlah program RKPD 2021 menyesuaikan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020*

Sementara itu, tingkat capaian keberhasilan program mulai tahun 2020 hingga tahun 2023 cenderung mengalami peningkatan. Sedangkan pada tahun 2024 sampai dengan triwulan 2, tingkat capaian keberhasilan programnya baru mencapai 52,26%. Selengkapnya data tingkat capaian keberhasilan program pembangunan bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.168
Tingkat Capaian Keberhasilan Program Pembangunan
Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program (%)	99,02	98,13	99,21	99,43	52,26

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2024

Salah satu unsur pembentuk tata kelola pemerintah adalah terkait tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dapat ditunjukkan dari rata-rata penyerapan anggaran kegiatan, sehingga diperlukan upaya untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif dan efisien. Rata-rata penyerapan anggaran di tahun 2020 – 2023 cenderung fluktuatif menyesuaikan kebutuhan sehingga terdapat sisa. Sedangkan di tahun 2024, sampai dengan triwulan II, penyerapan anggarannya baru mencapai 26,39%.

Tabel II.169
Rata – Rata Penyerapan Anggaran Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata penyerapan anggaran kegiatan (%)	90,18	80,17	88,83	88,19	26,39

Sumber: Sekretariat Daerah, diolah, 2024

2.1.3.5.2 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistim. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penyusunan pola karier PNS yang berhasil diidentifikasi meliputi pendidikan formal, diklat, usia, masa kerja, golongan ruang, pangkat dan tingkat jabatan serta kompetensi. Pemerintah Kota Surabaya juga telah merumuskan sistem pengembangan pola karier pegawai dan saat ini dalam proses pengesahan menjadi peraturan Kepala Daerah.

Selain itu, pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) juga tak kalah pentingnya dalam memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang diprasyaratkan sehingga dapat memberi konstribusi optimal bagi organisasi. Salah satu bentuk pengembangan pegawai adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan dapat melalui *off the job* dan *on the job training*. Pada tahun 2019 jumlah pegawai yang berkompeten sebanyak 5.803 pegawai, kemudian di tahun 2020 menurun menjadi

4.503 pegawai. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah pegawai yang berkompeten sebanyak 4.725 pegawai, lalu pada tahun 2022 jumlah pegawai yang berkompeten sebanyak 5.776 pegawai, dan pada tahun 2023 jumlahnya sebanyak 5.603 pegawai. Kemudian pada TW II tahun 2024, jumlahnya sebanyak 5.718 pegawai. Di bawah ini terdapat jumlah data pegawai yang kompeten.

Tabel II.170
Jumlah Pegawai Yang Berkompeten Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pegawai kompeten	4.503	4.725	5.776	5.603	5.718
2	Jumlah pegawai belum kompeten	2.033	1.636	312	403	152

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2024

Dari data di atas, sejak tahun 2020 – 2022, jumlah pegawai belum kompeten menurun setiap tahunnya. Namun pegawai yang belum kompeten masih relatif tinggi. Mengingat kompetensi aparatur sipil negara (ASN) berperan penuh dalam menjawab tantangan dan perubahan zaman yang dinamis, diupayakan untuk memperkecil jumlah pegawai yang belum kompeten.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pejabat struktural, salah satunya melalui pelaksanaan diklat. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat struktural sehingga diperlukan penyelenggaraan diklat secara komprehensif.

Tabel II.171
Persentase Pejabat Struktural yang telah Mengikuti Diklat Struktural
Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pejabat struktural	1.461	1.414	1.197	1.233	1.185
2.	Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural	1.048	944	624	642	622
3.	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural (%)	71,73	66,76	52,13	52,07	55,27

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2024

2.1.3.5.3 Pengelolaan Perbatasan

Tahapan pelaksanaan pekerjaan penegasan batas wilayah pada tahun 2016–2019 meliputi sosialisasi pelaksanaan penegasan batas wilayah kecamatan dan kelurahan lalu dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen, pemilihan peta dasar, pembuatan garis batas di atas peta serta penetapan ketentuan pelacakan dan penentuan posisi batas. Agar batas daerah tersebut dapat diterima

oleh semua pihak maka harus didukung oleh dokumen otentik berupa peta batas daerah dan tanda fisik di lapangan berupa pilar tanda batas. Sedangkan pada tahun 2020 hingga akhir tahun 2023, penegasan batas wilayah dilakukan dengan mengukur dan menetapkan batas wilayah melalui Perwali. Data penegasan wilayah Tahun 2019 – 2023 sebagai berikut.

Tabel II.172
Penegasan Wilayah Kecamatan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kecamatan	31	31	31	31	31
Sudah dilakukan penegasan wilayah	0	10	16	22	25

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2024

2.1.3.6 Unsur Pengawasan

Dalam melaksanakan setiap kegiatan di instansi pemerintahan memerlukan data serta informasi. Salah satu informasi yang diperlukan melalui kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi sebagai aspek penunjang dalam hal pelayanan, baik buruknya kinerja pelayanan dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan administrasi yang berjalan. Dalam menjalankan setiap kegiatan tata kelola administrasi seringkali adanya pelanggaran yang terjadi di Perangkat Daerah. Karena itu, diperlukan pengawasan untuk mengurangi pelanggaran di setiap tahunnya. Sebagaimana bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.173
Pelanggaran Tata Kelola Administrasi Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pelanggaran tata kelola administrasi	24	19	0	0	0

Sumber: Inspektorat Daerah, 2024

Dapat dilihat pada tabel di atas, tahun 2019 sampai tahun 2021 pelanggaran tata kelola administrasi mengalami penurunan. Dari 38 pelanggaran di tahun 2019, menjadi 19 pelanggaran di tahun 2021. Mulai di tahun 2022 hingga saat ini, jumlah pelanggaran dapat dicegah melalui pengawasan sebelum pelaporan tata kelola administrasi sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran tata kelola administrasi. Hal ini tidak terlepas dari adanya dukungan dari sistem informasi elektronik yang membantu mengakselerasi dan mempermudah proses pengawasan dan pemeriksaan.

Selain itu, unsur pengawasan internal juga diperlukan untuk mendisiplinkan aparatur. Banyaknya pelanggaran disiplin aparatur, sebagaimana ditunjukkan pada

tabel berikut, cenderung meningkat, karena itu diperlukan optimalisasi pengawasan internal untuk mengurangi jumlah pelanggaran.

Tabel II.174
Rekapitulasi Sanksi Disiplin Terhadap Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Jenis Hukuman Disiplin	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Hukuman Disiplin Ringan	8	13	2	5	4
Jumlah Hukuman Disiplin Sedang	7	1	2	19	8
Jumlah Hukuman Disiplin Berat	15	16	29	21	11
Total Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan	30	30	33	45	23

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2024

2.1.3.7 Unsur Pemerintahan Umum

2.1.3.7.1 Pembinaan Politik dan Organisasi Masyarakat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan pengertian ini bahwa dapat dijelaskan semua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemasyarakat lainnya merupakan bagian dari Ormas. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait keberadaan organisasi masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, setiap Ormas di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sedangkan untuk Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Bagi Ormas yang telah mendapat SKT akan mendapatkan pembinaan dan pengawasan. Sebagai sebuah organisasi oleh anggota masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau yang disebut Ormas juga memiliki peran penting dalam

rangka pemberdayaan, pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Jumlah Ormas Tahun 2020 – 2024 (Triwulan 2) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.175
Jumlah Ormas Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Ormas Aktif	15	38	27	26	10
2	Jumlah Ormas Terdaftar	167	167	104	213	252

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2024

Pemerintah Kota Surabaya melakukan pembinaan/pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja Ormas. Bentuk pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembinaan terhadap Ormas dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas. Pemberdayaan Ormas melalui antara lain fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sampai dengan triwulan 1 tahun 2024, terdapat 252 ormas yang terdaftar, sementara baru 10 ormas yang mendapat pembinaan.

2.1.3.7.2 Penanganan Potensi Konflik

Lingkungan yang damai dan tertib merupakan keinginan setiap masyarakat karena hal ini termasuk salah satu faktor yang sangat signifikan pengaruhnya pada kehidupan manusia.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan umum, pemerintah kota Surabaya melakukan upaya pengawasan terhadap potensi konflik yang bisa terjadi di masyarakat. Data potensi konflik selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.176
Jumlah Potensi Konflik Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah potensi konflik	215	297	403	309	196
2	Jumlah konflik	10	8	5	5	2

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2024

Guna mengurangi risiko potensi konflik ini, pelibatan tim kewaspadaan dini penting dalam memetakan potensi konflik, dan didukung penuh oleh partisipasi masyarakat sangat signifikan dalam mewujudkan kerukunan antar elemen di masyarakat.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi dapat diukur dari tingkat produktivitas per kategori lapangan usaha. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut.

Tabel II.177
Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Tahun	Konsumsi Rumah Tangga Perkapita				Total	
	Makanan	%	Non Makanan	%		
2019	742.013	36,60	1.285.586	63,40	2.027.599	100%
2020	777.725	41,39	1.101.421	58,61	1.879.146	100%
2021	810.743	41,52	1.141.846	54,48	1.952.589	100%
2022	819.124	41,60	1.149.824	58,40	1.968.948	100%
2023	948.701	38,79	1.497.216	61,21	2.445.917	100%

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2024

Konsumsi Rumah tangga setiap tahunnya menunjukkan peningkatan, kecuali pada tahun pandemi 2020. Jika diuraikan berdasarkan kelompok pengeluaran, persentase terbesar pada kelompok non makanan. Semakin besarnya proporsi konsumsi non makanan dibanding konsumsi makanan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya meningkat. Produktivitas ekonomi Kota Surabaya yang tercermin sebagaimana berikut.

Tabel II.178
Produktivitas Ekonomi di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Angkatan Kerja (orang)	1.566.846	1.582.564	1.572.888	1.643.314	1.569.714
PDRB (Juta Rp)	580.488.529	554.509.457	590.227.967	655.616.222	715.294.707
Produktivitas (Juta Rp per orang)	370,48	350,39	375,25	398,96	455,68

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2024

Produktivitas ekonomi yang merupakan cerminan dari PDRB Kota surabaya maka untuk menunjang pembangunan ekonomi. Dari beberapa sub

kategori PDRB yang menjadi salah satu prioritas antara lain yang pendukung perdagangan yaitu kategori transportasi dan pergudangan.

Tabel II.179
Perkembangan PDRB Kategori Transportasi dan Pergudangan
Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai PDRB ADHK (miliar rupiah)	20.497,98	19.477,42	19.875,91	22.684,94	25.217,17
Laju Pertumbuhan (persen)	7,62	-4,98	2,05	14,14	11,16

Sumber : BPS Kota Surabaya diolah, 2024

2.1.4.2 Fokus Infrastruktur Kewilayahan

2.1.4.2.1 Indeks Infrastruktur Kota

Indeks Infrastruktur Kota mengukur keberhasilan dalam peningkatan kualitas infrastruktur kota. Indeks Infrastruktur Kota menggambarkan implementasi penataan ruang kota yang terintegrasi melalui penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur kota yang terdiri dari tiga komponen, yaitu Indeks Kebinamargaan dan Pematusan, Indeks Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan serta Indeks Penyelenggaraan Transportasi.

Pola perhitungan Indeks Infrastruktur Kota pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 telah dilakukan evaluasi dan perbaikan pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Hal ini dikarenakan diperlukan penyesuaian komponen perhitungan untuk mengakomodir aspek infrastruktur kota yang masih perlu ditingkatkan pada periode 2021-2026. Sehingga formulasi perhitungan antara tahun 2020-2021 dengan tahun 2022 berbeda, dan capaiannya tidak dapat disejajarkan.

Tabel II.180
Indeks Infrastruktur Kota Surabaya Tahun 2022 – 2023

No.	Uraian	2022	2023
1.	Indeks Infrastruktur Kota	0,67	0,75
1.a	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	0,78	0,81
1.b	Indeks Keciptakayaan, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,53	0,67
1.c	Indeks Penyelenggaraan Transportasi	0,67	0,74

Sumber: Bappedalitbang, diolah, 2024

Pada tahun 2023 Realisasi Indeks Infrastruktur Kota Surabaya meningkat menjadi 0,75. Hal tersebut tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota untuk meningkatkan kualitas jalan dan prasarana melalui pembangunan pedestrian dan pelaksanaan *overlay* (pelapisan ulang aspal) pada 2.806 ruas jalan, peningkatan

konektivitas jalan melalui pembangunan jalan baru (*Radial Road*). Penanganan genangan dilakukan melalui pembangunan dan/rehabilitasi sistem drainase pada 236 lokasi, penambahan kapasitas dan pembangunan rumah pompa baru sebanyak 7 unit, serta pengerukan saluran primer, sekunder dan tersier di 1.140 lokasi.

Selanjutnya, penyediaan hunian layak juga telah dilakukan melalui penyediaan rumah susun bagi masyarakat miskin sebanyak 109 blok rusunawa, Program Dandan Omah sebagai upaya rehabilitasi terhadap rumah tapak tidak layak huni sebanyak 2.887 unit rumah, fasilitasi penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan sebanyak 35 lokasi, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik. Selain itu dari sisi penataan ruang dan penyediaan tanah telah dilakukan pelayanan penataan ruang dan bangunan yang terintegrasi serta berbasis teknologi.

Sedangkan dari aspek transportasi, keberhasilan tersebut didukung oleh penyediaan layanan angkutan umum perkotaan antara lain angkutan Suroboyo Bus sebanyak 28 unit yang melayani 2 rute layanan, kerjasama Kementerian Perhubungan melalui Program Teman Bus sebanyak 17 unit yang melayani 1 rute serta angkutan feeder sebanyak 52 unit yang melayani 6 rute di tahun 2023. Selain itu, capaian kinerja aspek transportasi didukung dengan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta koordinasi dengan pihak penyelenggara moda transportasi kereta api (PT. KAI DAOP VIII Surabaya) untuk menjalin konektivitas antar moda transportasi pada 3 stasiun serta manajemen dan rekayasa lalu lintas.

2.1.4.2.2 Penataan Ruang

Pada tahun 2023, sebagian besar luasan wilayah budidaya di Kota Surabaya adalah berupa wilayah produktif yaitu sebesar 93,27 persen. Wilayah produktif di Kota Surabaya antara lain berupa kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum, komersial, industri dan militer.

Tabel II.181
Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Luas Wilayah Produktif (ha)	23.665,80	23.665,80	23.665,80	23.665,80	23.665,80
Persentase luas wilayah produktif (persen)	93,27	93,27	93,27	93,27	93,27

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2024

Tabel II.182
Rasio Luas Wilayah Industri Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Luas Wilayah Industri (ha)	2.506,40	2.506,40	2.506,40	2.506,40	2.506,40
Rasio luas wilayah industri (%)	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2024

Berdasarkan luasannya, wilayah industri di Kota Surabaya terbagi menjadi kawasan industri dan zona industri. Kawasan industri berlokasi di kawasan Rungkut dan kawasan Margomulyo. Sedangkan zona industri berlokasi tersebar di beberapa tempat antara lain kawasan Kalirungkut kawasan Karangpilang, kawasan Tanjungsari dan kawasan Kalianak. Luas wilayah industri pada tahun 2023 adalah sebesar 9,88 persen dari keseluruhan Kota Surabaya.

Tabel II.183
Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Luas Wilayah Perkotaan (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Rasio luas wilayah perkotaan (persen)	100	100	100	100	100

Sumber: Review RTRW Kota Surabaya, 2024

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Seluruh kawasan budidaya yang ada di Kota Surabaya adalah merupakan kawasan perkotaan karena kegiatan utama pada kawasan budidaya di Kota Surabaya adalah bukan pertanian. Untuk itu rasio luas wilayah perkotaan adalah sebesar 100 persen dari keseluruhan kawasan budidaya di Kota Surabaya.

2.1.4.2.3 Perhubungan

Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk terus menyediakan fasilitas jalan yang memadai dengan memperhatikan perkembangan volume lalu lintas harian pada ruas jalan utama di Kota Surabaya. Hal ini diukur melalui V/C ratio yaitu perhitungan volume per jam tertinggi untuk memperkirakan volume per jam desain (yaitu volume per jam tertinggi ke-n) untuk keperluan desain yang ideal. Pada tahun 2022, terdapat 49 jalan kewenangan kota dan 2 jalan kewenangan nasional yang memiliki V/C Ratio ≤0,90 dari total 51 ruas jalan yang disampling. Semakin kecil

nilai V/C ratio pada suatu ruas jalan maka semakin baik pula fungsi jalan tersebut. Rata-rata V/C ratio di beberapa ruas jalan di Kota Surabaya terbukti semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 rata-rata V/C ratio di Kota Surabaya adalah 0,56. Kemudian turun menjadi 0,54 pada tahun 2019, dan turun lagi di tahun 2020 menjadi 0,47 dan di tahun 2021 menjadi 0,42. Namun pada tahun 2022 rata-rata V/C ratio di Kota Surabaya mengalami kenaikan menjadi 0,74. Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk mengurai kepadatan lalu lintas dengan melakukan pengembangan infrastruktur kota antara lain dengan menyediakan alternatif rute perjalanan serta melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Rata-rata V/C ratio jalan di Kota Surabaya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel II.184
Rata-rata V/C Ratio Jalan di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata V/C Ratio	0,54	0,47	0,42	0,75	0,74

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2023

Tabel II.185
Derajat Kejenuhan Lalu Lintas (V/C Rasio) Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Lokasi Jalan	Kewenangan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jl. Adityawarman	kota	0,3	0,28	0,295	0,54	0,85
2	Jl. Bengawan	kota	0,16	0,13	0,155	0,69	0,70
3	Jl. Blauran	kota	0,95	0,72	0,57	0,71	0,51
4	Jl. Bubutan	kota	0,67	0,4	0,82	0,81	0,44
5	Jl. Citra Raya Unesa	kota	0,51	0,4	0,27	0,72	0,84
6	Jl. Darmo	kota	0,47	0,5	0,545	0,88	0,76
7	Jl. Dharmahusada Utara VIII	kota	0,14	0,12	0,065	0,58	0,56
8	Jl. Dharmawangsa	kota	0,38	0,34	0,27	0,89	0,70
9	Jl. Dinoyo	kota	0,13	0,28	0,195	0,69	0,80
10	Jl. Diponegoro	kota	0,44	0,42	0,45	0,58	0,69
11	Jl. Dr. Ir. H. Soekarno	kota	0,43	0,42	0,49	0,86	0,79
12	Jl. Dr.Soetomo	kota	3,19	0,42	0,3	0,61	0,62
13	Jl. Embong Malang	kota	0,37	0,44	0,55	0,65	0,46
14	Jl. Gemblongan	kota	0,61	0,48	0,53	0,95	0,95
16	Jl. Gubeng pojok	kota	0,34	0,47	0,28	0,65	0,55
17	Jl. Gubernur Suryo	kota	0,91	0,67	0,32	0,69	0,60
18	Jl. Hayam Wuruk	kota	0,26	0,17	0,14	0,52	0,86
19	Jl. Indragiri	kota	0,2	0,18	0,375	0,69	0,77
20	Jl. Indrapura	kota	0,55	0,83	0,8	0,76	0,74
21	Jl. Jagir Wonokromo	kota	0,29	0,18	0,315	0,61	0,60
22	Jl. Jakarta	kota	0,66	0,6	0,385	0,80	0,88
23	Jl. Joyoboyo	kota	0,64	0,22	0,545	0,78	0,87

No.	Lokasi Jalan	Kewenangan	2019	2020	2021	2022	2023
24	Jl. Kapuas	kota	0,01	0,01	0,035	0,64	0,43
25	Jl. Kayoon	kota	0,23	0,23	0,25	0,64	0,78
26	Jl. Kedungdoro	kota	0,23	0,27	0,41	0,82	0,76
27	Jl. Kejawan Putih Tambak	kota	0,13	0,27	0,2	0,71	0,70
28	Jl. Kembang Jepun	kota	0,36	0,57	0,55	0,74	0,77
29	Jl. Kertajaya Indah	kota	0,58	0,45	0,53	0,74	0,73
30	Jl. Kusuma Bangsa	kota	0,63	0,49	0,47	0,75	0,76
31	Jl. Laguna Kejawan Putih Tambak	kota	0,23	0,22	0,25	0,67	0,63
32	Jl. Mayjend HR. Muhammad	kota	0,34	0,26	0,565	0,72	0,98
34	Jl. Mayjend Sungkono	kota	0,43	0,44	0,475	0,92	0,94
35	Jl. Ngagel	kota	0,46	0,5	0,27	0,70	0,70
36	Jl. Pahlawan	kota	0,74	1,11	0,53	0,80	0,82
37	Jl. Pemuda	kota	0,51	0,79	0,83	0,86	0,90
38	Jl. Perak Barat	nasional	0,85	0,63	0,71	1,03	0,99
39	Jl. Perak Timur	nasional	0,87	0,54	0,41	1,16	0,96
40	Jl. Polisi Istimewa	kota	0,19	0,16	0,22	0,79	0,78
41	Jl. Prof. Dr. Moestopo	kota	0,66	0,72	0,565	0,88	0,72
42	Jl. Rajawali	kota	0,85	0,83	0,51	0,76	0,76
43	Jl. Raya ITS	kota	0,58	0,19	0,23	0,49	0,65
44	Jl. Stasiun Wonokromo	kota	0,29	0,5	0,42	0,77	0,63
45	Jl. Sumatra	kota	0,52	0,37	0,02	0,72	0,78
46	Jl. Tunjungan	kota	0,82	1,03	0,58	0,66	0,87
47	Jl. Urip Sumoharjo	kota	0,89	0,55	0,475	0,87	0,70
48	Jl. Jendral Basuki Rachmat	kota	1,18	1,38	1,2	0,82	0,76
49	Jl. Jembatan Merah/ Jl. Veteran	kota	0,86	1,01	1,05	0,71	0,70
50	Jl. Panglima Sudirman	kota	0,22	0,96	0,27	0,85	0,71
51	Jl. Keputran	kota	0,12	0,05	0,035	0,72	0,87
Rata-rata di jalan kewenangan kota			**0,55**	**0,48**	**0,43**	**0,73**	**0,71**
Rata-rata total			**0,54**	**0,47**	**0,42**	**0,75**	**0,74**

Sumber: Dinas Perhubungan, 2024

Pada tabel di atas, rata-rata derajat kejenuhan menunjukkan tren yang relatif tinggi di angka 0,74. Masih adanya beberapa ruas jalan yang derajat kejenuhannya lebih dari 0,95 menunjukkan masih diperlukannya upaya untuk melakukan peningkatan penggunaan transportasi publik dan pengurangan penggunaan kendaraan pribadi melalui *Traffic Demand Management* yang diwujudkan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas-ruas jalan.

Meningkatnya volume kendaraan di Kota Surabaya menyebabkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas semakin besar. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengurangi angka kecelakaan dengan melakukan sosialisasi agar masyarakat tertib saat berkendara, memasang rambu, dan lain-lain. Angka kejadian kecelakaan lalu lintas di Surabaya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.186
Angka Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas	874	932	1.263	1.404	600

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2024

Mengingat Kota Surabaya adalah kota besar dan merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, seringkali Kota Surabaya menjadi tempat jujukan bagi masyarakat untuk mencari pekerjaan. Hal tersebut dapat terlihat pada jumlah kepadatan masyarakat di Kota Surabaya antara siang hari dan malam hari. Pada malam hari, Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk kurang lebih 3.009.286 jiwa, sementara pada siang hari bisa menjadi 2 kali lipat karena masyarakat dari kabupaten/kota sekitar yang memiliki pekerjaan di Kota Surabaya. Hal ini membuat akses keluar-masuk Kota Surabaya sering mengalami kemacetan pada jam-jam tertentu. Oleh karena itu diperlukan pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan daerah-daerah sekitar Surabaya agar dapat memberikan alternatif moda transportasi bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk beralih moda transportasi.

2.1.4.2.4 Drainase

Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan pengembangan dan optimalisasi kinerja sistem drainase karena kondisi geografis Kota Surabaya yang relatif datar dan berada di pesisir pantai sehingga mengakibatkan sistem drainase kota tidak hanya dipengaruhi oleh hujan, namun juga oleh pasang surut air laut.

Lama rata-rata terjadinya genangan Kota Surabaya secara umum mengalami penurunan. Pada 2020 rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Surabaya sebesar 22,22 menit dapat diturunkan tiap tahunnya, hingga triwulan 1 tahun 2024 ini rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Surabaya sebesar 18,39 menit, sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II.187
Rata-rata Lama Genangan Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Lama Terjadinya Genangan (menit)	22,22	22,04	19,12	18,69	18,39

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2024

Rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya secara umum juga mengalami penurunan. Pada tahun 2020, rata-rata genangan setinggi 10,92 cm. Hingga

triwulan 1 tahun 2024 ini, rata-rata tinggi genangan tersebut dapat diturunkan menjadi 9,83 sentimeter sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II.188
Rata-rata Tinggi Genangan Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Tinggi Genangan (cm)	10,92	10,92	10,92	10,01	9,83

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2024

Luasan wilayah genangan Kota Surabaya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, wilayah genangan Kota Surabaya seluas 462,64 hektar. Hingga triwulan 1 tahun 2024 ini, luas wilayah genangan terus menurun menjadi sebesar 391,40 hektar, sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II.189
Luas Wilayah Genangan di Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Wilayah Genangan (ha)	462,64	452,57	432,09	400,74	391,40

Sumber : Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2024

Pemerintah Kota Surabaya dalam mengendalikan banjir dan genangan telah melakukan pembangunan sarana prasarana serta normalisasi saluran pematusan di Kota Surabaya antara lain membangun boezem-boezem kurang lebih seluas 124,78 hektar, membangun dan meningkatkan kapasitas pompa sebanyak 67 rumah pompa, serta mengembangkan sistem pemantauan ketinggian muka air pada muara-muara saluran yang menuju ke laut (*smart water level*) sehingga pada ketinggian tertentu, pompa harus segera dioperasikan untuk mencegah timbulnya genangan di wilayah tersebut. Hingga sekarang, smart water level telah terpasang pada 7 (tujuh) rumah pompa, yaitu pada Pompa Boezem Kalidami, Pompa Boezem Morokrembangan, Pompa Darmokali, Pompa Balong II, Pompa Gadukan, Pompa Dinoyo dan Pompa Tambak Wedi.

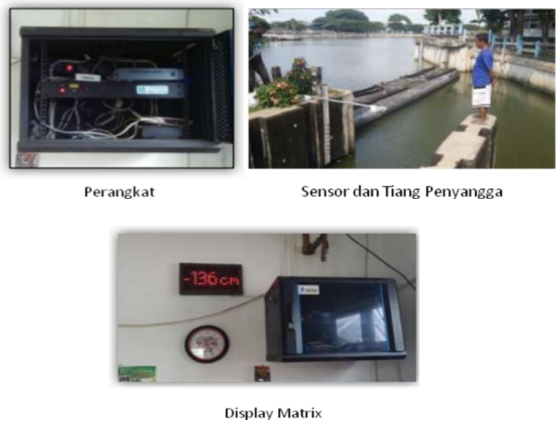

Gambar II.18
Perangkat Smart Water Level

Optimalnya kinerja drainase secara umum pada triwulan pertama tahun 2024 ini tidak lepas dari dilaksanakannya pengerjaan rehabilitasi drainase pada 243 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Surabaya. Meski demikian, Pemerintah Kota Surabaya akan terus melakukan upaya peningkatan sarana prasarana pematusan antara lain melalui pembangunan dan normalisasi saluran, peningkatan kapasitas pompa, pembangunan rumah pompa baru, boezem, tanggul laut, dan pemasangan *smart water level* di rumah pompa lainnya.

2.1.4.2.5 Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata, Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan penyebaran dan layanan jaringan utilitas kota di antaranya dengan terus meningkatkan sistem jaringan dan kualitas Penerangan Jalan Umum (PJU) secara merata di seluruh wilayah Kota Surabaya. Sampai dengan akhir tahun 2023, jumlah PJU yang terpasang sebanyak 105.846 titik dan seluruhnya dalam kondisi baik.

Tabel II.190
Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tahun 2020 – 2024 (TW II)

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PJU terpasang (titik per tahun)	6.400	1.324	3.002	9.594	4.419

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

Setiap tahun Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan pemasangan PJU di seluruh Kota Surabaya secara merata. Selain melakukan pemasangan baru PJU tersebut, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan kegiatan pelimpahan rekening PJU dari warga. Dengan semakin banyaknya PJU yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya, maka beban pemeliharaan dan tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya semakin besar. Oleh karena itu salah satu upaya yang terus dilakukan adalah dengan melakukan pemasangan PJU yang hemat energi sehingga semakin banyaknya PJU hemat energi yang terpasang di Kota Surabaya maka beban pemeliharaan dan tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya bisa semakin berkurang dan sekaligus dapat mendukung upaya penghematan/konservasi energi kota.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.1 Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksana Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah yang terdiri dari:

1. Komponen Pengungkit (*Enablers*), yaitu penilaian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya antara lain dengan melakukan penataan unsur dan fungsi manajemen pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Komponen Hasil (*Results*), merupakan dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan penilaian BB (78,13). Sedangkan pada tahun 2021, hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kembali memberikan nilai BB (78,38). Baru di tahun 2022, Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan nilai A (80,14). Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Surabaya berhasil mendapatkan nilai AA (95,12). Meski mendapat AA, namun evaluasi terus dilakukan untuk mendorong perbaikan kinerja birokrasi.

2.1.4.3.2 Keamanan dan Ketertiban

Untuk meningkatkan iklim investasi, Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan pengendalian terhadap demonstrasi atau unjuk rasa. Adapun jumlah kejadian unjuk rasa di Surabaya pada Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.191
Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bidang Politik	78	64	67	99	57	76
2	Bidang Ekonomi	68	81	142	161	106	36
3	Bidang Sosial Budaya	81	70	87	151	166	82
Jumlah unjuk rasa		**227**	**215**	**296**	**411**	**329**	**194**

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2024

Jumlah unjuk rasa di Kota Surabaya dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2021, terjadi kenaikan kejadian unjuk rasa sebanyak 296 kejadian dan didominasi oleh unjuk rasa di bidang ekonomi. Di tahun 2022, jumlah kejadian kembali meningkat dengan cukup signifikan. Namun di tahun 2023, jumlah kejadian sedikit berkurang seperti halnya di tahun 2024 juga berkurang. Hal ini menunjukan kondisi keamanan dan ketertiban di Surabaya masih tetap kondusif dan bisa dikendalikan, hal ini dikarenakan adanya pendekatan persuasif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan instansi terkait serta masih tingginya kesadaran warga kota Surabaya akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban kota sebagai modal utama dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di Kota Surabaya.

Seperti disajikan pada tabel di berikut ini, dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk menerbitkan peraturan yang mendukung iklim usaha Kota Surabaya, antara lain perda terkait perizinan, lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait ketenagakerjaan. Pada tahun 2022, perda yang mendukung iklim usaha adalah Perda nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Kota Surabaya.

Tabel II.192
Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Perda Terkait Perizinan	1	0	0	0	0
2.	Jumlah Perda Terkait Lalu Lintas Barang dan Jasa	0	0	0	0	0
3.	Jumlah Perda Terkait Ketenagakerjaan	0	0	0	1	0

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2024

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1 Ketenagakerjaan

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang tercermin dari jumlah lulusan sarjana. Data terkait rasio lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel II.193
Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah lulusan D4/S1	305.315	303.41	287.516	290.887	297.446
2	Jumlah lulusan S2	21.363	21.179	19.976	20.615	21.304

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
3	Jumlah lulusan S3	1.376	1.405	1.412	1.518	1.617
4	Jumlah lulusan D4/S1/S2/S3	328.054	325.994	308.904	313.020	320.367
5	Jumlah penduduk	3.159.481	2.970.730	2.970.952	2.987.863	3.009.286
6	Rasio lulusan D4/S1/S2/S3	0,104	0,109	0,104	0,105	0,106

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Daya saing SDM salah satunya tercermin pada pemerataan gender dan tingkat pendidikan dalam angkatan kerja, yakni penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Angkatan kerja Kota Surabaya pada tahun 2023 sejumlah 1.569.714 orang atau sebesar 68,73 persen sedikit menurun dibanding tahun 2022 sejumlah 1.634.314 orang atau sebesar 69,99 persen. Penurunan ini diperkirakan akibat pergeseran kecenderungan penduduk usia 15 tahun ke atas untuk melanjutkan sekolah ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi sehingga masuk ke dalam kategori bukan angkatan kerja.

Berdasarkan gender, partisipasi angkatan kerja perempuan semakin meningkat setiap tahunnya mencapai 57,61 persen pada tahun 2023 dibanding tahun 2022 sebesar 55,46 persen, sementara partisipasi angkatan kerja laki-laki sebesar 80,25 persen pada tahun 2023 menurun dari tahun 2022 yakni sebesar 85.07 persen. Semakin tinggi partisipasi perempuan untuk bekerja menunjukkan semakin sempitnya kesenjangan antara peranan laki-laki dan perempuan yang berarti pengarusutamaan gender pada sektor ketenagakerjaan semakin baik.

Tabel II.194
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Surabaya Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah angkatan kerja	1.590.651	1.582.564	1.572.888	1.643.314	1,569,714
2	Jumlah penduduk usia kerja	2.313.177	2.325.749	2.337.229	2.348.058	2.283.993
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	68,76	68,05	67,30	69,99	68,73
4	Tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki	81,79	81,23	81,69	85,07	80,25
5	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	56,22	55,35	53,44	55,46	57,61

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, angkatan kerja Kota Surabaya sejak tahun 2019 hingga 2023 didominasi oleh lulusan tingkat pendidikan menengah atas, diikuti dengan pendidikan tinggi (universitas dan

diploma), kemudian pendidikan menengah pertama, dan paling sedikit adalah pendidikan dasar ke bawah sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.195
Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kota Surabaya Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah angkatan kerja lulusan SD ke bawah	296.551	280.991	277.665	242.208	259.079
2	Jumlah angkatan kerja lulusan SMP	224.516	209.422	205.322	245.457	214.666
3	Jumlah angkatan kerja lulusan SMA Umum	352.095	364.391	361.454	446.306	375.281
4	Jumlah angkatan kerja lulusan SMA Kejuruan	318.598	344.292	348.882	331.289	367.480
5	Jumlah angkatan kerja lulusan Diploma I/II/III	61.526	59.030	56.790	47.937	47.479
6	Jumlah angkatan kerja lulusan Universitas	337.365	324.438	322.775	330.117	305.729

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Semakin baik tingkat pendidikan dari penduduk yang bekerja, semakin tinggi nilai produktivitas. Sebesar 23,67 persen penduduk bekerja di Kota Surabaya berpendidikan perguruan tinggi, 46,54 persen berpendidikan menengah atas, dan sisanya tersebar pada lulusan SMP dan SD atau kurang sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.196
Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah lulusan SD ke bawah	287.732	268.174	255.077	238.468	245.250
2	Jumlah lulusan SMP	214.547	182.651	185.909	213.754	198.479
3	Jumlah lulusan SMA	330.195	322.011	319.721	392.352	342.080
4	Jumlah lulusan SMK	285.022	298.881	309.413	314.112	337.375
5	Jumlah lulusan perguruan tinggi	381.598	355.951	350.495	359.352	340.410

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka di Kota Surabaya semakin menurun secara signifikan mencapai 6,76 persen pada tahun 2023 dibanding tahun 2022 yakni sebesar 7,62 persen. Penganggur terbuka yang dimaksud terdiri dari orang yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tabel II.197
Tingkat Pengganggguran Terbuka Kota Surabaya Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pengangguran	91.557	154.896	152.273	125.276	106.120
2	Tingkat pengganggguran terbuka	5,76	9,79	9,68	7,62	6,76
3	Tingkat pengganggguran terbuka laki-laki	5,64	10,79	10,77	9,66	7,30
4	Tingkat pengganggguran terbuka perempuan	5,92	8,37	8,07	4,61	6,04

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Ditinjau dari tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan sebagaimana tabel di bawah, pengangguran yang mengalami peningkatan pada tahun 2023 ada pada tingkat menengah atas kejuruan sebesar 8,19 persen dibanding tahun 2022 sebesar 5,18 persen. Hal ini diperkirakan terjadi akibat belum optimalnya pasar kerja menyerap lulusan SMK dan mereka juga tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi. Sementara lulusan perguruan tinggi tercatat menurun dari 4,95 persen di tahun 2022 menjadi 3,62 persen di tahun 2023 menunjukkan tingginya kebutuhan pasar kerja terhadap tenaga kerja yang berkualitas.

Tabel II.198
Tingkat Pengganggguran Terbuka Kota Surabaya Menurut
Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase pengangguran terbuka lulusan SD ke bawah	2,97	4,56	8,13	1,54	5,34
2	Persentase pengangguran terbuka lulusan SMP	4,44	12,78	9,45	12,92	7,54
3	Persentase pengangguran terbuka lulusan SMA	6,22	11,63	11,55	12,09	8,85
4	Persentase pengangguran terbuka lulusan SMK	10,54	13,19	11,31	5,18	8,19
5	Persentase pengangguran terbuka lulusan perguruan tinggi	4,34	7,18	7.66	4,95	3,62

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan kondisi ketenagakerjaan tersebut, antara lain semakin tingginya tingkat pendidikan angkatan kerja dan meratanya gender dalam partisipasi angkatan kerja yang berdampak pada semakin turunnya tingkat pengangguran terbuka terutama pada tingkat pendidikan tinggi, daya saing daerah sektor ketenagakerjaan Kota Surabaya dapat diproyeksikan semakin baik dan berkualitas pada periode ke depan. Kunci utama dalam daya saing sumber daya manusia adalah perbaikan kualitas pendidikan yang mampu membuka akses terhadap berbagai kesempatan dan potensi pekerjaan, bukan hanya pada pasar kerja formal melainkan juga informal yang justru mampu menciptakan lowongan pekerjaan.

Dari data di atas menunjukkan bahwa struktur angkatan kerja di Kota Surabaya berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan tertinggi berada pada tingkat pendidikan pada jenjang sekolah menengah atas. Tertinggi selanjutnya yakni berada pada tingkat pendidikan pada jenjang Perguruan Tinggi. Sebagaimana selayaknya, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang semakin baik pula. Artinya, semakin baik tingkat pendidikan dari penduduk yang bekerja, maka semakin tinggi nilai produktivitas yang bisa dihasilkan, begitu sebaliknya. Sehingga besarnya proporsi jumlah angkatan kerja dengan tingkat pendidikan tertinggi pada jenjang sekolah menengah atas dan perguruan tinggi di Kota Surabaya tersebut menjadi potensi tenaga kerja yang berdaya saing di pasar kerja. Ditambah lagi, untuk meningkatkan tenaga kerja di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya mengadakan program pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk memenuhi tuntutan dan standar pasar tenaga kerja yang terus berkembang pesat.

2.1.4.4.2 Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun dengan jumlah penduduk yang belum/tidak produktif, yaitu penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, demikian pula sebaliknya.

Tabel II.199
Rasio Ketergantungan Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk usia <15 tahun	688.478	675.558	686.916	678.456	678.456
2	Jumlah penduduk usia >64 tahun	186.272	193.749	208.815	220.805	220.805
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif	874.750	869.307	895.731	899.261	899.261
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	2.095.980	2.101.645	2.092.132	2.110.025	2.110.025
6	Rasio ketergantungan	0,417	0,414	0,428	0,426	0,426

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Dari data rasio ketergantungan pada tabel di atas, komposisi penduduk Surabaya pada akhir tahun 2023, antara lain kelompok usia non produktif, yakni penduduk dengan usia kurang dari 15 tahun dan usia lebih dari 64 tahun meningkat dari tahun 2022. Sedangkan jumlah penduduk kelompok usia produktif (usia 15-64

tahun) juga ikut meningkat dari tahun 2022. Sehingga rasio ketergantungan sedikit turun menjadi sebesar 0,426 yang artinya, setiap 100 orang yang berusia produktif/bekerja mempunyai tanggungan sebanyak 42 hingga 43 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

2.1.5 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan komitmen global dan nasional dalam pembangunan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB/SDGs mencakup 17 tujuan, yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB menjadi prioritas pembangunan nasional, yang berkolaborasi dengan kebijakan perencanaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Adapun capaian TPB di Kota Surabaya pada tahun 2023, adalah sebagai berikut.

Tabel II.200
Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Surabaya Tahun 2023

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Tercapai	Akan Tercapai	Tidak Ada Target	Tidak Ada Data
1	Tanpa Kemiskinan	25	13	3	8	1
2	Tanpa Kelaparan	10	5	-	1	4
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	33	20	1	8	4
4	Pendidikan Berkualitas	14	8	1	3	2
5	Kesetaraan Gender	14	6	2	4	2
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	14	8	3	2	1
7	Energi Bersih dan Terjangkau	0	-	-	-	-
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	18	11	-	-	7
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	11	7	-	3	1

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Tercapai	Akan Tercapai	Tidak Ada Target	Tidak Ada Data
10	Berkurangnya Kesenjangan	7	3	0	1	3
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	12	8	-	1	3
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertangung Jawab	6	2	-	-	4
13	Penanganan Perubahan Iklim	2	2	-	-	-
14	Ekosistem Lautan	0	-	-	-	-
15	Ekosistem Daratan	2	2	-	-	-
16	Perdamaian, Keadilan, Kelembagaan yang Tangguh	23	13	1	2	7
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	16	8	2	4	2
Total		**207**	**116**	**13**	**37**	**41**

Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, 2024

Mengacu tabel di atas, sebanyak 129 indikator dari 207 indikator atau sebesar 62,31% indikator TPB memiliki relevansi/kesesuaian dengan indikator kinerja RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dan seluruhnya telah mencapai predikat Tercapai dan Akan Tercapai untuk target tahun 2023. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung pencapaian TPB melalui program pembangunan dan kegiatan prioritas utamanya di bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Ekonomi. Sebanyak 76 program dari 148 program pembangunan Kota Surabaya serta 109 kegiatan dari 1.666 kegiatan Pemerintah Kota Surabaya mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaksanaan TPB dengan dukungan APBD Tahun 2023 sebesar Rp4,129 triliun.

Sebagai bentuk dukungan terhadap Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya juga berupaya untuk menyediakan data realisasi/kondisi terkini atas 82 indikator lainnya, dan sebanyak 41 indikator di antaranya tidak tersedia data, disebabkan ketentuan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa data tersebut bukan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota untuk penyediaannya.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023

Pada tahun 2023, pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan

Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan, dan Unsur Pemerintahan Umum rata-rata mampu mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi dan fleksibilitas penyelenggara pemerintahan kota cukup tinggi dari semua elemen, dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang ada. Fungsi dan peran birokrasi pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan publik khususnya pelayanan dasar masih tetap dapat dipertahankan dengan baik.

2.2.1.1 Kinerja Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar mampu mencatat kinerja yang baik, dengan angka rata-rata capaian kinerja kelompok urusan ini mencapai 112,51% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Adapun rincian capaian per bidang urusan sebagai berikut:

1) Pendidikan sebesar 103,36%;
2) Kesehatan sebesar 105,51%;
3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 151,98%;
4) Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 112,46%;
5) Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebesar 102,74%;
6) Sosial sebesar 99,01%.

2.2.1.2 Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Secara umum, kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar mencapai 107,49% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Namun demikian, urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan perlu memperoleh perhatian khusus dengan rata-rata capaian sebesar 19,35%. Belum optimalnya capaian urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan antara lain disebabkan adanya lokasi rencana pengadaan tanah yang masih dalam proses verifikasi dan validasi status tanah sehingga berpengaruh terhadap luasan yang dibebaskan serta adanya penyesuaian program prioritas pembangunan di tingkat kota. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya melakukan monitoring secara rutin dan membuat Sekretariat Bersama (Sekber) di Kantor Pertanahan guna memudahkan koordinasi kemajuan pembebasan tanah untuk pembangunan non infrastruktur. Rincian capaian per Bidang Urusan sebagai berikut:

1) Tenaga Kerja sebesar 110,00%;

2) Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebesar 109,24%;
3) Pangan sebesar 120,54%;
4) Pertanahan sebesar 19,35%;
5) Lingkungan Hidup sebesar 117,75%;
6) Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebesar 120,01%;
7) Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebesar 100,00%;
8) Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar 133,52%;
9) Perhubungan sebesar 101,35%;
10) Komunikasi Dan Informatika sebesar 103,14%;
11) Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah sebesar 104,28%;
12) Penanaman Modal sebesar 102,97%;
13) Kepemudaan Dan Olahraga sebesar 137,26%;
14) Statistik sebesar 100,00%;
15) Persandian sebesar 124,50%;
16) Kebudayaan sebesar 101,87%;
17) Perpustakaan sebesar 112,08%;
18) Kearsipan sebesar 116,98%.

2.2.1.3 Kinerja Urusan Pemerintahan Pilihan

Secara umum, kinerja Urusan Pilihan menunjukkan kinerja yang sangat baik, dimana angka rata-rata capaian kinerja kelompok urusan pemerintahan pilihan mencapai 109,81% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Adapun rincian capaian per bidang urusan sebagai berikut:

1) Kelautan Dan Perikanan sebesar 104,59%;
2) Pariwisata sebesar 134,09%;
3) Pertanian sebesar 101,52%;
4) Perdagangan sebesar 101,43%;
5) Perindustrian sebesar 107,41%.

2.2.1.4 Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan terlaksana dengan baik, dengan angka rata-rata capaian kinerjanya mencapai 102,95% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Rincian capaian Bidang Urusan Sekretariat Daerah sebesar 106,04% dan Bidang Urusan Sekretariat DPRD sebesar 99,85%.

2.2.1.5 Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan secara umum menunjukkan kinerja yang baik, dengan angka rata-rata capaian kinerjanya mencapai 108,60% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Rincian capaian per bidang urusan sebagai berikut:

1) Perencanaan sebesar 100,45%;
2) Keuangan sebesar 130,70%;
3) Kepegawaian sebesar 106,02%;
4) Pendidikan dan Pelatihan sebesar 105,82%;
5) Penelitian dan Pengembangan sebesar 100,00%.

2.2.1.6 Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Secara umum, kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan menunjukkan kinerja yang baik, dengan angka rata-rata capaian kinerja kelompok Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan mencapai 99,65% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**.

2.2.1.7 Kinerja Unsur Kewilayahan

Kinerja Unsur Kewilayahan yang meliputi Urusan Kecamatan terlaksana dengan baik, melalui angka rata-rata capaian kinerjanya mencapai 113,64% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**.

2.2.1.8 Kinerja Unsur Pemerintahan Umum

Kinerja Unsur Pemerintahan Umum yang meliputi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik telah terlaksana dengan baik, melalui angka rata-rata capaian kinerja kelompok Unsur Pemerintahan Umum mencapai 100,68% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Kategori **Sangat Tinggi**.

2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2024 dan realisasi tahun ketiga RPJMD 2021-2026 yang bersumber dari hasil monitoring pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah, maka rekapitulasi hasil telaah evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program sampai dengan triwulan II tahun 2024, secara umum disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.201
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Kota Surabaya

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.065.645.443		840.255.336		1.033.810.139		354.112.499		34.25%		1.194.367.835		112.08%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94.13 %		94.61 %		92.54 %		94.69 %		102.32 %		94.69 %		100.59 %		Dinas Pendidikan	-
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.442.377		1.267.170		1.250.660		640.902		51.25%		1.908.073		42.95%		
			Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam rangka Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan		1 kegiatan		33.33 %		1 kegiatan		33.33 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.442.377		1.267.170		1.250.660		640.902		51.25%		1.908.073		42.95 %		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen		10 Dokumen		3 Dokumen		30.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.029.406.176		821.384.396		1.021.209.775		350.698.058		34.34%		1.172.082.454		113.86%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.029.406.176		821.384.396		1.021.209.775		350.698.058		34.34%		1.172.082.454		113.86 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5929 Orang/bulan		7589 Orang/bulan		9216 Orang/bulan		7544 Orang/bulan		81.86 %		7544 Orang/bulan		127.24 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.331.194		409.937		768.926		176.898		23.01%		586.835		44.08%		
			Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%		88.46 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.331.194		409.937		768.926		176.898		23.01%		586.835		44.08 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		24 Paket		12 Paket		11 Paket		91.67 %		11 Paket		91.67 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah			4.870.126		557.235		3.741.959		160.550		4.29%		717.785		14.74%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		91.89 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4.870.126		557.235		3.741.959		160.550		4.29%		717.785		14.74 %		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	768 Unit		964 Unit		976 Unit		505 Unit		51.74 %		505 Unit		65.76 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			25.595.570		16.636.599		6.838.820		2.436.091		35.62%		19.072.690		74.52%		
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		98.37 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.477.487		1.945.551		2.077.001		553.071		26.63%		2.498.622		100.85 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			23.118.083		14.691.048		4.761.819		1.883.020		39.54%		16.574.068		71.69 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			1.281.043.215		974.073.066		950.534.900		201.463.135		21.19%		1.175.536.201		91.76%		
			Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan	91.43 %		102.78 %		89.21 %		100%		112.10 %		100%		109.37 %		Dinas Pendidikan	-
			Persentase SD terakreditasi minimal B	95.04 %		93.57 %		94.14 %		90.47 %		96.10 %		90.47 %		95.19 %		Dinas Pendidikan	-
			Persentase guru PAUD yang kompeten	100%		100.99 %		100%		99.46 %		99.46 %		99.46 %		99.46 %		Dinas Pendidikan	-
			Persentase lembaga PAUD berkualitas	84.85 %		91.54 %		84.58 %		87.53 %		103.49 %		87.53 %		103.16 %		Dinas Pendidikan	-
			Persentase SMP terakreditasi minimal B	97.44 %		94.51 %		96.79 %		93.64 %		96.75 %		93.64 %		96.10 %		Dinas Pendidikan	-
			Angka Kelulusan SMP/MTS	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Dinas Pendidikan	-
			Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan	100%		100.00 %		90%		100%		111.11 %		100%		100.00 %		Dinas Pendidikan	-
			Persentase guru yang	57%		22.35 %		38%		37.92 %		99.79 %		37.92 %		66.53 %		Dinas	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			mendapat pengembangan karir															Pendidikan	
			Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pendidikan	-
			Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Dinas Pendidikan	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			645.680.726		491.427.471		452.536.984		103.013.940		22.76%		594.441.411		92.06%		
			Jumlah lembaga pendidikan dasar yang mendapatkan peningkatan mutu	692 Lembaga		692 Lembaga		692 Lembaga		632 Lembaga		91.33 %		632 Lembaga		91.33 %		Dinas Pendidikan	
			Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Dinas Pendidikan	
			Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pendidikan	
			Jumlah laporan pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah dasar	4 laporan		4 laporan		4 laporan		1 laporan		25.00 %		1 laporan		25.00 %		Dinas Pendidikan	
			Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan		1 laporan		1 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			102.209.068		7.854.642		24.972.914		36.600		0.15%		7.891.242		7.72 %		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	19 Unit		5 Unit		7 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			188.257		125.000		127.664		13.840		10.84%		138.840		73.75 %		
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	259 Satuan Pendidikan		259 Satuan Pendidikan		259 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			6.043.654		1.085.309		2.088.877		549.793		26.32%		1.635.102		27.05 %		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	73986 Peserta Didik		73989 Peserta Didik		73986 Peserta Didik		71090 Peserta Didik		96.09 %		71090 Peserta Didik		96.09 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			2.901.710		0		3.134.952		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	10 Paket		N/A		33 Paket		0 Paket		0.00 %		0 Paket		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			7.328.937		2.957.344		6.427.795		11.200		0.17%		2.968.544		40.50 %		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket		3 Paket		3 Paket		0 Paket		0.00 %		0 Paket		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			148.042.295		214.027.810		208.809.420		11.200		0.01%		214.039.010		144.58 %		
			Jumlah Sekolah Dasar yang	587 Satuan		587 Satuan		587 Satuan		0 Satuan		0.00 %		0 Satuan		0.00 %		Dinas	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Mengelola Dana BOS	Pendidikan		Pendidikan		Pendidikan		Pendidikan				Pendidikan				Pendidikan	
	1.01.02.2.01.0027	**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar**			30.802.004		414.539		905.075		49.882		5.51%		464.420		1.51 %		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3135 Orang		3547 Orang		3135 Orang		4563 Orang		145.55 %		4563 Orang		145.55 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.0021	**Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar**			320.687.503		258.978.399		189.681.031		100.058.084		52.75%		359.036.484		111.96 %		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	85997 Peserta Didik		86001 Peserta Didik		38170 Peserta Didik		38170 Peserta Didik		100.00 %		38170 Peserta Didik		44.39 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.0050	**Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik**			320.597		347.821		470.818		55.230		11.73%		403.051		125.72 %		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	649 Satuan Pendidikan		649 Satuan Pendidikan		649 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.0048	**Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**			27.156.702		5.636.609		15.918.437		2.228.110		14.00%		7.864.719		28.96 %		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	205 Unit		125 Unit		155 Unit		50 Unit		32.26 %		50 Unit		24.39 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**			362.852.051		272.588.770		282.279.908		48.200.482		17.08%		320.789.253		88.41%		
			Jumlah lembaga pendidikan menengahyang mendapatkan peningkatan mutu	305 Lembaga		284 Lembaga		305 Lembaga		290 Lembaga		95.08 %		290 Lembaga		95.08 %		Dinas Pendidikan	
			Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan		1 laporan		1 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
			Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Dinas Pendidikan	
			Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pendidikan	
			Pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah menengah tepat waktu	4 laporan		4 laporan		4 laporan		1 laporan		25.00 %		1 laporan		25.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0012	**Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**			68.139.379		1.007.431		16.481.626		55.400		0.34%		1.062.831		1.56 %		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit		4 Unit		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.00	**Pembinaan Kelembagaan dan**			441.521		203.700		192.123		11.200		5.83%		214.900		48.67 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	41	Manajemen Sekolah																	
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	258 Satuan Pendidikan		275 Satuan Pendidikan		256 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			4.584.334		2.085.115		3.912.958		654.383		16.72%		2.739.499		59.76 %		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2280 Peserta Didik		2694 Peserta Didik		2122 Peserta Didik		764 Peserta Didik		36.00 %		764 Peserta Didik		33.51 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			6.779.353		2.681.657		7.437.087		11.200		0.15%		2.692.857		39.72 %		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket		3 Paket		2 Paket		0 Paket		0.00 %		0 Paket		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			80.429.498		125.878.552		123.637.600		11.200		0.01%		125.889.752		156.52 %		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	272 Satuan Pendidikan		268 Satuan Pendidikan		272 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			13.494.310		402.497		766.800		53.451		6.97%		455.948		3.38 %		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1013 Orang		1102 Orang		1013 Orang		2061 Orang		203.46 %		2061 Orang		203.46 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			170.635.719		132.283.208		118.556.843		46.028.381		38.82%		178.311.590		104.50 %		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	37574 Peserta Didik		41225 Peserta Didik		19139 Peserta Didik		0 Peserta Didik		0.00 %		0 Peserta Didik		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			243.465		217.545		383.954		109.738		28.58%		327.283		134.43 %		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	39248 Satuan Pendidikan		39607 Peserta Didik		39248 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			18.104.473		7.829.065		10.910.917		1.265.529		11.60%		9.094.594		50.23 %		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18 Unit		63 Unit		17 Unit		44 Unit		258.82 %		44 Unit		244.44 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			155.588.380		117.690.996		125.672.884		19.420.280		15.45%		137.111.277		88.12%		
			Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik	4 laporan		7 laporan		12 laporan		5 laporan		41.67 %		5 laporan		125.00 %		Dinas Pendidikan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			PAUD																
			Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
			Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan		1 laporan		1 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			0		0		169.898		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	N/A		N/A		1 unit		0 unit		0.00 %		0 unit		N/A		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			716.291		102.731		846.121		99.651		11.78%		202.382		28.25 %		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2355 Satuan Pendidikan		2646 Satuan Pendidikan		2355 Satuan Pendidikan		1067 Satuan Pendidikan		45.31 %		1067 Satuan Pendidikan		45.31 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD			0		0		50.000		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	N/A		N/A		1 paket		0 paket		0.00 %		0 paket		N/A		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD			742.276		1.671.041		290.980		12.000		4.12%		1.683.041		226.74 %		
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	3 Paket		3 Paket		3 Paket		1 Paket		33.33 %		1 Paket		33.33 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD			69.014.400		61.509.542		60.895.040		0		0.00%		61.509.542		89.13 %		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	2479 Satuan Pendidikan		2442 Satuan Pendidikan		2479 Satuan Pendidikan		2217 Satuan Pendidikan		89.43 %		2217 Satuan Pendidikan		89.43 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			8.420.251		1.325.209		4.033.256		11.200		0.28%		1.336.409		15.87 %		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3092 Orang		2536 Orang		3092 Orang		2155 Orang		69.70 %		2155 Orang		69.70 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD			161.215		3.441.692		4.787.930		1.507.350		31.48%		4.949.042		3,069.84 %		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	209 Peserta Didik		632 Peserta Didik		209 Peserta Didik		208 Peserta Didik		99.52 %		208 Peserta Didik		99.52 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			76.002.570		49.254.840		53.979.732		17.779.680		32.94%		67.034.519		88.20 %		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	88978 Peserta Didik		100126 Peserta Didik		88778 Peserta Didik		0 Peserta Didik		0.00 %		0 Peserta Didik		0.00 %		Dinas Pendidikan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.01.02.2.03.0004	**Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD**			531.376		385.940		619.929		10.400		1.68%		396.340		74.59 %		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit		3 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**			116.922.057		92.365.829		90.045.123		30.828.432		34.24%		123.194.261		105.36%		
			Penanganan anak rentan putus sekolah dan putus sekolah	5 hari		1.03 hari		5 hari		1 hari		180.00 %		1 hari		180.00 %		Dinas Pendidikan	
			Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
			Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik kesetaraan	4 laporan		6 laporan		12 laporan		5 laporan		41.67 %		5 laporan		125.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.0016	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan**			135.748		45.600		122.630		11.200		9.13%		56.800		41.84 %		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	293 Satuan Pendidikan		293 Satuan Pendidikan		153 Satuan Pendidikan		87 Satuan Pendidikan		56.86 %		87 Satuan Pendidikan		29.69 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.0040	**Pengadaan Perlengkapan Sekolah**			297.779		30.930		1.317.900		0		0.00%		30.930		10.39 %		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket		2 Paket		2 Paket		0 Paket		0.00 %		0 Paket		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.0017	**Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan**			6.791.865		4.584.862		4.729.770		0		0.00%		4.584.862		67.51 %		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	27 Satuan Pendidikan		23 Satuan Pendidikan		27 Satuan Pendidikan		25 Satuan Pendidikan		92.59 %		25 Satuan Pendidikan		92.59 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.0015	**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**			113.511		50.860		72.703		11.200		15.41%		62.060		54.67 %		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang		218 Orang		250 Orang		97 Orang		38.80 %		97 Orang		38.80 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.0010	**Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan**			849.600		5.091.631		7.583.217		1.556.506		20.53%		6.648.138		782.50 %		
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang	45 Peserta Didik		85 Peserta Didik		35 Peserta Didik		70 Peserta Didik		200.00 %		70 Peserta Didik		155.56 %		Dinas Pendidikan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Menerima Biaya Personil Peserta Didik																
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			108.733.554		82.561.946		76.218.904		29.249.526		38.38%		111.811.472		102.83 %		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2822 Peserta Didik		2992 Peserta Didik		2802 Peserta Didik		149 Peserta Didik		5.32 %		149 Peserta Didik		5.28 %		Dinas Pendidikan	
3	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			134.346.197		38.341.781		35.480.062		10.120.800		28.53%		48.462.581		36.07%		
			Rasio Guru/ Murid jenjang SMP	0.05		0.06		0.05		0.06		120.00 %		0.06		120.00 %		Dinas Pendidikan	-
			Rasio Guru/ Murid jenjang SD	0.05		0.05		0.05		0.05		100.00 %		0.05		100.00 %		Dinas Pendidikan	-
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			134.346.197		38.341.781		35.480.062		10.120.800		28.53%		48.462.581		36.07%		
			Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	12685 orang		12685 orang		12685 orang		8224 orang		64.83 %		8224 orang		64.83 %		Dinas Pendidikan	
			Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah	7725 orang		7725 orang		7725 orang		8856 orang		114.64 %		8856 orang		114.64 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			133.374.035		38.041.100		34.836.000		10.071.900		28.91%		48.113.000		36.07 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	350 Laporan		350 Laporan		350 Laporan		425 Laporan		121.43 %		425 Laporan		121.43 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			972.162		300.681		644.062		48.900		7.59%		349.581		35.96 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		1 Dokumen		50.00 %		1 Dokumen		50.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
4	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.104.548.933		1.121.233.086		1.291.352.979		241.392.717		18.69%		1.362.625.803		123.36%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		KABUPATEN/KOTA																	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%		92.76 %		89%		93.49 %		105.04 %		93.49 %		105.04 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%		89.40 %		100%		91.12 %		91.12 %		91.12 %		91.12 %		Dinas Kesehatan	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	88%		88.63 %		87.90 %		90.39 %		102.83 %		90.39 %		102.72 %		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	-
			Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang mencapai target	83%		86.87 %		82.90 %		87.88 %		106.01 %		87.88 %		105.88 %		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	-
			Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Bhakti Dharma Husada yang mencapai target	84%		92.59 %		82%		89.9 %		109.63 %		89.9 %		107.02 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	-
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			374.216.829		376.619.655		564.533.034		160.327.585		28.40%		536.947.240		143.49%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			35.732.522		47.668.232		72.721.197		20.448.804		28.12%		68.117.036		190.63 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	192 Orang/bulan		236 Orang/bulan		528 Orang/bulan		453 Orang/bulan		85.80 %		453 Orang/bulan		235.94 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			71.091.174		82.501.656		129.521.161		34.747.587		26.83%		117.249.243		164.93 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	450 Orang/bulan		475 Orang/bulan		1068 Orang/bulan		768 Orang/bulan		71.91 %		768 Orang/bulan		170.67 %		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			267.393.133		246.449.767		362.290.676		105.131.194		29.02%		351.580.961		131.48 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1174 Orang/bulan		1343 Orang/bulan		2744 Orang/bulan		2170 Orang/bulan		79.08 %		2170 Orang/bulan		184.84 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			8.082.258		989.119		12.992.729		141.495		1.09%		1.130.614		13.99%		
			Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			prasarana perkantoran																
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			8.082.258		989.119		12.992.729		141.495		1.09%		1.130.614		13.99 %		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		6 Unit		4 Unit		4 Unit		100.00 %		4 Unit		100.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			249.831.229		157.913.874		98.650.498		51.738.096		52.45%		209.651.971		83.92%		
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		95.39 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	
			Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			72.073.629		1.308.680		1.405.414		474.783		33.78%		1.783.463		2.47 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			45.112.416		976.000		1.210.000		368.000		30.41%		1.344.000		2.98 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			132.645.183		154.222.185		96.035.084		50.895.313		53.00%		205.117.498		154.64 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			472.418.617		585.710.439		615.176.719		29.185.540		4.74%		614.895.979		130.16%		
			Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		100.00 %		3 jenis		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Persentase jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di rumah sakit yang terpenuhi	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
			Persentase Jenis Kebutuhan Operasional Pelayanan dan Penunjang	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pelayanan BLUD di RS yang terpenuhi																
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			304.879.739		262.847.683		292.316.172		0		0.00%		262.847.683		86.21 %		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100.00 %		1 Unit Kerja		100.00 %		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			166.477.578		167.921.867		167.920.381		29.185.540		17.38%		197.107.407		118.40 %		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100.00 %		1 Unit Kerja		100.00 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1.061.298		154.940.887		154.940.162		0		0.00%		154.940.887		14599,19 %		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (63 Puskesmas)	63 Unit Kerja		63 Unit Kerja		63 Unit Kerja		63 Unit Kerja		100.00 %		63 Unit Kerja		100.00 %		Dinas Kesehatan	
5	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			716.339.152		747.952.804		958.346.627		331.759.976		34.62%		1.079.712.779		150.73%		
			Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kesehatan	-
			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	100%		100.00 %		100%		35.54 %		35.54 %		35.54 %		35.54 %		Dinas Kesehatan	-
			Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kesehatan	-
			Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Dinas Kesehatan	-
			Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani ≤ 1 x 24 Jam	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kesehatan	-
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit	98.08 %		100.00 %		98.08 %		100%		101.96 %		100%		101.96 %		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	-
			Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama	60%		61.90 %		56%		11.11 %		19.84 %		11.11 %		18.52 %		Dinas Kesehatan	-
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan	100%		101.47 %		98%		102.15 %		104.23 %		102.15 %		102.15 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			kelas rumah sakit																
			Persentase Rumah Sehat	88.22 %		88.39 %		88.20 %		88.38 %		100.20 %		88.38 %		100.18 %		Dinas Kesehatan	-
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila	82.65 %		103.81 %		82.55 %		28.96 %		35.08 %		28.96 %		35.04 %		Dinas Kesehatan	-
			Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kesehatan	-
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	0.100 %		0.08 %		0.102 %		0.03 %		170.59 %		0.03 %		170.00 %		Dinas Kesehatan	-
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	99.07 %		100.40 %		99.05 %		15.23 %		15.38 %		15.23 %		15.37 %		Dinas Kesehatan	-
			Persentase Jaminan Kesehatan	98.00 %		101.84 %		97.30 %		96.26 %		98.93 %		96.26 %		98.22 %		Dinas Kesehatan	-
			Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar	84.13 %		100.00 %		80.95 %		100%		123.53 %		100%		118.86 %		Dinas Kesehatan	-
			Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes)	99.21 %		100.02 %		99.19 %		16.27 %		16.40 %		16.27 %		16.40 %		Dinas Kesehatan	-
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu	100%		100.00 %		100%		9.6 %		9.60 %		9.6 %		9.60 %		Dinas Kesehatan	-
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			175.358.764		229.252.050		520.785.251		128.656.982		24.70%		357.909.032		204.10%		
			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi pemeliharaan dan pengadaan alat kesehatan	64 Unit		64 Unit		64 Unit		64 Unit		100.00 %		64 Unit		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Gedung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibangun dan dipelihara	14 unit		9 unit		16 unit		0 unit		0.00 %		0 unit		0.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah unit layanan yang terpenuhi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan	64 Unit		63 Unit		64 Unit		64 Unit		100.00 %		64 Unit		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah dokumen peningkatan Fasilitas Kesehatan	3 Dokumen		4 Dokumen		3 Dokumen		1 Dokumen		33.33 %		1 Dokumen		33.33 %		Dinas Kesehatan	
			Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100%		100%		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	
			Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100%		100%		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	
			Persentase Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang	100%		100%		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		RSUD dr. Mohamad	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUD Mohamad Soewandhie															Soewandhie	
	1.02.02.2.01.0002	**Pembangunan Puskesmas**			0		0		36.304.294		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	N/A		N/A		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.0001	**Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya**			110.381.289		75.813.478		304.744.400		127.924.731		41.98%		203.738.210		184.58 %		
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit		1 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.0020	**Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan**			20.455.226		6.750.169		4.244.536		112.836		2.66%		6.863.006		33.55 %		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	33 Unit		69 Unit		33 Unit		10 Unit		30.30 %		10 Unit		30.30 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.0014	**Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan**			8.332.225		15.312.746		80.588.393		11.200		0.01%		15.323.946		183.91 %		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit		89 Unit		147 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	
	1.02.02.2.01.0014	**Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan**			1.772.987		65.046.284		1.628.127		11.200		0.69%		65.057.484		3,669.37 %		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit		370 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
	1.02.02.2.01.0014	**Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan**			1.388.852		4.266.000		68.478.606		0		0.00%		4.266.000		307.16 %		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30 Unit		19 Unit		30 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.0023	**Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan**			9.093.726		1.151.006		3.174.307		395.815		12.47%		1.546.821		17.01 %		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan	2 Paket		1 Paket		5 Paket		0 Paket		0.00 %		0 Paket		0.00 %		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan																
	1.02.02.2.01.0007	**Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya**			101.369		54.400		2.296.968		13.800		0.60%		68.200		67.28 %		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit		4 Unit		3 Unit		1 Unit		33.33 %		1 Unit		33.33 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.0022	**Pengembangan Rumah Sakit**			103.983		25.542.028		10.739.136		92.172		0.86%		25.634.200		24,652.41 %		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		100.00 %		1 Unit		100.00 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	
	1.02.02.2.01.0010	**Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya**			926.120		29.970		447.448		0		0.00%		29.970		3.24 %		
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit		2 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.0009	**Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas**			22.802.988		24.636.117		8.139.036		95.227		1.17%		24.731.344		108.46 %		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	12 Unit		10 Unit		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			482.760.567		518.312.192		436.404.439		202.898.307		46.49%		721.210.499		149.39%		
			Peningkatan Penerima Jaminan Kesehatan bagi PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda	105 jiwa		17820 jiwa		105 jiwa		0 jiwa		0.00 %		0 jiwa		0%		Dinas Kesehatan	
			Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	4 kegiatan		4 kegiatan		4 kegiatan		5 kegiatan		125.00 %		5 kegiatan		125.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah kegiatan penyediaan jaminan persalinan pada ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0 kegiatan		0.00 %		0 kegiatan		0.00 %		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif di puskesmas	2 kegiatan		N/A		2 kegiatan		2 kegiatan		100.00 %		2 kegiatan		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas, dan bayi baru lahir	63 Unit		63 Unit		63 Unit		63 Unit		100.00 %		63 Unit		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi di puskesmas	2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		100.00 %		2 kegiatan		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas, dan bayi baru lahir	63 Unit		63 Unit		63 Unit		63 Unit		100.00 %		63 Unit		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah lembaga yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	153 Kelurahan		153 Kelurahan		153 Kelurahan		153 Kelurahan		100.00 %		153 Kelurahan		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		100.00 %		63 Puskesmas		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		100.00 %		63 Puskesmas		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah dokumen pelaporan akreditasi puskesmas yang disusun	100 Dokumen		100 Dokumen		145 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		100.00 %		63 Puskesmas		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	2 kegiatan		3 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		100.00 %		2 kegiatan		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		100.00 %		63 Puskesmas		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat di puskesmas	2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		100.00 %		2 kegiatan		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di puskesmas	3 kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan		100.00 %		3 kegiatan		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah lokasi kejadian kegawatdaruratan yang dilayani	700 Lokasi		804 Lokasi		700 Lokasi		337 Lokasi		48.14 %		337 Lokasi		48.14 %		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		100.00 %		63 Puskesmas		100.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0034	**Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya**			0		0		114.525		4.320		3.77%		4.320		0.00 %		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	N/A		N/A		12 Dokumen		4 Dokumen		33.33 %		4 Dokumen		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0034	**Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya**			0		0		115.500		12.869		11.14%		12.869		0.00 %		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	N/A		N/A		12 Dokumen		1 Dokumen		8.33 %		1 Dokumen		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0033	**Operasional Pelayanan Puskesmas**			773.640		36.277.670		52.925.356		9.195.664		17,37%		45.473.335		5877,84%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (63 Puskesmas)	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		4 Dokumen		33.33 %		4 Dokumen		33,33%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0025	**Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**			19.478.405		715.322		1.081.207		50.575		4.68%		765.897		3.93 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		25 Dokumen		12 Dokumen		17 Dokumen		141.67 %		17 Dokumen		141.67 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0025	**Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**			973.287		1.834.120		1.891.180		0		0.00%		1.834.120		188,45%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (63 Puskesmas)	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		4 Dokumen		33.33 %		4 Dokumen		33,33%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0028	**Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional**			0		0		896.371		147.017		16.40%		147.017		0.00 %		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	N/A		N/A		2 Paket		0 Paket		0.00 %		0 Paket		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0026	**Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat**			434.139.730		437.122.703		319.486.939		191.852.217		60.05%		628.974.920		144.88 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		5 Dokumen		41.67 %		5 Dokumen		41.67 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0014	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana**			175.559		598.682		773.719		149.320		19.30%		748.002		426.07 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		5 Dokumen		41.67 %		5 Dokumen		41.67 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			0		0		387.650		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	N/A		N/A		4401 Orang		2800 Orang		63.62 %		2800 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			4.191.821		20.613.426		2.589.899		62.282		2.40%		20.675.708		493.24 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		5 Dokumen		41.67 %		5 Dokumen		41.67 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.582.749		943.580		12.967.652		0		0.00%		943.580		59,62%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (63 Puskesmas)	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		4 Dokumen		33.33 %		4 Dokumen		33.33 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			0		0		495756		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (63 Puskesmas)	N/A		N/A		41.885 Orang		12.882 Orang		44.54 %		12.882 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			9.146.714		3.106.965		4.358.980		932.119		21.38%		4.039.084		44.16 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	43532 Orang		43460 Orang		43725 Orang		14389 Orang		32.91 %		14389 Orang		33.05 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			211.050		1.341.250		866.500		0		0.00%		1.341.250		635,51%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (63 Puskesmas)	43.532 orang		43.463 orang		43.725 orang		14.185 orang		44.34 %		14.185 Orang		32,59%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			0		0		138.861		9.663		6.96%		9.663		0.00 %		
			Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	N/A		N/A		73 Orang		41 Orang		56.16 %		41 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			2.942.877		206.051		796.111		29.154		3.66%		235.205		7.99 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		5 Dokumen		41.67 %		5 Dokumen		41.67 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.00	Pengelolaan pelayanan kesehatan			0		24.720		27.758		3.900		14.05%		28.620		0.00 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	42	**Malaria**																	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	N/A		10 orang		10 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0041	**Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)**			0		652.921		841.880		0		0.00%		652.921		0.00 %		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		1299 orang		205 Orang		183 Orang		89.27 %		183 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0012	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV**			211.050		310.730		80.820		0		0,00%		310.730		147,23%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (63 Puskesmas)	52.741 Orang		56.551 Orang		52.741 Orang		14.969 Orang		28,38%		14.969 Orang		28,38%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0012	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV**			3.350		878.593		1.194.744		68.253		5.71%		946.846		28,266.60 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	52.741 Orang		56.551 orang		52.741 Orang		14.969 Orang		28.38 %		14.969 Orang		1,212.06 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0040	**Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis**			0		720.000		977.288		0		0.00%		720.000		0.00 %		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		2345 orang		666 Orang		96 Orang		14.41 %		96 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0040	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis**			0		0		16.272		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar (63 Puskesmas)	N/A		N/A		63 Orang		707 Orang		1122,22 %		707 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**			3.350		509.021		17.867.101		147.240		0.82%		656.261		19,591.62 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	60512 Orang		60563 Orang		60512 Orang		36697 Orang		60.64 %		36697 Orang		60.64 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**			211050		1007360		219640		0		0,00%		1007360		477,31%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	60509 Orang		60187 Orang		60509 Orang		34881 Orang		57,65%		34881 Orang		57,65%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pelayanan Sesuai Standar (63 Puskesmas)																
	1.02.02.2.02.0007	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut**			4.295.627		33.600		112.095		11.200		9.99%		44.800		1.04 %		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	337268 Orang		260821 Orang		325983 Orang		146500 Orang		44.94 %		146500 Orang		43.44 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**			0		0		434382		0		0		0		0.00 %		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (63 Puskesmas)	N/A		N/A		330258 Orang		72033 Orang		21,81%		72033 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0006	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif**			3.226.155		1.175.537		1.312.197		75.957		5.79%		1.251.494		38.79 %		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2034759 Orang		1336931 Orang		2038597 Orang		561118 Orang		27.52 %		561118 Orang		27.58 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0009	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**			0		0		1.440.175		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		N/A		104362 Orang		63102 Orang		60.46 %		63102 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0008	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**			18.866		55.662		133.957		20.482		15.29%		76.144		403.60 %		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	749560 Orang		440659 Orang		747207 Orang		206789 Orang		27.67 %		206789 Orang		27.59 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0019	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya**			315.144		216.570		460.194		112.289		24.40%		328.859		104.35 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		5 Dokumen		41.67 %		5 Dokumen		41.67 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0018	**Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan**			0		0		203.057		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	N/A		N/A		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0020	**Pengelolaan Surveilans Kesehatan**			438.104		229.212		61.900		13.785		22.27%		242.997		55.47 %		
			Jumlah Dokumen Hasil	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		5 Dokumen		41.67 %		5 Dokumen		41.67 %		Dinas	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan															Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0020	**Pengelolaan Surveilans Kesehatan**			422.037		5.580.826		7.159.712		0		0.00%		5.580.826		1322,35%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (63 Puskesmas)	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		4 Dokumen		33,33%		4 Dokumen		33.33 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0046	**Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak**			0		0		2.970.513		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (63 Puskesmas)	N/A		N/A		1 Dokumen		0 Dokumen		0,00%		0 Dokumen		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**			363.311		58.620		123.973		28.100		22.67%		86.720		23.87%		
			Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang diterapkan	3 Aplikasi		3 Aplikasi		3 Aplikasi		0 Aplikasi		0.00 %		0 Aplikasi		0.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.03.0002	**Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan**			363.311		58.620		123.973		28.100		22.67%		86.720		23.87 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		2 Dokumen		40.00 %		2 Dokumen		40.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			57.856.510		329.942		1.032.964		176.587		17.10%		506.529		0.88%		
			Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau	122 Lembaga		120 Lembaga		122 Lembaga		22 Lembaga		18.03 %		22 Lembaga		18.03 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.04.0003	**Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan**			47.189.112		272.307		844.298		152.187		18.03%		424.494		0.90 %		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	63 Unit		63 Unit		63 Unit		63 Unit		100.00 %		63 Unit		100.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.04.0004	**Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan**			10.667.398		57.635		188.666		24.400		12.93%		82.035		0.77 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		5 Dokumen		41.67 %		5 Dokumen		41.67 %		Dinas Kesehatan	
6	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			3.841.543		1.331.708		2.783.803		123.832		4.45%		1.455.539		37.89%		
			Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas	53.52 %		60.46 %		50.17 %		0.67 %		1.34 %		0.67 %		1.25 %		Dinas Kesehatan	-
	1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan**			3.841.543		1.331.708		763.503		40.762		5.34%		1.372.469		35.73%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		UKM di Wilayah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan	63 Orang		1015 Orang		63 Orang		214 Orang		339.68 %		214 Orang		339.68 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			3.841.543		1.331.708		763.503		40.762		5.34%		1.372.469		35.73 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100.00 %		1 Dokumen		100.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0		0		2.020.300		83.070		4.11%		83.070		0.00%		
			Jumlah kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	N/A		N/A		4 Kegiatan		4 Kegiatan		100.00 %		4 Kegiatan		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0		0		2.020.300		83.070		4.11%		83.070		0.00 %		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	N/A		N/A		189 Orang		214 Orang		113.23 %		214 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
7	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			2.790.371		308.645		476.543		11.200		2.35%		319.845		11.46%		
			Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Dinas Kesehatan	-
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			2.790.371		308.645		476.543		11.200		2.35%		319.845		11.46%		
			Jumlah PIRT yang dibina	217 PIRT		217 PIRT		217 PIRT		39 PIRT		17.97 %		39 PIRT		17.97 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			2.790.371		308.645		476.543		11.200		2.35%		319.845		11.46 %		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang	150 Unit		209 Unit		150 Unit		38 Unit		25.33 %		38 Unit		25.33 %		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan																
8	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			66.842.725		193.520.268		188.353.197		60.229.635		31.98%		253.749.903		379.62%		
			Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kesehatan	-
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			10.118.740		77.556		181.415		27.822		15.34%		105.378		1.04%		
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye GERMAS (CERDIK)	154 Kelurahan		156 Kelurahan		154 Kelurahan		154 Kelurahan		100.00 %		154 Kelurahan		100.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.02.00 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			10.118.740		77.556		181.415		27.822		15.34%		105.378		1.04 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		5 Dokumen		41.67 %		5 Dokumen		41.67 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			56.723.985		193.442.712		188.171.782		60.201.812		31.99%		253.644.525		447.16%		
			Jumlah kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilakukan Puskesmas	6 Kegiatan		4 Kegiatan		6 Kegiatan		3 Kegiatan		50.00 %		3 Kegiatan		50.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		100.00 %		63 Puskesmas		100.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.00 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			54.013.675		191.396.405		178.985.656		60.201.812		33.63%		251.598.218		465.80 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		5 Dokumen		41.67 %		5 Dokumen		41.67 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.00 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			2.710.308		2.046.310		9.186.131		0		0.00%		2.046.310		75,50%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (63 Puskesmas)	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		5 Dokumen		41.67 %		5 Dokumen		41,67%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
9	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			135.419.812		119.062.751		121.896.142		47.742.392		39.17%		166.805.143		123.18%		
			Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	95%		98.30 %		93%		99.13 %		106.59 %		99.13 %		104.35 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	-
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	86.75 %		91.79 %		86.25 %		91.97 %		106.63 %		91.97 %		106.02 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	-
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			344.372		196.540		96.946		20.800		21.46%		217.340		63.11%		
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			344.372		196.540		96.946		20.800		21.46%		217.340		63.11 %		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		2 Dokumen		25.00 %		2 Dokumen		22.22 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			58.347.173		45.014.852		45.834.822		16.899.781		36.87%		61.914.633		106.11%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			58.347.173		45.014.852		45.834.822		16.899.781		36.87%		61.914.633		106.11 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	197 Orang/bulan		189 Orang/bulan		206 Orang/bulan		200 Orang/bulan		97.09 %		200 Orang/bulan		101.52 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			10.691.809		5.236.212		5.337.354		1.644.310		30.81%		6.880.522		64.35%		
			Persentase pengelolaan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100%		94.28 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10.691.809		5.236.212		5.337.354		1.644.310		30.81%		6.880.522		64.35 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket		3 Paket		1 Paket		33.33 %		1 Paket		33.33 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			66.036.458		68.615.147		70.627.020		29.177.501		41.31%		97.792.647		148.09%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	332 unit		321 unit		300 unit		107 unit		35.67 %		107 unit		32.23 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak operasional	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.09.00 09	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**			34.268.991		43.717.480		41.694.096		19.745.132		47.36%		63.462.612		185.19 %		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		8 Unit		6 Unit		2 Unit		33.33 %		2 Unit		33.33 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.09.00 03	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar**			17.184.882		11.079.630		15.232.892		4.866.912		31.95%		15.946.542		92.79 %		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	76 Unit		73 Unit		73 Unit		27 Unit		36.99 %		27 Unit		35.53 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.09.00 02	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**			14.582.585		13.818.037		13.700.033		4.565.456		33.32%		18.383.493		126.06 %		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	243 Unit		248 Unit		227 Unit		80 Unit		35.24 %		80 Unit		32.92 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
10	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**			50.157.841		55.264.039		45.485.386		17.933.764		39.43%		73.197.802		145.93%		
			Persentase rumah pompa yang beroperasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	-
	1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			50.157.841		55.264.039		45.485.386		17.933.764		39.43%		73.197.802		145.93%		
			Jumlah rumah pompa dan kelengkapannya yang dipelihara	64 unit		61 unit		62 unit		53 unit		85.48 %		53 unit		82.81 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.02.2.01.00 85	**Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir**			50.157.841		55.264.039		45.485.386		17.933.764		39.43%		73.197.802		145.93 %		
			Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	285 Unit		266 Unit		270 Unit		96 Unit		35.56 %		96 Unit		33.68 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
11	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			9.306.760		7.385.796		8.289.105		1.841.719		22.22%		9.227.515		99.15%		
			Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Volume kapasitas operasional pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya	923 m3		906.00 m3		911 m3		226 m3		24.81 %		226 m3		24.49 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	-
	1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**			9.306.760		7.385.796		8.289.105		1.841.719		22.22%		9.227.515		99.15%		
			jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun	2 kelurahan		3 kelurahan		2 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Jumlah jenis lokasi IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik	4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		100.00 %		4 Jenis		100.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.05.2.01.0038	**Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)**			7.156.794		5.193.617		6.134.647		1.819.563		29.66%		7.013.179		97.99 %		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	96 Unit		96 Unit		96 Unit		40 Unit		41.67 %		40 Unit		41.67 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.05.2.01.0039	**Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat**			2.149.966		2.192.180		2.154.458		22.156		1.03%		2.214.336		102.99 %		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	50 Rumah Tangga		174 Rumah Tangga		50 Rumah Tangga		0 Rumah Tangga		0.00 %		0 Rumah Tangga		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
12	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**			582.830.777		548.652.129		776.459.678		35.316.615		4.55%		583.968.744		100.20%		
			Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	-
	1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**			582.830.777		548.652.129		776.459.678		35.316.615		4.55%		583.968.744		100.20%		
			Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase	1223 lokasi		1175 lokasi		1170 lokasi		370 lokasi		31.62 %		370 lokasi		30.25 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun	80 dokumen		83 dokumen		80 dokumen		12 dokumen		15.00 %		12 dokumen		15.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan	200 lokasi		201 lokasi		150 lokasi		1 lokasi		0.67 %		1 lokasi		0.50 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.06.2.01.00	**Operasi dan Pemeliharaan Sistem**			103.393.336		78.043.178		70.462.933		28.945.164		41.08%		106.988.342		103.48 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	31	Drainase Perkotaan																	
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	29000 Sistem Drainase Perkotaan		68428 M		21 Sistem Drainase Perkotaan		30 Sistem Drainase Perkotaan		142.86 %		30 Sistem Drainase Perkotaan		0.10 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.06.2.01.00 12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan			125.161.494		156.483.980		81.538.674		960.265		1.18%		157.444.245		125.79 %		
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	10000 M		13917.8 M		10000 M		664.4 M		6.64 %		664.4 M		6.64 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.06.2.01.00 29	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan			246.834.073		220.348.609		499.424.209		233.711		0.05%		220.582.320		89.36 %		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	6000 Sistem Drainase Perkotaan		7895 M		8 Sistem Drainase Perkotaan		0 Sistem Drainase Perkotaan		0.00 %		0 Sistem Drainase Perkotaan		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.06.2.01.00 25	Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan			10.118.188		10.315.721		10.907.666		96.026		0.88%		10.411.746		102.90 %		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis	30 Sistem Drainase Perkotaan		31 Dokumen		8 Sistem Drainase Perkotaan		0 Sistem Drainase Perkotaan		0.00 %		0 Sistem Drainase Perkotaan		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.06.2.01.00 30	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan			8.038.411		5.571.955		9.697.923		1.056.757		10.90%		6.628.712		82.46 %		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	50 Dokumen		52 Dokumen		50 Dokumen		12 Dokumen		24.00 %		12 Dokumen		24.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.06.2.01.00 28	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan			89.285.275		77.888.686		104.428.273		4.024.693		3.85%		81.913.379		91.74 %		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	3300 Sistem Drainase Perkotaan		3871.68 M		8 Sistem Drainase Perkotaan		0 Sistem Drainase Perkotaan		0.00 %		0 Sistem Drainase Perkotaan		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
13	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			3.183.407		1.951.502		2.613.089		635.774		24.33%		2.587.276		81.27%		
			Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain	11%		7.31 %		9%		3.34 %		37.11 %		3.34 %		30.36 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	-
			Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	-
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			3.183.407		1.951.502		2.613.089		635.774		24.33%		2.587.276		81.27%		
			Jumlah permohonan masuk yang sudah diproses	240 berkas		245 berkas		240 berkas		100 berkas		41.67 %		100 berkas		41.67 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Jumlah SK Walikota tentang penetapan formulasi sewa tanah yang ditetapkan	14 Dokumen		12 Dokumen		13 Dokumen		3 Dokumen		23.08 %		3 Dokumen		21.43 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.07.2.01.00 18	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan			1.771.015		1.317.876		1.779.897		413.258		23.22%		1.731.134		97.75 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Strategis Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	240 Unit		245 Sistem Jaringan		240 Unit		100 Unit		41.67 %		100 Unit		41.67 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.07.2.01.0030	**Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota**			1.412.391		633.625		833.192		222.516		26.71%		856.142		60.62 %		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	14 Unit		18 Sistem Jaringan		13 Unit		11 Unit		84.62 %		11 Unit		78.57 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
14	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**			315.023.875		302.496.725		253.753.277		17.238.958		6.79%		319.735.683		101.50%		
			Persentase bangunan yang ber IMB	2.69 %		1.99 %		2.35 %		0.49 %		20.85 %		0.49 %		18.22 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	-
			Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan yang diselesaikan	90%		74.16 %		85%		45.81 %		53.89 %		45.81 %		50.90 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	-
			Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik	91.25 %		91.65 %		90.73 %		43.4 %		47.83 %		43.4 %		47.56 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	-
	1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**			315.023.875		302.496.725		253.753.277		17.238.958		6.79%		319.735.683		101.50%		
			Jumlah dokumen penataan bangunan yang terbit dan disahkan	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
			Jumlah pendataan	1907 Lokasi		2401 Lokasi		1882 Lokasi		865 Lokasi		45.96 %		865 Lokasi		45.36 %		Dinas	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			penyelenggaraan bangunan dan pengawasan bangunan yang dilaksanakan															Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
			Jumlah berkas Perizinan dan Non Perizinan Bidang Tata Bangunan yang diproses	1768 Berkas		3660 Berkas		1747 Berkas		1042 Berkas		59.65 %		1042 Berkas		58.94 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
			Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun/direhabilitasi dan dilakukan pemeliharaan	248 Bangunan		341 Bangunan		244 Bangunan		77 Bangunan		31.56 %		77 Bangunan		31.05 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.08.2.01.0021	**Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**			8.725.773		5.905.451		5.201.167		279.500		5.37%		6.184.951		70.88 %		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	65 Dokumen		64 Dokumen		61 Dokumen		5 Dokumen		8.20 %		5 Dokumen		7.69 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.08.2.01.0022	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung**			3.517.554		1.243.913		1.416.315		305.303		21.56%		1.549.215		44.04 %		
			Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	1861 Orang		2401 Unit		1861 Orang		865 Orang		46.48 %		865 Orang		46.48 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.08.2.01.0018	**Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**			38.016.233		42.685.345		36.903.927		11.948.183		32.38%		54.633.528		143.71 %		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	164 Bangunan Gedung		184 Unit		158 Bangunan Gedung		65 Bangunan Gedung		41.14 %		65 Bangunan Gedung		39.63 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.03.08.2.01.0017	**Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**			257.832.869		250.640.325		207.260.642		4.335.147		2.09%		254.975.472		98.89 %		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	141 Bangunan Gedung		158 Unit		139 Bangunan Gedung		12 Bangunan Gedung		8.63 %		12 Bangunan Gedung		8.51 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.08.2.01.0023	**Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG**			6.187.321		1.828.191		2.526.813		352.826		13.96%		2.181.017		35.25 %		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.08.2.01.0019	**Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung**			744.126		193.500		444.413		18.000		4.05%		211.500		28.42 %		
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
15	1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			610.347.180		423.646.336		721.689.148		117.632.144		16.30%		541.278.479		88.68%		
			Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun	12.000 meter		60,826.17 meter		11400 meter		0 meter		0.00 %		0 meter		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	-
			Luas jalan yang diperbaiki	210000 m2		581,969.87 m2		170000 m2		57428.66 m2		33.78 %		57428.66 m2		27.35 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**			610.347.180		423.646.336		721.689.148		117.632.144		16.30%		541.278.479		88.68%		
			Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun	338 lokasi		283 lokasi		200 lokasi		19 lokasi		9.50 %		19 lokasi		5.62 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Jumlah lokasi pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur	2 lokasi		5 lokasi		2 lokasi		2 lokasi		100.00 %		2 lokasi		100.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dipelihara	1501 lokasi		2693 lokasi		1201 lokasi		1686 lokasi		140.38 %		1686 lokasi		112.33 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	137 dokumen		156 dokumen		137 dokumen		26 dokumen		18.98 %		26 dokumen		18.98 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.10.2.01.0041	**Pelebaran Jalan Menambah Lajur**			221.175.434		61.880.705		316.734.470		81.928.660		25.87%		143.809.364		65.02 %		
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	5550 KM		17375 M²		1 KM		0.54 KM		54.00 %		0.54 KM		0.01 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.10.2.01.0032	**Pembangunan Jalan**			273.886.986		273.288.130		302.973.252		15.051.403		4.97%		288.339.533		105.28 %		
			Panjang Jalan yang Dibangun	12 KM		19.7 KM		11.4 KM		3.04 KM		26.67 %		3.04 KM		25.33 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.10.2.01.0046	**Pemeliharaan Rutin Jalan**			87.885.919		69.258.396		78.151.430		18.384.183		23.52%		87.642.578		99.72 %		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	40 KM		149.56 KM		45 KM		38.6 KM		85.78 %		38.6 KM		96.50 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.10.2.01.0030	**Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa**			14.182.828		8.398.263		9.232.004		218.043		2.36%		8.616.306		60.75 %		
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	67 KM		65 Dokumen		11.4 KM		0 KM		0.00 %		0 KM		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.10.2.01.0029	**Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan**			7.385.767		9.612.997		9.470.303		2.049.855		21.65%		11.662.852		157.91 %		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta	70 Dokumen		91 Dokumen		70 Dokumen		26 Dokumen		37.14 %		26 Dokumen		37.14 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun																
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan			5.830.246		1.207.846		5.127.689		0		0.00%		1.207.846		20.72 %		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.8 KM		0.27 KM		0.8 KM		0 KM		0.00 %		0 KM		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
16	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			982.825		462.812		557.922		129.114		23.14%		591.926		60.23%		
			Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas perusahaan jasa konstruksi	100%		118.10 %		95%		25%		26.32 %		25%		25.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	-
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			982.825		462.812		557.922		129.114		23.14%		591.926		60.23%		
			Jenis kelembagaan konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	5 jenis		4 jenis		5 jenis		2 jenis		40.00 %		2 jenis		40.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi			982.825		462.812		557.922		129.114		23.14%		591.926		60.23 %		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	120 Lembaga		124 Orang		110 Lembaga		8 Lembaga		7.27 %		8 Lembaga		6.67 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
17	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			14.227.131		3.802.524		9.774.340		1.823.512		18.66%		5.626.035		39.54%		
			Persentase pelayanan penataan ruang	96%		98.76 %		95%		36.2 %		38.11 %		36.2 %		37.71 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	-
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTr) Kabupaten/Kota			3.956.284		2.166.376		3.337.921		1.318.026		39.49%		3.484.402		88.07%		
			Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau Kajian teknis	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		0 dokumen		0.00 %		0 dokumen		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			pendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RrTR) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan															Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang			3.956.284		2.166.376		3.337.921		1.318.026		39.49%		3.484.402		88.07 %		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			10.270.847		1.636.148		6.436.419		505.485		7.85%		2.141.634		20.85%		
			Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota dan informasi penataan ruang kota yang disusun	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		0 dokumen		0.00 %		0 dokumen		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang			2.713.270		766.577		728.719		255.998		35.13%		1.022.575		37.69 %		
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang			7.557.576		869.571		5.707.700		249.487		4.37%		1.119.058		14.81 %		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
18	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			56.352.356		30.996.557		37.699.467		10.374.271		27.52%		41.370.828		73.41%		
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan	89.5 %		94.12 %		88.5 %		95.21 %		107.58 %		95.21 %		106.38 %		Dinas Perumahan Rakyat dan	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Kesekretariatan															Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			120.425		15.600		42.488		13.000		30.60%		28.600		23.75%		
			Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis		2 jenis		2 jenis		1 jenis		50.00 %		1 jenis		50.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**			120.425		15.600		42.488		13.000		30.60%		28.600		23.75 %		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen		1 Dokumen		14.29 %		1 Dokumen		12.50 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			43.233.748		25.255.328		27.864.615		9.330.957		33.49%		34.586.286		80.00%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			43.233.748		25.255.328		27.864.615		9.330.957		33.49%		34.586.286		80.00 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan		77 Orang/bulan		104 Orang/bulan		96 Orang/bulan		92.31 %		96 Orang/bulan		118.52 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			9.664.298		4.405.045		7.159.977		862.107		12.04%		5.267.152		54.50%		
			Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		100.00 %		3 Jenis		100.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			9.664.298		4.405.045		7.159.977		862.107		12.04%		5.267.152		54.50 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan	15 Paket		16 Paket		15 Paket		10 Paket		66.67 %		10 Paket		66.67 %		Dinas	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Perlengkapan Kantor yang Disediakan															Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			3.333.885		1.320.584		2.632.387		168.207		6.39%		1.488.791		44.66%		
			Jumlah jenis pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		100.00 %		2 Jenis		100.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.01.2.09.0006	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**			3.333.885		1.320.584		2.632.387		168.207		6.39%		1.488.791		44.66 %		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98 Unit		103 Unit		98 Unit		47 Unit		47.96 %		47 Unit		47.96 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
19	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			40.719.101		13.108.780		20.170.315		5.136.762		25.47%		18.245.542		44.81%		
			Persentase penghuni rusunawa yang sesuai dengan kriteria	100%		76.61 %		100%		70.75 %		70.75 %		70.75 %		70.75 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	-
	1.04.02.2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**			40.719.101		13.108.780		20.170.315		5.136.762		25.47%		18.245.542		44.81%		
			Jumlah Unit Hunian rumah susun Pemerintah Kota Surabaya	5157 Unit Hunian		5233 Unit Hunian		5157 Unit Hunian		5233 Unit Hunian		101.47 %		5233 Unit Hunian		101.47 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.02.2.05.0002	**Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**			40.719.101		13.108.780		20.170.315		5.136.762		25.47%		18.245.542		44.81 %		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	105 Dokumen		111 Dokumen		105 Dokumen		109 Dokumen		103.81 %		109 Dokumen		103.81 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Pertanahan	
20	1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**			18.599.004		119.570.739		68.702.358		40.536.782		59.00%		160.107.521		860.84%		
			Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni	100%		106.93 %		95%		25.8 %		27.16 %		25.8 %		25.80 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	-
	1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**			18.599.004		119.570.739		68.702.358		40.536.782		59.00%		160.107.521		860.84%		
			Jenis perbaikan rumah tapak tidak layak huni	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		100.00 %		2 jenis		100.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.03.2.03.0002	**Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni**			18.599.004		119.570.739		68.702.358		40.536.782		59.00%		160.107.521		860.84 %		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	405 Unit Rumah		2887 Unit Rumah		1000 Unit Rumah		863 Unit Rumah		86.30 %		863 Unit Rumah		213.09 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
21	1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**			96.664.080		28.308.619		22.181.600		3.516.713		15.85%		31.825.332		32.92%		
			Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	-
	1.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**			96.664.080		28.308.619		22.181.600		3.516.713		15.85%		31.825.332		32.92%		
			Jumlah lokasi pelaksanaan pencegahan permukiman kumuh	8 lokasi		7 lokasi		8 lokasi		2 lokasi		25.00 %		2 lokasi		25.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.04.2.01.0001	**Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh**			96.664.080		28.308.619		22.181.600		3.516.713		15.85%		31.825.332		32.92 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	10 Unit Rumah		7 Unit Rumah		9 Unit Rumah		2 Unit Rumah		22.22 %		2 Unit Rumah		20.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
22	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			1.260.047		1.560.769		1.254.179		552.835		44.08%		2.113.604		167.74%		
			Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik	100%		54.79 %		60%		89.04 %		148.40 %		89.04 %		89.04 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	-
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			1.260.047		1.560.769		1.254.179		552.835		44.08%		2.113.604		167.74%		
			Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara administrasi yang diproses	12 dokumen		14 dokumen		12 dokumen		9 dokumen		75.00 %		9 dokumen		75.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan			1.260.047		1.560.769		1.254.179		552.835		44.08%		2.113.604		167.74 %		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12 Laporan		15 Laporan		12 Laporan		15 Laporan		125.00 %		15 Laporan		125.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
23	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			96.085.239		72.821.047		78.501.139		27.698.534		35.28%		100.519.581		104.62%		
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	88%		96.28 %		88%		97.15 %		110.40 %		97.15 %		110.40 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95%		96.74 %		94%		95.8 %		101.91 %		95.8 %		100.84 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98%		97.76 %		97%		97.68 %		100.70 %		97.68 %		99.67 %		Satuan Polisi Pamong Praja	-
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			79.722.492		64.188.283		63.850.347		23.638.019		37.02%		87.826.302		110.17%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			37.585.968		29.425.001		28.745.071		10.992.052		38.24%		40.417.053		107.53 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132 Orang/bulan		126 Orang/bulan		131 Orang/bulan		124 Orang/bulan		94.66 %		124 Orang/bulan		93.94 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.269.993		9.305.302		9.974.308		3.719.146		37.29%		13.024.448		106.15 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		26 Orang/bulan		34 Orang/bulan		33 Orang/bulan		97.06 %		33 Orang/bulan		132.00 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			29.866.532		25.457.980		25.130.968		8.926.821		35.52%		34.384.801		115.13 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 Orang/bulan		106 Orang/bulan		109 Orang/bulan		102 Orang/bulan		93.58 %		102 Orang/bulan		91.89 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.872.334		3.739.066		6.086.611		1.295.111		21.28%		5.034.177		73.25%		
			Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 laporan		12 laporan		12 laporan		5 laporan		41.67 %		5 laporan		41.67 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
			Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.06.00	Penyediaan Peralatan dan			773.782		436.194		822.801		82.609		10.04%		518.804		67.05 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	02	Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket		2 Paket		2 Paket		100.00 %		2 Paket		100.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.659.697		1.795.116		1.758.189		534.009		30.37%		2.329.125		140.33 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket		8 Paket		17 Paket		8 Paket		47.06 %		8 Paket		47.06 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.438.855		1.507.756		3.505.622		678.493		19.35%		2.186.249		49.25 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket		17 Paket		17 Paket		8 Paket		47.06 %		8 Paket		47.06 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9.490.413		4.893.698		8.564.180		2.765.404		32.29%		7.659.102		80.70%		
			Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%		95.33 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Jumlah paket penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	3 paket		3 paket		3 paket		3 paket		100.00 %		3 paket		100.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
			Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.935.520		1.224.411		1.859.681		393.620		21.17%		1.618.030		83.60 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			4.004.199		2.562.555		4.257.360		1.465.911		34.43%		4.028.466		100.61 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.550.694		1.106.732		2.447.139		905.874		37.02%		2.012.606		56.68 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
24	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			37.177.337		35.109.955		82.612.188		28.317.733		34.28%		63.427.688		170.61%		
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada																
			Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	-
			Persentase PPNS yang dibina	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	-
			Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	-
			Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	-
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			34.779.392		32.495.034		74.821.114		26.597.037		35.55%		59.092.071		169.91%		
			Jumlah lembaga yang berkerjasama dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	11 Lembaga		11 Lembaga		11 Lembaga		11 Lembaga		100.00 %		11 Lembaga		100.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
			Jumlah Warga Sekitar lokasi penegakan Perda/Perkada yang berpotensi terkena dampak penegakan Perda/Perkada yang mendapatkan layanan	1520 Orang		1150 Orang		1280 Orang		540 Orang		42.19 %		540 Orang		35.53 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
			Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	192 Kali		197 Kali		192 Kali		81 Kali		42.19 %		81 Kali		42.19 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
			Jumlah lokasi penertiban pelanggaran Perda dan Perkada	116 Titik/Lokasi		98 Titik/Lokasi		104 Titik/Lokasi		104 Titik/Lokasi		100.00 %		104 Titik/Lokasi		89.66 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			527.904		761.973		762.473		337.746		44.30%		1.099.718		208.32 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		5 Dokumen		41.67 %		5 Dokumen		41.67 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			31.434.907		29.450.574		69.618.710		24.495.574		35.19%		53.946.148		171.61 %		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan	10080 laporan		10106 Kasus		12 laporan		5 laporan		41.67 %		5 laporan		0.05 %		Satuan Polisi Pamong Praja	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																
	1.05.02.2.01.0016	**Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa**			2.167.280		1.515.408		1.593.595		763.496		47.91%		2.278.904		105.15 %		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	36 Laporan		37 Kasus		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		13.89 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.01.0005	**Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia**			464.625		480.495		2.482.575		908.971		36.61%		1.389.465		299.05 %		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	978 Orang		976 Orang		978 Orang		730 Orang		74.64 %		730 Orang		74.64 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.01.0017	**Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah**			124.031		125.063		215.741		69.100		32.03%		194.163		156.54 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.01.0008	**Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**			60.646		161.523		148.020		22.150		14.96%		183.673		302.86 %		
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	2 Dokumen		18 Dokumen		12 Dokumen		5 Dokumen		41.67 %		5 Dokumen		250.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**			2.282.865		2.480.041		7.619.408		1.684.576		22.11%		4.164.617		182.43%		
			Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang diselidiki, dilakukan penyidikan, dan diselesaikan	94 Objek		100 Objek		94 Objek		35 Objek		37.23 %		35 Objek		37.23 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
			Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang ditindak dan diselesaikan	4230 Objek		4901 Objek		4230 Objek		2455 Objek		58.04 %		2455 Objek		58.04 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.02.0011	**Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah**			1.865.433		1.176.794		4.891.913		1.276.272		26.09%		2.453.066		131.50 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.02.0012	**Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**			417.432		625.677		1.189.298		408.304		34.33%		1.033.980		247.70 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.02.0010	**Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**			0		677.570		1.538.198		0		0.00%		677.570		0.00 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	N/A		4 Laporan		4 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		N/A		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**			115.079		134.880		171.666		36.120		21.04%		171.000		148.59%		
			Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan kapasitas	65 Orang		82 Orang		75 Orang		40 Orang		53.33 %		40 Orang		61.54 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.03.0006	**Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS**			115.079		134.880		171.666		36.120		21.04%		171.000		148.59 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		2 Laporan		50.00 %		2 Laporan		50.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
25	1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**			48.680.383		25.303.245		23.953.928		9.483.799		39.59%		34.787.043		71.46%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana	100%		98.34 %		100%		98.92 %		98.92 %		98.92 %		98.92 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
			Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit	100%		98.68 %		100%		99.97 %		99.97 %		99.97 %		99.97 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
	1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**			20.320.538		1.259.607		2.032.078		353.625		17.40%		1.613.233		7.94%		
			Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	42 Kegiatan		42 Kegiatan		42 Kegiatan		13 Kegiatan		30.95 %		13 Kegiatan		30.95 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.02.0016	**Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota**			3.318.289		944.604		1.275.312		266.747		20.92%		1.211.351		36.51 %		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1.650 Kawasan		1748 Orang		1650 Kawasan		497 Kawasan		30.12 %		497 Kawasan		30,121.21 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.02.0006	**Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan**			16.669.689		241.721		368.981		35.940		9.74%		277.661		1.67 %		
			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	31 Kawasan		30 Kawasan		31 Kawasan		9 Kawasan		29.03 %		9 Kawasan		29.03 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.02.0015	**Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota**			332.559		73.283		387.785		50.938		13.14%		124.221		37.35 %		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5 Unit		5 Unit		5 Unit		2 Unit		40.00 %		2 Unit		40.00 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**			28.359.846		24.043.637		21.921.849		9.130.173		41.65%		33.173.811		116.97%		
			Jenis kejadian bencana yang ditangani dalam Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10 Jenis		10 Jenis		10 Jenis		10 Jenis		100.00 %		10 Jenis		100.00 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.03.0003	**Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota**			26.091.537		22.592.240		19.843.578		8.617.835		43.43%		31.210.075		119.62 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	4497 Orang		15798 Orang		11000 Orang		7082 Orang		64.38 %		7082 Orang		157.48 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.03.0009	**Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota**			2.268.308		1.451.397		2.078.271		512.338		24.65%		1.963.736		86.57 %		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	467 Orang		424 Orang		467 Orang		132 Orang		28.27 %		132 Orang		28.27 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
26	1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**			64.034.041		75.313.153		73.721.381		22.284.498		30.23%		97.597.651		152.42%		
			Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-
			Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	46		37.88		47		8.97		180.91 %		8.97		180.50 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-
	1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**			62.884.592		74.650.529		72.740.336		22.021.738		30.27%		96.672.268		153.73%		
			Persentase sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang berfungsi baik	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
			Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilatih	656 Petugas		764 Petugas		656 Petugas		0 Petugas		0.00 %		0 Petugas		0.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.01.0002	**Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**			42.696.091		34.384.494		30.893.355		13.297.782		43.04%		47.682.277		111.68 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		100.00 %		2 Laporan		100.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.01.0007	**Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran**			1.006.458		493.723		1.713.323		992.298		57.92%		1.486.021		147.65 %		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan	10 Orang		10 Orang		10 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran															Penyelamatan	
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			10.493.247		35.032.053		32.177.774		5.432.492		16.88%		40.464.544		385.62 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	910 Unit		191 Unit		849 Unit		135 Unit		15.90 %		135 Unit		14.84 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			8.688.797		4.740.259		7.955.883		2.299.167		28.90%		7.039.426		81.02 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		100.00 %		2 Dokumen		100.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			550.836		357.789		515.940		141.294		27.39%		499.084		90.60%		
			Jumlah berkas pemeriksaan sistem proteksi kebakaran bangunan/gedung	520 Berkas		460 Berkas		480 Berkas		180 Berkas		37.50 %		180 Berkas		34.62 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			550.836		357.789		515.940		141.294		27.39%		499.084		90.60 %		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		100.00 %		2 Dokumen		100.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			598.613		304.834		465.105		121.465		26.12%		426.299		71.21%		
			Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi	110 Kegiatan		80 Kegiatan		90 Kegiatan		29 Kegiatan		32.22 %		29 Kegiatan		26.36 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan			598.613		304.834		465.105		121.465		26.12%		426.299		71.21 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																	
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1100 Orang		800 Orang		900 Orang		359 Orang		39.89 %		359 Orang		32.64 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																	
27	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			24.100.497		18.064.017		18.809.208		6.651.101		35.36%		24.715.117		102.55%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	88%		93.92 %		88%		94.67 %		107.58 %		94.67 %		107.58 %		Dinas Sosial	-
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19.227.230		15.456.244		15.730.319		5.814.264		36.96%		21.270.508		110.63%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			19.227.230		15.456.244		15.730.319		5.814.264		36.96%		21.270.508		110.63 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan		45 Orang/bulan		50 Orang/bulan		47 Orang/bulan		94.00 %		47 Orang/bulan		104.44 %		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.354.427		1.082.126		1.764.245		280.576		15.90%		1.362.703		57.88%		
			Persentase ketersediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.354.427		1.082.126		1.764.245		280.576		15.90%		1.362.703		57.88 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		15 Paket		12 Paket		12 Paket		100.00 %		12 Paket		100.00 %		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.518.840		1.525.646		1.314.643		556.260		42.31%		2.081.906		82.65%		
			Persentase Pelayanan Pelayanan Umum Kantor	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.518.840		1.525.646		1.314.643		556.260		42.31%		2.081.906		82.65 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Sosial	
28	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			8.489.757		4.906.106		4.870.555		1.907.229		39.16%		6.813.336		80.25%		
			Persentase Jenis PSKS dan Lembaga	100%		64.29 %		88.24 %		55.56 %		62.96 %		55.56 %		55.56 %		Dinas Sosial	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial																
			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	88.98 %		81.96 %		86.96 %		31.1 %		35.76 %		31.1 %		34.95 %		Dinas Sosial	-
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			8.489.757		4.906.106		4.870.555		1.907.229		39.16%		6.813.336		80.25%		
			Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS kelembagaan	372 orang		1559 orang		363 orang		449 orang		123.69 %		449 orang		120.70 %		Dinas Sosial	
			Jumlah jenis PSKS perorangan yang dibina	7 jenis		6 jenis		6 jenis		5 jenis		83.33 %		5 jenis		71.43 %		Dinas Sosial	
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			6.940.781		3.978.705		4.097.623		1.699.384		41.47%		5.678.089		81.81 %		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	597 Orang		535 Orang		583 Orang		267 Orang		45.80 %		267 Orang		44.72 %		Dinas Sosial	
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			1.548.976		927.401		772.932		207.845		26.89%		1.135.247		73.29 %		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Lembaga		8 Lembaga		8 Lembaga		7 Lembaga		87.50 %		7 Lembaga		58.33 %		Dinas Sosial	
29	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			67.098.483		115.627.594		34.464.332		11.067.151		32.11%		126.694.745		188.82%		
			Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Sosial	-
			Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Sosial	-
			Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Sosial	-
			Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Sosial	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial																
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			45.567.674		100.742.163		25.061.507		7.155.638		28.55%		107.897.801		236.79%		
			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas	12 kali		12 kali		12 kali		5 kali		41.67 %		5 kali		41.67 %		Dinas Sosial	
			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Lanjut Usia	12 kali		12 kali		12 kali		5 kali		41.67 %		5 kali		41.67 %		Dinas Sosial	
			Jumlah kegiatan pelayanan reunifikasi bagi PMKS	12 kali		12 kali		12 kali		5 kali		41.67 %		5 kali		41.67 %		Dinas Sosial	
			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Anak	12 kali		12 kali		12 kali		5 kali		41.67 %		5 kali		41.67 %		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			5.917.303		4.205.760		5.132.355		1.544.028		30.08%		5.749.788		97.17 %		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang		104 Orang		100 Orang		94 Orang		94.00 %		94 Orang		72.31 %		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			37.558.454		9.463.379		8.286.917		2.169.881		26.18%		11.633.260		30.97 %		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	215 Orang		221 Orang		230 Orang		205 Orang		89.13 %		205 Orang		95.35 %		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan			1.615.342		750.364		640.392		245.737		38.37%		996.101		61.67 %		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang		57 Orang		40 Orang		49 Orang		122.50 %		49 Orang		122.50 %		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			476.574		90.612		391.915		21.547		5.50%		112.159		23.53 %		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	795 Orang		1622 Orang		795 Orang		681 Orang		85.66 %		681 Orang		85.66 %		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan			0		86.232.049		10.609.928		3.174.444		29.92%		89.406.493		0.00 %		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A		23327 Orang		1270 Orang		2125 Orang		167.32 %		2125 Orang		N/A		Dinas Sosial	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**			21.530.809		14.885.431		9.402.824		3.911.513		41.60%		18.796.944		87.30%		
			Jumlah laporan pemberian layanan kedaruratan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		5 laporan		41.67 %		5 laporan		41.67 %		Dinas Sosial	
			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial	12 kali		12 kali		12 kali		5 kali		41.67 %		5 kali		41.67 %		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.02.0007	**Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial**			17.475.588		12.038.003		6.581.943		2.755.944		41.87%		14.793.947		84.65 %		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1100 Orang		1505 Orang		900 Orang		1757 Orang		195.22 %		1757 Orang		159.73 %		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.02.0002	**Pemberian Layanan Kedaruratan**			4.055.221		2.847.428		2.820.881		1.155.569		40.96%		4.002.997		98.71 %		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	4716 Orang		4726 Orang		4716 Orang		5399 Orang		114.48 %		5399 Orang		114.48 %		Dinas Sosial	
30	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**			10.901.678		32.202.820		60.596.787		7.152.326		11.80%		39.355.145		361.00%		
			Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87%		96.53 %		87%		86.15 %		99.02 %		86.15 %		99.02 %		Dinas Sosial	-
	1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**			10.901.678		32.202.820		60.596.787		7.152.326		11.80%		39.355.145		361.00%		
			Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR	12 laporan		12 laporan		12 laporan		5 laporan		41.67 %		5 laporan		41.67 %		Dinas Sosial	
			Jumlah laporan koordinasi dan monitoring intervensi sosial	12 laporan		12 laporan		12 laporan		5 laporan		41.67 %		5 laporan		41.67 %		Dinas Sosial	
	1.06.05.2.02.0004	**Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat**			116.497		5.669.791		7.928.411		349.475		4.41%		6.019.266		5,166.89 %		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2229 Orang		834 Orang		1071 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Sosial	
	1.06.05.2.02.0003	**Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga**			5.865.631		21.210.011		48.074.447		4.950.969		10.30%		26.160.980		446.00 %		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	83899 Keluarga		120118 Keluarga		59295 Keluarga		42014 Keluarga		70.86 %		42014 Keluarga		50.08 %		Dinas Sosial	
	1.06.05.2.02.00	**Pendataan Fakir Miskin Cakupan**			4.681.621		5.011.418		4.017.011		1.618.901		40.30%		6.630.320		141.62 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	01	Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	534731 Orang		272670 Orang		174385 Orang		116945 Orang		67.06 %		116945 Orang		21.87 %		Dinas Sosial	
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			237.929		311.600		576.918		232.980		40.38%		544.580		228.88 %		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	264931 Keluarga		82788 keluarga		59295 Keluarga		42029 Keluarga		70.88 %		42029 Keluarga		15.86 %		Dinas Sosial	
31	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			1.980.041		1.524.603		1.756.987		933.492		53.13%		2.458.095		124.14%		
			Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Sosial	-
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			1.980.041		1.524.603		1.756.987		933.492		53.13%		2.458.095		124.14%		
			Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		100.00 %		3 Jenis		100.00 %		Dinas Sosial	
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			1.980.041		1.524.603		1.756.987		933.492		53.13%		2.458.095		124.14 %		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	7 Makam		7 Makam		7 Makam		7 Makam		100.00 %		7 Makam		100.00 %		Dinas Sosial	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
32	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.606.977		14.253.168		15.176.161		5.485.897		36.15%		19.739.065		135.13%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95%		94.37 %		93%		94.66 %		101.78 %		94.66 %		99.64 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.701.619		12.466.523		13.569.616		4.927.189		36.31%		17.393.712		136.94%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.701.619		12.466.523		13.569.616		4.927.189		36.31%		17.393.712		136.94 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan		30 Orang/bulan		51 Orang/bulan		47 Orang/bulan		92.16 %		47 Orang/bulan		151.61 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Kerja	
	2.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			1.905.358		1.786.645		1.606.546		558.708		34.78%		2.345.352		123.09%		
			Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
			Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			1.596.618		1.508.769		1.420.380		516.587		36.37%		2.025.355		126.85 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.01.2.08.0003	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			308.739		277.876		186.166		42.121		22.63%		319.997		103.65 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
33	2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			11.303.582		8.299.114		8.587.305		950.520		11.07%		9.249.634		81.83%		
			Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten	85.02 %		80.84 %		81.02 %		75%		92.57 %		75%		88.21 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-
			Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	91.7 %		97.96 %		90.5 %		100%		110.50 %		100%		109.05 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-
	2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**			6.876.862		5.268.525		5.604.020		535.065		9.55%		5.803.590		84.39%		
			Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
			Jumlah laporan pelaksanaan pemagangan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.03.2.01.0002	**Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja**			434.813		437.163		293.736		70.136		23.88%		507.299		116.67 %		
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan	12 Lembaga		42 Lembaga		12 Lembaga		2 Lembaga		16.67 %		2 Lembaga		16.67 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n																
	2.07.03.2.01.0001	**Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**			6.442.049		4.831.362		5.310.285		464.929		8.76%		5.296.291		82.21 %		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	720 Orang		736 Orang		720 Orang		241 Orang		33.47 %		241 Orang		33.47 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.03.2.04	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**			305.648		265.314		240.622		63.000		26.18%		328.314		107.42%		
			Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.03.2.04.0001	**Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil**			305.648		265.314		240.622		63.000		26.18%		328.314		107.42 %		
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	50 Perusahaan		50 Perusahaan		50 Perusahaan		29 Perusahaan		58.00 %		29 Perusahaan		58.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.03.2.05	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			4.121.071		2.765.275		2.742.663		352.455		12.85%		3.117.731		75.65%		
			Jumlah laporan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.03.2.05.0001	**Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja**			4.121.071		2.765.275		2.742.663		352.455		12.85%		3.117.731		75.65 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		1 Dokumen		25.00 %		1 Dokumen		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
34	2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			3.690.000		2.236.285		2.085.356		611.712		29.33%		2.847.997		77.18%		
			Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan	5%		3.50 %		3%		0%		0.00 %		0%		0%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-
	2.07.04.2.01	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**			2.280.264		1.568.793		1.467.906		461.222		31.42%		2.030.015		89.03%		
			Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis	9 laporan		9 laporan		9 laporan		4 laporan		44.44 %		4 laporan		44.44 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.01.0002	**Pelayanan antar Kerja**			24.068		78.573		122.450		23.200		18.95%		101.773		422.85 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2150 Orang		1938 Orang		1950 Orang		758 Orang		38.87 %		758 Orang		35.26 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja			1.151.313		487.571		512.490		171.796		33.52%		659.366		57.27 %		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	1500 Orang		1000 Orang		1100 Orang		386 Orang		35.09 %		386 Orang		25.73 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja			1.104.883		1.002.649		832.966		266.226		31.96%		1.268.876		114.84 %		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	250 Orang		546 Orang		250 Orang		164 Orang		65.60 %		164 Orang		65.60 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			338.718		250.335		227.204		13.919		6.13%		264.253		78.02%		
			Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Jobfair/Bursa Kerja	7 Laporan		4 Laporan		5 Laporan		2 Laporan		40.00 %		2 Laporan		28.57 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja			338.718		250.335		227.204		13.919		6.13%		264.253		78.02 %		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	350 Orang		260 Orang		250 Orang		102 Orang		40.80 %		102 Orang		29.14 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			1.071.018		417.158		390.246		136.571		35.00%		553.729		51.70%		
			Jumlah laporan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	7 Laporan		4 Laporan		5 Laporan		1 Laporan		20.00 %		1 Laporan		14.29 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			1.071.018		417.158		390.246		136.571		35.00%		553.729		51.70 %		
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	350 Orang		200 Orang		250 Orang		50 Orang		20.00 %		50 Orang		14.29 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
35	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			2.216.940		1.867.257		1.456.126		438.135		30.09%		2.305.392		103.99%		
			Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan	60%		30.95 %		40%		33.67 %		84.18 %		33.67 %		56.12 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-
			Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama	15.04 %		13.58 %		13.77 %		13.72 %		99.64 %		13.72 %		91.22 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.358.206		1.049.002		792.500		213.485		26.94%		1.262.487		92.95%		
			Jumlah Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			62.206		41.538		45.550		11.200		24.59%		52.738		84.78 %		
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	220 Perusahaan		286 Perusahaan		220 Perusahaan		109 Perusahaan		49.55 %		109 Perusahaan		49.55 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			1.296.000		1.007.464		746.950		202.285		27.08%		1.209.749		93.34 %		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			858.734		818.254		663.625		224.650		33.85%		1.042.904		121.45%		
			Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			525.521		421.337		307.407		100.220		32.60%		521.557		99.25 %		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara		60 Perkara		50 Perkara		22 Perkara		44.00 %		22 Perkara		44.00 %		Dinas Perindustrian	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		dan Tenaga Kerja	
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			333.213		396.917		356.218		124.431		34.93%		521.348		156.46 %		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	110 Perkara		115 Perkara		110 Perkara		36 Perkara		32.73 %		36 Perkara		32.73 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
36	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			17.557.497		13.404.567		14.715.206		5.244.759		35.64%		18.649.326		106.22%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%		95.31 %		100%		98.74 %		98.74 %		98.74 %		98.74 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.968.828		10.490.806		11.823.432		4.208.311		35.59%		14.699.117		113.34%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.968.828		10.490.806		11.823.432		4.208.311		35.59%		14.699.117		113.34 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan		25 Orang/bulan		33 Orang/bulan		31 Orang/bulan		93.94 %		31 Orang/bulan		129.17 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat			4.012.046		2.555.114		2.333.073		891.629		38.22%		3.446.743		85.91%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Daerah																	
			Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%		91.29 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			4.012.046		2.555.114		2.333.073		891.629		38.22%		3.446.743		85.91 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		16 Paket		5 Paket		15 Paket		300.00 %		15 Paket		300.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			576.622		358.647		558.702		144.819		25.92%		503.466		87.31%		
			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	100%		90%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.01.2.08.0003	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			576.622		358.647		558.702		144.819		25.92%		503.466		87.31 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan		14 Laporan		6 Laporan		11 Laporan		183.33 %		11 Laporan		183.33 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
37	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**			2.324.452		1.089.699		1.778.957		349.044		19.62%		1.438.743		61.90%		
			Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			sektor ipoleksosbud															dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			782.126		359.086		495.430		137.213		27.70%		496.299		63.46%		
			Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG			782.126		359.086		495.430		137.213		27.70%		496.299		63.46 %		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	58 Perangkat Daerah		58 Perangkat Daerah		58 Perangkat Daerah		0 Perangkat Daerah		0.00 %		0 Perangkat Daerah		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			467.797		293.888		317.307		104.971		33.08%		398.859		85.26%		
			Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum,	600 Orang		568 Orang		600 Orang		169 Orang		28.17 %		169 Orang		28.17 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota															dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.02.2.02.0002	**Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi**			467.797		293.888		317.307		104.971		33.08%		398.859		85.26 %		
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Organisasi		44 Organisasi		31 Organisasi		32 Organisasi		103.23 %		32 Organisasi		103.23 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**			1.074.529		436.725		966.220		106.861		11.06%		543.586		50.59%		
			Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Kegiatan		12 Kegiatan		21 Kegiatan		14 Kegiatan		66.67 %		14 Kegiatan		66.67 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.02.2.03.0002	**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**			1.074.529		436.725		966.220		106.861		11.06%		543.586		50.59 %		
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	740 Orang		740 Orang		740 Orang		614 Orang		82.97 %		614 Orang		82.97 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
38	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			538.911		542.161		1.186.011		119.383		10.07%		661.544		122.76%		
			Persentase lembaga / PKBM yang responsif	100%		48.39 %		64.51 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Dinas Pemberdayaan	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			terhadap perlindungan perempuan															Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			105.528		162.000		896.844		17.200		1.92%		179.200		169.81%		
			Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	20 kasus		79 kasus		20 kasus		30 kasus		150.00 %		30 kasus		150.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			105.528		162.000		896.844		17.200		1.92%		179.200		169.81 %		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	20 Orang		79 Orang		20 Orang		30 Orang		150.00 %		30 Orang		150.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			433.382		380.161		289.167		102.183		35.34%		482.344		111.30%		
			Jumlah kecamatan yang responsif terhadap	31 kecamatan		15 kecamatan		20 kecamatan		0 kecamatan		0.00 %		0 kecamatan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			penanganan permasalahan perempuan															Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.03.2.03.0004	**Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**			433.382		380.161		289.167		102.183		35.34%		482.344		111.30 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
39	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**			619.665		946.288		1.156.169		351.577		30.41%		1.297.864		209.45%		
			Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	283		322.00		246		0		0.00 %		0		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
	2.08.04.2.03	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			619.665		946.288		1.156.169		351.577		30.41%		1.297.864		209.45%		
			Jumlah laporan penyediaan layanan keluarga oleh Ruang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	12 laporan		12 laporan		12 laporan		5 laporan		41.67 %		5 laporan		41.67 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.04.2.03.0001	**Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah**			619.665		946.288		1.156.169		351.577		30.41%		1.297.864		209.45 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Layanan		3 Layanan		2 Layanan		2 Layanan		100.00 %		2 Layanan		100.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
40	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**			468.442		264.306		224.116		83.358		37.19%		347.665		74.22%		
			Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
	2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			468.442		264.306		224.116		83.358		37.19%		347.665		74.22%		
			Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data gender dan anak	58 Lembaga		58 Lembaga		58 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.05.2.01.0001	**Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota**			468.442		264.306		224.116		83.358		37.19%		347.665		74.22 %		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
41	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**			3.918.987		2.462.484		3.028.689		761.767		25.15%		3.224.251		82.27%		
			Persentase Kelurahan	100%		100.00 %		79.87 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Dinas	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Layak Anak															Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**			911.497		434.988		550.051		67.000		12.18%		501.988		55.07%		
			Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0 kegiatan		0.00 %		0 kegiatan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.06.2.01.0001	**Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**			911.497		434.988		550.051		67.000		12.18%		501.988		55.07 %		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	21 Organisasi		58 Organisasi		30 Organisasi		0 Organisasi		0.00 %		0 Organisasi		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**			3.007.491		2.027.496		2.478.638		694.767		28.03%		2.722.263		90.52%		
			Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator Kota Layak Anak	3 kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan		0 kegiatan		0.00 %		0 kegiatan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.431.215		734.719		995.496		203.275		20.42%		937.995		65.54 %		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			1.576.276		1.292.777		1.483.141		491.492		33.14%		1.784.268		113.20 %		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		31 Orang		10 Orang		29 Orang		290.00 %		29 Orang		290.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
42	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			1.549.369		1.006.344		991.436		439.324		44.31%		1.445.668		93.31%		
			Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
			Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	100%		48.39 %		64.51 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan			1.549.369		1.006.344		991.436		439.324		44.31%		1.445.668		93.31%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	150 kasus		174 kasus		150 kasus		110 kasus		73.33 %		110 kasus		73.33 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Jumlah lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	31 lembaga		15 lembaga		20 lembaga		0 lembaga		0.00 %		0 lembaga		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.07.2.02.0006	**Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK**			192.248		64.927		52.890		15.504		29.31%		80.431		41.84 %		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	150 Orang		174 Layanan		150 Orang		110 Orang		73.33 %		110 Orang		73.33 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.07.2.02.0005	**Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			1.357.120		941.417		938.546		423.820		45.16%		1.365.237		100.60 %		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	150 Orang		174 Orang		150 Orang		110 Orang		73.33 %		110 Orang		73.33 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**																	
43	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**			26.817.816		21.261.280		23.968.790		7.778.888		32.45%		29.040.168		108.29%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		KABUPATEN/KOTA																	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95%		94.50 %		94%		95.85 %		101.97 %		95.85 %		100.89 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			22.173.111		17.310.121		19.232.769		6.602.763		34.33%		23.912.884		107.85%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			22.173.111		17.310.121		19.232.769		6.602.763		34.33%		23.912.884		107.85 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan		49 Orang/bulan		74 Orang/bulan		70 Orang/bulan		94.59 %		70 Orang/bulan		142.86 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.644.705		3.951.159		4.736.021		1.176.125		24.83%		5.127.283		110.39%		
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.681.649		3.031.261		3.174.417		995.900		31.37%		4.027.161		109.38 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			963.056		919.898		1.561.604		180.225		11.54%		1.100.123		114.23 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
44	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			2.185.139		1.398.121		1.695.037		332.726		19.63%		1.730.847		79.21%		
			Indeks Kecukupan Pangan Pokok	1.26		1.83		1.22		2.87		235.25 %		2.87		227.78 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			931.260		589.471		641.918		142.918		22.26%		732.389		78.65%		
			Jumlah jenis pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		1 Jenis		25.00 %		1 Jenis		25.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis			931.260		589.471		641.918		142.918		22.26%		732.389		78.65 %		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	15 Laporan		15 Dokumen		15 Laporan		5 Laporan		33.33 %		5 Laporan		33.33 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			1.253.879		808.650		1.053.119		189.808		18.02%		998.458		79.63%		
			Jenis pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		2 Jenis		66.67 %		2 Jenis		66.67 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			1.253.879		808.650		1.053.119		189.808		18.02%		998.458		79.63 %		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
45	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			973.715		672.458		870.083		206.015		23.68%		878.473		90.22%		
			Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman	97.91 %		99.28 %		97.89 %		100%		102.16 %		100%		102.13 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			973.715		672.458		870.083		206.015		23.68%		878.473		90.22%		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			973.715		672.458		870.083		206.015		23.68%		878.473		90.22 %		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	36 Dokumen		36 Dokumen		36 Dokumen		12 Dokumen		33.33 %		12 Dokumen		33.33 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																	
46	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			153.598.241		28.976.055		82.300.255		9.221.599		11.20%		38.197.654		24.87%		
			Luas tanah dan/atau	55265.71 M2		8,179.00 M2		43886.90 M2		0 M2		0.00 %		0 M2		0.00 %		Dinas	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum															Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	2.10.05.2.01	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			153.598.241		28.976.055		82.300.255		9.221.599		11.20%		38.197.654		24.87%		
			Jumlah lokasi pengadaan/pembelian tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	1 lokasi		3 lokasi		1 lokasi		1 lokasi		100.00 %		1 lokasi		100.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	2.10.05.2.01.0002	**Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			153.598.241		28.976.055		82.300.255		9.221.599		11.20%		38.197.654		24.87 %		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		3 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100.00 %		1 Dokumen		100.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**																	
47	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			98.611.737		54.136.584		56.790.849		19.665.371		34.63%		73.801.955		74.84%		
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	87%		90.16 %		86%		89.81 %		104.43 %		89.81 %		103.23 %		Dinas Lingkungan Hidup	-
	2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			81.736.755		44.105.816		44.746.949		16.691.479		37.30%		60.797.294		74.38%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			81.736.755		44.105.816		44.746.949		16.691.479		37.30%		60.797.294		74.38 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	193 Orang/bulan		180 Orang/bulan		196 Orang/bulan		192 Orang/bulan		97.96 %		192 Orang/bulan		99.48 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			15.689.324		9.606.264		11.591.303		2.810.997		24.25%		12.417.262		79.14%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			15.689.324		9.606.264		11.591.303		2.810.997		24.25%		12.417.262		79.14 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			1.185.658		424.504		452.596		162.895		35.99%		587.399		49.54%		
			Persentase pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			1.185.658		424.504		452.596		162.895		35.99%		587.399		49.54 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit		50 Unit		50 Unit		18 Unit		36.00 %		18 Unit		36.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
48	2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			4.341.984		33.771.080		3.713.481		817.715		22.02%		34.588.794		796.61%		
			Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	90%		90.96 %		86%		94.51 %		109.90 %		94.51 %		105.01 %		Dinas Lingkungan Hidup	-
			Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik	50%		46.90 %		46%		50%		108.70 %		50%		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	-
	2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**			2.963.234		1.691.250		2.571.184		571.658		22.23%		2.262.908		76.37%		
			jumlah rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		100.00 %		1 kegiatan		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jenis kualitas lingkungan yang dimonitoring selama 1 tahun	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		100.00 %		2 jenis		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.2.01.0001	**Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut**			1.002.892		562.479		873.947		280.200		32.06%		842.679		84.02 %		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.11.03.2.01.0002	**Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim**			1.960.342		1.128.771		1.697.237		291.458		17.17%		1.420.229		72.45 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.2.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**			1.378.750		32.079.830		1.142.297		246.057		21.54%		32.325.886		2,344.58 %		
			Jumlah Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yang digunakan untuk menentukan ISPU kota dalam 1 tahun	3 stasiun		2 stasiun		2 stasiun		2 stasiun		100.00 %		2 stasiun		66.67 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.2.02.0001	**Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat**			1.378.750		857.947		1.142.297		246.057		21.54%		1.104.004		80.07 %		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
49	2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**			114.572.766		92.846.462		94.856.231		37.192.741		39.21%		130.039.203		113.50%		
			Persentase kelestarian keanekaragaman hayati	100%		101.68 %		99.49 %		101.68 %		102.20 %		101.68 %		101.68 %		Dinas Lingkungan Hidup	-
	2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**			114.572.766		92.846.462		94.856.231		37.192.741		39.21%		130.039.203		113.50%		
			Pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	2.87 Ha		2.86 Ha		2.83 Ha		2.86 Ha		101.06 %		2.86 Ha		99.65 %		Dinas Lingkungan Hidup	
			Pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	2.87 Ha		2.86 Ha		2.83 Ha		2.86 Ha		101.06 %		2.86 Ha		99.65 %		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		0 dokumen		0.00 %		0 dokumen		0.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.04.2.01.0004	**Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**			88.616.171		72.046.462		73.733.061		28.739.921		38.98%		100.786.384		113.73 %		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	275.90 Ha		275.84 Ha		275.86 Ha		275.86 Ha		100.00 %		275.86 Ha		99.99 %		Dinas Lingkungan Hidup	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.11.04.2.01.0007	**Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati**			9.689.511		7.679.015		8.240.939		3.532.889		42.87%		11.211.904		115.71 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	125 Unit		125 Unit		125 Unit		125 Unit		100.00 %		125 Unit		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.04.2.01.0008	**Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya**			15.911.738		12.604.503		12.581.451		4.852.321		38.57%		17.456.824		109.71 %		
			Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	143,26 Unit		143.26 Ha		143.26 Unit		14 Unit		9.77 %		14 Unit		9.79 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.04.2.01.0001	**Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**			355.347		516.482		300.780		67.609		22.48%		584.091		164.37 %		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
50	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**			5.250.677		1.139.242		3.104.934		704.657		22.69%		1.843.900		35.12%		
			Persentase peningkatan jumlah lokasi penanganan limbah B3/Sampah spesifik	100%		90.00 %		90%		100%		111.11 %		100%		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	-
			Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	80%		100.00 %		80%		100%		125.00 %		100%		125.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	-
	2.11.05.2.01	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**			779.119		278.787		388.990		88.295		22.70%		367.083		47.12%		
			Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	250 berkas		254 berkas		250 berkas		103 berkas		41.20 %		103 berkas		41.20 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.05.2.01.0001	**Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**			779.119		278.787		388.990		88.295		22.70%		367.083		47.12 %		
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	255 Dokumen		273 Dokumen		255 Dokumen		109 Dokumen		42.75 %		109 Dokumen		42.75 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.05.2.02	**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1**			4.471.557		860.455		2.715.944		616.362		22.69%		1.476.817		33.03%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		(satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		100.00 %		1 kegiatan		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan			4.471.557		860.455		2.715.944		616.362		22.69%		1.476.817		33.03 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
51	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			4.000.329		1.379.136		2.310.590		460.803		19.94%		1.839.939		45.99%		
			Persentase ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan	95%		61.00 %		70%		17%		24.29 %		17%		17.89 %		Dinas Lingkungan Hidup	-
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			4.000.329		1.379.136		2.310.590		460.803		19.94%		1.839.939		45.99%		
			Persentase ketepatan waktu persetujuan lingkungan yang diterbitkan	80%		100%		80%		100%		125.00 %		100%		125.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah obyek kegiatan usaha dan titik IPAL yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya	432 obyek		432 obyek		432 obyek		177 obyek		40.97 %		177 obyek		40.97 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			2.406.414		900.400		1.332.942		311.354		23.36%		1.211.754		50.36 %		
			Jumlah Rekomendasi	350 Dokumen		292 Dokumen		300 Dokumen		111 Dokumen		37.00 %		111 Dokumen		31.71 %		Dinas	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan															Lingkungan Hidup	
	2.11.06.2.01.0005	**Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**			1.593.914		478.737		977.647		149.449		15.29%		628.185		39.41 %			
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	254 Badan Usaha		432 Laporan		254 Badan Usaha		99 Badan Usaha		38.98 %		99 Badan Usaha		38.98 %		Dinas Lingkungan Hidup	
52	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			8.194.978		1.392.464		3.015.191		384.929		12.77%		1.777.393		21.69%		
			Persentase peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan	63.84 %		64.10 %		59.77 %		39.6 %		66.25 %		39.6 %		62.03 %		Dinas Lingkungan Hidup	-
			Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	71.81 %		82.69 %		61.04 %		60.47 %		99.07 %		60.47 %		84.21 %		Dinas Lingkungan Hidup	-
	2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			8.194.978		1.392.464		3.015.191		384.929		12.77%		1.777.393		21.69%		
			Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang dibutuhkan	12 kali		12 kali		12 kali		3 kali		25.00 %		3 kali		25.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		100.00 %		1 jenis		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.08.2.01.0002	**Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup**			7.391.891		926.349		1.852.684		217.138		11.72%		1.143.487		15.47 %		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.08.2.01.0003	**Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup**			803.086		466.115		1.162.507		167.792		14.43%		633.906		78.93 %		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku	1725 Orang		1610 Orang		1615 Orang		1080 Orang		66.87 %		1080 Orang		62.61 %		Dinas Lingkungan Hidup	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Usaha/Kegiatan yang terlibat																
53	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			687.892		3.632.216		4.602.408		20.214		0.44%		3.652.429		530.96%		
			Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat	92.00 %		75.60 %		71.20 %		35.6 %		50.00 %		35.6 %		38.70 %		Dinas Lingkungan Hidup	-
	2.11.09.2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			687.892		3.632.216		4.602.408		20.214		0.44%		3.652.429		530.96%		
			Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang di usulkan	4 penghargaan		4 penghargaan		4 penghargaan		0 penghargaan		0.00 %		0 penghargaan		0.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.09.2.01.0001	**Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**			687.892		3.632.216		4.602.408		20.214		0.44%		3.652.429		530.96 %		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	10 Entitas		10 Entitas		10 Entitas		0 Entitas		0.00 %		0 Entitas		0.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
54	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**			732.771		228.633		472.432		83.489		17.67%		312.122		42.59%		
			Jumlah penyelesaian permasalahan lingkungan hidup melalui upaya pemberian sanksi administrasi dan non sanksi administrasi	46 obyek		51.00 obyek		48 obyek		13 obyek		172.92 %		13 obyek		171.74 %		Dinas Lingkungan Hidup	-
	2.11.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**			732.771		228.633		472.432		83.489		17.67%		312.122		42.59%		
			Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.10.2.01.0004	**Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota**			732.771		228.633		472.432		83.489		17.67%		312.122		42.59 %		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang	46 Pengaduan		51 Dokumen		48 Pengaduan		21 Pengaduan		43.75 %		21 Pengaduan		45.65 %		Dinas Lingkungan Hidup	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			ditindaklanjuti/ditangani																
55	2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**			445.929.165		390.749.518		461.725.540		137.040.588		29.68%		527.790.107		118.36%		
			Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik	5.12 %		5.13 %		5.12 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	-
			Persentase pengangkutan sampah ke TPA ≤ 1 hari	88.76 %		100.00 %		88.01 %		100%		113.62 %		100%		112.66 %		Dinas Lingkungan Hidup	-
			Persentase pengolahan sampah di TPS 3R	52%		53.18 %		51%		53.18 %		104.27 %		53.18 %		102.27 %		Dinas Lingkungan Hidup	-
	2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**			445.929.165		390.749.518		461.725.540		137.040.588		29.68%		527.790.107		118.36%		
			Jumlah jenis kegiatan penanganan sampah yang dilakukan	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		100.00 %		2 jenis		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah jenis kegiatan pemanfaatan sampah yang dilakukan	3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		100.00 %		3 jenis		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah jenis sarana dan prasarana persampahan yang disediakan dan dikelola	4 jenis		4 jenis		4 jenis		1 jenis		25.00 %		1 jenis		25.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.11.2.01.0020	**Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional**			222.633.644		198.755.958		218.435.086		61.626.906		28.21%		260.382.865		116.96 %		
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	650430 Ton		535325.92 Ton		650430 Ton		242579.78 Ton		37.30 %		242579.78 Ton		37.30 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.11.2.01.0012	**Penanganan sampah melalui pengangkutan**			182.639.754		169.713.041		167.797.295		64.363.086		38.36%		234.076.127		128.16 %		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	1 Ton		1 Laporan		515238 Ton		224548.99 Ton		43.58 %		224548.99 Ton		22,454,899.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.11.2.01.0007	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota**			40.655.768		22.280.519		75.493.159		11.050.596		14.64%		33.331.115		81.98 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	226 Unit		235 Unit		230 Unit		418 Unit		181.74 %		418 Unit		184.96 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN**																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		PENCATATAN SIPIL																	
56	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			26.618.623		46.229.000		49.641.478		18.457.079		37.18%		64.686.079		243.01%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	87.58 %		89.98 %		86.68 %		90.93 %		104.90 %		90.93 %		103.83 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
	2.12.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			16.846		9.100		13.000		7.800		60.00%		16.900		100.32%		
			Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis		2 jenis		2 jenis		1 jenis		50.00 %		1 jenis		50.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**			16.846		9.100		13.000		7.800		60.00%		16.900		100.32 %		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		2 Dokumen		25.00 %		2 Dokumen		22.22 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			15.703.038		40.803.680		41.204.294		15.200.419		36.89%		56.004.099		356.65%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			15.703.038		40.803.680		41.204.294		15.200.419		36.89%		56.004.099		356.65 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan		193 Orang/bulan		194 Orang/bulan		180 Orang/bulan		92.78 %		180 Orang/bulan		439.02 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			10.049.047		2.694.128		5.641.220		2.464.040		43.68%		5.158.168		51.33%		
			Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kebutuhan sekretariat Dinas	100%		97.87 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			10.049.047		2.694.128		5.641.220		2.464.040		43.68%		5.158.168		51.33 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket		3 Paket		3 Paket		100.00 %		3 Paket		100.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang**			849.692		2.722.091		2.782.965		784.820		28.20%		3.506.911		412.73%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Urusan Pemerintahan Daerah																	
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			849.692		2.722.091		2.782.965		784.820		28.20%		3.506.911		412.73 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
57	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**			3.481.298		3.802.619		3.353.469		1.242.414		37.05%		5.045.032		144.92%		
			Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	95%		100.00 %		95%		100%		105.26 %		100%		105.26 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
	2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**			2.655.892		2.795.808		2.439.931		894.889		36.68%		3.690.697		138.96%		
			Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	156000 berkas		184539 berkas		156000 berkas		128499 berkas		82.37 %		128499 berkas		82.37 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.02.2.01.0002	**Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk**			2.655.892		2.795.808		2.439.931		894.889		36.68%		3.690.697		138.96 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		5 Dokumen		41.67 %		5 Dokumen		41.67 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.02.2.03	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**			825.406		1.006.811		913.539		347.525		38.04%		1.354.335		164.08%		
			Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	156000 berkas		184539 berkas		156000 berkas		293566 berkas		188.18 %		293566 berkas		188.18 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.02.2.03.0002	**Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk**			825.406		1.006.811		913.539		347.525		38.04%		1.354.335		164.08 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		5 Dokumen		41.67 %		5 Dokumen		41.67 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Penduduk																	
58	2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**			1.969.905		2.937.677		2.534.232		955.423		37.70%		3.893.100		197.63%		
			Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	95%		100.00 %		95%		100%		105.26 %		100%		105.26 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
	2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**			1.524.354		2.335.226		1.939.657		778.750		40.15%		3.113.976		204.28%		
			Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	36000 berkas		37054 berkas		36000 berkas		17117 berkas		47.55 %		17117 berkas		47.55 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.01.0001	**Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting**			1.524.354		2.335.226		1.939.657		778.750		40.15%		3.113.976		204.28 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		5 Dokumen		41.67 %		5 Dokumen		41.67 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**			445.551		602.451		594.574		176.673		29.71%		779.124		174.87%		
			Jumlah Berkas Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil yang diterbitkan	36000 berkas		138801 berkas		36000 berkas		34884 berkas		96.90 %		34884 berkas		96.90 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.02.0004	**Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil**			445.551		602.451		594.574		176.673		29.71%		779.124		174.87 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
59	2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**			2.941.983		2.980.158		3.390.626		1.252.124		36.93%		4.232.281		143.86%		
			Persentase jumlah PD/Lembaga yang Melakukan kerjasama	100%		77.27 %		60%		120%		200.00 %		120%		120.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
			Persentase jumlah layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis IT	77%		88.06 %		71%		100%		140.85 %		100%		129.87 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase kesesuaian data penduduk antara Data Kementrian Bersih dengan data penduduk layanan	99%		98.44 %		97%		99.53 %		102.61 %		99.53 %		100.54 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			431.627		1.007.546		910.515		328.119		36.04%		1.335.665		309.45%		
			Jumlah Data Penduduk yang diidentifikasi	48000 data		112565 data		8000 data		9486 data		118.58 %		9486 data		19.76 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			431.627		1.007.546		910.515		328.119		36.04%		1.335.665		309.45 %		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		1 Dokumen		50.00 %		1 Dokumen		50.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			653.293		666.669		773.919		246.582		31.86%		913.251		139.79%		
			Jumlah Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	5 Lembaga		5 Lembaga		5 Lembaga		5 Lembaga		100.00 %		5 Lembaga		100.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.2.03.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi			362.799		372.084		464.513		144.534		31.12%		516.618		142.40 %		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		100.00 %		5 Dokumen		100.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			290.494		294.585		309.405		102.048		32.98%		396.633		136.54 %		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen		10 Dokumen		5 Dokumen		1 Dokumen		20.00 %		1 Dokumen		20.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			1.857.063		1.305.943		1.706.192		677.423		39.70%		1.983.365		106.80%		
			Jumlah unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	32 unit layanan		32 unit layanan		32 unit layanan		32 unit layanan		100.00 %		32 unit layanan		100.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.2.04.00	Pembinaan dan Pengawasan			1.857.063		1.305.943		1.706.192		677.423		39.70%		1.983.365		106.80 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	01	**Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**																	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
60	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**			89.414		64.333		122.265		40.633		33.23%		104.965		117.39%		
			Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
	2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**			89.414		64.333		122.265		40.633		33.23%		104.965		117.39%		
			Jumlah jenis informasi yang dilaporkan dalam dokumen Profil Perkembangan Kependudukan	4 Informasi		4 Informasi		4 Informasi		4 Informasi		100.00 %		4 Informasi		100.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.05.2.01.0002	**Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain**			89.414		64.333		122.265		40.633		33.23%		104.965		117.39 %		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		1 Dokumen		50.00 %		1 Dokumen		50.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**																	
61	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**			0		1.214.287		1.721.155		362.260		21.05%		1.576.547		0.00%		
			Persentase Implementasi Program Pokok PKK dimasyarakat	0%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
	2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum**			0		1.214.287		1.721.155		362.260		21.05%		1.576.547		0.00%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	N/A		34 Kegiatan		53 Kegiatan		35 Kegiatan		66.04 %		35 Kegiatan		N/A		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.13.05.2.01.0009	**Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga**			0		1.214.287		1.721.155		362.260		21.05%		1.576.547		0.00 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	N/A		34 Laporan		12 Dokumen		5 Dokumen		41.67 %		5 Dokumen		N/A		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**																	
62	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**			379.795		571.396		551.607		144.950		26.28%		716.345		188.61%		
			Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	100%		47.38 %		63.06 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
	2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**			231.497		172.955		167.165		63.850		38.20%		236.804		102.29%		
			Jumlah peserta sosialisasi pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	178 Orang		292 Orang		160 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal			231.497		172.955		167.165		63.850		38.20%		236.804		102.29 %		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	89 Satuan Pendidikan		150 Satuan Pendidikan		80 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			148.298		398.441		384.443		81.100		21.10%		479.541		323.36%		
			Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan	58 Perangkat Daerah		58 Perangkat Daerah		58 Perangkat Daerah		0 Perangkat Daerah		0.00 %		0 Perangkat Daerah		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			0		63.631		63.600		0		0.00%		63.631		0.00 %		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	N/A		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		N/A		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			0		217.628		180.000		24.400		13.56%		242.028		0.00 %		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	N/A		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		N/A		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			148.298		117.183		140.843		56.700		40.26%		173.883		117.25 %		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
63	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			10.106.307		7.492.785		8.806.891		1.552.364		17.63%		9.045.150		89.50%		
			Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi	17.60 %		16.70 %		18.10 %		13.39 %		126.02 %		13.39 %		123.92 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
			Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	86%		83.00 %		84%		69.94 %		83.26 %		69.94 %		81.33 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			357.857		890.321		795.000		202.305		25.45%		1.092.626		305.33%		
			Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Mini Lokakarya	31 Kecamatan		31 Kecamatan		31 Kecamatan		31 Kecamatan		100.00 %		31 Kecamatan		100.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.01.0014	**Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja**			0		117.264		150.000		23.550		15.70%		140.814		0.00 %		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	N/A		31 Organisasi		31 Organisasi		0 Organisasi		0.00 %		0 Organisasi		N/A		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.01.0011	**Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)**			178.928		402.600		465.000		138.894		29.87%		541.494		302.63 %		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.01.0008	**Pengendalian Program KKBPK**			178.928		221.704		80.000		31.147		38.93%		252.851		141.31 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan		2 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.01.0012	**Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang**			0		148.754		100.000		8.714		8.71%		157.468		0.00 %		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,	N/A		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		N/A		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang															Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**			2.657.552		950.861		1.264.432		239.822		18.97%		1.190.683		44.80%		
			Jumlah Pertemuan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB) bersama dengan kader IMP	12 Kali		12 Kali		12 Kali		2 Kali		16.67 %		2 Kali		16.67 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.02.0006	**Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)**			859.998		596.465		805.432		103.442		12.84%		699.907		81.38 %		
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.02.0004	**Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)**			1.797.554		307.416		459.000		136.380		29.71%		443.796		24.69 %		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1566 Orang		1566 Orang		1566 Orang		1566 Orang		100.00 %		1566 Orang		100.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan**			4.520.722		5.162.135		6.379.209		934.796		14.65%		6.096.932		134.87%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR)	417096 Orang		307610 Orang		417003 Orang		255485 Orang		61.27 %		255485 Orang		61.25 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.03.0008	**Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya**			0		32.126		39.200		2.820		7.19%		34.946		0.00 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	N/A		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		N/A		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.03.0001	**Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya**			2.353.459		285.359		528.641		279.316		52.84%		564.675		23.99 %		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.03.0003	**Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**			1.749.975		4.177.571		5.621.373		652.660		11.61%		4.830.231		276.02 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1950 Orang		1950 Orang		1950 Orang		603 Orang		30.92 %		603 Orang		30.92 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Berencana	
	2.14.03.2.03.0006	**Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB**			417.288		667.080		189.995		0		0.00%		667.080		159.86 %		
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	19 Unit		66 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**			2.570.177		489.468		368.250		175.441		47.64%		664.909		25.87%		
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan di Kampung KB	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.04.0002	**Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB**			0		9.000		3.750		0		0.00%		9.000		0.00 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	N/A		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		N/A		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.04.0006	**Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas**			2.570.177		480.468		364.500		175.441		48.13%		655.909		25.52 %		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	31 Kampung		31 Kampung		31 Kampung		31 Kampung		100.00 %		31 Kampung		100.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	Berencana	
64	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			4.687.035		16.381.580		20.065.833		5.559.065		27.70%		21.940.645		468.11%		
			Median usia kawin pertama perempuan	21 tahun		22.90 tahun		21 tahun		0 tahun		0.00 %		0 tahun		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
			Persentase balita yang mengikuti PAUD	41.58 %		49.88 %		41.56 %		47.97 %		115.42 %		47.97 %		115.37 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
			Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial	55.76 %		92.82 %		47.50 %		31.16 %		65.60 %		31.16 %		55.88 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
			Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	44%		71.43 %		42%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			4.687.035		16.381.580		20.065.833		5.559.065		27.70%		21.940.645		468.11%		
			Jumlah laporan pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Jumlah laporan kegiatan penyediaan biaya operasional bagi kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (DAK)	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Jumlah laporan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Jumlah kelompok kegiatan UPPKA yang didampingi	10 Kelompok		14 Kelompok		10 Kelompok		0 Kelompok		0.00 %		0 Kelompok		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.04.2.01.0019	**Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)**			608.785		381.869		660.665		167.357		25.33%		549.226		90.22 %		
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	1136 Orang		625 Orang		930 Orang		300 Orang		32.26 %		300 Orang		26.41 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.04.2.01.0028	**Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan**			1.202.795		1.500.549		3.358.732		1.363.467		40.59%		2.864.016		238.11 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)																	
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	57 Kelompok		2263 Kelompok		153 Kelompok		153 Kelompok		100.00 %		153 Kelompok		268.42 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.04.2.01.0018	**Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)**			412.985		352.200		480.000		0		0.00%		352.200		85.28 %		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	38 Unit		30 Unit		40 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.04.2.01.0024	**Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)**			1.002.109		13.512.980		13.948.200		3.678.970		26.38%		17.191.950		1,715.58 %		
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya	6642 Orang		6664 Orang		6642 Orang		6642 Orang		100.00 %		6642 Orang		100.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			operasional kegiatan															Berencana	
	2.14.04.2.01.0017	**Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))**			1.460.361		633.982		1.618.235		349.271		21.58%		983.253		67.33 %		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**																	
65	2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			93.715.342		68.991.310		81.234.345		27.264.663		33.56%		96.255.973		102.71%		
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	92%		93.55 %		92%		93.8 %		101.96 %		93.8 %		101.96 %		Dinas Perhubungan	-
	2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			73.040.321		55.952.232		55.876.664		20.725.495		37.09%		76.677.727		104.98%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			73.040.321		55.952.232		55.876.664		20.725.495		37.09%		76.677.727		104.98 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	287 Orang/bulan		275 Orang/bulan		272 Orang/bulan		256 Orang/bulan		94.12 %		256 Orang/bulan		89.20 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			5.949.269		4.449.529		6.729.790		1.303.632		19.37%		5.753.161		96.70%		
			Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			5.949.269		4.449.529		6.729.790		1.303.632		19.37%		5.753.161		96.70 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket		14 Paket		23 Paket		9 Paket		39.13 %		9 Paket		39.13 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			14.725.751		8.589.550		9.210.268		3.450.355		37.46%		12.039.905		81.76%		
			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Umum	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Perhubungan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.15.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			14.725.751		8.589.550		9.210.268		3.450.355		37.46%		12.039.905		81.76 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan		3 Laporan		3 Laporan		100.00 %		3 Laporan		100.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**			0		0		9.417.623		1.785.181		18.96%		1.785.181		0.00%		
			Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD Parkir Tepi Jalan Umum	N/A		N/A		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		N/A		Dinas Perhubungan	
			Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD Pengelolaan Transportasi Umum	N/A		N/A		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		N/A		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.10.0001	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**			0		0		6.684.000		1.352.274		20.23%		1.352.274		0.00 %		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	N/A		N/A		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100.00 %		1 Unit Kerja		N/A		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.10.0001	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**			0		0		2.733.623		432.907		15.84%		432.907		0.00 %		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	N/A		N/A		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100.00 %		1 Unit Kerja		N/A		Dinas Perhubungan	
66	2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			472.129.235		386.327.414		472.395.994		149.499.858		31.65%		535.827.272		113.49%		
			Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	48.75 %		50.40 %		48.70 %		52.79 %		108.40 %		52.79 %		108.29 %		Dinas Perhubungan	-
			Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	50 km/jam		43.18 km/jam		45 km/jam		0 km/jam		0.00 %		0 km/jam		0.00 %		Dinas Perhubungan	-
			Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya	80%		81.99 %		80%		81.13 %		101.41 %		81.13 %		101.41 %		Dinas Perhubungan	-
			Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	80%		80.98 %		80%		91.73 %		114.66 %		91.73 %		114.66 %		Dinas Perhubungan	-
	2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**			323.533.151		260.710.896		274.112.494		103.263.323		37.67%		363.974.219		112.50%		
			Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	31 Kawasan		31 Kawasan		31 Kawasan		31 Kawasan		100.00 %		31 Kawasan		100.00 %		Dinas Perhubungan	
			Penyelenggaraan	15 Lokasi		8 Lokasi		15 Lokasi		0 Lokasi		0.00 %		0 Lokasi		0.00 %		Dinas	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Prasarana Jalan di Kota Surabaya															Perhubungan	
	2.15.02.2.02.0001	**Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**			117.251.786		110.118.093		99.845.242		38.554.734		38.61%		148.672.826		126.80 %		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	3000 Unit		5903 Unit		3000 Unit		4419 Unit		147.30 %		4419 Unit		147.30 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02.0002	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**			28.689.292		4.655.122		11.711.175		2.207.549		18.85%		6.862.671		23.92 %		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2500 Unit		1946 Unit		2500 Unit		700 Unit		28.00 %		700 Unit		28.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02.0004	**Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan**			35.134.102		18.277.767		27.236.980		6.852.431		25.16%		25.130.198		71.53 %		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	9000 Unit		9000 Unit		9000 Unit		3750 Unit		41.67 %		3750 Unit		41.67 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02.0003	**Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan**			142.457.971		127.659.915		135.319.097		55.648.609		41.12%		183.308.524		128.68 %		
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	105252 Unit		96252 Unit		99252 Unit		105846 Unit		106.64 %		105846 Unit		100.56 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**			29.006.404		16.253.211		19.087.307		5.718.162		29.96%		21.971.373		75.75%		
			Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan	14 Lokasi		13 Lokasi		14 Lokasi		14 Lokasi		100.00 %		14 Lokasi		100.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.03.0011	**Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)**			29.006.404		16.253.211		19.087.307		5.718.162		29.96%		21.971.373		75.75 %		
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	12 Unit		15 Unit		12 Unit		14 Unit		116.67 %		14 Unit		116.67 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**			20.323.724		22.496.325		25.249.471		7.483.790		29.64%		29.980.114		147.51%		
			Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	60 Berkas		75 Berkas		60 Berkas		32 Berkas		53.33 %		32 Berkas		53.33 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.04.0002	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota**			20.323.724		22.496.325		25.249.471		7.483.790		29.64%		29.980.114		147.51 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Perhubungan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			8.140.371		9.280.189		9.717.777		2.439.167		25.10%		11.719.357		143.97%		
			Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR	134525 Unit		123870 Unit		134525 Unit		49741 Unit		36.98 %		49741 Unit		36.98 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			8.140.371		9.280.189		9.717.777		2.439.167		25.10%		11.719.357		143.97 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	33 Unit		33 Unit		33 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			21.001.558		21.861.455		35.591.063		10.410.392		29.25%		32.271.847		153.66%		
			Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	10 Lokasi		9 Lokasi		10 Lokasi		2 Lokasi		20.00 %		2 Lokasi		20.00 %		Dinas Perhubungan	
			Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasai dan Dikendalikan	7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		100.00 %		7 Jenis		100.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			4.153.675		2.216.713		3.546.770		333.084		9.39%		2.549.796		61.39 %		
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	13 Laporan		9 Laporan		13 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			16.847.884		19.644.742		32.044.293		10.077.309		31.45%		29.722.051		176.41 %		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			65.033.247		54.187.039		105.272.952		19.556.335		18.58%		73.743.374		113.39%		
			Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya	3 Koridor		10 Koridor		3 Koridor		9 Koridor		300.00 %		9 Koridor		300.00 %		Dinas Perhubungan	
			Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Abdi Yasa Teladan	75 Orang		75 Orang		75 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			32.542.203		5.281.118		50.743.531		948.235		1.87%		6.229.353		19.14 %		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Perhubungan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																
	2.15.02.2.09.0003	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			32.491.043		48.905.921		54.529.421		18.608.100		34.12%		67.514.021		207.79 %		
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	72 Unit		88 Unit		72 Unit		92 Unit		127.78 %		92 Unit		127.78 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.11	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			5.090.782		1.538.300		3.364.931		628.689		18.68%		2.166.989		42.57%		
			Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan	1 Jaringan		1 Jaringan		1 Jaringan		0 Jaringan		0.00 %		0 Jaringan		0.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.11.0001	**Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			5.090.782		1.538.300		3.364.931		628.689		18.68%		2.166.989		42.57 %		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen		4 Dokumen		10 Dokumen		3 Dokumen		30.00 %		3 Dokumen		30.00 %		Dinas Perhubungan	
67	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**			3.518.992		855.852		2.669.837		295.059		11.05%		1.150.911		32.71%		
			Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Dinas Perhubungan	-
	2.15.03.2.04	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota**			3.518.992		855.852		2.669.837		295.059		11.05%		1.150.911		32.71%		
			Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan	2 Kali		2 Kali		2 Kali		0 Kali		0.00 %		0 Kali		0.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.03.2.04.0002	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota**			3.518.992		855.852		2.669.837		295.059		11.05%		1.150.911		32.71 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Perhubungan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota																
68	**2.15.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**			5.874.008		4.446.226		5.274.312		1.543.833		29.27%		5.990.059		101.98%		
			Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Dinas Perhubungan	-
	2.15.05.2.01	**Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**			5.874.008		4.446.226		5.274.312		1.543.833		29.27%		5.990.059		101.98%		
			Jumlah Kegiatan Pengembangan, Penetapan Kebijakan, dan Sosialisasi Keselamatan serta Rencana Induk Perkeretaapian	2 Kali		2 Kali		2 Kali		0 Kali		0.00 %		0 Kali		0.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.05.2.01.0002	**Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian**			5.874.008		4.446.226		5.274.312		1.543.833		29.27%		5.990.059		101.98 %		
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**																	
69	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			18.550.501		15.336.126		17.472.970		5.406.431		30.94%		20.742.557		111.82%		
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89.58 %		93.59 %		89.56 %		94.48 %		105.49 %		94.48 %		105.47 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	-
	2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			15.330.201		13.314.338		15.036.603		4.815.013		32.02%		18.129.351		118.26%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			15.330.201		13.314.338		15.036.603		4.815.013		32.02%		18.129.351		118.26 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan		35 Orang/bulan		59 Orang/bulan		47 Orang/bulan		79.66 %		47 Orang/bulan		127.03 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			1.996.579		1.418.729		1.654.677		520.136		31.43%		1.938.865		97.11%		
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.996.579		1.418.729		1.654.677		520.136		31.43%		1.938.865		97.11 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket		4 Paket		4 Paket		100.00 %		4 Paket		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.223.721		603.059		781.691		71.282		9.12%		674.341		55.11%		
			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.223.721		603.059		781.691		71.282		9.12%		674.341		55.11 %		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit		90 Unit		90 Unit		23 Unit		25.56 %		23 Unit		25.56 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
70	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			16.438.816		11.827.411		15.137.543		3.475.427		22.96%		15.302.838		93.09%		
			Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu ≤ 24 jam	89%		90.22 %		87%		99.9 %		114.83 %		99.9 %		112.25 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	-
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			16.438.816		11.827.411		15.137.543		3.475.427		22.96%		15.302.838		93.09%		
			Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan	4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		100.00 %		4 Jenis		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPID ≤ 17 hari kerja	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan			2.943.703		1.412.760		1.667.508		392.873		23.56%		1.805.633		61.34 %		
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		5 Dokumen		41.67 %		5 Dokumen		41.67 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik			849.870		813.008		1.235.619		237.359		19.21%		1.050.367		123.59 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		5 Dokumen		41.67 %		5 Dokumen		41.67 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			12.645.244		9.601.643		12.234.416		2.845.196		23.26%		12.446.839		98.43 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		5 Dokumen		41.67 %		5 Dokumen		41.67 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
71	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN			74.293.471		54.622.482		64.428.116		17.263.482		26.79%		71.885.964		96.76%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		APLIKASI INFORMATIKA																	
			Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	-
	2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			31.347.122		49.225.766		56.392.513		15.510.642		27.50%		64.736.408		206.51%		
			Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO ≤ 1 x 24 jam b. Jaringan FO ≤ 3 x 24 jam	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.01.0003	**Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah**			31.347.122		49.225.766		56.392.513		15.510.642		27.50%		64.736.408		206.51 %		
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	415 Unit		226 Unit		322 Unit		120 Unit		37.27 %		120 Unit		28.92 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			42.946.350		5.396.716		8.035.604		1.752.840		21.81%		7.149.556		16.65%		
			Persentase pengelolaan pusat data yang dipelihara dan dimonitoring	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi ≤ 1 x 24 jam	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02.0001	**Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**			498.811		398.673		388.292		118.789		30.59%		517.462		103.74 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	58 Dokumen		58 Dokumen		58 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02.0003	**Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah**			5.641.236		776.329		3.828.793		251.099		6.56%		1.027.429		18.21 %		
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		100.00 %		2 Unit		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02.0007	**Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik**			5.046.132		1.509.581		1.396.476		462.153		33.09%		1.971.734		39.07 %		
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang	190 Unit		190 Unit		190 Unit		190 Unit		100.00 %		190 Unit		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Dikembangkan																
	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			31.760.170		2.712.133		2.422.042		920.799		38.02%		3.632.932		11.44 %		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	58 Dokumen		58 Dokumen		58 Dokumen		31 Dokumen		53.45 %		31 Dokumen		53.45 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																	
72	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			40.889.705		28.624.185		28.547.826		10.199.152		35.73%		38.823.336		94.95%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%		93.61 %		91%		94.14 %		103.45 %		94.14 %		101.23 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			34.133.950		24.028.728		25.309.323		9.268.594		36.62%		33.297.321		97.55%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			34.133.950		24.028.728		25.309.323		9.268.594		36.62%		33.297.321		97.55 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/bulan		81 Orang/bulan		98 Orang/bulan		94 Orang/bulan		95.92 %		94 Orang/bulan		111.90 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.755.756		4.595.457		3.238.502		930.558		28.73%		5.526.015		81.80%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
			Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			5.759.388		4.120.217		2.715.807		852.254		31.38%		4.972.471		86.34 %		
			Jumlah Laporan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Koperasi	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan															Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			996.368		475.240		522.695		78.304		14.98%		553.544		55.56 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
73	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			778.729		270.194		238.445		76.362		32.02%		346.556		44.50%		
			Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam	44%		23.13 %		30%		24.58 %		81.93 %		24.58 %		55.86 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			778.729		270.194		238.445		76.362		32.02%		346.556		44.50%		
			Jumlah koperasi yang mengajukan permohonan izin usaha simpan pinjam	30 koperasi		30 koperasi		30 koperasi		12 koperasi		40.00 %		12 koperasi		40.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			778.729		270.194		238.445		76.362		32.02%		346.556		44.50 %		
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	30 Unit Usaha		30 Unit Usaha		30 Unit Usaha		12 Unit Usaha		40.00 %		12 Unit Usaha		40.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
74	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			1.063.751		708.854		691.574		298.264		43.13%		1.007.118		94.68%		
			Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)	71%		85.06 %		69%		100%		144.93 %		100%		140.85 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan			1.063.751		708.854		691.574		298.264		43.13%		1.007.118		94.68%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota																	
			Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan	415 koperasi		415 koperasi		415 koperasi		160 koperasi		38.55 %		160 koperasi		38.55 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.03.2.01.0004	**Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota**			1.063.751		708.854		691.574		298.264		43.13%		1.007.118		94.68 %		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	415 Unit Usaha		415 Unit Usaha		415 Unit Usaha		160 Unit Usaha		38.55 %		160 Unit Usaha		38.55 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
75	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**			565.398		168.281		370.535		149.360		40.31%		317.641		56.18%		
			Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.	72%		29.32 %		43%		29.32 %		68.19 %		29.32 %		40.72 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-
	2.17.05.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**			565.398		168.281		370.535		149.360		40.31%		317.641		56.18%		
			Jumlah target yang ditetapkan oleh kementerian sebagai penerima manfaat	103 Orang		103 Orang		103 Orang		103 Orang		100.00 %		103 Orang		100.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.05.2.01.0001	**Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi**			565.398		168.281		370.535		149.360		40.31%		317.641		56.18 %		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	103 Orang		103 Orang		103 Orang		103 Orang		100.00 %		103 Orang		100.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
76	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**			559.292		426.005		502.559		128.094		25.49%		554.099		99.07%		
			Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha	100%		40.00 %		60%		40%		66.67 %		40%		40.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-
	2.17.06.2.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan**			559.292		426.005		502.559		128.094		25.49%		554.099		99.07%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha koperasi	83 koperasi		83 koperasi		83 koperasi		0 koperasi		0.00 %		0 koperasi		0.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.06.2.01.0005	**Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha**			559.292		426.005		502.559		128.094		25.49%		554.099		99.07 %		
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	83 Unit Usaha		83 Orang		83 Unit Usaha		0 Unit Usaha		0.00 %		0 Unit Usaha		0.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
77	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**			3.423.539		2.225.902		2.386.577		895.992		37.54%		3.121.894		91.19%		
			Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha	50%		21.03 %		29.86 %		21.03 %		70.43 %		21.03 %		42.06 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-
			Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya	100%		93.88 %		100%		71.43 %		71.43 %		71.43 %		71.43 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-
	2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**			3.423.539		2.225.902		2.386.577		895.992		37.54%		3.121.894		91.19%		
			Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan	136 Orang		136 Orang		136 Orang		59 Orang		43.38 %		59 Orang		43.38 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
			Jumlah sentra usaha yang pelaku usaha mikro nya mendapatkan fasilitasi pembinaan	9 sentra		10 sentra		10 sentra		5 sentra		50.00 %		5 sentra		55.56 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.07.2.01.00	**Pemberdayaan Kelembagaan**			3.048.602		1.970.095		2.136.573		823.763		38.56%		2.793.857		91.64 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	04	Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																	
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	9 Unit Usaha		10 Unit Usaha		10 Unit Usaha		5 Unit Usaha		50.00 %		5 Unit Usaha		55.56 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro			374.936		255.807		250.003		72.230		28.89%		328.037		87.49 %		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	136 Unit Usaha		136 Unit Usaha		136 Unit Usaha		59 Unit Usaha		43.38 %		59 Unit Usaha		43.38 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
78	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			1.548.127		1.448.109		1.994.566		397.173		19.91%		1.845.282		119.19%		
			Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya	100%		66.68 %		76%		16.24 %		21.37 %		16.24 %		16.24 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil			1.548.127		1.448.109		1.994.566		397.173		19.91%		1.845.282		119.19%		
			Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pembinaan untuk meningkatkan kinerja usaha	500 orang		500 orang		500 orang		200 orang		40.00 %		200 orang		40.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro			1.548.127		1.448.109		1.994.566		397.173		19.91%		1.845.282		119.19 %		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	500 Unit Usaha		500 Unit Usaha		500 Unit Usaha		200 Unit Usaha		40.00 %		200 Unit Usaha		40.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																	
79	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.852.455		12.288.100		14.689.709		4.805.558		32.71%		17.093.658		107.83%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%		92.68 %		91%		94.71 %		104.08 %		94.71 %		101.84 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.545.528		9.656.813		10.656.390		3.807.576		35.73%		13.464.389		99.40%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			13.545.528		9.656.813		10.656.390		3.807.576		35.73%		13.464.389		99.40 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan		27 Orang/bulan		40 Orang/bulan		34 Orang/bulan		85.00 %		34 Orang/bulan		125.93 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			2.306.927		2.631.287		4.033.319		997.982		24.74%		3.629.269		157.32%		
			Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			2.125.937		2.553.849		3.896.332		953.055		24.46%		3.506.904		164.96 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.08.0003	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			180.990		77.438		136.987		44.927		32.80%		122.365		67.61 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
80	2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**			665.825		472.905		489.288		174.685		35.70%		647.589		97.26%		
			Jumlah Investor PMA/PMDN	230 Perusahaan		170.00 Perusahaan		190 Perusahaan		13 Perusahaan		6.84 %		13 Perusahaan		5.65 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
	2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**			665.825		472.905		489.288		174.685		35.70%		647.589		97.26%		
			Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta	78%		77.4 %		74%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Dinas Penanaman	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Potensi dan Peluang Usaha															Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			665.825		472.905		489.288		174.685		35.70%		647.589		97.26 %		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
81	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			738.216		539.336		639.855		91.511		14.30%		630.846		85.46%		
			Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	60%		59.67 %		55%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			738.216		539.336		639.855		91.511		14.30%		630.846		85.46%		
			Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	300 Calon Investor / Investor		305 Calon Investor / Investor		250 Calon Investor / Investor		51 Calon Investor / Investor		20.40 %		51 Calon Investor / Investor		17.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			738.216		539.336		639.855		91.511		14.30%		630.846		85.46 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		1 Dokumen		33.33 %		1 Dokumen		33.33 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
82	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			5.864.492		3.909.862		3.298.629		1.280.015		38.80%		5.189.877		88.50%		
			Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			5.864.492		3.909.862		3.298.629		1.280.015		38.80%		5.189.877		88.50%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah kegiatan usaha yang ijin usahanya dilakukan pemantauan	12000 Kegiatan usaha		12373 Kegiatan usaha		11500 Kegiatan usaha		3902 Kegiatan usaha		33.93 %		3902 Kegiatan usaha		32.52 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan	100000 berkas		98030 berkas		90000 berkas		48995 berkas		54.44 %		48995 berkas		49.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.04.2.01.0008	**Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko**			1.092.027		801.041		677.769		262.509		38.73%		1.063.549		97.39 %		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	12.000 Kegiatan Usaha		12373 Kegiatan Usaha		11500 Kegiatan Usaha		3902 Kegiatan Usaha		33.93 %		3902 Kegiatan Usaha		32,516.67 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.04.2.01.0006	**Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik**			4.772.465		3.108.821		2.620.860		1.017.507		38.82%		4.126.328		86.46 %		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	16.000 Pelaku Usaha		10267 Pelaku Usaha		12000 Pelaku Usaha		4215 Pelaku Usaha		35.13 %		4215 Pelaku Usaha		26,343.75 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
83	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**			1.056.164		837.464		705.537		202.535		28.71%		1.039.999		98.47%		
			Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis	46%		45.73 %		44%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
	2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			1.056.164		837.464		705.537		202.535		28.71%		1.039.999		98.47%		
			Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan	1500 perusahaan		1230 perusahaan		1300 perusahaan		683 perusahaan		52.54 %		683 perusahaan		45.53 %		Dinas Penanaman Modal dan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek															Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			283.670		225.005		174.442		264		0.15%		225.269		79.41 %		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	290 Pelaku Usaha		293 Pelaku Usaha		270 Pelaku Usaha		0 Pelaku Usaha		0.00 %		0 Pelaku Usaha		0.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal			772.494		612.459		531.095		202.271		38.09%		814.731		105.47 %		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	2960 Kegiatan Usaha		3073 Kegiatan Usaha		2900 Kegiatan Usaha		1068 Kegiatan Usaha		36.83 %		1068 Kegiatan Usaha		36.08 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
84	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			377.020		229.449		205.326		65.150		31.73%		294.599		78.14%		
			jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	20 lembaga		20.00 lembaga		20 lembaga		6 lembaga		30.00 %		6 lembaga		30.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			377.020		229.449		205.326		65.150		31.73%		294.599		78.14%		
			Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	500 perusahaan		387 perusahaan		400 perusahaan		199 perusahaan		49.75 %		199 perusahaan		39.80 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			377.020		229.449		205.326		65.150		31.73%		294.599		78.14 %		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		1 Dokumen		25.00 %		1 Dokumen		25.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan															Terpadu Satu Pintu	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
85	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			50.957.792		38.293.638		48.930.194		21.310.060		43.55%		59.603.698		116.97%		
			Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	28%		22.12 %		24%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
			Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	47.98 %		70.78 %		47.23 %		10.02 %		21.22 %		10.02 %		20.88 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
			Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri	28%		23.31 %		24%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			50.957.792		38.293.638		48.930.194		21.310.060		43.55%		59.603.698		116.97%		
			Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Pemuda Pelopor, Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja dan Pemuda Pasukan Pengibar Bendera	24 jenis		23 jenis		23 jenis		6 jenis		26.09 %		6 jenis		25.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Daya Saing Wira Usaha Pemula	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		100.00 %		2 jenis		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Kepada Siswa/Siswi SMA/SMK Sederajat dan Mahasiswa/Mahasiswi Berprestasi	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		100.00 %		1 laporan		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan			1.715.027		397.176		406.098		119.237		29.36%		516.413		30.11 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	820 Orang		825 Orang		825 Orang		310 Orang		37.58 %		310 Orang		37.80 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.02.2.01.0002	**Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula**			1.758.202		544.906		776.871		159.027		20.47%		703.932		40.04 %		
			Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	500 Orang		500 Orang		700 Orang		191 Orang		27.29 %		191 Orang		38.20 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.02.2.01.0007	**Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi**			45.009.330		35.965.966		46.224.739		20.534.940		44.42%		56.500.906		125.53 %		
			Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	15849 Orang		3186 Orang		3500 Orang		3064 Orang		87.54 %		3064 Orang		19.33 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.02.2.01.0008	**Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda**			2.475.234		1.385.591		1.522.486		496.855		32.63%		1.882.446		76.05 %		
			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	810 Orang		925 Orang		925 Orang		505 Orang		54.59 %		505 Orang		62.35 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
86	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			99.950.462		77.204.689		64.078.734		4.879.548		7.61%		82.084.238		82.12%		
			Jumlah prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	205 medali		398.00 medali		185 medali		0 medali		0.00 %		0 medali		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
			Persentase Penambahan dan Peningkatan Fasilitas Olahraga	28%		17.00 %		18%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
	2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan**			24.739.225		9.178.365		19.851.529		153.445		0.77%		9.331.810		37.72%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah wilayah yang memperoleh penambahan prasarana olahraga	9 kecamatan		10 kecamatan		5 kecamatan		2 kecamatan		40.00 %		2 kecamatan		22.22 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota			24.739.225		9.178.365		19.851.529		153.445		0.77%		9.331.810		37.72 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	84 Unit		30 Unit		24 Unit		2 Unit		8.33 %		2 Unit		2.38 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			41.576.316		44.945.918		20.494.230		877.423		4.28%		45.823.341		110.22%		
			Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina	45 cabang olahraga		49 cabang olahraga		45 cabang olahraga		0 cabang olahraga		0.00 %		0 cabang olahraga		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota			41.576.316		44.945.918		20.494.230		877.423		4.28%		45.823.341		110.22 %		
			Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	700 Orang		689 Orang		661 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			33.634.920		23.080.406		23.732.975		3.848.680		16.22%		26.929.086		80.06%		
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan Peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		0 dokumen		0.00 %		0 dokumen		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Jumlah Prasarana Olahraga yang Difasilitasi dan Dipelihara	166 lokasi		386 lokasi		405 lokasi		133 lokasi		32.84 %		133 lokasi		80.12 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan			27.850.024		20.597.916		20.415.188		3.781.880		18.52%		24.379.796		87.54 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Prasarana Olahraga Rekreasi																	
			Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	166 Unit		386 Unit		405 Unit		133 Unit		32.84 %		133 Unit		80.12 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.03.2.05.0001	**Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi**			5.784.896		2.482.490		3.317.787		66.800		2.01%		2.549.290		44.07 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	7 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**																	
87	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**			695.275		530.791		400.248		90.994		22.73%		621.785		89.43%		
			Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	-
	2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**			695.275		530.791		400.248		90.994		22.73%		621.785		89.43%		
			Jumlah sektor yang dianalisa	5 Sektor		5 Sektor		5 Sektor		5 Sektor		100.00 %		5 Sektor		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.20.02.2.01.0001	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral**			695.275		530.791		400.248		90.994		22.73%		621.785		89.43 %		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		4 Dokumen		33.33 %		4 Dokumen		33.33 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**																	
88	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**			7.177.846		5.312.643		4.869.625		1.690.913		34.72%		7.003.556		97.57%		
			Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	41%		22.41 %		27%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	-
	2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			4.474.291		3.537.959		3.258.148		1.155.643		35.47%		4.693.602		104.90%		
			Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi dan	3 kali/per hari		3.02 kali/per hari		3 kali/per hari		3 kali/per hari		100.00 %		3 kali/per hari		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Informatika																
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			4.474.291		3.537.959		3.258.148		1.155.643		35.47%		4.693.602		104.90 %		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	13 Perangkat Daerah		13 Perangkat Daerah		13 Perangkat Daerah		5 Perangkat Daerah		38.46 %		5 Perangkat Daerah		38.46 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			2.703.556		1.774.683		1.611.477		535.270		33.22%		2.309.954		85.44%		
			Jumlah kegiatan koordinasi komunikasi sandi antar PD yang diselenggarakan	6 Kali		6 Kali		6 Kali		6 Kali		100.00 %		6 Kali		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.703.556		1.774.683		1.611.477		535.270		33.22%		2.309.954		85.44 %		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	58 Perangkat Daerah		58 Perangkat Daerah		58 Perangkat Daerah		58 Perangkat Daerah		100.00 %		58 Perangkat Daerah		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
89	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			51.347.778		25.501.935		24.605.596		8.027.107		32.62%		33.529.041		65.30%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%		93.34 %		91%		94.33 %		103.66 %		94.33 %		101.43 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			32.124.462		20.759.625		21.998.906		7.430.626		33.78%		28.190.251		87.75%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			32.124.462		20.759.625		21.998.906		7.430.626		33.78%		28.190.251		87.75 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan		72 Orang/bulan		81 Orang/bulan		77 Orang/bulan		95.06 %		77 Orang/bulan		106.94 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			19.223.316		4.742.310		2.606.690		596.481		22.88%		5.338.791		27.77%		
			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran.	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			17.544.444		4.330.266		1.926.567		522.472		27.12%		4.852.739		27.66 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.01.2.08.0003	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			1.678.872		412.043		680.123		74.009		10.88%		486.052		28.95 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
90	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			6.343.173		7.855.570		10.558.490		1.372.716		13.00%		9.228.286		145.48%		
			Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal	100%		70.00 %		80%		22.5 %		28.13 %		22.5 %		22.50 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
	2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			6.343.173		7.855.570		10.558.490		1.372.716		13.00%		9.228.286		145.48%		
			Jumlah pelaksanaan tampilan pemanfaatan budaya daerah	480 kali		521 kali		460 kali		137 kali		29.78 %		137 kali		28.54 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.02.2.01.0001	**Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan**			6.343.173		7.855.570		10.558.490		1.372.716		13.00%		9.228.286		145.48 %		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek		2 Objek		2 Objek		2 Objek		100.00 %		2 Objek		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
91	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN**			2.443.046		1.157.731		1.423.167		313.803		22.05%		1.471.534		60.23%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		KESENIAN TRADISIONAL																	
			Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	62.00 %		59.86 %		60.00 %		59.86 %		99.77 %		59.86 %		96.55 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
	2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			2.443.046		1.157.731		1.423.167		313.803		22.05%		1.471.534		60.23%		
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian tradisional	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		5 dokumen		41.67 %		5 dokumen		41.67 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.03.2.01.0001	**Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional**			2.443.046		1.157.731		1.423.167		313.803		22.05%		1.471.534		60.23 %		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	973 Orang		927 Orang		895 Orang		1233 Orang		137.77 %		1233 Orang		126.72 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
92	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**			1.292.538		1.128.486		1.063.609		23.200		2.18%		1.151.686		89.10%		
			Persentase siswa yang memahami materi sejarah	80%		75.13 %		76%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
	2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			1.292.538		1.128.486		1.063.609		23.200		2.18%		1.151.686		89.10%		
			Jumlah Pelaksanaan Event yang bertema sejarah dan kepahlawanan	10 kali		10 kali		10 kali		0 kali		0.00 %		0 kali		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.04.2.01.0003	**Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah**			1.292.538		1.128.486		1.063.609		23.200		2.18%		1.151.686		89.10 %		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		1 Dokumen		25.00 %		1 Dokumen		25.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
93	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			1.514.094		1.044.957		1.090.715		325.131		29.81%		1.370.088		90.49%		
			Persentase cagar budaya	92.04 %		96.99 %		92.04 %		29.32 %		31.86 %		29.32 %		31.86 %		Dinas	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian															Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			1.514.094		1.044.957		1.090.715		325.131		29.81%		1.370.088		90.49%		
			Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian	289 lokasi		270 lokasi		275 lokasi		118 lokasi		42.91 %		118 lokasi		40.83 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya			1.514.094		1.044.957		1.090.715		325.131		29.81%		1.370.088		90.49 %		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	289 Objek		270 Objek		275 Objek		118 Objek		42.91 %		118 Objek		40.83 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
94	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			3.477.181		8.343.870		9.279.251		2.834.296		30.54%		11.178.165		321.47%		
			Persentase museum yang berhasil dikembangkan	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			3.477.181		8.343.870		9.279.251		2.834.296		30.54%		11.178.165		321.47%		
			Jumlah museum dan bangunan sejarah yang dikelola	8 lokasi		9 lokasi		9 lokasi		9 lokasi		100.00 %		9 lokasi		112.50 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu			223.926		416.154		450.849		14.694		3.26%		430.848		192.41 %		
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	730 Unit		747 Unit		730 Unit		300 Unit		41.10 %		300 Unit		41.10 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum			433.529		800.187		807.609		96.037		11.89%		896.224		206.73 %		
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	8 Unit		8 Unit		8 Unit		1 Unit		12.50 %		1 Unit		12.50 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			135.342		226.497		241.542		3.463		1.43%		229.961		169.91 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		100.00 %		2 Unit		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum			2.684.384		6.901.031		7.779.251		2.720.101		34.97%		9.621.132		358.41 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	8 Unit		9 Unit		9 Unit		9 Unit		100.00 %		9 Unit		112.50 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																	
95	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			19.264.534		16.815.246		19.190.756		6.398.392		33.34%		23.213.638		120.50%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99.02 %		97.53 %		97.04 %		98.61 %		101.62 %		98.61 %		99.59 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.905.797		14.484.525		16.937.802		5.561.952		32.84%		20.046.477		126.03%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.905.797		14.484.525		16.937.802		5.561.952		32.84%		20.046.477		126.03 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan		41 Orang/bulan		74 Orang/bulan		69 Orang/bulan		93.24 %		69 Orang/bulan		153.33 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			227.838		84.592		230.770		25.523		11.06%		110.116		48.33%		
			Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			227.838		84.592		230.770		25.523		11.06%		110.116		48.33 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket		10 Paket		6 Paket		60.00 %		6 Paket		60.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			754.718		208.663		358.130		65.708		18.35%		274.370		36.35%		
			Persentase Pengadaan	100%		100%		100%		100%		100.00		100%		100.00 %		Dinas	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									%						Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			754.718		208.663		358.130		65.708		18.35%		274.370		36.35 %		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit		19 Unit		17 Unit		25 Unit		147.06 %		25 Unit		178.57 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.376.181		2.037.467		1.664.054		745.208		44.78%		2.782.675		117.11%		
			Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			214.853		291.337		320.280		93.751		29.27%		385.087		179.23 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.161.328		1.746.130		1.343.774		651.458		48.48%		2.397.588		110.93 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
96	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			32.318.230		16.438.506		13.995.108		5.684.517		40.62%		22.123.023		68.45%		
			Persentase pemenuhan koleksi buku baru sesuai dengan hasil analisis kebutuhan	100%		80.09 %		59.92 %		80.09 %		133.66 %		80.09 %		80.09 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
			Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	100%		69.95 %		78.14 %		69.95 %		89.52 %		69.95 %		69.95 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
			Persentase event literasi yang diselenggarakan	100%		38.80 %		58.8 %		43.92 %		74.69 %		43.92 %		43.92 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			31.664.882		15.996.440		13.531.722		5.545.142		40.98%		21.541.582		68.03%		
			Jumlah perpustakaan / layanan baca yang dibina	230 Lembaga		271 Lembaga		200 Lembaga		306 Lembaga		153.00 %		306 Lembaga		133.04 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Tingkat Kepuasan Pemustaka	83.5 nilai		93.31 nilai		82.5 nilai		96.15 nilai		116.55 %		96.15 nilai		115.15 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Jenis buku yang disediakan	2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		0 Jenis		0.00 %		0 Jenis		0.00 %		Dinas Perpustakaan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		dan Kearsipan	
	2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota			241.070		212.211		285.443		130.366		45.67%		342.577		142.11 %		
			Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	200 Perpustakaan		203 Perpustakaan		200 Perpustakaan		200 Perpustakaan		100.00 %		200 Perpustakaan		100.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			76.506		87.479		56.875		26.275		46.20%		113.754		148.69 %		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	30 Perpustakaan		68 Perpustakaan		30 Perpustakaan		106 Perpustakaan		353.33 %		106 Perpustakaan		353.33 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka			1.665.490		334.788		1.181.932		83.332		7.05%		418.119		25.10 %		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1505 Eksemplar		1797 Eksemplar		1500 Eksemplar		0 Eksemplar		0.00 %		0 Eksemplar		0.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			29.394.765		15.129.773		11.787.099		5.198.194		44.10%		20.327.967		69.16 %		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1505 Perpustakaan		1498 Perpustakaan		1500 Perpustakaan		686 Perpustakaan		45.73 %		686 Perpustakaan		45.58 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			287.051		232.189		220.373		106.975		48.54%		339.164		118.15 %		
			Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Orang		506 Orang		500 Orang		511 Orang		102.20 %		511 Orang		102.20 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			653.349		442.066		463.386		139.376		30.08%		581.442		88.99%		
			Jumlah bibit penulis dan pendongeng	7429 orang		4477 orang		5461 orang		4869 orang		89.16 %		4869 orang		65.54 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.23.02.2.02.0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat			653.349		442.066		463.386		139.376		30.08%		581.442		88.99 %		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	260 Lokus		245 Lokus		250 Lokus		126 Lokus		50.40 %		126 Lokus		48.46 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																	
97	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			3.079.365		3.306.859		2.752.627		1.114.886		40.50%		4.421.745		143.59%		
			Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	100%		64.55 %		76.21 %		69.52 %		91.22 %		69.52 %		69.52 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
			Persentase jumlah jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	17.98 %		16.04 %		14.07 %		12.75 %		90.62 %		12.75 %		70.91 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
			Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	30.01 %		29.64 %		28.84 %		28.91 %		100.24 %		28.91 %		96.33 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			943.857		832.007		653.118		231.812		35.49%		1.063.819		112.71%		
			Jumlah arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsipnya	9000 item		9000 item		9000 item		3750 item		41.67 %		3750 item		41.67 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Jumlah PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup	66 lembaga		48 lembaga		54 lembaga		0 lembaga		0.00 %		0 lembaga		0.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			783.408		566.115		437.530		141.815		32.41%		707.929		90.37 %		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	471 Berkas		471 Berkas		471 Berkas		195 Berkas		41.40 %		195 Berkas		41.40 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			160.449		265.892		215.588		89.997		41.75%		355.890		221.81 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	66 Laporan		66 Laporan		66 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			1.743.109		1.891.796		1.534.964		650.022		42.35%		2.541.818		145.82%		
			Arsip yang dialih mediakan	8640 Lembar		8640 Lembar		8640 Lembar		3600 Lembar		41.67 %		3600 Lembar		41.67 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			1.743.109		1.891.796		1.534.964		650.022		42.35%		2.541.818		145.82 %		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi,	300 Arsip		300 Arsip		300 Arsip		120 Arsip		40.00 %		120 Arsip		40.00 %		Dinas Perpustakaan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis															dan Kearsipan	
	2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**			392.398		583.056		564.545		233.052		41.28%		816.108		207.98%		
			Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	9200 item		8205 item		7200 item		6768 item		94.00 %		6768 item		73.57 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			PD, Unit Kerja, BUMD yang mendapatkan evaluasi sistem kearsipan	69 Lembaga		70 Lembaga		70 Lembaga		24 Lembaga		34.29 %		24 Lembaga		34.78 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.03.0002	**Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota**			152.577		186.113		173.869		62.625		36.02%		248.738		163.02 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	69 Laporan		70 Laporan		70 Laporan		24 Laporan		34.29 %		24 Laporan		34.78 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.03.0001	**Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN**			239.821		396.943		390.677		170.427		43.62%		567.370		236.58 %		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 Pengguna		3080 Pengguna		1200 Pengguna		1566 Pengguna		130.50 %		1566 Pengguna		1,566.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
98	2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**			178.274		66.100		83.653		21.800		26.06%		87.900		49.31%		
			Persentase arsip yang dinilai dan direkomendasikan untuk dimusnahkan	100%		51.95 %		59.97 %		12.99 %		21.66 %		12.99 %		12.99 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
	2.24.03.2.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**			178.274		66.100		83.653		21.800		26.06%		87.900		49.31%		
			Dokumen proses penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang disusun	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.03.2.01.0001	**Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**			178.274		66.100		83.653		21.800		26.06%		87.900		49.31 %		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan	880 Arsip		880 Arsip		880 Arsip		220 Arsip		25.00 %		220 Arsip		25.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
99	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			4.094.028		2.334.352		1.531.216		785.030		51.27%		3.119.382		76.19%		
			Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai	50%		41.43 %		40%		7.46 %		18.65 %		7.46 %		14.92 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			4.094.028		2.334.352		1.531.216		785.030		51.27%		3.119.382		76.19%		
			Jumlah laporan penyediaan sarana usaha perikanan tangkap	1 laporan		1 laporan		1 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap			4.094.028		2.334.352		1.531.216		785.030		51.27%		3.119.382		76.19 %		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	70 Unit		55 Unit		60 Unit		15 Unit		25.00 %		15 Unit		21.43 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
100	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			1.687.007		1.519.178		1.363.903		295.765		21.69%		1.814.944		107.58%		
			Jumlah pembudidaya perikanan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	40 orang/kelompok		25.00 orang/kelompok		30 orang/kelompok		25 orang/kelompok		83.33 %		25 orang/kelompok		62.50 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			379.056		385.873		310.009		97.509		31.45%		483.382		127.52%		
			Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan	40 kali		34 kali		36 kali		10 kali		27.78 %		10 kali		25.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			379.056		385.873		310.009		97.509		31.45%		483.382		127.52 %		
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta	40 Kelompok		25 Kelompok		30 Kelompok		7 Kelompok		23.33 %		7 Kelompok		17.50 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			1.307.951		1.133.305		1.053.894		198.256		18.81%		1.331.561		101.81%		
			Jumlah laporan penyediaan sarana budidaya ikan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.307.951		1.133.305		1.053.894		198.256		18.81%		1.331.561		101.81 %		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	68 Unit		60 Unit		58 Unit		15 Unit		25.86 %		15 Unit		22.06 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
101	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			45.590.707		179.800		186.552		56.350		30.21%		236.150		0.52%		
			Jumlah kasus nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan	0 kasus		0.00 kasus		0 kasus		0 kasus		100.00 %		0 kasus		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota			45.590.707		179.800		186.552		56.350		30.21%		236.150		0.52%		
			Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap	12 Kali		12 Kali		12 Kali		5 Kali		41.67 %		5 Kali		41.67 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota			45.590.707		179.800		186.552		56.350		30.21%		236.150		0.52 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		5 Dokumen		41.67 %		5 Dokumen		41.67 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
102	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			820.823		1.842.281		1.622.046		597.321		36.83%		2.439.601		297.21%		
			Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif	80%		65.00 %		70%		70%		100.00 %		70%		87.50 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/			820.823		1.842.281		1.622.046		597.321		36.83%		2.439.601		297.21%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Kota																	
			Jumlah sentra ikan yang dikelola	3 sentra		2 sentra		2 sentra		0 sentra		0.00 %		0 sentra		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			820.823		1.842.281		1.622.046		597.321		36.83%		2.439.601		297.21 %		
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	250 Pelaku Usaha		180 Pelaku Usaha		180 Pelaku Usaha		0 Pelaku Usaha		0.00 %		0 Pelaku Usaha		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																	
103	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			6.263.210		6.190.044		7.722.992		2.406.360		31.16%		8.596.404		137.25%		
			Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	78.57 %		42.86 %		50%		42.86 %		85.72 %		42.86 %		54.55 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			5.122.716		5.370.679		6.588.526		2.103.755		31.93%		7.474.434		145.91%		
			Jumlah lokasi daya tarik wisata yang dikelola	2 lokasi		2 lokasi		2 lokasi		2 lokasi		100.00 %		2 lokasi		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			5.122.716		5.370.679		6.588.526		2.103.755		31.93%		7.474.434		145.91 %		
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi		2 Lokasi		2 Lokasi		2 Lokasi		100.00 %		2 Lokasi		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			1.140.494		819.365		1.134.466		302.605		26.67%		1.121.970		98.38%		
			Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	2 lokasi		1 lokasi		1 lokasi		0 lokasi		0.00 %		0 lokasi		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata			150.212		177.699		150.876		23.300		15.44%		200.999		133.81 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	60 Laporan		60 Dokumen		60 Laporan		32 Laporan		53.33 %		32 Laporan		53.33 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.02.2.03.00 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			598.043		510.566		839.590		256.605		30.56%		767.171		128.28 %		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi		1 Lokasi		1 Lokasi		0 Lokasi		0.00 %		0 Lokasi		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.02.2.03.00 02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			392.238		131.100		144.000		22.700		15.76%		153.800		39.21 %		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
104	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			6.583.809		4.521.173		5.969.687		398.492		6.68%		4.919.665		74.72%		
			Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata	47%		103.88 %		43.5 %		0%		0.00 %		0%		0%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			6.583.809		4.521.173		5.969.687		398.492		6.68%		4.919.665		74.72%		
			Jumlah jenis kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		100.00 %		2 jenis		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.03.2.01.00 06	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			6.583.809		4.521.173		5.969.687		398.492		6.68%		4.919.665		74.72 %		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan		2 Laporan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100.00 %		2 Kegiatan		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
10	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN			2.802.104		1.779.764		1.742.811		436.706		25.06%		2.216.469		79.10%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
5		**SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**																	
			Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder pariwisata yang dilaksanakan 20 kesepakatan	100%		40.00 %		60%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
			Persentase peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata	28%		22.22 %		24%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
			Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan	100%		100.00 %		80%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
	3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**			822.352		544.379		545.984		126.771		23.22%		671.150		81.61%		
			Jumlah jenis kelompok pemangku kepentingan pariwisata yang dilakukan penjajakan kerjasama	2 jenis		3 jenis		2 jenis		1 jenis		50.00 %		1 jenis		50.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Jumlah laporan pelaksanaan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat	1 laporan		1 laporan		1 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.05.2.01.0009	**Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata**			424.235		290.831		259.924		70.944		27.29%		361.775		85.28 %		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	300 Orang		250 Orang		250 Orang		134 Orang		53.60 %		134 Orang		44.67 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.05.2.01.0008	**Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI**			398.118		253.548		286.060		55.827		19.52%		309.375		77.71 %		
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	80 Orang		72 Orang		60 Orang		35 Orang		58.33 %		35 Orang		43.75 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	3.26.05.2.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**			1.979.752		1.235.384		1.196.827		309.935		25.90%		1.545.319		78.06%		
			Jumlah produk ekonomi kreatif yang dihasilkan	5 Produk		3 Produk		4 Produk		0 Produk		0.00 %		0 Produk		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.05.2.02.0001	**Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif**			1.979.752		1.235.384		1.196.827		309.935		25.90%		1.545.319		78.06 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	250 Orang		150 Orang		220 Orang		84 Orang		38.18 %		84 Orang		33.60 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**																	
106	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			7.660.760		4.737.353		6.901.826		1.116.953		16.18%		5.854.306		76.42%		
			Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	45 Orang		30.00 Orang		35 Orang		30 Orang		85.71 %		30 Orang		66.67 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
	3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**			6.792.603		2.423.739		3.651.510		565.916		15.50%		2.989.654		44.01%		
			Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pembudidaya Pekarangan	10 Jenis		10 Jenis		10 Jenis		0 Jenis		0.00 %		0 Jenis		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.02.2.01.0002	**Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian**			6.792.603		2.293.845		3.131.510		534.952		17.08%		2.828.797		41.65 %		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.02.2.01.0001	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi**			0		129.894		520.000		30.964		5.95%		160.858		0.00 %		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	N/A		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		N/A		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.02.2.03	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**			868.157		2.313.615		3.250.315		551.037		16.95%		2.864.652		329.97%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Jenis Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Jenis		6 Jenis		6 Jenis		4 Jenis		66.67 %		4 Jenis		66.67 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil			868.157		2.313.615		3.250.315		551.037		16.95%		2.864.652		329.97 %		
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
107	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			21.217.227		10.184.831		12.935.181		3.074.904		23.77%		13.259.735		62.50%		
			Peningkatan luas taman hutan raya yang dikelola sebagai pendukung cadangan pangan masyarakat	2 Ha		2.00 Ha		2 Ha		0 Ha		0.00 %		0 Ha		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
			Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	35 Lokasi		19.00 Lokasi		24 Lokasi		20 Lokasi		83.33 %		20 Lokasi		57.14 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			1.309.313		5.136.309		6.242.887		1.770.200		28.36%		6.906.509		527.49%		
			Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pengelola lahan aset untuk budidaya pertanian	4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		0 Jenis		0.00 %		0 Jenis		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			1.309.313		5.136.309		6.242.887		1.770.200		28.36%		6.906.509		527.49 %		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	6 Laporan		16 Laporan		16 Laporan		12 Laporan		75.00 %		12 Laporan		200.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			19.907.914		5.048.522		6.692.293		1.304.703		19.50%		6.353.226		31.91%		
			Jumlah laporan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	13 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		100.00 %		2 Laporan		15.38 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			19.907.914		5.048.522		6.692.293		1.304.703		19.50%		6.353.226		31.91 %		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	13 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		100.00 %		2 Unit		15.38 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
108	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN			1.140.798		1.203.319		2.249.464		598.582		26.61%		1.801.901		157.95%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER																	
			Jumlah pembudidaya ternak yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	8 kelompok		5.00 kelompok		6 kelompok		0 kelompok		0.00 %		0 kelompok		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
			Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	89.5 %		89.53 %		89.5 %		82.64 %		92.34 %		82.64 %		92.34 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
	3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**			845.362		996.499		1.095.950		419.286		38.26%		1.415.785		167.48%		
			Persentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan	80%		90.95 %		80%		88.75 %		110.94 %		88.75 %		110.94 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.04.2.01.0008	**Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			845.362		996.499		1.095.950		419.286		38.26%		1.415.785		167.48 %		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**			295.436		206.820		1.153.514		179.296		15.54%		386.116		130.69%		
			Jumlah pelaksanaan pendampingan unit usaha dan produk asal hewan	45 Unit		31 Unit		35 Unit		15 Unit		42.86 %		15 Unit		33.33 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.04.2.04.0010	**Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan**			295.436		206.820		1.153.514		179.296		15.54%		386.116		130.69 %		
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	12 Unit Usaha		12 Laporan		35 Unit Usaha		15 Unit Usaha		42.86 %		15 Unit Usaha		125.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
109	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**			113.553		42.955		55.288		14.000		25.32%		56.955		50.16%		
			Persentase Perizinan usaha lingkup pertanian yang diproses	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
	3.27.06.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			113.553		42.955		55.288		14.000		25.32%		56.955		50.16%		
			Persentase ketepatan waktu penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan	80%		100%		80%		100%		125.00 %		100%		125.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			teknis izin usaha sektor pertanian dan perikanan															Pertanian	
	3.27.06.2.01.00 02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian			113.553		42.955		55.288		14.000		25.32%		56.955		50.16 %		
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		5 Dokumen		41.67 %		5 Dokumen		41.67 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
110	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			2.709.423		2.001.952		2.254.999		724.912		32.15%		2.726.864		100.64%		
			Tingkat Produktivitas Pertanian	6.05 ton/ha		6.56 ton/ha		5.9 ton/ha		7.09 ton/ha		120.17 %		7.09 ton/ha		117.19 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
			Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			2.709.423		2.001.952		2.254.999		724.912		32.15%		2.726.864		100.64%		
			Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani	7 kali		7 kali		7 kali		2 kali		28.57 %		2 kali		28.57 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Jumlah penyuluh yang mengikuti bimtek/pelatihan	25 orang		26 orang		25 orang		25 orang		100.00 %		25 orang		100.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.07.2.01.00 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			1.702.059		808.868		1.090.968		303.133		27.79%		1.112.001		65.33 %		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Unit		7 Unit		7 Unit		2 Unit		28.57 %		2 Unit		28.57 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.07.2.01.00 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			1.007.364		1.193.085		1.164.031		421.779		36.23%		1.614.863		160.31 %		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		100.00 %		1 Unit		100.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																	
111	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			1.879.526		837.993		1.019.655		297.173		29.14%		1.135.166		60.40%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan	96%		99.65 %		94%		96.49 %		102.65 %		96.49 %		100.51 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	3.30.02.2.01	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**			501.503		193.163		284.084		72.879		25.65%		266.042		53.05%		
			Jumlah Laporan Pemenuhan Komitmen Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.01.0001	**Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**			501.503		193.163		284.084		72.879		25.65%		266.042		53.05 %		
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	450 Dokumen		547 Dokumen		450 Dokumen		222 Dokumen		49.33 %		222 Dokumen		49.33 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.02	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**			585.879		200.679		286.758		81.341		28.37%		282.020		48.14%		
			Jumlah Laporan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.02.0001	**Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang**			585.879		200.679		286.758		81.341		28.37%		282.020		48.14 %		
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	60 Dokumen		200 Dokumen		60 Dokumen		70 Dokumen		116.67 %		70 Dokumen		116.67 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.03	**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri**			127.369		88.496		83.966		29.610		35.26%		118.106		92.73%		
			Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.03.0002	**Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri**			127.369		88.496		83.966		29.610		35.26%		118.106		92.73 %		
			Jumlah Dokumen yang	24 Dokumen		29 Dokumen		24 Dokumen		12 Dokumen		50.00 %		12 Dokumen		50.00 %		Dinas Koperasi	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri															Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.04	**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri**			127.369		33.600		42.600		11.200		26.29%		44.800		35.17%		
			Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.04.0002	**Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri**			127.369		33.600		42.600		11.200		26.29%		44.800		35.17 %		
			Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	24 Dokumen		29 Dokumen		24 Dokumen		12 Dokumen		50.00 %		12 Dokumen		50.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.05	**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**			537.406		322.055		322.247		102.143		31.70%		424.199		78.93%		
			Jumlah Laporan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.05.0001	**Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C**			537.406		322.055		322.247		102.143		31.70%		424.199		78.93 %		
			Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	40 Dokumen		88 Dokumen		40 Dokumen		22 Dokumen		55.00 %		22 Dokumen		55.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
112	3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**			4.968.209		4.499.354		3.755.736		1.727.022		45.98%		6.226.376		125.32%		
			Persentase pelaku usaha	100%		100.00 %		100%		100%		100.00		100%		100.00 %		Dinas Koperasi	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			distribusi perdagangan yang difasilitasi									%						Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.03.2.02	**Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**			4.968.209		4.499.354		3.755.736		1.727.022		45.98%		6.226.376		125.32%		
			Jumlah Laporan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.03.2.02.0001	**Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan**			4.968.209		4.499.354		3.755.736		1.727.022		45.98%		6.226.376		125.32 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	611 Dokumen		622 Dokumen		611 Dokumen		250 Dokumen		40.92 %		250 Dokumen		40.92 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
113	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**			1.309.691		759.349		652.607		232.372		35.61%		991.722		75.72%		
			Persentase intervensi ketersediaan komoditas	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-
	3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**			1.309.691		759.349		652.607		232.372		35.61%		991.722		75.72%		
			Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.04.2.02.0003	**Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota**			425.952		301.824		294.353		129.280		43.92%		431.103		101.21 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			883.738		457.526		358.254		103.093		28.78%		560.618		63.44 %		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
114	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			2.045.562		614.124		755.615		255.225		33.78%		869.349		42.50%		
			Persentase pelayanan tera yang tepat waktu	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			2.045.562		614.124		755.615		255.225		33.78%		869.349		42.50%		
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			1.898.815		509.165		649.996		218.316		33.59%		727.481		38.31 %		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	24290 Unit		23246 Unit		23340 Unit		10233 Unit		43.84 %		10233 Unit		42.13 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			146.747		104.959		105.618		36.909		34.95%		141.868		96.67 %		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1200 Orang		1264 Orang		1200 Orang		507 Orang		42.25 %		507 Orang		42.25 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
115	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			6.660.120		5.779.579		6.526.265		2.195.982		33.65%		7.975.561		119.75%		
			Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			6.660.120		5.779.579		6.526.265		2.195.982		33.65%		7.975.561		119.75%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah laporan usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	12 laporan		12 laporan		12 laporan		5 laporan		41.67 %		5 laporan		41.67 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			6.660.120		5.779.579		6.526.265		2.195.982		33.65%		7.975.561		119.75 %		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	5220 UMKM		5301 UMKM		5220 UMKM		1940 UMKM		37.16 %		1940 UMKM		37.16 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																	
116	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			589.753		852.656		670.300		167.668		25.01%		1.020.324		173.01%		
			Persentase pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan	26%		17.05 %		20%		2.8 %		14.00 %		2.8 %		10.77 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			589.753		852.656		670.300		167.668		25.01%		1.020.324		173.01%		
			Jumlah laporan pemberdayaan pelaku usaha	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			0		121.832		117.841		0		0.00%		121.832		0.00 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	N/A		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		N/A		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			589.753		730.824		552.459		167.668		30.35%		898.492		152.35 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		5 Dokumen		41.67 %		5 Dokumen		41.67 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
117	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			331.422		413.608		310.334		116.493		37.54%		530.101		159.95%		
			Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya	90%		100.00 %		85%		57.5 %		67.65 %		57.5 %		63.89 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Kerja	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			331.422		413.608		310.334		116.493		37.54%		530.101		159.95%		
			Jumlah laporan hasil pengawasan izin usaha	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota			331.422		413.608		310.334		116.493		37.54%		530.101		159.95 %		
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		5 Dokumen		41.67 %		5 Dokumen		41.67 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
118	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			213.589		204.471		239.600		94.000		39.23%		298.471		139.74%		
			Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung kebijakan perencanaan Industri	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			213.589		204.471		239.600		94.000		39.23%		298.471		139.74%		
			Laporan penyusunan dokumen data pelaku usaha dan analisis sektor industri, yang berlokasi di Kota surabaya	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			213.589		204.471		239.600		94.000		39.23%		298.471		139.74 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan,	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		5 Dokumen		41.67 %		5 Dokumen		41.67 %		Dinas Perindustrian	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)															dan Tenaga Kerja	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH																	
119	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			262.195.831		215.729.913		212.911.207		100.455.921		47.18%		316.185.834		120.59%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100%		95.00 %		100%		95.56 %		95.56 %		95.56 %		95.56 %		Sekretariat Daerah	-
			Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses ≤ 30 Hari Kerja	98%		99.96 %		94%		100%		106.38 %		100%		102.04 %		Sekretariat Daerah	-
			Persentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan	90%		100.00 %		85%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Sekretariat Daerah	-
			Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik	98%		100.00 %		98%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Sekretariat Daerah	-
			Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	-
			Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	-
			Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A	75%		100.00 %		69.44 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Sekretariat Daerah	-
			Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar.	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	-
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	-
	4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			91.628.677		61.560.357		64.418.503		23.482.341		36.45%		85.042.698		92.81%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			91.628.677		61.560.357		64.418.503		23.482.341		36.45%		85.042.698		92.81 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	157 Orang/bulan		168 Orang/bulan		203 Orang/bulan		192 Orang/bulan		94.58 %		192 Orang/bulan		122.29 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			4.083.838		1.378.544		860.057		156.975		18.25%		1.535.519		37.60%		
			Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 laporan		12 laporan		12 laporan		5 laporan		41.67 %		5 laporan		41.67 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.05.0002	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**			4.083.838		1.378.544		860.057		156.975		18.25%		1.535.519		37.60 %		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket		9 Paket		5 Paket		2 Paket		40.00 %		2 Paket		40.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			33.982.990		25.279.955		14.418.604		5.141.330		35.66%		30.421.284		89.52%		
			Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 laporan		12 laporan		12 laporan		5 laporan		41.67 %		5 laporan		41.67 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.07.0006	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**			33.982.990		25.279.955		14.418.604		5.141.330		35.66%		30.421.284		89.52 %		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1200 Unit		2569 Unit		1500 Unit		2482 Unit		165.47 %		2482 Unit		206.83 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			63.205.968		99.420.505		102.902.293		58.414.646		56.77%		157.835.151		249.72%		
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		98.63 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	
			Perentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan PD	100%		95.65 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	
			Persentase Ketersediaan	100%		100%		100%		100%		100.00		100%		100.00 %		Sekretariat	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran									%						Daerah	
	4.01.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			52.008.578		93.700.063		97.019.192		56.223.436		57.95%		149.923.500		288.27 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.08.0003	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			6.349.570		3.772.040		3.831.428		1.574.786		41.10%		5.346.827		84.21 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**			4.847.821		1.948.401		2.051.673		616.424		30.04%		2.564.825		52.91 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**			9.302.988		8.247.147		9.424.255		2.904.579		30.82%		11.151.727		119.87%		
			Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	
			Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.11.0004	**Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**			8.072.880		8.072.846		9.238.090		2.830.000		30.63%		10.902.846		135.06 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan		100.00 %		2 Orang/Bulan		100.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.11.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**			1.230.108		174.301		186.165		74.579		40.06%		248.881		20.23 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan		100.00 %		2 Orang/Bulan		100.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**			3.818.611		2.514.120		2.565.506		799.553		31.17%		3.313.673		86.78%		
			Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penerapan SAKIP	58 instansi		58 instansi		58 instansi		22 instansi		37.93 %		22 instansi		37.93 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah perangkat daerah yang didampingi	58 instansi		58 instansi		58 instansi		22 instansi		37.93 %		22 instansi		37.93 %		Sekretariat Daerah	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			penyusunan evaluasi kelembagaan dan/atau analisis jabatan/analisis beban kerja sesuai kelembagaan yang berlaku																
			Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang didampingi untuk peningkatan kualitas layanan	253 unit		253 unit		253 unit		253 unit		100.00 %		253 unit		100.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.13.0004	**Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana**			1.545.079		661.614		709.870		195.150		27.49%		856.764		55.45 %		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.13.0001	**Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan**			1.005.337		917.788		952.978		313.769		32.93%		1.231.557		122.50 %		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.13.0003	**Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi**			1.268.196		934.717		902.658		290.635		32.20%		1.225.352		96.62 %		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		1 Dokumen		50.00 %		1 Dokumen		50.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**			56.172.758		17.329.285		18.321.989		9.556.496		52.16%		26.885.782		47.86%		
			Jumlah laporan pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		5 laporan		41.67 %		5 laporan		41.67 %		Sekretariat Daerah	
			Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.14.0001	**Fasilitasi Keprotokolan**			54.169.994		16.566.422		17.542.202		9.335.765		53.22%		25.902.187		47.82 %		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.14.0002	**Fasilitasi Komunikasi Pimpinan**			2.002.763		762.863		779.787		220.731		28.31%		983.594		49.11 %		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Sekretariat Daerah	
120	4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			40.046.015		88.201.903		103.192.091		40.526.074		39.27%		128.727.977		321.45%		
			Kecepatan waktu rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat	14 hari		14.00 hari		14 hari		0 hari		200.00 %		0 hari		200.00 %		Sekretariat Daerah	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			SIMPROLAMAS yang di laporkan																
			Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya	100%		43.48 %		58.37 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Sekretariat Daerah	-
			Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan	100%		100.00 %		85%		100%		117.65 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	-
			Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan	100%		100.00 %		98.5 %		100%		101.52 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	-
			Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Sekretariat Daerah	-
			Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	-
			Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	-
			Persentase produk hukum yang disebarluaskan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	-
			Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	-
			Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi	100%		100.00 %		95%		100%		105.26 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	-
			Kecepatan waktu pelaporan outreach	2 hari		2.00 hari		2 hari		0 hari		200.00 %		0 hari		200.00 %		Sekretariat Daerah	-
			Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	100%		80.65 %		83.87 %		80.65 %		96.16 %		80.65 %		80.65 %		Sekretariat Daerah	-
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			14.579.943		5.793.231		7.094.849		2.151.208		30.32%		7.944.439		54.49%		
			Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah memahami materi pembinaan	185 Lembaga		80 Lembaga		108 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah pendataan batas wilayah kecamatan	31 Kecamatan		25 Kecamatan		26 Kecamatan		25 Kecamatan		96.15 %		25 Kecamatan		80.65 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		100.00 %		2 Dokumen		100.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			5.403.004		2.330.599		2.771.023		1.177.598		42.50%		3.508.197		64.93 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		100.00 %		2 Dokumen		100.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.01.00	Penataan Administrasi			4.813.183		1.900.597		2.184.083		654.429		29.96%		2.555.026		53.08 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	01	Pemerintahan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			4.363.756		1.562.034		2.139.744		319.181		14.92%		1.881.215		43.11 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			4.931.081		76.108.302		86.737.547		36.168.116		41.70%		112.276.418		2,276.91 %		
			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan evaluasi pengelolaan bina mental spiritual	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah kegiatan pelaksanaan outreach	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		0 Kegiatan		0.00 %		0 Kegiatan		0.00 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan pelayanan masyarakat pada Aplikasi SIMPROLAMAS	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		0 Kegiatan		0.00 %		0 Kegiatan		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			3.101.912		27.067.565		30.709.176		10.131.842		32.99%		37.199.407		1,199.24 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat			104.165		47.867.133		55.279.529		25.780.603		46.64%		73.647.735		70,702.64 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial			1.725.003		1.173.604		748.842		255.671		34.14%		1.429.275		82.86 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB																
	4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**			17.480.417		4.861.957		7.244.306		1.707.878		23.58%		6.569.835		37.58%		
			Jumlah produk hukum yang dipublikasi	60 produk hukum		104 produk hukum		60 produk hukum		32 produk hukum		53.33 %		32 produk hukum		53.33 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah permasalahan hukum yang ditangani	20 permasalahan hukum		20 permasalahan hukum		20 permasalahan hukum		6 permasalahan hukum		30.00 %		6 permasalahan hukum		30.00 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun	60 rancangan produk hukum		104 rancangan produk hukum		60 rancangan produk hukum		32 rancangan produk hukum		53.33 %		32 rancangan produk hukum		53.33 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.03.00 02	**Fasilitasi Bantuan Hukum**			8.163.200		1.651.831		1.974.624		607.151		30.75%		2.258.982		27.67 %		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20 Kasus		20 Kasus		20 Kasus		6 Kasus		30.00 %		6 Kasus		30.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.03.00 01	**Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah**			7.357.890		2.164.183		3.694.780		728.715		19.72%		2.892.899		39.32 %		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	60 Dokumen		104 Dokumen		60 Dokumen		32 Dokumen		53.33 %		32 Dokumen		53.33 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.03.00 03	**Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum**			1.959.326		1.045.942		1.574.903		372.012		23.62%		1.417.954		72.37 %		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	60 Dokumen		104 Dokumen		60 Dokumen		32 Dokumen		53.33 %		32 Dokumen		53.33 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**			3.054.574		1.438.414		2.115.389		498.872		23.58%		1.937.285		63.42%		
			Jumlah evaluasi kerjasama yang dilakukan	32 Lembaga		31 Lembaga		31 Lembaga		12 Lembaga		38.71 %		12 Lembaga		37.50 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah kerjasama luar negeri yang difasilitasi	12 Lembaga		11 Lembaga		11 Lembaga		5 Lembaga		45.45 %		5 Lembaga		41.67 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah kerjasama dalam negeri yang difasilitasi	20 Lembaga		20 Lembaga		20 Lembaga		7 Lembaga		35.00 %		7 Lembaga		35.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.04.00 03	**Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama**			171.358		315.703		330.162		100.692		30.50%		416.395		243.00 %		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.04.00 01	**Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri**			1.043.032		648.934		688.355		281.352		40.87%		930.286		89.19 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.04.00 02	**Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri**			1.840.185		473.776		1.096.871		116.828		10.65%		590.604		32.09 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
12	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN**			34.422.025		15.278.251		18.446.253		4.051.529		21.96%		19.329.780		56.16%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
1		PEMBANGUNAN																	
			Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	-
			Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD	100%		100.00 %		85%		33.33 %		39.21 %		33.33 %		33.33 %		Sekretariat Daerah	-
			Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%	86%		88.23 %		85%		1.09 %		1.28 %		1.09 %		1.27 %		Sekretariat Daerah	-
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			4.723.953		3.337.671		3.318.121		1.078.695		32.51%		4.416.366		93.49%		
			Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian	12 laporan		12 laporan		12 laporan		3 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian	12 laporan		12 laporan		12 laporan		3 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian	12 laporan		12 laporan		12 laporan		3 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			2.272.753		1.184.830		1.111.200		389.750		35.07%		1.574.580		69.28 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			1.863.337		1.607.162		1.622.405		501.259		30.90%		2.108.422		113.15 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			587.864		545.679		584.516		187.686		32.11%		733.364		124.75 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			16.052.307		7.804.821		10.822.867		1.718.827		15.88%		9.523.649		59.33%		
			Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan yang disusun	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			8.427.767		5.896.632		6.911.657		1.150.486		16.65%		7.047.118		83.62 %		
			Jumlah Laporan Hasil	16 Laporan		16 Laporan		16 Laporan		6 Laporan		37.50 %		6 Laporan		37.50 %		Sekretariat	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan															Daerah	
	4.01.03.2.02.00 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			7.624.540		1.908.190		3.911.210		568.341		14.53%		2.476.531		32.48 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			13.527.842		4.079.858		4.263.719		1.246.207		29.23%		5.326.065		39.37%		
			Persentase dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	98%		100%		94%		100%		106.38 %		100%		102.04 %		Sekretariat Daerah	
			Presentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		98.63 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.03.00 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			11.720.292		336.937		331.200		77.860		23.51%		414.796		3.54 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang		323 Orang		300 Orang		131 Orang		43.67 %		131 Orang		43.67 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.03.00 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			1.807.550		3.742.921		3.932.519		1.168.347		29.71%		4.911.269		271.71 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	20 Dokumen		23 Dokumen		98 Dokumen		53 Dokumen		54.08 %		53 Dokumen		265.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			117.922		55.900		41.547		7.800		18.77%		63.700		54.02%		
			Jumlah laporan pemantauan kebijakan sumber daya alam	1 laporan		1 laporan		1 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.04.00 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			117.922		55.900		41.547		7.800		18.77%		63.700		54.02 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD																	
122	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			211.561.797		111.489.750		187.976.597		43.782.628		23.29%		155.272.378		73.39%		
			Tingkat kepuasan	94%		92.22 %		93%		93.03 %		100.03		93.03 %		98.97 %		Sekretariat	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan									%						DPRD	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.979.496		12.846.823		14.243.607		4.551.498		31.95%		17.398.320		108.88%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.979.496		12.846.823		14.243.607		4.551.498		31.95%		17.398.320		108.88 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan		53 Orang/bulan		57 Orang/bulan		50 Orang/bulan		87.72 %		50 Orang/bulan		86.21 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			30.164.551		28.960.657		35.690.136		9.346.189		26.19%		38.306.847		126.99%		
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		87.67 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			30.164.551		28.960.657		35.690.136		9.346.189		26.19%		38.306.847		126.99 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket		11 Paket		11 Paket		11 Paket		100.00 %		11 Paket		100.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.459.328		5.441.075		6.509.998		712.277		10.94%		6.153.352		112.71%		
			Rata-rata waktu penyiapan Kelengkapan sarana dan prasarana rapat	1 Hari		1 Hari		1 Hari		1 Hari		100.00 %		1 Hari		100.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.459.328		5.441.075		6.509.998		712.277		10.94%		6.153.352		112.71 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	204 Unit		140 Unit		204 Unit		35 Unit		17.16 %		35 Unit		17.16 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			96.495.857		21.442.017		85.215.578		11.714.428		13.75%		33.156.446		34.36%		
			Rata-rata waktu Penyiapan kelengkapan administrasi perjalanan Dinas	1 Hari		1 Hari		1 Hari		1 Hari		100.00 %		1 Hari		100.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan			96.495.857		21.442.017		85.215.578		11.714.428		13.75%		33.156.446		34.36 %		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	96 Laporan		96 Laporan		96 Laporan		40 Laporan		41.67 %		40 Laporan		41.67 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			59.974.263		42.208.224		45.146.688		17.393.208		38.53%		59.601.432		99.38%		
			Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.15.00	Penyelenggaraan Administrasi			59.974.263		42.208.224		45.146.688		17.393.208		38.53%		59.601.432		99.38 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	01	Keuangan DPRD																	
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan		45.58 Orang/Bulan		50 Orang/Bulan		49.6 Orang/Bulan		99.20 %		49.6 Orang/Bulan		99.20 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD			3.488.302		590.952		1.170.590		65.028		5.56%		655.980		18.81%		
			Rata-rata Waktu Penyelesaian Laporan Perjalanan Dinas	2 Hari		1.13 Hari		2 Hari		1 Hari		150.00 %		1 Hari		150.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.16.00 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			3.488.302		590.952		1.170.590		65.028		5.56%		655.980		18.81 %		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	36 Laporan		24 Laporan		36 Laporan		1 Laporan		2.78 %		1 Laporan		2.78 %		Sekretariat DPRD	
123	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			50.604.084		56.830.024		64.618.443		25.607.755		39.63%		82.437.779		162.91%		
			Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat DPRD	-
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			5.204.429		1.535.146		3.294.369		191.204		5.80%		1.726.350		33.17%		
			Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas	6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.01.00 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			5.204.429		1.535.146		3.294.369		191.204		5.80%		1.726.350		33.17 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			23.981.751		24.129.993		24.716.888		8.804.121		35.62%		32.934.115		137.33%		
			Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	50 Orang		77 Orang		50 Orang		18 Orang		36.00 %		18 Orang		36.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.04.00 02	Pendalaman Tugas DPRD			1.976.169		529.500		1.200.000		108.000		9.00%		637.500		32.26 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dokumen		15 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		100.00 %		2 Dokumen		100.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.04.00 08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD			22.005.582		23.600.493		23.516.888		8.696.121		36.98%		32.296.615		146.77 %		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		100.00 %		4 Dokumen		100.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			16.446.120		27.858.452		31.925.482		15.835.684		49.60%		43.694.136		265.68%		
			Jumlah dokumen pelaksanaan reses	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		1 Dokumen		33.33 %		1 Dokumen		33.33 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.05.00	Pelaksanaan Reses			16.446.120		27.858.452		31.925.482		15.835.684		49.60%		43.694.136		265.68 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	03																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150 Dokumen		150 Dokumen		150 Dokumen		50 Dokumen		33.33 %		50 Dokumen		33.33 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			4.971.784		3.306.433		4.681.704		776.745		16.59%		4.083.178		82.13%		
			Rata rata waktu penyelesaian risalah rapat paripurna dan notulensi rapat	2 Hari		1 Hari		2 Hari		1 Hari		150.00 %		1 Hari		150.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			4.971.784		3.306.433		4.681.704		776.745		16.59%		4.083.178		82.13 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	36 Dokumen		93 Dokumen		36 Dokumen		7 Dokumen		19.44 %		7 Dokumen		19.44 %		Sekretariat DPRD	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
	5.01	PERENCANAAN																	
124	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			35.308.369		25.021.651		25.419.640		9.242.537		36.36%		34.264.188		97.04%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95.69 %		96.97 %		95.55 %		98.16 %		102.73 %		98.16 %		102.58 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			210.672		231.496		225.528		128.816		57.12%		360.312		171.03%		
			Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		100.00 %		2 jenis		100.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			210.672		231.496		225.528		128.816		57.12%		360.312		171.03 %		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		2 Dokumen		25.00 %		2 Dokumen		22.22 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			31.185.574		21.861.915		22.424.276		8.048.785		35.89%		29.910.700		95.91%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembanga	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		n	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			31.185.574		21.861.915		22.424.276		8.048.785		35.89%		29.910.700		95.91 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan		48 Orang/bulan		69 Orang/bulan		67 Orang/bulan		97.10 %		67 Orang/bulan		145.65 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.912.122		2.928.240		2.769.836		1.064.936		38.45%		3.993.176		102.07%		
			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.386.893		2.583.061		2.404.935		947.229		39.39%		3.530.290		104.23 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			525.229		345.179		364.901		117.707		32.26%		462.886		88.13 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
125	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			3.929.602		2.629.069		3.138.312		1.199.526		38.22%		3.828.595		97.43%		
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-
			Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembanga	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		n	
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-
	5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**			1.402.991		1.165.673		1.456.418		616.991		42.36%		1.782.664		127.06%		
			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		1 dokumen		16.67 %		1 dokumen		16.67 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.02.2.01.0007	**Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota**			1.402.991		1.165.673		1.456.418		616.991		42.36%		1.782.664		127.06 %		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**			1.519.411		931.939		1.045.022		315.363		30.18%		1.247.302		82.09%		
			Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan	58 PD		58 PD		58 PD		58 PD		100.00 %		58 PD		100.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.02.2.02.0001	**Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah**			1.519.411		931.939		1.045.022		315.363		30.18%		1.247.302		82.09 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	38 Dokumen		39 Masukan		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**			1.007.199		531.456		636.871		267.172		41.95%		798.629		79.29%		
			Jumlah Perangkat Daerah	58 PD		58 PD		58 PD		58 PD		100.00		58 PD		100.00 %		Badan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah									%						Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.02.2.03.0003	**Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah**			1.007.199		531.456		636.871		267.172		41.95%		798.629		79.29 %		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		2 Laporan		50.00 %		2 Laporan		50.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
126	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**			10.791.670		5.447.477		5.478.596		1.889.075		34.48%		7.336.552		67.98%		
			Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76%	98.63 %		99.01 %		98.43 %		94.28 %		95.78 %		94.28 %		95.59 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-
	5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**			3.064.620		1.871.093		1.890.752		707.929		37.44%		2.579.023		84.15%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.01.0008	**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia**			1.742.848		1.113.374		1.108.047		401.099		36.20%		1.514.473		86.90 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.01.0004	**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan**			1.321.772		757.720		782.706		306.830		39.20%		1.064.550		80.54 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**			3.728.973		1.551.763		1.559.106		563.804		36.16%		2.115.568		56.73%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian dan Bidang SDA yang disusun	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.02.0004	**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian**			2.300.253		818.670		773.823		264.091		34.13%		1.082.761		47.07 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.02.0008	**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA**			1.428.720		733.093		785.282		299.713		38.17%		1.032.806		72.29 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**			3.998.078		2.024.621		2.028.738		617.341		30.43%		2.641.962		66.08%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dan Bidang Kewilayahan yang disusun	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.03.0004	**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur**			2.288.163		1.106.649		1.070.881		283.818		26.50%		1.390.467		60.77 %		
			Jumlah Laporan Hasil	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur															Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			1.709.914		917.972		957.857		333.523		34.82%		1.251.495		73.19 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.02	KEUANGAN																	
127	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			158.554.798		81.655.464		83.570.102		28.651.523		34.28%		110.306.987		69.57%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94%		95.37 %		92%		95.59 %		103.90 %		95.59 %		101.69 %		Badan Pendapatan Daerah	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94%		92.87 %		92%		94.41 %		102.62 %		94.41 %		100.44 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			138.590.122		66.879.215		65.452.930		24.377.814		37.24%		91.257.030		65.85%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			33.513.641		27.892.930		27.763.415		10.205.164		36.76%		38.098.093		113.68 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang/bulan		79 Orang/bulan		90 Orang/bulan		88 Orang/bulan		97.78 %		88 Orang/bulan		106.02 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			105.076.481		38.986.286		37.689.515		14.172.651		37.60%		53.158.936		50.59 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	114 Orang/bulan		111 Orang/bulan		121 Orang/bulan		119 Orang/bulan		98.35 %		119 Orang/bulan		104.39 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			302.277		241.977		234.286		89.320		38.12%		331.297		109.60%		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Pendapatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah															Daerah	
	5.02.01.2.04.00 02	**Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah**			302.277		241.977		234.286		89.320		38.12%		331.297		109.60 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			2.257.261		95.682		423.333		14.652		3.46%		110.334		4.89%		
			Persentase pemenuhan unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.07.00 10	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			2.257.261		95.682		423.333		14.652		3.46%		110.334		4.89 %		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	200 Unit		200 Unit		200 Unit		200 Unit		100.00 %		200 Unit		100.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			8.380.438		11.742.633		12.722.785		3.140.438		24.68%		14.883.072		177.59%		
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.08.00 04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			2.381.130		2.978.230		2.856.979		806.496		28.23%		3.784.726		158.95 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.08.00 04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			5.702.468		5.781.586		5.895.223		1.635.937		27.75%		7.417.523		130.08 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Badan Pendapatan Daerah	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	5.02.01.2.08.0003	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			52.856		607.080		435.180		167.591		38.51%		774.670		1,465.63 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.08.0003	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			243.984		2.375.738		3.535.403		530.414		15.00%		2.906.153		1,191.12 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			9.024.700		2.695.957		4.736.768		1.029.298		21.73%		3.725.255		41.28%		
			Persentase ketepatan pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.09.0001	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**			9.024.700		2.695.957		4.736.768		1.029.298		21.73%		3.725.255		41.28 %		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2240 Unit		2412 Unit		2520 Unit		854 Unit		33.89 %		854 Unit		38.13 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
128	5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			22.253.236		19.560.456		23.904.593		2.157.847		9.03%		21.718.303		97.60%		
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Pendapatan Daerah	-
	5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**			2.377.973		3.078.749		3.271.243		955.438		29.21%		4.034.187		169.65%		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan	7 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang disusun																
	5.02.02.2.01.0001	**Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS**			570.265		774.790		1.214.502		327.426		26.96%		1.102.216		193.28 %		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.01.0007	**Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD**			595.726		657.717		809.724		247.116		30.52%		904.833		151.89 %		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.01.0008	**Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD**			637.253		943.448		890.522		334.397		37.55%		1.277.846		200.52 %		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.01.0002	**Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS**			574.729		702.793		356.495		46.500		13.04%		749.293		130.37 %		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**			3.181.881		2.652.201		2.084.200		807.345		38.74%		3.459.546		108.73%		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		2 dokumen		50.00 %		2 dokumen		50.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
			Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani	104440 berkas		94756 berkas		94731 berkas		39809 berkas		42.02 %		39809 berkas		38.12 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			Jumlah Dokumen Laporan	244 Dokumen		244 Dokumen		244 Dokumen		95 Dokumen		38.93 %		95 Dokumen		38.93 %		Badan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			dan Perhitungan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola															Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			625.752		619.180		559.893		235.523		42.07%		854.704		136.59 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	244 Dokumen		244 Dokumen		244 Dokumen		95 Dokumen		38.93 %		95 Dokumen		38.93 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			376.596		371.674		366.137		139.948		38.22%		511.623		135.85 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		2 Dokumen		50.00 %		2 Dokumen		50.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			2.179.533		1.661.346		1.158.171		431.873		37.29%		2.093.219		96.04 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	104440 Dokumen		94756 Dokumen		94731 Dokumen		39809 Dokumen		42.02 %		39809 Dokumen		38.12 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			1.193.382		1.013.729		1.049.149		395.064		37.66%		1.408.794		118.05%		
			Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		18 Dokumen		75.00 %		18 Dokumen		75.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			1.193.382		1.013.729		1.049.149		395.064		37.66%		1.408.794		118.05 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		18 Dokumen		75.00 %		18 Dokumen		75.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			15.500.000		12.815.776		17.500.000		0		0.00%		12.815.776		82.68%		
			Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana	100%		100%		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Aset Daerah	
			Persentase realisasi dana darurat dan mendesak	25%		25%		25%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			500.000		0		500.000		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			15.000.000		12.815.776		17.000.000		0		0.00%		12.815.776		85.44 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
129	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			50.448.426		27.828.823		23.900.448		10.540.255		44.10%		38.369.077		76.06%		
			Persentase tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang	33.3 %		61.90 %		33.3 %		8.33 %		25.02 %		8.33 %		25.02 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			50.448.426		27.828.823		23.900.448		10.540.255		44.10%		38.369.077		76.06%		
			Jumlah dokumen sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	30 Dokumen		30 Dokumen		30 Dokumen		13 Dokumen		43.33 %		13 Dokumen		43.33 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			10.102.386		17.212.043		14.619.719		6.929.143		47.40%		24.141.187		238.97 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7679 Dokumen		8115 Dokumen		7679 Dokumen		3107 Dokumen		40.46 %		3107 Dokumen		40.46 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			3.138.336		2.584.912		1.744.241		575.402		32.99%		3.160.314		100.70 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60 Orang		60 Orang		60 Orang		60 Orang		100.00 %		60 Orang		100.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01.00	Pengamanan Barang Milik Daerah			9.289.359		5.935.597		5.832.209		2.286.753		39.21%		8.222.350		88.51 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	07																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			27.918.345		2.096.270		1.704.280		748.956		43.95%		2.845.226		10.19 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30 Laporan		30 Laporan		30 Laporan		13 Laporan		43.33 %		13 Laporan		43.33 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
130	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			37.665.666		19.449.692		16.519.434		6.600.779		39.96%		26.050.472		69.16%		
			Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	85%		99.83 %		83%		99.56 %		119.95 %		99.56 %		117.13 %		Badan Pendapatan Daerah	-
			Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir	73%		67.79 %		69%		17.94 %		26.00 %		17.94 %		24.58 %		Badan Pendapatan Daerah	-
			Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	60%		189.38 %		60%		174.64 %		291.07 %		174.64 %		291.07 %		Badan Pendapatan Daerah	-
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah			37.665.666		19.449.692		16.519.434		6.600.779		39.96%		26.050.472		69.16%		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Badan Pendapatan Daerah	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		5 Dokumen		41.67 %		5 Dokumen		41.67 %		Badan Pendapatan Daerah	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		5 Dokumen		41.67 %		5 Dokumen		41.67 %		Badan Pendapatan Daerah	
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	20615 Objek Pajak		25749 Objek Pajak		19814 Objek Pajak		9495 Objek Pajak		47.92 %		9495 Objek Pajak		46.06 %		Badan Pendapatan Daerah	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			697.318		401.748		310.887		117.306		37.73%		519.054		74.44 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Badan Pendapatan Daerah	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah			4.872.361		1.730.039		3.078.427		1.166.264		37.89%		2.896.304		59.44 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		5 Dokumen		41.67 %		5 Dokumen		41.67 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			17.564.766		6.634.852		6.005.642		2.118.526		35.28%		8.753.378		49.83 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			1.397.431		3.999.245		2.486.072		1.495.912		60.17%		5.495.157		393.23 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		5 Dokumen		41.67 %		5 Dokumen		41.67 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			13.133.790		6.683.808		4.638.406		1.702.770		36.71%		8.386.578		63.85 %		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	20615 Obyek Pajak		25749 Obyek Pajak		19814 Obyek Pajak		9495 Obyek Pajak		47.92 %		9495 Obyek Pajak		46.06 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.03	KEPEGAWAIAN																	
131	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			19.003.190		15.928.466		16.542.342		5.858.608		35.42%		21.787.074		114.65%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%		94.10 %		89%		94.31 %		105.97 %		94.31 %		105.97 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16.673.062		14.572.603		15.212.457		5.448.551		35.82%		20.021.154		120.08%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.673.062		14.572.603		15.212.457		5.448.551		35.82%		20.021.154		120.08 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		40 Orang/bulan		45 Orang/bulan		44 Orang/bulan		97.78 %		44 Orang/bulan		110.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			1.624.599		854.276		817.099		224.239		27.44%		1.078.515		66.39%		
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			1.624.599		854.276		817.099		224.239		27.44%		1.078.515		66.39 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket		25 Paket		28 Paket		8 Paket		28.57 %		8 Paket		28.57 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			705.530		501.587		512.785		185.818		36.24%		687.405		97.43%		
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			705.530		501.587		512.785		185.818		36.24%		687.405		97.43 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
132	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**			7.304.388		4.268.050		5.320.024		1.845.834		34.70%		6.113.884		83.70%		
			Persentase pegawai yang berkinerja minimal baik	95%		99.86 %		93%		98.12 %		105.51 %		98.12 %		103.28 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
			Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen	37.94 %		35.61 %		32.43 %		35.41 %		109.19 %		35.41 %		93.33 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
			Persentase pegawai yang disiplin	96.99 %		96.59 %		96.74 %		96.58 %		99.83 %		96.58 %		99.58 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
	5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**			2.823.680		1.050.385		1.960.470		400.998		20.45%		1.451.383		51.40%		
			Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya	94%		100%		92%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.01.0003	**Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK**			2.014.416		379.685		1.342.180		195.362		14.56%		575.047		28.55 %		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.01.0011	**Pengelolaan Data Kepegawaian**			483.991		417.213		359.687		113.399		31.53%		530.612		109.63 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.01.0002	**Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN**			325.274		253.488		258.603		92.237		35.67%		345.725		106.29 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**			1.935.060		1.449.717		1.199.613		424.731		35.41%		1.874.449		96.87%		
			Jumlah berkas mutasi, promosi dan rotasi jabatan serta penataan administrasi kepegawaian	8555 berkas		9493 berkas		8555 berkas		3063 berkas		35.80 %		3063 berkas		35.80 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.02.0002	**Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN**			695.225		418.230		340.712		118.598		34.81%		536.828		77.22 %		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembanga	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		n Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN			649.787		472.598		453.701		173.634		38.27%		646.232		99.45 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN			590.048		558.889		405.200		132.500		32.70%		691.389		117.18 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			2.545.648		1.767.947		2.159.941		1.020.105		47.23%		2.788.052		109.52%		
			Jumlah jenis intervensi asesmen pegawai	1 jenis		1 jenis		1 jenis		0 jenis		0.00 %		0 jenis		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Jumlah Jenis intervensi Disiplin	5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		100.00 %		5 jenis		100.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Jumlah intervensi peningkatan kinerja aparatur	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		100.00 %		2 jenis		100.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			933.164		447.485		880.700		611.100		69.39%		1.058.585		113.44 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			684.603		590.643		579.690		198.047		34.16%		788.690		115.20 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5199 Dokumen		6067 Dokumen		5797 Dokumen		5939 Dokumen		102.45 %		5939 Dokumen		114.23 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	Daya Manusia	
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			927.881		729.819		699.551		210.958		30.16%		940.777		101.39 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	
133	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			9.535.107		2.799.946		4.434.774		838.351		18.90%		3.638.297		38.16%		
			Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning	96%		100.00 %		95%		100%		105.26 %		100%		104.17 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis			2.027.793		2.114.010		2.282.472		558.401		24.46%		2.672.411		131.79%		
			Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	2232 orang		2292 orang		2232 orang		350 orang		15.68 %		350 orang		15.68 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			2.027.793		2.114.010		2.282.472		558.401		24.46%		2.672.411		131.79 %		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2232 Orang		2292 Orang		2232 Orang		350 Orang		15.68 %		350 Orang		15.68 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			7.507.314		685.936		2.152.302		279.950		13.01%		965.886		12.87%		
			Jumlah ASN yang mendapatkan fasilitasi Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	168 orang		168 orang		168 orang		50 orang		29.76 %		50 orang		29.76 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			7.507.314		685.936		2.152.302		279.950		13.01%		965.886		12.87 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		2 Laporan		50.00 %		2 Laporan		50.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	
134	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			689.355		1.319.801		1.448.369		524.038		36.18%		1.843.839		267.47%		
			Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			689.355		1.319.801		1.448.369		524.038		36.18%		1.843.839		267.47%		
			Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi serta pelaksanaan diseminasi yang disusun	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			292.621		676.802		770.284		281.788		36.58%		958.590		327.59 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			396.735		643.000		678.084		242.250		35.73%		885.249		223.13 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH																	
13	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN			31.555.889		22.872.314		22.250.826		8.457.058		38.01%		31.329.372		99.28%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
5		**PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%		97.58 %		100%		97.46 %		97.46 %		97.46 %		97.46 %		Inspektorat	-
	6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			27.567.135		21.403.256		20.386.216		7.919.535		38.85%		29.322.791		106.37%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Inspektorat	
	6.01.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			27.567.135		21.403.256		20.386.216		7.919.535		38.85%		29.322.791		106.37 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan		42 Orang/bulan		43 Orang/bulan		42 Orang/bulan		97.67 %		42 Orang/bulan		100.00 %		Inspektorat	
	6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			802.437		215.857		434.166		60.569		13.95%		276.426		34.45%		
			Persentase pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Inspektorat	
	6.01.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			802.437		215.857		434.166		60.569		13.95%		276.426		34.45 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket		2 Paket		2 Paket		100.00 %		2 Paket		100.00 %		Inspektorat	
	6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			3.186.316		1.253.201		1.430.444		476.954		33.34%		1.730.155		54.30%		
			Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%		97.81 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Inspektorat	
	6.01.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			3.186.316		1.253.201		1.430.444		476.954		33.34%		1.730.155		54.30 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Inspektorat	
136	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**			2.764.043		1.354.518		1.570.396		574.900		36.61%		1.929.418		69.80%		
			Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Inspektorat	-
			Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Inspektorat	-
			Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Inspektorat	-
	6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**			2.115.113		875.060		987.540		388.300		39.32%		1.263.360		59.73%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Surabaya yang ditindaklanjuti oleh PD dan dilakukan monev	20 Rekomendasi		36 Rekomendasi		142 Rekomendasi		0 Rekomendasi		0.00 %		0 Rekomendasi		0.00 %		Inspektorat	
			Jumlah dokumen hasil reviu laporan kinerja dan keuangan	17 Dokumen		17 Dokumen		17 Dokumen		4 Dokumen		23.53 %		4 Dokumen		23.53 %		Inspektorat	
			Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan internal	65 lembaga		60 lembaga		60 lembaga		25 lembaga		41.67 %		25 lembaga		38.46 %		Inspektorat	
	6.01.02.2.01.0007	**Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP**			1.440.287		260.900		262.866		153.500		58.39%		414.400		28.77 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 Dokumen		36 Dokumen		142 Dokumen		20 Dokumen		14.08 %		20 Dokumen		100.00 %		Inspektorat	
	6.01.02.2.01.0002	**Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah**			598.536		224.060		232.893		77.600		33.32%		301.660		50.40 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	65 Laporan		60 Laporan		60 Laporan		25 Laporan		41.67 %		25 Laporan		38.46 %		Inspektorat	
	6.01.02.2.01.0004	**Reviu Laporan Keuangan**			36.351		196.500		245.883		76.900		31.28%		273.400		752.10 %		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	7 Laporan		7 Laporan		7 Laporan		3 Laporan		42.86 %		3 Laporan		42.86 %		Inspektorat	
	6.01.02.2.01.0003	**Reviu Laporan Kinerja**			39.940		193.600		245.898		80.300		32.66%		273.900		685.78 %		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan		10 Laporan		10 Laporan		1 Laporan		10.00 %		1 Laporan		10.00 %		Inspektorat	
	6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**			648.930		479.458		582.857		186.600		32.01%		666.058		102.64%		
			Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan dengan tujuan tertentu	20 lembaga		20 lembaga		20 lembaga		7 lembaga		35.00 %		7 lembaga		35.00 %		Inspektorat	
	6.01.02.2.02.0001	**Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah**			35.956		229.700		291.285		96.900		33.27%		326.600		908.32 %		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		2 Laporan		40.00 %		2 Laporan		40.00 %		Inspektorat	
	6.01.02.2.02.0002	**Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**			612.973		249.758		291.572		89.700		30.76%		339.458		55.38 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan		20 Laporan		20 Laporan		7 Laporan		35.00 %		7 Laporan		35.00 %		Inspektorat	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
137	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			1.127.801		1.403.840		1.466.442		524.300		35.75%		1.928.140		170.96%		
			Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi	100%		100.00 %		100%		18.33 %		18.33 %		18.33 %		18.33 %		Inspektorat	-
			Persentase rumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Inspektorat	-
			Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Inspektorat	-
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			522.100		477.500		515.008		178.700		34.70%		656.200		125.68%		
			Jumlah Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		100.00 %		4 dokumen		100.00 %		Inspektorat	
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			78.860		205.200		250.365		81.600		32.59%		286.800		363.68 %		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi		4 Rekomendasi		4 Rekomendasi		2 Rekomendasi		50.00 %		2 Rekomendasi		50.00 %		Inspektorat	
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			443.240		272.300		264.643		97.100		36.69%		369.400		83.34 %		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi		4 Rekomendasi		4 Rekomendasi		2 Rekomendasi		50.00 %		2 Rekomendasi		50.00 %		Inspektorat	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			605.701		926.340		951.433		345.600		36.32%		1.271.940		209.99%		
			Jumlah frekuensi yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Reformasi Birokasi, Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Integritas	49 Kali		93 Kali		45 Kali		59 Kali		131.11 %		59 Kali		120.41 %		Inspektorat	
			Jumlah laporan yang dihasilkan dalam hal pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	65 Laporan		60 Laporan		60 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Inspektorat	
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			56.261		232.280		218.747		80.500		36.80%		312.780		555.94 %		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan	25 Kegiatan		25 Kegiatan		25 Kegiatan		9 Kegiatan		36.00 %		9 Kegiatan		36.00 %		Inspektorat	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			36.045		212.000		219.050		73.700		33.65%		285.700		792.62 %		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	14 perangkat daerah		8 perangkat daerah		10 perangkat daerah		10 perangkat daerah		100.00 %		10 perangkat daerah		71.43 %		Inspektorat	
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			70.353		222.400		240.450		82.900		34.48%		305.300		433.95 %		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah		60 perangkat daerah		60 perangkat daerah		40 perangkat daerah		66.67 %		40 perangkat daerah		400.00 %		Inspektorat	
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			443.042		259.660		273.187		108.500		39.72%		368.160		83.10 %		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	65 perangkat daerah		60 perangkat daerah		60 perangkat daerah		0 perangkat daerah		0.00 %		0 perangkat daerah		0.00 %		Inspektorat	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
	7.01	KECAMATAN																	
138	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			627.261.662		749.872.487		700.537.103		261.703.932		37.36%		1.011.576.419		161.27%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.92 %		96.02 %		97.88 %		97.32 %		99.43 %		97.32 %		99.39 %		Kec. Sukomanunggal	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.99 %		95.56 %		96.96 %		96.97 %		100.01 %		96.97 %		99.98 %		Kec. Mulyorejo	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.05 %		95.35 %		97.80 %		95.77 %		97.92 %		95.77 %		97.67 %		Kec. Pabean Cantian	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.44 %		95.30 %		97.34 %		95.78 %		98.40 %		95.78 %		98.30 %		Kec. Krembangan	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.04 %		96.08 %		95.98 %		96.96 %		101.02 %		96.96 %		100.96 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.36 %		95.22 %		96.88 %		95.26 %		98.33 %		95.26 %		97.84 %		Kec. Tandes	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99.82 %		95.81 %		98.90 %		97.63 %		98.72 %		97.63 %		97.81 %		Kec. Bulak	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.09 %		94.04 %		97.91 %		93.73 %		95.73 %		93.73 %		95.56 %		Kec. Benowo	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.93 %		95.07 %		96.70 %		95.36 %		98.61 %		95.36 %		98.38 %		Kec. Sawahan	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.26 %		95.15 %		97.11 %		96.28 %		99.15 %		96.28 %		98.99 %		Kec. Sukolilo	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.58 %		95.81 %		98.39 %		97.1 %		98.69 %		97.1 %		98.50 %		Kec. Jambangan	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.48 %		94.35 %		97.40 %		95.82 %		98.38 %		95.82 %		98.30 %		Kec. Pakal	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.29 %		93.93 %		97.30 %		96.17 %		98.84 %		96.17 %		97.84 %		Kec. Dukuh Pakis	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.56 %		96.78 %		97.50 %		97.08 %		99.57 %		97.08 %		99.51 %		Kec. Simokerto	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.15 %		96.33 %		97.67 %		97.17 %		99.49 %		97.17 %		99.00 %		Kec. Tambaksari	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.81 %		94.61 %		96.78 %		95.15 %		98.32 %		95.15 %		98.29 %		Kec. Karangpilang	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.08 %		95.84 %		96.97 %		95.95 %		98.95 %		95.95 %		98.84 %		Kec. Gubeng	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.26 %		96.14 %		97.24 %		97.64 %		100.41 %		97.64 %		100.39 %		Kec. Lakarsantri	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.43 %		95.54 %		97.30 %		95.58 %		98.23 %		95.58 %		98.10 %		Kec. Wonocolo	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.45 %		94.52 %		97.06 %		95.86 %		98.76 %		95.86 %		98.37 %		Kec. Rungkut	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100.6 %		95.50 %		99.77 %		96.56 %		96.78 %		96.56 %		95.98 %		Kec. Asemrowo	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.19 %		95.34 %		96.06 %		96.11 %		100.05 %		96.11 %		99.92 %		Kec. Bubutan	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95.92 %		97.24 %		95.42 %		97.38 %		102.05 %		97.38 %		101.52 %		Kec. Semampir	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.76 %		97.51 %		98.72 %		96.98 %		98.24 %		96.98 %		98.20 %		Kec. Kenjeran	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.09 %		96.05 %		98.03 %		95.81 %		97.74 %		95.81 %		97.68 %		Kec. Gunung Anyar	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99.65 %		94.78 %		98.81 %		95.23 %		96.38 %		95.23 %		95.56 %		Kec. Gayungan	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99.10 %		96.37 %		98.94 %		96.34 %		97.37 %		96.34 %		97.21 %		Kec. Sambikerep	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.46 %		97.15 %		98.41 %		97.81 %		99.39 %		97.81 %		99.34 %		Kec. Wiyung	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.35 %		94.10 %		98.15 %		95.05 %		96.84 %		95.05 %		96.64 %		Kec. Tegalsari	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.36 %		96.60 %		98.10 %		97.15 %		99.03 %		97.15 %		98.77 %		Kec. Wonokromo	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.70 %		96.32 %		97.50 %		97.96 %		100.47 %		97.96 %		100.27 %		Kec. Genteng	-
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			546.130.426		576.295.745		562.501.628		211.484.319		37.60%		787.780.064		144.25%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Jambangan	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Kenjeran	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Pakal	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Bulak	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sambikerep	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Krembangan	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Gunung Anyar	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Karangpilang	
			Persentase ketepatan waktu	100%		100%		100%		100%		100.00		100%		100.00 %		Kec. Genteng	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN									%							
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Gubeng	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Lakarsantri	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sawahan	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Semampir	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Bubutan	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Gayungan	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Benowo	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tandes	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tegalsari	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Simokerto	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wiyung	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wonocolo	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Asemrowo	
			Persentase ketepatan waktu	100%		100%		100%		100%		100.00		100%		100.00 %		Kec. Sukolilo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN									%							
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Rungkut	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tambaksari	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			15.940.971		17.616.074		17.725.376		6.518.785		36.78%		24.134.860		151.40 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan		60 Orang/bulan		54 Orang/bulan		55 Orang/bulan		101.85 %		55 Orang/bulan		80.88 %		Kec. Simokerto	
	7.01.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			16.781.899		15.688.486		15.383.053		5.637.092		36.64%		21.325.577		127.07 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		54 Orang/bulan		48 Orang/bulan		47 Orang/bulan		97.92 %		47 Orang/bulan		78.33 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			15.603.917		16.570.930		15.883.932		5.927.646		37.32%		22.498.576		144.19 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan		55 Orang/bulan		52 Orang/bulan		50 Orang/bulan		96.15 %		50 Orang/bulan		78.13 %		Kec. Wiyung	
	7.01.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			17.790.611		16.650.400		16.200.887		5.944.540		36.69%		22.594.940		127.00 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan		52 Orang/bulan		48 Orang/bulan		47 Orang/bulan		97.92 %		47 Orang/bulan		81.03 %		Kec. Krembangan	
	7.01.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			19.118.818		20.003.580		19.369.326		7.280.553		37.59%		27.284.133		142.71 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan		69 Orang/bulan		62 Orang/bulan		62 Orang/bulan		100.00 %		62 Orang/bulan		77.50 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			19.428.208		21.154.656		20.238.167		7.333.751		36.24%		28.488.406		146.63 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan		69 Orang/bulan		64 Orang/bulan		60 Orang/bulan		93.75 %		60 Orang/bulan		74.07 %		Kec. Gubeng	
	7.01.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			20.296.819		22.151.892		21.519.765		8.192.782		38.07%		30.344.674		149.50 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan		74 Orang/bulan		71 Orang/bulan		71 Orang/bulan		100.00 %		71 Orang/bulan		87.65 %		Kec. Tandes	
	7.01.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			15.809.979		15.923.330		16.002.477		5.755.784		35.97%		21.679.114		137.12 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		54 Orang/bulan		51 Orang/bulan		48 Orang/bulan		94.12 %		48 Orang/bulan		80.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.01.2.02.00 01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			15.154.579		15.269.995		14.928.716		5.548.353		37.17%		20.818.348		137.37 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		50 Orang/bulan		44 Orang/bulan		44 Orang/bulan		100.00 %		44 Orang/bulan		73.33 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.01.2.02.00 01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			19.969.408		21.137.921		20.421.735		7.945.643		38.91%		29.083.563		145.64 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan		67 Orang/bulan		67 Orang/bulan		66 Orang/bulan		98.51 %		66 Orang/bulan		86.84 %		Kec. Rungkut	
	7.01.01.2.02.00 01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			21.775.782		23.941.220		23.026.220		8.811.450		38.27%		32.752.670		150.41 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/bulan		82 Orang/bulan		76 Orang/bulan		75 Orang/bulan		98.68 %		75 Orang/bulan		84.27 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.01.2.02.00 01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			20.215.176		20.559.260		20.073.215		7.693.571		38.33%		28.252.831		139.76 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan		67 Orang/bulan		65 Orang/bulan		65 Orang/bulan		100.00 %		65 Orang/bulan		85.53 %		Kec. Sawahan	
	7.01.01.2.02.00 01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			17.466.465		16.608.937		15.862.240		5.983.576		37.72%		22.592.513		129.35 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan		58 Orang/bulan		50 Orang/bulan		50 Orang/bulan		100.00 %		50 Orang/bulan		79.37 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.01.2.02.00 01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			16.466.930		18.261.009		18.303.419		6.885.638		37.62%		25.146.648		152.71 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan		62 Orang/bulan		58 Orang/bulan		58 Orang/bulan		100.00 %		58 Orang/bulan		85.29 %		Kec. Genteng	
	7.01.01.2.02.00 01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			18.169.150		18.755.268		18.148.206		6.641.836		36.60%		25.397.105		139.78 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan		62 Orang/bulan		60 Orang/bulan		58 Orang/bulan		96.67 %		58 Orang/bulan		82.86 %		Kec. Semampir	
	7.01.01.2.02.00 01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			13.997.087		14.771.214		14.659.426		5.539.487		37.79%		20.310.701		145.11 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan		54 Orang/bulan		50 Orang/bulan		52 Orang/bulan		104.00 %		52 Orang/bulan		89.66 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.01.2.02.00 01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			16.192.561		18.725.710		18.000.972		6.882.883		38.24%		25.608.593		158.15 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/bulan		67 Orang/bulan		66 Orang/bulan		64 Orang/bulan		96.97 %		64 Orang/bulan		87.67 %		Kec. Gayungan	
	7.01.01.2.02.00 01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			15.035.256		18.268.181		17.774.225		6.569.033		36.96%		24.837.214		165.19 %		
			Jumlah Orang yang	73		67		61		59		96.72 %		59		80.82 %		Kec.	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		Orang/bulan		Orang/bulan		Orang/bulan				Orang/bulan				Jambangan	
	7.01.01.2.02.00 01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			16.950.603		17.058.289		17.387.185		6.402.970		36.83%		23.461.259		138.41 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan		61 Orang/bulan		51 Orang/bulan		53 Orang/bulan		103.92 %		53 Orang/bulan		79.10 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.01.2.02.00 01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			21.653.687		22.251.157		21.502.372		8.058.593		37.48%		30.309.750		139.98 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan		78 Orang/bulan		73 Orang/bulan		71 Orang/bulan		97.26 %		71 Orang/bulan		80.68 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.01.2.02.00 01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			15.766.279		16.613.589		16.140.545		6.082.986		37.69%		22.696.574		143.96 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan		56 Orang/bulan		52 Orang/bulan		51 Orang/bulan		98.08 %		51 Orang/bulan		80.95 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.01.2.02.00 01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			15.739.285		16.026.452		15.349.852		5.933.702		38.66%		21.960.154		139.52 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan		53 Orang/bulan		50 Orang/bulan		50 Orang/bulan		100.00 %		50 Orang/bulan		84.75 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.01.2.02.00 01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			15.615.151		16.930.363		16.462.971		6.272.479		38.10%		23.202.841		148.59 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan		57 Orang/bulan		56 Orang/bulan		55 Orang/bulan		98.21 %		55 Orang/bulan		87.30 %		Kec. Benowo	
	7.01.01.2.02.00 01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			15.957.215		18.626.006		18.094.692		6.887.297		38.06%		25.513.303		159.89 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan		62 Orang/bulan		59 Orang/bulan		60 Orang/bulan		101.69 %		60 Orang/bulan		83.33 %		Kec. Bubutan	
	7.01.01.2.02.00 01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			20.279.561		21.567.194		20.887.623		7.937.472		38.00%		29.504.666		145.49 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/bulan		75 Orang/bulan		69 Orang/bulan		67 Orang/bulan		97.10 %		67 Orang/bulan		77.01 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.01.2.02.00 01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			15.925.618		16.998.180		16.498.912		6.189.823		37.52%		23.188.002		145.60 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan		57 Orang/bulan		56 Orang/bulan		53 Orang/bulan		94.64 %		53 Orang/bulan		82.81 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.01.2.02.00 01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			17.595.265		18.355.968		18.507.085		7.006.928		37.86%		25.362.896		144.15 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan		63 Orang/bulan		60 Orang/bulan		60 Orang/bulan		100.00 %		60 Orang/bulan		80.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.01.2.02.00 01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			18.063.586		21.990.943		21.443.324		8.261.685		38.53%		30.252.627		167.48 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	87 Orang/bulan		78 Orang/bulan		70 Orang/bulan		72 Orang/bulan		102.86 %		72 Orang/bulan		82.76 %		Kec. Lakarsantri	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Tunjangan ASN																
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.822.509		16.313.490		16.135.629		5.862.181		36.33%		22.175.671		131.82 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan		56 Orang/bulan		52 Orang/bulan		51 Orang/bulan		98.08 %		51 Orang/bulan		78.46 %		Kec. Bulak	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.104.845		15.841.033		15.271.923		5.799.805		37.98%		21.640.838		143.27 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan		51 Orang/bulan		44 Orang/bulan		46 Orang/bulan		104.55 %		46 Orang/bulan		83.64 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			25.443.205		25.665.017		25.298.159		9.695.999		38.33%		35.361.016		138.98 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/bulan		86 Orang/bulan		79 Orang/bulan		82 Orang/bulan		103.80 %		82 Orang/bulan		86.32 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			76.007.353		170.176.954		133.433.668		49.369.435		37.00%		219.546.388		288.85%		
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Asemrowo	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Benowo	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Gayungan	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Gubeng	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		94.89 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tambaksari	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Genteng	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Karangpilang	
			Persentase barang dan jasa	100%		97.2 %		100%		100%		100.00		100%		100.00 %		Kec.	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			untuk menunjang administrasi umum yang disediakan									%						Lakarsantri	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		97.34 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	29 Paket		29 Paket		29 Paket		18 Paket		62.07 %		18 Paket		62.07 %		Kec. Sambikerep	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Semampir	
			Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	31 Paket		31 Paket		29 Paket		29 Paket		100.00 %		29 Paket		93.55 %		Kec. Gunung Anyar	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Krembangan	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Simokerto	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		96.7 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Jambangan	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Rungkut	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sawahan	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sukolilo	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24 paket		24 paket		24 paket		20 paket		83.33 %		20 paket		83.33 %		Kec. Bulak	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Bubutan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tandes	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wiyung	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Kenjeran	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		97.01 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wonocolo	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wonokromo	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Pakal	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket		14 Paket		19 Paket		20 Paket		105.26 %		20 Paket		105.26 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.01.2.06.00 02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			2.643.376		6.638.168		5.673.297		2.117.186		37.32%		8.755.354		331.22 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		17 Paket		15 Paket		15 Paket		100.00 %		15 Paket		100.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.01.2.06.00 02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			1.909.831		5.076.275		3.445.839		1.269.194		36.83%		6.345.470		332.25 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket		9 Paket		9 Paket		9 Paket		100.00 %		9 Paket		100.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.01.2.06.00 02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			1.885.216		5.659.862		5.507.878		1.959.136		35.57%		7.618.998		404.14 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket		20 Paket		14 Paket		70.00 %		14 Paket		70.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.01.2.06.00 02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			816.940		2.999.287		2.477.949		994.851		40.15%		3.994.137		488.91 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket		17 Paket		17 Paket		5 Paket		29.41 %		5 Paket		29.41 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.142.237		5.975.487		5.099.648		1.749.543		34.31%		7.725.030		360.61 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket		26 Paket		24 Paket		18 Paket		75.00 %		18 Paket		75.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.172.553		4.669.312		3.892.734		1.279.549		32.87%		5.948.861		273.82 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket		19 Paket		19 Paket		10 Paket		52.63 %		10 Paket		52.63 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.029.400		6.408.443		4.858.726		1.650.760		33.98%		8.059.203		266.03 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket		29 Paket		22 Paket		17 Paket		77.27 %		17 Paket		77.27 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.723.479		5.603.485		4.272.119		1.478.569		34.61%		7.082.054		260.04 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket		15 Paket		11 Paket		73.33 %		11 Paket		73.33 %		Kec. Genteng	
	7.01.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.734.121		4.721.682		3.807.343		1.364.206		35.83%		6.085.888		350.95 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket		8 Paket		8 Paket		100.00 %		8 Paket		100.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.462.248		4.769.423		3.715.767		1.177.697		31.69%		5.947.120		406.71 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket		14 Paket		19 Paket		20 Paket		105.26 %		20 Paket		105.26 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.775.956		6.115.623		4.362.720		1.836.258		42.09%		7.951.882		210.59 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket		15 Paket		8 Paket		53.33 %		8 Paket		53.33 %		Kec. Semampir	
	7.01.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.448.920		5.270.376		3.930.609		1.495.645		38.05%		6.766.021		466.97 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket		24 Paket		36 Paket		23 Paket		63.89 %		23 Paket		63.89 %		Kec. Bubutan	
	7.01.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.786.799		5.594.231		4.088.102		1.596.582		39.05%		7.190.814		189.89 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket		24 Paket		20 Paket		83.33 %		20 Paket		83.33 %		Kec. Bulak	
	7.01.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			847.284		6.210.437		5.496.300		2.033.201		36.99%		8.243.638		972.95 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan	23 Paket		24 Paket		23 Paket		19 Paket		82.61 %		19 Paket		82.61 %		Kec.	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Perlengkapan Kantor yang Disediakan															Wonokromo	
	7.01.01.2.06.00 02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			2.920.502		5.854.795		4.234.693		1.454.778		34.35%		7.309.573		250.28 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket		23 Paket		27 Paket		11 Paket		40.74 %		11 Paket		40.74 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.01.2.06.00 02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			2.755.199		5.202.676		3.950.158		1.438.920		36.43%		6.641.596		241.06 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket		8 Paket		8 Paket		100.00 %		8 Paket		100.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.01.2.06.00 02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			1.729.368		5.437.105		4.551.554		1.707.933		37.52%		7.145.038		413.16 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket		6 Paket		7 Paket		116.67 %		7 Paket		116.67 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.01.2.06.00 02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			5.098.006		9.183.800		6.599.351		2.553.894		38.70%		11.737.693		230.24 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket		20 Paket		9 Paket		45.00 %		9 Paket		45.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.01.2.06.00 02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			4.367.996		4.074.128		3.140.299		1.208.396		38.48%		5.282.524		120.94 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		100.00 %		1 Paket		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.01.2.06.00 02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			2.448.980		7.355.493		5.449.964		2.133.578		39.15%		9.489.071		387.47 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket		19 Paket		19 Paket		23 Paket		121.05 %		23 Paket		121.05 %		Kec. Sawahan	
	7.01.01.2.06.00 02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			1.807.210		4.370.808		3.141.518		1.131.860		36.03%		5.502.669		304.48 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket		22 Paket		22 Paket		22 Paket		100.00 %		22 Paket		100.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.01.2.06.00 02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			724.460		4.526.421		2.617.598		1.071.666		40.94%		5.598.087		772.73 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket		17 Paket		17 Paket		12 Paket		70.59 %		12 Paket		70.59 %		Kec. Benowo	
	7.01.01.2.06.00 02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			1.840.899		6.676.207		5.546.849		2.182.013		39.34%		8.858.221		481.19 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		8 Paket		15 Paket		14 Paket		93.33 %		14 Paket		93.33 %		Kec. Rungkut	
	7.01.01.2.06.00 02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			1.181.219		4.946.105		4.042.697		1.583.391		39.17%		6.529.496		552.78 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	501 Paket		516 Paket		501 Paket		209 Paket		41.72 %		209 Paket		41.72 %		Kec. Pakal	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Disediakan																
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.415.085		5.067.707		4.112.959		1.674.290		40.71%		6.741.997		105.10 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	31 Paket		31 Paket		29 Paket		29 Paket		100.00 %		29 Paket		93.55 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.007.331		4.073.849		2.852.824		1.031.208		36.15%		5.105.057		506.79 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket		109 Paket		100 Paket		41 Paket		41.00 %		41 Paket		41.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.832.212		5.999.459		4.802.878		1.764.335		36.73%		7.763.794		423.74 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket		10 Paket		10 Paket		100.00 %		10 Paket		100.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.827.863		5.059.004		3.977.141		1.593.382		40.06%		6.652.385		363.94 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket		113 Paket		100 Paket		50 Paket		50.00 %		50 Paket		50.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			964.089		6.605.545		4.904.939		1.841.757		37.55%		8.447.302		876.20 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		16 Paket		10 Paket		11 Paket		110.00 %		11 Paket		110.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.109.517		5.769.822		4.457.027		1.559.200		34.98%		7.329.023		660.56 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket		12 Paket		16 Paket		133.33 %		16 Paket		133.33 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.599.059		4.261.936		4.422.187		1.436.455		32.48%		5.698.391		74.99 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket		29 Paket		29 Paket		18 Paket		62.07 %		18 Paket		62.07 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.123.883		3.399.788		4.601.807		850.178		18.47%		4.249.966		82.94%		
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		91.67 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Gubeng	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Gayungan	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Jambangan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Karangpilang	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Kenjeran	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sambikerep	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Genteng	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Benowo	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sukolilo	
			jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	20 Unit		24 Unit		20 Unit		11 Unit		55.00 %		11 Unit		55.00 %		Kec. Gunung Anyar	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Lakarsantri	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Simokerto	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Semampir	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tambaksari	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Bubutan	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Asemrowo	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Krembangan	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit		25 Unit		30 Unit		11 Unit		36.67 %		11 Unit		36.67 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wiyung	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		92.86 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wonocolo	
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit		2 unit		2 unit		4 unit		200.00 %		4 unit		200.00 %		Kec. Bulak	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wonokromo	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tegalsari	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Pakal	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Rungkut	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			disediakan																
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tandes	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			200.239		116.420		247.845		28.989		11.70%		145.409		72.62 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit		23 Unit		36 Unit		6 Unit		16.67 %		6 Unit		16.67 %		Kec. Krembangan	
	7.01.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			170.767		120.036		196.849		24.425		12.41%		144.461		84.60 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit		50 Unit		50 Unit		21 Unit		42.00 %		21 Unit		42.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			211.392		143.051		227.196		40.159		17.68%		183.210		86.67 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 Unit		21 Unit		34 Unit		3 Unit		8.82 %		3 Unit		8.82 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			140.091		98.870		138.869		22.008		15.85%		120.878		86.29 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	65 Unit		27 Unit		65 Unit		15 Unit		23.08 %		15 Unit		23.08 %		Kec. Simokerto	
	7.01.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			148.255		73.204		145.557		19.980		13.73%		93.184		62.85 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit		25 Unit		30 Unit		11 Unit		36.67 %		11 Unit		31.43 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			126.396		87.115		130.547		26.912		20.61%		114.026		90.21 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit		23 Unit		29 Unit		9 Unit		31.03 %		9 Unit		31.03 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			198.810		138.711		198.814		21.932		11.03%		160.643		80.80 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		100.00 %		3 Unit		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			164.611		80.467		116.402		13.733		11.80%		94.200		57.23 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		100.00 %		5 Unit		100.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			110.587		101.390		142.131		35.809		25.19%		137.198		124.06 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		100.00 %		5 Unit		100.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			301.827		159.666		279.821		61.019		21.81%		220.685		73.12 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit		6 Unit		7 Unit		116.67 %		7 Unit		116.67 %		Kec. Semampir	
	7.01.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			156.241		116.632		74.170		19.140		25.81%		135.772		86.90 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		6 Unit		5 Unit		6 Unit		120.00 %		6 Unit		120.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			190.228		117.830		102.667		24.474		23.84%		142.304		74.81 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit		2 Unit		4 Unit		200.00 %		4 Unit		200.00 %		Kec. Bulak	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			194.913		126.755		151.050		23.946		15.85%		150.701		77.32 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		7 Unit		7 Unit		6 Unit		85.71 %		6 Unit		85.71 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			161.471		91.794		83.309		21.036		25.25%		112.830		69.88 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		100.00 %		3 Unit		100.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			175.905		118.442		160.955		33.782		20.99%		152.223		86.54 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit		4 Unit		5 Unit		125.00 %		5 Unit		125.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			232.980		120.802		232.980		39.391		16.91%		160.193		68.76 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit		50 Unit		50 Unit		8 Unit		16.00 %		8 Unit		16.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			96.413		113.694		116.688		27.277		23.38%		140.970		146.22 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		100.00 %		4 Unit		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			168.090		132.851		96.130		28.540		29.69%		161.391		96.01 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		9 Unit		5 Unit		2 Unit		40.00 %		2 Unit		40.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			139.792		58.012		101.566		16.817		16.56%		74.828		53.53 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	6 Unit		4 Unit		6 Unit		8 Unit		133.33 %		8 Unit		133.33 %		Kec. Rungkut	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																
	7.01.01.2.09.00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			141.228		134.764		145.227		39.269		27.04%		174.032		123.23 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit		26 Unit		19 Unit		19 Unit		100.00 %		19 Unit		100.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.01.2.09.00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			105.600		88.285		52.807		14.098		26.70%		102.383		96.95 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit		24 Unit		20 Unit		11 Unit		55.00 %		11 Unit		55.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.01.2.09.00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			117.333		89.593		121.082		26.200		21.64%		115.793		98.69 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit		99 Unit		100 Unit		40 Unit		40.00 %		40 Unit		40.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.01.2.09.00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			305.712		114.733		244.522		23.790		9.73%		138.523		45.31 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		7 Unit		7 Unit		6 Unit		85.71 %		6 Unit		85.71 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.01.2.09.00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			223.592		87.681		158.603		28.968		18.26%		116.649		52.17 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit		113 Unit		100 Unit		32 Unit		32.00 %		32 Unit		32.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.01.2.09.00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			108.863		123.041		123.489		33.524		27.15%		156.565		143.82 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit		43 Unit		60 Unit		8 Unit		13.33 %		8 Unit		13.33 %		Kec. Gubeng	
	7.01.01.2.09.00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor			160.370		111.038		142.071		23.091		16.25%		134.129		83.64 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		100.00 %		5 Unit		100.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.01.2.09.00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			95.506		92.805		123.489		24.247		19.63%		117.051		122.56 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit		49 Unit		50 Unit		9 Unit		18.00 %		9 Unit		18.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.01.2.09.00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			132.288		108.978		122.717		27.931		22.76%		136.909		103.49 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		100.00 %		4 Unit		100.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.01.2.09.00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			162.335		99.719		149.645		23.083		15.42%		122.802		75.65 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit		60 Unit		60 Unit		24 Unit		40.00 %		24 Unit		40.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.01.2.09.00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			133.688		105.074		120.559		24.754		20.53%		129.828		97.11 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		4 Unit		3 Unit		3 Unit		100.00 %		3 Unit		100.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.01.2.09.00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			148.363		128.337		154.053		31.855		20.68%		160.192		107.97 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		100.00 %		5 Unit		100.00 %		Kec. Gayungan	
139	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			1.265.386		437.862		708.012		129.277		18.26%		567.139		44.82%		
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sambikerep	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tegalsari	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Benowo	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Gubeng	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tambaksari	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Krembangan	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Kenjeran	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tandes	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sawahan	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Asemrowo	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Semampir	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Genteng	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Gunung Anyar	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Gayungan	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Jambangan	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Mulyorejo	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Lakarsantri	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Rungkut	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Bulak	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Simokerto	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Karangpilang	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Bubutan	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Pakal	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wiyung	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sukolilo	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wonokromo	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wonocolo	-
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**			1.265.386		437.862		708.012		129.277		18.26%		567.139		44.82%		
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus		20 Kasus		20 Kasus		7 Kasus		35.00 %		7 Kasus		35.00 %		Kec. Asemrowo	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	19 Kasus		34 Kasus		29 Kasus		15 Kasus		51.72 %		15 Kasus		78.95 %		Kec. Bubutan	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 topik		2 topik		2 topik		0 topik		0.00 %		0 topik		0.00 %		Kec. Gayungan	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	45 Kasus		45 Kasus		45 Kasus		17 Kasus		37.78 %		17 Kasus		37.78 %		Kec. Gayungan	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	9 Kasus		12 Kasus		9 Kasus		5 Kasus		55.56 %		5 Kasus		55.56 %		Kec. Genteng	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus		28 Kasus		24 Kasus		10 Kasus		41.67 %		10 Kasus		41.67 %		Kec. Gubeng	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		2 Topik		100.00 %		2 Topik		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Jumlah topik fasilitasi,	2 Topik		1 Topik		2 Topik		1 Topik		50.00 %		1 Topik		50.00 %		Kec. Pabean	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional															Cantian	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Kasus		19 Kasus		12 Kasus		5 Kasus		41.67 %		5 Kasus		41.67 %		Kec. Pakal	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		2 Topik		100.00 %		2 Topik		100.00 %		Kec. Pakal	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		2 Topik		100.00 %		2 Topik		100.00 %		Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		2 Topik		100.00 %		2 Topik		100.00 %		Kec. Sambikerep	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	36 Kasus		36 Kasus		36 Kasus		15 Kasus		41.67 %		15 Kasus		41.67 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	37 Kasus		37 Kasus		37 Kasus		18 Kasus		48.65 %		18 Kasus		48.65 %		Kec. Sambikerep	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Benowo	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Sawahan	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Kenjeran	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Semampir	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Genteng	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	35 Orang		35 Orang		35 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Krembangan	
			Jumlah laporan potensi	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Bulak	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas																
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus		24 Kasus		24 Kasus		10 Kasus		41.67 %		10 Kasus		41.67 %		Kec. Kenjeran	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Gubeng	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	7 Kasus		18 Kasus		7 Kasus		6 Kasus		85.71 %		6 Kasus		85.71 %		Kec. Simokerto	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		2 Topik		100.00 %		2 Topik		100.00 %		Kec. Simokerto	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	4 Kasus		18 Kasus		24 Kasus		10 Kasus		41.67 %		10 Kasus		250.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Sukolilo	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	150 Kasus		150 Kasus		150 Kasus		60 Kasus		40.00 %		60 Kasus		40.00 %		Kec. Rungkut	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	2 Kasus		5 Kasus		2 Kasus		3 Kasus		150.00 %		3 Kasus		150.00 %		Kec. Sukolilo	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Rungkut	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		2 Topik		100.00 %		2 Topik		100.00 %		Kec. Asemrowo	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama babinsa/babinkamtibmas	24 kasus		24 kasus		24 kasus		6 kasus		25.00 %		6 kasus		25.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah topik fasilitasi,	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec.	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional															Sukomanunggal	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Jambangan	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus		21 Kasus		20 Kasus		10 Kasus		50.00 %		10 Kasus		50.00 %		Kec. Tandes	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Tandes	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	62 Kasus		61 Kasus		62 Kasus		16 Kasus		25.81 %		16 Kasus		25.81 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		1 Topik		50.00 %		1 Topik		50.00 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	24 kasus		20 kasus		24 kasus		0 kasus		0.00 %		0 kasus		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 kasus		26 kasus		24 kasus		10 kasus		41.67 %		10 kasus		41.67 %		Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	144 Kasus		144 Kasus		144 Kasus		60 Kasus		41.67 %		60 Kasus		41.67 %		Kec. Sawahan	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 kasus		24 kasus		24 kasus		10 kasus		41.67 %		10 kasus		41.67 %		Kec. Wiyung	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Wiyung	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Bubutan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional																
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	88 Kasus		88 Kasus		88 Kasus		32 Kasus		36.36 %		32 Kasus		36.36 %		Kec. Wonocolo	
			Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,k Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	34 Orang		36 Orang		33 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Bulak	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Wonokromo	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	28 Kasus		39 Kasus		33 Kasus		14 Kasus		42.42 %		14 Kasus		50.00 %		Kec. Jambangan	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Karangpilang	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus		24 Kasus		24 Kasus		10 Kasus		41.67 %		10 Kasus		41.67 %		Kec. Benowo	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Kasus		12 Kasus		12 Kasus		5 Kasus		41.67 %		5 Kasus		41.67 %		Kec. Wonokromo	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	44 Kasus		44 Kasus		44 Kasus		23 Kasus		52.27 %		23 Kasus		52.27 %		Kec. Lakarsantri	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus		21 Kasus		20 Kasus		10 Kasus		50.00 %		10 Kasus		50.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	210 Kasus		21 Kasus		210 Kasus		5 Kasus		2.38 %		5 Kasus		2.38 %		Kec. Semampir	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Wonocolo	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama	73 Kasus		73 Kasus		73 Kasus		30 Kasus		41.10 %		30 Kasus		41.10 %		Kec. Karangpilang	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Babinsa/Babinkamtibmas																
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	2 kasus		12 kasus		2 kasus		5 kasus		250.00 %		5 kasus		250.00 %		Kec. Tambaksari	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		2 Topik		100.00 %		2 Topik		100.00 %		Kec. Tambaksari	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	7 Laporan		9 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		71.43 %		Kec. Krembangan	
	7.01.05.2.01.00 02	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			16.079		9.750		14.400		0		0.00%		9.750		60.64 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang		145 Orang		120 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.05.2.01.00 02	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			18.011		4.800		14.648		0		0.00%		4.800		26.65 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	35 Orang		35 Orang		35 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.05.2.01.00 02	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			11.883		3.710		14.000		0		0.00%		3.710		31.22 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	77 Orang		57 Orang		58 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.05.2.01.00 02	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan**			13.399		6.160		7.180		0		0.00%		6.160		45.97 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Nasional																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	61 Orang		72 Orang		54 Orang		110 Orang		203.70 %		110 Orang		180.33 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			30.147		6.000		7.600		1.900		25.00%		7.900		26.20 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang		60 Orang		120 Orang		60 Orang		50.00 %		60 Orang		50.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			10.049		2.760		9.616		0		0.00%		2.760		27.47 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang		92 Orang		100 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			9.379		2.200		7.110		0		0.00%		2.200		23.46 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang		40 Orang		160 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			10.049		2.300		6.900		0		0.00%		2.300		22.89 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	166 Orang		50 Orang		166 Orang		55 Orang		33.13 %		55 Orang		33.13 %		Kec. Pakal	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																
	7.01.05.2.01.00 02	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			10.049		2.520		9.430		0		0.00%		2.520		25.08 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang		84 Orang		160 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.05.2.01.00 02	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			22.510		2.100		11.930		0		0.00%		2.100		9.33 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4 Orang		4 Orang		4 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.05.2.01.00 02	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			6.699		1.000		6.400		0		0.00%		1.000		14.93 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	187 Orang		74 Orang		187 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.05.2.01.00 02	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			16.079		5.200		9.200		2.300		25.00%		7.500		46.65 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80 Orang		80 Orang		80 Orang		55 Orang		68.75 %		55 Orang		68.75 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.05.2.01.00 02	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,**			8.039		1.400		11.680		0		0.00%		1.400		17.41 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	418 Orang		218 Orang		418 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.05.2.01.00 02	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			16.749		4.698		15.000		6.057		40.38%		10.755		64.22 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	561 Orang		89 Orang		561 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.05.2.01.00 02	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			51.920		3.000		5.640		1.350		23.94%		4.350		8.38 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	94 Orang		100 Orang		94 Orang		45 Orang		47.87 %		45 Orang		47.87 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.05.2.01.00 02	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			10.049		2.500		5.000		5.000		100.00 %		7.500		74.63 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	43 Orang		50 Orang		47 Orang		47 Orang		100.00 %		47 Orang		109.30 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.05.2.01.00 02	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			23.898		3.440		4.700		0		0.00%		3.440		14.39 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,	36 Orang		69 Orang		124 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Tandes	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			18.011		10.400		10.621		0		0.00%		10.400		57.74 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang		160 Orang		160 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			7.933		3.800		6.400		0		0.00%		3.800		47.90 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80 Orang		60 Orang		53 Orang		53 Orang		100.00 %		53 Orang		66.25 %		Kec. Simokerto	
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			10.049		5.200		9.616		0		0.00%		5.200		51.75 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	52 Orang		78 Orang		80 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			24.610		7.530		23.204		0		0.00%		7.530		30.60 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	123 Orang		91 Orang		93 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Sawahan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.05.2.01.00 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			10.049		8.900		6.200		0		0.00%		8.900		88.57 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang		107 Orang		120 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.05.2.01.00 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			32.616		1.200		3.851		0		0.00%		1.200		3.68 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	230 Orang		40 Orang		230 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.05.2.01.00 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			29.707		2.000		25.000		0		0.00%		2.000		6.73 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang		86 Orang		120 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.05.2.01.00 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			16.079		5.460		14.876		0		0.00%		5.460		33.96 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang		141 Orang		160 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.05.2.01.00 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			2.512		1.080		2.380		0		0.00%		1.080		42.99 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	34 Orang		36 Orang		33 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			23.766		1.890		20.000		0		0.00%		1.890		7.95 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	58 Orang		63 Orang		35 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			33.671		13.560		20.560		5.140		25.00%		18.700		55.54 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	663 Orang		310 Orang		663 Orang		77 Orang		11.61 %		77 Orang		11.61 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			16.414		4.070		5.720		0		0.00%		4.070		24.80 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	36 Orang		69 Orang		124 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			5.025		1.260		4.460		0		0.00%		1.260		25.08 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan	164 Orang		80 Orang		82 Orang		82 Orang		100.00 %		82 Orang		50.00 %		Kec. Asemrowo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Ketahanan Nasional																
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			16.414		360		8.960		0		0.00%		360		2.19 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 Orang		12 Orang		12 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.05.2.01.0005	**Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**			8.039		6.439		7.692		1.610		20.92%		8.048		100.11 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Bubutan	
	7.01.05.2.01.0005	**Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**			29.778		6.439		6.439		2.146		33.33%		8.585		28.83 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7 Laporan		9 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		71.43 %		Kec. Krembangan	
	7.01.05.2.01.0005	**Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**			13.399		5.544		12.520		1.789		14.29%		7.333		54.73 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan		3 Laporan		1 Laporan		3 Laporan		300.00 %		3 Laporan		300.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.05.2.01.0005	**Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**			13.260		10.731		20.521		4.471		21.79%		15.202		114.65 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Genteng	
	7.01.05.2.01.0005	**Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**			53.595		8.585		8.585		2.862		33.33%		11.446		21.36 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.05.2.01.0005	**Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**			10.049		18.243		9.616		2.325		24.18%		20.568		204.67 %		
			Jumlah Laporan Konflik	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tenggilis	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									%						Mejoyo	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			8.039		6.439		7.692		2.146		27.90%		8.585		106.79 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan		3 Laporan		50.00 %		3 Laporan		50.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			8.039		3.577		7.692		3.577		46.50%		7.154		88.99 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	37 Laporan		37 Laporan		37 Laporan		18 Laporan		48.65 %		18 Laporan		48.65 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			10.049		8.943		9.616		2.862		29.76%		11.804		117.46 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Pakal	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			10.049		0		4.500		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			22.510		7.869		17.170		5.723		33.33%		13.593		60.38 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28 Laporan		39 Laporan		33 Laporan		12 Laporan		36.36 %		12 Laporan		42.86 %		Kec. Jambangan	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			103.841		32.193		32.193		11.625		36.11%		43.818		42.20 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			8.039		8.585		8.585		2.862		33.33%		11.446		142.38 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Kenjeran	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			25.917		19.852		23.365		6.975		29.85%		26.828		103.51 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			103.841		6.439		8.943		2.862		32.00%		9.300		8.96 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			100.121		21.462		25.754		8.585		33.33%		30.047		30.01 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Tandes	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			29.778		17.527		23.311		4.650		19.95%		22.177		74.48 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan		5 Laporan		4 Laporan		2 Laporan		50.00 %		2 Laporan		50.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			2.103		715		2.073		358		17.25%		1.073		51.04 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Simokerto	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			13.399		8.585		12.698		4.824		37.99%		13.408		100.07 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			10.049		8.943		4.292		1.789		41.67%		10.731		106.79 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Wiyung	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			21.770		16.633		19.626		4.829		24.60%		21.462		98.58 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Sawahan	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			10.049		8.585		9.616		1.789		18.60%		10.373		103.23 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		2 Laporan		40.00 %		2 Laporan		40.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			6.763		6.439		7.151		2.146		30.01%		8.585		126.94 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Gayungan	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			7.149		6.439		4.292		1.431		33.33%		7.869		110.07 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			8.039		8.585		8.585		2.862		33.33%		11.446		142.38 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			3.350		2.146		2.862		358		12.50%		2.504		74.75 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Bulak	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			16.308		500		13.000		0		0.00%		500		3.07 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	88 Laporan		88 Laporan		88 Laporan		32 Laporan		36.36 %		32 Laporan		36.36 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			27.844		13.800		25.200		7.200		28.57%		21.000		75.42 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Tambaksari	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Perundang-Undangan																
	7.01.05.2.01.0005	**Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**			16.414		14.666		15.705		4.292		27.33%		18.958		115.50 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Gubeng	
	7.01.05.2.01.0005	**Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**			15.550		8.406		10.731		3.577		33.33%		11.983		77.06 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.05.2.01.0005	**Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**			16.414		14.308		15.705		5.008		31.89%		19.316		117.68 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Benowo	
140	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			629.376.184		381.680.174		514.667.349		117.463.560		22.82%		499.143.734		79.31%		
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wonokromo	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		37.50 %		62.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Jambangan	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Simokerto	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		37.50 %		62.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Sukolilo	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Gayungan	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		37.50 %		62.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Wonocolo	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		37.50 %		62.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Tegalsari	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Bulak	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		37.50 %		62.50 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Gubeng	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		37.50 %		62.50 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wonocolo	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		37.50 %		62.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Mulyorejo	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Gunung Anyar	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		37.50 %		62.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Sawahan	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Bubutan	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Benowo	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		37.50 %		62.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Jambangan	-
			Persentase potensi usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Gubeng	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Kenjeran	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tandes	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		37.50 %		62.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Bubutan	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		37.50 %		62.50 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Asemrowo	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		37.50 %		62.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		37.50 %		62.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Semampir	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		37.50 %		62.50 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Sambikerep	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wiyung	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Krembangan	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		37.50 %		62.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Kenjeran	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sambikerep	-
			Persentase kelurahan	100%		37.50 %		62.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec.	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			yang menindaklanjuti konsep inovasi															Tambaksari	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		37.50 %		62.50 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Genteng	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		37.50 %		62.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Simokerto	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Pakal	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		37.50 %		62.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Krembangan	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		37.50 %		62.50 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Benowo	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tegalsari	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		37.50 %		62.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Karangpilang	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Genteng	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		37.50 %		62.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Tandes	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Semampir	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		37.50 %		62.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Rungkut	-
			Persentase potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Rungkut	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Mulyorejo	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tambaksari	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		37.50 %		62.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Bulak	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		37.50 %		62.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Wonokromo	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		37.50 %		62.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Wiyung	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Asemrowo	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Lakarsantri	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		37.50 %		62.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Karangpilang	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Sawahan	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		37.50 %		62.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Lakarsantri	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		37.50 %		62.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Pakal	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sukolilo	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		37.50 %		62.50 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Gayungan	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		37.50 %		62.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			623.077.437		373.957.156		509.583.899		116.154.465		22.79%		490.111.621		78.66%		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Benowo	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 Kelurahan		5 Kelurahan		5 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Bubutan	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Bulak	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	4 Kelurahan		4 Kelurahan		4 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			jumlah kelurahan yang	4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Gayungan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi																
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Genteng	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Jambangan	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Kenjeran	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		6 kelurahan		6 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Asemrowo	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	3 kelurahan		3 kelurahan		3 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Asemrowo	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Gayungan	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Rungkut	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		6 kelurahan		6 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Gubeng	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		2 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Bubutan	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		2 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Semampir	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan		5 kelurahan		5 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Semampir	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Krembangan	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel	5 kelurahan		5 kelurahan		5 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Simokerto	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			berdasarkan konsep inovasi																
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 Lembaga		5 Lembaga		5 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Krembangan	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan		2 Kelurahan		2 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Gubeng	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		6 kelurahan		6 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Tandes	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Karangpilang	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Sambikerep	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan		4 Kelurahan		4 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Pakal	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Kenjeran	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan		2 Kelurahan		2 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Sukolilo	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	7 kelurahan		7 kelurahan		7 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Sukolilo	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Sambikerep	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		22 Unit		1 Unit		3 Unit		300.00 %		3 Unit		300.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		2 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		2 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 kelurahan		2 kelurahan		2 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Tambaksari	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Benowo	
			jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	5 Lembaga		5 Lembaga		5 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Bulak	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		2 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Tandes	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Karangpilang	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		6 kelurahan		6 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Tegalsari	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan		5 kelurahan		5 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Tegalsari	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan		4 Kelurahan		4 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas		1 Pokmas/Ormas		1 Pokmas/Ormas		0 Pokmas/Ormas		0.00 %		0 Pokmas/Ormas		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan		4 Kelurahan		4 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Wiyung	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Wiyung	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Pakal	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Wonocolo	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan		5 kelurahan		5 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Genteng	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		6 kelurahan		6 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Sawahan	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		6 kelurahan		6 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel	4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			berdasarkan konsep inovasi																
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Jambangan	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		2 Kelurahan		2 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Rungkut	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		6 kelurahan		6 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Wonokromo	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan		5 kelurahan		5 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Wonocolo	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	4 Kelurahan		4 Kelurahan		4 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Wonokromo	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Simokerto	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		2 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Sawahan	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	8 kelurahan		8 kelurahan		8 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			3.544.639		1.682.512		2.912.960		1.479.308		50.78%		3.161.820		89.20 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		2 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			2.767.659		809.772		1.727.193		97.670		5.65%		907.441		32.79 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		8 Unit		6 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			1.520.370		1.737.986		2.256.947		95.649		4.24%		1.833.635		120.60 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	66 Unit		8 Unit		66 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			984.989		1.397.413		1.516.161		207.366		13.68%		1.604.778		162.92 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit		9 Unit		24 Unit		1 Unit		4.17 %		1 Unit		4.17 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			1.551.881		1.804.524		2.057.612		93.716		4.55%		1.898.240		122.32 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit		14 Unit		13 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.00	**Pembangunan Sarana dan**			5.348.168		756.758		1.537.573		42.962		2.79%		799.720		14.95 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	02	Prasarana Kelurahan																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit		2 Unit		27 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.777.698		995.079		1.000.387		36.977		3.70%		1.032.056		58.06 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		9 Unit		10 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.658.766		477.426		2.487.030		121.099		4.87%		598.524		16.36 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		12 Unit		9 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.787.980		1.425.743		3.184.226		52.228		1.64%		1.477.970		53.01 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		7 Unit		10 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.459.209		1.649.588		2.168.568		106.175		4.90%		1.755.763		39.37 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		11 Unit		9 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.505.701		680.150		2.992.074		64.239		2.15%		744.389		21.23 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		6 Unit		10 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.436.054		1.621.986		2.854.744		259.709		9.10%		1.881.696		131.03 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 Unit		6 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.675.411		1.509.923		1.279.096		213.915		16.72%		1.723.838		102.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		8 Unit		8 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			998.221		1.179.818		2.502.259		93.098		3.72%		1.272.916		127.52 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.667.236		962.439		2.223.468		257.911		11.60%		1.220.350		73.20 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		5 Unit		9 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.166.718		2.099.919		2.223.640		231.650		10.42%		2.331.569		107.61 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit		11 Unit		11 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.474.407		1.204.557		2.955.375		0		0.00%		1.204.557		34.67 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		16 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.545.939		2.813.510		3.039.452		0		0.00%		2.813.510		79.34 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		21 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.577.259		2.182.007		3.966.535		0		0.00%		2.182.007		61.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		15 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.776.235		2.081.589		2.790.034		650.160		23.30%		2.731.749		72.34 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		13 Unit		2 Unit		1 Unit		50.00 %		1 Unit		50.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.611.036		2.405.867		3.254.546		0		0.00%		2.405.867		66.63 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		20 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.934.527		387.601		2.032.189		61.927		3.05%		449.528		15.32 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		7 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.157.876		1.475.277		3.434.191		135.529		3.95%		1.610.806		139.12 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			914.917		1.003.632		1.699.873		60.962		3.59%		1.064.594		116.36 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.059.580		951.566		1.894.065		53.608		2.83%		1.005.174		94.87 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			716.396		2.074.456		1.352.718		148.070		10.95%		2.222.525		310.24 %		
			Jumlah Sarana dan	33 Unit		12 Unit		33 Unit		2 Unit		6.06 %		2 Unit		6.06 %		Kec.	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Prasarana Kelurahan yang Terbangun															Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.00 02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			510.519		1.732.250		1.002.191		58.734		5.86%		1.790.985		350.82 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		14 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.00 02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			497.724		994.506		3.698.421		343.746		9.29%		1.338.252		268.87 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		4 Unit		1 Unit		1 Unit		100.00 %		1 Unit		100.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.00 02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			1.697.312		850.153		2.388.169		119.135		4.99%		969.288		57.11 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		4 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.00 02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			1.393.201		1.697.410		1.894.065		93.411		4.93%		1.790.821		128.54 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit		16 Unit		15 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.00 02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			1.567.015		331.121		1.352.632		27.222		2.01%		358.343		22.87 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		2 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.00 02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			743.626		2.620.937		1.826.944		123.637		6.77%		2.744.574		369.08 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		8 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.00 02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			393.697		1.447.118		2.345.115		141.772		6.05%		1.588.890		403.58 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		8 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.00 02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			1.587.513		1.284.153		1.666.394		262.628		15.76%		1.546.780		97.43 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		8 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.00 02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			1.786.345		1.112.912		2.783.178		371.868		13.36%		1.484.780		83.12 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		8 Unit		1 Unit		3 Unit		300.00 %		3 Unit		300.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.00 02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			2.283.835		1.409.949		879.205		55.306		6.29%		1.465.255		64.16 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	2 Unit		2 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Terbangun																
	7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			2.790.793		1.641.468		2.584.216		267.935		10.37%		1.909.404		68.42 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		2 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			2.277.356		1.268.472		2.133.755		105.036		4.92%		1.373.508		60.31 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		2 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			3.398.685		1.357.912		4.493.537		44.415		0.99%		1.402.327		41.26 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		8 Unit		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			1.392.974		1.684.214		1.894.065		1.118.588		59.06%		2.802.801		201.21 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			3.453.097		1.853.021		2.047.151		95.671		4.67%		1.948.692		56.43 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		4 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			3.998.712		557.567		1.130.020		37.352		3.31%		594.918		14.88 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		2 Unit		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			3.172.837		694.817		2.097.501		90.568		4.32%		785.385		24.75 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		10 Unit		6 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			3.234.239		1.137.727		1.972.154		62.258		3.16%		1.199.985		37.10 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		1 Unit		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			3.703.650		1.488.088		2.196.018		1.759.891		80.14%		3.247.979		87.70 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		5 Unit		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			3.064.205		1.089.748		1.483.768		17.853		1.20%		1.107.600		36.15 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		6 Unit		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Rungkut	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			2.894.195		1.680.034		1.729.364		1.275.575		73.76%		2.955.609		102.12 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		8 Unit		10 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			3.125.820		865.454		1.786.583		879.624		49.24%		1.745.078		55.83 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		9 Unit		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			2.986.633		1.673.871		2.168.568		2.135.312		98.47%		3.809.182		127.54 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		8 Unit		4 Unit		3 Unit		75.00 %		3 Unit		75.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			2.931.648		1.764.309		1.212.957		107.627		8.87%		1.871.936		63.85 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		14 Unit		10 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			2.084.961		878.990		1.697.184		88.802		5.23%		967.792		46.42 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		10 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			3.995.477		1.693.662		1.729.607		76.577		4.43%		1.770.238		44.31 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		18 Unit		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			2.855.743		962.803		2.603.385		337.717		12.97%		1.300.521		45.54 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		4 Unit		1 Unit		8 Unit		800.00 %		8 Unit		800.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			4.787.091		1.809.149		3.269.510		0		0.00%		1.809.149		37.79 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		11 Unit		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			3.839.386		1.119.811		2.745.482		1.289.526		46.97%		2.409.337		62.75 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		12 Unit		12 Unit		1 Unit		8.33 %		1 Unit		8.33 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			4.937.372		750.732		3.550.903		80.080		2.26%		830.812		16.83 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		7 Unit		8 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.00	**Pembangunan Sarana dan**			3.906.513		2.953.084		3.466.894		460.701		13.29%		3.413.785		87.39 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	02	Prasarana Kelurahan																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		15 Unit		14 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.822.107		3.426.045		3.177.728		902.189		28.39%		4.328.234		113.24 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		13 Unit		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.019.165		2.472.200		1.661.330		469.205		28.24%		2.941.405		145.67 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		8 Unit		8 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			5.446.203		2.426.462		1.841.401		590.520		32.07%		3.016.982		55.40 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.947.833		268.604		2.005.787		790.537		39.41%		1.059.141		35.93 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		3 Unit		1 Unit		5 Unit		500.00 %		5 Unit		500.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.902.278		1.151.748		1.352.048		808.526		59.80%		1.960.274		103.05 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		3 Unit		1 Unit		3 Unit		300.00 %		3 Unit		300.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.902.278		805.580		3.235.321		640.795		19.81%		1.446.375		76.03 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		3 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			951.139		258.934		1.624.771		62.652		3.86%		321.586		33.81 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		3 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.377.848		570.182		2.058.767		1.055.011		51.24%		1.625.193		68.35 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		3 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.377.848		1.706.305		3.901.167		1.435.291		36.79%		3.141.596		132.12 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		8 Unit		1 Unit		6 Unit		600.00 %		6 Unit		600.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.114.697		1.481.585		2.058.767		122.315		5.94%		1.603.900		51.49 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		5 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			343.974		967.397		1.381.129		955.280		69.17%		1.922.676		558.96 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			675.134		494.637		1.098.009		263.903		24.03%		758.540		112.35 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 Unit		3 Unit		1 Unit		33.33 %		1 Unit		33.33 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			949.596		200.214		1.564.663		297.588		19.02%		497.802		52.42 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.294.288		1.944.746		2.525.421		66.230		2.62%		2.010.976		46.83 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		2 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			560.418		1.977.514		1.098.009		0		0.00%		1.977.514		352.86 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		6 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			733.449		931.859		1.098.009		0		0.00%		931.859		127.05 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		2 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.314.486		800.803		1.568.614		1.435.949		91.54%		2.236.752		96.64 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		100.00 %		1 Unit		100.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.268.395		2.589.012		2.645.375		162.585		6.15%		2.751.597		121.30 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		6 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.343.308		1.466.398		2.431.554		1.028.067		42.28%		2.494.465		185.70 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		7 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.055.456		1.951.450		1.500.467		759.158		50.59%		2.710.608		256.82 %		
			Jumlah Sarana dan	1 Unit		3 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tandes	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Prasarana Kelurahan yang Terbangun																
	7.01.03.2.02.00 02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			4.764.212		2.650.048		2.635.221		1.524.941		57.87%		4.174.989		87.63 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		1 Unit		3 Unit		1 Unit		33.33 %		1 Unit		100.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.00 02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			2.458.343		1.995.184		2.206.069		1.465.012		66.41%		3.460.196		140.75 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		18 Unit		2 Unit		4 Unit		200.00 %		4 Unit		400.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.00 02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			2.774.678		1.978.418		1.891.183		787.768		41.65%		2.766.185		99.69 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		14 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.00 02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			3.714.272		1.984.849		2.771.552		516.733		18.64%		2.501.582		67.35 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		10 Unit		2 Unit		3 Unit		150.00 %		3 Unit		150.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.00 02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			4.508.587		2.470.300		2.285.779		124.947		5.47%		2.595.247		57.56 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		9 Unit		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.00 02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			2.937.215		1.831.348		1.111.835		58.003		5.22%		1.889.351		64.32 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		13 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.00 02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			1.591.799		1.915.898		2.398.382		105.958		4.42%		2.021.856		127.02 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.00 02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			2.876.228		2.297.679		2.218.247		126.252		5.69%		2.423.931		84.27 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		12 Unit		9 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.00 02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			2.405.262		1.813.507		1.221.615		117.636		9.63%		1.931.143		80.29 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		8 Unit		7 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.00 02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			1.011.356		280.315		2.153.298		401.707		18.66%		682.022		67.44 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	3 Unit		2 Unit		3 Unit		4 Unit		133.33 %		4 Unit		133.33 %		Kec. Benowo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Terbangun																
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.155.850		2.180.215		2.226.290		124.728		5.60%		2.304.944		73.04 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		9 Unit		10 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.405.315		2.169.962		1.190.840		90.505		7.60%		2.260.467		66.38 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		14 Unit		10 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			563.929		906.793		1.102.347		263.463		23.90%		1.170.256		207.52 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		5 Unit		4 Unit		2 Unit		50.00 %		2 Unit		50.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.184.566		1.707.490		2.502.262		0		0.00%		1.707.490		78.16 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		4 Unit		6 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.952.311		1.353.150		1.715.530		104.542		6.09%		1.457.692		74.66 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		5 Unit		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.310.806		1.185.630		1.701.396		0		0.00%		1.185.630		51.31 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			934.257		2.016.201		1.729.364		1.402.336		81.09%		3.418.537		365.91 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		13 Unit		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.560.404		266.979		2.632.788		259.260		9.85%		526.239		33.72 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		4 Unit		7 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.101.652		2.330.207		1.696.663		91.760		5.41%		2.421.967		219.85 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		11 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.258.246		1.959.813		1.532.140		264.825		17.28%		2.224.637		176.80 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Jambangan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.267.520		2.598.664		2.687.511		601.045		22.36%		3.199.709		74.98 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit		13 Unit		33 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.368.380		2.235.626		3.012.403		1.101.172		36.55%		3.336.798		140.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		7 Unit		6 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.066.352		2.328.977		3.646.401		636.236		17.45%		2.965.213		143.50 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		12 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.923.694		1.983.752		2.408.152		132.263		5.49%		2.116.014		110.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit		16 Unit		20 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.011.339		2.197.573		2.471.520		1.446.960		58.55%		3.644.533		90.86 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		17 Unit		7 Unit		3 Unit		42.86 %		3 Unit		42.86 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.869.453		2.315.811		1.839.165		556.728		30.27%		2.872.539		58.99 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit		4 Unit		11 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.861.720		3.225.673		2.257.938		92.055		4.08%		3.317.728		68.24 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		23 Unit		8 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			793.506		812.723		1.309.133		63.055		4.82%		875.778		110.37 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit		7 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.875.658		1.391.438		2.177.032		107.011		4.92%		1.498.448		38.66 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit		13 Unit		13 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.423.557		1.327.974		2.281.888		399.842		17.52%		1.727.817		39.06 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		12 Unit		12 Unit		3 Unit		25.00 %		3 Unit		25.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.00	Pembangunan Sarana dan			1.481.058		1.968.875		1.665.772		99.462		5.97%		2.068.337		139.65 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	02	Prasarana Kelurahan																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit		13 Unit		13 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			642.099		1.602.509		2.958.099		140.598		4.75%		1.743.107		271.47 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			5.176.870		2.843.596		3.407.630		692.749		20.33%		3.536.345		68.31 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit		11 Unit		11 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.656.137		2.626.987		2.800.311		145.126		5.18%		2.772.113		59.54 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit		9 Unit		11 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.738.431		1.169.872		1.763.703		67.297		3.82%		1.237.169		33.09 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		7 Unit		9 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.339.186		1.999.653		3.657.476		193.769		5.30%		2.193.422		50.55 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		10 Unit		9 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.144.651		1.762.260		3.259.013		989.575		30.36%		2.751.835		128.31 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		12 Unit		9 Unit		6 Unit		66.67 %		6 Unit		66.67 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.382.471		1.458.595		2.713.291		1.920.904		70.80%		3.379.499		141.85 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		9 Unit		2 Unit		7 Unit		350.00 %		7 Unit		350.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.382.471		2.008.514		1.869.857		753.497		40.30%		2.762.011		115.93 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		6 Unit		8 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.144.651		1.736.459		1.894.065		358.530		18.93%		2.094.989		97.68 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		9 Unit		6 Unit		2 Unit		33.33 %		2 Unit		33.33 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.249.664		2.646.200		1.894.065		777.678		41.06%		3.423.879		152.20 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		11 Unit		4 Unit		4 Unit		100.00 %		4 Unit		66.67 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.392.343		599.620		2.058.767		101.014		4.91%		700.634		29.29 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		8 Unit		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.020.102		3.043.120		2.740.838		1.141.697		41.66%		4.184.817		138.57 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		15 Unit		5 Unit		2 Unit		40.00 %		2 Unit		40.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.020.102		622.360		2.540.008		1.570.426		61.83%		2.192.786		72.61 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		5 Unit		5 Unit		2 Unit		40.00 %		2 Unit		28.57 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.298.312		1.321.795		1.098.035		9.027		0.82%		1.330.822		40.35 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		10 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.761.470		1.852.883		1.500.949		517.979		34.51%		2.370.862		134.60 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		14 Unit		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.046.368		1.458.440		2.218.043		501.366		22.60%		1.959.805		95.77 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		8 Unit		6 Unit		3 Unit		50.00 %		3 Unit		37.50 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.422.669		1.673.578		3.355.925		988.840		29.47%		2.662.418		187.14 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		14 Unit		9 Unit		3 Unit		33.33 %		3 Unit		33.33 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			499.855		1.749.861		2.346.600		1.679.609		71.58%		3.429.471		686.09 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		11 Unit		2 Unit		12 Unit		600.00 %		12 Unit		600.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.412.480		1.819.321		1.082.479		807.576		74.60%		2.626.897		185.98 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		15 Unit		7 Unit		5 Unit		71.43 %		5 Unit		71.43 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			307.061		2.281.630		3.390.000		2.035.787		60.05%		4.317.418		1,406.05 %		
			Jumlah Sarana dan	2 Unit		12 Unit		2 Unit		13 Unit		650.00		13 Unit		650.00 %		Kec.	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Prasarana Kelurahan yang Terbangun									%						Sambikerep	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.570.614		2.240.409		1.372.511		1.316.215		95.90%		3.556.624		226.45 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		5 Unit		12 Unit		3 Unit		25.00 %		3 Unit		25.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			588.445		1.107.601		1.235.260		713.376		57.75%		1.820.978		309.46 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		3 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			718.802		1.710.077		1.744.308		992.206		56.88%		2.702.282		375.94 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		10 Unit		4 Unit		5 Unit		125.00 %		5 Unit		125.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.449.825		875.313		1.555.994		707.719		45.48%		1.583.033		109.19 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		7 Unit		2 Unit		4 Unit		200.00 %		4 Unit		200.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.311.429		1.501.165		2.018.146		92.908		4.60%		1.594.073		48.14 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		9 Unit		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.829.275		323.618		2.168.476		26.201		1.21%		349.819		12.36 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Unit		5 Unit		36 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.281.862		2.010.870		2.054.337		112.584		5.48%		2.123.454		64.70 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit		14 Unit		18 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.679.181		1.460.033		3.725.720		727.565		19.53%		2.187.599		130.28 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29 Unit		10 Unit		29 Unit		2 Unit		6.90 %		2 Unit		6.90 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.720.121		199.970		1.659.775		90.965		5.48%		290.935		10.70 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit		2 Unit		20 Unit		1 Unit		5.00 %		1 Unit		5.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.966.850		619.191		2.223.468		562.534		25.30%		1.181.725		60.08 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	5 Unit		8 Unit		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Simokerto	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Terbangun																
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.875.774		2.186.631		2.223.468		163.129		7.34%		2.349.760		125.27 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		10 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.417.269		1.364.076		1.774.228		593.060		33.43%		1.957.136		80.96 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	40 Unit		12 Unit		35 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.170.973		1.219.503		2.482.387		1.478.954		59.58%		2.698.457		124.30 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit		10 Unit		18 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.775.556		2.229.008		1.866.615		1.744.517		93.46%		3.973.526		143.16 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		18 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.823.588		3.042.836		2.171.887		110.293		5.08%		3.153.129		65.37 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		11 Unit		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.410.138		257.877		2.168.568		52.959		2.44%		310.836		7.05 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		5 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.422.502		1.800.022		2.933.816		477.627		16.28%		2.277.649		51.50 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		8 Unit		3 Unit		2 Unit		66.67 %		2 Unit		66.67 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			5.650.489		3.076.872		2.085.069		1.085.342		52.05%		4.162.214		73.66 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		7 Unit		4 Unit		5 Unit		125.00 %		5 Unit		125.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.961.405		332.467		1.900.617		32.569		1.71%		365.036		7.36 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		6 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.537.320		702.173		2.917.358		902.801		30.95%		1.604.975		104.40 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		9 Unit		6 Unit		3 Unit		50.00 %		3 Unit		50.00 %		Kec. Wonocolo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			1.119.392		1.825.407		1.399.961		957.616		68.40%		2.783.023		248.62 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		8 Unit		8 Unit		2 Unit		25.00 %		2 Unit		25.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			2.123.349		2.021.108		3.046.975		703.580		23.09%		2.724.688		128.32 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		11 Unit		12 Unit		4 Unit		33.33 %		4 Unit		33.33 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			2.848.309		1.817.685		1.537.212		222.046		14.44%		2.039.731		71.61 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		2 Unit		2 Unit		1 Unit		50.00 %		1 Unit		50.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			1.143.111		913.047		1.399.961		267.364		19.10%		1.180.412		103.26 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		7 Unit		8 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			0		3.311.265		1.958.554		89.129		4.55%		3.400.394		0.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		2 unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		N/A		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.166.147		467.600		1.092.080		157.012		14.38%		624.612		53.56 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.805.410		894.727		1.076.331		303.492		28.20%		1.198.219		66.37 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			918.505		687.634		1.017.110		232.887		22.90%		920.521		100.22 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.104.769		951.985		1.220.416		322.804		26.45%		1.274.789		60.57 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.467.127		881.595		959.698		290.711		30.29%		1.172.306		79.90 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.250.584		1.194.528		1.995.638		406.270		20.36%		1.600.797		71.13 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.272.583		814.501		1.670.255		277.902		16.64%		1.092.402		48.07 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.479.471		1.179.458		2.018.817		406.239		20.12%		1.585.698		63.95 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.407.099		1.317.664		1.259.212		439.000		34.86%		1.756.664		72.98 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.574.386		1.356.411		1.817.716		456.028		25.09%		1.812.439		50.71 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			947.958		641.615		876.019		219.406		25.05%		861.021		90.83 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.837.092		1.000.040		1.043.387		339.438		32.53%		1.339.478		72.91 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			842.672		421.939		1.119.288		140.872		12.59%		562.811		66.79 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wiyung	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			962.895		621.323		722.671		212.296		29.38%		833.619		86.57 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.320.793		622.663		1.418.812		209.288		14.75%		831.951		62.99 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			3.216.778		1.249.378		1.276.750		432.891		33.91%		1.682.268		52.30 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.103.167		878.601		988.506		298.730		30.22%		1.177.331		55.98 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.435.573		1.285.769		1.647.913		437.869		26.57%		1.723.638		70.77 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			3.160.036		1.624.988		1.560.336		552.816		35.43%		2.177.804		68.92 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.820.535		983.187		1.138.491		333.617		29.30%		1.316.804		72.33 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.271.557		1.766.871		1.896.344		602.696		31.78%		2.369.567		104.31 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.071.524		572.578		1.050.595		195.053		18.57%		767.631		71.64 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
	7.01.03.2.02.00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.141.471		592.003		681.396		200.523		29.43%		792.526		69.43 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.099.598		669.444		1.308.710		225.442		17.23%		894.886		81.38 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.067.306		636.945		1.517.113		217.835		14.36%		854.781		80.09 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.271.723		501.467		932.137		170.420		18.28%		671.887		52.83 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.248.122		529.945		623.875		178.093		28.55%		708.038		56.73 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.394.393		655.796		1.116.104		223.396		20.02%		879.192		63.05 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			965.059		442.808		426.797		150.153		35.18%		592.960		61.44 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			986.245		318.550		787.823		107.760		13.68%		426.310		43.23 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			979.817		270.385		294.611		92.775		31.49%		363.160		37.06 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.643.893		838.337		1.174.210		285.834		24.34%		1.124.171		68.38 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			703.767		471.923		503.575		162.374		32.24%		634.296		90.13 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			628.210		255.247		549.408		85.818		15.62%		341.065		54.29 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.131.939		792.440		861.809		266.428		30.91%		1.058.868		93.54 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.735.397		1.008.310		2.316.325		337.820		14.58%		1.346.130		49.21 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.181.764		846.950		919.021		287.816		31.32%		1.134.766		96.02 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.982.423		1.041.810		952.509		352.120		36.97%		1.393.930		70.31 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.432.113		994.480		1.250.876		343.158		27.43%		1.337.638		55.00 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Krembangan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.373.294		1.094.105		1.439.028		339.692		23.61%		1.433.796		104.41 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.164.376		219.945		422.386		74.596		17.66%		294.541		25.30 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.050.663		954.923		2.411.382		323.683		13.42%		1.278.607		121.70 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.332.172		1.342.135		1.765.753		453.728		25.70%		1.795.863		77.00 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.948.824		1.278.021		1.321.512		437.039		33.07%		1.715.061		88.00 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.625.380		898.148		1.285.505		302.684		23.55%		1.200.832		73.88 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.668.532		758.641		1.071.909		258.481		24.11%		1.017.122		60.96 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.574.842		932.665		1.218.442		312.000		25.61%		1.244.665		79.03 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.668.143		1.545.465		1.350.869		537.365		39.78%		2.082.830		124.86 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	15 Pokmas / Ormas		15 Pokmas / Ormas		15 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Rungkut	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.313.211		831.141		752.809		283.990		37.72%		1.115.130		84.92 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.115.318		1.223.943		1.826.845		401.962		22.00%		1.625.905		76.86 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.963.261		1.073.238		1.001.416		349.151		34.87%		1.422.389		72.45 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.297.476		576.313		769.393		191.205		24.85%		767.518		59.15 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.772.012		1.701.915		1.756.032		573.320		32.65%		2.275.234		82.08 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.091.174		1.235.653		1.802.055		415.858		23.08%		1.651.512		78.98 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			3.025.727		1.293.651		1.594.390		433.474		27.19%		1.727.125		57.08 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			3.025.849		2.007.015		1.747.151		673.149		38.53%		2.680.164		88.58 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			3.239.302		1.936.190		1.801.814		652.250		36.20%		2.588.440		79.91 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.871.745		986.057		1.340.695		329.667		24.59%		1.315.723		70.29 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.323.475		760.155		672.371		251.460		37.40%		1.011.614		76.44 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.101.041		931.951		891.736		324.715		36.41%		1.256.667		114.13 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.127.615		787.745		1.707.227		265.670		15.56%		1.053.414		93.42 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.027.721		870.477		1.281.216		292.227		22.81%		1.162.704		113.13 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			558.633		342.372		716.248		116.141		16.22%		458.513		82.08 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.669.712		846.600		1.269.511		283.581		22.34%		1.130.181		67.69 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			850.264		570.349		586.120		194.864		33.25%		765.213		90.00 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Mulyorejo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.466.004		1.003.148		907.572		345.005		38.01%		1.348.153		91.96 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.071.548		1.122.928		1.548.614		382.831		24.72%		1.505.758		72.69 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			874.932		267.177		706.506		91.012		12.88%		358.189		40.94 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.768.963		824.088		1.276.511		280.512		21.97%		1.104.600		62.44 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			772.531		348.224		695.006		117.142		16.85%		465.365		60.24 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.497.398		367.070		684.006		123.385		18.04%		490.455		32.75 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.901.301		615.452		963.608		207.771		21.56%		823.223		43.30 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.911.965		785.719		1.178.210		266.110		22.59%		1.051.829		55.01 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			911.900		586.079		698.155		199.685		28.60%		785.764		86.17 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tandes	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
	7.01.03.2.02.00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.727.658		816.033		1.237.407		281.090		22.72%		1.097.123		63.50 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			885.745		557.136		661.722		191.714		28.97%		748.849		84.54 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		33.33 %		1 Pokmas / Ormas		33.33 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			962.207		533.151		508.800		182.304		35.83%		715.455		74.36 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		33.33 %		1 Pokmas / Ormas		33.33 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.815.890		1.733.390		1.592.314		597.126		37.50%		2.330.516		82.76 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			810.766		447.287		1.176.209		155.721		13.24%		603.008		74.38 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		20.00 %		1 Pokmas / Ormas		20.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.312.079		618.570		645.588		212.655		32.94%		831.225		63.35 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.783.596		1.144.352		1.056.480		389.038		36.82%		1.533.390		85.97 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.662.868		1.618.714		1.701.004		552.719		32.49%		2.171.433		81.54 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.341.718		752.280		1.124.434		253.586		22.55%		1.005.866		74.97 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.470.002		825.538		868.028		284.548		32.78%		1.110.086		75.52 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			413.413		207.470		677.226		69.190		10.22%		276.660		66.92 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.986.677		1.167.505		1.313.740		398.841		30.36%		1.566.346		78.84 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			557.717		223.395		709.668		77.849		10.97%		301.244		54.01 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		33.33 %		1 Pokmas / Ormas		33.33 %		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			407.201		298.049		778.144		99.219		12.75%		397.268		97.56 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.209.682		735.616		2.141.163		249.173		11.64%		984.789		81.41 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.187.055		1.337.007		2.305.439		450.870		19.56%		1.787.877		81.75 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			626.804		540.400		584.513		183.036		31.31%		723.436		115.42 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.133.491		477.739		848.741		163.054		19.21%		640.793		56.53 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.043.949		642.330		1.372.380		216.767		15.79%		859.097		82.29 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.756.326		854.453		1.051.909		288.102		27.39%		1.142.556		65.05 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.486.122		474.430		1.618.247		167.542		10.35%		641.971		43.20 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.547.999		401.394		368.354		136.130		36.96%		537.524		34.72 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.080.816		404.702		521.377		136.695		26.22%		541.397		50.09 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.066.891		1.357.889		1.342.773		466.347		34.73%		1.824.236		88.26 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			930.189		449.405		424.625		155.708		36.67%		605.113		65.05 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			129.030		563.946		557.383		194.790		34.95%		758.736		588.03 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Pakal	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.169.320		530.968		696.624		180.957		25.98%		711.925		60.88 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			648.488		380.682		485.882		129.148		26.58%		509.830		78.62 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			667.913		1.105.227		1.367.497		377.490		27.60%		1.482.717		221.99 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			877.868		1.017.634		1.053.251		342.416		32.51%		1.360.050		154.93 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			3.241.199		269.128		496.429		91.527		18.44%		360.655		11.13 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.062.865		1.000.661		828.507		306.950		37.05%		1.307.611		123.03 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.224.080		1.308.431		1.237.610		441.241		35.65%		1.749.672		78.67 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.456.023		1.290.677		1.381.341		416.888		30.18%		1.707.565		69.53 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.675.032		1.133.274		1.533.644		387.419		25.26%		1.520.693		90.79 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.427.230		1.529.329		1.382.661		512.410		37.06%		2.041.739		84.12 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.685.781		1.338.336		1.200.473		447.913		37.31%		1.786.249		66.51 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.357.204		753.553		1.020.071		256.248		25.12%		1.009.801		74.40 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.667.073		1.077.719		1.512.067		363.029		24.01%		1.440.748		54.02 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			702.840		525.464		668.769		176.523		26.40%		701.987		99.88 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.184.061		738.593		1.172.491		238.995		20.38%		977.588		82.56 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			748.403		679.814		672.914		228.845		34.01%		908.659		121.41 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			699.380		568.210		1.195.710		190.549		15.94%		758.758		108.49 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gayungan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			780.674		425.444		385.979		142.416		36.90%		567.860		72.74 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.033.519		708.563		1.214.210		244.288		20.12%		952.851		92.19 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.470.386		733.203		1.288.011		250.784		19.47%		983.987		66.92 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.167.111		889.133		828.691		293.084		35.37%		1.182.217		101.29 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.403.731		841.062		786.270		287.344		36.55%		1.128.406		80.39 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.206.980		915.552		1.352.486		308.206		22.79%		1.223.758		101.39 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.198.532		1.042.503		929.071		355.395		38.25%		1.397.898		116.63 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.518.871		1.404.673		1.223.363		453.276		37.05%		1.857.949		122.32 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.418.571		1.184.859		1.056.040		396.245		37.52%		1.581.104		111.46 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sambikerep	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			833.579		473.802		529.923		159.633		30.12%		633.435		75.99 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			587.694		282.946		284.281		94.400		33.21%		377.346		64.21 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.878.070		883.044		804.007		295.727		36.78%		1.178.771		62.77 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			655.157		666.153		746.507		223.492		29.94%		889.645		135.79 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.088.790		807.009		688.775		239.399		34.76%		1.046.408		96.11 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.460.828		475.920		542.961		161.158		29.68%		637.077		43.61 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.835.583		735.535		1.073.130		253.266		23.60%		988.801		53.87 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.452.106		674.187		1.470.304		228.407		15.53%		902.594		62.16 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.809.622		1.059.709		1.215.691		360.930		29.69%		1.420.639		78.50 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			949.789		999.426		1.216.821		342.396		28.14%		1.341.822		141.28 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.614.622		1.084.207		2.990.264		364.751		12.20%		1.448.959		89.74 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.728.681		791.808		1.401.812		264.385		18.86%		1.056.193		61.10 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.596.717		889.834		796.140		300.645		37.76%		1.190.478		74.56 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.446.145		687.264		1.404.812		229.000		16.30%		916.264		37.46 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.158.529		1.189.476		1.100.410		403.611		36.68%		1.593.087		73.80 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			3.177.498		946.007		1.487.300		301.896		20.30%		1.247.903		39.27 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			3.445.420		1.621.929		1.763.397		541.443		30.70%		2.163.372		62.79 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Semampir	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.894.153		2.331.046		2.003.967		761.669		38.01%		3.092.715		106.86 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			3.445.420		1.306.186		1.319.411		437.556		33.16%		1.743.742		50.61 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			3.445.420		1.351.258		1.264.712		451.875		35.73%		1.803.132		52.33 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.833.928		1.324.270		1.604.972		445.337		27.75%		1.769.607		96.49 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			709.961		591.195		1.007.924		203.186		20.16%		794.381		111.89 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.975.407		931.337		903.808		304.544		33.70%		1.235.881		62.56 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			846.811		912.079		1.962.816		306.236		15.60%		1.218.315		143.87 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.505.548		576.842		861.308		193.000		22.41%		769.842		51.13 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.00 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.004.486		585.392		868.308		189.798		21.86%		775.189		77.17 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonocolo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			0		2.117.590		2.436.984		659.436		27.06%		2.777.025		0.00 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A		2 Pokmas/Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		N/A		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			37.564		1.920		32.840		0		0.00%		1.920		5.11 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			1.340		0		1.282		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			2.010		3.600		9.600		0		0.00%		3.600		179.12 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			6.389		2.940		6.000		0		0.00%		2.940		46.01 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			26.673		3.600		7.200		0		0.00%		3.600		13.50 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			10.853		4.860		10.385		0		0.00%		4.860		44.78 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			6.699		2.700		7.200		0		0.00%		2.700		40.30 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			13.399		3.600		3.600		0		0.00%		3.600		26.87 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			33.497		2.850		3.300		0		0.00%		2.850		8.51 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			1.072		2.460		2.640		0		0.00%		2.460		229.50 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			30.147		8.150		13.250		0		0.00%		8.150		27.03 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Krembangan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pembangunan di Kelurahan																
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			6.029		207		5.076		0		0.00%		207		3.42 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			16.528		9.500		16.400		0		0.00%		9.500		57.48 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			10.049		2.670		5.340		0		0.00%		2.670		26.57 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			1.675		1.770		6.060		0		0.00%		1.770		105.68 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			40.196		2.100		27.100		2.600		9.59%		4.700		11.69 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			1.675		0		1.500		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	8 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Jambangan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			30.147		0		9.180		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan		12 Lembaga Kemasyarakatan		12 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			30.147		4.800		4.800		0		0.00%		4.800		15.92 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			1.675		6.000		6.000		0		0.00%		6.000		358.24 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan		7 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			30.147		4.500		9.000		0		0.00%		4.500		14.93 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			2.680		3.000		7.200		0		0.00%		3.000		111.95 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			26.798		1.650		6.000		0		0.00%		1.650		6.16 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	4 Lembaga Kemasyarakat		4 Lembaga Kemasyarakat		4 Lembaga Kemasyarakat		0 Lembaga Kemasyarakat		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakat		0.00 %		Kec. Pakal	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	an		an		an		an				an					
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			23.448		6.300		10.500		0		0.00%		6.300		26.87 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan		13 Lembaga Kemasyarakatan		12 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			6.163		2.760		3.000		0		0.00%		2.760		44.78 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			5.025		3.600		4.808		0		0.00%		3.600		71.65 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			23.448		4.860		22.436		0		0.00%		4.860		20.73 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			8.374		3.750		7.500		0		0.00%		3.750		44.78 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			46.839		4.050		13.400		0		0.00%		4.050		8.65 %		
			Jumlah Lembaga	7 Lembaga		10 Lembaga		7 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Simokerto	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kemasyarakatan		Kemasyarakatan		Kemasyarakatan		Kemasyarakatan				Kemasyarakatan					
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			27.783		9.540		9.000		0		0.00%		9.540		34.34 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan		12 Lembaga Kemasyarakatan		12 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			18.318		3.750		5.400		0		0.00%		3.750		20.47 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**			6.298.746		7.723.018		5.083.450		1.309.095		25.75%		9.032.113		143.40%		
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Potensi usaha		50 Potensi usaha		50 Potensi usaha		20 Potensi usaha		40.00 %		20 Potensi usaha		40.00 %		Kec. Benowo	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	480 Lembaga		420 Lembaga		440 Lembaga		180 Lembaga		40.91 %		180 Lembaga		37.50 %		Kec. Bulak	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	61 Lembaga		61 Lembaga		61 Lembaga		61 Lembaga		100.00 %		61 Lembaga		100.00 %		Kec. Genteng	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	52 Lembaga		52 Lembaga		52 Lembaga		52 Lembaga		100.00 %		52 Lembaga		100.00 %		Kec. Gubeng	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	100 Lembaga		103 Lembaga		100 Lembaga		40 Lembaga		40.00 %		40 Lembaga		40.00 %		Kec. Jambangan	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Lembaga		116 Lembaga		116 Lembaga		50 Lembaga		43.10 %		50 Lembaga		43.10 %		Kec. Karangpilang	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		231 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		40 Pelaku Usaha		40.00 %		40 Pelaku Usaha		40.00 %		Kec. Krembangan	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	32 Lembaga		32 Lembaga		32 Lembaga		32 Lembaga		100.00 %		32 Lembaga		100.00 %		Kec. Lakarsantri	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		92 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		25 Pelaku Usaha		25.00 %		25 Pelaku Usaha		25.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk	52 Lembaga		50 Lembaga		50 Lembaga		50 Lembaga		100.00 %		50 Lembaga		96.15 %		Kec. Pabean Cantian	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pemberdayaan dapat disediakan																
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha		100 pelaku usaha		100 pelaku usaha		40 pelaku usaha		40.00 %		40 pelaku usaha		40.00 %		Kec. Pakal	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	480 Lembaga		421 Lembaga		440 Lembaga		144 Lembaga		32.73 %		144 Lembaga		30.00 %		Kec. Bubutan	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	120 Lembaga		120 Lembaga		120 Lembaga		50 Lembaga		41.67 %		50 Lembaga		41.67 %		Kec. Gayungan	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	37 Lembaga		38 Lembaga		38 Lembaga		38 Lembaga		100.00 %		38 Lembaga		102.70 %		Kec. Sambikerep	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	148 Lembaga		148 Lembaga		148 Lembaga		60 Lembaga		40.54 %		60 Lembaga		40.54 %		Kec. Sambikerep	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	29 Lembaga		29 Lembaga		29 Lembaga		29 Lembaga		100.00 %		29 Lembaga		100.00 %		Kec. Karangpilang	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	29 Lembaga		23 Lembaga		15 Lembaga		5 Lembaga		33.33 %		5 Lembaga		17.24 %		Kec. Genteng	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	72 Lembaga		72 Lembaga		72 Lembaga		72 Lembaga		100.00 %		72 Lembaga		100.00 %		Kec. Sawahan	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	25 Lembaga		25 Lembaga		25 Lembaga		5 Lembaga		20.00 %		5 Lembaga		20.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	38 Lembaga		43 Lembaga		38 Lembaga		38 Lembaga		100.00 %		38 Lembaga		100.00 %		Kec. Kenjeran	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	30 Lembaga		30 Lembaga		30 Lembaga		30 Lembaga		100.00 %		30 Lembaga		100.00 %		Kec. Gayungan	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	70 Lembaga		70 Lembaga		70 Lembaga		70 Lembaga		100.00 %		70 Lembaga		100.00 %		Kec. Semampir	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga		44 Lembaga		44 Lembaga		44 Lembaga		100.00 %		44 Lembaga		100.00 %		Kec. Krembangan	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	48 Lembaga		48 Lembaga		48 Lembaga		48 Lembaga		100.00 %		48 Lembaga		100.00 %		Kec. Simokerto	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	26 Lembaga		26 Lembaga		26 Lembaga		26 Lembaga		100.00 %		26 Lembaga		100.00 %		Kec. Jambangan	
			Jumlah Potensi Usaha yang	50 Lembaga		50 Lembaga		50 Lembaga		20 Lembaga		40.00 %		20 Lembaga		40.00 %		Kec. Pabean	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			difasilitasi.															Cantian	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	29 Lembaga		29 Lembaga		29 Lembaga		29 Lembaga		100.00 %		29 Lembaga		100.00 %		Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	288 Lembaga		288 Lembaga		288 Lembaga		96 Lembaga		33.33 %		96 Lembaga		33.33 %		Kec. Sawahan	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	110 Unit Usaha		110 Unit Usaha		110 Unit Usaha		44 Unit Usaha		40.00 %		44 Unit Usaha		40.00 %		Kec. Rungkut	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	78 Lembaga		78 Lembaga		78 Lembaga		78 Lembaga		100.00 %		78 Lembaga		100.00 %		Kec. Tambaksari	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	62 Unit Usaha		62 Unit Usaha		288 Unit Usaha		120 Unit Usaha		41.67 %		120 Unit Usaha		193.55 %		Kec. Asemrowo	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Pelaku Usaha		50 Pelaku Usaha		50 Pelaku Usaha		15 Pelaku Usaha		30.00 %		15 Pelaku Usaha		30.00 %		Kec. Sukolilo	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	140 Unit Usaha		140 Unit Usaha		140 Unit Usaha		35 Unit Usaha		25.00 %		35 Unit Usaha		25.00 %		Kec. Semampir	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	36 Lembaga		36 Lembaga		36 Lembaga		36 Lembaga		100.00 %		36 Lembaga		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	34 Lembaga		34 Lembaga		34 Lembaga		34 Lembaga		100.00 %		34 Lembaga		100.00 %		Kec. Wiyung	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		50 Pelaku Usaha		50.00 %		50 Pelaku Usaha		50.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	150 pelaku usaha		209 pelaku usaha		150 pelaku usaha		40 pelaku usaha		26.67 %		40 pelaku usaha		26.67 %		Kec. Tambaksari	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	51 Lembaga		51 Lembaga		51 Lembaga		51 Lembaga		100.00 %		51 Lembaga		100.00 %		Kec. Tandes	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		42 Pelaku Usaha		42.00 %		42 Pelaku Usaha		42.00 %		Kec. Tandes	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	48 Lembaga		48 Lembaga		48 Lembaga		48 Lembaga		100.00 %		48 Lembaga		100.00 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	192 Lembaga		192 Lembaga		192 Lembaga		50 Lembaga		26.04 %		50 Lembaga		26.04 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		25 Pelaku Usaha		25.00 %		25 Pelaku Usaha		25.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	25 Lembaga		26 Lembaga		25 Lembaga		25 Lembaga		100.00 %		25 Lembaga		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	20 unit usaha		20 unit usaha		20 unit usaha		8 unit usaha		40.00 %		8 unit usaha		40.00 %		Kec. Wiyung	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	17 Lembaga		17 Lembaga		17 Lembaga		17 Lembaga		100.00 %		17 Lembaga		100.00 %		Kec. Asemrowo	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	26 Lembaga		26 Lembaga		26 Lembaga		26 Lembaga		100.00 %		26 Lembaga		100.00 %		Kec. Benowo	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	53 Lembaga		58 Lembaga		53 Lembaga		53 Lembaga		100.00 %		53 Lembaga		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga		44 Lembaga		44 Lembaga		44 Lembaga		100.00 %		44 Lembaga		100.00 %		Kec. Bubutan	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	74 Lembaga		74 Lembaga		74 Lembaga		74 Lembaga		100.00 %		74 Lembaga		100.00 %		Kec. Rungkut	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	156 Lembaga		203 Lembaga		156 Lembaga		65 Lembaga		41.67 %		65 Lembaga		41.67 %		Kec. Wonocolo	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga		44 Lembaga		44 Lembaga		44 Lembaga		100.00 %		44 Lembaga		100.00 %		Kec. Wonocolo	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	21 Lembaga		21 Lembaga		21 Lembaga		21 Lembaga		100.00 %		21 Lembaga		100.00 %		Kec. Bulak	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	31 Lembaga		31 Lembaga		31 Lembaga		31 Lembaga		100.00 %		31 Lembaga		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Unit Usaha		116 Unit Usaha		116 Unit Usaha		50 Unit Usaha		43.10 %		50 Unit Usaha		43.10 %		Kec. Wonokromo	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		110 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		50 Pelaku Usaha		50.00 %		50 Pelaku Usaha		50.00 %		Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	90 Unit Kerja		91 Unit Kerja		90 Unit Kerja		37 Unit Kerja		41.11 %		37 Unit Kerja		41.11 %		Kec. Gubeng	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	58 Lembaga		58 Lembaga		58 Lembaga		58 Lembaga		100.00 %		58 Lembaga		100.00 %		Kec. Wonokromo	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha		102 pelaku usaha		100 pelaku usaha		50 pelaku usaha		50.00 %		50 pelaku usaha		50.00 %		Kec. Kenjeran	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	124 Lembaga		124 Lembaga		124 Lembaga		54 Lembaga		43.55 %		54 Lembaga		43.55 %		Kec. Lakarsantri	
			Jumlah Lembaga yang	34 Lembaga		34 Lembaga		34 Lembaga		34 Lembaga		100.00		34 Lembaga		100.00 %		Kec. Pakal	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan									%							
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Lembaga		50 Lembaga		50 Lembaga		20 Lembaga		40.00 %		20 Lembaga		40.00 %		Kec. Simokerto	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	67 Lembaga		67 Lembaga		67 Lembaga		67 Lembaga		100.00 %		67 Lembaga		100.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.03.00 04	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			16.079		7.200		14.400		1.200		8.33%		8.400		52.24 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan		2 Laporan		33.33 %		2 Laporan		33.33 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.03.00 04	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			8.039		3.000		14.000		1.850		13.21%		4.850		60.33 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.03.00 04	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			9.179		4.320		8.783		2.160		24.59%		6.480		70.60 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan		48 Laporan		48 Laporan		21 Laporan		43.75 %		21 Laporan		43.75 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.03.00 04	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			15.000		4.320		12.000		0		0.00%		4.320		28.80 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan		48 Laporan		48 Laporan		20 Laporan		41.67 %		20 Laporan		41.67 %		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.03.00 04	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			51.641		3.600		3.600		0		0.00%		3.600		6.97 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.03.00 04	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			15.312		7.200		14.652		4.800		32.76%		12.000		78.37 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan		48 Laporan		48 Laporan		20 Laporan		41.67 %		20 Laporan		41.67 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.03.00 04	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			19.294		9.030		22.000		6.600		30.00%		15.630		81.01 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.03.00 04	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			23.854		8.370		22.394		3.000		13.40%		11.370		47.67 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.03.00 04	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			25.324		14.130		22.530		2.700		11.98%		16.830		66.46 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan		53 Laporan		48 Laporan		20 Laporan		41.67 %		20 Laporan		41.67 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.03.0004	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			10.049		3.600		5.760		1.800		31.25%		5.400		53.74 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.03.0004	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			42.599		9.930		16.800		0		0.00%		9.930		23.31 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.03.0004	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			73.733		20.583		47.866		1.200		2.51%		21.783		29.54 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.03.0004	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			12.863		5.760		11.520		3.840		33.33%		9.600		74.63 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.03.0004	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			10.049		4.500		9.000		3.600		40.00%		8.100		80.60 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.03.0004	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			9.647		4.200		9.231		3.060		33.15%		7.260		75.26 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan		3 Laporan		1 Laporan		33.33 %		1 Laporan		33.33 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.03.0004	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			12.059		12.990		11.520		2.880		25.00%		15.870		131.60 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.03.0004	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			3.350		4.320		8.640		2.940		34.03%		7.260		216.74 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.03.0004	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			19.294		10.080		17.280		1.790		10.36%		11.870		61.52 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		75.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.03.0004	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			17.824		16.110		21.090		0		0.00%		16.110		90.38 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Genteng	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																
	7.01.03.2.03.00 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			3.182		480		2.400		0		0.00%		480		15.08 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.03.00 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			3.350		43.786		45.812		0		0.00%		43.786		1,307.16 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan		48 Laporan		48 Laporan		20 Laporan		41.67 %		20 Laporan		41.67 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.03.00 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			31.822		18.900		25.500		6.150		24.12%		25.050		78.72 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.03.00 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			23.854		6.100		20.400		2.640		12.94%		8.740		36.64 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.03.00 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			16.414		9.900		14.700		2.160		14.69%		12.060		73.48 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.03.00 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			9.647		5.040		8.640		2.880		33.33%		7.920		82.10 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.03.2.03.00 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			16.414		7.200		15.705		5.280		33.62%		12.480		76.03 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.03.00 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			28.539		10.640		16.440		1.200		7.30%		11.840		41.49 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.03.00 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			14.999		13.394		27.430		1.200		4.37%		14.594		97.30 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.03.00 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			50.246		6.840		21.060		5.540		26.31%		12.380		24.64 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha	4 Laporan		7 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Mulyorejo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Ekonomi Masyarakat																	
	7.01.03.2.03.0004	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			23.448		11.500		17.600		2.200		12.50%		13.700		58.43 %		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		2 Laporan		50.00 %		2 Laporan		50.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.03.0004	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			23.113		4.500		21.154		5.760		27.23%		10.260		44.39 %		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan		48 Laporan		48 Laporan		20 Laporan		41.67 %		20 Laporan		41.67 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.03.0003	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan**			71.766		78.861		53.780		15.511		28.84%		94.372		131.50 %		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	17 Unit		38 Unit		17 Unit		17 Unit		100.00 %		17 Unit		100.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.03.2.03.0003	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan**			281.439		252.208		211.955		61.132		28.84%		313.340		111.33 %		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	67 Unit		67 Unit		67 Unit		67 Unit		100.00 %		67 Unit		100.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.03.0003	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan**			302.442		270.658		227.772		65.694		28.84%		336.352		111.21 %		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	72 Unit		92 Unit		72 Unit		72 Unit		100.00 %		72 Unit		100.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.03.0003	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan**			98.701		137.730		82.251		23.723		28.84%		161.453		163.58 %		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	26 Unit		50 Unit		26 Unit		26 Unit		100.00 %		26 Unit		100.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.03.0003	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan**			79.720		162.653		79.720		19.930		25.00%		182.583		229.03 %		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	21 Unit		94 Unit		21 Unit		21 Unit		100.00 %		21 Unit		100.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.03.0003	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan**			134.419		170.358		101.232		29.197		28.84%		199.556		148.46 %		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	32 Unit		59 Unit		32 Unit		32 Unit		100.00 %		32 Unit		100.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.03.0003	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan**			130.218		286.793		98.069		28.285		28.84%		315.078		241.96 %		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang	31 Unit		60 Unit		31 Unit		31 Unit		100.00 %		31 Unit		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Disediakan																
	7.01.03.2.03.00 03	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan**			218.430		215.904		158.175		45.621		28.84%		261.525		119.73 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	52 Unit		55 Unit		50 Unit		50 Unit		100.00 %		50 Unit		96.15 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.03.00 03	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan**			184.826		169.966		139.194		40.146		28.84%		210.112		113.68 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit		49 Unit		44 Unit		44 Unit		100.00 %		44 Unit		100.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.03.00 03	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan**			142.820		133.699		107.559		31.022		28.84%		164.721		115.33 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	34 Unit		71 Unit		34 Unit		34 Unit		100.00 %		34 Unit		100.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.03.00 03	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan**			121.817		116.889		91.741		26.460		28.84%		143.349		117.68 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	29 Unit		32 Unit		29 Unit		29 Unit		100.00 %		29 Unit		100.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.03.00 03	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan**			294.041		400.278		221.445		63.869		28.84%		464.147		157.85 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	70 Unit		86 Unit		70 Unit		70 Unit		100.00 %		70 Unit		100.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.03.00 03	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan**			201.628		209.148		151.848		43.796		28.84%		252.945		125.45 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	48 Unit		48 Unit		48 Unit		48 Unit		100.00 %		48 Unit		100.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.03.00 03	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan**			184.826		184.621		139.194		40.146		28.84%		224.767		121.61 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit		51 Unit		44 Unit		44 Unit		100.00 %		44 Unit		100.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.03.00 03	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan**			159.622		242.049		144.256		34.672		24.04%		276.721		173.36 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	38 Unit		54 Unit		38 Unit		38 Unit		100.00 %		38 Unit		100.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.03.00 03	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan**			105.015		117.852		79.088		22.811		28.84%		140.663		133.95 %		
			Jumlah Sarana dan	25 Unit		66 Unit		25 Unit		25 Unit		100.00		25 Unit		100.00 %		Kec. Tenggilis	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan									%						Mejoyo	
	7.01.03.2.03.00 03	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan**			310.843		274.956		280.919		67.519		24.04%		342.475		110.18 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	74 Unit		78 Unit		74 Unit		74 Unit		100.00 %		74 Unit		100.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.03.00 03	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan**			222.631		299.351		167.666		48.358		28.84%		347.709		156.18 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	53 Unit		85 Unit		53 Unit		53 Unit		100.00 %		53 Unit		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.03.00 03	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan**			218.430		491.770		164.502		47.446		28.84%		539.216		246.86 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	52 Unit		108 Unit		52 Unit		52 Unit		100.00 %		52 Unit		100.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.03.00 03	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan**			193.827		439.110		193.606		46.533		24.04%		485.644		250.56 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	51 Unit		223 Unit		51 Unit		51 Unit		100.00 %		51 Unit		100.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.03.00 03	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan**			184.826		214.498		167.033		40.146		24.04%		254.644		137.78 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit		93 Unit		44 Unit		44 Unit		100.00 %		44 Unit		100.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.03.00 03	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan**			256.236		339.568		231.568		57.892		25.00%		397.460		155.12 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	52 Unit		183 Unit		61 Unit		61 Unit		100.00 %		61 Unit		117.31 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.03.00 03	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan**			182.218		175.185		182.218		43.796		24.04%		218.981		120.18 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	48 Unit		48 Unit		48 Unit		48 Unit		100.00 %		48 Unit		100.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.03.00 03	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan**			109.215		94.892		98.701		23.723		24.04%		118.615		108.61 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	26 Unit		26 Unit		26 Unit		26 Unit		100.00 %		26 Unit		100.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.03.00	**Penyediaan Sarana dan Prasarana**			121.817		140.934		91.742		26.460		28.84%		167.394		137.41 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	03	Lembaga Kemasyarakatan																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	29 Unit		37 Unit		29 Unit		29 Unit		100.00 %		29 Unit		100.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.03.00 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			243.634		391.635		183.483		39.690		21.63%		431.325		177.04 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	58 Unit		363 Unit		58 Unit		58 Unit		100.00 %		58 Unit		100.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.03.00 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			126.017		169.686		94.905		27.373		28.84%		197.058		156.37 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	30 Unit		118 Unit		30 Unit		30 Unit		100.00 %		30 Unit		100.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.03.00 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			155.422		269.218		120.213		34.672		28.84%		303.890		195.53 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	37 Unit		69 Unit		38 Unit		38 Unit		100.00 %		38 Unit		102.70 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.03.00 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			142.820		286.343		129.071		31.022		24.04%		317.366		222.21 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	34 Unit		455 Unit		34 Unit		34 Unit		100.00 %		34 Unit		100.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.03.00 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			151.221		321.147		113.886		32.847		28.84%		353.995		234.09 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	36 Unit		214 Unit		36 Unit		36 Unit		100.00 %		36 Unit		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.03.00 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			327.645		373.538		246.753		71.169		28.84%		444.707		135.73 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	78 Unit		102 Unit		78 Unit		78 Unit		100.00 %		78 Unit		100.00 %		Kec. Tambaksari	
141	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			5.087.451		7.875.918		4.457.673		1.503.156		33.72%		9.379.074		184.36%		
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Mulyorejo	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Genteng	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Asemrowo	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Perda di Kecamatan																
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tegalsari	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Rungkut	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Benowo	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Gubeng	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Pakal	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Krembangan	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Kenjeran	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tandes	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tambaksari	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Karangpilang	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wonocolo	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sukolilo	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Jambangan	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Gayungan	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran	100%		100.00 %		100%		99.54 %		99.54 %		99.54 %		99.54 %		Kec. Simokerto	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Perda di Kecamatan																
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sambikerep	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Bubutan	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Bulak	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wiyung	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Semampir	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sawahan	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wonokromo	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		101.59 %		101.59 %		101.59 %		101.59 %		Kec. Gunung Anyar	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Lakarsantri	-
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			5.087.451		7.875.918		4.457.673		1.503.156		33.72%		9.379.074		184.36%		
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi		12 Lokasi		12 Lokasi		12 Lokasi		100.00 %		12 Lokasi		100.00 %		Kec. Genteng	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi		24 Lokasi		24 Lokasi		24 Lokasi		100.00 %		24 Lokasi		100.00 %		Kec. Gubeng	
			Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		4 Laporan		33.33 %		4 Laporan		33.33 %		Kec. Bulak	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan																
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	82 Lokasi		8 Lokasi		8 Lokasi		8 Lokasi		100.00 %		8 Lokasi		9.76 %		Kec. Jambangan	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Krembangan	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	26 Lokasi		29 Lokasi		26 Lokasi		26 Lokasi		100.00 %		26 Lokasi		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi		24 Lokasi		24 Lokasi		26 Lokasi		108.33 %		26 Lokasi		108.33 %		Kec. Gayungan	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi		14 Lokasi		14 Lokasi		14 Lokasi		100.00 %		14 Lokasi		100.00 %		Kec. Simokerto	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi		12 Lokasi		12 Lokasi		12 Lokasi		100.00 %		12 Lokasi		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi		12 Lokasi		12 Lokasi		12 Lokasi		100.00 %		12 Lokasi		100.00 %		Kec. Lakarsantri	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	22 Lokasi		22 Lokasi		22 Lokasi		22 Lokasi		100.00 %		22 Lokasi		100.00 %		Kec. Rungkut	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		100.00 %		15 Lokasi		100.00 %		Kec. Pakal	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan	11 Lokasi		12 Lokasi		11 Lokasi		11 Lokasi		100.00 %		11 Lokasi		100.00 %		Kec. Sukolilo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			ditertibkan																
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	16 Lokasi		16 Lokasi		16 Lokasi		16 Lokasi		100.00 %		16 Lokasi		100.00 %		Kec. Semampir	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 lokasi		15 lokasi		15 lokasi		15 lokasi		100.00 %		15 lokasi		100.00 %		Kec. Tandes	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	21 Lokasi		21 Lokasi		21 Lokasi		21 Lokasi		100.00 %		21 Lokasi		100.00 %		Kec. Tegalsari	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		100.00 %		15 Lokasi		100.00 %		Kec. Sambikerep	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14 lokasi		14 lokasi		14 lokasi		14 lokasi		100.00 %		14 lokasi		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi		14 Lokasi		14 Lokasi		14 Lokasi		100.00 %		14 Lokasi		100.00 %		Kec. Benowo	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 lokasi		15 lokasi		15 lokasi		15 lokasi		100.00 %		15 lokasi		100.00 %		Kec. Wiyung	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	20 Lokasi		20 Lokasi		20 Lokasi		20 Lokasi		100.00 %		20 Lokasi		100.00 %		Kec. Wonokromo	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	5 Lokasi		5 Lokasi		5 Lokasi		5 Lokasi		100.00 %		5 Lokasi		100.00 %		Kec. Asemrowo	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan	12 Lokasi		12 Lokasi		12 Lokasi		12 Lokasi		100.00 %		12 Lokasi		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			ditertibkan																
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi		8 Lokasi		8 Lokasi		8 Lokasi		100.00 %		8 Lokasi		100.00 %		Kec. Wonocolo	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		100.00 %		15 Lokasi		100.00 %		Kec. Bubutan	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi		16 Lokasi		14 Lokasi		14 Lokasi		100.00 %		14 Lokasi		100.00 %		Kec. Sawahan	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi		8 Lokasi		8 Lokasi		8 Lokasi		100.00 %		8 Lokasi		100.00 %		Kec. Karangpilang	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi		24 Lokasi		24 Lokasi		24 Lokasi		100.00 %		24 Lokasi		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	10 Lokasi		10 Lokasi		10 Lokasi		10 Lokasi		100.00 %		10 Lokasi		100.00 %		Kec. Kenjeran	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		26 Lokasi		173.33 %		26 Lokasi		173.33 %		Kec. Gunung Anyar	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	17 lokasi		17 lokasi		17 lokasi		17 lokasi		100.00 %		17 lokasi		100.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			155.275		134.911		112.524		37.344		33.19%		172.256		110.94 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		9 Laporan		75.00 %		9 Laporan		75.00 %		Kec. Bubutan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.04.2.01.00 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			177.759		252.340		146.115		47.085		32.22%		299.425		168.44 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Krembangan	
	7.01.04.2.01.00 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			262.249		231.581		141.186		48.666		34.47%		280.248		106.86 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Genteng	
	7.01.04.2.01.00 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			154.683		238.435		158.001		40.118		25.39%		278.553		180.08 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.04.2.01.00 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			169.641		148.686		108.600		34.279		31.56%		182.965		107.85 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.04.2.01.00 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			88.039		210.984		113.353		37.784		33.33%		248.769		282.57 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			145.639		190.645		178.618		58.736		32.88%		249.381		171.23 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			199.767		200.512		150.299		50.055		33.30%		250.567		125.43 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan		360 Laporan		360 Laporan		150 Laporan		41.67 %		150 Laporan		41.67 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			167.097		187.136		179.340		59.139		32.98%		246.275		147.38 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan		361 Laporan		360 Laporan		150 Laporan		41.67 %		150 Laporan		41.67 %		Kec. Jambangan	
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			120.295		283.555		111.625		39.300		35.21%		322.854		268.39 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Pakal	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Kecamatan																
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			194.561		428.076		152.554		44.326		29.06%		472.402		242.80 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			157.159		185.604		148.471		48.836		32.89%		234.440		149.17 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			171.867		179.692		132.733		44.180		33.29%		223.873		130.26 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			142.826		254.976		134.286		49.270		36.69%		304.246		213.02 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Semampir	
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah**			309.309		238.946		244.618		71.947		29.41%		310.894		100.51 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Kecamatan																	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			146.260		265.875		223.018		74.123		33.24%		339.998		232.46 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Tandes	
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			188.612		313.654		172.703		55.877		32.35%		369.531		195.92 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			154.049		265.669		74.914		31.199		41.65%		296.868		192.71 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			131.678		115.252		131.917		43.608		33.06%		158.860		120.64 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Simokerto	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
	7.01.04.2.01.00 01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			152.729		124.527		147.620		61.482		41.65%		186.009		121.79 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Wiyung	
	7.01.04.2.01.00 01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			152.234		145.887		115.459		39.961		34.61%		185.848		122.08 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Sawahan	
	7.01.04.2.01.00 01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			154.049		238.705		153.616		49.896		32.48%		288.601		187.34 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Rungkut	
	7.01.04.2.01.00 01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			151.735		292.283		148.872		48.618		32.66%		340.901		224.67 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan		2 Laporan		33.33 %		2 Laporan		33.33 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.04.2.01.00 01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,**			157.866		340.735		163.679		52.195		31.89%		392.930		248.90 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Gayungan	
	7.01.04.2.01.00 01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			165.164		122.039		107.197		35.581		33.19%		157.620		95.43 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.04.2.01.00 01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			31.844		89.548		79.324		26.374		33.25%		115.922		364.03 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		4 Laporan		33.33 %		4 Laporan		33.33 %		Kec. Bulak	
	7.01.04.2.01.00 01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			165.173		341.551		107.279		33.306		31.05%		374.858		226.95 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan		360 Laporan		360 Laporan		149 Laporan		41.39 %		149 Laporan		41.39 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.04.2.01.00 01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			316.157		667.168		201.197		104.188		51.78%		771.356		243.98 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Tambaksari	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			156.952		779.648		138.771		45.344		32.68%		824.993		525.63 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Gubeng	
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			129.511		165.066		130.719		39.932		30.55%		204.998		158.29 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan		2 Laporan		33.33 %		2 Laporan		33.33 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			117.273		242.232		149.067		50.405		33.81%		292.636		249.53 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Benowo	
142	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			145.220.138		1.269.277		2.480.670		386.561		15.58%		1.655.838		1.14%		
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		99.02 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sambikerep	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan	30.77 %		91.18 %		30.77 %		52.94 %		172.05 %		52.94 %		172.05 %		Kec. Gubeng	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			yang dipertimbangkan																
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Genteng	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		97.62 %		100%		99.13 %		99.13 %		99.13 %		99.13 %		Kec. Bubutan	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Krembangan	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Semampir	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		99.78 %		100%		99.84 %		99.84 %		99.84 %		99.84 %		Kec. Tambaksari	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37.16 %		53.75 %		37.16 %		81.08 %		218.19 %		81.08 %		218.19 %		Kec. Rungkut	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50.51 %		52.07 %		50.51 %		52.5 %		103.94 %		52.5 %		103.94 %		Kec. Tandes	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Pakal	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37.94 %		58.97 %		32.34 %		57.5 %		177.80 %		57.5 %		151.56 %		Kec. Wonocolo	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	47.02 %		47.37 %		47.02 %		78.63 %		167.23 %		78.63 %		167.23 %		Kec. Tambaksari	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	51%		51.57 %		51%		48.81 %		95.71 %		48.81 %		95.71 %		Kec. Sukomanunggal	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	25%		76.06 %		23.91 %		44.71 %		186.99 %		44.71 %		178.84 %		Kec. Lakarsantri	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Wonokromo	-
			Persentase data terverifikasi yang	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sawahan	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			dibutuhkan Perangkat Daerah																
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	81.7 %		70.09 %		67.53 %		53.66 %		79.46 %		53.66 %		65.68 %		Kec. Simokerto	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.37 %		64.14 %		24.37 %		54.08 %		221.91 %		54.08 %		221.91 %		Kec. Sambikerep	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Sukolilo	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		99.14 %		100%		99.83 %		99.83 %		99.83 %		99.83 %		Kec. Wonocolo	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Gayungan	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		99.22 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Krembangan	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		99.77 %		100%		99.94 %		99.94 %		99.94 %		99.94 %		Kec. Pabean Cantian	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Bubutan	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		99.50 %		100%		99.98 %		99.98 %		99.98 %		99.98 %		Kec. Tegalsari	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Genteng	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Gubeng	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Mulyorejo	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Semampir	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			baik oleh masyarakat																
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	25%		75.09 %		23.91 %		43.12 %		180.34 %		43.12 %		172.48 %		Kec. Semampir	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Karangpilang	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Benowo	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wiyung	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	65.01 %		68.49 %		35.29 %		69.64 %		197.34 %		69.64 %		107.12 %		Kec. Wonokromo	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.25 %		61.29 %		23.25 %		58.18 %		250.24 %		58.18 %		250.24 %		Kec. Tegalsari	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tandes	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	25%		64.29 %		23.91 %		51.85 %		216.85 %		51.85 %		207.40 %		Kec. Bulak	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		99.51 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Kenjeran	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	20%		55.43 %		17%		32.79 %		192.88 %		32.79 %		163.95 %		Kec. Pabean Cantian	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Tandes	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Sawahan	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37.11 %		57.22 %		37.11 %		31.72 %		85.48 %		31.72 %		85.48 %		Kec. Krembangan	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Rungkut	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	31.3 %		62.88 %		27.76 %		52.85 %		190.38 %		52.85 %		168.85 %		Kec. Jambangan	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		99.74 %		100%		99.93 %		99.93 %		99.93 %		99.93 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Wonocolo	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	27.27 %		68.22 %		27.27 %		44.44 %		162.96 %		44.44 %		162.96 %		Kec. Asemrowo	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Benowo	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Lakarsantri	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Kenjeran	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.37 %		59.17 %		24.37 %		33.33 %		136.77 %		33.33 %		136.77 %		Kec. Bubutan	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Asemrowo	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Wiyung	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Simokerto	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	33.33 %		55.98 %		33.33 %		51.22 %		153.68 %		51.22 %		153.68 %		Kec. Kenjeran	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Pakal	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Bulak	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wonokromo	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Bulak	-
			Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	23.38 %		74.29 %		23.38 %		63.56 %		271.86 %		63.56 %		271.86 %		Kec. Genteng	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Jambangan	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Tambaksari	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Gayungan	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		99.90 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sukolilo	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Tegalsari	-
			Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	24.73 %		74.51 %		24.73 %		74.36 %		300.69 %		74.36 %		300.69 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	53.19 %		63.92 %		53.19 %		57.86 %		108.78 %		57.86 %		108.78 %		Kec. Pakal	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Karangpilang	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Sambikerep	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	100%		73.86 %		89.1 %		49.61 %		55.68 %		49.61 %		49.61 %		Kec. Karangpilang	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Mulyorejo	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	34.45 %		40.99 %		34.45 %		26.12 %		75.82 %		26.12 %		75.82 %		Kec. Benowo	-
			Persentase data terverifikasi yang	100%		99.93 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Simokerto	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			dibutuhkan Perangkat Daerah																
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	89.61 %		72.09 %		58.44 %		51.72 %		88.50 %		51.72 %		57.72 %		Kec. Sawahan	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		98.10 %		100%		97.68 %		97.68 %		97.68 %		97.68 %		Kec. Gunung Anyar	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	40.51 %		60.36 %		40.51 %		55.56 %		137.15 %		55.56 %		137.15 %		Kec. Mulyorejo	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Kec. Gubeng	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	55.81 %		64.96 %		55.81 %		39.58 %		70.92 %		39.58 %		70.92 %		Kec. Wiyung	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26.32 %		76.29 %		26.32 %		45.45 %		172.68 %		45.45 %		172.68 %		Kec. Dukuh Pakis	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50%		35.78 %		50%		62.37 %		124.74 %		62.37 %		124.74 %		Kec. Gunung Anyar	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		98.99 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Rungkut	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		99.94 %		99.94 %		99.94 %		99.94 %		Kec. Lakarsantri	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		99.55 %		100%		99.33 %		99.33 %		99.33 %		99.33 %		Kec. Asemrowo	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26.71 %		56.52 %		26.71 %		50.89 %		190.53 %		50.89 %		190.53 %		Kec. Sukolilo	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		99.34 %		100%		99.76 %		99.76 %		99.76 %		99.76 %		Kec. Jambangan	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	32.87 %		72.73 %		30.15 %		54.39 %		180.40 %		54.39 %		165.47 %		Kec. Gayungan	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			267.325		95.442		124.846		92.340		73.96%		187.782		70.24%		
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan	6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		100.00 %		6 lembaga		100.00 %		Kec. Benowo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			musrenbang pada tingkat kecamatan																
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga		4 Lembaga		4 Lembaga		4 Lembaga		100.00 %		4 Lembaga		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		7 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Genteng	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		7 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Gubeng	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Jambangan	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		100.00 %		2 Laporan		100.00 %		Kec. Krembangan	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Lakarsantri	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		7 Lembaga		116.67 %		7 Lembaga		116.67 %		Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Pakal	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Kenjeran	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Sambikerep	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		100.00 %		6 lembaga		100.00 %		Kec. Sawahan	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat	4 Lembaga		7 Lembaga		4 Lembaga		4 Lembaga		100.00 %		4 Lembaga		100.00 %		Kec. Semampir	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			kecamatan																
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Rungkut	
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkaitt	2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan		100.00 %		2 laporan		100.00 %		Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Gayungan	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	5 lembaga		5 lembaga		5 lembaga		5 lembaga		100.00 %		5 lembaga		100.00 %		Kec. Simokerto	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		7 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Sukolilo	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		7 Lembaga		116.67 %		7 Lembaga		116.67 %		Kec. Tambaksari	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		100.00 %		6 lembaga		100.00 %		Kec. Tandes	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		100.00 %		2 Laporan		100.00 %		Kec. Bulak	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Asemrowo	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		7 Lembaga		116.67 %		7 Lembaga		116.67 %		Kec. Bubutan	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga		4 Lembaga		4 Lembaga		4 Lembaga		100.00 %		4 Lembaga		100.00 %		Kec. Wonokromo	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Karangpilang	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		100.00 %		6 lembaga		100.00 %		Kec. Wiyung	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat Kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.02.2.01.00 01	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			10.786		2.010		2.250		1.470		65.33%		3.480		32.26 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan		100.00 %		6 Laporan		100.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.02.2.01.00 01	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			8.843		2.550		4.200		4.200		100.00 %		6.750		76.33 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		100.00 %		2 Laporan		100.00 %		Kec. Krembangan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			8.374		3.000		3.000		3.000		100.00 %		6.000		71.65 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			2.512		2.250		2.220		2.220		100.00 %		4.470		177.93 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			6.699		3.600		3.600		3.600		100.00 %		7.200		107.47 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			14.739		9.720		6.300		6.300		100.00 %		16.020		108.69 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.02.2.01.00	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan**			3.752		3.060		3.590		1.740		48.47%		4.800		127.94 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	01	dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.02.2.01.00 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			5.108		3.000		10.000		3.000		30.00%		6.000		117.46 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.02.2.01.00 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			6.967		2.250		2.250		2.250		100.00 %		4.500		64.59 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.02.2.01.00 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			8.374		3.750		3.600		3.600		100.00 %		7.350		87.77 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.02.2.01.00 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			3.048		2.730		2.917		2.910		99.77%		5.640		185.03 %		
			Jumlah Laporan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00		1 Laporan		100.00 %		Kec. Sawahan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									%							
	7.01.02.2.01.00 01	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			12.729		1.950		1.950		1.950		100.00 %		3.900		30.64 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.02.2.01.00 01	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			5.025		3.420		4.500		1.050		23.33%		4.470		88.96 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.02.2.01.00 01	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			5.694		5.100		5.449		5.400		99.10%		10.500		184.39 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.02.2.01.00 01	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			6.699		1.650		1.650		1.650		100.00 %		3.300		49.26 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Gayungan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.02.2.01.00 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			4.020		5.400		2.100		2.100		100.00 %		7.500		186.58 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.02.2.01.00 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			12.394		1.050		1.050		1.050		100.00 %		2.100		16.94 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.02.2.01.00 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			15.779		3.792		4.500		4.500		100.00 %		8.292		52.55 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.02.2.01.00 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			10.049		2.340		2.418		0		0.00%		2.340		23.29 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		100.00 %		2 Laporan		100.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.02.2.01.00 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			3.852		3.450		3.450		3.450		100.00 %		6.900		179.12 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.02.2.01.00 01	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			10.887		2.400		2.700		2.700		100.00 %		5.100		46.85 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.02.2.01.00 01	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			10.049		2.700		9.000		6.000		66.67%		8.700		86.57 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	125 Laporan		125 Laporan		125 Laporan		125 Laporan		100.00 %		125 Laporan		100.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.02.2.01.00 01	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			5.427		4.860		5.192		5.190		99.95%		10.050		185.20 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.02.2.01.00 01	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			15.375		3.840		3.000		3.000		100.00 %		6.840		44.49 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tambaksari	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Instansi Vertikal Terkait																
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			3.350		1.980		2.160		1.020		47.22%		3.000		89.56 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	178 Laporan		178 Laporan		178 Laporan		178 Laporan		100.00 %		178 Laporan		100.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			16.079		2.100		4.200		4.200		100.00 %		6.300		39.18 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			8.441		1.410		5.400		990		18.33%		2.400		28.43 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			8.910		1.980		1.800		1.800		100.00 %		3.780		42.42 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal**			19.294		2.700		12.000		6.600		55.00%		9.300		48.20 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Terkait																	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			3.350		3.000		6.000		3.000		50.00%		6.000		179.12 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			10.719		2.400		2.400		2.400		100.00 %		4.800		44.78 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		100.00 %		2 Laporan		100.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			138.837.194		694.187		1.095.913		250.672		22.87%		944.859		0.68%		
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	188 lembaga		193 lembaga		193 lembaga		193 lembaga		100.00 %		193 lembaga		102.66 %		Kec. Benowo	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	431 Lembaga		431 Lembaga		431 Lembaga		431 Lembaga		100.00 %		431 Lembaga		100.00 %		Kec. Krembangan	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	346 Lembaga		346 Lembaga		346 Lembaga		346 Lembaga		100.00 %		346 Lembaga		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Jumlah lembaga	158 Lembaga		158 Lembaga		158 Lembaga		158 Lembaga		100.00		158 Lembaga		100.00 %		Kec. Bulak	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan									%						
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	488 Lembaga		497 Lembaga		497 Lembaga		497 Lembaga		100.00 %		497 Lembaga		101.84 %		Kec. Rungkut	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	636 Lembaga		636 Lembaga		636 Lembaga		636 Lembaga		100.00 %		636 Lembaga		100.00 %		Kec. Semampir	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	376 Lembaga		371 Lembaga		371 Lembaga		371 Lembaga		100.00 %		371 Lembaga		98.67 %		Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	220 Lembaga		220 Lembaga		220 Lembaga		220 Lembaga		100.00 %		220 Lembaga		100.00 %		Kec. Karangpilang	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	439 Lembaga		441 Lembaga		441 Lembaga		441 Lembaga		100.00 %		441 Lembaga		100.46 %		Kec. Sukolilo	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	414 Lembaga		414 Lembaga		414 Lembaga		414 Lembaga		100.00 %		414 Lembaga		100.00 %		Kec. Bubutan	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	460 Lembaga		460 Lembaga		460 Lembaga		460 Lembaga		100.00 %		460 Lembaga		100.00 %		Kec. Kenjeran	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	217 Lembaga		217 Lembaga		219 Lembaga		219 Lembaga		100.00 %		219 Lembaga		100.92 %		Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	356 lembaga		356 lembaga		356 lembaga		356 lembaga		100.00 %		356 lembaga		100.00 %		Kec. Simokerto	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung	480 Lembaga		480 Lembaga		480 Lembaga		480 Lembaga		100.00 %		480 Lembaga		100.00 %		Kec. Gubeng	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			penyelenggaraan urusan pemerintahan																
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	197 Lembaga		197 Lembaga		197 Lembaga		197 Lembaga		100.00 %		197 Lembaga		100.00 %		Kec. Gayungan	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	749 Lembaga		749 Lembaga		751 Lembaga		751 Lembaga		100.00 %		751 Lembaga		100.27 %		Kec. Tambaksari	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	139 Lembaga		139 Lembaga		139 Lembaga		139 Lembaga		100.00 %		139 Lembaga		100.00 %		Kec. Asemrowo	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	260 Lembaga		261 Lembaga		261 Lembaga		261 Lembaga		100.00 %		261 Lembaga		100.38 %		Kec. Sambikerep	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	365 Lembaga		364 Lembaga		364 Lembaga		364 Lembaga		100.00 %		364 Lembaga		99.73 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	185 Lembaga		185 Lembaga		185 Lembaga		185 Lembaga		100.00 %		185 Lembaga		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	211 lembaga		212 lembaga		211 lembaga		211 lembaga		100.00 %		211 lembaga		100.00 %		Kec. Wiyung	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	280 Lembaga		281 Lembaga		281 Lembaga		281 Lembaga		100.00 %		281 Lembaga		100.36 %		Kec. Wonocolo	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	627 lembaga		627 lembaga		627 lembaga		627 lembaga		100.00 %		627 lembaga		100.00 %		Kec. Sawahan	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	568 Lembaga		568 Lembaga		568 Lembaga		568 Lembaga		100.00 %		568 Lembaga		100.00 %		Kec. Wonokromo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	323 Lembaga		323 Lembaga		323 Lembaga		323 Lembaga		100.00 %		323 Lembaga		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	371 lembaga		371 lembaga		371 lembaga		371 lembaga		100.00 %		371 lembaga		100.00 %		Kec. Tandes	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	200 Lembaga		205 Lembaga		205 Lembaga		205 Lembaga		100.00 %		205 Lembaga		102.50 %		Kec. Lakarsantri	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	196 Lembaga		196 Lembaga		196 Lembaga		392 Lembaga		200.00 %		392 Lembaga		200.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	364 Lembaga		364 Lembaga		364 Lembaga		364 Lembaga		100.00 %		364 Lembaga		100.00 %		Kec. Genteng	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	229 Lembaga		229 Lembaga		229 Lembaga		229 Lembaga		100.00 %		229 Lembaga		100.00 %		Kec. Pakal	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	168 Lembaga		168 Lembaga		168 Lembaga		214 Lembaga		127.38 %		214 Lembaga		127.38 %		Kec. Jambangan	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			2.454.403		12.701		100.056		3.175		3.17%		15.876		0.65 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			6.200.886		31.104		25.920		12.960		50.00%		44.064		0.71 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Gubeng	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada**			5.594.402		27.929		23.274		9.310		40.00%		37.238		0.67 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Krembangan	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			5.798.635		29.344		24.840		9.931		39.98%		39.274		0.68 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			5.890.578		28.517		28.577		11.907		41.67%		40.424		0.69 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan		60 Laporan		60 Laporan		25 Laporan		41.67 %		25 Laporan		41.67 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			4.708.920		23.069		19.847		7.690		38.74%		30.758		0.65 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Simokerto	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			2.745.070		13.284		11.070		4.320		39.02%		17.604		0.64 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			4.852.656		23.301		320.137		9.828		3.07%		33.129		0.68 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Genteng	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			6.686.608		22.421		18.684		7.474		40.00%		29.894		0.45 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Mulyorejo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Wilayah Kecamatan																
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			2.876.732		13.673		11.394		4.558		40.00%		18.230		0.63 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Wiyung	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			9.280.353		41.013		110.036		13.522		12.29%		54.534		0.59 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Sawahan	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			2.483.134		11.988		9.990		3.996		40.00%		15.984		0.64 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			4.437.744		26.827		22.356		11.178		50.00%		38.005		0.86 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		15 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Bubutan	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			4.917.046		32.388		20.034		8.014		40.00%		40.402		0.82 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			5.427.372		31.601		26.946		10.735		39.84%		42.336		0.78 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		4 Laporan		33.33 %		4 Laporan		33.33 %		Kec. Rungkut	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			2.108.477		10.082		30.507		3.413		11.19%		13.495		0.64 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Bulak	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			1.881.581		9.007		7.506		3.002		40.00%		12.010		0.64 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			2.761.646		14.510		12.366		6.183		50.00%		20.693		0.75 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Pakal	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			8.285.543		41.213		43.502		18.304		42.08%		59.517		0.72 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30 Laporan		30 Laporan		30 Laporan		12 Laporan		40.00 %		12 Laporan		40.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			9.569.468		48.535		40.446		20.277		50.13%		68.812		0.72 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			2.436.619		12.182		10.422		5.211		50.00%		17.393		0.71 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Benowo	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			2.411.844		14.062		14.191		5.913		41.67%		19.975		0.83 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Gunung Anyar	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			5.001.019		23.587		19.656		7.862		40.00%		31.450		0.63 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1.680.000		10.886		9.072		4.536		50.00%		15.422		0.92 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Jambangan	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			4.152.648		20.920		17.442		8.721		50.00%		29.641		0.71 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan		60 Laporan		60 Laporan		25 Laporan		41.67 %		25 Laporan		41.67 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2.859.088		14.256		11.880		3.564		30.00%		17.820		0.62 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2.600.212		13.238		10.638		3.191		30.00%		16.429		0.63 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Gayungan	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			6.782.123		36.185		30.672		12.269		40.00%		48.454		0.71 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			3.684.744		17.231		26.316		7.587		28.83%		24.818		0.67 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Wonocolo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			3.422.884		16.583		14.094		4.228		30.00%		20.812		0.61 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			4.844.760		22.550		24.041		7.814		32.50%		30.364		0.63 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Tandes	
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			6.115.619		479.648		1.259.912		43.550		3.46%		523.198		8.56%		
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Bubutan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Bubutan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	4 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		4 Bidang Urusan		5 Bidang Urusan		125.00 %		5 Bidang Urusan		125.00 %		Kec. Bulak	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Gubeng	
			Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		5 laporan		41.67 %		5 laporan		41.67 %		Kec. Gunung Anyar	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Dokumen non perijinan usaha yang dilaksanakan	635 Dokumen		304 Dokumen		625 Dokumen		160 Dokumen		25.60 %		160 Dokumen		25.20 %		Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Karangpilang	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Kenjeran	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Kenjeran	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Lakarsantri	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Kenjeran	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Pakal	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen		30 Dokumen		30 Dokumen		12 Dokumen		40.00 %		12 Dokumen		40.00 %		Kec. Rungkut	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Rungkut	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Rungkut	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Jambangan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		9 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sambikerep	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Jambangan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sambikerep	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Karangpilang	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha Yang DilaksanakanBidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		10 Dokumen		41.67 %		10 Dokumen		41.67 %		Kec. Bulak	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sawahan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sawahan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		2 Bidang Urusan		33.33 %		2 Bidang Urusan		33.33 %		Kec. Bubutan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Semampir	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Krembangan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			usaha yang dilimpahkan kepada Camat																
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		3 Bidang Urusan		50.00 %		3 Bidang Urusan		50.00 %		Kec. Krembangan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Jumlah Pelayanan non perizinan yang ditangani	11 Layanan		12 Layanan		11 Layanan		12 Layanan		109.09 %		12 Layanan		109.09 %		Kec. Bulak	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Pakal	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Genteng	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sukolilo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Semampir	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		4 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sukolilo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Gayungan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Genteng	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Semampir	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat																
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Asemrowo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Asemrowo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Simokerto	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Simokerto	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Gayungan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Jambangan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Tambaksari	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Tambaksari	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Tambaksari	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Gayungan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Tandes	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Pakal	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Benowo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Tandes	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Genteng	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		5 laporan		41.67 %		5 laporan		41.67 %		Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		6 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Asemrowo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Wiyung	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Wiyung	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Benowo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Benowo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Wonocolo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Lakarsantri	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Wonocolo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Gubeng	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			kepada Camat																
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Wonokromo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		4 Bidang Urusan		66.67 %		4 Bidang Urusan		66.67 %		Kec. Gubeng	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Wonokromo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sawahan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Karangpilang	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Laporan		2 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Krembangan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Simokerto	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sambikerep	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Lakarsantri	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			kepada Camat																
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sukolilo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Tandes	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Wiyung	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Wonocolo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.02.2.04.0003	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**			8.039		915		7.603		0		0.00%		915		11.38 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Bubutan	
	7.01.02.2.04.0003	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**			8.039		0		3.192		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Gubeng	
	7.01.02.2.04.0003	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**			4.020		3.597		3.600		0		0.00%		3.597		89.48 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.02.2.04.0003	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**			10.049		1.890		1.991		0		0.00%		1.890		18.81 %		
			Jumlah Laporan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Sukolilo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			3.753		171		3.197		0		0.00%		171		4.56 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			10.049		4.706		8.545		0		0.00%		4.706		46.83 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Krembangan	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			1.102		8.022		17.636		0		0.00%		8.022		728.23 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Genteng	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			912		397		722		0		0.00%		397		43.55 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Wiyung	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			13.399		416		9.503		0		0.00%		416		3.11 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			16.079		1.787		15.511		0		0.00%		1.787		11.11 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			10.049		0		9.616		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.02.2.04.00	Pelaksanaan Urusan			18.591		6.454		17.789		0		0.00%		6.454		34.71 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	03	Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.02.2.04.00 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			8.039		7.197		7.200		0		0.00%		7.197		89.53 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.02.2.04.00 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			10.049		266		9.616		0		0.00%		266		2.65 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		2 Laporan		50.00 %		2 Laporan		50.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.02.2.04.00 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			21.494		2.309		4.784		0		0.00%		2.309		10.74 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.02.2.04.00 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			8.039		3.154		7.193		0		0.00%		3.154		39.23 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.02.2.04.00 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			10.594		0		9.574		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.02.2.04.00 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			8.597		3.840		4.029		0		0.00%		3.840		44.67 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Bulak	
	7.01.02.2.04.00 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12.863		710		5.390		0		0.00%		710		5.52 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.02.2.04.00 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			2.043		115		1.955		0		0.00%		115		5.65 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		2 Laporan		50.00 %		2 Laporan		50.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.02.2.04.00 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			128.628		1.250		16.196		0		0.00%		1.250		0.97 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.02.2.04.00 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12.059		8.654		11.492		0		0.00%		8.654		71.76 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.02.2.04.00 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			8.039		577		7.692		0		0.00%		577		7.18 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.02.2.04.00 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			10.652		2.527		9.511		0		0.00%		2.527		23.72 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.02.2.04.00 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			32.500		0		24.364		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.02.2.04.00 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			10.049		0		9.811		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Sukomanunggal	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			402		5.934		10.949		0		0.00%		5.934		1,476.27 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			6.699		2.190		6.390		0		0.00%		2.190		32.69 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			8.039		0		7.692		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			8.374		0		7.757		396		5.11%		396		4.73 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			24.118		305		20.777		0		0.00%		305		1.27 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Tandes	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			14.259		7.454		12.000		0		0.00%		7.454		52.27 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Bubutan	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			14.259		3.570		11.921		0		0.00%		3.570		25.04 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Gubeng	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			4.020		888		3.830		0		0.00%		888		22.09 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Wonokromo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			pada Urusan Pemerintahan																
	7.01.02.2.04.0002	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**			3.753		436		3.284		0		0.00%		436		11.62 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Simokerto	
	7.01.02.2.04.0002	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**			10.049		3.375		14.906		0		0.00%		3.375		33.58 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Krembangan	
	7.01.02.2.04.0002	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**			8.039		11.736		11.322		0		0.00%		11.736		145.98 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Genteng	
	7.01.02.2.04.0002	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**			10.049		11.045		9.616		0		0.00%		11.045		109.91 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Wiyung	
	7.01.02.2.04.0002	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**			13.399		4.163		49.338		0		0.00%		4.163		31.07 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.02.2.04.0002	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**			14.259		19.936		23.642		0		0.00%		19.936		139.81 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.02.2.04.0002	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**			10.049		0		9.616		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.02.2.04.0002	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**			18.591		17.770		17.789		0		0.00%		17.770		95.58 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		6 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.02.2.04.0002	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**			9.171		19.276		11.051		11.049		99.98%		30.325		330.65 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Gayungan	
	7.01.02.2.04.00 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			14.259		6.689		11.388		4.445		39.03%		11.134		78.08 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2923 Laporan		3235 Laporan		2923 Laporan		1326 Laporan		45.36 %		1326 Laporan		45.36 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.02.2.04.00 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			21.494		9.052		26.673		0		0.00%		9.052		42.11 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.02.2.04.00 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			4.809.279		41.387		24.525		9.935		40.51%		51.322		1.07 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		13 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.02.2.04.00 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			19.438		2.000		5.842		1.912		32.73%		3.912		20.13 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Semampir	
	7.01.02.2.04.00 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			4.913		2.198		3.397		0		0.00%		2.198		44.74 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Bulak	
	7.01.02.2.04.00 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			14.259		3.330		8.218		0		0.00%		3.330		23.35 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Rungkut	
	7.01.02.2.04.00 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			12.075		11.402		13.545		0		0.00%		11.402		94.42 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.02.2.04.00 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			20.098		3.906		18.196		0		0.00%		3.906		19.44 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4140 Laporan		4163 Laporan		4140 Laporan		1725 Laporan		41.67 %		1725 Laporan		41.67 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.02.2.04.00	Pelaksanaan Urusan			12.059		5.836		4.831		0		0.00%		5.836		48.40 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	02	Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			8.039		4.448		5.088		0		0.00%		4.448		55.33 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Benowo	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			10.652		11.668		13.902		0		0.00%		11.668		109.54 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			72.000		15.984		18.057		0		0.00%		15.984		22.20 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4277 Laporan		4672 Laporan		4277 Laporan		1782 Laporan		41.66 %		1782 Laporan		41.66 %		Kec. Jambangan	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			10.049		0		8.505		3.170		37.28%		3.170		31.55 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			402		888		333		0		0.00%		888		220.92 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			10.049		46.253		227.964		0		0.00%		46.253		460.27 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			2.010		2.958		1.923		1.008		52.41%		3.966		197.34 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			8.374		2.504		51.353		0		0.00%		2.504		29.90 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Pakal	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			pada Urusan Pemerintahan																
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			24.118		37.825		31.768		2.747		8.65%		40.573		168.23 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Tandes	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			3.350		2.264		3.167		0		0.00%		2.264		67.60 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		5 Laporan		41.67 %		5 Laporan		41.67 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			16.079		537		14.400		0		0.00%		537		3.34 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	40 Dokumen		83 Dokumen		40 Dokumen		34 Dokumen		85.00 %		34 Dokumen		85.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			16.079		7.560		15.039		0		0.00%		7.560		47.02 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	35 Dokumen		35 Dokumen		35 Dokumen		15 Dokumen		42.86 %		15 Dokumen		42.86 %		Kec. Gubeng	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			1.675		12.266		2.221		0		0.00%		12.266		732.38 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		5 Dokumen		41.67 %		5 Dokumen		41.67 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			10.016		8.940		8.949		8.888		99.32%		17.828		178.00 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	50 Dokumen		50 Dokumen		50 Dokumen		15 Dokumen		30.00 %		15 Dokumen		30.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			16.079		0		8.085		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100 Dokumen		135 Dokumen		100 Dokumen		38 Dokumen		38.00 %		38 Dokumen		38.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			3.753		1.310		3.197		0		0.00%		1.310		34.90 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	20 Dokumen		60 Dokumen		20 Dokumen		24 Dokumen		120.00 %		24 Dokumen		120.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.02.2.04.00 01	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha**			10.049		5.606		7.056		0		0.00%		5.606		55.78 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen		76 Dokumen		24 Dokumen		10 Dokumen		41.67 %		10 Dokumen		41.67 %		Kec. Krembangan	
	7.01.02.2.04.00 01	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha**			13.399		839		8.096		0		0.00%		839		6.26 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen		30 Dokumen		30 Dokumen		92 Dokumen		306.67 %		92 Dokumen		306.67 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.02.2.04.00 01	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha**			10.049		62		9.616		0		0.00%		62		0.62 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		5 Dokumen		41.67 %		5 Dokumen		41.67 %		Kec. Wiyung	
	7.01.02.2.04.00 01	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha**			16.079		1.516		4.734		0		0.00%		1.516		9.43 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		5 Dokumen		41.67 %		5 Dokumen		41.67 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.02.2.04.00 01	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha**			12.059		5.050		24.697		0		0.00%		5.050		41.88 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		5 Dokumen		41.67 %		5 Dokumen		41.67 %		Kec. Genteng	
	7.01.02.2.04.00 01	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha**			10.049		685		9.616		0		0.00%		685		6.82 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100.00 %		1 Dokumen		100.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.02.2.04.00 01	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha**			18.591		5.606		3.017		0		0.00%		5.606		30.15 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen		2 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100.00 %		1 Dokumen		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			16.079		705		2.069		0		0.00%		705		4.38 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	42 Dokumen		92 Dokumen		42 Dokumen		20 Dokumen		47.62 %		20 Dokumen		47.62 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			1.340		3.867		9.230		0		0.00%		3.867		288.63 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen		48 Dokumen		48 Dokumen		20 Dokumen		41.67 %		20 Dokumen		41.67 %		Kec. Gayungan	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			21.494		3.444		3.486		0		0.00%		3.444		16.02 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		5 Dokumen		41.67 %		5 Dokumen		41.67 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			2.456		300		1.174		0		0.00%		300		12.21 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		10 Dokumen		41.67 %		10 Dokumen		41.67 %		Kec. Bulak	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			18.142		7.448		25.840		0		0.00%		7.448		41.05 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen		12 Dokumen		10 Dokumen		5 Dokumen		50.00 %		5 Dokumen		50.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			9.647		5.801		2.920		0		0.00%		5.801		60.13 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		5 Dokumen		41.67 %		5 Dokumen		41.67 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			13.834		836		1.681		0		0.00%		836		6.04 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		5 Dokumen		50.00 %		5 Dokumen		50.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non			9.513		466		9.103		0		0.00%		466		4.90 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Usaha																	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	38 Dokumen		81 Dokumen		38 Dokumen		99 Dokumen		260.53 %		99 Dokumen		260.53 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.02.2.04.00 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			24.118		5.184		16.594		0		0.00%		5.184		21.49 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		1 Dokumen		25.00 %		1 Dokumen		25.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.02.2.04.00 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			8.039		1.079		2.489		0		0.00%		1.079		13.42 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	15 Dokumen		16 Dokumen		15 Dokumen		7 Dokumen		46.67 %		7 Dokumen		46.67 %		Kec. Benowo	
	7.01.02.2.04.00 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			12.059		6.809		6.000		0		0.00%		6.809		56.46 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen		89 Dokumen		48 Dokumen		76 Dokumen		158.33 %		76 Dokumen		158.33 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.02.2.04.00 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			10.652		1.854		10.193		0		0.00%		1.854		17.41 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	635 Dokumen		304 Dokumen		625 Dokumen		160 Dokumen		25.60 %		160 Dokumen		25.20 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.02.2.04.00 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			1.005		405		32.345		0		0.00%		405		40.30 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	16 Dokumen		53 Dokumen		16 Dokumen		11 Dokumen		68.75 %		11 Dokumen		68.75 %		Kec. Jambangan	
	7.01.02.2.04.00 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			12.863		525		11.618		0		0.00%		525		4.08 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen		70 Dokumen		48 Dokumen		21 Dokumen		43.75 %		21 Dokumen		43.75 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.02.2.04.00 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			10.049		0		31.380		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang	30 Dokumen		58 Dokumen		30 Dokumen		23 Dokumen		76.67 %		23 Dokumen		76.67 %		Kec. Sukomanungg	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Dilaksanakan															al	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			108.004		311		13.201		0		0.00%		311		0.29 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen		77 Dokumen		48 Dokumen		42 Dokumen		87.50 %		42 Dokumen		87.50 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			16.079		389		777		0		0.00%		389		2.42 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen		30 Dokumen		30 Dokumen		12 Dokumen		40.00 %		12 Dokumen		40.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			24.118		12.623		22.823		0		0.00%		12.623		52.34 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	35 Dokumen		36 Dokumen		35 Dokumen		15 Dokumen		42.86 %		15 Dokumen		42.86 %		Kec. Tandes	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	
143	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.375.109		12.456.137		12.866.412		4.515.780		35.10%		16.971.917		118.06%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%		96.94 %		100%		96.45 %		96.45 %		96.45 %		96.45 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.120.103		9.889.790		10.012.959		3.659.359		36.55%		13.549.149		148.56%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.120.103		9.889.790		10.012.959		3.659.359		36.55%		13.549.149		148.56 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		26 Orang/bulan		29 Orang/bulan		25 Orang/bulan		86.21 %		25 Orang/bulan		100.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			191.802		110.694		202.821		25.682		12.66%		136.375		71.10%		
			Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			191.802		110.694		202.821		25.682		12.66%		136.375		71.10 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket		5 Paket		1 Paket		20.00 %		1 Paket		20.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			5.063.203		2.455.653		2.650.632		830.740		31.34%		3.286.393		64.91%		
			Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			5.063.203		2.455.653		2.650.632		830.740		31.34%		3.286.393		64.91 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
144	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**			846.659		2.516.972		6.159.689		519.535		8.43%		3.036.507		358.65%		
			Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan	94%		95.30 %		92%		93.02 %		101.11 %		93.02 %		98.96 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
	8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**			846.659		2.516.972		6.159.689		519.535		8.43%		3.036.507		358.65%		
			Jumlah Lembaga RW di Kota Surabaya yang Mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	291 Lembaga		298 Lembaga		291 Lembaga		84 Lembaga		28.87 %		84 Lembaga		28.87 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.02.2.01.0004	**Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan**			846.659		2.516.972		6.159.689		519.535		8.43%		3.036.507		358.65 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	291 Orang		298 Orang		291 Orang		84 Orang		28.87 %		84 Orang		28.87 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
145	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**			8.317.287		78.907.505		123.220.441		47.365.305		38.44%		126.272.810		1,518.20 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100%		46.54 %		54%		26.54 %		49.15 %		26.54 %		26.54 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
	8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**			8.317.287	78.907.505		123.220.441		47.365.305		38.44%		126.272.810		1,518.20 %			
			Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	70 Lembaga		80 Lembaga		30 Lembaga		8 Lembaga		26.67 %		8 Lembaga		11.43 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.03.2.01.00 04	**Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah**			8.317.287	78.907.505		123.220.441		47.365.305		38.44%		126.272.810		1,518.20 %			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	140 Orang		150 Orang		60 Orang		16 Orang		26.67 %		16 Orang		11.43 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
146	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**			59.370		65.547		90.533		15.769		17.42%		81.316		136.96%		
			Persentase organisasi	100%		40.77 %		60%		100%		166.67		100%		100.00 %		Badan	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan									%						Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**			59.370		65.547		90.533		15.769		17.42%		81.316		136.96%		
			Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	30 Lembaga		26 Lembaga		31 Lembaga		10 Lembaga		32.26 %		10 Lembaga		33.33 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.04.2.01.0005	**Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah**			59.370		65.547		90.533		15.769		17.42%		81.316		136.96 %		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		1 Laporan		50.00 %		1 Laporan		50.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
147	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**			823.293		625.399		767.749		204.519		26.64%		829.918		100.80%		
			Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
	8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**			823.293		625.399		767.749		204.519		26.64%		829.918		100.80%		
			Jumlah Lembaga yang Berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8 Lembaga		10 Lembaga		8 Lembaga		8 Lembaga		100.00 %		8 Lembaga		100.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.05.2.01.0004	**Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat**			823.293		625.399		767.749		204.519		26.64%		829.918		100.80 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Kepercayaan di Daerah																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	690 Orang		792 Orang		690 Orang		161 Orang		23.33 %		161 Orang		23.33 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
148	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			12.624.896		26.941.525		11.163.409		4.871.260		43.64%		31.812.784		251.98%		
			Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
			Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti	100%		100.00 %		100%		87.5 %		87.50 %		87.5 %		87.50 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			12.624.896		26.941.525		11.163.409		4.871.260		43.64%		31.812.784		251.98%		
			Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional	12 Lembaga		27 Lembaga		14 Lembaga		26 Lembaga		185.71 %		26 Lembaga		216.67 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Penanganan Konflik Sosial	18 Lembaga		17 Lembaga		17 Lembaga		21 Lembaga		123.53 %		21 Lembaga		116.67 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			11.875.472		26.473.379		10.639.213		4.779.327		44.92%		31.252.706		263.17 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,	18 Orang		23 Orang		17 Orang		20 Orang		117.65 %		20 Orang		111.11 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																
	8.01.06.2.01.0005	**Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah**			749.424		468.146		524.195		91.933		17.54%		560.079		74.73 %			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	44 Laporan		65 Laporan		44 Laporan		12 Laporan		27.27 %		12 Laporan		27.27 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Rata-rata capaian kinerja (%)												**52.26%**	**26.39%**						
Predikat Kinerja												**Rendah**	**Sangat Rendah**						

2.2.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Hasil penelaahan terhadap monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 dilakukan pada 10 (sepuluh) indikator tujuan, 29 (dua puluh sembilan) indikator sasaran, 507 (lima ratus tujuh) indikator program, 881 (delapan ratus delapan puluh satu) indikator kegiatan dan 2.086 (dua ribu delapan puluh enam) indikator sub kegiatan. Berdasarkan target tahun 2024 diperoleh capaian rata-rata sebesar 52,26% dengan predikat capaian Rendah.

Perangkat Daerah dengan capaian tertinggi sebagai berikut:

1) Satuan Polisi Pamong Praja, dengan capaian 93,64%;
2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan capaian 88,94%;
3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan capaian 88,56%;
4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan capaian 88,30%;
5) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, dengan capaian 87,82%.

Tingginya capaian Perangkat Daerah tersebut didorong oleh:

1) Tersedianya alokasi anggaran, sarana prasarana pendukung serta sumber daya manusia yang memadai;
2) Tersedianya SOP yang jelas serta sistem informasi yang terintegrasi sehingga pelayanan dan intervensi dapat berjalan secara optimal;
3) Komitmen untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin untuk memastikan program dan kegiatan terlaksana sesuai perencanaan serta;
4) Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait.

Perangkat Daerah dengan capaian terendah sebagai berikut :

1) Dinas Perhubungan, dengan capaian 45,70%;
2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan capaian 42,75%;
3) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dengan capaian 42,69%;
4) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, dengan capaian 42,07%;
5) Dinas Kesehatan, dengan capaian 33,83%.

Rendahnya capaian Perangkat Daerah tersebut disebabkan oleh:

1) Triwulan II merupakan tahapan pelaksanaan atau adanya penyesuaian jadwal pelaksanaan dengan adanya prioritas, dan hasil kinerja berkaitan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan di triwulan-triwulan selanjutnya;
2) Menyesuaikan dengan realisasi pelayanan perijinan dan non-perijinan;
3) Menyesuaikan dengan jadwal dan kesediaan kelompok sasaran kegiatan, misalnya siswa yang libur sekolah sehingga dilakukan penyesuaian jadwal kegiatan;
4) Pelaporan kegiatan dan pengukuran data penyusun realisasi indikator dilakukan di triwulan III/IV.

Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam pelaksanaan selanjutnya adalah:

1) Pemantauan dan penyesuaian timeline target kinerja yang proporsional dengan mengedepankan kondisi terkini, alokasi kebutuhan dan proyeksi capaian target kinerja;
2) Melakukan evaluasi triwulan II sebagai dasar perubahan target kegiatan apabila diperlukan;
3) Intensif melakukan koordinasi dengan pemangku kegiatan/sub kegiatan dan melakukan monitoring secara rutin untuk memastikan capaian target sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan;
4) Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan perizinan/non-perizinan dan reformasi birokrasi.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan gambaran umum serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 dan 2024 hingga triwulan II, serta analisis isu pada media sosial menggunakan *big data*, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan harus ditangani Pemerintah Kota Surabaya.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Perlunya percepatan penanganan kemiskinan;
2. Perlunya penanganan terhadap pengangguran terbuka;
3. Perlunya penanganan inflasi;
4. Perlunya penurunan kesenjangan pendapatan;
5. Perlunya menjaga ketahanan pangan;

6. Perlunya penguatan kerjasama antar daerah dan lembaga untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan;
7. Masih perlunya optimalisasi jaringan drainase untuk mengatasi titik genangan dan pencegahan terjadinya banjir;
8. Masih perlunya peningkatan sarana prasarana, sistem jaringan jalan dan utilitas perkotaan sesuai rencana tata ruang;
9. Masih ditemukannya balita dengan kondisi gizi kurang, gizi buruk, dan stunting serta ibu hamil kurang energi kronis (KEK);
10. Masih perlunya percepatan pelaksanaan eliminasi penyakit menular seperti tuberkulosis, HIV/Aids dan Kusta;
11. Masih perlunya optimalisasi pelayanan, pemerataan fasilitas, dan peningkatan sarana-prasarana kesehatan dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta penurunan stunting;
12. Masih perlunya peningkatan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah;
13. Perlunya peningkatan kunjungan dan pengembangan obyek destinasi wisata dan kerjasama pelaku pariwisata;
14. Perlunya peningkatan upaya pemberdayaan perempuan dan upaya perlindungan anak;
15. Masih perlunya peningkatan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni;
16. Masih perlunya optimalisasi peningkatan keamanan dan ketertiban Masyarakat pasca Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
17. Perlunya upaya peningkatan pemberdayaan pemuda dan penguatan masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal;
18. Masih perlunya pengembangan dan inovasi berkelanjutan di bidang pelayanan publik.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.3.2.1 Pendidikan

1. Masih belum optimalnya kualitas tenaga pendidik sesuai standar, maka diperlukan fasilitasi pendidikan dan pelatihan guru penggerak bagi pendidik untuk meningkatkan standarisasi tenaga pendidik;

2. Perlunya optimalisasi pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan buku bacaan teks dan nonteks penunjang literasi dan numerasi serta melakukan rehabilitasi terhadap prasarana sekolah;
3. Perlunya optimalisasi kualitas tenaga pendidik dan kualitas lembaga PAUD (TK), melalui melalui pelatihan terkait dengan pengembangan konten digital bagi pendidik PAUD dan Forum Komunikasi PAUD-SD untuk pengembangan kualitas lembaga PAUD;
4. Masih adanya lembaga kursus dan pelatihan yang belum terakreditasi, maka diperlukan fasilitasi pendampingan akreditasi lembaga kursus dan pelatihan (LKP) ke BAN (Badan Akreditasi Nasional).

2.3.2.2 Kesehatan

1. Masih diperlukannya peningkatan pencegahan dan penanganan terhadap penderita penyakit menular antara lain Covid-19, HIV/AIDS, TB, dan penyakit tidak menular seperti hipertensi, kanker, diabetes, obesitas, melalui upaya peningkatan cakupan skrining penyakit menular dan optimalisasi inisiasi pengobatan.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan baik di Rumah Sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu masih perlu ditingkatkan sesuai standar. Upaya yang dilakukan yakni pelaksanaan pembangunan/relokasi dan rehabilitasi puskesmas dan puskesmas pembantu, peningkatan kualitas layanan Rumah Sakit melalui pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar.
3. Perlunya pemerataan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Kota Surabaya. Upaya yang dilakukan dengan adanya Pembangunan Rumah Sakit di wilayah Surabaya Timur sebagai wujud pemerataan cakupan rumah sakit milik pemerintah disetiap wilayah kota.
4. Masih perlunya peningkatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal terutama pada Rumah Sakit Umum Daerah, upaya yang dilaksanakan dengan melakukan optimalisasi sumber daya rumah sakit dan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mencapai SPM yang belum terpenuhi.
5. Masih terdapat Tempat Pengolahan Makanan (TPM) binaan Pemerintah Kota Surabaya yang belum memenuhi syarat higienis sanitasi. Upaya

yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan dengan meningkatan pelaksanaan pemeriksanaan dan pemantauan produk makanan-minuman industri rumah tangga (PIRT).

6. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM tenaga kesehatan. Upaya yang akan dilaksanakan yakni pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui keikutsertaan pendidikan dan pelatihan, workshop dan seminar.
7. Perlunya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan. Upaya yang dilakukan yakni optimalisasi sistem informasi kesehatan yang ada seperti e-Health, Aplikasi Sayang Warga (ASW), Pemantauan Wilayah Sekitar (PWS) dan integrasi lainnya dengan sistem pemerintah kota.
8. Perlunya optimalisasi rujukan berjenjang, melalui peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan dan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan bersama mitra layanan kesehatan di Kota Surabaya.
9. Perlunya optimalisasi pemanfaatan jaminan kesehatan semesta dan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan jaminan kesehatan. Upaya yang dilaksanakan yakni mempertahankan bantuan pembiayaan kesehatan yakni *Universal Health Coverage* (UHC) Kota Surabaya melalui pembiayaan bantuan dan iuran PBPU Pemda.

2.3.2.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Masih adanya bangunan yang belum memiliki IMB atau bangunan yang tidak sesuai dengan IMB. Karena itu, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan survei di jalan arteri, lokal, dan lingkungan untuk melakukan *monitoring* terkait adanya bangunan yang belum memiliki IMB atau bangunan yang tidak sesuai dengan IMB;
2. Masih terjadinya genangan di beberapa titik di Surabaya karena curah hujan tinggi serta masih adanya jaringan drainase yang belum berfungsi optimal. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya telah membuat rencana konektivitas saluran pada sistem drainase di Kota Surabaya sebagai bentuk upaya optimalisasi sistem drainase dan penanganan genangan yang disebabkan oleh curah hujan tinggi;

3. Perlunya optimalisasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan dan/atau konservasi energi pada gedung pemerintah dan swasta, salah satunya melalui audiensi terkait Proyek *Sustainable Energy Transition in Indonesia* (SETI), yang merupakan kerjasama antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) dengan *International Climate Initiative*, sebagai salah satu upaya optimalisasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan dan/atau konservasi energi pada gedung pemerintah dan swasta;
4. Penyediaan layanan air bersih terkendala lahan yang bukan menjadi wewenang Pemerintah Kota. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya berkoordinasi intens dengan PDAM Surya Sembada dalam penyediaan master meter untuk penanganan terhadap penyediaan layanan air bersih yang terkendala masalah lahan;
5. Adanya jaringan jalan yang v/c rasio-nya masih kurang optimal. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan.

2.3.2.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Masih perlunya pembenahan atau rehabilitasi jalan dan saluran lingkungan serta sarana dan prasarana permukiman. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk melaksanakan peningkatan kualitas kawasan permukiman, dengan rutin melaksanakan pembangunan infrastruktur di kawasan permukiman setiap tahunnya, mulai dari rehabilitasi jalan dan saluran lingkungan, serta penyediaan sarana dan prasarana permukiman;
2. Masih diperlukannya peningkatan kualitas lingkungan dan rumah layak huni, melalui perbaikan rumah tidak layak huni;
3. Masih diperlukannya peningkatan sarana dan prasarana permukiman antara lain penyediaan air layak minum dan sanitasi. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya berupaya dalam penyediaan sanitasi layak melalui kerjasama CSR (*Corporate Social Responsibility*) dengan pihak swasta. Sedangkan dalam upaya penyediaan air layak minum,

Pemerintah Kota Surabaya berkoordinasi dengan PDAM Surya Sembada dalam melaksanakan pekerjaan peremajaan pipa distribusi yang berusia ratusan tahun;

4. Terbatasnya ketersediaan lahan untuk penyediaan perumahan. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya memprioritaskan penggunaan aset tanah untuk pembangunan rumah susun di Kota Surabaya.

2.3.2.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1. Masih adanya temuan pelanggaran peraturan. Untuk itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat, di antaranya melalui sosialisasi dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang terkait dengan penegakan peraturan;
2. Masih terdapat gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk itu diperlukan sosialisasi melalui *platform* media informasi daring yang lebih menarik dan dapat menjangkau masyarakat lebih luas;
3. Masih adanya kejadian kebakaran yang antara lain disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat. Untuk ini diperlukan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara rutin kepada masyarakat.

2.3.2.6 Sosial

1. Perlunya peningkatan kualitas pemutakhiran data Keluarga Miskin secara berkala, melalui integrasi data pekerjaan dan pendapatan warga miskin pada Sistem Padat Karya, serta secara rutin melaksanakan musyawarah kelurahan setiap bulan bersama seluruh pemangku kepentingan di kelurahan;
2. Kurang optimalnya partisipasi PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial, dilakukan melalui pelatihan berkala untuk PSKS, serta pemberian penghargaan kepada PSKS yang berperan serta aktif dalam membantu penanganan masalah kesejahteraan sosial. Selain itu, partisipasi PSKS juga ditingkatkan melalui pembentukan jaringan atau forum komunikasi antara PSKS untuk saling berbagi informasi dan pengalaman sehingga dapat meningkatkan jumlah dan partisipasi relawan baru.

2.3.2.7 Tenaga Kerja

1. Masih diperlukannya perluasan kesempatan bekerja dan fasilitasi pembentukan wirausaha baru untuk peningkatan perekonomian masyarakat, baik terkait pelatihan produksi, pengelolaan dan manajemen usaha, permodalan dan pemasaran. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya memiliki program kegiatan perluasan kesempatan kerja yang meliputi bimtek perluasan kesempatan kerja dalam rangka menciptakan wirausaha baru melalui bimtek menjahit, kuliner makanan, sablon, cuci kendaraan, membatik, cuci helm, pembuatan sabun, cuci AC, dan sebagainya yang juga mendukung program padat karya Pemkot dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran dari warga miskin;
2. Perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial belum optimal. Karena itu, Pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan terkait hubungan industrial, syarat kerja, dan jamsostek baik kepada perusahaan, pekerja, dan serikat pekerja/serikat buruh.

2.3.2.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Belum optimalnya pemahaman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) oleh beberapa pemangku kepentingan. Untuk itu dilakukan pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang melibatkan semua Perangkat Daerah serta adanya pembinaan kecamatan, kelurahan, dan RW responsif gender;
2. Perlunya peningkatan pemahaman dan pelaksanaan terkait pengarusutamaan gender di setiap aspek pembangunan melalui pelatihan Pengarusutamaan Gender yang melibatkan semua Perangkat Daerah serta adanya pembinaan kecamatan, kelurahan, dan RW responsif gender;
3. Perlunya optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam mendukung kegiatan pencapaian indikator Kelurahan/kampung layak anak melalui penjaringan aspirasi pada saat musrenbang kelurahan dan musrenbang kota dengan melibatkan Forum Anak Surabaya, LSM Pemerhati Anak, dan APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia) serta tersedianya Sistem Informasi Kota Layak Anak Surabaya (SITALAS);

4. Perlunya optimalisasi upaya perlindungan perempuan dan anak utamanya dalam pencegahan dan penanganan permasalahan perempuan dan anak antara lain *trafficking* dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), melalui fasilitasi konseling dan pengaduan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang sudah menyebar hingga tingkat RW.

2.3.2.9 Pangan

1. Masih ditemukannya bahan pangan segar dan makanan olahan yang belum memenuhi syarat keamanan makanan karena rendahnya kesadaran masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kota Surabaya melalui Program Pengawasan Keamanan Pangan terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang layak dan aman di masyarakat, serta menjaga keamanan pangan segar mulai dari proses produksi sampai ke tahapan konsumsi. Selain sosialisasi, juga dilakukan secara rutin dan berkala pemeriksaan bahan pangan yang beredar di masyarakat, pengambilan sampel ini dilakukan secara acak di pasar tradisional, toko swalayan maupun di pasar modern;
2. Perlunya perluasan kerjasama penyediaan pangan dengan daerah-daerah penghasil bahan pangan, sehingga akan mampu mendukung stabilitas harga pangan. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat rutin melaksanakan survei terkait ketersedian stok dan harga pangan pokok di masyarakat. Selain itu, juga diupayakan stabilnya pasokan komoditas pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan penjajakan kerjasama dengan daerah-daerah penghasil pangan yang ada di Jawa Timur;
3. Perlunya optimalisasi potensi *urban farming* baik di masyarakat maupun pemanfaatan aset milik Pemerintah Kota sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan. Untuk itu, di sisi produksi, melalui Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pemerintah Kota Surabaya memaksimalkan kemampuan produksi komoditas pangan dengan memanfaatkan lahan aset sebagai lahan

produktif budidaya pertanian, peternakan serta perikanan. Gerakan *urban farming* juga dilakukan di lingkungan warga kota, didukung oleh Pemerintah Kota yang memberikan bantuan berupa sarana/prasarana dan pendampingan.

2.3.2.10 Pertanahan

1. Masih perlunya pengadaan tanah/bangunan untuk kepentingan umum. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya memprioritaskan penggunaan aset tanah untuk penyediaan perumahan, pada tahun 2024 telah direncanakan perbaikan rumah susun di 9 lokasi;
2. Masih adanya aset tanah yang belum dilakukan sertifikasi serta pemasangan pagar, papan, patok karena masih belum jelas batas dan belum lengkap bukti kepemilikannya. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya melakukan percepatan proses sertifikasi mulai dari permohonan peta bidang, permohonan hak, hingga pendaftaran hak, serta memperkuat sinergi dengan pihak terkait seperti Kejaksaan serta Kantor Pertanahan dalam rangka penyelesaian sertifikasi aset;
3. Perlunya optimalisasi pengamanan dan sertifikasi aset pertanahan, melalui percepatan proses sertifikasi serta sinergi dengan pihak terkait dalam rangka penyelesaian sertifikasi aset.

2.3.2.11 Lingkungan Hidup

1. Masih diperlukan upaya untuk mengoptimalkan penataan Ruang Terbuka Hijau, di antaranya melalui diversifikasi jenis pohon/tanaman untuk meningkatkan efektivitas penyerapan polutan;
2. Masih diperlukan peningkatan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan Teknologi 3R, melalui penambahan kapasitas maupun penambahan lokasi baru;
3. Masih diperlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan, melalui pembinaan kepada masyarakat;
4. Masih adanya kegiatan/usaha diawasi yang belum menaati/mematuhi aspek lingkungan. Ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada kegiatan/usaha terkait kewajiban terhadap pengelolaan lingkungan serta mempermudah pelaporan melalui portal Sistem Pelaporan Elektronik (e-simpel);

5. Masih adanya permasalahan lingkungan hidup yang perlu ditangani, antara lain terkait limbah, kebisingan dan polusi udara dari kegiatan usaha dan transportasi. Ini dilakukan dengan melakukan sinergi bersama pelaku usaha untuk melaksanakan program-program pelestarian lingkungan serta kompetisi lingkungan hidup;
6. Belum optimalnya pelaksanaan penerbitan persetujuan lingkungan dikarenakan adanya transisi perubahan peraturan dengan diterbitkannya PP 5 tahun 2021, PP 22 tahun 2021 dan Permenlh 4 tahun 2021 dan adanya perpindahan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan di provinsi dan pusat. Untuk itu, perlu dilakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Lingkungan Hidup terkait perizinan dan pengawasan kegiatan/usaha yang berpotensi mencemari.

2.3.2.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Perlunya optimalisasi layanan kependudukan dan pencatatan sipil secara *online* melalui optimalisasi aplikasi Mobile Klampid dan Takon Klampid. Selain itu juga membentuk SPP (Sentra Pelayanan Publik) yang tesebar di berbagai wilayah kota, antara lain di Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) di Surabaya Selatan, Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) di Surabaya Timur, Taman Cahaya Pakal di Surabaya Barat dan Wisata Rakyat Nambangan di Surabaya Utara.

2.3.2.13 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Perlunya upaya peningkatan cakupan jumlah peserta KB baru melalui kampanye dan edukasi tentang perencanaan keluarga dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan KB;
2. Perlunya upaya peningkatan akses Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) melalui kampanye dan edukasi tentang perencanaan keluarga dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan MKJP;
3. Masih ada pasangan usia subur (PUS) yang istrinya berusia kurang dari 20 tahun. Untuk itu dilakukan pemberdayaan pusat informasi dan konseling Remaja (PIK-R), pembinaan terhadap keluarga yg mempunyai remaja melalui Bina Keluarga Remaja (BKR), dan kampanye program Bangga Kencana melalui Generasi Berencana (Duta Genre);

4. Perlunya penguatan dan pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam mendukung tenaga penyuluh KB atau petugas lapangan KB di tingkat desa/kelurahan melalui kegiatan seperti Posyandu, Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS), Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).

2.3.2.14 Perhubungan

1. Masih diperlukan pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan daerah-daerah di sekitar Surabaya, melalui koordinasi dengan instansi penyelenggara transportasi lainnya di dalam maupun sekitar wilayah Kota Surabaya, untuk saling mendukung dan membangun konektivitas wilayah yang lebih baik;
2. Masih diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas angkutan umum termasuk waktu tunggu kendaraan umum, untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum, melalui penyediaan layanan angkutan umum perkotaan Surabaya dengan menambah jumlah koridor dan jumlah armada angkutan dengan skema *Buy The Service* (BTS);
3. Masih adanya kejadian kecelakaan lalu lintas dikarenakan kurangnya kesadaran pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya melakukan pembinaan keselamatan lalu lintas kepada masyarakat dan pelajar untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas serta menerapkan pengembangan teknologi untuk mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas.

2.3.2.15 Komunikasi dan Informatika

1. Masih perlunya peningkatan sarana prasarana dan jaringan utilitas untuk menunjang sistem informasi perkotaan, di antaranya melalui pemeliharaan dan pembaharuan sarana prasarana dan jaringan utilitas TIK secara rutin dan berkala serta peningkatan kompetensi teknis SDM TIK dalam pengelolaan sarana prasarana TIK.

2.3.2.16 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1. Perlunya optimalisasi penggunaan ePeken oleh masyarakat untuk meningkatkan akses pemasaran produk UMKM dan toko kelontong. Karena itu, telah dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak, baik

distributor maupun pelaku usaha ePeken untuk mendorong ePeken agar nantinya seluruh masyarakat Surabaya dapat merasakan mudahnya bertransaksi menggunakan ePeken;

2. Masih ada produk usaha mikro yang belum layak diuji mutukan dan belum memiliki sertifikasi merk, halal dan BPPOM. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya telah menggencarkan program sertifikasi halal, baik itu secara regular maupun *self-declare* bagi UMKM Surabaya. Selain itu, UMKM Surabaya juga mendapatkan fasilitasi sertifikasi merk dan BPPOM;
3. Masih ada koperasi masih belum berklasifikasi AAB dan kurang optimalnya pertumbuhan anggota koperasi serta peningkatan volume usaha koperasi. Untuk itu, Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan kemitraan berkelanjutan untuk mendorong dan memelihara koperasi tetap aktif secara kelembagaan dan usaha. Selain itu, diberikan juga pendidikan dan pelatihan manajemen koperasi, serta didukung melalui kebijakan yang mendorong iklim berkoperasi yang sehat dan produktif untuk menarik minat masyarakat menjadi anggota koperasi;
4. Masih diperlukan upaya peningkatan daya saing produk-produk lokal di pasar domestik dan internasional, salah satunya melalui kemitraan dengan universitas dan *stakeholder* terkait, serta memfasilitasi promosi produk UMKM melalui *event* pameran, gelar produk, dan pemasaran melalui SKG (Sentra Kriya Galeri).

2.3.2.17 Kepemudaan dan Olahraga

1. Kurang meratanya sarana dan prasarana olahraga yang tersedia dan dalam kondisi baik, terutama pada kampung-kampung padat penduduk. Untuk itu, dilakukan pembangunan sarana dan prasarana olahraga secara bertahap yang diintegrasikan dengan potensi wilayah berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan musyawarah pembangunan pemuda;
2. Masih diperlukannya pembinaan dan pengembangan tenaga atlet dan pelatih profesional, melalui peningkatan kompetensi atlet dan pelatih serta pembibitan atlet yang difasilitasi di seluruh cabang olahraga dan induk olahraga yang tergabung dalam KONI dan KORMI Kota Surabaya.

2.3.2.18 Statistik

1. Perlunya optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sistem satu data dan satu peta yang tervalidasi dan terintegrasi, salah satunya melalui penyediaan portal satu data tentang Kota Surabaya yang terbuka sehingga memberikan kemudahan akses untuk publik maupun instansi pemerintahan lainnya;
2. Perlunya penyusunan standar data dan data prioritas sebagai pedoman pelaksanaan statistik, melalui pelaksanaan koordinasi dalam Forum Satu Data.

2.3.2.19 Persandian

1. Perlunya optimalisasi integrasi sistem antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, melalui penerapan sistem keamanan informasi yang secara berkala dilakukan evaluasi mandiri dalam penerapannya;
2. Perlunya perlindungan keamanaan data dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, melalui peningkatan pengelolaan dan dukungan sumber daya persandian yang memadai dan berkompeten sesuai bidang IT dan keamanan informasi.

2.3.2.20 Kebudayaan

1. Masih ada bangunan cagar budaya yang belum terpelihara dengan baik, karena pelibatan pemilik/pengelola cagar budaya dalam pengembangan kawasan sejarah/cagar budaya masih belum optimal. Untuk itu, dilakukan koordinasi antara Pemerintah Kota dengan pemilik/pengelola cagar budaya untuk menghasilkan kesepahaman pengembangan cagar budaya. Pemerintah Kota Surabaya juga menjadikan bangunan cagar budaya sebagai objek atau daya tarik wisata yang dapat menarik kunjungan wisatawan melalui penataan kawasan wisata;
2. Perlunya fasilitasi kelompok seni untuk dapat tampil di fasilitas publik, melalui koordinasi antara Pemerintah Kota Surabaya dengan para pelaku atau kelompok seni untuk menghasilkan kesepahaman dalam pengembangan seni.

2.3.2.21 Perpustakaan

1. Perlunya optimalisasi pemanfaatan Perpustakaan dan Taman Baca Masyarakat untuk meningkatkan minat baca masyarakat, melalui pengembangan sistem layanan perpustakaan yang modern dan terintegrasi.

2.3.2.22 Kearsipan

1. Perlunya optimalisasi kualitas dan kuantitas sumberdaya pengelola kearsipan guna mewujudkan tertib sistem tata kearsipan, melalui sertifikasi kompetensi;
2. Implementasi pengelolaan arsip secara digital belum optimal, sehingga pemerintah kota mengembangkan sistem layanan kearsipan yang modern dan terintergrasi, serta menyempurnakan regulasi dan SOP pengelolaan kearsipan.

2.3.2.23 Kelautan dan Perikanan

1. Perlunya optimalisasi pembudidaya perikanan dan kelautan binaan yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang telah disediakan, melalui Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, yang tidak hanya sebatas pemberian bantuan sarana dan prasarana budidaya namun juga sekaligus pendampingan dari tenaga penyuluh;
2. Perlunya pemberdayaan nelayan untuk meningkatkan pendapatan nelayan, melalui pemberian bantuan intervensi kepada keluarga nelayan untuk dapat mengolah hasil perikanan menjadi produk jadi yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Keluarga nelayan yang dibina menjadi pelaku usaha UMKM tersebut juga mendapatkan fasilitas pemasaran di Sentra Ikan Bulak dan Romokalisari (Romokalisari *Adventure Land*).

2.3.2.24 Pariwisata

1. Perlunya optimalisasi upaya peningkatan kunjungan di objek wisata, melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta integrasi dengan kawasan wisata lain;
2. Perlunya optimalisasi kawasan wisata dan integrasi antar kawasan wisata, melalui melalui penambahan destinasi wisata baru di kawasan kota lama yang pengembangan dan pengintegrasian antar zonanya masih akan terus dilakukan hingga 5 tahun ke depan;

3. Perlunya optimalisasi kerjasama dengan *stakeholder* bidang pariwisata, melalui kerjasama dengan kelompok sadar wisata dan komunitas lokal seperti Bersukaria Walk dan Surabaya Walking Tour by Roodebrug, serta perusahaan, melalui *creating shared value* (CSV) untuk mengembangkan wisata rakyat yang dapat dijangkau masyarakat.

2.3.2.25 Pertanian

1. Perlunya optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana produksi oleh pembudidaya pertanian *(urban farming),* peternakan dan perikanan, melalui Program Penyuluhan Pertanian untuk meningkatkan kapasitas pembudidaya, tenaga pendamping maupun penyuluh;
2. Masih adanya hewan ternak yang belum mendapatkan vaksinasi dan pengobatan. Untuk itu, dilakukan optimalisasi klinik hewan yang beroperasi untuk menangani kesehatan hewan ternak di masyarakat;
3. Perlunya pencegahan dan penanganan terhadap dampak munculnya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, melalui peran aktif veteriner pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang didukung juga oleh klinik hewan.

2.3.2.26 Perdagangan

1. Perlunya optimalisasi pengoperasian sentra dan pasar, melalui revitalisasi sentra dan pasar, pelatihan cita rasa dan penyajian untuk sentra wisata kuliner (SWK), serta melakukan *rebranding* beberapa sentra yang berpotensi;
2. Perlunya optimalisasi pengelolaan pasar tradisional, melalui pemenuhan sarana prasarana di beberapa pasar untuk menuju pasar ber-SNI Pasar Rakyat, serta pasar pangan aman berbasis komunitas.

2.3.2.27 Sekretariat Daerah

1. Masih diperlukannya penataan kelembagaan, pelaksanaan evaluasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik untuk memenuhi harapan masyarakat;
2. Masih adanya kecamatan yang batas wilayahnya perlu penegasan yang sah. Untuk itu, dilakukan penegasan batas pada 2 kecamatan, yaitu

Kecamatan Wiyung dan Kecamatan Karang Pilang yang kemudian akan disahkan melalui perwali hasil penegasan batas kecamatan. Sedangkan 4 kecamatan yang belum ditegaskan, yakni Kecamatan Krembangan, Tandes, Sukomanunggal, dan Asemrowo akan diselesaikan pada tahun 2026;

3. Masih perlunya evaluasi peraturan yang berlaku dalam rangka penyesuaian peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan perkembangan kota dan kondisi masyarakat, melalui evaluasi secara bertahap terhadap produk hukum yang telah ditetapkan maupun diundangkan.

2.3.2.28 Perencanaan

1. Masih diperlukannya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, melalui pengembangan aplikasi ePlanning;
2. Masih perlunya peningkatan kualitas pengelolaan data dan evaluasi, melalui evaluasi atas penyelenggaraan data dan informasi perencanaan, yang ditindaklanjuti dengan penyempurnaan SOP sesuai standar penyelenggaraan statistik sektoral dan pengajuan rekomendasi statistik untuk penyelenggaraan data dan informasi tahun berikutnya.

2.3.2.29 Keuangan

1. Kurang optimalnya realisasi pendapatan daerah. Untuk itu, dilakukan percepatan implementasi elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah, khususnya untuk pajak dan retribusi daerah dengan menggalakkan pembayaran melalui kanal-kanal *digital*, yaitu pembayaran retribusi parkir melalui QRIS serta pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah melalui *internet banking* dan *virtual account* serta kanal-kanal pembayaran *digital* lainnya;
2. Belum optimalnya intensifikasi pajak dan retribusi daerah. Untuk itu, dilakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah dengan menggali potensi yang ada melalui pemasangan alat pemantauan pajak secara elektronik;
3. Belum validnya pendataan obyek pajak/retribusi yang dinamis. Untuk itu, dilakukan pendataan ulang *database* pajak daerah dengan menyesuaikan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Belum optimalnya pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dikarenakan petunjuk teknis yang terlambat dan perubahan petunjuk teknis atau kebijakan pada tahun berjalan. Untuk itu, dilakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait pendapatan dan belanja transfer.

2.3.2.30 Kepegawaian

1. Perlunya optimalisasi sistem merit dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara, melalui pengembangan evaluasi kinerja dan karir ASN berbasis *talent pool* elektronik, *awarding*, serta absensi *online*;
2. Perlunya penyusunan analisa beban kerja dan analisa jabatan secara berkala, melalui pengembangan *talent pool* elektronik.

2.3.2.31 Pendidikan dan Pelatihan

1. Perlunya optimalisasi pengembangan kompetensi pegawai, melalui pengembangan e-learning, balai diklat terakreditasi, serta aplikasi perencanaan dan dampak diklat.

2.3.2.32 Penelitian dan Pengembangan

1. Masih adanya hasil penelitian dan pengembangan yang belum dimanfaatkan/ditindaklanjuti. Untuk itu, dilakukan finalisasi *longlist* dan *shortlist* permasalahan yang dapat menjadi topik penelitian oleh PTN (Perguruan Tinggi Negeri) dan/atau PTS (Perguruan Tinggi Swasta) di Kota Surabaya, serta dibangun basis data/direktori penelitian terkait Kota Surabaya yang bersumber dari hasil penelitian yang masih relevan;
2. Perlunya penguatan kelembagaan bidang urusan penelitian dan pengembangan, antara lain melalui:
   a. koordinasi untuk segera menindaklanjuti MoU dengan PTN dan/atau PTS pada ruang lingkup Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Perjanjian Kerjasama terkait kolaborasi penelitian.
   b. pengembangan sistem informasi sehingga siap terintegrasi dengan sistem informasi lainnya dalam rangka merintis iklim berbagi-pakai infrastruktur, sumber daya, maupun hasil riset dan inovasi antar pemangku kepentingan.

2.3.2.33 Inspektorat Daerah

1. Perlunya optimalisasi pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk itu, selain dilakukan pengembangan WBS (*whistleblowing system*) yang melibatkan aduan masyarakat, juga dibentuk sekretariat bersama penyuluh anti KKN;
2. Masih ditemukannya pelanggaran tata kelola administrasi pada beberapa Perangkat Daerah. Maka dari itu, Pemerintah Kota Surabaya mengembangkan e-consulting sebagai kanal bagi Perangkat Daerah untuk berkonsultasi pada APIP terkait permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
3. Masih ditemukannya pelanggaran disiplin aparatur pada beberapa Perangkat Daerah. Untuk itu, perlu dilakukan sosialisasi peraturan terkait kedisiplinan secara rutin yang bekerja sama dengan PD Kepegawaian sebagai upaya penanganan pelaku tindak indisipliner.

2.3.2.34 Kecamatan

1. Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia utamanya pemberi pelayanan langsung bagi masyarakat, melalui upaya peningkatan kapasitas baik tenaga ASN maupun non-ASN;
2. Perlunya peningkatan kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan, melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi sistem informasi yang dapat memudahkan dalam melaksanakan koordinasi antara personil di Kecamatan dan Kelurahan;
3. Perlunya optimalisasi pelaksanaan Dana Kelurahan, dengan melibatkan segala unsur masyarakat, baik perwakilan unsur lembaga kemasyarakatan maupun perwakilan masyarakat rentan, seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan difabel.

2.3.2.35 Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Masih adanya potensi konflik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Untuk itu diperlukan adanya Tim Kewaspadaan Dini untuk memetakan potensi konflik, serta perlu didukung pemenuhan kebutuhan dan koordinasi dari para petugas pengamanan.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian pada tahun 2024 diperkirakan masih menghadapi berbagai tekanan. Masih berjalannya ketidakstabilan kondisi ekonomi yang terjadi selama tahun 2023 masih menjadi penyebab tertahannya laju perekonomian global tumbuh lebih tinggi hingga saat ini. Beberapa alasan yang menjadi faktor perlambatan, antara lain yakni dampak aksi geopolitik ekonomi yang mengganggu kestabilan ekonomi dunia, melambatnya perekonomian tiongkok akibat terganggunya sektor real estate, masih lemahnya ekonomi Amerika Serikat, pengetatan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi, serta volatilas harga komoditas global. Faktor-faktor tersebut tentunya berdampak terhadap mayoritas negara didunia, baik untuk negara maju maupun berkembang, tentunya implikasi tersebut berdampak berbeda tergantung dari masing-masing ketahanan ekonomi (fundamental) yang dimiliki.

Perekonomian dunia pada tahun 2024 diprediksi tidak jauh berbeda dengan kondisi di tahun 2023. Lembaga *International Monetary Fund* atau IMF dan OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2024 sedikit lebih lamban dibanding tahun sebelumnya. Sementara *World Bank* memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 sedikit lebih optimis.

Dampak ketidakstabilnya ekonomi global juga berdampak terhadap perekonomian nasional. Hal itu dikonfirmasi oleh kinerja ekonomi Indonesia yang menunjukkan capaian yang moderat. Berdasarkan data BPS Nasional, realisasi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen. Meskipun ditengah ketidakpastian global, capaian kinerja ekonomi nasional menunjukkan kinerja baik. Hal itu ditunjukkan oleh keberhasilan pemerintah mempertahankan capaian pertumbuhan ekonomi dikisaran 5 persen. Peran konsumsi domestik masih menjadi kunci utama kuatnya ekonomi nasional disertai investasi yang terus tumbuh seiring peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Peran sektor pariwisata juga terus menunjukkan menopang akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Mempertimbangkan capaian di tahun 2023 dan kondisi ekonomi terkini, Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) memprediksi perekonomian nasional pada tahun 2024 yang tertuang dalam APBN tumbuh pada kisaran 5,2 persen. Dari sisi pengeluaran, peluang besarnya investasi dan ekspor diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tahun 2024. Konsumsi masyarakat juga diperkirakan tumbuh positif didorong oleh peningkatan aktivitas masyarakat. Sementara dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi diperkirakan didorong oleh sektor-sektor potensial yang mengalami pertumbuhan positif.

Bappenas juga menargetkan sasaran indikator makro lainya di tahun 2024. Indikator ketenagakerjaan yang diwakilkan oleh tingkat pengangguran terbuka (TPT) ditargetkan di kisaran 5,0-5,7 persen. Begitu pula dengan tingkat kemiskinan ditargetkan turun dikisaran 9 hingga 8,5 persen. Sementara indikator indeks gini yang mencerminkan pemerataan pendapatan ditargetkan dikisaran 0,381-0,384. Indeks pembangunan manusia ditargekan dikisaran 73,99 – 74,02. Target-target tersebut tentunya dibuat dan diwujudkan melalui program-program kerja pemerintah disertai arah kebijakan srategis yang tertuang dalam prioritas nasional (PN) RKP Tahun 2024**.**

Kinerja positif juga ditunjukkan oleh perekonomian Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023 tumbuh sebesar 4,95 persen (yoy). Sektor utama penopang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur didominasi oleh industri pengolahan, perdagangan dan partanian. Dari sisi pengeluaran, kinerja perekonomian Jawa Timur ditopang peningkatan permintaan domestik masyarakat yang tercermin dari kenaikan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan net ekspor antardaerah pada tahun 2023

Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diperkirakan berkisar antara batas bawah 4,7 persen hingga 5,49 persen. Perhitungan perkiraan tersebut merupakah hasil proyeksi oleh beberapa lembaga akademisi maupun lembaga ekonomi yang tertuang dalam dokuman Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2026. Selanjutnya arah kebijakan makro Jawa Timur kedepan dilaksanakan melalui pemerataan serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan. Pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah yang dilakukan melalui optimalisasi dan pemberdayaan potensi ekonomi lokal.

Pertumbuhan ekonomi berkualitas yang ditargetkan dilaksanakan melalui perciptaan stabilitas makro ekonomi yang didukung investasi. Selanjutnya juga dilakukan melalui peningkatan nilai tambah sektor primer dan sekunber serta pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

Selaras dengan nasional dan Jawa Timur, meski mengalami perlambatan akibat pengaruh kondisi ekonomi global, namun kinerja ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2023 sudah cukup memuaskan. Masih kuatnya ketahanan ekonomi Kota Surabaya menjaga pertumbuhan ekonomi stabil tinggi. Sama seperti periode sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya konsisten tumbuh tinggi diatas capaian pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Timur. Kinerja konsumsi yang dibarengi tingginya daya beli menjadi fundamental ekonomi Kota Surabaya selama ini. Hampir 60 (enam puluh) persen komponen konsumsi manyarakat menjadi kontribusi terhadap perekonomian Kota Surabaya. Selanjutnya konsistensi daya tarik investasi di Kota Surabaya juga menjadi daya dukung yang turut mengakselerasi. Capaian pertumbuhan ekonomi yang stabil tinggi selama ini juga merefleksikan besarnya produktivitas pelaku usaha serta sektor-sektor potensial di Kota Surabaya yang terus menggeliat menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Kinerja investasi berdasarkan laporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2023 mencapai 37 triliun. Capaian tersebut lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 34 triliun.

Sejalan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, optimisme juga ditunjukkan oleh kinerja makro lainnya yakni kinerja indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan. Untuk kinerja pembangunan manusia, pada tahun 2023 nilai IPM Kota Surabaya sebesar 83,99 atau tumbuh sebesar 0,67 poin dibanding tahun 2022 yang sebesar 83,32. Selain itu, data kemiskinan juga menunjukkan penurunan seiring membaiknya kondisi perekonomian di Kota Surabaya, jumlah penduduk miskin semakin berkurang menjadi sebanyak 4,65 persen di tahun 2023 yang mulanya mencapai 4,72 persen ditahun 2022. Perbaikan juga ditunjukkan oleh kinerja tingkat pengangguran Kota Surabaya yang mengalami penurunan yang mulanya sebesar 7,62 persen pada tahun 2022 menjadi sebesar 6,76 persen di tahun 2023.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Kota Surabaya

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Peningkatan ekonomi yang terus berlanjut salah satunya ditunjukkan oleh peningkatan nilai PDRB dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja peningkatan nilai tersebut besarannya menyerupai kondisi pra pandemi Covid-19. Peningkatan tersebut dikontribusi oleh akumulatif meningkatnya nilai tambah hampir seluruh komponen pembentuk PDRB. Perkembangan perekonomian Kota Surabaya tahun 2019 hingga tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel III.1
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya
Tahun 2019 s/d Tahun 2023* (dalam juta)

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023*
		Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	928.398,16	889.331,91	917.595,42	982.815,39	1.026.186,70
B	Pertambangan dan Penggalian	33.531,33	31.943,80	32.761,34	33.392,98	32.513,35
C	Industri Pengolahan	109.205.137,20	107.416.294,34	113.535.139,44	126.030.898,75	135.434.984,12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.362.300,29	2.237.615,57	2.417.167,25	2.742.046,30	3.728.710,22
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	791.147,83	824.951,94	872.320,90	932.750,33	968.113,96
F	Konstruksi	54.649.310,30	51.969.408,77	55.273.538,87	61.408.502,94	64.940.579,25
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	161.032.248,06	149.246.755,05	163.509.913,19	184.610.467,40	201.432.925,47
H	Transportasi dan Pergudangan	31.240.415,60	29.794.090,41	30.518.851,24	36.260.418,47	42.834.312,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	95.519.341,84	85.618.582,64	91.418.079,71	102.248.698,97	114.627.560,20
J	Informasi dan Komunikasi	30.770.585,80	33.247.669,54	35.273.340,84	36.541.720,23	39.290.062,52

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023*
		Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	29.413.339,89	29.183.377,44	30.560.741,63	33.950.422,52	35.852.303,70
L	Real Estate	14.947.568,30	15.354.350,85	15.790.323,11	16.599.139,83	17.213.531,88
M,N	Jasa Perusahaan	14.930.184,77	14.116.912,06	14.543.157,97	15.772.593,51	17.530.932,18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.054.990,77	8.238.304,23	8.310.975,30	8.486.026,22	8.533.021,21
P	Jasa Pendidikan	14.007.607,77	14.540.365,94	14.692.371,72	14.866.084,13	15.784.480,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.443.228,45	4.880.587,79	5.220.638,17	5.508.115,81	5.958.216,19
R,S,T, U	Jasa lainnya	8.159.192,66	6.918.915,11	7.340.199,70	8.642.127,81	10.106.272,69
	Produk Domestik Regional Bruto	**580.448.529,01**	**554.509.457,38**	**590.227.115,79**	**655.616.221,58**	**715.294.707,23**

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2024
*Catatan: *) data sementara*

Perekonomian Kota Surabaya terus tumbuh positif. Seperti yang terangkum pada Tabel III.1, pertumbuhan yang positif ditunjukkan oleh capaian realisasi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB). Pada tahun 2019 nilai PDRB ADHB Kota Surabaya terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 meski sedikit mengalami kontraksi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Pada 2019 PDRB ADHB Kota Surabaya sebesar Rp580.448.529,01 juta dan hingga akhir tahun 2023 menghasilkan nilai tambah sebesar Rp715.294.707,23 juta. Dari sisi sektoral, perekonomian Kota Surabaya dikontribusi oleh peningkatan dari semua lapangan usaha pembentuknya terkecuali lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Industri Pengolahan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menempati tiga terbesar pemberi kontribusi tertinggi bagi perekonomian Kota Surabaya hingga saat ini. Terkait pekembangan terkini, pada tahun 2023, PDRB ADHB untuk lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebagai sektor yang merupakan sektor terbesar menghasilkan nilai tambah sebesar Rp201.432.925,47 juta. Lapangan usaha yang berkontribusi tinggi selanjutnya yaitu Industri Pengolahan dan diikuti oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan nilai tambah yang dihasilkan pada tahun 2023 masing masing sebesar Rp135.434.984,12 juta dan sebesar Rp114.627.560,20 juta.

Selaras dengan realisasi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Surabaya yang mengalami peningkatan, hal yang sama terjadi di PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). Pada Tabel III.2, nilai PDRB ADHK Kota Surabaya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 juga mengalami peningkatan, terkecuali tahun 2020. Pada tahun 2019 nilai PDRB ADHK Kota Surbaya sebesar Rp410.879.306,14 juta meningkat menjadi sebesar Rp459.030.719,58 juta di tahun 2023. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan nilai tambah sebesar Rp128.814.587,77 juta pada tahun 2023. Jumlah ini mewakili kontribusi sebesar 28,06% dari seluruh lapangan usaha penyumbang PDRB Kota Surabaya. Sementara lapangan usaha Industri Pengolahan memberikan nilai tambah sebesar Rp87.392.236,59 juta.

Tabel III.2
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya
Tahun 2019 s/d Tahun 2023*

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023*
		Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	576.221,53	547.994,90	554.054,69	573.236,82	576.177,55
B	Pertambangan dan Penggalian	20.782,09	19.464,04	19.479,83	19.094,55	17.844,90
C	Industri Pengolahan	77.271.868,81	76.384.521,77	79.366.597,57	84.567.579,11	87.392.236,59
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.546.272,08	1.449.668,99	1.538.145,94	1.661.665,76	2.174.083,24
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	605.979,60	630.336,37	665.833,73	680.003,79	696.386,15
F	Konstruksi	40.576.452,62	38.387.739,29	40.070.071,57	42.633.575,68	44.772.953,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	116.305.502,48	106.340.867,71	114.183.332,32	122.122.627,45	128.814.587,77
H	Transportasi dan Pergudangan	20.497.977,43	19.477.422,82	19.874.938,33	22.684.941,35	25.217.168,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	62.898.688,76	56.053.239,21	57.221.633,11	62.076.385,35	66.946.110,99
J	Informasi dan Komunikasi	27.531.903,71	29.511.280,46	31.281.790,23	32.264.418,48	34.446.030,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	19.187.832,54	19.231.210,98	19.324.709,68	19.648.801,34	20.445.326,71
L	Real Estate	10.784.959,46	11.000.304,15	11.179.684,13	11.634.820,68	11.916.338,17
M,N	Jasa Perusahaan	9.474.538,92	8.801.216,28	8.974.255,48	9.490.093,03	10.278.169,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.867.861,44	4.754.525,35	4.748.920,17	4.756.347,15	4.759.414,54
P	Jasa Pendidikan	9.668.100,19	9.934.443,75	9.993.042,98	10.001.195,71	10.447.847,60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.254.593,89	3.539.299,11	3.722.145,29	3.782.452,79	3.932.734,49
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.821.770,58	4.872.889,81	5.007.190,09	5.671.102,07	6.197.308,43
	Produk Domestik Regional Bruto	**410.879.306,14**	**390.936.424,98**	**407.725.825,13**	**434.268.341,12**	**459.030.719,58**

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Surabaya, diolah,2024
*Catatan: *) data sementara*

Berdasarkan kontribusi sektor pembentuk perekonomian Kota Surabaya, struktur perekonomian Kota Surabaya memiliki pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Peran sektor tersier dalam menopang perekonomian Kota Surabaya dilihat dari peranan sektor Perdagangan dan Jasa. Kondisi ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2023 yang sedikit mengalami perlambatan, dimana selaras dengan perekonomian pusat dan global membuat beberapara sektor lapangan usaha Kota Surabaya juga melambat. Kondisi itu ditunjukkan oleh dua sektor terbesar Kota Surabaya yakni lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pada tahun 2023 lapangan usaha ini memberikan peranan terhadap PDRB ADHK Kota Surabaya sebesar 28,06 persen yang sedikit mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 28,12 persen. Hal yang sama juga dialami oleh kinerja lapangan usaha Industri Pengolahan, dimana pada tahun 2023 memberikan kontribusi sebesar 19,04 persen yang mulanya sebesar 19,47 persen. Artinya selama tahun 2023 Industri Pengolahan produktivitasnya turun sebesar 0,40 persen. Melemahnya kinerja perdagangan besar maupun kecil tersebut berdampak terhadap kinerja lapangan usaha Industri pengolahan akibat menurunnya permintaan masyarakat.

Hal yang berbeda ditunjukkan oleh kinerja lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang memiliki kecendurangan terus meningkat. Sejak tahun 2021 hingga 2023 lapangan usaha ini terus meningkat. Pada tahun 2021 kontribusinya sebesar 14,03 persen dan meningkat ditahun 2022 sebesar 14,29 persen. Nilai tersebut meningkat kembali di tahun 2023 peranannya menjadi sebesar 14,58 persen.Terus meningkatnya sektor ini masih terdapat base effect Kebijakan pelonggaran yang ini mendorong kegiatan operasional hotel dan restoran dengan kapasitas maksimal menjadi faktor mendorong pertumbuhan sektor ini tumbuh lebih tinggi. Disamping itu, pola konsumsi masyarakat Kota Surabaya yang tinggi akan makanan minuman jadi mendorong semakin maraknya penyedia makanan minuman jadi (resto, cafe, warung kopi dll) yang tumbuh di Kota Surabaya.

Lapangan usaha transportasi dan pergudangan pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan kontribusi, dimana pada tahun 2022 sebesar 5,22 persen menjadi 5,49 persen. Lapangan usaha ini mengalami peningkatan peranan

diindikasi seiring tingginya belanja online sehingga aktivitas pergudangan meningkat. Meningkatnya belanja online juga mendorong kebutuhan pada sektor transportasi dan pergudangan semakin meningkat.

Tabel III.3
Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kota Surabaya
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019 s/d Tahun 2023*
(dalam persen)

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023*
		Persen	Persen	Persen	Persen	Persen
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	18,81	19,54	19,47	19,47	19,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,38	0,37	0,38	0,38	0,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,16	0,16	0,16	0,15
F	Konstruksi	9,88	9,82	9,83	9,82	9,75
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,31	27,2	28	28,12	28,06
H	Transportasi dan Pergudangan	4,99	4,98	4,87	5,22	5,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,31	14,34	14,03	14,29	14,58
J	Informasi dan Komunikasi	6,7	7,55	7,67	7,43	7,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,67	4,92	4,74	4,52	4,45
L	Real Estate	2,62	2,81	2,74	2,68	2,60
M,N	Jasa Perusahaan	2,31	2,25	2,2	2,19	2,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,18	1,22	1,16	1,10	1,04
P	Jasa Pendidikan	2,35	2,54	2,45	2,30	2,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,79	0,91	0,91	0,87	0,86
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,42	1,25	1,23	1,31	1,35
	Produk Domestik Regional Bruto	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Surabaya, diolah, 2024
*Catatan: *) data sementara*

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2023 perekonomian Kota Surabaya tumbuh positif sebesar sebesar 5,70 persen. Meskipun capaian pada tahun ini lebih lamban dibanding tahun 2022 yang mencapai angka yang lebih tinggi yakni sebesar 6,51 persen namun ekonomi Kota Surabaya terjaga tumbuh stabil di atas angka 5 persen. perlambatan selaras dengan kinerja ekonomi pusat maupun provinsi yang mengalami pertumbuhan dengan kondisi yang sama. Kondisi ekonomi global saat ini dihadapkan oleh berbagai tantangan, mulai dari aksi geopolitik ekonomi yang mengganggu kestabilan ekonomi dunia, perlambatan ekonomi negara-negara maju seperti Tiongkok, ketidakstabilan harga baik karena permintaan ataupun ketersediaan, serta volatilas harga komoditas.

Kinerja ekonomi Kota Surabaya patut diapresiasi karena masih tumbuh cukup tinggi di tengah kondisi ekonomi fluktuatif yang terjadi selama tahun 2023. Masih tingginya capaian kinerja ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2023 juga hasil dari keberhasilan pemerintah Kota Surabaya dalam menjaga daya beli masyarakat Kota Surabaya tetap tinggi melalui pengendalian harga barang dan jasa di Kota Surabaya. Selain itu, untuk pendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kota Surabaya juga melalukan berbagai program seperti program peningkatan investasi melalui pelayanan investasi maupun perizinan, pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya, pemberdayaan UMKM, penyediaan akses pekerjaan serta peningkatan sektor pariwisata di Kota Surabaya.

Tabel III.4
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2019 - 2023*

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2019	6,09
2020	-4,85
2021	4,29
2022*	6,51
2023	5,70

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Surabaya, diolah, 2024
**) data sementara*

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya dilihat dari sisi penawaran, pada tahun 2023 terbentuk dari 17 (tujuh belas) sektor lapangan usaha pembentuk perekonomian Kota Surabaya. Terdapat 16 (enam belas) lapangan usaha yang tumbuh positif, dan 1 (satu) lapangan usaha yang masih terkontraksi yakni lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Seperti yang terangkum dalam grafik batang, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni pengadaan listrik dan gas sebesar 30,84 persen. Lapangan usaha ini tumbuh pesat dikarenakan karena tingginya kebutuhan akan listrik dan gas untuk menunjang seluruh aktivitas masyarakat di Kota Surabaya sehingga pemintaan akan komoditas tersebut sangat tinggi.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi kedua yakni transportasi dan pergudangan sebesar 11, 16 persen. Transportasi dan pergudangan tumbuh tinggi dikarenakan peran sektor transportasi merupakan sarana penting dalam aktivitas perekonoamian. Sebagai moda mobilitas dan aktivitas masyarakat, tingkat mobilitas yang tinggi mengindikasikan semakin produktif suatu perekonomian.

Lapangan usaha tertinggi selanjutnya tumbuh pada kisaran 5 hingga 10 persen, secara berurutan yakni jasa lainnya (9,28 persen), jasa perusahaan (8,30 persen), penyediaan akomodasi dan makan minum (7,84 persen), informasi dan komunikasi (6,76 persen), diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Motor dan Sepeda Motor (5,48 persen), kontruksi (5,02 persen). Sisanya tumbuh kisaran kurang dari 5 persen. Sementara lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif selama tahun 2023 yakni Pertambangan dan Penggalian yang terkontraksi sebesar -6,54 persen.

c. Tingkat Inflasi

Nilai Inflasi Kota Surabaya pada tahun 2023 terjaga dalam kisaran sasaran. Pada awal tahun 2023 Kota Surabaya menetapkan target inflasi pada kisaran 2,5 +- 1 persen, selaras dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Perkembangan pada desember 2023 menunjukkan inflasi Kota Surabaya year on year sebesar 3,03 persen.inflasi yang terjaga dalam nilai kisarannya merupakan wujud keberhasilan kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam

mengendalikan inflasi sepanjang tahun 2023. Nilai inflasi pada tahun 2023 capaiannya lebih rendah dibanding nilai inflasi pada tahun 2022 yang mencapai sebesar 6,59 persen.

Gambar III.1
Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2019 – Tw I 2023 (persen)

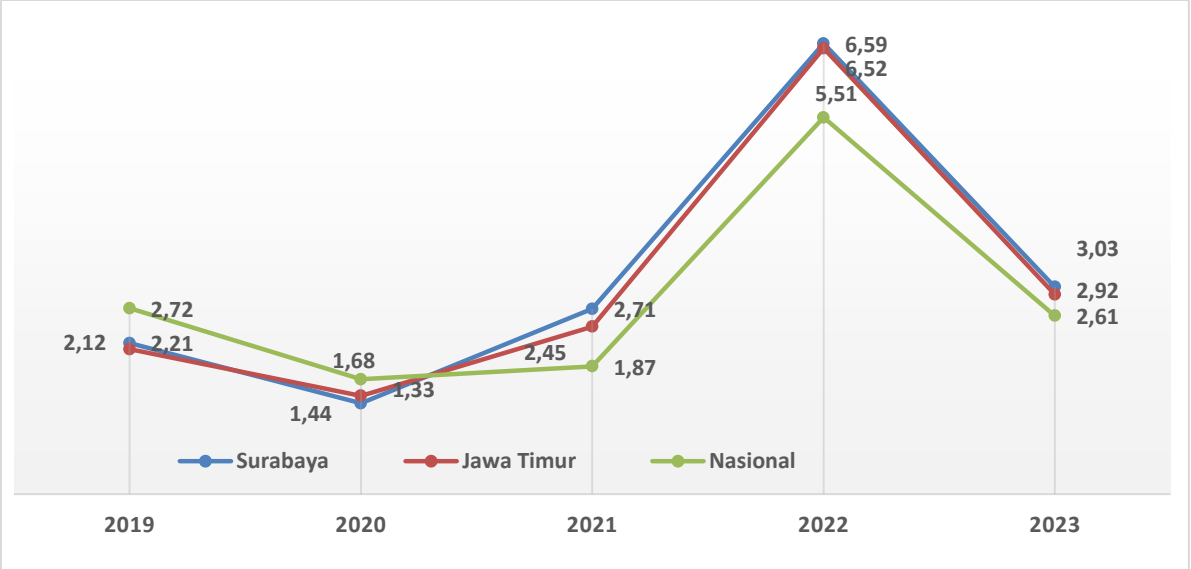

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, 2024, diolah

Inflasi Kota Surabaya yang terjadi pada tahun 2023 disebabkan oleh 10 kelompok pengeluaran mengalami inflasi sisanya 1 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi. Kelompok pengeluaran yang berkontribusi tertinggi menyumbang inflasi Kota Surabaya di tahun 2023 secara berurutan yakni kelompok makanan, minuman dan tembakau (6,36 persen), perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga (4,43 persen), perawatan pribadi dan jasa lainnya (3,41 persen) dan penyediaan makanan dan minuman/restoran (3,34 persen).

Kelompok Makanan, Minuman dan tembakau menjadi kelompok tertinggi yang menyumbang inflasi tahun 2023. Hal itu disebabkan karena ketiga sub pembentuknya menyumbang inflasi, tertinggi pada Sub kelompok rokok dan tembakau menyumbang sebesar 6,89 persen diikuti subkelompok makanan sebesar 6,67 persen dan minuman yang tidak beralkohol sebesar 3,51 persen. Sub kelompok makanan dikontribusi oleh komoditas-komoditas bahan pagan yang disebabkan selain karena periode musiman yang menyebabkan ketersediaan stok

dipasaran terbatas, juga dikarenakan banyak sedikitnya permintaan. Untuk Sub kelompok rokok dan tembakau dikontribusi oleh tren peningkatan harga pada rokok kretek filter yang merupakan dampak dari peningkatan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar 10% pada awal tahun 2023.

Kelompok yang berperan tinggi selanjutnya yakni perawatan pribadi dan jasa lainya. Pada tahun 2023 kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalmai inflasi sebesar 4,43 persen, atau tertinggi kedua setelah kelompok bahan makanan, minuman dan tembakau. Selain karena permintaan yang tinggi akan perawatan pribadi, peningkatan harga komoditas emas yang meningkat selaras dengan kondisi ekonomi yang cukup berfluktuasi selama ini menjadi faktor pendorong peningkatan permintaan emas sebagai asset aman, peningkatan permintaan tersebut berdampak pada kenaikan harga emas secara general di pasaran.

Kelompok pakaian dan alas kaki memberikan kontribusi inflasi Kota Surabaya pada tahun 2023 sebesar 3,41 persen. Dari 2 (dua) kelompok pembentuknya, inflasi pada sub kelompok alas kaki mengalami inflasi sebesar 7,28 persen, sementara subkelompok pakaian mengalami inflasi yang lebih rendah yakni 2,57 persen. Tekanan inflasi pada kelompok ini umumnya terjadi pada periode pertengahan tahun, dimana permintaan meningkat sejalan dengan pola tahunan di saat persiapan masuknya tahun ajaran baru sekolah pada bulan Juli pertengahan tahun.

Inflasi Kelompok Makanan dan MInuman/Restoran menjadi urutan keempat yang mengalami inflasi tinggi yang mengalami inflasi sebesar 3,34 persen. Inflasi yang terjadi pada kelompok ini dikontribusi oleh 3 kelompok sub pembentuknya. Secara berurutan, sub kelompok rokok dan tembakau mengalami inflasi tertinggi yakni sebesar 6,89 persen selanjutnya sub kelompok makanan yang mengalami inflasi sebesar 6,67 persen dan sub kelompok minuman yang tidak beralkohol sebesar 3,51 persen. Untuk sub kelompok makanan didorong oleh beberapa komoditas bahan makanan yang mengalami peningkatan harga baik karena terganggunya persediaan, anomali cuaca, pola musiman maupun faktor lainnya

Gambar 1.1
Grafik Kelompok Jenis Barang dan Jasa Pembentuk Inflasi Kota Surabaya Tahun 2023

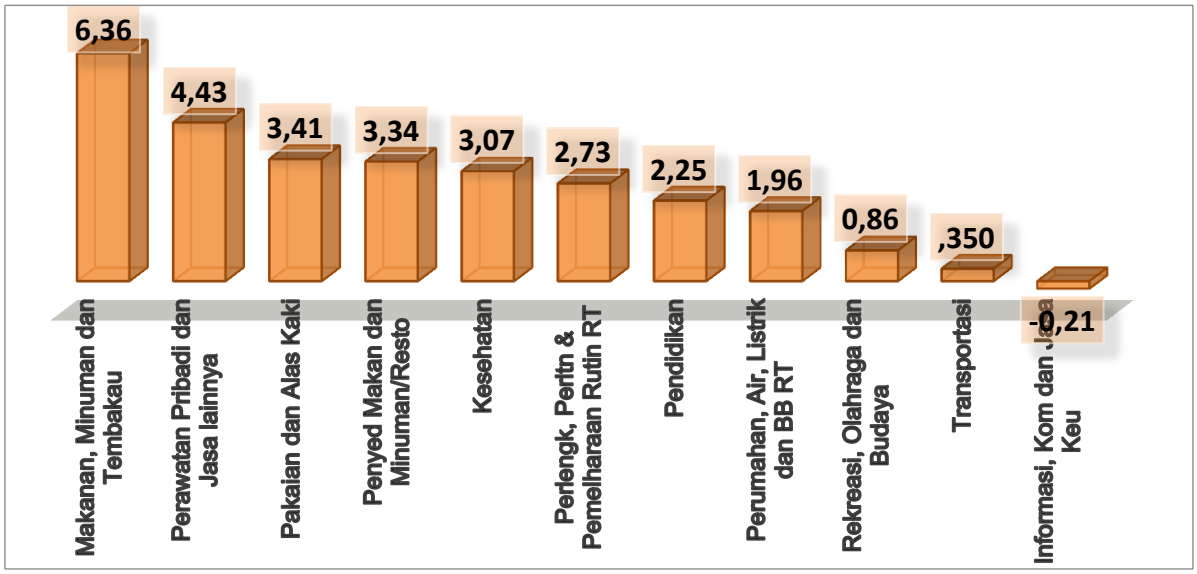

Jika dilihat dari jenis komoditasnya, 10 (sepuluh) komoditas tertinggi yang menyumbang inflasi Kota Surabaya selama tahun 2023 antara lain beras, cabai rawit, tarif air minum PAM, cabai merah, emas perhiasan, kontrak rumah, akademi perguruan tinggi, rokok kretek filter, sewa rumah dan bawang putih. Sementara 10 (sepuluh) komoditas yang menjadi penahan laju inflasi pada tahun 2023 antara lain telur ayam ras, bensin, minyak goreng, bawang merah, tomat, telepon selular, semangka, daging sapi, sawi hijau dan melon.

Selama pada tahun 2023 komoditas beras menjadi komoditas yang berkontribusi cukup signifikan terhadap inflasi di Kota Surabaya. Peningkatan harga beras di Peningkatan harga beras didorong oleh semakin menipisnya pasokan akibat penurunan produksi padi. Penurunan produksi padi di Jawa Timur disebabkan oleh rendahnya curah hujan akibat fenomena anomali cuaca El Nino. Selanjutnya penurunan produksi selanjutnya berdampak terhadap peningkatan harga gabah kering dan giling sehingga mendorong peningkatan harga beras di pasaran. Selain itu, permintaan yang tinggi juga disebabkan oleh percepatan pelaksanaan bantuan sosial sehingga mengakibatkan persediaan dipasaran mendorong persediaan dipasaran terbaas.

Komoditas yang juga tergolong penyumbang inflasi tertinggi pada

subkelompok pangan yakni bumbu-bumbuan seperti cabai rawit, cabai merah dan bawang putih. Cabai rawit dan cabai merah yang merupakan tergolong holtikultura memiliki volatillitas yang cukup tinggi, dimana sering kali menjadi penyumbang inflasi akibat penurunan produktivitas, daya simpan yang pendek dan sangat bergantung dengan anomali cuaca dan faktor lainnya. Seiring dengan tingginya permintaan baik kebutuhan rumah tangga maupun non rumah tangga (hotel restoran dan katering) menjadikan semakin tinggi juga kontribusi komoditas terhadap inflasi. Sementara untuk komoditas bawang putih mengalmai inflasi disebabkan oleh produksi yang menurun akibat cuaca el Nino sementara permintaan tetap tinggi dan realisasi impor yang kurang optimal karena produksi di daerah asal impor juga mengalami penurunan produksi.

Untuk kontrak rumah dan sewa rumah masih menjadi faktor tertinggi penyumbang inflasi Kota Surabaya di tahun 2023 sama seperti pola di tahun sebelum-sebelumnya. Sampai saat ini, permintaan akan hunian sementara seperti sewa maupun kontrak rumah di Kota Surabaya masih cukup tinggi. Selain dikarenakan harga rumah di Surabaya sudah tidak terjakau lagi, meningkatnya inflasi pada sewa rumah dan kontrak rumah untuk tahun 2023 juga didorong oleh peningkatan tarif air minum PAM. Di awal tahun 2023 perusahan air minum PAM Kota Surabaya melakukan penyesuaian tarif air minum PAM seiring meningkatnya biaya oprasional perusahaan. Selain tariff listrik, tariff air minum PAM merupakan komponen dari penentuan penetapan biaya sewa rumah sehingga meningkatnya tariff air minum PAM otomatis membuat para pemilik hunian sewa/kontrak memutuskan untuk menaikkan biaya sewa bulannya

d. Investasi

Komponen investasi meupakan salah satu komponen terbesar yang berkontribusi terhadap PDRB dari sisi pengeluaran. Peran investasi penting untuk menstimulus perekonomian Kota Surabaya sebab aktivitas penambahan modal yang ditanamkan akan meningkatan produktivitas serta kapasitas produksi, yang selanjutnya dapat mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan banyaknya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan strategi

investasi yang diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki *multiplier effect* yang tinggi.

Tabel III.5
Realisasi Nilai Investasi Kota Surabaya
Tahun 2019 –Tahun 2023

Tahun	Jumlah Penanaman Modal	
	PMDN	PMA
2019	Rp 16.777.246.236.711	Rp 2.442.653.778.989
2020	Rp 16.356.162.161.751	Rp 1.258.527.150.916
2021	Rp 26.367.999.200.000	Rp 2.847.062.089.924
2022	Rp 32.360.553.538.640	Rp 2.537.261.412.162
2023	Rp 34.810.311.974.810	Rp 2.525.167.120.000

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya, 2024

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya, nilai total investasi di Kota Surabaya selama 5 tahun sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sebagaimana terangkum dalam tabel di atas. Nilai investasi Kota Surabaya tahun 2023 yang berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp34.810.311.974.810. Sementara investasi dari penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 2.525.167.120.000. Sehingga total realisasi investasi Kota Surabaya pada tahun 2022 sebesar Rp 37.335.479.094.810.

e. Ekspor

Kinerja ekspor non migas Kota Surabaya selama tahun 2022 menunjukkan kinerja positif, namun lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2022 nilai realiasi ekspor non migas Kota Surabaya sebesar US$20.735.891.937 atau menurun sebesar 8,98 persen. Lebih rendahnya realisasi ekspor non migas Kota Surabaya dipengaruhi oleh perlambatan kinerja ekonomi mitra dagang Kota Surabaya akibat ancaman resesi global. Disamping itu, adanya kebijakan untuk tarif ekspor maupun bea keluar untuk komoditas-komoditas tertentu turut menjadi faktor yang mempengaruhi turunnya kinerja ekspor Kota Surabaya pada tahun 2022.

Ditinjau dari komoditasnya, komoditas perhiasan/permata menjadi komoditas

tertinggi yang diminati para importir selama tahun 2021. Hal tersebut ditunjukkan oleh meningkatnya ekspor perhiasan/permata, yang mulanya sebesar US$1.579.696.859 di tahun 2021 menjadi sebesar US$1.910.211.837 di tahun 2022. Kondisi Komoditas ekspor non migas tertinggi selanjutnya yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja perdagangan Kota Surabaya terangkum dalam tabel 1.3. Jika dilihat komposisi, jenis komoditas ekspor non migas Kota Surabaya yang pada tahun 2021 hampir sama dengan jenis komoditas di tahun 2020 namun variasi besaran nilainya yang berbeda.

Kondisi yang berbeda ditunjukkan oleh kinerja impor non migas Kota Surabaya. Realisasi kinerja impor non migas Kota Surabaya pada tahun 2022 sebesar US$21.466.323.294 sementara realiasi pada tahun 2021 menunjukkan angka yang lebih rendah yakni US$19.568.405.393. Artinya, sepanjang tahun 2022 kinerja impor Kota Surabaya mengalami peningkatan sebesar 8,84 persen dibanding tahun 2021. Jika dilihat dari komposisinya, komoditas tertinggi masih sama dengan tahun sebelumnya, dimana komoditas impor non migas Kota Surabaya mayoritas merupakan barang modal maupun inventori bahan baku serta barang konsumsi yang dipenuhi dari luar daerah maupun luar negeri. Adanya peningkatan nilai realisasi impor Kota Surabaya tahun 2022 dapat merefleksikan bahwa aktivitas ekonomi di Kota Surabaya pada tahun 2022 lebih produktif dibanding pada tahun 2022 yang ditunjukkan dari permintaan para pelaku usaha akan input produksi yang menunjang kebutuhan produksi selama tahun 2022.

Tabel III.6
Ekspor Impor Non Migas Kota Surabaya
Tahun 2012 – 2022

Nilai/Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Ekspor (US$)	18,120,064,879	17,278,974,907	17,278,974,907	22,780,677,395	20.735.891.93
Impor (US$)	17,368,048,068	15,382,235,848	15,382,235,848	19,568,405,393	21.466.323.294

Sumber data: BPS Provinsi Jawa Timur dan Bappedalitbang Surabaya, diolah, 2024

f. Tingkat Pengangguran Terbuka

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka dalam kurun waktu tahun 2019 ke tahun 2020 mempunyai tren meningkat dengan angka tingkat pengangguran yang mulanya sebesar 5,87 persen menjadi 9,79 persen. Beberapa faktor yang menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran di Kota Surabaya antara lain faktor kependudukan yang terdiri dari jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi namun tidak dibekali dengan keterampilan dan mental kerja, tingkat pendidikan rendah, tingkat urbanisasi yang tinggi serta faktor jumlah lapangan kerja yang terbatas, faktor tenaga kerja kontrak (*outsourcing*), dan faktor pemutusan hubungan kerja yang utamanya banyak terjadi ketika pandemi Covid-19.

Berdasarkan data rilis Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 7,62 persen dari yang sebelumnya sebesar 9,68 persen pada tahun 2021 atau turun sebesar 2,06 persen. Penurunan TPT terus belanjut menjadi 6,76 persen di tahun 2023. Penurunan TPT Kota Surabaya yang cukup signifikan disebabkan oleh kebijakan pengurangan pengangguran khususnya difokuskan pada pengangguran akibat Covid-19. Penurunan ini merupakan sinyal efektivitas kebijakan yang diterapkan di Kota Surabaya sehingga membuat penduduk angkatan kerja yang sebelumnya terdorong keluar dari pasar kerja, dapat kembali terserap kdalam kategori penduduk yang bekerja dengan kriteria paling sedikit satu jam dalam seminggu terakhir.

Ditinjau dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, nilai TPT Kota Surabaya tahun 2022 didominasi oleh penduduk berpendidikan SMA ke atas. kondisi seperti ini juga terjadi pada periode-periode sebelumnya di mana penduduk bekerja di Kota Surabaya mayoritas sudah berpendidikan tinggi. Mutu pendidikan tenaga kerja erat kaitannya dengan nilai produktivitas yang dihasilkan pada suatu wilayah. Semakin baik tingkat pendidikan dari penduduk yang bekerja, maka semakin tinggi nilai produktivitas yang bisa dihasilkan.

Tabel III.7
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya
Tahun 2019 – 2023

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2019	5,87%
2020	9,79%
2021	9,68%
2022	7,62%
2023	6,76%

Sumber data: BPS Jawa Timur, 2024

3.1.2 Prospek Ekonomi Tahun 2024 dan 2025

Kondisi perekonomian secara umum pada tahun 2024 diperkirakan masih tumbuh positif meskipun cenderung termoderasi. Tertahannya pertumbuhan tumbuh lebih tinggi utamanya dipengaruhi oleh faktor global. Masih tingginya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik yang masih berlanjutnya hingga saat ini serta tidak stabilnya kondisi moneter bank sentral berdampak terhadap perekonomian nasional dari sisi perdagangan dan investasi. Meskipun demikian, tekanan yang terjadi saat ini tidak sama seperti dampak pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian terkontraksi tajam. Berdasarkan rilis BPS Nasional, ekonomi Indonesia di akhir tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen (y-on-y).

Bappenas menargetkan sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 pada kisaran 5,2 persen, dan pada tahun 2025 diperkirakan mengalami pertumbuhan di kisaran 5,1-5,5 persen. Melihat perkembangan terkini, pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya diperkirakan masih tumbuh kuat, yakni dikisaran 6,1 persen dengan asumsi tidak ada gejolak ekonomi yang terjadi. Salah satu sasaran pembangunan yang masih difokuskan ialah pemulihan ekonomi yang menjadi program keberlanjutan pemerintah. Optimisme tersebut dilatar belakangi oleh bergeraknya sektor-sektor riil, kebijakan yang secara mikro dan langsung menyentuh masyarakat serta ditunjukkan dengan membaiknya beberapa indikator-indikator ekonomi yang lain. Seiring kondisi tersebut, perekonomian diperkirakan berjalan normal sehingga aktivitas ekonomi berlangsung normal.

Dari sisi sektoral, lapangan usaha potensial Kota Surabaya yakni lapangan

usaha Perdagangan Besar Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Industri Pengolahan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum masih diperkirakan menjadi sektor yang berkontribusi besar menghasilkan nilai tambah terhadap perekonomian Kota Surabaya. Selain itu, peralihan status dari pandemi menjadi endemi berdampak terhadap meningkatnya mobiltas masyarakat dan khususnya aktivitas sektor pariwisata. Perkembangan yang positif tersebut turut mendorong kinerja sektor yang lain sehingga tumbuh positif. Kondisi tersebut tentunya juga dipengaruhi oleh semakin membaiknya kinerja investasi yang mendorong tingginya penyerapan tenaga kerja di Kota Surabaya.

Dari sisi perkembangan harga, inflasi Kota Surabaya pada akhir tahun 2023 berdasarkan rilis BPS Kota Surabaya secara year on year (y-on-y) sebesar 3,03 persen. Jika dibandingkan pada tahun 2022, Kota Surabaya mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 6,59 persen. Sementara untuk tahun 2024, inflasi Kota Surabaya diperkirakan lebih terkendali sehingga inflasi Kota Surabaya pada tahun 2024 diperkirakan pada kisaran 2,5 ± 1 persen. Perkiraan tersebut juga telah sesuai dengan sasaran pembangunan nasional tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Pasal 11 bahwa Perubahan RKPD tahun 2024 dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan
b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan;

Dengan adanya proyeksi membaiknya pengendalian inflasi di Kota Surabaya, selain dengan adanya penyesuaian terhadap Sisa Lebih Pagu Anggaran (SiLPA) tahun 2023, pada sisi pendapatan juga membawa dampak dengan proyeksi meningkatnya pendapatan pada beberapa sektor serta penyesuaian pada sisi belanja yang diarahkan untuk pada belanja yang efisien namun dapat memberikan dampak pergerakan perekonomian di Kota Surabaya.

Memperhatikan prospek perekonomian Kota Surabaya di masa yang akan datang, arah kebijakan ekonomi yang disusun diharapkan dapat mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditargetkan. Optimisme ini perlu terus dipertahankan dan diakselerasi melalui berbagai upaya penguatan pemulihan ekonomi. Bauran kebijakan transformasi ekonomi yang responsive dan adaptif perlu dirumuskan melalui arah kebijakan ekonomi Jawa Timur di tahun 2024 sebagai berikut :

1. Akselerasi pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektifitas Kawasan sentra pertumbuhan ekonomi baru;
2. Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggarann belanja dan konsumsi pemerintah agar harga kebutuhan-kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat tetap terjaga;
3. Mendorong ekspor dan optimalisasi produk komoditas ekspor unggulan baik produk agro maupun non agro;
4. Peningkatan daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui standarisasi dan desain produk;
5. Meningkatkan produktifitas pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan;
6. Penguatan pemulihan sektor riil bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, penguatan SDM KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, perluasan pemasaran melalui Upaya kolaboratif dan optimaliasi teknologi informasi;
7. Akselerasi pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan serta perluasan lapangan pekerjaan baik bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif;
8. Menjaga iklim investasi melalui melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampingan realisasi investasi;
9. Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau/green ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat dan ramah lingkungan serta inklusif secara sosial;
10. Penguatan ekonomi local melalui upaya kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan wirausaha baru di pedesaan

Mengacu pada tema pembangunan nasional dalam RKP Nasional Tahun 2024 yaitu ***"Mempercepat Tranformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan"*** dengan prioritas nasional sebagai berikut :

1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5) Memperkuat insfrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transforasi pelayanan publik;

Berikutnya pada Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, tema pembangunan tahun 2024 adalah ***"Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transfromasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak"***, dengan priortas pembangunan sebagai berikut :

1) Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata;
2) Penguatan konektifitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur;
3) Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktifitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan;
4) Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5) Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi;
6) Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
7) Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.

Berdasarkan kondisi ekonomi makro dan diselaraskan dengan arah kebijakan tahun 2024 yang tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 ***"Peningkatan Kualitas Tata Kota dan Sistem Transportasi Terpadu Pendukung Sektor Utama yang Sinergi dengan Kebijakan Nasional dan Daerah Sekitar"***. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan II dengan mempertimbangkan pencapaian target RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, maka perubahan RKPD Kota Surabaya tetap difokukan untuk pencapaian tema pembangunan dalam RKPD Kota Surabaya tahun 2024 yakni "***Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dengan Dukungan Kualitas Tata Kota, Sistem Transportasi Terpadu dan Berkelanjuta*n *serta Peningkatan Sumber Daya Manusia***". dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan produktifitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata dan padat karya;
2. Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu;
3. Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar;
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5. Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana;
7. Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik

Selanjutnya, kondisi perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2025 juga diperkirakan semakin baik. Di tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya diperkirakan tumbuh namun sedikit mengalami perlambatan dikarenakan tingginya ketidakpastian ekonomi global yakni kisaran 5,5-6,1 persen. Kondisi ekonomi negara-negara berpengaruh yang melamban berpengaruh terhadap perekonomian domestik melalui sisi perdagangan dan sektor keuangan. Sehingga diperkirakan aktivitas perdagangan Kota Surabaya pada 2025 memiliki performa yang lebih

rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara kinerja konsumsi rumah tangga yang menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tetap menjadi komponen yang konsisten tumbuh positif seiring gigihnya komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam pengendalian inflasi di Kota Surabaya. Dengan penerapan UU HKPD, kemandirian fiskal Kota Surabaya yang diklasifikasikan sebagai kota mandiri akan meningkat dan tetap menjadi wilayah dengan target Pendapatan Daerah tertinggi di Jawa Timur. Kota Surabaya merupakan pusat bisnis dan pemerintahan dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman. Struktur ekonomi ini mendorong penghasilan pajak daerah yang relatif lebih besar dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Lebih lanjut, jika UU HKPD berlaku sepenuhnya mulai 1 Januari 2025, diperkirakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya dari opsen Pajak dapat mencapai Rp1 triliun per tahun, meningkat dari Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) yang sebelumnya sekitar Rp400 miliar. Kondisi ini tentunya akan mendongkrak penerimaan PAD Kota Surabaya.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Surabaya tahun 2024 mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan Daerah tediri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Pendapatan Transfer;
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dalam rangka optimalisasi upaya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD, Pemerintah Kota telah berkomitmen untuk melakukan penyusunan

perencanaan dan monitoring secara digital melalui pengembangan *eplanning, Government Resource Management System* (GRMS), dan implementasi SIPD RI. Untuk meningkatkan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Surabaya teleh mengembangkan pembayaran pajak dan retribusi secara *online*

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan Pemerintah Kota Surabaya tahun 2024 pada masing-masing jenis pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan yang sah. Kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing jenis obyek terdiri dari:

   a. Kebijakan Pajak Daerah:

      1) Penganggaran pajak daerah disusun berdasarkan Pasal 94 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
      2) Penganggaran pajak daerah dengan objek kepemilikan dan atau penguasaan alat berat dapat dipungut pajak daerah dengan nama pajak alat berat
      3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Kota Surabaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yaitu penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan

besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi

4) Mengoptimalisasikan penerimaan pajak melalui perluasan basis data serta pemutakhiran data pajak
5) Mengembangkan layanan pajak secara daring untuk mempermudah pembayaran pajak melalui kanal digital.

b. Kebijakan Retribusi Daerah:
   1) Penganggaran retribusi daerah dapat dianggarkan dan dilaksanakan pemungutannya selama Peraturan Daerah telah disesuaikan dan ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
   2) Peningkatan pelayanan publik dari sisi kecepatan pelayanan dan kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah
   3) Pengawasan bangunan yang memerlukan perizinan tertentu yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui Perangkat Daerah penghasil dan Kecamatan/Kelurahan, supaya semakin banyak masyarakat yang mengajukan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan membayar retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
   4) Penambahan komponen objek pelayanan publik yang dapat dikenakan retribusi
   5) Optimalisasi pendapatan retribusi parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan mengupayakan kerjasama dengan pengelola parkir swasta

6) Meningkatkan kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah dengan asuransi kesehatan swasta
7) Optimalisasi layanan RSUD denga layanan Kesehatan dan alat-alat kedokteran yang baru

c. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:
   1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah
   2) Kebijakan pengganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan, antara lain :
      a) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi daerah
      b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi Pemerintahan Daerah
      c) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan
      d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan
      e) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi daerah
   3) Optimalisasi koordinasi dan/atau pengawasan kepada BUMD dan BUMN

d. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:
   1) Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
      a) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan
      b) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan

c) Hasil kerjasama daerah
d) Jasa giro
e) Hasil pengelolaan dana bergulir
f) Pendapatan bunga
g) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah
h) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah
i) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
j) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
k) Pendapatan denda pajak daerah
l) Pendapatan denda retribusi daerah
m) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
n) Pendapatan dari pengembalian
o) Pendapatan dari BLUD
p) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Dalam rangka meningkatkan Lain-lain PAD yang Sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS) / Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3) Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil untuk optimalisasi denda pajak daerah dan denda retribusi daerah serta pendapatan objek lainnya.
4) Koordinasi dengan lembaga perbankan secara intensif terkait penempatan jasa giro dan deposito kas daerah Pemerintah Kota

2. Kebijakan Pendapatan Transfer yaitu:
   a. Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Transfer pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pendapatan bagi hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
   b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur dana transfer dari Pemerintah Pusat mulai diberlakukan pada tahun 2023. Potensi dana transfer dari pemerintah pusat pada APBD Kota Surabaya menyesuaikan dengan kebijakan yang tertuang dalam aturan tersebut
   c. Penganggaran Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana transfer atau informasi resmi mengenai alokasi dana transfer yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
   d. Penganggaran dana transfer dari Pemerintah Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi dengan memperhatikan realisasi pendapatan Dana Transfer tahun terakhir. Terhadap dana perimbangan ini, kebijakan yang ditetapkan adalah melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peranan aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk dapat memenuhi persyaratan penyaluran dana transfer.

3. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi :

a. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
b. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
c. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
d. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya
f. Pengalokasian Dana BOS Kabupaten/Kota untuk satuan pendidikan dasar negeri dan swasta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 ada pada kode rekening Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik merupakan bagian dari pendapatan transfer DAK Non Fisik

Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berdasarkan data pendapatan daerah Kota Surabaya sebagaimana terlihat

pada Tabel III.8.

Terdapat perubahan dalam Tabel dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2021 s.d 2025, hal ini dikarenakan pada 2025 terdapat potensi peningkatan pajak dan retribusi menyesuaikan dengan regulasi baru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan hasil penyesuaian dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Inovasi yang dilakukan adalah optimalisasi potensi baru dari pajak dan retribusi dengan cara :

1. Percepatan implementasi elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah khususnya untuk Pajak dan retribusi daerah dengan Menggalakkann pembayaran melalui kanal-kanal digital antara lain :
   a. seperti pembayaran retribusi parkir melalui QRIS,
   b. pembayaran Pajak daerah dan retribusi daerah melalui internet banking dan virtual account dan kanal-kanal pembayaran digital lainnya,
   c. memperluas kerjasama dengan penyedia kanal pembayaran digital untuk memperluas pembayaran pajak dan retribusi daerah secara digital
2. Pendataan ulang database Pajak Daerah dengan menyesuaikan Perda PDRD;
3. Memberikan insentif pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Intensifikasi pemungutan pajak daerah dengan menggali potensi yang ada melalui pemasangan alat pemantauan pajak secara elektronik
5. Implementasi atas Perjanjian Kerjasama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D) yang telah disepakati dengan Kementerian Keuangan
6. Pemanfaatan asset daerah berupa tanah dan/atau bangunan dengan Pihak Ketiga untuk menambah pendapatan dari sewa atau pemanfaatan BMD yang lain sehingga meningkatkan pendapatan di lain-lain PAD yang sah,
7. Menambah daya Tarik obyek wisata yang dikelola Pemerintah Kota

Surabaya sehingga dapat meningkatkan pengunjung dan menambah pendapatan dari retribusi pelayanan tempat wisata dan olahraga,

8. Optimalisasi pemungutan Opsen PKB dan BBNKB melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutran serta koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
9. Cara-cara lainnya yang dipandang perlu untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah. .

Tabel III.8
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kota Surabaya
Tahun 2021 s.d Tahun 2025

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Perubahan RKPD Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
1	**Pendapatan Asli Daerah**						
1.1	Pajak Daerah	3.649.732.215.700	4.157.521.611.124	4.562.879.779.487	5.061.651.201.188	5.151.326.806.350	6.550.224.998.396
1.2	Retribusi Daerah	235.591.662.263	269.599.560.046	289.382.181.469	393.470.465.818	405.033.091.681	316.334.245.975
1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	160.897.394.117	233.686.218.755	152.380.733.841	222.512.698.894	190.042.923.841	210.074.787.736
1.4	Lain-Lain PAD yang sah	681.089.357.590	653.887.867.869	767.175.835.656	743.257.785.393	814.105.162.258	947.678.924.390
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**4.727.310.629.670**	**5.314.695.257.794**	**5.771.818.530.453**	**6.420.892.151.293**	**6.560.507.984.130**	**8.024.312.956.497**
2	**Pendapatan Transfer**			**5.694.014.077.000**			
2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**2.202.536.032.336**	**2.516.292.582.738**	**2.595.300.604.262**	**2.727.367.254.000**	**2.727.367.254.000**	**2.694.153.486.882**
2.1.1	Dana Perimbangan	2.154.338.429.336	2.475.155.880.738	2.564.776.881.262	2.704.974.440.000	2.704.974.440.000	2.694.153.486.882
2.1.1.1	Dana Transfer Umum	1.770.191.478.753	1.712.278.031.555	1.799.756.817.452	1.907.351.541.000	1.907.351.541.000	1.907.351.541.000
2.1.1.2	Dana Bagi Hasil	603.035.148.835	574.564.763.316	568.678.807.909	478.749.003.000	478.749.003.000	478.749.003.000
2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	1.167.156.329.918	1.137.713.268.239	1.231.078.009.543	1.428.602.538.000	1.428.602.538.000	1.428.602.538.000

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Perubahan RKPD Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
2.1.1.4	Dana Transfer Khusus	384.146.950.583	762.877.849.183	765.020.063.810	797.622.899.000	797.622.899.000	786.801.945.882
2.1.1.4.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	15.584.019.460	52.559.727.674	24.935.715.998	6.765.509.000	6.765.509.000	6.765.509.000
2.1.1.4.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	368.562.931.123	710.318.121.509	740.084.347.812	790.857.390.000	790.857.390.000	780.036.436.882
2.1.2	Dana Insentif Daerah	48.197.603.000	41.136.702.000	30.523.723.000	22.392.814.000	22.392.814.000	0
2.1.3	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Dana Keistimewaan	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Dana Desa	0	0	0	0	0	0
2.2	**Transfer Antar - Daerah**	**1.016.416.082.323**	**960.320.838.950**	**1.237.660.629.691**	**1.622.055.062.570**	**1.801.220.648.162**	**493.564.543.242**
2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Provinsi	1.013.160.682.323	939.286.438.950	1.224.592.229.691	1.618.211.748.791	1.797.377.334.383	489.721.229.463
2.2.2	Pendapatan Bantuan Keuangan	3.255.400.000	21.034.400.000	13.068.400.000	3.843.313.779	3.843.313.779	3.843.313.779
	Jumlah Pendapatan Transfer	**3.218.952.114.659**	**3.476.613.421.688**	**3.832.961.233.953**	**4.349.422.316.570**	**4.528.587.902.162**	**3.187.718.030.124**
3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**						
3.1	Hibah	0	0	0	0	0	0
3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Perubahan RKPD Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	380.645.331.897	0	0	0	0	0
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**380.645.331.897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Jumlah Pendapatan	**8.326.908.076.226**	**8.791.308.679.482**	**9.604.779.764.405**	**10.770.314.467.863**	**11.089.095.886.292**	**11.212.030.986.622**

Sumber : Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Berikut adalah rekapitulasi pendapatan per PD Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 seperti tersaji dalam tabel.

Tabel III.9
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kota Surabaya Per PD
Tahun 2021 s.d Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Perubahan RKPD Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
1	Badan Pendapatan Daerah	0	4.177.250.689.693	4.573.798.966.702	5.061.651.201.188	5.151.326.806.350	6.550.224.998.396
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0	3.848.389.155.761	4.157.105.095.159	4.732.948.556.216	4.910.088.407.504	3.536.842.392.105
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	91.645.170.368	101.733.121.281	112.508.222.727	144.634.403.064	144.634.403.064	115.634.403.064
4	Dinas Perhubungan	38.663.359.372	46.291.695.558	53.146.932.313	93.485.041.653	93.485.041.653	90.080.609.882
5	Dinas Lingkungan Hidup	0	79.520.392.415	84.916.831.126	103.857.367.792	124.413.634.771	122.455.080.145
6	Dinas Kesehatan	2.509.328.000	147.501.762.677	162.772.987.076	155.872.128.500	174.000.000.000	176.577.625.200
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	18.590.000,00	248.226.000	720.894.000	650.000.000	780.894.000	750.032.000
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0	490.218.000	6.722.815.600	6.958.929.600	6.958.929.600	7.232.000.000
9	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan	0	3.248.373.740	2.479.038.640	0	0	0

No	Perangkat Daerah	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Perubahan RKPD Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
10	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	0	7.087.935.150	11.751.091.061	8.000.000.000	16.000.000.000	17.219.090.000
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	444.014.000	563.127.080	586.749.000	553.584.000	2.104.513.500	2.953.584.000
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.459.620.000	1.066.450.000	597.510.000	360.000.000	360.000.000	360.000.000
13	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	327.392.879.016	209.370.718.921	270.202.075.903	292.316.171.975	295.816.171.975	307.470.399.714
14	RSUD Bhakti Dharma Husada	204.992.688.699	167.920.381.475	166.541.999.598	167.920.381.475	167.920.381.475	177.865.015.715
15	RSUD Surabaya Timur	0	0	0	0	0	105.000.000.000
16	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	0	621.111.831	928.555.500	1.106.702.400	1.206.702.400	1.365.756.400
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	5.319.900	0	0	0	0
18	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	88.274.192.166	0	0	0	0	0
19	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	99.756.045.281	0	0	0	0	0
21	Dinas Tenaga Kerja	4.399.749.300	0	0	0	0	0
22	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	654.215.020	0	0	0	0	0

No	Perangkat Daerah	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Perubahan RKPD Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	948.884.500	0	0	0	0	0
24	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	244.280.000	0	0	0	0	0
25	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	4.713.307.090	0	0	0	0	0
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	7.457.577.292.611	0	0	0	0	0
27	Dinas Perdagangan	2.182.974.904	0	0	0	0	0
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.485.900	0	0	0	0	0
JUMLAH		**8.326.878.076.226**	**8.791.308.679.482**	**9.604.779.764.405**	**10.770.314.467.863**	**11.089.095.886.292**	**11.212.030.986.622**

Sumber : Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2024

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Arah kebijakan dalam Dokumen Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Terjadinya pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada berbagai aspek perlu ditindaklanjuti dengan pemulihan kinerja pada berbagai sektor utamanya pada pemulihan ekonomi, sistem pendidikan, sistem kesehatan dan sistem sosial kemasyarakat, oleh sebab itu Perubahan RKPD 2024 tetap diarahkan pada pencapaian tema Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2024 yaitu ***"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dengan Dukungan Kualitas Tata Kota, Sistem Transportasi Terpadu dan Berkelanjutan serta Peningkatan Sumber Daya Manusia"*** diprioritaskan untuk :

1) Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya;
2) Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu;

3) Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar;
4) Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5) Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah;
6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana;
7) Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik.

Belanja Daerah memperhatikan hal-hal khusus lain, sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) Pasal Pasal 146 Ayat (1) Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Total belanja pegawai sebesar Rp2.970.875.714.308 dan Tunjangan Guru melalui TKD sebesar Rp234.429.707.000 sehingga belanja Pegawai setelah dikurangi Tunjangan Guru melalui TKD sebesar Rp2.736.446.007.308 atau 24,22%;
2. Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagai upaya peningkatan pelayanan bidang pendidikan. Jumlah alokasi anggaran fungsi pendidikan sebagaimana tercantum dalam dokumen Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.218.950.572.310 atau 19,66% hal ini dikarenakan peningkatan pada belanja lain sehingga mengakibatkan total belanja mengalami peningkatan dan rasio mengalami penurunan;
3. Mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagai upaya peningkatan bidang kesehatan, termasuk didalamnya anggaran penanggulangan stunting. Jumlah alokasi anggaran fungsi kesehatan sebagaimana tercantum dalam dokumen Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.696.306.176.049 atau 29,88%;

4. Mengalokasikan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebesar 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah DAU tambahan. Jumlah alokasi anggaran kegiatan dimaksud sebagaimana tercantum dalam dokumen RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 adalah sebesar 509.306.902.288 atau 5%
5. Mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal;
6. Mengalokasikan upaya penataan kota yang berkualitas melalui penanganan masalah genangan dan pencegahan banjir;
7. Pengintegrasian penataan kota dan upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum melalui penataan penerangan jalan umum;
8. Pengalokasian anggaran sebagai keberlanjutan pekerjaan tahun jamak berupa pembangunan Rumah Sakit Surabaya Timur;
9. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum dan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dialokasikan belanja hibah penyelenggaraan kegiatan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp 84.710.987.277,- dengan mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Pengalokasian Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 5.000.000.000,- untuk memenuhi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang;
11. Pengalokasian anggaran penyusunan RPJPD Kota Surabaya Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2029 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
12. Pengalokasian anggaran untuk mendukung partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui dukungan anggaran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13. Efisiensi belanja nonprioritas khususnya belanja barang operasional yang

dapat digantikan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektonik dan dialihkan untuk belanja yang lebih produktif;

14. Evaluasi terhadap bantuan sosial serta perlindungan sosial melalui penguatan data agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan ;
15. Sebagai upaya penurunan terhadap emisi gas rumah kaca, secara bertahap dilakukan peralihan terhadap kendaraan operasional berbahan bakar fosil menjadi kendaran listrik baik melalui pengadaan terhadap kendaraan listrik maupun melalui mekanisme sewa;
16. Penambahan terhadap pagu belanja memperhatikan waktu penyelesaian kegiatan dalam perubahan APBD Tahun 2024.

Berdasarkan data realisasi Tahun 2021, Tahun 2022, adan Tahun 2023 serta APBD Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 serta Proyeksi Tahun 2025 maka Belanja Daerah Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel III.9

Tabel III.9
Realisasi dan Target/Proyeksi Belanja Kota Surabaya Tahun 2022 s.d Tahun 2025

No	Uraian	Realiasi Tahun 2021	Realiasi Tahun 2022	Realiasi Tahun 2023	Target APBD Tahun 2024	Perubahan RKPD TA. 2024	Target Tahun 2025
2	**BELANJA**						
2.1	**Belanja Operasi**						
2.1.1	Belanja pegawai	2,353,630,642,870	2,460,367,884,874	2,540,673,580,810	2,969,669,114,959	3,016,269,454,678	3,857,168,782,897
2.1.2	Belanja barang dan jasa	3,911,678,188,866	4,892,062,090,433	4,835,931,638,916	4,856,709,908,235	5,207,747,281,772	4,608,874,607,730
2.1.3	Belanja subsidi					33,283,565,696	80,912,203,294
2.1.4	Belanja hibah	506,066,200,592	327,011,169,427	404,050,361,625	442,862,699,069	443,147,476,763	339,132,299,486
2.1.5	Belanja bantuan sosial	58,944,000	-	78,223,729,100	28,262,400,000	9,004,400,000	7,562,400,000
	Jumlah Belanja Operasi	**6,771,433,976,328**	**7,679,441,144,734**	**7,858,879,310,451**	**8,297,504,122,263**	**8,709,452,178,909**	**8,893,650,293,407**
2.2	**Belanja Modal**						
2.2.1	Belanja tanah	171,876,414,740	181,872,132,600	90,286,694,348	394,207,182,390	258,132,525,094	125,523,042,657
2.2.2	Belanja peralatan dan mesin	163,131,234,366	406,539,524,326	285,845,343,961	390,350,817,090	236,096,009,718	318,689,514,074
2.2.3	Belanja gedung dan bangunan	345,118,654,570	344,055,978,498	365,424,112,763	613,657,726,699	745,753,086,703	678,105,805,554
2.2.4	Belanja jalan irigasi dan jaringan	329,418,247,818	827,064,729,888	921,720,212,895	1,261,528,774,335	1,324,289,135,899	1,365,205,383,482
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	6,791,951,896	4,222,263,480	8,619,452,218	9,590,367,017	1,377,566,401	7,849,286,210
2.2.6	Belanja aset lainnya	0	2,275,837,736	0	0	6,445,531,298	144,300,000
	Jumlah Belanja Modal	**1,016,336,503,390**	**1,766,030,466,528**	**1,671,895,816,185**	**2,669,334,867,531**	**2,572,093,855,113**	**2,495,517,331,977**
2.3	**Belanja Tidak Terduga**						
2.3.1	Belanja tidak terduga	28,251,407,155	1,702,578,492	12,815,776,299	17,000,000,000	5,000,000,000	17,000,000,000
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	**28,251,407,155**	**1,702,578,492**	**12,815,776,299**	**17,000,000,000**	**5,000,000,000**	**17,000,000,000**
2.4	**Belanja Transfer**						
2.4.1	Belanja bagi hasil	3,055,434,672	1,062,588,930	-	-	-	
2.4.2	Belanja bantuan keuangan	0	-	-	500,000,000	500,000,000	20,500,000,000
	Jumlah Transfer	**3,055,434,672**	**1,062,588,930**	**-**	**500,000,000**	**500,000,000**	**20,500,000,000**
	JUMLAH BELANJA	**7,819,077,321,545**	**9,448,236,778,684**	**9,543,590,902,935**	**10,984,338,989,794**	**11,287,046,034,022**	**11,426,667,625,384**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan,diolah tahun 2024

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 diperoleh dari SILPA Tahun 2023 berdasarkan hasil audit laporan realisasi anggaran tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan diarahkan untuk penempatan modal / penyertaan modal bagi badan usaha milik negara / daerah dan / atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Sisa penyertaan modal Pemerintah Kota Surabaya kepada BUMD sesuai dengan pencapaian tujuan pembangunan di tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp9.929.481.387,- yang akan dialokasikan pada penyertaan modal Perusahaan Daerah Pasar Surya.

Gambaran pembiayaan riil daerah selama 5 tahun terakhir (2021 – 2025) terlihat seperti yang terdapat pada Tabel III.10

Tabel III.10
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021 s.d Tahun 2025

Uraian	Realisasi			Target		Proyeksi
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	APBD Tahun 2024	Perubahan RKPD Tahun 2024	Tahun 2025
Penerimaan Daerah						
Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA)	824.424.505.647	824.424.505.647	156.690.767.646	223.954.003.318	207.879.629.117	224.636.639.762
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**824.424.505.647**	**824.424.505.647**	**156.690.767.646**	**223.954.003.318**	**207.879.629.117**	**224.636.639.762**
Pengeluaran Daerah						
Penyertaan modal	0	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	9.929.481.387	10.000.000.000
Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**9.929.481.387**	**10.000.000.000**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2024

3.2.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah

Dalam rangka mewujudkan pencapaian pembangunan daerah, pemerintah daerah telah menyusun program-program perencanaan, baik perencanaan pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek. Namun demikian, jika dilihat dari sisi fiskal daerah, kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya masih cukup rentan. Mengingat besarnya rencana program pembangunan Pemerintah Kota Surabaya baik infrastruktur maupun non infrastruktur maka anggaran belanja yang dikeluarkan selalu meningkat setiap tahunnya dan lebih besar dibanding dengan pendapatan yang diterima. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat bergantung sepenuhnya terhadap APBD yang tersedia sehingga mengharuskan pemerintah Kota Surabaya untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah dari sumber lainnya.

Alternatif-alternatif kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya adalah sebagai berikut: (1) *fiscal engineering* yaitu pembiayaan pembangunan yang diarahkan untuk mampu membangun kemandirian fiskal dengan konsep *expenditure reform* melalui perubahan tata kelola menjadi Badan Layanan Umum Daerah pada Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan *cost recovery*. (2) *Creative Financing* yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan dengan mengoptimalkan peran sektor swasta dalam melalui beberapa skema yakni skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*) maupun melalui sinergi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya, antara lain yakni:

1. Kemitraan Pembiayaan Daerah antara Pemerintah dan swasta, melalui
    a. Peningkatan kerjasama swasta dan pemerintah melalui kerjasama pemerintah swasta (KPS) / *Public Private Partnership* (PPP). Bentuk kerjasama PKS dapat dilakukan dengan berbagai skema kerjasama seperti *Build Operate and Transfer* (BOT), *Build Transfer Operate* (BTO) maupun bentuk lainnya.

b. Optimalisasi partisipasi dunia usaha sebagai bagian dari pemangku kepentingan (stakeholder) untuk berperan dan terlibat aktif dalam program pembangunan melalui Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pembiayaan pembangunan di Kota Surabaya melalui CSR dipandang potensial untuk dikembangkan oleh pemerintah daerah Kota Surabaya. Potensi tersebut didukung oleh tingginya peran sektor industri pegolahan, dimana sektor industri pengolahan merupakan sektor kedua dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya sehingga telah dibentuk Forum CSR Kota Surabaya sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Selain CSR, pendekatan melalu *Creating Shared Value* (CSV) Perusahaan juga dilakukan sejak tahun 2024, yang menekankan pada penambahan nilai atas dampak sosial yang diberikan oleh Perusahaan.

2. Pengembangan kerjasama antar lembaga atau pemerintah daerah lainnya tersebut meliputi kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan. Kerjasama antara daerah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi maupun efektivitas guna mendorong pembangunan suatu daerah.
3. Kerjasama kemitraan dengan lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi maupun ilmu pengetahuan guna menunjang pembangunan daerah.
4. Pengembangan kerjasama melalui pinjaman maupun hibah luar negeri yang digunakan pada bidang-bidang strategis utamanya untuk pembangunan infrastruktur publik yang mempunyai daya ungkit kepada perekonomian daerah.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dokumen Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, berpedoman pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, RKP Tahun 2024 serta mendukung pencapaian visi dan misi Presiden-Wakil Presiden dan program strategis Nasional.

RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut mengacu pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian, Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih ***"Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan".*** Visi tersebut diwujudkan melalui misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan, baik oleh penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat, sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi

lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional

2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya
3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan
4. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
5. Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya pencapaiannya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam tabel IV.1

Tabel IV.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan						
Misi	**Tujuan**	**Indikator**	**Target**	**Sasaran**	**Indikator**	**Target**
Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung nasional dan internasional	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,1% **5,6 – 6,1%***	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	4,01% **5,49%***
		Indeks Gini	0,319 **0,319-0,388***		Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan	3,96%
					Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum	5,37% **7,9%***
					Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak	5,26%
					Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	24,90%
	Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,5%	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	6,30% **7,67%***
		Persentase Penduduk Miskin	4,01%		Persentase tenaga kerja yang terserap	22,01% **22,67%***
					Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,81 **0,7***
Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya	Indeks Pembangunan Manusia	83,50	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Indeks Pendidikan	79,33
					Angka Harapan Hidup	74,53 **75,97***
					Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk	2,22% **1,46%***
					Skor Pola Pangan Harapan	95,20
				Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	93,75 **95,76***
	Pembentukan karakter masyarakat	Indeks Harmoni Sosial	82,13	Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis	Indeks Budaya Lokal	89,70 **90***

Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan						
Misi	**Tujuan**	**Indikator**	**Target**	**Sasaran**	**Indikator**	**Target**
				pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	64,94
					Indeks Kepedulian Sosial	89,30
			83*			**97,96***
Misi 3 : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan	Terpenuhinya penataan kota yang terintegrasi didukung infrastruktur berkualitas untuk mendorong konektivitas sosial dan ekonomi masyarakat	Indeks Infrastruktur Kota	0,734	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	0,820
					Indeks Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,625
						0,78*
					Indeks Penyelenggaraan Transportasi	0,728
			0,78*			**0,743***
	Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, nyaman dan indah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	68,75	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	56,09
						57,58*
					Indeks Kualitas Udara	90,34
					Indeks Kualitas Lahan	42,72
					Indeks Persampahan	78,13
			71,04*			**83,8***
Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	84,21	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	84,02
					Opini BPK	WTP
					Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,3 (Baik)
						4,49*
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Nilai Kepuasan Masyarakat	90,16%
			97*			**95,90%***
Misi 5 : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,87	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,88
						0,94*
				Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat	Indeks Penanggulangan Bencana	0,864
			0,935*			**0,92***

Keterangan : *) penyesuaian target pada Perubahan RKPD 2024 dengan berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi Tahun 2023

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Dokumen Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Surabaya tahun 2005-2025, RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, strategi dan penelaahan terhadap RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, RKP Tahun 2024 dan Program Strategis Nasional serta strategi dan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur.

4.2.1 Isu Strategis

Isu strategis pembangunan Kota Surabaya selaras dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Isu strategis Kota Surabaya yang telah tercantum dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing dan Bermartabat;
2. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui melalui Pengembangan Ekonomi Inklusif;
3. Pengembangan infrastruktur Hijau dan Sistim Transportasi Perkotaan Terpadu (*Integrated Transportation System)*;
4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;
5. Mewujudkan Harmoni Sosial, Keamanan dan Ketentraman Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat.

Indeks Reformasi Birokrasi Kota Surabaya tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 yaitu dari A dengan nilai 80,14 pada tahun 2022 menjadi A dengan nilai 95,12 di tahun 2023. Namun, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 (Surat dari KemenPAN RB Nomor B/304/RB.06/2024), hasil evaluasi tahun 2023 “tidak diperbandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penialian yang signifikan.

Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024, memperhatikan strategi dan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Visi pembangunan ***"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong",*** dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

Gambar IV.1
Visi, Misi, Arahan dan Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024

Sumber : Lampiran 1 Perpres 18 Tahun 2020

Sembilan Nawacita Misi Presiden terdiri atas:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai strategi pelaksanaan Sembilan Nawacita, Presiden memberikan 5 (lima) arahan, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur
   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi
   Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja.
4. Penyederhanaan Birokrasi
   Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi
   Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Visi misi pembangunan, selanjutnya diterjemahkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, sebagai berikut:

1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 yang ingin dicapai antara lain:

1) Tingkat Kemiskinan 6,0-7,0%
2) Tingkat Pengangguran Terbuka 3,6-4,3 %
3) Rasio Gini 0,360-0,374
4) Indeks Pembangunan Manusia 75,54
5) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,3 %
6) Pertumbuhan investasi 6,6-7,0%
7) Tingkat Inflasi 2,7%
8) Rasio Pajak 10,7-12,3 %PDB
9) Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas 6,6-7,0%
10) Pertumbuhan Ekspor Non Migas 7,4%
11) Share Industri Pengolahan 21%
12) Defisit Transaksi Berjalan 1,7% ODB

Tema yang diusung dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah ***"Mempercepat Tranformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan"*.** Pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapain:

a. Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5%;
b. Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, yang didukung dengan program *Universal Health Coverage* yang telah dicapai Kota Surabaya sejak tahun 2022 yang dianggarkan melalui Dinas Kesehatan

2. Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 14%;
   b. Insidensi tuberkulosis: 297 per 100.000 penduduk;
   c. Jumlah kabupaten/kota dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria: 95 kabupaten/kota;
   d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 514 kabupaten/kota;
   e. Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca: 396 b) Matematika: 388 (c) Sains 402.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

   - MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional yang dilakukan melalui pencegahan penyakit menular dan tidak menular, promosi kesehatan serta penguatan surveiilance yang dianggarkan melalui Dinas Kesehatan
   - MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0) melalui penyediaan pendidikan non formal kesetaraan, BOS dan BOPDA Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dianggarkan pada Dinas Pendidikan;
   - MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting melalui intervensi terpadu terhadap Balita Stunting, pencegahan terhadap Ibu hamil KEK, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang dianggarkan pada Dinas Kesehatan.

3. Arah Kebijakan Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4%- 5,8% per target RPJMN 8,1%;
   b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,9%- 20,5% per Target RPJMN 21,0%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter yang didukung melalui kemudahan akses perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta pengawasan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- MP Pengelolaan Terpadu UMKM yang didukung melalui fasilitasi dalam memperolah Nomor Induk Berusaha, akses permodalan dan pemasaran pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
- MP Destinasi Pariwisata Prioritas yang didukung melalui pengembangan kawasan wisata pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
- MP Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan), di Kota Surabaya belum terdapat *food estate* dukungan diberikan melalui upaya ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- MP Transformasi Digital yang didukung dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik utamanya penguatan pada pelayanan berbasis elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

4. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%-7%;
   b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38–13,08 miliar.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   - MP Pengelolaan Terpadu UMKM yang didukung melalui fasilitasi dalam memperolah Nomor Induk Berusaha, akses permodalan dan pemasaran pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
5. Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27,27%;
   b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 19,5%

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   - MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 yang didukung melalui perizinan limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup;

- MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi. Belum terdapat program khusus dalam dukungan energi terbarukan, namun penurunan emisi GRK dilakukan melalui upaya peningkatan kualitas air, kualitas udara dan kualitas tanah pada Dinas Lingkungan Hidup.

6. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupatenkota: 95%/74%/64%;
   b. Persentase Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76% akses layak dan 15% akses aman;
   c. Persentase Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53%;
   d. Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86 % akses layak termasuk 12 % akses aman;
   e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 12 lokasi;
   f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.400 kwh/kapita.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   - MP Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah);
   - MP Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90 Persen Rumah Tangga);
   - MP Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu. Kewenangan terhadap pengelolaan Pelabuhan utama terpadu tidak pada lingkup Pemerintah Daerah setingkat Kabupaten/Kota.
7. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   - MP Ibu Kota Nusantara;
   - MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.
8. Arah kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian:

a. Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553 satker.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- Didukung oleh proyek-proyek prioritas.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024 sebagai pelaksanaan kerangka tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Tujuh Prioritas Nasional RKP Tahun 2024, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sasaran pembangunan RKP Tahun 2024 yang ingin dicapai antara lain:

1) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3%-5,7%
2) Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5%-7,5%
3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,0%-5,7%
4) Rasio Gini sebesar 0,374-0,377
5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,99-74,02
6) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 27,27%

Serta indikator lainnya yaitu:

1) Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 107-110
2) Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 105-108

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 memperhatikan strategi dan arah kebijakan Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2024.

Visi Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

"Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong"

Misi Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Sedangkan Misi Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 sebagai penjabaran dari Visi pembangunan adalah:

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Strategi Pembangunan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Guna mendukung pencapaian keempat Misi di atas, maka dilakukan melalui serangkaian Strategi Pembangunan sebagai berikut:

1. **Penegasan Nilai-nilai Luhur Budaya dan Keagamaan sebagai Perspektif dan Spirit dalam Pembangunan;**
2. **Pembangunan berkelanjutan yang inklusif bertujuan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, penyiapan Jawa Timur untuk menghadapi disrupsi ekonomi maupun ketidakpastian masa depan (*uncertain future*);**
3. **Pemenuhan hak dan ruang kepada perempuan (Pengarusutamaan Gender), perlindungan anak dan kelompok rentan dalam berpartisipasi pada proses pembangunan (*Right Based Development);***
4. **Memperluas akses dan kesempatan kepada warga untuk memperoleh apa yang dianggap bermakna bagi dirinya (*Development as Freedom*);**
5. **Pembangunan berbasis kawasan yang sensitif terhadap potensi serta problem khas wilayah untuk memastikan setiap wilayah dengan konteks persoalan yang berbeda-beda dapat tumbuh kembang bersama; dan**
6. **Percepatan Pembangunan melalui Inovasi di Segala Bidang Berbasis *Information Communication Technology (ICT).***

Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Mengacu pada Visi, Misi, dan Strategi Pembangunan di atas, maka Arah Kebijakan Pembangunan Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagaimana disajikan dalam ilustrasi milestone di bawah ini :

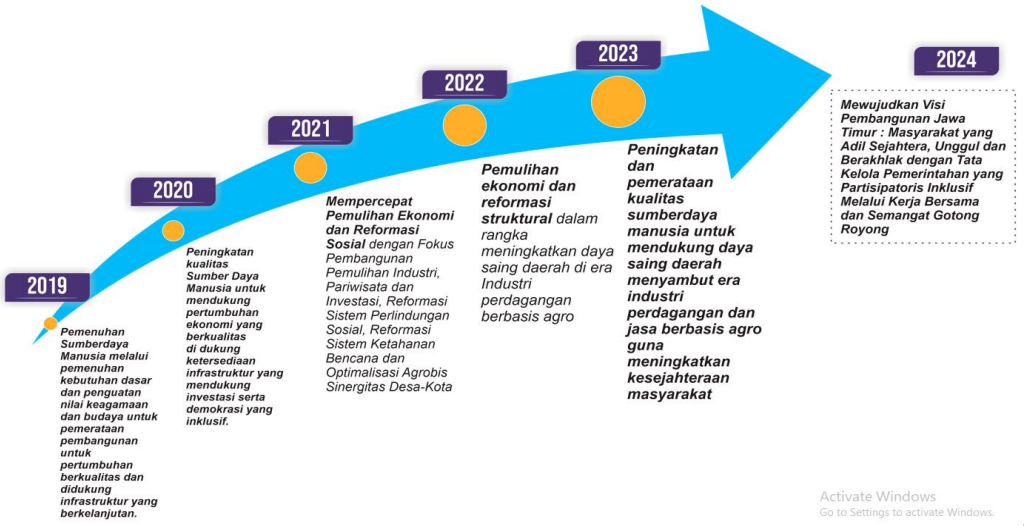

Gambar IV.2 Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 diarahkan sesuai dengan tema pembangunan dalam dokumen RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yakni

"***Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak***".

Tema dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, dijabarkan pada prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata;
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrstruktur;
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5. Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi;
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayananan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.

4.2.2 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah, Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Berdasarkan tema RKP Tahun 2024 adalah "***Mempercepat Tranformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan***", tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 "***Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Insklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak***", serta saran masukan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Surabaya Tahun 2023 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024 yang dilaksanakan pada 15 Maret 2023, maka Tema Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2024 yaitu "***Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dengan Dukungan Kualitas Tata Kota, Sistem Transportasi Terpadu dan Berkelanjuta*****n** ***serta Peningkatan Sumber Daya Manusia***". Penetapan prioritas pembangunan daerah tahun 2024, telah diselaraskan dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021-2026 yakni “Peningkatan kualitas tata kota dan sistem transportasi terpadu pendukung sektor utama yang sinergi dengan kebijakan nasional dan daerah sekitar”, mendukung prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2024, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

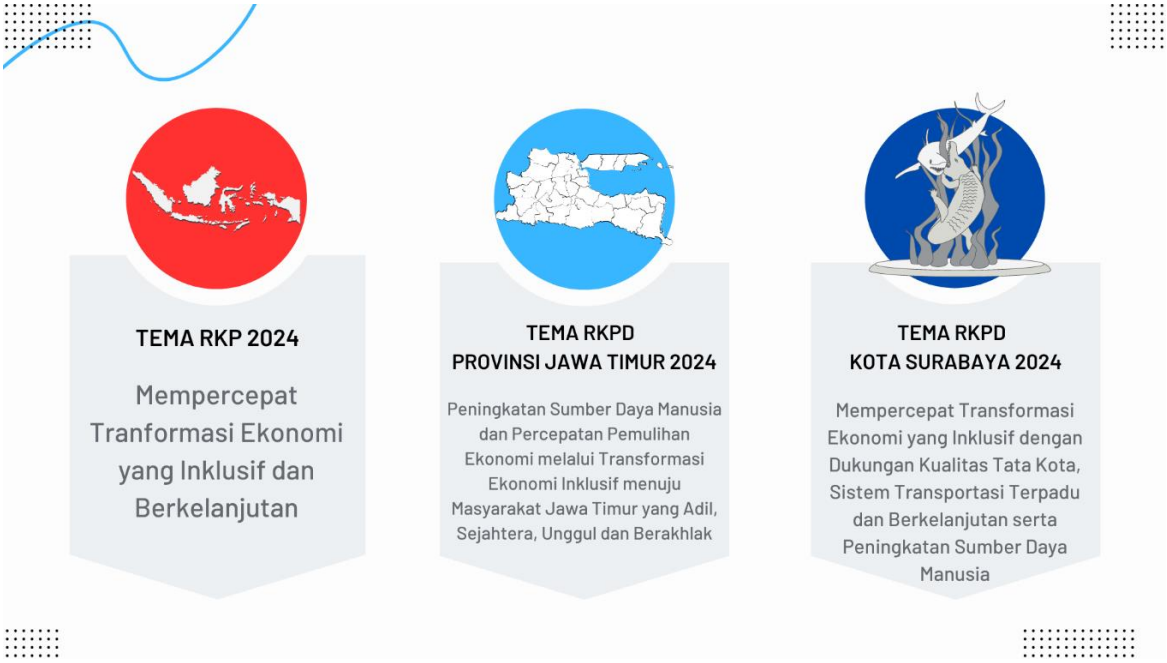

Adapun prioritas pembangunan Kota Surabaya Tahun 2024 sebagai berikut :

1. **Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya**

   Pandemi Covid-19 dampak yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Dengan diberlakukannya pembatasan pergerakan manusia di masa puncak Pandemi Covid-19 menimbulkan efek negatif bagi berbagai sektor dunia usaha yang berakibat terganggunya kondisi perekonomian masyarakat. Kendati Presiden Joko Widodo telah mencabut status pandemi Covid-19, namun pemulihan perekonomian masyarakat masih membutuhkan dukungan dan stimulasi-stimulasi dari pemerintah. Kebijakan serta inovasi yang akan dilakukan untuk mendukung prioritas tersebut adalah :

   1) Revitalisasi pasar rakyat / pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya;
   2) Fasilitasi pemasaran produk berbasis digital (*e-peken*) bagi pelaku usaha mikro termasuk usaha toko kelontong dan sentra wisata kuliner;

3) Pelatihan, pembinaan dan pendampingan pedagang di sentra wisata kuliner dan pasar rakyat;
4) Fasilitasi pemasaran produk pelaku usaha mikro di Surabaya Kriya Gallery dan turut hadir disetiap festival dan parade;
5) Meningkatkan keterlibatan pelaku usaha mikro dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pada *e-purchasing* di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
6) Sinkronisasi kegiatan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja sesuai dengan ketersediaan peluang kerja dan kebutuhan perusahaan-perusahaan;
7) Optimalisasi pemanfaatan tanah dan bangunan aset milik Pemerintah Kota untuk kegiatan ekonomi masyarakat;
8) Bimbingan teknis untuk pemberdayaan masyarakat pada kegiatan ekonomi masyarakat;
9) Penataan, *branding* dan promosi kawasan wisata untuk menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di Kota Surabaya;
10) Penguatan kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha di bidang pariwisata;
11) Pelaksanaan festival dan parade sebagai ajang promosi wisata.

2. Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu

Kebijakan serta inovasi yang akan dilakukan untuk mendukung prioritas tersebut, yaitu :

1) Optimalisasi penataan ruang melalui perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
2) Pengembangan sistem transportasi umum yang aman, nyaman, handal dan terjangkau;
3) Optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau yang sudah dikuasai Pemerintah Kota Surabaya;
4) Pemenuhan kebutuhan lahan bagi pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur untuk kepentingan umum;
5) Optimalisasi dan peningkatan kuantitas pemasangan penerangan jalan umum;
6) Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan serta konektivitas antar wilayah;
7) Peningkatan sarana dan prasarana drainase kota yang terpadu;

Sebagai dukungan terhadap Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo – Lamongan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, telah disusun program yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai berikut :

a) Program Penyelenggaraan Jalan pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga untuk mendukung proyek pembangunan jalan baru *radial road* di kawasan raya lontar sehingga dapat mengurangi kemacetan;
b) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pengelolaan Perkeretaapian pada Dinas Perhubungan untuk mendukung Transportasi Publik di Gerbangkertosusila;
c) Program Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan untuk mendukung program Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya MBR di Kota Surabaya.

3. Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar

Kebijakan serta inovasi untuk mendukung prioritas tersebut, yaitu :

1) Peningkatan jangkauan akses layanan pendidikan khususnya untuk keluarga miskin melalui pemberian beasiswa bantuan biaya pendidikan, tebus ijazah, pemberian seragam, sepatu serta biaya penunjang pendidikan lainnya;
2) Pemerataan kualitas pendidikan secara berkelanjutan yang dilakukan dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan sarana prasarana pendukung serta pengembangan inovasi bidang Pendidikan, seperti: Sekolahe Arek Suroboyo, Surabaya Mengajar, Sinau dan Ngaji Bareng, serta program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan;
3) Pengembangan Kota Surabaya sebagai barometer nasional PAUD Holistik Integratif;

4) Peningkatan jangkauan akses layanan kesehatan melalui pembangunan Rumah Sakit Baru dengan unggulan ibu dan anak;
5) Percepatan vaksinasi booster untuk memutuskan mata rantai penyebaran pandemi Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan;
6) Pengembangan 9 (sembilan) tatanan Kota Sehat Surabaya serta penguatan Sistem Kesehatan Kota dengan penguatan kolaborasi pemerintah dan masyarakat melalui Kader Surabaya Hebat guna melakukan deteksi dini atas permasalahan kesehatan di masyarakat serta melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk melakukan pendampingan dan penanganan pada Ibu Hamil Resiko Tinggi (Risti) dan Balita *Stunting*;
7) Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempermudah akses layanan kesehatan masyarakat baik di tingkat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut;
8) Pencegahan, pengendalian, dan penanganan Penyakit Menular serta Penyakit Tidak Menular melalui peningkatan upaya promosi kesehatan, surveilans kesehatan, deteksi dini resiko penyakit tidak menular dan pemberian imunisasi dasar lengkap;
9) Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem melalui berbagai inovasi intervensi dan sinergitas antar pemangku kepentingan;
10) Pengembangan Kota Surabaya sebagai Kota Layak Anak Nasional dan Kota Layak Anak Dunia dengan mengutamakan pemenuhan hak anak serta peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan;
11) Pengembangan inovasi di bidang Pendidikan kesetaraan, antara lain: pengembangan sanggar kegiatan belajar bagi anak tidak mampu yang putus sekolah, program kejar paket C plus yang merupakan program kejar paket C dengan sertifikat uji kompetensi kursus dan pelatihan sehingga lulus dapat langsung mendapatkan pekerjaan, gerakan literasi finansial, pelatihan robotika, pembentukan forum komunikasi tutor pengajar pendidikan kesetaraan paket A B dan C, serta pembuatan bank soal standar asesmen kompetensi minimum untuk pendidikan kesetaraan sehingga kelulusan peserta didik kesetaraan terstandarisasi;

12) Rehabilitasi sosial dan pemberian bantuan alat disabilitas bagi penyandang disabilitas sebagai upaya untuk melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-haknya.

4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal

Kebijakan serta inovasi untuk mendukung prioritas tersebut, yaitu :

1) Penataan dan pengembangan kawasan dan bangunan cagar budaya;
2) Pelaksanaan festival dan parade dengan tema kebudayaan;
3) Pemberdayaan seniman dan budayawan;
4) Pengembangan dan akreditasi museum;
5) Penanaman nilai moral kebangsaan dan toleransi dengan falsafah Bhinneka Tunggal Ika kepada pemuda melalui sekolah kebangsaan serta festival dan parade dengan tema sejarah dan kebangsaan;
6) Pengembangan iklim industri ekonomi kreatif dengan menyediakan ruang / sarana prasarana rumah kreatif serta kegiatan pelatihan dan tampilan hasil karya ekonomi kreatif.

5. Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah

Kebijakan serta inovasi untuk mendukung prioritas tersebut, yaitu :

1) Penerapan *urban farming* di masyakat dengan memanfaatkan lahan perkarangan menjadi lahan produktif budidaya pertanian perkotaan;
2) Penerapan diversifikasi pangan di masyarakat untuk menunjang pemenuhan gizi;
3) Pemanfaatan lahan aset pemerintah kota menjadi lahan produktif budidaya pertanian, peternakan dan perikanan;
4) Pelaksanaan monitoring ketersedian dan harga bahan pangan segar;
5) Penguatan kerjasama dengan daerah penghasil pangan untuk memastikan kelancaran distribusi pangan di Kota Surabaya;
6) Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar di Kota Surabaya.

6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana

Kebijakan serta inovasi untuk mendukung prioritas tersebut, yaitu :

1) Peningkatan kualitas sarana pengolahan air limbah rumah tangga;

2) Peningkatan pemanfataan fasilitas pengelolaan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
3) Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan layak huni;
4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hemat energi dan penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan;
5) Peningkatan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana alam/ bencana non alam.
6) Sampah 3R;
7) Peningkatan penyediaan RTH publik;
8) Revitalisasi sempadan sungai di Kota Surabaya;
9) Sosialisasi pengelolaan air limbah dan sampah terhadap masyarakat dan kegiatan usaha;
10) Peningkatan pemantauan dan pengawasan pada stasiun pemantauan sebagai pemberi informasi kualitas udara di Kota Surabaya;
11) Sosialisasi program kampung iklim untuk memberikan pengetahuan penghematan energi dan EBT;
12) Pelaksanaan *Car Free Day* sebagai upaya mengurangi tingkat polusi udara di Kota Surabaya;
13) Pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor secara rutin dan berkala.

7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik

Kebijakan serta inovasi untuk mendukung prioritas tersebut, yaitu :

1) Pemantapan pelayanan publik berbasis digital;
2) Peningkatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
3) Peningkatan sinergitas antar pemangku kepentingan dan penguatan partisipasi masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
4) Peningkatan kualitas pelayanan utamanya pada perkantoran yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat;
5) Pencegahan terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme melalui penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan.

Tabel IV.2
Keterkaitan Isu Strategis Kota Surabaya dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur

RKP 2024	RKPD PROV JATIM 2024	ISU STRATEGIS	RKPD KOTA SURABAYA 2024
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui melalui pengembangan ekonomi inklusif	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Pengembangan infrastruktur hijau dan sistim transportasi perkotaan terpadu (integrated transportation system)	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dan bermartabat	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Mewujudkan harmoni sosial, keamanan dan ketentraman wilayah serta pencegahan dan mitigasi bencana berbasis masyarakat	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui melalui pengembangan ekonomi inklusif.	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Mewujudkan harmoni sosial, keamanan dan ketentraman wilayah serta pencegahan dan mitigasi bencana berbasis masyarakat	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat Jawa Timur	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintah, reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik

Tabel IV.3
Keselarasan Indikator Makro Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2024

No	Indikator Makro	Target Perubahan RKPD Provinsi Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024	Keterangan
SASARAN PEMBANGUNAN				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,71% – 6,34%	6,1% **5,6 – 6,1%****	Terdapat perubahan target P-RKPD 2024
2	Persentase Penduduk Miskin	10,56% – 9,75%	4,01%	Tidak terdapat perubahan target P-RKPD 2024
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,40% – 3,81%	4,5%	Tidak terdapat perubahan target P-RKPD 2024
4	Indeks Pembangunan Manusia	72,85 – 74,07 **74,66 – 75,88***	83,50 **84,2****	Terdapat perubahan target P-RKPD 2024
5	Indeks Gini	0,3670 – 0,3665	0,319 **0,319 – 0,388****	Terdapat perubahan target P-RKPD 2024

Keterangan :
1. *) Rankhir Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
2. **) penyesuaian target pada Perubahan RKPD 2024 dengan berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi Tahun 2023

Arahan pengembangan wilayah untuk Kota Surabaya tahun 2024 mempedomani RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2024, yaitu:

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, informasi dan komunikasi, real estate, jasa kesehatan dan kegiatan sosial);
2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor pengadaan listrik dan gas, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan) menjadi Sektor Unggulan;
3. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (Industri dan pergudangan) dengan pusat distribusi (terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, jalan tol);
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional;

5. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan;
6. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik, Open Defication Free (ODF) dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak;
7. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian zona rawan bencana banjir;
8. Peningkatan Kerjasama antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan;
9. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender;
10. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
11. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan industri di Kota Surabaya;
12. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024;
13. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah;
14. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat serta penguatan analisis dan pengembangan inovasi pada lokasi-lokasi prioritas.

4.2.3 Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2024 yang Mendukung Prioritas Pembangunan

Dalam menjalankan program Kota Surabaya melalui serangkaian kegiatan dan sub kegiatan telah seiring dengan pemenuhan atau dukungan terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Jawa Timur dan Prioritas Kota Surabaya. Penyusunan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 telah sesuai dengan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah sebagaimana tindaklanjut Radiogram Ditjen Bangda Kemendagri tanggal 19 Juni 2023 No. 600.2.1/7230/Bangda tentang Diseminasi Permendagri tentang RKPD Tahun 2024.

Tabel IV.4
Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2024 yang Mendukung Prioritas Pembangunan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Membangun lingkungan hidup,	Peningkatan ketahanan bencana dan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	kualitas lingkungan hidup	dan penguatan sistem ketahanan bencana		terhadap Bencana	Kesiapsiagaan		
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
bencana dan perubahan iklim	hidup	bencana					
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
ketahanan bencana dan perubahan iklim	lingkungan hidup	sistem ketahanan bencana	KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
bencana dan perubahan iklim	hidup	bencana	LINGKUNGAN HIDUP		Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
bencana dan perubahan iklim	hidup	bencana					
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
perubahan iklim			BERACUN (LIMBAH B3)		Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
iklim			MASYARAKAT	Kabupaten/Kota			
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Membangun	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah	Dinas Lingkungan	Dinas Lingkungan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Hidup	Hidup
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Pengelolaan	Penjaminan	Dinas Ketahanan	Dinas Ketahanan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pangan dan Pertanian	Pangan dan Pertanian
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyediaan dan	Pemberian Fasilitas	Dinas Ketahanan	Dinas Ketahanan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pangan dan Pertanian	Pangan dan Pertanian
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Memperkuat infrastruktur untuk	Peningkatan kemandirian pangan dan	Peningkatan ketahanan pangan dan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	pengelolaan sumber daya energi	pengendalian inflasi daerah	PRASARANA PERTANIAN		Pertanian Lainnya		
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembanga	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
n ekonomi dan pelayanan dasar	energi				Desa		
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk	Pemulihan ekonomi kerakyatan	Peningkatan produktivitas ekonomi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	TENAGA KERJA		Perusahaan Kecil		
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkeadilan	sekunder dan pariwisata	mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya					
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Memperkuat	Pemulihan	Peningkatan	PROGRAM	Pengesahan	Pengesahan	Dinas Perindustrian	Dinas

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	HUBUNGAN INDUSTRIAL	Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	dan Tenaga Kerja	Perindustrian dan Tenaga Kerja
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berkeadilan	nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya		Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkeadilan	sekunder dan pariwisata	mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya					
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
yang berkualitas dan berkeadilan	peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya		Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Terpadu Satu Pintu
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pariwisata	kawasan wisata, dan padat karya					
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Memperkuat ketahanan	Pemulihan ekonomi	Peningkatan produktivitas	PROGRAM PEMASARAN	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan	Dinas Kebudayaan,

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PARIWISATA	Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Olah Raga serta Pariwisata	Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berkeadilan	sektor sekunder dan pariwisata	pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya					
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri,	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
yang berkualitas dan berkeadilan	peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya		dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Asemrowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balas Klumprik
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balongsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bangkingan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Banyu Urip
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Benowo
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Peningkatan	Pelayanan dan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bulak

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelayanan BLUD	Penunjang Pelayanan BLUD		Banteng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dr. Soetomo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dukuh Kupang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dupak

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur		KABUPATEN/KOTA				
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gading
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gayungan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gundih

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gunung Anyar
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jagir
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jemursari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jeruk

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalijudan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalirungkut
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kebonsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedungdoro
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedurus
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kenjeran
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Peningkatan	Pelayanan dan	Dinas Kesehatan	Puskesmas

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelayanan BLUD	Penunjang Pelayanan BLUD		Keputih
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ketabang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Klampis Ngasem
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Krembangan Selatan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur		KABUPATEN/KOTA				
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lidah Kulon
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lontar
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Made

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Manukan Kulon
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Medokan Ayu
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Menur
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Moro Krembangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mulyorejo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ngagel Rejo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pacar Keling
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pakis
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pegirian
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Peningkatan	Pelayanan dan	Dinas Kesehatan	Puskesmas

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelayanan BLUD	Penunjang Pelayanan BLUD		Peneleh
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Perak Timur
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pucangsewu
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Putat Jaya

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur		KABUPATEN/KOTA				
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Rangkah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawahan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawah Pulo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sememi
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidosermo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo Wetan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simolawang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simomulyo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Siwalankerto

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambakrejo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambak Wedi
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanah Kali Kedinding
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Peningkatan	Pelayanan dan	Dinas Kesehatan	Puskesmas

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelayanan BLUD	Penunjang Pelayanan BLUD		Tanjungsari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tembok Dukuh
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tenggilis
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wiyung

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pelayanan publik	kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur		KABUPATEN/KOTA				
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokromo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokusumo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
Memperkuat stabilitas Polhukhankam	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum,	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan transformasi pelayanan publik	umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dan kualitas pelayanan publik	DAN KETERTIBAN UMUM	Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik			Peristiwa Penting		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PENUNJANG	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lainnya		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik		Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	berbasis risiko		Terpadu Satu Pintu
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PENGELOLAAN	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	ARSIP	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota		Kearsipan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik		untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Golongan B dan C		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur			Kewenangan Kabupaten/Kota			
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PENUNJANG	Administrasi Keuangan dan	Penyediaan Dana Penunjang	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik			Sosial		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	KESEJAHTERAAN RAKYAT				
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik	DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Pelaksanaan Reses	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM DUKUNGAN	Fasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Pelaksanaan Tugas DPRD		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik	DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kebijakan Retribusi Daerah		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PENGELOLAAN	Koordinasi dan Pengelolaan	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	KEUANGAN DAERAH	Perbendaharaan Daerah	Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Penagihan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik			Pengadaan ASN	Manusia	Manusia
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Data Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM KEPEGAWAIAN	Penilaian dan Evaluasi Kinerja	Evaluasi Hasil Penilaian dan	Badan Kepegawaian dan	Badan Kepegawaian dan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	DAERAH	Aparatur	Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Sumber Daya Manusia
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik		Manajerial dan Fungsional	Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Manusia	Manusia
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Inspektorat

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat	Inspektorat
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat	Inspektorat
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat	Inspektorat
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Penyelenggaraan Pengawasan dengan	Penanganan Penyelesaian	Inspektorat	Inspektorat

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PENGAWASAN	Tujuan Tertentu	Kerugian Negara/Daerah		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	Inspektorat
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat	Inspektorat
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat	Inspektorat

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Inspektorat
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat	Inspektorat
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat	Inspektorat

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat	Inspektorat
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Benowo	Kec. Benowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik	DAERAH KABUPATEN/KOTA		Lainnya		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bulak	Kec. Bulak
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Genteng	Kec. Genteng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PENUNJANG	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Pakal	Kec. Pakal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik	DAERAH KABUPATEN/KOTA		Lainnya		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Semampir	Kec. Semampir
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tandes	Kec. Tandes
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PENUNJANG	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Benowo	Kec. Benowo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Bulak	Kec. Bulak
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik		Tingkat Kecamatan	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Genteng	Kec. Genteng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Koordinasi Penyelenggaraan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur				Terkait		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Pakal	Kec. Pakal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Semampir	Kec. Semampir
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik		Tingkat Kecamatan	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tandes	Kec. Tandes

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Koordinasi Penyelenggaraan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Benowo	Kec. Benowo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur			Kecamatan			
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bulak	Kec. Bulak
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Genteng	Kec. Genteng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Peningkatan Efektifitas	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pakal	Kec. Pakal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur			Kecamatan			
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Semampir	Kec. Semampir
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Kec. Tandes	Kec. Tandes

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Kec. Benowo	Kec. Benowo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dilimpahkan kepada Camat	Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Bulak	Kec. Bulak
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Genteng	Kec. Genteng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik			Non Usaha		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Pakal	Kec. Pakal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dilimpahkan kepada Camat	Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Semampir	Kec. Semampir
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Tandes	Kec. Tandes
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik			Non Usaha		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Benowo	Kec. Benowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Bulak	Kec. Bulak
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dilimpahkan kepada Camat	terkait dengan Nonperizinan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Genteng	Kec. Genteng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik					
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Pakal	Kec. Pakal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Semampir	Kec. Semampir
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dilimpahkan kepada Camat	terkait dengan Nonperizinan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Tandes	Kec. Tandes
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik			yang Dilimpahkan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Benowo	Kec. Benowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bulak	Kec. Bulak

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Genteng	Kec. Genteng
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dilimpahkan kepada Camat	Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Pakal	Kec. Pakal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik			yang Dilimpahkan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Semampir	Kec. Semampir

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dilimpahkan kepada Camat	Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tandes	Kec. Tandes
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Benowo	Kec. Benowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Kec. Bulak	Kec. Bulak

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik			Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Genteng	Kec. Genteng

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kegiatan Pemberdayaan	Peningkatan Partisipasi	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan	Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur				Kelurahan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Pakal	Kec. Pakal

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Kec. Semampir	Kec. Semampir

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik			Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Tandes	Kec. Tandes
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kegiatan Pemberdayaan	Peningkatan Partisipasi	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan	Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur				Kelurahan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Asemrowo	Kelurahan Asemrowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Asemrowo	Kelurahan Genting Kalianak
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Asemrowo	Kelurahan Tambak Sarioso

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Benowo	Kelurahan Kandangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Benowo	Kelurahan Romokalisari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Benowo	Kelurahan Sememi
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Benowo	Kelurahan Tambak Oso Wilangun

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik					
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Bubutan	Kelurahan Alun-Alun Contong
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Bubutan	Kelurahan Bubutan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Bubutan	Kelurahan Gundih

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Bubutan	Kelurahan Jepara
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Bubutan	Kelurahan Tembok Dukuh
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Bulak	Kelurahan Bulak
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kegiatan Pemberdayaan	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kec. Bulak	Kelurahan Kedung Cowek

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan	Kelurahan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Bulak	Kelurahan Kenjeran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Bulak	Kelurahan Sukolilo Baru
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Dukuh Pakis	Kelurahan Dukuh Kupang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Dukuh Pakis	Kelurahan Dukuh Pakis
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Dukuh Pakis	Kelurahan Gunungsari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Dukuh Pakis	Kelurahan Pradah Kalikendal

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gayungan	Kelurahan Dukuh Menanggal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gayungan	Kelurahan Gayungan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gayungan	Kelurahan Ketintang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gayungan	Kelurahan Menanggal

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik					
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Genteng	Kelurahan Embong Kaliasin
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Genteng	Kelurahan Genteng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Genteng	Kelurahan Kapasari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Genteng	Kelurahan Ketabang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Genteng	Kelurahan Peneleh
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gubeng	Kelurahan Airlangga
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kegiatan Pemberdayaan	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kec. Gubeng	Kelurahan Baratajaya

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan	Kelurahan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gubeng	Kelurahan Gubeng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gubeng	Kelurahan Kertajaya
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gubeng	Kelurahan Mojo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gubeng	Kelurahan Pucang Sewu
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gunung Anyar	Kelurahan Gunung Anyar
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gunung Anyar	Kelurahan Gunung Anyar Tambak

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gunung Anyar	Kelurahan Rungkut Menanggal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gunung Anyar	Kelurahan Rungkut Tengah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Jambangan	Kelurahan Karah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Jambangan	Kelurahan Jambangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik					
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Jambangan	Kelurahan Kebonsari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Jambangan	Kelurahan Pagesangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Karangpilang	Kelurahan Karang Pilang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Karangpilang	Kelurahan Kebraon
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Karangpilang	Kelurahan Kedurus
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Karangpilang	Kelurahan Waru Gunung
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kegiatan Pemberdayaan	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kec. Kenjeran	Kelurahan Sidotopo Wetan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan	Kelurahan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Kenjeran	Kelurahan Tanah Kali Kedinding
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Kenjeran	Kelurahan Bulak Banteng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Kenjeran	Kelurahan Tambak Wedi

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Krembangan	Kelurahan Kemayoran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Krembangan	Kelurahan Dupak
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Krembangan	Kelurahan Morokrembangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Krembangan	Kelurahan Krembangan Selatan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Krembangan	Kelurahan Perak Barat
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Lakarsantri	Kelurahan Bangkingan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Lakarsantri	Kelurahan Jeruk

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik					
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Lakarsantri	Kelurahan Lakarsantri
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Lakarsantri	Kelurahan Lidah Kulon
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Lakarsantri	Kelurahan Lidah Wetan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Lakarsantri	Kelurahan Sumurwelut
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Mulyorejo	Kelurahan Mulyorejo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Mulyorejo	Kelurahan Dukuh Sutorejo
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kegiatan Pemberdayaan	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kec. Mulyorejo	Kelurahan Kalisari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan	Kelurahan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Mulyorejo	Kelurahan Kejawan Putih Tambak
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Mulyorejo	Kelurahan Manyar Sambangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Mulyorejo	Kelurahan Kalijudan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Pabean Cantian	Kelurahan Bongkaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Pabean Cantian	Kelurahan Krembangan Utara
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Pabean Cantian	Kelurahan Nyamplungan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Pabean Cantian	Kelurahan Tanjung Perak
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Pakal	Kelurahan Babat Jerawat
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Pakal	Kelurahan Pakal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Pakal	Kelurahan Sumberejo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik					
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Pakal	Kelurahan Benowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Rungkut	Kelurahan Kalirungkut
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Rungkut	Kelurahan Rungkut Kidul

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Rungkut	Kelurahan Kedung Baruk
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Rungkut	Kelurahan Penjaringansari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Rungkut	Kelurahan Medokan Ayu
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kegiatan Pemberdayaan	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kec. Rungkut	Kelurahan Wonorejo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan	Kelurahan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sambikerep	Kelurahan Lontar
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sambikerep	Kelurahan Made
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sambikerep	Kelurahan Sambikerep

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sambikerep	Kelurahan Beringin
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sawahan	Kelurahan Pakis
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sawahan	Kelurahan Putat Jaya

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sawahan	Kelurahan Kupang Krajan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sawahan	Kelurahan Banyu Urip
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sawahan	Kelurahan Sawahan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sawahan	Kelurahan Petemon

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik					
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Semampir	Kelurahan Ujung
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Semampir	Kelurahan Sidotopo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Semampir	Kelurahan Pegirian

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Semampir	Kelurahan Wonokusumo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Semampir	Kelurahan Ampel
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Simokerto	Kelurahan Kapasan
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kegiatan Pemberdayaan	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kec. Simokerto	Kelurahan Sidodadi

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan	Kelurahan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Simokerto	Kelurahan Simolawang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Simokerto	Kelurahan Tambakrejo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Simokerto	Kelurahan Simokerto

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukolilo	Kelurahan Keputih
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukolilo	Kelurahan Klampis Ngasem
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukolilo	Kelurahan Medokan Semampir

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukolilo	Kelurahan Menur Pumpungan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukolilo	Kelurahan Nginden Jangkungan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukolilo	Kelurahan Semolowaru
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukolilo	Kelurahan Gebang Putih

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik					
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukomanunggal	Kelurahan Putat Gede
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukomanunggal	Kelurahan Simomulyo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukomanunggal	Kelurahan Simomulyo Baru

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukomanunggal	Kelurahan Sonokwijenan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukomanunggal	Kelurahan Sukomanunggal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukomanunggal	Kelurahan Tanjungsari
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kegiatan Pemberdayaan	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kec. Tambaksari	Kelurahan Dukuh Setro

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan	Kelurahan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tambaksari	Kelurahan Gading
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tambaksari	Kelurahan Kapasmadya Baru
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tambaksari	Kelurahan Pacarkeling

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tambaksari	Kelurahan Pacarkembang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tambaksari	Kelurahan Ploso
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tambaksari	Kelurahan Rangkah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tambaksari	Kelurahan Tambaksari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tandes	Kelurahan Tandes
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tandes	Kelurahan Karangpoh
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tandes	Kelurahan Balongsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik					
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tandes	Kelurahan Manukan Wetan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tandes	Kelurahan Manukan Kulon
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tandes	Kelurahan Banjar Sugihan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tegalsari	Kelurahan Tegalsari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tegalsari	Kelurahan Keputran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tegalsari	Kelurahan Wonorejo
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kegiatan Pemberdayaan	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kec. Tegalsari	Kelurahan Kedungdoro

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan	Kelurahan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tegalsari	Kelurahan Dr. Soetomo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kelurahan Kutisari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kelurahan Kendangsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kelurahan Tenggilis Mejoyo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kelurahan Panjang Jiwo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wiyung	Kelurahan Jajar Tunggal

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wiyung	Kelurahan Balas Klumprik
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wiyung	Kelurahan Wiyung
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wiyung	Kelurahan Babatan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wonocolo	Kelurahan Siwalankerto

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik					
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wonocolo	Kelurahan Sidosermo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wonocolo	Kelurahan Bendul Merisi
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wonocolo	Kelurahan Jemur Wonosari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wonocolo	Kelurahan Margorejo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wonokromo	Kelurahan Darmo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wonokromo	Kelurahan Jagir
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kegiatan Pemberdayaan	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kec. Wonokromo	Kelurahan Ngagel

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan	Kelurahan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wonokromo	Kelurahan Ngagel Rejo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wonokromo	Kelurahan Sawunggaling
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wonokromo	Kelurahan Wonokromo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Asemrowo	Kelurahan Asemrowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Asemrowo	Kelurahan Genting Kalianak
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Asemrowo	Kelurahan Tambak Sarioso

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Benowo	Kelurahan Kandangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Benowo	Kelurahan Romokalisari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Benowo	Kelurahan Sememi
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Benowo	Kelurahan Tambak Oso Wilangun

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik					
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Bubutan	Kelurahan Alun-Alun Contong
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Bubutan	Kelurahan Bubutan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Bubutan	Kelurahan Gundih

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Bubutan	Kelurahan Jepara
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Bubutan	Kelurahan Tembok Dukuh
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Bulak	Kelurahan Kedung Cowek
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kegiatan Pemberdayaan	Pemberdayaan Masyarakat di	Kec. Bulak	Kelurahan Kenjeran

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan	Kelurahan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Bulak	Kelurahan Sukolilo Baru
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Bulak	Kelurahan Bulak
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Dukuh Pakis	Kelurahan Dukuh Kupang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Dukuh Pakis	Kelurahan Dukuh Pakis
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Dukuh Pakis	Kelurahan Gunungsari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Dukuh Pakis	Kelurahan Pradah Kalikendal

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Gayungan	Kelurahan Dukuh Menanggal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Gayungan	Kelurahan Gayungan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Gayungan	Kelurahan Ketintang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Gayungan	Kelurahan Menanggal

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik					
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Genteng	Kelurahan Embong Kaliasin
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Genteng	Kelurahan Genteng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Genteng	Kelurahan Kapasari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Genteng	Kelurahan Ketabang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Genteng	Kelurahan Peneleh
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Gubeng	Kelurahan Airlangga
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kegiatan Pemberdayaan	Pemberdayaan Masyarakat di	Kec. Gubeng	Kelurahan Baratajaya

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan	Kelurahan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Gubeng	Kelurahan Gubeng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Gubeng	Kelurahan Kertajaya
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Gubeng	Kelurahan Mojo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Gubeng	Kelurahan Pucang Sewu
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Gunung Anyar	Kelurahan Gunung Anyar
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Gunung Anyar	Kelurahan Gunung Anyar Tambak

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Gunung Anyar	Kelurahan Rungkut Tengah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Gunung Anyar	Kelurahan Rungkut Menanggal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Jambangan	Kelurahan Karah
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Jambangan	Kelurahan Jambangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik					
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Jambangan	Kelurahan Kebonsari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Jambangan	Kelurahan Pagesangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Karangpilang	Kelurahan Karang Pilang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Karangpilang	Kelurahan Kebraon
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Karangpilang	Kelurahan Kedurus
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Karangpilang	Kelurahan Waru Gunung
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kegiatan Pemberdayaan	Pemberdayaan Masyarakat di	Kec. Kenjeran	Kelurahan Sidotopo Wetan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan	Kelurahan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Kenjeran	Kelurahan Tanah Kali Kedinding
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Kenjeran	Kelurahan Bulak Banteng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Kenjeran	Kelurahan Tambak Wedi

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Krembangan	Kelurahan Kemayoran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Krembangan	Kelurahan Dupak
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Krembangan	Kelurahan Krembangan Selatan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Krembangan	Kelurahan Perak Barat
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Krembangan	Kelurahan Morokrembangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Lakarsantri	Kelurahan Bangkingan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Lakarsantri	Kelurahan Jeruk

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik					
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Lakarsantri	Kelurahan Lakarsantri
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Lakarsantri	Kelurahan Lidah Kulon
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Lakarsantri	Kelurahan Lidah Wetan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Lakarsantri	Kelurahan Sumurwelut
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Mulyorejo	Kelurahan Mulyorejo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Mulyorejo	Kelurahan Dukuh Sutorejo
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kegiatan Pemberdayaan	Pemberdayaan Masyarakat di	Kec. Mulyorejo	Kelurahan Kalisari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan	Kelurahan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Mulyorejo	Kelurahan Kejawan Putih Tambak
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Mulyorejo	Kelurahan Manyar Sambangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Mulyorejo	Kelurahan Kalijudan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Pabean Cantian	Kelurahan Bongkaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Pabean Cantian	Kelurahan Krembangan Utara
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Pabean Cantian	Kelurahan Nyamplungan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Pabean Cantian	Kelurahan Tanjung Perak
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Pakal	Kelurahan Babat Jerawat
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Pakal	Kelurahan Pakal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Pakal	Kelurahan Sumberejo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik					
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Pakal	Kelurahan Benowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Rungkut	Kelurahan Kalirungkut
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Rungkut	Kelurahan Rungkut Kidul

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Rungkut	Kelurahan Kedung Baruk
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Rungkut	Kelurahan Penjaringansari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Rungkut	Kelurahan Medokan Ayu
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kegiatan Pemberdayaan	Pemberdayaan Masyarakat di	Kec. Rungkut	Kelurahan Wonorejo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan	Kelurahan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sambikerep	Kelurahan Lontar
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sambikerep	Kelurahan Sambikerep
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sambikerep	Kelurahan Made

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sambikerep	Kelurahan Beringin
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sawahan	Kelurahan Banyu Urip
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sawahan	Kelurahan Kupang Krajan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sawahan	Kelurahan Pakis
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sawahan	Kelurahan Putat Jaya
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sawahan	Kelurahan Sawahan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sawahan	Kelurahan Petemon

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik					
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Semampir	Kelurahan Ujung
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Semampir	Kelurahan Wonokusumo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Semampir	Kelurahan Ampel

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Semampir	Kelurahan Sidotopo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Semampir	Kelurahan Pegirian
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Simokerto	Kelurahan Kapasan
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kegiatan Pemberdayaan	Pemberdayaan Masyarakat di	Kec. Simokerto	Kelurahan Tambakrejo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan	Kelurahan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Simokerto	Kelurahan Sidodadi
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Simokerto	Kelurahan Simokerto
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Simokerto	Kelurahan Simolawang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sukolilo	Kelurahan Gebang Putih
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sukolilo	Kelurahan Keputih
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sukolilo	Kelurahan Klampis Ngasem

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sukolilo	Kelurahan Medokan Semampir
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sukolilo	Kelurahan Menur Pumpungan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sukolilo	Kelurahan Nginden Jangkungan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sukolilo	Kelurahan Semolowaru

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik					
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sukomanunggal	Kelurahan Putat Gede
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sukomanunggal	Kelurahan Simomulyo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sukomanunggal	Kelurahan Simomulyo Baru

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sukomanunggal	Kelurahan Sonokwijenan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sukomanunggal	Kelurahan Sukomanunggal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Sukomanunggal	Kelurahan Tanjungsari
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kegiatan Pemberdayaan	Pemberdayaan Masyarakat di	Kec. Tambaksari	Kelurahan Dukuh Setro

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan	Kelurahan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tambaksari	Kelurahan Gading
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tambaksari	Kelurahan Kapasmadya Baru
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tambaksari	Kelurahan Pacarkeling

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tambaksari	Kelurahan Pacarkembang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tambaksari	Kelurahan Ploso
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tambaksari	Kelurahan Rangkah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tambaksari	Kelurahan Tambaksari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tandes	Kelurahan Tandes
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tandes	Kelurahan Karangpoh
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tandes	Kelurahan Balongsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik					
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tandes	Kelurahan Manukan Wetan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tandes	Kelurahan Manukan Kulon
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tandes	Kelurahan Banjar Sugihan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tegalsari	Kelurahan Tegalsari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tegalsari	Kelurahan Keputran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tegalsari	Kelurahan Wonorejo
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kegiatan Pemberdayaan	Pemberdayaan Masyarakat di	Kec. Tegalsari	Kelurahan Kedungdoro

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan	Kelurahan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tegalsari	Kelurahan Dr. Soetomo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kelurahan Kutisari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kelurahan Kendangsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kelurahan Tenggilis Mejoyo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kelurahan Panjang Jiwo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Wiyung	Kelurahan Babatan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Wiyung	Kelurahan Jajar Tunggal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Wiyung	Kelurahan Balas Klumprik
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Wiyung	Kelurahan Wiyung
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Wonocolo	Kelurahan Siwalankerto

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik					
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Wonocolo	Kelurahan Jemur Wonosari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Wonocolo	Kelurahan Bendul Merisi
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Wonocolo	Kelurahan Margorejo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Wonocolo	Kelurahan Sidosermo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Wonokromo	Kelurahan Darmo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Wonokromo	Kelurahan Jagir
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kegiatan Pemberdayaan	Pemberdayaan Masyarakat di	Kec. Wonokromo	Kelurahan Ngagel

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan	Kelurahan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Wonokromo	Kelurahan Ngagel Rejo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Wonokromo	Kelurahan Sawunggaling
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Wonokromo	Kelurahan Wonokromo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Benowo	Kec. Benowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Bulak	Kec. Bulak
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Genteng	Kec. Genteng

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik					
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Pemberdayaan Lembaga	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lembaga Kemasyarakatan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Pakal	Kec. Pakal

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Semampir	Kec. Semampir
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik					
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Tandes	Kec. Tandes
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Pemberdayaan Lembaga	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lembaga Kemasyarakatan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Benowo	Kec. Benowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Bulak	Kec. Bulak
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Genteng	Kec. Genteng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik					
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Pemberdayaan Lembaga	Fasilitasi Pengembangan	Kec. Pakal	Kec. Pakal

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Usaha Ekonomi Masyarakat		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Semampir	Kec. Semampir
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Tandes	Kec. Tandes
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik					
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Benowo	Kec. Benowo
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM KOORDINASI	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Bulak	Kec. Bulak
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur				Kecamatan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Genteng	Kec. Genteng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik			Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pakal	Kec. Pakal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM KOORDINASI	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Semampir	Kec. Semampir
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur				Kecamatan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tandes	Kec. Tandes

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik			Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Benowo	Kec. Benowo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Bulak	Kec. Bulak
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Genteng	Kec. Genteng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik	UMUM	Daerah	Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Pakal	Kec. Pakal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Semampir	Kec. Semampir
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Tandes	Kec. Tandes

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Benowo	Kec. Benowo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik	UMUM	Daerah			
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Bulak	Kec. Bulak
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Genteng	Kec. Genteng
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Penanganan Konflik Sosial Sesuai	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Pakal	Kec. Pakal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik	UMUM	Daerah			
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Semampir	Kec. Semampir
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari
Memperkuat stabilitas	Peningkatan ketentraman,	Peningkatan ketentraman,	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Penanganan Konflik Sosial Sesuai	Kec. Tandes	Kec. Tandes

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
publik	pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur						
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
			ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pelayanan publik	PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	peningkatan layanan infrastruktur						
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	layanan infrastruktur						
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	infrastruktur						
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Mengembangk	Penguatan	Penataan ruang,	PROGRAM	Penyelenggaraan	Pemeliharaan,	Dinas Perumahan	Dinas Perumahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
an wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Mengembangkan wilayah	Penguatan konektivitas	Penataan ruang, infrastruktur, dan	PROGRAM PENATAAN	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di	Pembinaan dan Pengawasan	Dinas Perumahan Rakyat dan	Dinas Perumahan Rakyat dan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	utilitas kota yang terpadu	BANGUNAN GEDUNG	Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	serta peningkatan layanan infrastruktur				Jalan dan Jembatan		
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	peningkatan layanan infrastruktur						
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	layanan infrastruktur						
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTr) Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	infrastruktur						
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Mengembangk	Penguatan	Penataan ruang,	PROGRAM	Penyediaan	Pembangunan	Dinas Perhubungan	Dinas

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
an wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Perhubungan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Mengembangkan wilayah	Penguatan konektivitas	Penataan ruang, infrastruktur, dan	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Penyediaan Perlengkapan Jalan di	Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	utilitas kota yang terpadu	LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jalan Kabupaten/Kota	Perlengkapan Jalan		
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Mengembangkan wilayah untuk	Penguatan konektivitas antar wilayah	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	terpadu	ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Kendaraan Bermotor		
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
kesenjangan dan menjamin pemerataan	pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur		(LLAJ)	Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan menjamin pemerataan	hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur			dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota		
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pemerataan	pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur						
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Pengelolaan	Pengembangan Karir	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PENGELOLAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PENDIDIKAN	Menengah Pertama	Peserta Didik		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar		Formal/Kesetaraan	Nonformal/Kesetaraan		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	RSUD dr. Mohamad Soewandhie

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Rumah Sakit	RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Asemrowo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balas Klumprik
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyediaan Layanan	Pengelolaan	Dinas Kesehatan	Puskesmas

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Balongsari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bangkingan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Banyu Urip
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Benowo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ibu Hamil		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bulak Banteng
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dr. Soetomo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dukuh Kupang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dupak
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gading
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gayungan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gundih
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gunung Anyar
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jagir

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	MASYARAKAT				
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jemursari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jeruk
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalijudan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalirungkut
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kebonsari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedungdoro

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedurus
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kenjeran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Keputih

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ketabang
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Klampis Ngasem
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Krembangan Selatan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lidah Kulon
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lontar
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Made

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Manukan Kulon
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Medokan Ayu
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Menur

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Moro Krembangan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mulyorejo
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyediaan Layanan	Pengelolaan	Dinas Kesehatan	Puskesmas

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Ngagel Rejo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pacar Keling
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pakis
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pegirian

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ibu Hamil		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Peneleh
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Perak Timur
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pucangsewu

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Putat Jaya
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Rangkah
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawah Pulo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sememi
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidosermo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	MASYARAKAT				
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo Wetan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simolawang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simomulyo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Siwalankerto
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambakrejo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambak Wedi
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanah Kali Kedinding
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanjungsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tembok Dukuh
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tenggilis
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wiyung

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokromo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokusumo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Asemrowo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balas Klumprik
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyediaan Layanan	Pengelolaan	Dinas Kesehatan	Puskesmas

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Balongsari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bangkingan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Banyu Urip
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Benowo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang Terduga Tuberkulosis		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bulak Banteng
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dr. Soetomo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dukuh Kupang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tuberkulosis		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dupak
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gading
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gayungan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gundih
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gunung Anyar
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jagir

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	MASYARAKAT				
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jemursari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jeruk
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalijudan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalirungkut
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kebonsari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedungdoro

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedurus
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kenjeran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Keputih

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ketabang
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Klampis Ngasem
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Krembangan Selatan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lidah Kulon
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lontar
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Made

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Manukan Kulon
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Medokan Ayu
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Menur

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Moro Krembangan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mulyorejo
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyediaan Layanan	Pengelolaan	Dinas Kesehatan	Puskesmas

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Ngagel Rejo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pacar Keling
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pakis
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pegirian

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang Terduga Tuberkulosis		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Peneleh
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Perak Timur
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pucangsewu

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tuberkulosis		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Putat Jaya
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Rangkah
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawah Pulo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sememi
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidosermo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	MASYARAKAT				
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo Wetan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simolawang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simomulyo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Siwalankerto
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambakrejo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambak Wedi
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanah Kali Kedinding
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanjungsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tembok Dukuh
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tenggilis
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wiyung

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokromo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokusumo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Asemrowo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balas Klumprik
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balongsari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bangkingan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Banyu Urip
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Benowo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bulak Banteng
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyediaan Layanan	Pengelolaan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dr.

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Soetomo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dukuh Kupang
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dupak
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gading

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gayungan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gundih
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gunung Anyar

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terinfeksi HIV		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jagir
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jemursari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jeruk

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalijudan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalirungkut
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kebonsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	MASYARAKAT				
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedungdoro
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedurus
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kenjeran

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Keputih
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ketabang
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Klampis Ngasem

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Krembangan Selatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lidah Kulon
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lontar

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Made
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Manukan Kulon
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Medokan Ayu

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Menur
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Moro Krembangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mulyorejo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ngagel Rejo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pacar Keling

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pakis
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pegirian
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Peneleh
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyediaan Layanan	Pengelolaan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Perak

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Timur
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pucangsewu
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Putat Jaya
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Rangkah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawahan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawah Pulo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sememi

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terinfeksi HIV		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidosermo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo Wetan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simolawang
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simomulyo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Siwalankerto

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	MASYARAKAT				
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambakrejo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambak Wedi
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanah Kali Kedinding

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanjungsari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tembok Dukuh
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tenggilis

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wiyung
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokromo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokusumo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Asemrowo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balas Klumprik
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balongsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bangkingan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Banyu Urip
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Benowo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bulak Banteng
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dr. Soetomo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dukuh Kupang
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyediaan Layanan	Pengelolaan	Dinas Kesehatan	Puskesmas

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Dupak
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gading
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gayungan
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gundih

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Gizi Masyarakat		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gunung Anyar
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jagir
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jemursari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jeruk
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalijudan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalirungkut

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kebonsari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedungdoro
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedurus

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	MASYARAKAT				
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kenjeran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Keputih
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ketabang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Klampis Ngasem
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Krembangan Selatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lidah Kulon

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lontar
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Made
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Manukan Kulon

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Medokan Ayu
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Menur
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Moro Krembangan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mulyorejo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ngagel Rejo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pacar Keling
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pakis
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pegirian

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Peneleh
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Perak Timur
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pucangsewu
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyediaan Layanan	Pengelolaan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Putat

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jaya
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Rangkah
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawahan
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawah Pulo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Gizi Masyarakat		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sememi
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidosermo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo Wetan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simolawang
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simomulyo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Siwalankerto
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambakrejo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambak Wedi

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	MASYARAKAT				
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanah Kali Kedinding
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanjungsari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tembok Dukuh

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tenggilis
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wiyung
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokromo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokusumo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Asemrowo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balas Klumprik
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balongsari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bangkingan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Banyu Urip
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Benowo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bulak Banteng

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dr. Soetomo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dukuh Kupang
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dupak

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gading
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gayungan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gundih
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyediaan Layanan	Pengelolaan	Dinas Kesehatan	Puskesmas

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Gunung Anyar
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jagir
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jemursari
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jeruk

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lingkungan		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalijudan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalirungkut
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kebonsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedungdoro
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedurus
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kenjeran

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Keputih
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ketabang
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Klampis Ngasem

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	MASYARAKAT				
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Krembangan Selatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lidah Kulon
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lontar

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Made
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Manukan Kulon
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Medokan Ayu

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Menur
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Moro Krembangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mulyorejo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ngagel Rejo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pacar Keling

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pakis
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pegirian
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Peneleh

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Perak Timur
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pucangsewu
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Putat Jaya

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Rangkah
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawahan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawah Pulo
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyediaan Layanan	Pengelolaan	Dinas Kesehatan	Puskesmas

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Sememi
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidosermo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo Wetan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lingkungan		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simolawang
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simomulyo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Siwalankerto

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambakrejo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambak Wedi
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanah Kali Kedinding

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanjungsari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tembok Dukuh
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tenggilis

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	MASYARAKAT				
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wiyung
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokromo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokusumo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokusumo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Asemrowo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balas Klumprik
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balongsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bangkingan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Banyu Urip
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Benowo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bulak Banteng
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dr. Soetomo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dukuh Kupang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dupak
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gading
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gayungan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gundih
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gunung Anyar
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jagir
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyediaan Layanan	Pengelolaan	Dinas Kesehatan	Puskesmas

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Surveilans Kesehatan		Jemursari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jeruk
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalijudan
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalirungkut

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kebonsari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedungdoro
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedurus

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kenjeran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Keputih
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ketabang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Klampis Ngasem
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Krembangan Selatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lidah Kulon

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	MASYARAKAT				
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lontar
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Made
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Manukan Kulon

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Medokan Ayu
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Menur
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Moro Krembangan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mulyorejo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ngagel Rejo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pacar Keling
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pakis
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pegirian

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Peneleh
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Perak Timur
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pucangsewu

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Putat Jaya
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Rangkah
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawah Pulo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sememi
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidosermo
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyediaan Layanan	Pengelolaan	Dinas Kesehatan	Puskesmas

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Surveilans Kesehatan		Sidotopo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo Wetan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simolawang
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simomulyo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Siwalankerto
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambakrejo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambak Wedi

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanah Kali Kedinding
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanjungsari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tembok Dukuh

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tenggilis
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wiyung
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokromo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	MASYARAKAT				
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokusumo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Asemrowo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balas Klumprik
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balongsari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bangkingan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Banyu Urip
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Benowo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bulak Banteng

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dr. Soetomo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dukuh Kupang
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dupak

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gading
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gayungan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gundih

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gunung Anyar
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jagir
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jemursari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jeruk
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalijudan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalirungkut
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyediaan Layanan	Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kebonsari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedungdoro
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedurus
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kenjeran

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Menular		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Keputih
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ketabang
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Klampis Ngasem

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Krembangan Selatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lidah Kulon
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lontar

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Made
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Manukan Kulon
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Medokan Ayu

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	MASYARAKAT				
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Menur
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Moro Krembangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mulyorejo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ngagel Rejo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pacar Keling

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pakis
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pegirian
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Peneleh

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Perak Timur
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pucangsewu
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Putat Jaya

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Rangkah
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawahan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawah Pulo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sememi
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidosermo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo Wetan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simolawang
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simomulyo
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyediaan Layanan	Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyakit Menular dan Tidak Menular		Siwalankerto
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambakrejo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambak Wedi
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanah Kali

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Menular		Kedinding
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanjungsari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tembok Dukuh
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tenggilis

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wiyung
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokromo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Asemrowo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balas Klumprik
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balongsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	MASYARAKAT				
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bangkingan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Banyu Urip
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Benowo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bulak Banteng
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dr. Soetomo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dukuh Kupang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dupak
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gading
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gayungan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gundih
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gunung Anyar
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jagir

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jemursari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jeruk
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalijudan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalirungkut
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kebonsari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedungdoro

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedurus
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kenjeran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Keputih
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyediaan Layanan	Operasional	Dinas Kesehatan	Puskesmas

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Puskesmas		Ketabang
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Klampis Ngasem
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Krembangan Selatan
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Operasional Pelayanan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lidah Kulon

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lontar
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Made
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Manukan Kulon

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Medokan Ayu
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Menur
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Moro Krembangan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mulyorejo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ngagel Rejo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	MASYARAKAT				
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pacar Keling
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pakis
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pegirian

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Peneleh
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Perak Timur
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pucangsewu

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Putat Jaya
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Rangkah
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawah Pulo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sememi
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidosermo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo Wetan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simolawang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simomulyo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Siwalankerto
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambakrejo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambak Wedi
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanah Kali Kedinding
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanjungsari
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Penyediaan Layanan	Operasional	Dinas Kesehatan	Puskesmas

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Puskesmas		Tembok Dukuh
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tenggilis
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wiyung
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Operasional Pelayanan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokromo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokusumo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Laboratorium Kesehatan Daerah
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Instalasi Farmasi Kesehatan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	MASYARAKAT	Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar		Rumah Tangga	serta Tindak Lanjut Pengawasan		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wiyung

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokromo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonokusumo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tenggilis

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Asemrowo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balas Klumprik
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Balongsari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bangkingan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Banyu Urip
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Benowo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bulak Banteng
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dr. Soetomo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dukuh Kupang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dupak
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gading
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gayungan
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Pengembangan dan	Bimbingan Teknis dan	Dinas Kesehatan	Puskesmas

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Gundih
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gunung Anyar
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jagir
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	Bimbingan Teknis dan Supervisi	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jemursari

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jeruk
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalijudan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalirungkut

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	BIDANG KESEHATAN	Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kebonsari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedungdoro
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedurus

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar		(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kenjeran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Keputih
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ketabang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar		Daerah Kabupaten/Kota	Daya Masyarakat (UKBM)		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Klampis Ngasem
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Krembangan Selatan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lidah Kulon

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar		Kabupaten/Kota	(UKBM)		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lontar
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Made
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Manukan Kulon

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Medokan Ayu
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Menur
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Moro Krembangan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mulyorejo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ngagel Rejo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pacar Keling
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pakis
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pegirian

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Peneleh
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambak Wedi
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanah Kali Kedinding

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanjungsari
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tembok Dukuh
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Perak Timur
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Pengembangan dan	Bimbingan Teknis dan	Dinas Kesehatan	Puskesmas

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Pucangsewu
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Putat Jaya
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Rangkah
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	Bimbingan Teknis dan Supervisi	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawah Pulo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sememi
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidosermo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	BIDANG KESEHATAN	Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sidotopo Wetan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simolawang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar		(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Simomulyo
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Puskesmas Siwalankerto
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambakrejo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
saing	dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar		Daerah Kabupaten/Kota	Daya Masyarakat (UKBM)		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Penyediaan Permakanan	Dinas Sosial	Dinas Sosial

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar		Pengemis di Luar Panti Sosial			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Dinas Sosial	Dinas Sosial

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar		Panti Sosial			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial	Dinas Sosial

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial	Dinas Sosial

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Pelembagaan PHA	Advokasi Kebijakan	Dinas	Dinas

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PERLINDUNGAN	Penyediaan Layanan bagi Anak yang	Penyediaan Layanan Pengaduan	Dinas Pemberdayaan	Dinas Pemberdayaan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	KHUSUS ANAK	Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
				Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengendalian Program KKBPK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan	Peningkatan	Peningkatan	PROGRAM	Pelaksanaan	Promosi dan KIE	Dinas	Dinas

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMBINAAN	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh	Pembinaan IMP dan Program Bangga	Dinas Pemberdayaan	Dinas Pemberdayaan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	KELUARGA BERENCANA (KB)	KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas layanan	PROGRAM PEMBINAAN	Pengendalian dan Pendistribusian	Peningkatan Kesertaan	Dinas Pemberdayaan	Dinas Pemberdayaan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Manusia berkualitas dan berdaya saing	pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	KELUARGA BERENCANA (KB)	Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan,	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
berkualitas dan berdaya saing	kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	BERENCANA (KB)	Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	KB	Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	SEJAHTERA (KS)	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
dan berdaya saing	produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	SEJAHTERA (KS)	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan			Kader Kabupaten/Kota			
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	an serta pengentasan kemiskinan	pemenuhan kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerja an serta	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	pengentasan kemiskinan	kebutuhan dasar					
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
	kemiskinan						
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelindungan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Revolusi mental dan	Peningkatan kepedulian	Peningkatan kepedulian sosial	PROGRAM PENGELOLAAN	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, dan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan	Dinas Kebudayaan,

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	Lokasi Pelaksana Anggaran
pembangunan kebudayaan	sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	PERMUSEUMAN		Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Olah Raga serta Pariwisata	Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bentuk komitmen/dukungan Pemerintah Kota Surabaya atas kebijakan prioritas nasional tahun 2024 ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel IV.5
Tindak Lanjut Dukungan Pemerintah Daerah Atas Kebijakan Prioritas Nasional Tahun 2024

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	Pendidikan	Penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan (Inklusi)	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Kelulusan (AL) SD/MI** **Angka Kelulusan SMP/MTS** **Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan**	Pemberian BOS juga telah diberikan kepada 50 SD dan 25 SMP yang terdapat program Sekolah Inklusi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Jumlah laporan pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah dasar** **Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan**	
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan** **Pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah menengah tepat waktu**	
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	
		Dukungan terhadap Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) melalui percepatan penyusunan Rencana Aksi Daerah	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase guru PAUD yang kompeten**	Kota Surabaya telah menyusun rencana aksi Daerah PAUD HI Tahun 2021-2026

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Integratif.		**Persentase lembaga PAUD berkualitas**	Pembentukan Gugus Tugas PAUD Holistik Integratif dilakukan melalui Surat Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/541/436.1.2/2022 tanggal 23 November 2022 tentang Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik PAUD**	
					Laporan penilaian kinerja yang disusun	
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	
				Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	
				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	
		Dukungan pelaksanaan peningkatan pijar (Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja) di Daerah	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Kelulusan (AL) SD/MI**	Seragam gratis untuk 39.911 siswa gamis di SD Negeri dan 11.713 siswa gamis di SD Swasta serta 13.522 siswa gamis di SMP Negeri dan 15.150 siswa gamis di SMP Swasta.
					Angka Kelulusan SMP/MTS	Sekolah gratis bagi seluruh siswa sekolah negeri dan sekolah gratis bagi siswa gamis di sekolah Swasta.

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
					Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Jumlah laporan pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah dasar**	
					Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan**	
					Pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah menengah tepat waktu	
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	
		Dukungan peningkatan daya saing bangsa serta mendukung pertumbuhan perkonomian nasional melalui Revitalisasi sekolah menengah kejuruan	a. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia			Sesuai Instruksi Presiden RI nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia pada bagian Kedua butir 12 yang mengatur peran Gubernur untuk memberikan layanan pendidikan Kejuruan,

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
						menyediakan pendidik, penataan kelembagaan SMK, serta mengembangkan SMK unggulan.
		Penguatan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Berkarakter;	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase SD terakreditasi minimal B** **Persentase SMP terakreditasi minimal B**	Indikator tersebut masuk ke dalam mata pelajaran PPKn di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Jumlah lembaga pendidikan dasar yang mendapatkan peningkatan mutu**	
				Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Jumlah lembaga pendidikan menengahyang mendapatkan peningkatan mutu**	
				Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	
		Dukungan Pelaksanaan Program Kejar (Satu Rekening Satu Pelajar) di Daerah	Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 26 Tahun 2019 tentag Hari Indonesis Menabung (HIM)	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase SD terakreditasi minimal B** **Persentase SMP terakreditasi minimal B**	Telah disupport oleh subkegiatan minat bakat baik jenjang SD maupun SMP. Di dalam subkegiatan tersebut ada sosialisasi terhadap literasi keuangan yaitu berupa gerakan menabung bagi pelajar jenjang SD dan SMP
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Jumlah lembaga pendidikan dasar yang mendapatkan peningkatan mutu**	
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Jumlah lembaga pendidikan menengahyang mendapatkan peningkatan mutu**	
				Pembinaan Minat, Bakat dan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang	

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Kreativitas Siswa	Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	
		Dukungan terhadap revitalisasi bahasa daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase SD terakreditasi minimal B** **Persentase SMP terakreditasi minimal B**	Telah masuk dalam kurikulum mata pelajaran bahasa daerah
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Jumlah lembaga pendidikan dasar yang mendapatkan peningkatan mutu**	
				Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Jumlah lembaga pendidikan menengahyang mendapatkan peningkatan mutu**	
				Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	
		Dukungan terhadap penerapan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis Zonasi	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**	Kota Surabaya telah menerapkan PPDB berbasis zonasi dengan penerimaan siswa melalui alamat website ppdb.surabaya.go.id [SMP]
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam rangka Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	ppdbsd.surabaya.go.id [SD]
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ppdbtk.surabaya.go.id [TK] yang dikembangkan pada sub kegiatn penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
		Dukungan terhadap program merdeka belajar untuk penguatan	a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,	**PROGRAM PENGELOLAAN**	**Persentase SD terakreditasi minimal B**	Sekolah penggerak di Kota Surabaya telah

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
		transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak dan guru penggerak	Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak c. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran	**PENDIDIKAN** **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	**Persentase SMP terakreditasi minimal B** **Jumlah lembaga pendidikan dasar yang mendapatkan peningkatan mutu** Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar **Jumlah lembaga pendidikan menengahyang mendapatkan peningkatan mutu** Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	dijalankan pada 152 sekolah dengan guru penggerak 265 orang. Sekolah penggerak dan guru penggerak berfungsi mendukung pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru).yang difasilitasi melalui Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik baik tingkat SD maupun SMP
		Dukungan terhadap proses transisi dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar (SD)	a. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Penyelenggaraan Proses Belajar	**Persentase guru PAUD yang kompeten** **Persentase SD terakreditasi minimal B** **Jumlah lembaga pendidikan dasar yang mendapatkan peningkatan mutu** Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar **Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik PAUD** Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti	

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan e. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0759/C/HK.04.01/2023 tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Kelas Awal	PAUD	Proses Belajar	
		Dukungan terhadap peserta didik penyandang disabilitas melalui: a) penyediaan anggaran dan/atau bantuan pendanaan b) penyediaan sarana dan prasarana c) penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan d) penyediaan kurikulum	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**	Pemberian BOS juga telah diberikan kepada 50 SD dan 25 SMP yang terdapat program Sekolah Inklusi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran**	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran**	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
				PROGRAM PENGELOLAAN	**Persentase SD terakreditasi minimal B**	

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				PENDIDIKAN	**Persentase SMP terakreditasi minimal B**	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Jumlah lembaga pendidikan dasar yang mendapatkan peningkatan mutu**	
				Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Jumlah lembaga pendidikan menengahyang mendapatkan peningkatan mutu**	
				Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	
		Dukungan terhadap penumbuhan budaya membaca di masyarakat dan satuan pendidikan melalui: a) penyediaan buku bacaan bermutu b) peningkatan kemampuan kepala sekolah, guru, dan pustakawan dalam pengelolaan dan pemanfaatan buku bacaan	a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan b. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Buku, Standar Proses dan Kaidah Pemerolehan Naskah, serta Standar Proses dan Kaidah Penerbitan Buku d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penilaian Buku e. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase guru PAUD yang kompeten**	
					Persentase guru yang mendapat pengembangan karir	Selain penyediaan perpustakaan di Sekolah, budaya membaca di masyarakat juga didorong melalui penyediaan TBM di 530 Lokasi serta penambahan koleksi bacaan sejumlah 448,840 koleksi
					Persentase SD terakreditasi minimal B	
					Persentase SMP terakreditasi minimal B	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir**	
					Jumlah lembaga pendidikan dasar yang mendapatkan peningkatan mutu	
				Pengadaan Perlengkapan	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Kemendikbudristek Nomor 030/P/2022 tentang Pedoman Perjenjangan Buku	Sekolah		
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir**	
					Jumlah lembaga pendidikan menengahyang mendapatkan peningkatan mutu	
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir**	
					Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik PAUD	
				Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi	

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
					dan Kualifikasi	
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan**	
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tingkat Kepuasan Pemustaka**	
				Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	
		Dukungan percepatan capaian pendidikan numerasi sekolah dasar	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.1.7/2097/SJ tentang Dukungan Percepatan Capaian Pendidikan Numerasi Sekolah Dasar	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Kelulusan (AL) SD/MI**	
					Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Jumlah laporan pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah dasar**	
					Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	
2	Kesehatan	Penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 202-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 d. Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Germas	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif**	
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye GERMAS (CERDIK)**	
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)**	
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
		Pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama: 1) Human lmmunodeficiency Virus (HlV); dan 2) Tuberkulosis (TBC); 3) Malaria 4) Penyakit menular lainnya	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 e. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani ≤ 1 x 24 Jam**	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di puskesmas**	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
				Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	
				Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis	

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Penanggulangan Malaria h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome, dan Inkubasi Menular Seksual	Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	
		Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama: 1) Diabetes Melitus; dan 2) Hipertensi; dan 3) Penyakit tidak menular lainnya.	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)**	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah lembaga yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)**	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
		Penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan Masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu**	
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau**	
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran	

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
					Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	
		Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, dengan pemenuhan; 1) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di puskesmas sesuai Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi 2) Perawat dan Bidan pada entitas puskesmas pembantu prima; 3) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di rumah sakit umum daerah (RSUD) sesuai Permenkes Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology): 4) Tenaga kesehatan di laboratorium kesehatan daerah; 5) Insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di puskesmas; 6) Peningkatan kapasitas & insentif kader posyandu.	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan urenofrology) g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**	Pada 63 Puskesmas telah didukung oleh 1 Tenaga dengan kompetensi Manajamen Informasi dan 1 Tenaga dengan kompetensi pengelola keuangan serta pengadaan SDM non ASN pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN**	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran**	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
				Peningkatan Pelayanan BLUD	**Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi**	
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas**	
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah	**Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan**	

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Kabupaten/Kota		
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif**	
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)**	
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
3	Penataan Ruang	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP No 21 Tahun 2021	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase pelayanan penataan ruang**	
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTr) Kabupaten/Kota	**Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau Kajian teknis pendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RrTR) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan**	
				Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	
4	Sosial	Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Daerah sesuai dengan Amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun	a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial**	

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
		2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui strategi a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan b. Menjadikan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) sebagai acuan dalam menentukan penerima layanan dan agar dilakukan verifikasi dan validasi oleh daerah c. Agar membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi/Kabupaten/Kota	Kemiskinan Ekstrem b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten-Kota c. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 – 2024 d. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem e. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem		**Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial**	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Lanjut Usia**	
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial**	
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial**	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	**Jumlah laporan koordinasi dan monitoring intervensi sosial**	

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR**	
				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	
		1. Agar Pemerintah Provinsi yang tidak memiliki panti dapat membentuk panti, dan yang sudah memiliki panti namun masih terbatas pada satu layanan dapat membentuk panti multilayanan untuk pelayananan dasar bidang sosial 2. Agar Kabupaten/Kota dapat membentuk UPTD Dinas Sosial sebagai tempat pelayanan terpadu bidang sosial sehingga dapat memperoleh alokasi anggaran untuk pelayanan sosial 3. Agar indikator mengenai pelaksanaan SPM tidak terpisah tiap bidang, melainkan dapat terintegrasi tiap bidangnya	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Standar teknis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial Di daerah provinsi dan di Daerah Kab/Kota 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial**	Kota Surabaya memiliki UPTD Dinas Sosial :
					Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	UPTD KANRI & KALIJUDAN
					Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	UPTD LIPONSOS KEPUTIH
					Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	UPTD GRIYA WREDA
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut	**Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Anak**	UPTD BABAT JERAWAT
					Jumlah kegiatan	

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**rehabilitasi sosial dasar bagi Lanjut Usia**	
					Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas	
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial**	
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Pengalokasian pembiayaan untuk pemutakhiran data	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial**	Pemutakhiran data dilakukan melalui Musyawarah Kelurahan dan aplikasi sayang warga
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR**	
				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang	

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Kabupaten/Kota	Didata	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	
5	Tenaga Kerja	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Lampiran G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah terbagi habis mulai dari Pemerintah Daerah Provinsi sampai dengan Pemerintah Desa. 1. Pemerintah Daerah provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab: a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerjaoleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihankerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi; b. mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya; c. menerbitkan izin kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; d. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara berjenjang dan periodik kepada Menteri; e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja; f. menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi syarat dan standar kesehatan; g. menyediakan dan memfasilitasi	a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia b. Lampiran G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah c. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten**	
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi**	
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan**	
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI**	
				Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Keterangan
		pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan; h. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan i. dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat provinsi. 2. Pemerintah Daerah kabupaten/ kota memiliki tugas dan tanggung jawab: a. menyosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat; b. membuat basis data Pekerja Migran Indonesia; c. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara periodik kepada Pemerintah Daerah provinsi; d. mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya; e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di daerah kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewenangannya; f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi; g. melakukan pembinaan dan								

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
		pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di kabupaten/kota; h. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; i. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan; j. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan k. dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat kabupaten/ kota.				
		Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 461/217/SJ, tanggal 14 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan telah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Layanan Disabilitas melalui penguatan tugas dan fungsi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota, menyusun rencana program dan kegiatan dalam melaksanakan fungsi Layanan Disabilitas, dan menyediakan dukungan anggaran pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di provinsi dan	a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 461/217/SJ, tanggal 14 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** **Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota** Perluasan Kesempatan Kerja	**Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan** **Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis** Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
		kabupaten/kota untuk pelaksanaan fungsi Layanan Disabilitas				
		Guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan maka diminta perhatian Gubernur dan Bupati/Walikota memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah daerah dengan status Non Apatatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja beserta keluarganya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	a. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan b. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	**Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama** **Jumlah Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan** Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	
		Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pemerintah Daerah memiliki peran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28: 1. Ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam pelaksanaan Program Kartu rakerja dalam bentuk: a. sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja; b. penyediaan data lembaga Pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah; c. penyediaan data kebutuhan tenaga kerja oleh industri di daerah; dan d. fasilitasi pendaftaran peserta dan	a. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja b. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 c. Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** **Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota** Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	**Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan** **Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis** Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
		pemilihan jenis Pelatihan pada Program Kartu Prakerja. 2. Ayat (2) Selain bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan: a. sistem berbagi biaya pendanaan Program Kartu Prakerja; dan/atau b. pendampingan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja dan usaha kecil menengah. 3. Ayat (3) Segala biaya yang diperlukan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.				
6	Pertanian	Pengawasan terhadap produksi/pengadaan, peredaran/ distribusi dan penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu atau terkoordinasi antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP), antara lain: 1) koordinasi dan evaluasi tingkat provinsi/kabupaten/kota; 2) pemantauan dan evaluasi KPPP; 3) pengambilan/pembelian sampel pupuk dan pestisida; dan 4) pengujian/analisa sampel pupuk dan pestisida.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian c. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 142/Kpts/OT.050/2/2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	**Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh** **Tingkat Produktivitas Pertanian** **Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani** **Jumlah penyuluh yang mengikuti bimtek/pelatihan** Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kegiatan pengawasan juga melibatkan Aparat Penegak Hukum dengan tujuan peredaran/ distribusi serta penggunaan pupuk dan pestisida tepat guna dan tepat sasaran
		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas perkebunan, penyelesaian	Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana			Kota Surabaya tidak memiliki kebun kelapa

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
		status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, gubernur, bupati dan wali kota daerah penghasil sawit menyusun rencana aksi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta membentuk tim pelaksana daerah dalam rangka pelaksanaan rencana aksi sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024	Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024			sawit
		Fasilitasi pembentukan korporasi petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Pertanian	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	**Tingkat Produktivitas Pertanian** **Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani** Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
		Penerapan Good Agricultural Practice pada tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan	a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan c. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** Pengembangan	**Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh** **Tingkat Produktivitas Pertanian** **Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani** **Jumlah penyuluh yang mengikuti bimtek/pelatihan** Jumlah Kelembagaan	

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			d. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik	Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
		Pengendalian penyebaran Organisme Pengganggu Tanaman dan Dampak Perubahan Iklim pada tanaman serta penyakit pada hewan melalui pencegahan, pengobatan dan penanganan dampak.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2018 tentang Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan**	
				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan**	
				Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Tingkat Produktivitas Pertanian**	
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani**	
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan	

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Petani di Kecamatan dan Desa	Kapasitasnya	
7	Kehutanan	Pemerintah Daerah agar melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui manajemen lapangan yang terkonsolidasi dan terorganisasi, melakukan deteksi dini, dan monitoring di area-area yang rawan Hotspot dengan sistem dashboard.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan	N/A	N/A	Pemerintah Kota Surabaya tidak menetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan dalam bagian Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan kondisi geografis
		Melaksanakan monitoring dan pengawasan, memberikan pendidikan yang berkesinambungan kepada masyarakat, perusahaan, dan koorporasi, terutama di daerah dengan kecenderungan peningkatan hotspot, mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk turut menjelaskan kepada masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan bagi kesehatan dan ekonomi.		N/A	N/A	Pemerintah Kota Surabaya tidak menetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan dalam bagian Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan kondisi geografis
		Pencegahan dan menangani karhutla untuk masa yang akan datang baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.		N/A	N/A	Pemerintah Kota Surabaya tidak menetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan dalam bagian Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan kondisi geografis
		Pemerintah Daerah menganggarkan dukungan pembiayaan pengelolaan perhutanan sosial yang bersumber dari APBD dan dapat memberikan insentif kepada pihak yang dapat memulihkan, mempertahankan, dan/atau melestarikan hutan di dalam dan di luar kawasan hutan	Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan	N/A	N/A	Pemerintah Kota Surabaya tidak menetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan dalam bagian Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan kondisi geografis
		Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan berupa hutan dan lahan, ekosistem mangrove dan ekosistem gambut	a. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan b. Peraturan Pemerintah Nomor	N/A	N/A	Pemerintah Kota Surabaya tidak menetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan dalam bagian

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			23 Tahun 2021 tentang Penyelanggaraan Kehutanan			Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan kondisi geografis
		Penyusunan RPHJP (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) pada KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) dalam rangka pengelolaan hutan lestari dalam mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan dan sebagai salah satu kinerja KPH	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.	N/A	N/A	Pemerintah Kota Surabaya tidak menetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan dalam bagian Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan kondisi geografis
		Pencapaian NDC (*Nationally Determined Contribution)* Indonesia dari sektor FOLU (*Forest and Others Land Use*) melalui aksi pegurangan emisi, mempertahankan serapan, meningkatkan serapan karbon, serta pengembangan kelembagaan.	a. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional b. PermenLHK Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Emisi Karbon	N/A	N/A	Pemerintah Kota Surabaya tidak menetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan dalam bagian Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan kondisi geografis
		Pelaksanaan Kebijakan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca, peningkatan ketahanan Iklim dan Nilai Ekonomi Karbon secara Nasional berdasarkan baseline 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Target penurunan emisi GRK pada 5 (lima) sektor : energi (11%), limbah (0,38%), IPPU (0,1%), Pertanian (0,32%), Dan Kehutanan (17,2%).	a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreeement to the United Climate Charge (Persetujuan Paris atas konvensi Kerangka kerja PBB mengenai Perubahan Iklim) c. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untUK Pencapaian	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	**Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik** **Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu** **Jenis kualitas lingkungan yang dimonitoring selama 1 tahun** **jumlah rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim** Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan	

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Target Kontribusi Yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional	Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Jumlah Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yang digunakan untuk menentukan ISPU kota dalam 1 tahun**	
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	**Persentase kelestarian keanekaragaman hayati**	
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi**	
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN	**Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang**	

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	**diterbitkan**	
				Penyimpanan Sementara Limbah B3	**Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan**	
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	**Persentase ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan**	
				Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah obyek kegiatan usaha dan titik IPAL yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya**	
				Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
8	Pangan	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) melalui penetapan dan penyelenggaraan CPPD (termasuk pengadaan, pengelolaan, penyaluran CPPD)	a. Undang-undang Nomor18 tahun 2012 tentang Pangan b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Indeks Kecukupan Pangan Pokok**	
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**Jumlah jenis pemantauan stok, pasokan dan harga pangan**	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	
		Pemantapan ketersediaan pangan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui pemantauan ketersediaan, pasokan dan harga pangan, penyusunan neraca pangan, penguatan sarana prasarana logistik pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan	a. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional b. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, Dan Daging Ayam Ras c. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Indeks Kecukupan Pangan Pokok**	
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**Jumlah jenis pemantauan stok, pasokan dan harga pangan**	
				Koordinasi dan	Jumlah koordinasi dan	

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula d. Konsumsi Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen e. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras	Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	
		Penyusunan rencana aksi pangan dan gizi sebagaidokumen perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengendalian kebutuhan dan kecukupan pangan dan gizi di daerah	a. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Peraturan b. Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Indeks Kecukupan Pangan Pokok**	
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**Jumlah jenis pemantauan stok, pasokan dan harga pangan**	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	
		Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) serta penyelenggaraan sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi (SKPG)	a. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi c. Peraturan Badan Pangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Indeks Kecukupan Pangan Pokok**	
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan	**Jumlah jenis pemantauan stok, pasokan dan harga**	

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan d. Peraturan Badan Pangan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi	**Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**pangan**	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	
		Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	a. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Indeks Kecukupan Pangan Pokok**	
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**Jumlah jenis pemantauan stok, pasokan dan harga pangan**	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Jenis pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal**	
				Pemberdayaan Masyarakat dalam	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman**	
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar**	
				Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
9	Pertanahan	Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah yang bersumber dari APBD/APBN, instansi yang memerlukan tanah berkoordinasi dengan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi urusan pertanahan dalam tahap perencanaan untuk ketersediaan data dan informasi yang diperlukan dalam Dokumen Perencanaan Pengadaaan Tanah.	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum**	
				Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah lokasi pengadaan/pembelian tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum**	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
10	Lingkungan Hidup	Dalam rangka memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi	a. PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN**	**Persentase kelestarian keanekaragaman hayati**	

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
		dalam pembanguann suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, Pemerintah Daerah agar dapat menyelenggarakan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Lingkungan Hidup Strategis b. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah c. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD	**HAYATI (KEHATI)**		
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun**	
				Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	
		Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar dapat melakukan pengelolaan sampah meliputi: 1) Penanganan sampah; dan 2) Pengurangan sampah.	a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase pengangkutan sampah ke TPA ≤ 1 hari**	
				Pengelolaan Sampah	**Jumlah jenis kegiatan penanganan sampah yang dilakukan**	
				Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
		Dalam rangka pengarusutamaan pelestarian keanekaragaman hayati untuk tercapainya keseimbangan dan keterpaduan dalam pembanguan berkelanjutan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar: 1) Menyusun Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Nasional untuk Provinsi dan berdasarkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Provinsi untuk Kabupaten/Kota 2) Memastikan pelaksanaan	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati.	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase kelestarian keanekaragaman hayati**	
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun**	
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	
				Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan	

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
		pengelolaan keanekaragaman hayati dalam Dokumen Perencanaan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 3) Mendorong partisipasi masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati; dan 4) Melaporkan pelaksanaan keanekaragaman hayati daerah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta melaporkan pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati daerah kabupaten/kota kepada Gubernur.			Kabupaten/Kota	
		Dalam rangka Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya agar melakukan pemantauan terhadap Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).	a. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik**	
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Jenis kualitas lingkungan yang dimonitoring selama 1 tahun**	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
		Pemerintah daerah sesuai kewenangannya agar melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN**	**Persentase ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan**	

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Hidup	**LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**		
				Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	
				Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	
				Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
		Dalam rangka mengendalikan perubahan iklim, pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan ketahanan iklim dan nilai ekonomi karbon secara nasional berdasarkan baseline 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar mengalokasikan anggaran untuk mendukung kewajiban Pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi	a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreeement to the United Climate Charge (Persetujuan Paris atas konvensi Kerangka kerja PBB mengenai Perubahan Iklim) c. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu**	
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**jumlah rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim**	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
		gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 20C (dua derajat celcius) hingga 1,50C (satu koma lima derajat celcius) dari tingkat suhu praindustrialisasi dengan memedomani pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Climate Chang*e (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional	Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional	Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dalam rangka meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan peningkatan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi dilaksanakan dengan strategi: 1. Kemitraan usaha antara usaha mikro – kecil dan usaha menengah – besar melalui : a. Pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk; b. Perluasan kemitraan usaha; dan c. Penguatan kapasitas kelembagaan dan bermitra. 2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha melalui : a. Pendampingan umkm untuk mengakses kredit; dan b. Pengembangan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM.	a. PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha**	
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan**	
				Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	
				Pemberdayaan Kelembagaan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima	

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
		3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi melalui : a. Peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi; b. pengembangan jangkauan dan cakupan usaha; dan c. pengembangan inovasi koperasi. 4. Peningkatan penciptaan start up dan peluang usaha melalui: a. Pelatihan kewirausahaan; b. Inkubasi usaha; c. Penguatan kapasitas layanan usaha; d. Pengembangan sentra industry kecil dan menengah; e. Pembinaan wirausaha 5. Peningkatan nilai tambah usaha sosial		Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	
		Untuk itu, Kebijakan Prioritas sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui program/kegiatan, memuat: 1. Fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi KUMKM. 2. Akses perluasan pasar dan digital: - 40% belanja pengadaan barang/jasa pemerintah intervensi untuk UMKM; - 30% infrastruktur publik untuk penyediaan tempat promosi dan pengembangan KUMKM; - Fasilitasi digitalisasi KUMKM untuk pengembangan usaha; 3. Fasilitasi akses Pembiayaan UMKM melalui kredit usaha rakyat (KUR) dan KUR klaster, dilakukan melalui: - sosialisasi program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM; - pelaksanaan program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM; dan	PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha**	
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan**	
				Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
		- monitoring dan evaluasi KUR dan KUR klaster di daerah; 4. Perluasan kemitraan melalui pola: - Inti plasma; - Subkontrak; - Waralaba; - Perdagangan umum; - Distribusi dan keagenan; - Rantai pasok; dan - Bentuk kemitraan lainnya. 5. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM melalui: - Peningkatan kapasitas bagi koperasi dan usaha mikro dan kecil melalui pelatihan dan pendampingan; dan - Penyelenggaraan inkubasi usaha. 6. Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil			
12	Kebudayaan	Memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional, yaitu: 1) Upaya pemajuan objek kebudayaan Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan; 2) Upaya pelestarian cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan; 3) Upaya pengelolaan museum melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan	a. UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman b. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya c. UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan d. PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum e. PP Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan f. PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya g. Perpres Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan PPKD dan Strategi Kebudayaan; h. Keppres Nomor 21 tahun 2022 tentang Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional; i. Perpres Nomor 114 Tahun	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase museum yang berhasil dikembangkan**	
				Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	**Jumlah museum dan bangunan sejarah yang dikelola**	
				Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	
				Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
		peraturan perundang-undangan; 4) Upaya peningkatan tata kelola melalui penyusunan dan pemantauan evaluasi Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang dijadikan rujukan penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran daerah; 5) Upaya pemutakhiran data dan informasi terkait OPK (Objek Pemajuan Kebudayaan), Cagar Budaya, tenaga dan lembaga kebudayaan dalam aplikasi Data Pokok Kebudayaan.	2022 tentang Strategi Kebudayaan			
		1. Agar Daerah Provinsi dapat mendukung dan melaksanakan kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) setiap tahunnya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN). 2. Mendukung penguatan kebudayaan dalam pendidikan melalui integrasi kebudayaan dalam muatan lokal pendidikan.	a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan b. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dan Strategi Kebudayaan c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil**	
				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian tradisional**	
				Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	
13	Kelautan dan Perikanan	Dalam rangka pengendalian kawasan budidaya perikanan danau sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 angka (5) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Danau Toba dan Sekitarnya, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan 7 (tujuh) kabupaten sekitar danau toba terdiri atas Kabupaten Toba, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan,	Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Danau Toba dan Sekitarnya			Bukan termasuk area kewenangan Kota Surabaya

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
		Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Dairi wajib menyusun rencana pengendalian kawasan budidaya perikanan danau termasuk rencana penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) beserta pemberian insentif kepada masyarakat berupa pemberian kompensasi yang dialokasikan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam RKPD.				
		Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Fasilitasi pembuatan Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) termasuk migrasi kartu nelayan menjadi kartu KUSUKA dalam rangka membantu nelayan mengakses bantuan pemerintah seperti asuransi bagi nelayan kecil, bantuan sarana penangkapan ikan, akses permodalan, sehat dan lain-lain sesuai dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.	a. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah pembudidaya perikanan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan**	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Jumlah laporan penyediaan sarana budidaya ikan**	
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk: 1) pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, SDM pengawasan, sarana dan prasarana pengawasan, pengawasan pelaku usaha kelautan dan perikanan serta peraturan daerah terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; 2) penyusunan dan sosialisasi Perda RZWP-3-K yang terintegrasi dengan RTRW; 3) monitoring pelaksanaan implementasi RZWP-3-K, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diturunkan menjadi Peraturan	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja b. Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah pembudidaya perikanan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan**	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Jumlah laporan penyediaan sarana budidaya ikan**	
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif**	

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
		Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; 4) Pengadaaan sarana dan prasarana produksi garam, sarana dan prasarana pasca produksi garam, peningkatan kualitas SDM produksi Garam untuk mendukung percepatan pembangunan Pergaraman untuk memenuhi kebutuhan Garam nasional sesuai dengan Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional; dan 5) Pengelolaan kawasan konservasi daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah sentra ikan yang dikelola**	
				Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	
		Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk: 1) penyediaan data pelaku usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, petambak garam dan pengolah hasil kelautan dan perikanan serta serapan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan lainnya; 2) penyediaan data produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, stok garam dan nilai konsumsi ikan; 3) penyediaan SDM enumerator dan proses pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui satu data KUSUKA serta penyelesaian validasi nasional tepat waktu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data	a. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan**	
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pembudidaya Pekarangan**	
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
		Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.				
14	Perencanaan	Pemerintah Daerah pada tahun 2024 melaksanakan Musrenbang RPJPD 2025-2045	Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 11 ayat (4)	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan**	
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun**	
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan**	
				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah**	
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Pembangunan Daerah		
		Pemerintah daerah pada Tahun 2024 menyusun RPJMD Teknokratik 2025-2030	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan**	
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun**	
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan**	
				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah**	
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
		Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan**	
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun**	
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan**	
				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah**	
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	
15	Kepegawaian serta	Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dalam upaya	a. Pasal 69 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang	**PROGRAM PENGEMBANGAN**	**Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat**	

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	Pendidikan dan Pelatihan	peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah memprioritaskan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi, yaitu: 1. Penyediaan anggaran prioritas pengembangan SDM aparatur yang berbasis kompetensi dan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, pejabat dan perangkat daerah, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. 2. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas. 3. sertifikat mengikuti pengembangan kompetensi dan sertifikat Kompetensi Pemerintahan menjadi salah sau syarat pengangkatan dalam jabatan.JPT madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas. 4. pemenuhan kompetensi jabatan fungsional binaan Kemendagri melalui pengembangan komptensi dan uji kompetensi antara lain: Polisi Pamong Praja (Satpol PP),	Aparatur Sipil Negara b. Pasal 233 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Pasal 203 Ayat (3), Ayat (4), Dan (4a) PP No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). d. Pasal 40 PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK e. Pasal 17 Ayat (5) Permendagri No. 89 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. f. Pasal 17 ayat (5) Permendagri No 89 Tahun 2022 tentang Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. h. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.	**SUMBER DAYA MANUSIA**	**setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning**	
				Pengembangan Kompetensi Teknis	**Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis**	
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**Jumlah ASN yang mendapatkan fasilitasi Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	

No	Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), Aparatur Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, Administrator Data Base Kependudukan, dan Operator sistem Informasi Administrasi Kependudukan, serta Penata Perizinan. 5. Prioritas tata kelola Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatan Sistem Pengendalian Intern dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan kompetensi bagi Dewan Pengawas dan Komisaris BUMD.				
16	Pengelolaan Perbatasan	1. Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan pada masing- masing OPD terkait, dan berdasarkan RPJMN 2020- 2024, fokus pengelolaan kawasan perbatasan berada di 222 Kecamatan yang merupakan Lokasi Prioritas (Lokpri). 2. Dukungan pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatannya.	a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara; b. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024; c. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024.			Kota Surabaya tidak termasuk dalam Kawasan perbatasan Negara

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2024 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel IV.6
Keterkaitan Program Pembangunan Nasional dengan RKPD Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	100%	209 Peserta Didik	209 Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
		Jumlah Warga Negara Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	100%	85997 Peserta Didik	37.309 Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
					39574 Peserta Didik	16.260 Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
		-	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	100%	35 Peserta Didik	35 Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
		Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan	-	64,83%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		Asesmen Nasional					
		-	Rata-rata kompetensi Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	56,48%	3135 Orang	3135 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	54,56%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		-	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	41,72%	3135 Orang	3135 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
		Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	64,18%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		-	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	66,14%	1013 Orang	1013 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	54,00%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		-	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	56,78%	1013 Orang	1013 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
			Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan akreditasi B	63,64	N/A	N/A	sesuai Berita Acara Rakortekbang bidang pendidikan tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Pemda Prov Jatim, indikator ini sudah melebur/update menjadi indikator "Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B"
		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	-	65,96%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	-	69,70%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
			Tingkat pertumbuhan pendidik PAUD S1 dan DIV	69	N/A	N/A	sesuai Berita Acara Rakortekbang bidang pendidikan tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Pemda Prov Jatiml, indikator ini sudah melebur/update menjadi indikator "Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV"
		Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	-	62,84%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
			Rasio pengawas PAUD	3.2	N/A	N/A	sesuai Berita Acara Rakortekbang bidang pendidikan tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Pemda Prov Jatim, indikator ini sudah tidak dimunculkan lagi
		Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	-	53,61%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	-	61,79%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	-	56,31%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	-	90,00%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	79,00%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		-	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	62,13%	2355 Satuan Pendidikan	2355 Satuan Pendidikan	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		-	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	64,00%	3092 Orang	3092 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
		Iklim keamanan SMA	-	84,78%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		-	Iklim keamanan SD	88,61%	259 Satuan Pendidikan	259 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah
		Iklim keamanan SMK	-	85,31%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		-	Iklim keamanan SMP	83,55%	256 Satuan Pendidikan	256 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan
		Iklim keamanan SDLB	-	87,88%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		-	Iklim kebinekaan SD	89,75%	259 Satuan Pendidikan	259 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah
		Iklim keamanan SMPLB	-	85,73%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		-	Iklim kebinekaan SMP	79,53%	256 Satuan Pendidikan	256 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan
		Iklim keamanan SMALB	-	84,25%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		-	Iklim inklusivitas SD	79,49%	259 Satuan Pendidikan	259 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah
		Iklim kebinekaan SMA	-	85,33%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		-	Iklim inklusivitas SMP	79,46%	256 Satuan Pendidikan	256 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan
		Iklim kebinekaan SMK	-	86,67%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Iklim kebinekaan SDLB	-	92,39%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Iklim kebinekaan SMPLB	-	80,36%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Iklim kebinekaan SMALB	-	78,51%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Iklim Inklusivitas SMA	-	81,55%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Iklim Inklusivitas SMK	-	80,82%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Iklim Inklusivitas SDLB	-	83,58%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi. Kota Surabaya mendukung urusan tersebut pada indikator lainnya
		Iklim inklusivitas SMPLB	-	86,48%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Iklim inklusivitas SMALB	-	85,98%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
2	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	-	79%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
3	Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	54.56	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
4	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	54	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
5	Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	-	56.31	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
6	Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	-	62.84	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
7	Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	-	53.61	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
8	Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	-	61.79	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
9	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	-	90%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
10	ata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	-	64.83	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
11	Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	-	65.96	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
12	Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	-	69.70	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
13	Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	64.18	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
14	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	N/A	N/A	sesuai Berita Acara Rakortekbang bidang pendidikan tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Pemda Prov Jatim, indikator ini sudah melebur/update menjadi indikator "Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)"
15	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	N/A	N/A	sesuai Berita Acara Rakortekbang bidang pendidikan tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Pemda Prov Jatim, indikator ini sudah melebur/update menjadi indikator "Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)"

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
1	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	100%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	-	100%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
2	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	100%	Paripurna	Paripurna	Hasil Penilaian Akreditasi RSUD dr. Mohamad Soewandhie
					Paripurna	Paripurna	Hasil Penilaian Akreditasi RSUD Bhakti Dharma Husada
		Persentase FKTP terakreditasi		100%	145 Dokumen	145 Dokumen	Jumlah dokumen pelaporan akreditasi puskesmas yang disusun
					56%	56%	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama
					56%	56%	Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama
		Persentase Puskesmas tersedia obat esensial	Persentase Puskesmas tersedia obat esensial	96%	100%	100%	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan
		Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun	Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun	21.8%	2.038.597 Orang	1.923.364 Orang	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		Kab/Kota yang mencapai eliminasi kusta	-	514 Kabupaten/Kota	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Presentase Kab/Kota yang mencapai target Imunisasi rutin	-	95%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	14%	7,14%	7,14%	Prevalensi Balita Stunting
		Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	83%	56%	56%	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama
		Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria	Jumlah Kecamatan yang Mencapai Eliminasi Malaria	405 Kabupaten/Kota	10 orang	10 orang	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria
		Jumlah Kab/kota yang menerapkan KTR	-	474 Kabupaten/Kota	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (*Treatment Coverage*)	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (*Treatment Coverage*)	90%	60512 Orang	78.502 Orang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
		Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	95%	52741 Orang	49485 Orang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	100%	63 Puskesmas	63 Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi
					2 kegiatan	2 kegiatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi di puskesmas
		Prevalensi *Wasting* (Kurus Dan Sangat Kurus) Pada Balita (Persen)	Prevalensi *Wasting* (Kurus Dan Sangat Kurus) Pada Balita (Persen)	7%	63 Puskesmas	63 Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
					2 kegiatan	2 kegiatan	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat di puskesmas
					0,102%	0,102%	Prevalensi Balita Gizi Buruk
		Persentase Penurunan Jumlah Kematian Ibu	Persentase Penurunan Jumlah Kematian Ibu	27.5%	57	57	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH (kelahiran hidup)

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
1	Tersedianya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	90% (termasuk 15% aman)	50 Rumah Tangga	200 Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air	100%	N/A	N/A	Terkait Penyediaan air minum di kota surabaya ditangani oleh PDAM Surya Sembada

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		minum layak	minum layak				
2	Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	60 Materi Teknis	N/A	N/A	Target penyelesaian dan penetapan Perda RTRW Tahun 2023
		Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	102 Materi Teknis	3 Dokumen	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota
		Penyelesaian Materi Teknis RDTR	-	102	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Penetapan RTRW	Penetapan RTRW	58 Perda	N/A	N/A	Target penyelesaian dan penetapan Perda RTRW Tahun 2023
		Penetapan RDTR	Penetapan RDTR	96 Perkada	3 dokumen	3 dokumen	Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau Kajian teknis pendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RrTR) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan
3	Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pelaksanaan Fasilitasi Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada Daerah Aliran Sungai (DAS)	Pelaksanaan Fasilitasi Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada Daerah Aliran Sungai (DAS)	9 Kasus	N/A	N/A	Kota Surabaya tidak memiliki Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada Daerah Aliran Sungai (DAS). Namun Kota Surabaya melakukan Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota guna mencegah adanya Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan	30.45%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
	sanitasi yang layak dan aman	perpipaan	perpipaan				
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	15%	N/A	N/A	Terkait Penyediaan air minum dikota surabaya ditangani oleh PDAM Surya Sembada
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	Penanganan (80%) dan Pengurangan (20%)	N/A	N/A	*inline* dengan indikator "Persentase lokasi/wilayah yang terjaga kebersihannya" pada Sasaran Dinas Lingkungan Hidup, dengan target 99,82%
5	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	Tambahan Debit Air Baku	-	11.43 M^3/Detik	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	143826 Ha	N/A	N/A	Di Kota Surabaya Jaringan Irigasi sudah tidak ada. Sudah berganti menjadi Sistem Drainase
		Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	34125 Ha	N/A	N/A	Di Kota Surabaya Jaringan Irigasi sudah tidak ada. Sudah berganti menjadi Sistem Drainase
		Panjang infrastruktur pengendalian banjir/abrasi di wilayah sungai (WS) kewenangan provisi		35 Km	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
6	Meningkatnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi	Tersedianya data dan informasi jasa konstruksi cakupan wilayah provinsi pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi		1 Laporan	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Jumlah Tenaga kerja konstruksi ahli bersertifikat di wilayah		50 Orang	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		provinsi					
7	Meningkatnya konektivitas wilayah	Persentase kondisi mantap jalan provinsi	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	Provinsi = 75% Kab/Kota = 65%	1.201 lokasi	1.201 lokasi	Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dipelihara
					170.000 m^2	170.000 m^2	Luas jalan yang diperbaiki
					19,00%	19,00%	Persentase panjang jalan kota yang diperbaiki
					45 KM	45 KM	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin
8	Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung secara tertib dan and	Persentase Kabupaten/Kota dengan bangunan gedung yang sudah memenuhi PBG dan SLF	-	100%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
1	Terpenuhinya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat	Persentase warga negara Provinsi korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persentase warga negara korban bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni	100%	95%	95%	Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni
					400 Unit Rumah	1.500 Unit Rumah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Provinsi yang memperoleh fasilitasi	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi	100%	100%	100%	Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		penyediaan rumah yang layak huni	penyediaan rumah yang layak huni				
2	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Luas Kawasan permukiman kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	75.007,37 Ha	N/A	N/A	Berdasarkan Berita Acara hasil perhitungan pengurangan luasan kumuh tahun 2019 Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Januari 2019 bahwa pengurangan luasan kumuh di Kota Surabaya terhadap target RPJMN tahun 2015-2019 telah tercapai di tahun 2019 sehingga sisa target luasan kumuh dinyatakan 0 (nol).
		Jumlah Kawasan di Permukiman Kumuh Perkotaan Yang Ditangani Melalui Peremajaan Kota		10 Ha	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Luas kawasan permukiman kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh <10 Ha yang ditangani	1000 Ha	N/A	N/A	Luas kawasan kumuh di Kota Surabaya sudah mencapai 0 Ha
3	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Peningkatan Kualitas		250910 Unit	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui		355387 Unit	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		Peran Masyarakat dan Dunia Usaha					
		Jumlah penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM)/Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)/Sertipikat Hak Satuan Rumah Susun (SHRS)		10000 Persil	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Fasilitasi Pemerintah		261565 Unit	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		-	Berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni (RTLH)	212210 Unit	95%	95%	Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni
					400 Unit Rumah	1.500 Unit Rumah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki
4	Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100%	60%	60%	Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik
		Jumlah Rumah Yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan, Termasuk PSU Kawasan Skala Besar		75000 Unit	N/A	N/A	indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
5	Meningkatnya Fasilitasi	Jumlah Rumah Tangga		220000 Rumah Tangga	N/A	N/A	indikator tersebut merupakan indikator pada

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
	Pembiayaan Penyediaan Perumahan	Berpendapatan Rendah Yang Menerima Bantuan/Subsidi Pembiayaan Perumahan Berupa Bantuan Uang Muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)					provinsi.
		Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Dari Lembaga Keuangan		161540 Rumah Tangga	N/A	N/A	indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
6	Terpenuhinya Rumah Layak dan Terjangkau	Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau	Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau	70%	95%	95%	Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni
					24,59%	24,59%	Persentase tercapainya penyediaan rumah layak huni
					400 Unit Rumah	400 Unit Rumah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
1	Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Persentase Perda dan Perkada yang masih berlaku dan memuat sanksi yang ditegakkan	Persentase Perda dan Perkada yang masih berlaku dan memuat sanksi yang ditegakkan	80%	N/A	N/A	Tidak ada indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024
		Persentase pemberkasan penyidikan oleh PPNS terhadap pelanggaran Perda yang bersanksi pidana	Persentase Perda dan Perkada yang masih berlaku dan memuat sanksi yang ditegakkan	30%	4230 Objek	4230 Objek	Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang ditindak dan diselesaikan
					100%	100%	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti
		Jumlah Satgas Linmas Provinsi yang ditetapkan dengan SK Gubernur	Jumlah Satgas Linmas Provinsi yang ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota	1 Dokumen	N/A	N/A	Tidak ada indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024
		Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan	10 Dokumen	2 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan
		Persentase Aparatur Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	Persentase Aparatur Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat	50%	N/A	N/A	Tidak ada indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
			Fungsional				
		Persentase daerah yang telah memanfaatkan aplikasi pemetaan SDM Satpol PP	Persentase daerah yang telah memanfaatkan aplikasi pemetaan SDM Satpol PP	30%	N/A	N/A	Tidak ada indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024
		Persentase pegawai anggota Satpol PP yang ditingkatkan menjadi pejabat fungsional	Persentase pegawai anggota Satpol PP yang ditingkatkan menjadi pejabat fungsional	40%	N/A	N/A	Tidak ada indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024
		Persentase daerah yang telah menyusun dokumen pemetaan rawan gangguan linmas tingkat kabupaten/kota	Persentase daerah yang telah menyusun dokumen pemetaan rawan gangguan linmas tingkat kecamatan, desa dan kelurahan	20%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Jumlah daerah yang telah membentuk struktur organisasi satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat	Jumlah daerah yang telah membentuk struktur organisasi satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat	50%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Persentase daerah yang memanfaatkan aplikasi Simlinmas (Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Masyarakat)	Persentase daerah yang memanfaatkan aplikasi Simlinmas (Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Masyarakat)	50%	N/A	N/A	Tidak ada indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024
		Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Provinsi yang ditangani	Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kabupaten/Kota yang ditangani	100%	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
							Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
					12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan
					104 Titik/ lokasi	104 Titik/ lokasi	Jumlah lokasi penertiban pelanggaran Perda dan Perkada
					100%	100%	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani
		Persentase ketersediaan Posko Linmas tingkat kab/kota	Persentase ketersediaan Posko Linmas tingkat kecamatan	20%	N/A	N/A	Tidak ada indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024
		Jumlah dokumen pemetaan rawan gangguan trantibum Provinsi yang ditetapkan	Jumlah dokumen pemetaan rawan gangguan trantibum Kabupaten/Kota yang ditetapkan	1 Dokumen	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS	Prov = 5 Orang Kab/kota	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
				= 7 Orang			Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda
					75 Orang	75 Orang	Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan kapasitas
					100%	100%	Persentase PPNS yang dibina
		Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan kapasitasnya	Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan kapasitasnya	100%	978 Orang	978 Orang	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya
					192 kali	192 kali	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja
					100%	100%	Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya
2	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	Jumlah daerah yang dilakukan pendampingan penyusunan dokumen SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah	-	100%	90 Kegiatan	90 Kegiatan	Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi
		-	Jumlah dokumen SOP penanggulangan kebakaran dan	3 Dokumen	N/A	N/A	Tidak ada indikator yang sesuai di Perubahan RKPD

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
			penyelamatan di daerah yang disusun				2024
		Persentase pendampingan pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	Persentase pendampingan pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	Prov = 100% Kab/Kota = 50%	900 Orang	900 Orang	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap tahunnya
		Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100%	900 Orang	900 Orang	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap tahunnya
		Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	-	100%	90 Kegiatan	90 Kegiatan	Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi
		-	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	50%	N/A	N/A	Tidak ada indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024
		Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran yang	25%	10 Orang	10 Orang	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
			ditingkatkan kapasitasnya				Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
					656 Petugas	656 Petugas	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilatih
3	Meningkatnya manajemen bencana yang terintergrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Jumlah aparatur terkait kebencanaan di provinsi/kabupaten/kota yang memperoleh pelatihan pencegahan dan mitigasi dan/atau gladi kesiapsiagaan	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan, pencegahan dan mitigasi dan/atau gladi kesiapsiagaan	25%	1.650 Kawasan	1.650 Kawasan	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana
					100%	100%	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana
		Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	100%	11.000 Orang	11.000 Orang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana
					10 jenis	10 jenis	Jenis kejadian bencana yang ditangani dalam Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
					100%	100%	Persentase

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
							pengaduan kedaruratan yang direspon kurang dari 7 menit
		Persentase pendampingan pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas kabupaten/kota	Persentase pengumpulan pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana per jenis ancaman bencana yang menjadi prioritas kabupaten/kota	100%	31 Kawasan	31 Kawasan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
					100%	100%	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana
		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal meliputi dokumen pra bencana, tanggap darurat bencana dan pascabencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal meliputi dokumen pra bencana, tanggap darurat bencana dan pascabencana	100%	N/A	N/A	Tidak terdapat indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024
		Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	Persentase penanganan tangap darurat bencana	100%	467 Orang	467 Orang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		Jumlah personil TRC tingkat provinsi yang ditingkatkan kapasitas teknis manajerial	Jumlah personil TRC yang dikembangkan teknis manajerialnya	25%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Jumlah orang yang tersedia	Jumlah orang yang	30%	1.650	1.650	Jumlah warga negara

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		untuk melaksanakan sosialisasi KIE rawan bencana lintas kabupaten/kota	mendapatkan sosialisasi KIE rawan bencana		Kawasan	Kawasan	termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
1	Tersedianya Data Fakir Miskin	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	70%	12 laporan	12 laporan	Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR
		Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	514 Unit	712.975 Orang	116.945 Orang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata
					12 laporan	12 laporan	Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR
					87%	87%	Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam DTKS	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam DTKS	200 Orang	712.975 Orang	116.945 Orang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata
					12 laporan	12 laporan	Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR
					87%	87%	Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial
		Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan layanan terpadu perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terintegrasi *command center*	-	514 Kabupaten/Kota	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		-	Jumlah Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan layanan terpadu perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terintegrasi *command center*	864 Desa/Kelurahan	4716 orang	8.150 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota
					12 laporan	12 laporan	Jumlah laporan pemberian layanan kedaruratan

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		Jumlah PSKS Perorangan yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial sesuai standar	Jumlah PSKS Perorangan yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial sesuai standar	7230 Orang	11 Lembaga	8 Lembaga	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
					6 jenis	6 jenis	Jumlah jenis PSKS perorangan yang dibina
					88,24%	88,24%	Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial
2	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Jumlah penerbitan ijin pengumpulan sumbangan lintas daerah Kab/Kota dalam satu daerah provinsi	-	38 Surat Keputusan	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		-	Jumlah penerbitan ijin pengumpulan sumbangan dalam daerah Kab/Kota	514 Surat Keputusan	N/A	N/A	Tidak ada indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024
		Jumlah PSKS Perorangan yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial sesuai	Jumlah PSKS Perorangan yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial sesuai standar	10230 Orang	11 Lembaga	8 Lembaga	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		standar			6 jenis	6 jenis	Jumlah jenis PSKS perorangan yang dibina
					88,24%	88,24%	Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial
		Jumlah SDM Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Profesional	Jumlah SDM Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Profesional	2000 Orang	583 Orang	583 Orang	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		Persentase SDM PKH yang Melaksanakan P2K2	Persentase SDM PKH yang Melaksanakan P2K2	100%	12 laporan	12 laporan	Jumlah laporan koordinasi dan monitoring intervensi sosial
		Jumlah KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako	Jumlah KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako	18800000 KPM	83.899 KPM	42.014 keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial bersyarat (PKH)	10000000 KPM	83899 keluarga	42.014 keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		bersyarat (PKH)					Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
					87%	87%	Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial
					88,50%	88,50%	Persentase penduduk miskin yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial
		Jumlah KPM yang dirujuk untuk mendapatkan pendampingan usaha	Jumlah KPM yang dirujuk untuk mendapatkan pendampingan usaha	7500 KPM	2229 Orang	1071 Orang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		Jumlah lembaga di bidang kesos yang mendapatkan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pelayanan	Jumlah lembaga di bidang kesos yang mendapatkan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pelayanan	850 Lembaga	11 Lembaga	8 Lembaga	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
		Jumlah daerah yang melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin tanda daftar lembaga di bidang kesejahteraan sosial	Jumlah daerah yang melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin tanda daftar lembaga di bidang kesejahteraan sosial	38 Provinsi	363 orang	852 orang	Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS kelembagaan
					11 Lembaga	8 Lembaga	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
							Kabupaten/Kota
		Jumlah TJSLBU (Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha) yang mendapatkan penguatan	Jumlah TJSLBU (Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha) yang mendapatkan penguatan	200 Badan Usaha	363 orang	852 orang	Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS kelembagaan
					88.24 %	88.24 %	Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial
					11 Lembaga	8 Lembaga	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
		Jumlah daerah yang melaksanakan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial	Jumlah daerah yang melaksanakan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial	38 Provinsi	88.24 %	88.24 %	Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial
		-	Jumlah paket bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	514 Paket	12 kali	12 kali	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Anak
					12 kali	12 kali	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Lanjut Usia

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
					12 kali	12 kali	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas
		-	Jumlah Warga KAT yang mendapatkan pemberdayaan	2847 KK	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi. Kota Surabaya tidak memiliki Warga KAT (Komunitas Adat Terpencil)
3	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	100%	100%	100%	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	-	100 Orang	23364 Orang	2171 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	-	100 Orang	100%	100%	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		Jumlah penyandang disabiltas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	-	50 Orang	100%	100%	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	-	2720 Orang	795 Orang	1299 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	-	1360 Orang	795 Orang	1299 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	100%	100%	100%	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
		Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket	-	3400 Orang	23364 Orang	2171 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		permakanan di dalam panti sesuai standar gizi					Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota
		Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	-	100 Orang	100%	100%	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
		Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	-	1700 Orang	130 Orang	100 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota
		Jumlah Anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti	-	100 Orang	100%	100%	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
		Jumlah Anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	-	680 Orang	795 Orang	1299 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	-	340 Orang	795 Orang	1299 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	100%	100%	100%	Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	-	3400 Orang	23364 Orang	2171 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	-	100 Orang	100%	100%	Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan dan kesehatan dasar	Jumlah Lanjut Usia Terlantar diluar panti yang mendapatkan akses ke layanan dan kesehatan dasar	3400 Orang	130 Orang	100 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		Jumlah Lanjut Usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	-	50 Orang	100%	100%	Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
		Jumlah Lanjut Usia terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	Jumlah Lanjut Usia terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	25 Orang	795 Orang	1299 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	-	10 Orang	795 Orang	1299 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan	-	2 Orang	4716 Orang	8150 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	100%	100%	100%	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	-	100 Orang	23364 Orang	2171 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	-	100 Orang	100%	100%	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	-	100 Orang	100%	100%	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
		Jumlah Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di dalam panti	-	100 Orang	100%	100%	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	-	340 Orang	130 Orang	100 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yg mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	-	25 Orang	795 Orang	1299 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	-	25 Orang	795 Orang	1299 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	-	136 Unit	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	-	68 Alat	1000 Orang	1810 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		Jumlah paket perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	-	136 Paket	100%	100%	Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					100%	100%	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					100%	100%	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					100%	100%	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
		Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	-	1 Paket	1000 Orang	1810 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
					215 Orang	230 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
							Kabupaten/Kota
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	-	136 Paket	100%	100%	Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					100%	100%	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					100%	100%	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					100%	100%	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	-	1 Paket	100%	100%	Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
					100%	100%	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					100%	100%	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					100%	100%	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
		Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	-	2 Orang	6 jenis	6 jenis	Jumlah jenis PSKS perorangan yang dibina
		-	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gepeng	100%	100%	100%	Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
			di Luar Panti		100%	100%	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					100%	100%	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					100%	100%	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
		-	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gepeng yang dijangkau	200 Orang	100%	100%	Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					100%	100%	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					100%	100%	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
							memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					100%	100%	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
		-	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gepeng yang dirujuk	25 Orang	100%	100%	Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					100%	100%	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					100%	100%	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					100%	100%	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		-	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	100 Orang	23364 Orang	2171 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota
		-	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gepeng yang menerima paket sandang	100 Orang	100%	100%	Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					100%	100%	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					100%	100%	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					100%	100%	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		-	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gepeng yang memanfaatkan alat bantu	50 Orang	1000 Orang	1810 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
		-	Jumlah paket alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	514 Paket	215 orang	230 orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
					100%	100%	Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					130 orang	100 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota
					100%	100%	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					1000 orang	1810 orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
							Kabupaten/Kota
					100%	100%	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					31,5%	31,5%	Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat
		-	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan di rumah singgah/shelter	50 Orang	215 orang	230 orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
					100%	100%	Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					130 orang	100 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
					100%	100%	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					1000 orang	**1810** orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
					100%	100%	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					31,5%	31,5%	Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat
		-	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia di rumah singgah/shelter	514 Paket	215 orang	230 orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
					100%	100%	Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
					130 orang	100 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota
					100%	100%	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					1000 orang	1810 orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
					100%	100%	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					31,5%	31,5%	Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat
		-	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan	200 Orang	1000 Orang	1810 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
			Gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial di Keluarga Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial				Kabupaten/Kota
					215 orang	230 orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
		-	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	200 Orang	100%	100%	Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					100%	100%	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					100%	100%	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial
					100%	100%	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		-	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gepeng yang mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	50 Orang	130 Orang	100 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota
		-	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gepeng yang mendapatkan layanan penulusuran keluarga	50 Orang	795 Orang	1299 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		-	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	50 Orang	795 Orang	1299 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		-	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	514 Unit	N/A	N/A	
		-	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau Relawan Sosial yang disediakan	2 Orang	6 jenis	6 jenis	Jumlah jenis PSKS perorangan yang dibina

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		Persentase (%) penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	100%	12 kali	12 kali	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas
		Persentase (%) anak yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	Persentase (%) anak yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	100%	12 kali	12 kali	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Anak
		Persentase (%) lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	Persentase (%) lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	100%	12 kali	12 kali	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Lanjut Usia
		Persentase (%) korban perdagangan orang dan migran, tuna sosial, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan dan/atau korban tindak kekerasan yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	Persentase (%) korban perdagangan orang dan migran, tuna sosial, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan dan/atau korban tindak kekerasan yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	100%	12 kali	12 kali	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial
		Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan	Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan	204330 Jiwa	4716 Orang	8150 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	Kesiapsiagaan Dan Mitigasi				Kabupaten/Kota
		Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan	Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan	1000 Orang	291 Orang	291 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
					291 Lembaga	291 Lembaga	Jumlah Lembaga RW di Kota Surabaya yang Mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Jumlah Kelompok Masyarakat Di Lokasi Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pencegahan Terorisme	Jumlah Kelompok Masyarakat Di Lokasi Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pencegahan Terorisme	250 Kelompok Masyarakat	1.650 Kawasan	1.650 Kawasan	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana
4	Terpenuhi Kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat Dan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah	100%	467 Orang	467 Orang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
	Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	tanggap darurat bencana kabupaten/kota				Bencana
		Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket permakanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket permakanan	135000 Orang	467 Orang	467 Orang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	135000 Orang	467 Orang	467 Orang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan tempat penampungan	Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan tempat penampungan	135000 Orang	467 Orang	467 Orang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
					11.000 Orang	11.000 Orang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana
		Jumlah korban bencana kelompok rentan	Jumlah korban bencana kelompok rentan	6750 Orang	467 Orang	467 Orang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
							Bencana
		Jumlah korban bencana yang meneriman pelayanan dukungan psikososial	Jumlah korban bencana yang meneriman pelayanan dukungan psikososial	5000 Orang	11.000 Orang	11.000 Orang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	514 Tim	100%	100%	Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon kurang dari 7 menit
		-	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus pelayanan kedaruratan yang dimiliki	514 Unit	N/A	N/A	Tidak terdapat indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024
5	Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana Sosial dan non alam yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	Jumlah Korban Bencana Sosial dan non alam yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	50000 Orang	11.000 Orang	11.000 Orang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana
		Jumlah Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial	Jumlah Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial	25000 Orang	31 Kawasan	31 Kawasan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
6	Pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Jumlah Tagana yang meningkat kompetensinya	Jumlah Tagana yang meningkat kompetensinya	26188 Orang	1.650 Kawasan	1.650 Kawasan	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
1	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	2164920 Orang	35,38%	35,38%	Persentase Pencari Kerja Yang mendapatkan peningkatan Kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja
					30,20%	30,20%	Persentase Pencari kerja Yang Telah Meningkat Kompetensinya
					1100 Orang	1100 Orang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
					720 Orang	720 Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n
2	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil	325000 Orang	1100 Orang	1100 Orang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		dalam negeri hasil pelatihan kerja	pelatihan kerja		720 Orang	720 Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n
					22,01%	22,67%	Persentase tenaga kerja yang terserap
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	50000 Orang	22,01%	22,67%	Persentase tenaga kerja yang terserap
					1950 Orang	1950 Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL
					250 Orang	250 Orang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja
		Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	75%	30,20%	30,20%	Persentase Pencari kerja Yang Telah Meningkat Kompetensinya
					22,01%	22,67%	Persentase tenaga kerja yang terserap
3	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-haknya	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	-	11289510 Orang	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan
					250 Orang	250 Orang	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya
		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-	11289510 Orang	50 Perkara	50 Perkara	Jumlah Perselisihan yang Dicegah
					110 Perkara	110 Perkara	Jumlah Perkara Perselisihan yang

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	hak pekerja dan dialog sosial				Terselesaikan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai 91,30	93,75	95,76	Indeks Pembangunan Gender
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	64.51 %	64.51 %	Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan
					100%	100%	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam
					83,96%	83,96%	Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai 79.16	83.76 %	83.76 %	Indeks Pemberdayaan Gender

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja modal APBD	Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja modal APBD	8.76%	100%	100%	Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender
					100%	100%	Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak
2	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Nilai 64.34	1 kegiatan	1 kegiatan	Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak
					3 kegiatan	3 kegiatan	Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator Kota Layak Anak
					10 Orang	10 Orang	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	64.51 %	64.51 %	Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak
					100%	100%	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam
					83,96%	83,96%	Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
							jalur hukum

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
1	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Provinsi = 20% x cadangan beras total provinsi Kab/kota = 80% x cadangan beras total provinsi x rasio jumlah penduduk kab/kota Keterangan: Cadangan Beras Total Provinsi X = (0,5% x jumlah penduduk provinsi x konsumsi beras per kapita per tahun di provinsi) / 1000	1,22	1,22	Indeks Kecukupan Pangan Pokok
2	Meningkatnya Pemanfaatan Pangan yang Berkualitas dan Terjaminnya Keamanan dan Mutu	Skor Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan	95.2	95,2	95,2	Skor Pola Pangan Harapan
		Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu	90%	97,89%	97,89%	Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
	Pangan	persyaratan mutu dan keamanan pangan	dan keamanan pangan				
3	Terentaskannya Kerawanan Pangan dan Gizi	Persentase daerah rentan rawan pangan	Terentaskannya Kerawanan Pangan dan Gizi	12%	96,70%	96,70%	Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
1	Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	300614 Bidang Tanah	N/A	N/A	Pemerintah Kota Surabaya fokus untuk memanfaatkan semua tanah aset untuk kepentingan umum masyarakat, khususnya untuk program pemberdayaan masyarakat sehingga tidak melaksanakan redistribusi tanah di Kota Surabaya
		Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	130700 Kepala Keluarga	N/A	N/A	Kegiatan AKSES Reforma Agraria dilaksanakan oleh BPN/Kantor Pertanahan sebagai leading sector

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69.74 Poin	68,75 Poin	71,04 Poin	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
2	Meningkatnya penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	70%	70%	70%	Persentase ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan
		Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	75%	70%	70%	Persentase ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan
3	Meningkatnya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	-	Persentase pengurangan sampah	28.1%	78.13	83.8	Indeks Persampahan
		-	Persentase sampah yang ditangani	71%	78.13	83.8	Indeks Persampahan
4	Penyusunan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	76 Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
					1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100%	95%	95%	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan
		Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100%	95%	95%	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan
		Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	100%	95%	95%	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		Pemanfaatan data kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan	100%	5 Lembaga	5 Lembaga	Jumlah Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan
					60%	60%	Persentase jumlah PD/Lembaga yang Melakukan kerjasama
					5 Dokumen	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
		Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	100%	4 Informasi	4 Informasi	Jumlah jenis informasi yang dilaporkan dalam dokumen Profil Perkembangan Kependudukan
					100%	100%	Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan
					2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan
		Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	99%	95%	95%	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efesien	Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	7.500 Desa	N/A	N/A	Tidak ada indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024
		Jumlah kelembagaan desa yang telah ditata sesuai standar	Jumlah kelembagaan desa yang telah ditata sesuai standar	7.500 Desa	N/A	N/A	Tidak ada indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024
		Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa	13.494 Orang	N/A	N/A	Tidak ada indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024
2	Berkembangnya status pembangunan desa	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	9.152 Desa	N/A	N/A	Tidak ada indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024
		Jumlah Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	59.291 Desa	N/A	N/A	Tidak ada indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024
		Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	6.444 Desa	N/A	N/A	Tidak ada indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024
3	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Jumlah BUM Desa Maju	Jumlah BUM Desa Maju	1.800 BUMDes	N/A	N/A	Tidak ada indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024
		Jumlah BUM	Jumlah BUM Desa	10.000 BUMDes	N/A	N/A	Tidak ada indikator yang

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		Desa Berkembang	Berkembang				sesuai di Perubahan RKPD 2024
4	Meningkatnya status Perkembangan Kawasan Perdesaan	Nilai Rata-rata Indeks Perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)	Nilai Rata-rata Indeks Perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)	58.7 Nilai	N/A	N/A	Tidak ada indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024
5	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma)	Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) Maju	Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) Maju	200 Bumdesma	N/A	N/A	Tidak ada indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024
		Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) Berkembang	Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) Berkembang	300 Bumdesma	N/A	N/A	Tidak ada indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	61 (Indeks)	58.20 %	58.20 %	Indeks pembangunan keluarga (ibangga)
2	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2.1 Rata-rata Anak per Wanita	1.74 %	1.74 %	Angka Kelahiran Total (TFR)

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
	berencana	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	18 Kelahiran per 1.000 WUS 15-19 Tahun	25	25	Rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Spesific Fertility Rate) per 1000 wanita
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	63.41%	84%	84%	Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	7.4%	18.10 %	18.10 %	Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
1	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Rasio konektivitas Provinsi	Rasio konektivitas Provinsi	0.763 Rasio	60%	60%	Konektivitas jaringan transportasi Multimoda yang terintegrasi
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	*On Time Performance* Layanan Transportasi	*On Time Performance* Layanan Transportasi	82.08%	31%	31%	Rata-rata Load Factor Angkutan Trunk dan Feeder
					42%	42%	Rata-rata Load Factor Angkutan Umum Perkotaan Surabaya

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	88.5 Nilai	80%	80%	Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya
3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 100 ribu Keberangkatan	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 100 ribu Keberangkatan	23.71 Rasio	6.0 %	6.0 %	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
1	Tersedianya Infrastruktur Digital	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	100%	322 Unit	306 Unit	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah	-	90%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		-	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah	30%	322 Unit	306 Unit	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
		Persentase Kabupaten/Kota yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah	-	50%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
2	Terlaksananya Layanan Pemerintah secara Digital	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	-	65%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		-	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	40%	322 Unit	306 Unit	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
		Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	100%	190 Unit	190 Unit	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan
3	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Pertumbuhan Ekonomi	-	Persentase perangkat daerah yangmendapatkan sosialisasi program inovasi yangmendukung kabupaten/kota cerdas	100%	58 Dokumen	58 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Masyarakat di bidang digital	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	2%	58 Dokumen	58 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Jumlah ASN pengelola SPBE di Pemda termasuk ASN di Kabupaten/Kota di wilayahnya yang mendapatkan	-	100 orang	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas					
		-	Jumlah ASN pengelola SPBE di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	10 orang	58 Dokumen	58 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
5	Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (antara lain: Ibu Kota Negara, pemilu/pilkada, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (antara lain: Ibu Kota Negara, pemilu/pilkada, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	85%	54%	54%	Persentase Cakupan masyarakat yang terjangkau informasi publik
		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	74%	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik
		Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	100%	100%	100%	Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPID ≤ 17 hari kerja
		Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang	Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang	85%	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi olehDinas Kominfo Provinsi	mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas Kominfo Kabupaten/Kota				
		Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah	Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah	85%	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
1	Terwujudnya Koperasi Yang Berkualitas dan Modern	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	20%	0,9%	0,9%	Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi
					60%	60%	Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha
		Persentase Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	10%	69%	69%	Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
							(koperasi ber RAT)
2	Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	Pertumbuhan Wirausaha	Pertumbuhan Wirausaha	4%	24%	24%	Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro
		Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	-	75%	136 Orang	136 Orang	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan
					29,86%	29,86%	Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha
					136 Unit Usaha	136 Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro
		-	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	4%	N/A	N/A	Tidak ada indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
1	Tercapainya Target Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Rp1.293 Triliun	50,5 Triliyun Rupiah	39,94 Triliyun Rupiah	Nilai Investasi Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Nasional dan Internasional	Tersusunnya DOD Tingkat Provinsi	Tersusunnya DOD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Persentase penduduk 10 tahun ke atas di Provinsi yang berolahraga dalam seminggu terakhir	Persentase penduduk 10 tahun ke atas di Provinsi yang berolahraga dalam seminggu terakhir	40%	N/A	N/A	Tidak terdapat indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024
2	Meningkatnya kualitas pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila	Terbentuknya tim koordinasi pelayanan kepemudaan tingkat provinsi	Terbenuknya tim koordinasi pelayanan kepemudaan tingkat provinsi	1 Dokumen	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan ditingkat Provinsi	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan ditingkat Provinsi	1 Dokumen	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Indeks Pembangunan Pemuda	-	57.67 Index	0,76	0,76	Indeks daya saing keolahragaan dan kepemudaan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
1	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	100%	5 Sektor	5 Sektor	Jumlah sektor yang dianalisa
2	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
1	Menguatnya keamanan siber lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	40 Orang	N/A	N/A	Peningkatan kompetensi pengelola keamanan siber tersertifikasi belum dilaksanakan
		Jumlah Lulusan Program Born to Defence untuk SDM Pengelola Keamanan Siber Sektor IIV	Jumlah Lulusan Program Born to Defence untuk SDM Pengelola Keamanan Siber Sektor IIV	200 Orang	N/A	N/A	Peningkatan kompetensi pengelola keamanan siber tersertifikasi belum dilaksanakan
		Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT	Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT	25 Orang	N/A	N/A	Peningkatan kompetensi pengelola keamanan siber tersertifikasi belum dilaksanakan
		Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah	32 Daerah	3 kali/per hari	3 kali/per hari	Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Sektor Pemda dengan Tingkat Kematangan Keamanan Siber pada Skor Minimal 2,59	Persentase Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Sektor Pemda dengan Tingkat Kematangan Keamanan Siber pada Skor Minimal 2,59	51,80%	3,3 (Baik)	4,49	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
1	Kelestarian Cagar Budaya	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	2.04%	895 Orang	895 Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	50.00%	N/A	N/A	Tidak terdapat indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	15.00%	8 Unit	8 Unit	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	61.62%	275 lokasi	275 lokasi	Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian
					275 Objek	275 Objek	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi
2	Pemajuan Kebudayaan	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	23.06%	N/A	N/A	Tidak terdapat indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024
		Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	0.56%	N/A	N/A	Tidak terdapat indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	0.50%	60,00%	60,00%	Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
1	Peningkatan kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	71 Nilai	69.4 Nilai	69.4 Nilai	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat
2	Pembangunan literasi masyarakat meningkat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	15 Index	69.4 Nilai	69.4 Nilai	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
1	Terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	738836 Arsip	8640 Lembar	8640 Lembar	Arsip yang dialih mediakan
					28,84%	28,84%	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik
					300 Arsip	300 Arsip	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
							Akses Arsip Statis
		Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	452194 Pengguna	1.200 Pengguna	1.200 Pengguna	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
2	Penerapan e-Arsip terintegrasi	Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang menerapkan e-Arsip terintegrasi	Jumlah Pemerintah Daerah Kab/Kota yang menerapkan e-Arsip terintegrasi	158 Provinsi/Kab/Kota	7200 item	7200 item	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN
					14,07%	14,07%	Persentase jumlah jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN
3	Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori B ke atas	Jumlah Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori B ke atas	32 Provinsi/Kab/Kota	54 lembaga	54 lembaga	Jumlah PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup
					76,21%	76,21%	Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan
					66 Laporan	66 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
4	Rekomendasi Hasil	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	132 Rekomendasi	70	70 Lembaga	PD, Unit Kerja,

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
	Pengawasan Kearsipan yang Ditindaklanjuti	Hasil Pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Provinsi	Hasil Pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Kab/Kota		Lembaga		BUMD yang mendapatkan evaluasi sistem kearsipan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
1	Meningkatnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	Materi teknis muatan perairan pesisir yang disetujui untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi	-	10 Provinsi	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional	-	17800000 Ha	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi. Kota Surabaya mendukung urusan tersebut pada indikator lainnya
2	Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi garam	-	2000000 Ton	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	8350000 Ton	18.330,15 Ton	18.330,15 Ton	Hasil Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan
		Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	21430000 Ton	18.330,15 Ton	18.330,15 Ton	Hasil Produksi Sektor Perikanan

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
							dan Kelautan
		Konsumsi ikan	-	58.76 Kg/KAP/TH	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif	Pelaku usaha Unit Pengolahan kelautan dan perikanan izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya	Pelaku usaha Unit Pengolahan kelautan dan perikanan izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya	1 Dokumen	N/A	N/A	Tidak terdapat indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024
		Pelaku usaha budidaya kelautan dan perikanan izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya	Pelaku usaha budidaya kelautan dan perikanan izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya	1 Dokumen	N/A	N/A	Tidak terdapat indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024
		Pelaku usaha kelautan dan perikanan izin Provinsi pada wilayah ruang laut yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya	Pelaku usaha kelautan dan perikanan izin Kabupaten/Kota pada wilayah ruang laut yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya	1 Dokumen	12 Kali	N/A	Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap
		Operasi kapal perikanan tangkap/speedboat pengawas	Operasi kapal perikanan tangkap/speedboat pengawas	1 Dokumen	12 Dokumen	N/A	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
							Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
		POKMASWAS yang ditumbuhkan dan dikembangkan	POKMASWAS yang ditumbuhkan dan dikembangkan	1110 Kelompok	N/A	18.330,15 Ton	Tidak terdapat indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024
		Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Provinsi	-	1 Forum	N/A	18.330,15 Ton	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional	Kontribusi PDRB Pariwisata	Kontribusi PDRB Pariwisata	4.5%	5,37%	7,9%	Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum
					5,37%	7,9%	Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	1500000000 Perjalanan	43,50%	43,50%	Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata
					29,70%	29,70%	Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di Kota Surabaya
		Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp.1.347.000.000.000	N/A	N/A	Tidak terdapat indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
1	Meningkatnya produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai)	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai)	1.49%	18.251 Ton	18.251 Ton	Jumlah hasil produksi sektor pertanian
		Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	2.86%	18.251 Ton	18.251 Ton	Jumlah hasil produksi sektor pertanian

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		Persentase peningkatan produktivitas perkebunan (kopi, kelapa, kakao, karet, lada, pala, cengkeh, dan tebu)	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan (kopi, kelapa, kakao, karet, lada, pala, cengkeh, dan tebu)	1.42%	N/A	N/A	Tidak terdapat indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024
		Jumlah produksi daging	Jumlah produksi daging	4.710.622 ton	N/A	N/A	Tidak terdapat indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024
2	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Jumlah produksi susu	Jumlah produksi susu	815.390 ton	N/A	N/A	Tidak terdapat indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024
		Jumlah produksi telur	Jumlah produksi telur	6.465.230 ton	N/A	N/A	Tidak terdapat indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024
		Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan)	Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	71.93%	N/A	N/A	Tidak terdapat indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
		Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI (Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan)	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	50.27%	N/A	N/A	Tidak terdapat indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024
		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	80.5%	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
1	Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	-	1500670.98 Ha	N/A	N/A	Tidak terdapat urusan bidang kehutanan yang diampu oleh Kota Surabaya

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
2	Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	-	30000 Ha	N/A	N/A	Tidak terdapat urusan bidang kehutanan yang diampu oleh Kota Surabaya

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
1	Meningkatnya Rumah Tangga yang Teraliri Listrik	Rasio elektrifikasi	-	100%	N/A	N/A	Tidak terdapat urusan bidang ESDM yang diampu oleh Kota Surabaya
2	Meningkatnya Penggunaan Energi yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional	-	19.5%	N/A	N/A	Tidak terdapat urusan bidang ESDM yang diampu oleh Kota Surabaya
3	Meningkatnya Jumlah Desa yang Teraliri Listrik	Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik)	-	100%	N/A	N/A	Tidak terdapat urusan bidang ESDM yang diampu oleh Kota Surabaya

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
1	Meningkatnya pertumbuhan ekspor bernilai	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	7.86%	N/A	N/A	Tidak terdapat indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
	tambah tinggi						
2	Meningkatnya Keberdayaan dan Kepercayaan Konsumen	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	-	55%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
		Persentase penanganan pengaduan konsumen	-	92%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
3	Meningkatnya Jaminan Mutu Komoditas Potensial Daerah	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	-	75%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.
4	Terwujudnya Iklim Usaha yang Kondusif	Tertib Usaha	Tertib Usaha	90%	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Pemenuhan Komitmen Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
					12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
					12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penerbitan Tanda Daftar Gudang
					12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
					40 Dokumen	40 Dokumen	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
					24 Dokumen	24 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri
					24 Dokumen	24 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
							Negeri
					450 Dokumen	450 Dokumen	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
					60 Dokumen	160 Dokumen	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang
5	Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk/pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah, waktu, harga, mutu, dan tempat	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persentase kinerja realisasi pupuk	90%	N/A	N/A	Tidak terdapat indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024
6	Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat	Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	5.9%	100%	100%	Persentase intervensi ketersediaan komoditas
					98%	98%	Tingkat stabilitas harga komoditas

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
7	Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan	Inflasi Pangan Bergejolak	Inflasi Pangan Bergejolak	5%	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang
8	Terwujudnya implementasi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang	Pertumbuhan implementasi PLK (Pasar Lelang Komoditas)	-	50%	N/A	N/A	Indikator tersebut merupakan indikator pada provinsi.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
1	Tercapainya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	8.40%	3,96%	3,96%	Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	18.90%	3,96%	3,96%	Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan
3	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	USD 181.59 Miliar	N/A	N/A	Tidak terdapat indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
4	Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang)	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang)	21.94 Juta Orang	N/A	N/A	Tidak terdapat indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024
5	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rp. 613.85 Triliun	N/A	N/A	Tidak terdapat indikator yang sesuai di Perubahan RKPD 2024

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
1	Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	46.10 Index	N/A	N/A	Tidak terdapat urusan bidang transmigrasi yang diampu oleh Kota Surabaya
		Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	57.50 Index	N/A	N/A	Tidak terdapat urusan bidang transmigrasi yang diampu oleh Kota Surabaya

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
1	Jumlah provinsi dengan indeks kinerja gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kategori baik	Jumlah provinsi berkinerja baik	Jumlah provinsi berkinerja baik	30 Provinsi	N/A	N/A	Kewenangan Provinsi
2	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	Rekomendasi kebijakan	Rekomendasi kebijakan	22 Tugas dan Wewenang	N/A	N/A	Kewenangan Provinsi
3	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	78.66 Indeks	30 Lembaga	30 Lembaga	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
					8 Lembaga	8 Lembaga	Jumlah Lembaga yang Berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
					54%	54%	Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
					100%	100%	Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina
					89,3	97,96	Indeks Kepedulian Sosial
					0,88	0,94	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota
					89,3	89,3	Tingkat Kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai sosial, kemanusiaan, keagamaan
					4.33 %	4.33 %	Persentase konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan
					690 Orang	690 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
					60 Orang	60 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
					82,13	83	Indeks Harmoni Sosial
					89,3	97,96	Indeks Kepedulian Sosial
					95,67%	95,67%	Persentase penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan
		Indeks Kewaspadaan Nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	64 Indeks	12 Lembaga	14 Lembaga	Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional
					18 Lembaga	17 Lembaga	Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Penanganan Konflik Sosial

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
					100%	100%	Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti
					100%	100%	Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti
					0,88	0,94	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota
					4.33 %	4.33 %	Persentase konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan
					44 Laporan	44 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
					18 Orang	17 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
					82,13	83	Indeks Harmoni Sosial
					95,67%	95,67%	Persentase penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan
		Indeks Kinerja Ormas	Indeks Kinerja Ormas	67 Indeks	31 Lembaga	31 Lembaga	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan
					60%	60%	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan
					0,88	0,94	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota
					4.33 %	4.33 %	Persentase konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan

No	Kinerja	Indikator		Target	Target RKPD	Target P-RKPD	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota				
					2 Laporan	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
					82,13	83	Indeks Harmoni Sosial
					95,67%	95,67%	Persentase penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan

4.2.4 Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024

Penjabaran sasaran pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024 dijabarkan dalam Tabel IV.7 berikut ini yang memuat indikator sasaran berserta target yang ingin dicapai pada tahun 2023 dari setiap indikator sasaran tersebut.

Tabel IV.7
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran 2024
Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung nasional dan internasional	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	4,01% **5,49%***
			Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan	3,96%
			Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum	5,37% **7,9%***
			Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak	5,26%
			Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	24,90%
	Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	6,30% **7,67%***
			Persentase tenaga kerja yang terserap	22,01% **22,67%***
			Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,81 **0,7***
Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Indeks Pendidikan	79,33
			Angka Harapan Hidup	74,53 **75,97***
			Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk	2,22% **1,46%***
			Skor Pola Pangan Harapan	95,20
		Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	93,75 **95,76***

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran 2024
	Pembentukan karakter masyarakat	Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	Indeks Budaya Lokal	89,70
				90*
			Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	64,94
			Indeks Kepedulian Sosial	89,30
				97,96*
Misi 3 : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan	Terpenuhinya penataan kota yang terintegrasi didukung infrastruktur berkualitas untuk mendorong konektivitas sosial dan ekonomi masyarakat	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	0,820
			Indeks Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,625
				0,78*
			Indeks Penyelenggaraan Transportasi	0,728
				0,743*
	Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, nyaman dan indah	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	56,09
				57,58*
			Indeks Kualitas Udara	90,34
			Indeks Kualitas Lahan	42,72
			Indeks Persampahan	78,13
				83,80*
Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	84,02
			Opini BPK	WTP
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,3 (Baik)
				4,49*
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Nilai Kepuasan Masyarakat	90,16%
				95,90%*
Misi 5 : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,88
				0,94*
		Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat	Indeks Penanggulangan Bencana	0,864
				0,92*

Keterangan : *) Penyesuaian target pada Perubahan RKPD 2024 dengan berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi tahun 2023

Adanya perubahan terhadap kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta upaya pencapaian target tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi RKPD 2024 sampai dengan triwulan II, diperlukan penjadwalan serta penyesuaian target indikator pada target Sasaran Perangkat Daerah, Kegiatan dan Sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel IV.8
Perubahan Target Sasaran PD Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024

No	Indikator	Target		Keterangan	Perangkat Daerah
		Semula	Menjadi		
1	Nilai Investasi Daerah	50,5 Triliyun Rupiah	39,94 Triliyun Rupiah	Perhitungan Nilai Investasi Daerah menggunakan nilai realisasi investasi yang terdapat dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Dengan memperhatikan : a. Analisa berdasarkan proyeksi investasi di Kota Surabaya dan perkembangannya berdasarkan peningkatan nilai investasi daerah; b. Analisa berdasarkan target investasi nasional; dan c. Analisa berdasarkan saran dan masukan tenaga ahli/narasumber/akademisi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel IV.9
Perubahan Target Kegiatan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024

No	Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/Kota	jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan	90.000 berkas	110.000 berkas	Penambahan berkas pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai tindak lanjut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya yang secara umum mengatur tentang pelimpahan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani	94.731 berkas	97.500 berkas	Penambahan jumlah berkas pembayaran Biaya Operasional /BOP untuk Balai RT dan RW serta gaji PPPK	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah dokumen pelaksanaan reses	3 dokumen	2 dokumen	Penyesuian jadwal pelaksanaan reses dengan peralihan periode masa jabatan DPRD	Sekretariat DPRD
4	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Unit Hunian rumah susun Pemerintah Kota Surabaya	5.157 unit hunian	5.233 unit hunian	Adanya pembangunan blok baru pada tahun 2023 di rusun pakal	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
5	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara administrasi yang diproses	12 dokumen	62 dokumen	Penyesuaian target penyelesaian penyerahan PSU pada tahun 2024 berdasarkan MCP KPK adalah 50 BAST fisik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

No	Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
6	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengadaan/pembelian tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	1 lokasi	2 lokasi	Adanya penambahan lokasi untuk pembayaran ganti rugi di pengadaan tanah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
7	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS kelembagaan	363 orang	852 Orang	Penyesuaian anggota PSKS jenis kelembagaan yang akan dilakukan pembinaan	Dinas Sosial
8	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Prasarana Jalan di Kota Surabaya	15 lokasi	9 lokasi	Penyesuaian prioritas lokasi perlengkapan jalan yang disediakan dengan target awal 8 lokasi halte baru disesuaikan menjadi 3 lokasi halte baru dan prasarana park and ride yang direncanakan pada tahun 2024 ditunda karena pertimbangan waktu pelaksanaan	Dinas Perhubungan
9	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya	3 koridor	8 koridor	Penyesuaian jumlah koridor layanan (rute layanan) angkutan umum yang mencakup Suroboyo Bus dan *Feeder* Wira Wiri diselenggarakan oleh UPTD BLUD Pengelolaan Transportasi Umum Dinas Perhubungan Kota Surabaya, dengan Suroboyo Bus sebanyak 1 koridor dan *feeder* wara wiri 7 koridor	Dinas Perhubungan
10	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan / layanan baca yang dibina	2000 lembaga	306 lembaga	Penambahan perpustakaan/layanan baca yang dibina	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
11	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	156.000 berkas	295.000 berkas	Adanya percepatan layanan pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database	Jumlah Data Penduduk yang diidentifikasi	8.000 data	13.068 data	Adanya kegiatan pengecekan kembali data penduduk yang data RT RW nya tidak sesuai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
	Kependudukan					
13	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur	2 KM	5 KM	Penambahan lokasi yang dilakukan pembebasan lahan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
14	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan	150 lokasi	50 lokasi	Penyesuaian jumlah lokasi kawasan permukiman yang dilakukan pemeliharaan dan pembangunan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
15	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun	2 kelurahan	1 kelurahan	Lokasi yang dilakukan pembangunan sistem air limbah domestik hanya 1 kelurahan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 paket	20 paket	Penyesuaian prioritas belanja Perangkat Daerah	Kecamatan Bulak
17	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	288 unit usaha	174 unit usaha	Jumlah UMKM di wilayah Asemrowo sudah banyak yang mandiri sehingga jumlah UMKM yang memerlukan pendampingan semakin berkurang	Kecamatan Asemrowo
18	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 paket	22 paket	Penyesuaian prioritas belanja Perangkat Daerah	Kecamatan Sambikerep
19	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	210 kasus	21 kasus	Adanya Sinergi 3 Pilar yang dapat meredam potensi konflik wilayah	Kecamatan Semampir
20	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha	60 pelaku usaha	Jumlah UMKM di wilayah Tenggilis Mejoyo sudah banyak yang mandiri sehingga jumlah UMKM yang memerlukan pendampingan semakin berkurang	Kecamatan Tenggilis Mejoyo

No	Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
21	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 unit	20 unit	Penyesuaian jumlah kendaraan dinas yang telah dilelang serta peralatan kantor yang dipelihara	Kecamatan Tenggilis Mejoyo

Tabel IV.10
Perubahan Target Sub Kegiatan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024

No	Subkegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
1	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	94.731 berkas	97.500 berkas	Penambahan jumlah berkas pembayaran Biaya Operasional /BOP untuk Balai RT dan RW serta gaji PPPK	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.520 Unit	1.531 Unit	Penyesuaian jumlah kendaraan dinas yang telah dilelang	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat korodinasi dan konsultasi DPRD	36 laporan	16 laporan	penyesuaian jumlah kegiatan asdeksi dan forkom yang dihadiri/dilaksanakan	Sekretariat DPRD
4	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	60 Dokumen	160 Dokumen	Berdasarkan hasil monitoring terhadap pengurusan ijin usaha pergudangan, maka diproyeksikan target pengurusan ijin usaha pergudangan sampai Desember meningkat menjadi 160 dokumen	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	976 unit	636 unit	Penyesuaian jumlah kendaraan dinas yang telah dilelang	Dinas Pendidikan
6	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non	73.986 peserta didik	71.390 peserta didik	Penyesuaian jumlah peserta yang mengikuti kompetisi / ajang perlombaan yang berjenjang hingga tingkat nasional	Dinas Pendidikan

No	Subkegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
		Akademik				
7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	19.139 peserta didik	16.260 peserta didik	Menyesuaikan data gamis / pramis per bulan Juni 2024	Dinas Pendidikan
8	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	2.479 satuan pendidikan	2.217 satuan pendidikan	Penyesuaian jumlah PAUD yang menerima BOP berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 462 P 2023 tentang Satuan Biaya Penerima Dana dan Besaran Alokasi Dana BOSP 2024	Dinas Pendidikan
9	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	27 satuan pendidikan	25 satuan pendidikan	Penyesuaian jumlah Lembaga PKBM/ SKB yang menerima BOP berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 462 P 2023 tentang Satuan Biaya Penerima Dana dan Besaran Alokasi Dana BOSP 2024	Dinas Pendidikan
10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 unit	3 unit	Penyesuaian prioritas pembangunan SMP Negeri	Dinas Pendidikan
11	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 unit	6 unit	Penambahan rehab lembaga swasta	Dinas Pendidikan
12	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar	2802 peserta didik	33 peserta didik	Disesuaikan dengan pemutakhiran di SIPD RI	Dinas Pendidikan
13	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	147 unit	24 unit	Penyesuaian pengadaan alat kesehatan yang bersumber dari dana DBHCHT	RSUD Bhakti Dharma Husada

No	Subkegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
		yang Disediakan				
14	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	139 bangunan gedung	142 bangunan gedung	Penambahan pembangunan fasilitas prasarana Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
15	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	110 lembaga	12 lembaga	Disesuaikan dengan pemutakhiran di SIPD RI	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98 unit	89 unit	Penyesuaian jumlah kendaraan dinas yang telah dilelang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
17	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	105 dokumen	109 dokumen	Adanya pembangunan blok baru pada tahun 2023 di rusun pakal	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
18	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1.000 unit rumah	1.500 unit rumah	Penambahan rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
19	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12 laporan	50 laporan	Penyesuaian target penyelesaian penyerahan PSU pada tahun 2024 berdasarkan MCP KPK sebanyak 50 BAST fisik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
20	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi	1 dokumen	2 dokumen	Adanya penambahan lokasi untuk pembayaran ganti rugi pengadaan tanah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

No	Subkegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
	Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Permukiman serta Pertanahan
21	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30 Unit	88 Unit	Penyesuaian jumlah Alat Kesehatan yang dibutuhkan	Dinas Kesehatan
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	43725 Orang	37395 Orang	Penyesuaian dengan proyeksi target Kementerian Kesehatan tahun 2024	Dinas Kesehatan
23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (pada 63 Puskesmas)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	43725 Orang	37395 Orang	Penyesuaian dengan proyeksi target Kementerian Kesehatan tahun 2024	Dinas Kesehatan
24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2038597 Orang	1923364 Orang	Penyesuaian dengan proyeksi target Kementerian Kesehatan tahun 2024	Dinas Kesehatan
25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	325983 Orang	378637 Orang	Penyesuaian dengan proyeksi target Kementerian Kesehatan tahun 2024	Dinas Kesehatan
26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	747207 Orang	727432 Orang	Penyesuaian dengan proyeksi target Kementerian Kesehatan tahun 2024	Dinas Kesehatan
27	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis	60512 Orang	78502 Orang	Penyesuaian dengan proyeksi target Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Subkegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
	Tuberkulosis	yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			tahun 2024	
28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (pada 63 puskesmas)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	60512 Orang	78502 Orang	Penyesuaian dengan proyeksi target Kementerian Kesehatan tahun 2024	Dinas Kesehatan
29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	52741 Orang	49485 Orang	Penyesuaian dengan proyeksi target Kementerian Kesehatan tahun 2024	Dinas Kesehatan
30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (pada 63 Puskesmas)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	52741 Orang	49485 Orang	Penyesuaian dengan proyeksi target Kementerian Kesehatan tahun 2024	Dinas Kesehatan
31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4401 Orang	36208 Orang	Penyesuaian dengan proyeksi target Kementerian Kesehatan tahun 2024	Dinas Kesehatan
32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	104362 Orang	101979 Orang	Penyesuaian dengan proyeksi target Kementerian Kesehatan tahun 2024	Dinas Kesehatan
33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar pada 63 Puskesmas	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	330258 Orang	396102 Orang	Penyesuaian dengan proyeksi target Kementerian Kesehatan tahun 2024	Dinas Kesehatan
34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin pada 63 Puskesmas	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41885 orang	37187 Orang	Penyesuaian dengan proyeksi target Kementerian Kesehatan tahun 2024	Dinas Kesehatan
35	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis pada 63 Puskesmas	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	63 orang	693 orang	Penyesuaian dengan proyeksi target Kementerian Kesehatan tahun 2024	Dinas Kesehatan

No	Subkegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
36	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	322 unit	306 unit	Penyesuaian jumlah unit sistem jaringan intra pemerintah daerah yang dibangun dan / atau dipelihara	Dinas Komunikasi dan Informatika
37	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1270 Orang	2171 Orang	Penyesuaian jumlah penghuni Liponsos Keputih, Liponsos Babat Jerawat, UPTD Griya Wreda dan UPTD Kampung Anak Negeri dan Kalijudan yang diberikan permakanan	Dinas Sosial
38	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	795 Orang	1299 Orang	Penyesuaian jumlah layanan reunifikasi yang dilakukan untuk PPKS	Dinas Sosial
39	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	49 Orang	Penyesuaian jumlah penghuni Liponsos Babat Jerawat	Dinas Sosial
40	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	4716 Orang	8150 Orang	Penyesuaian jumlah layanan ambulance gratis untuk warga surabaya	Dinas Sosial
41	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Orang	1810 orang	Menyesuaikan dengan jumlah penghuni Liponsos Keputih	Dinas Sosial
42	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	174.385 Orang	116.945 Orang	Penyesuaian jumlah Keluarga Miskin sesuai dengan pendataan sampai dengan Mei 2024	Dinas Sosial
43	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin	59.295 Keluarga	42.029 Keluarga	Penyesuaian jumlah Keluarga Miskin yang diberikan bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah	Dinas Sosial

No	Subkegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
		Kabupaten/Kota			daerah	
44	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	59.295 Keluarga	42.014 keluarga	Penyesuaian jumlah Keluarga Miskin yang diberikan bantuan dari pemerintah pusat	Dinas Sosial
45	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	17 paket	15 paket	Penyesuaian prioritas belanja Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
46	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	23 paket	13 paket	Penyesuaian prioritas belanja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan
47	Pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota yang terbangun	3.000 unit	7.500 unit	Penyesuaian jumlah prasarana jalan (PJU) yang dibangun untuk memenuhi kenyamanan masyarakat memperoleh pencahayaan yang cukup di wilayahnya	Dinas Perhubungan
48	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	99.252 unit	105.846 unit	Penyesuaian jumlah prasarana jalan (PJU) yang dipelihara	Dinas Perhubungan
49	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	12 unit	14 unit	Penyesuaian jumlah terminal tipe C yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
50	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	72 unit	92 unit	Penyesuaian jumlah armada angkutan umum yang diselenggarakan oleh UPTD BLUD Pengelolaan Transportasi Umum Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Dinas Perhubungan

No	Subkegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
51	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 dokumen	6 dokumen	Penyesuaian Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sesuai rencana koridor layanan yang akan ditambahkan	Dinas Perhubungan
52	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	143,26 unit	14 unit	Disesuaikan dengan pemutakhiran di SIPD RI	Dinas Lingkungan Hidup
53	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	30 perpustakaan	106 perpustakaan	Penambahan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar yang dibina	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
54	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17 unit	15 unit	Penyesuaian jumlah kendaraan dinas yang telah dilelang serta peralatan kantor yang dipelihara	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
55	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	10.000 M	7.500 M	Penyesuaian jumlah lokasi kawasan permukiman yang dilakukan pembangunan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
56	Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis	8 sistem drainase perkotaan	15 sistem drainase perkotaan	Menyesuaikan dengan jumlah pekerjaan yang diawasi	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
57	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	8 sistem drainase perkotaan	10 sistem drainase perkotaan	Terdapat penambahan sistem drainase perkotaan yg direhabilitasi	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
58	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	8 sistem drainase perkotaan	15 sistem drainase perkotaan	Terdapat penambahan sistem drainase perkotaan yg dilakukan pembangunan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
59	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan	21 sistem drainase perkotaan	30 sistem drainase perkotaan	Terdapat penambahan sistem drainase perkotaan yg dilakukan pemeliharaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

No	Subkegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
		Terpelihara				
60	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	50 rumah tangga	200 rumah tangga	Penambahan Rumah tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
61	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	65 unit	25 unit	Penyesuaian jumlah kendaraan dinas yang telah dilelang serta peralatan kantor yang dipelihara	Kecamatan Simokerto
62	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	35 unit	25 unit	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Simokerto
63	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas/ormas	1 pokmas/ormas	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Simokerto
64	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 unit	10 unit	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Simokerto
65	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 unit	7 unit	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan wonokromo
66	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 unit	12 unit	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan wonokromo
67	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 unit	3 unit	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan wonokromo
68	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 unit	5 unit	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan wonokromo
69	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 unit	8 unit	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan wonokromo

No	Subkegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
70	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 unit	8 unit	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan karangpilang
71	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 unit	9 unit	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan karangpilang
72	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	197 orang	51 orang	Penyesuaian jumlah peserta sosialisasi wasbang sesuai dengan perwakilan peserta per RT	Kecamatan karangpilang
73	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 unit	9 unit	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan tegalsari
74	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 unit	12 unit	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan tegalsari
75	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29 unit	12 unit	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan tegalsari
76	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 unit	9 unit	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan tegalsari
77	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	94 orang	47 orang	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan tegalsari
78	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 unit	5 unit	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Benowo

No	Subkegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
79	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	66 unit	8 unit	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Genteng
80	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 unit	3 unit	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Genteng
81	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 unit	10 unit	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Genteng
82	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 unit	5 unit	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Genteng
83	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 unit	4 unit	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Genteng
84	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 paket	23 paket	Penyesuaian prioritas belanja Perangkat Daerah	Kecamatan Bubutan
85	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 orang	20 orang	Penyesuaian jumlah peserta sosialisasi wasbang sesuai dengan perwakilan peserta per RT	Kecamatan Bubutan
86	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 paket	20 paket	Penyesuaian prioritas belanja Perangkat Daerah	Kecamatan Bulak
87	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	33 orang	46 orang	Penyesuaian jumlah peserta sosialisasi wasbang sesuai dengan perwakilan peserta per RT	Kecamatan Bulak

No	Subkegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
88	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas/ormas	1 pokmas/ormas	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Bulak
89	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 unit	10 unit	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Lakarsantri
90	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	10 paket	Penyesuaian prioritas belanja Perangkat Daerah	Kecamatan Gubeng
91	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 unit	8 unit	Penyesuaian jumlah kendaraan dinas yang telah dilelang serta peralatan kantor yang dipelihara	Kecamatan Gubeng
92	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 unit	9 unit	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Gubeng
93	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	1 unit	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Asemrowo
94	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	1 unit	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Asemrowo
95	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	1 unit	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Asemrowo
96	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100 dokumen	87 dokumen	Penyesuaian jumlah dokumen IMB/SKRK yang diselesaikan di Kecamatan	Kecamatan Asemrowo
97	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 paket	22 paket	Penyesuaian prioritas belanja Perangkat Daerah	Kecamatan Sambikerep

No	Subkegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
98	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 unit	32 unit	Penyesuaian jumlah kendaraan dinas yang telah dilelang serta peralatan kantor yang dipelihara	Kecamatan Sambikerep
99	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 unit	20 unit	Penyesuaian jumlah kendaraan dinas yang telah dilelang serta peralatan kantor yang dipelihara	Tenggilis Mejoyo
100	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	124 orang	110 orang	Penyesuaian jumlah peserta sosialisasi wasbang sesuai dengan perwakilan peserta per RT	Kecamatan Tandes
101	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	7 unit	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Tandes
102	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas/ormas	2 pokmas/ormas	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Tandes
103	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 unit	7 unit	Penyesuaian jumlah kendaraan dinas yang telah dilelang serta peralatan kantor yang dipelihara	Kecamatan Krembangan
104	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas/ormas	1 pokmas/ormas	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Krembangan

No	Subkegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
105	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 unit	2 unit	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Krembangan
106	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 pokmas/ormas	2 pokmas/ormas	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Krembangan
107	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas/ormas	1 pokmas/ormas	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Krembangan
108	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 unit	2 unit	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Krembangan
109	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas/ormas	1 pokmas/ormas	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Sawahan
110	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas/ormas	1 pokmas/ormas	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Sawahan
111	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas/ormas	1 pokmas/ormas	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Sawahan

No	Subkegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
112	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 pokmas/ormas	1 pokmas/ormas	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Dukuh pakis
113	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas/ormas	1 pokmas/ormas	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Dukuh pakis
114	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas/ormas	2 pokmas/ormas	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Dukuh pakis
115	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 unit	1 unit	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Dukuh pakis
116	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	230 orang	40 orang	Penyesuaian jumlah peserta sosialisasi wasbang sesuai dengan perwakilan peserta per RT	Kecamatan Gayungan
117	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	10 unit	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Gayungan
118	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 unit	10 unit	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Gayungan
119	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 unit	9 unit	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Gayungan

No	Subkegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
		yang Terbangun				
120	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 unit	3 unit	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Gunung anyar
121	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	5 unit	Penyesuaian jumlah kendaraan dinas yang telah dilelang serta peralatan kantor yang dipelihara	Kecamatan Wiyung
122	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ormas	2 pokmas/ormas	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Wiyung
123	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4 orang	27 orang	Penyesuaian jumlah peserta sosialisasi wasbang sesuai dengan perwakilan peserta per RT	Kecamatan Jambangan
124	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 unit	10 unit	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Jambangan
125	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 unit	7 unit	Penyesuaian jumlah kendaraan dinas yang telah dilelang serta peralatan kantor yang dipelihara	Kecamatan Sukomanunggal
126	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,	160 orang	169 orang	Penyesuaian jumlah peserta sosialisasi wasbang sesuai dengan perwakilan peserta per RT	Kecamatan Sukomanunggal

No	Subkegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
	Ketahanan Nasional	Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
127	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 laporan	63 laporan	Penyesuaian jumlah laporan kegiatan setiap kelurahan di wilayah Kecamatan Sukomanunggal	Kecamatan Sukomanunggal
128	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 lembaga kemasyarakatan	6 lembaga kemasyarakatan	Penyesuaian jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pelaksanaan musbangkel	Kecamatan Sukomanunggal
129	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 unit	6 unit	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Sukomanunggal
130	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 unit	5 unit	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Sukomanunggal
131	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 unit	8 unit	Penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kecamatan Rungkut
132	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	203 orang/bulan	197 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Sekretariat Daerah
133	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 orang/bulan	42 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Inspektorat
134	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 orang/bulan	51 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Sekretariat DPRD
135	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	69 orang/bulan	69 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Badan Perencanaan

No	Subkegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
		Tunjangan ASN				Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
136	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 orang/bulan	89 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
137	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang/bulan	44 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
138	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang/bulan	28 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
139	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang/bulan	33 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
140	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	121 orang/bulan	119 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Badan Pendapatan Daerah
141	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 orang/bulan	79 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
142	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	194 orang/bulan	182 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
143	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2744 orang/bulan	2253 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Dinas Kesehatan
144	Penyediaan Gaji dan	Jumlah Orang yang	74 orang/bulan	70 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Dinas Ketahanan

No	Subkegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
	Tunjangan ASN	Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				Pangan dan Pertanian
145	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 orang/bulan	55 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Dinas Komunikasi dan Informatika
146	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	196 orang/bulan	193 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Dinas Lingkungan Hidup
147	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	206 orang/bulan	202 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
148	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	131 orang/bulan	129 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
149	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	37 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
150	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9216 orang/bulan	8621 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Dinas Pendidikan
151	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang/bulan	34 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
152	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 orang/bulan	99 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
153	Penyediaan Gaji dan	Jumlah Orang yang	272 orang/bulan	258 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Dinas

No	Subkegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
	Tunjangan ASN	Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				Perhubungan
154	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 orang/bulan	70 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
155	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 orang/bulan	101 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
156	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang/bulan	48 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Dinas Sosial
157	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 orang/bulan	52 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
158	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	109 orang/bulan	103 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Satuan Polisi Pamong Praja
159	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1068 orang/bulan	811 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
160	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	528 orang/bulan	478 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	RSUD Bhakti Dharma Husada
161	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang/bulan	52 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Kecamatan AsemRowo
162	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 orang/bulan	55 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Kecamatan Benowo
163	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 orang/bulan	60 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Kecamatan Bubutan
164	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	52 orang/bulan	51 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Kecamatan Bulak

No	Subkegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
		Tunjangan ASN				
165	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 orang/bulan	51 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Kecamatan Dukuh Pakis
166	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 orang/bulan	64 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Kecamatan Gayungan
167	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 orang/bulan	58 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Kecamatan Genteng
168	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 orang/bulan	60 or orang/bulan ang	Penyesuaian jumlah ASN	Kecamatan Gubeng
169	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 orang/bulan	44 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Kecamatan Gunung Anyar
170	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 orang/bulan	59 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Kecamatan Jambangan
171	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 orang/bulan	53 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Kecamatan KarangPilang
172	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 orang/bulan	47 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Kecamatan Kenjeran
173	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 orang/bulan	47 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Kecamatan Krembangan
174	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang/bulan	72 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Kecamatan Lakarsantri
175	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 orang/bulan	67 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Kecamatan Mulyorejo

No	Subkegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
176	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang/bulan	50 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Kecamatan Pabean Cantian
177	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 orang/bulan	48 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Kecamatan Pakal
178	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 orang/bulan	66 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Kecamatan Rungkut
179	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 orang/bulan	46 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Kecamatan Sambikerep
180	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang/bulan	65 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Kecamatan Sawahan
181	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 orang/bulan	58 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Kecamatan Semampir
182	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 orang/bulan	55 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Kecamatan Simokerto
183	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 orang/bulan	75 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Kecamatan Sukolilo
184	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 orang/bulan	62 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Kecamatan Sukomanunggal
185	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 orang/bulan	82 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Kecamatan Tambaksari
186	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 orang/bulan	71 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Kecamatan Tandes
187	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 orang/bulan	53 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Kecamatan Tegalsari

No	Subkegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
188	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang/bulan	50 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Kecamatan Tenggilis Mejoyo
189	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 orang/bulan	50 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Kecamatan Wiyung
190	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 orang/bulan	60 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Kecamatan Wonocolo
191	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 orang/bulan	71 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Kecamatan Wonokromo
192	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	11,4 km	29,39 km	Adanya penmabahan lokasi pekerjaan pembangunan jalan (peningkatan kualitas jalan)	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

4.2.5 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok Pikiran DPRD RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 tidak ada perubahan. Dokumen Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 diarahkan untuk menyelesaikan pokok-pokok pikiran DPRD yang telah tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.

4.2.6 Inovasi Unggulan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menjelaskan Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peranan inovasi daerah ini sangat penting dalam rangka percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sesuai dengan tema RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 *"**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dengan Dukungan Kualitas Tata Kota, Sistem Transportasi Terpadu dan Berkelanjutan serta Peningkatan Sumber Daya Manusia**",* pada tahun 2024 akan dilaksanakan beberapa inovasi unggulan guna mendukung pencapaian tema dan prioritas pembangunan tahun 2024, antara lain :

1. Optimalisasi e-Peken, Pemberdayaan dan Ketahanan Ekonomi Nang Suroboyo (PEKEN) berbentuk aplikasi yang dapat diakses melalui *website* maupun playstore pada android. Aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Kota Surabaya ini menjadi media transaksi untuk toko kelontong, UMKM dan Sentra Wisata Kuliner. Pada tahun 2024, beberapa inovasi yang akan ditambahkan salah satunya fitur *tracking* pengiriman yang akan bekerjasama dengan jasa pengiriman instan, selain itu Rumah Potong Hewan (RPH) yang menjual daging dan olahannya sudah difasilitasi di e-Peken maka kedepannya akan difasilitasi juga pedagang dari pasar binaan Pemerintah Kota Surabaya dengan kategori *fresh market* atau sayur mayur. E-Peken akan dikolaborasikan dengan hasil Program Padat Karya berupa *voucher* jasa atau belanja makanan minuman di Rumah Padat Karya Pemerintah Kota Surabaya. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan omset pada toko kelontong, UMKM dan Sentra Wisata Kuliner serta hasil dari pemberdayaan program lain di Pemerintah Kota

Surabaya dapat meningkat. Dengan adanya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Dan Pengadaan Barang/Jasa e-Peken maka e-Peken tidak hanya sebagai meningkatkan omset dari pelaku UMKM saja namun juga mendukung optimalisasi belanja untuk UMKM dan PDN ini sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo bahwa APBD harus didedikasikan untuk rakyat, serta untuk menstimulan ekonomi rakyat;

2. ASSIK dan Program Padat Karya, terjadinya pandemi Covid-19 mengakibatkan meningkatnya pengangguran terbuka di Kota Surabaya. Peningkatan pada pertumbuhan ekonomi mulai selaras dengan pengurangan pengangguran terbuka di Kota Surabaya. Program ASSIK yang merupakan sinergi antara kebutuhan perusahaan-perusahaan di Kota Surabaya dengan Pencari Kerja, baik berupa peningkatan *softskill*, keterampilan, pelatihan maupun bimbingan teknis yang telah diserap pada sektor formal dan informal akan tetap dilanjutkan dengan menambah fitur *link and match* sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Selain itu Program Padat Karya tidak hanya fokus pada penyerapan tenaga kerja namun juga pada pengurangan kemiskinan ekstrem sesuai Surat Keputusan Walikota 188.45/556/436.1.2/2022 tentang Data Sasaran Keluarga Miskin Ekstrem beserta Surat Edaran Upaya Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Program Padat Karya mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan pendapatan Keluarga Miskin. Pemerintah Kota Surabaya akan mengoptimalkan Program Padat Karya dengan memberikan pelatihan dan bimbingan teknis untuk memproduksi atau jasa yang setiap tahunnya dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, agar keluarga miskin hasil pelatihan pada Program Padat Karya memiliki penghasilan dan mentas dari kemiskinan ekstrem;
3. Dandan Omah, merupakan program perbaikan rumah tidak layak huni yang dalam prosesnya untuk sarana percepatan dan transparansi disinergikan dengan kemudahan teknologi antar OPD yaitu usulan dari Kader Surabaya Hebat (KSH) melalui aplikasi Sayang Warga, proses verifikasi dan monitoring pelaksanaan pekerjaan dengan e-Housing / e-Rutilahu, dan mengintervensi tenaga kerja melalui aplikasi Padat Karya;

4. Paving GePREK (Gotong Royong, Pemberdayaan Dan Ekonomi Kerakyatan) yang bertujuan mensinergikan upaya pembangunan infrastruktur dengan pemulihan perekonomian di Kota Surabaya. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan lingkungan permukiman perkampungan pada beberapa lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Kota Surabaya menggunakan bahan material paving dipenuhi melalui pemberdayaan warga yang berasal dari keluarga miskin. Hal ini dimulai dari pelatihan, pelaksanaan pekerjaan sampai dengan akses pemasaran yang pada akhirnya meningkatkan pemberdayaan warga yang berpartisipasi serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.
5. Penataan, *branding* dan promosi kawasan wisata juga merupakan program unggulan untuk menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di Kota Surabaya. Program ini dilaksanakan untuk mengembalikan lagi geliat ekonomi di Kota Surabaya pasca Pandemi Covid-19 melanda. Dengan menciptakan daya tarik wisata baru di Kota Surabaya tentunya akan menarik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung Kembali ke Kota Surabaya. Meningkatnya kunjungan wisatawan yang datang ke Kota Surabaya akan berdampak kepada transaksi ekonomi khususnya di sektor usaha hotel, restoran dan kafe;
6. Sekolahe Arek Suroboyo (SAS), merupakan upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk peningkatan mutu sekolah secara keseluruhan dan penerapan pendidikan karakter melalui ekosistem lingkungan sekolah yang aman, rekreatif, edukatif dan kegotong-royongan antar pemangku kepentingan. SAS mengembangkan sekolah berbasis kearifan dan keunggulan sekolah dan menguatkan partisipasi masyarakat secara bergotong-royong untuk mewujudkan pembelajaran bersama masyarakat.
7. Beasiswa Pemuda Tangguh, merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan kemudahan dan keterjangkauan akses pendidikan kepada seluruh masyarakat usia sekolah di Kota Surabaya. Program ini tentunya diprioritaskan kepada masyarakat yang terdata sebagai keluarga miskin. Beasiswa ini diberikan mulai dari jejang Pendidikan SD/SMP/SMA sampai dengan jenjang Perguruan Tinggi. Adapun rincian beasiswa yang diberikan antara lain biaya pendidikan, biaya pendukung pendidikan, seragam, serta sepatu. Tata cara pemberian beasiswa ini

tercantum di dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 135 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa;

8. KECAPIN MAMS (Kelas Calon Pengantin & Mama Menyusui), merupakan program di Bidang Kesehatan yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada calon pengantin dan Ibu menyusui sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya bayi dengan status gizi buruk, stunting, masalah tumbuh kembang bayi lainnya serta kehamilan resiko tinggi yang dapat mengakibatkan kematian Ibu dan bayi;
9. E-Me Health merupakan aplikasi layanan berobat dan konsultasi permasalahan psikologi atau gejala gangguan mental umum seperti kecemasan, depresi serta gejala somatik lainnya. Inovasi ini untuk mendekatkan dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan akses kesehatan jiwa;
10. Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan, program ini berupaya memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan pemerintah utamanya administrasi kependudukan. Upaya yang akan dilakukan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat dalam lingkup kerja Kelurahan;
11. SIGAP (Sistem Informasi Infrastruktur Kedaruratan Gempa), merupakan pusat informasi infrastruktur yang bekerja sama dengan pihak ITS Surabaya dan berguna pada saat kondisi darurat becana khususnya gempa bumi. Aplikasi ini memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat mengenai kejadian gempa yang terjadi serta menunjukkan akses menuju posko atau fasilitas kesehatan / kedaruratan terdekat;
12. Wira-Wiri Surabaya merupakan Layanan angkutan pengumpan / *Feeder* yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan layanan kepada masyarakat sampai ke kawasan lingkungan.

4.2.7 Kebijakan Pencapaian SPM

4.2.7.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Jenis pelayanan dasar pada Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan meliputi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan.

Penjabaran terkait SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.11
Indikator SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap Tahun

Dalam rangka pendukung pencapaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2024, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan didukung dengan alokasi anggaran semula sebesar **Rp2.019.825.100.759** menjadi **Rp 1.983.303.636.595** dengan rincian seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.12
Alokasi Anggaran Pendukung Pencapaian SPM
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Nilai Anggaran Semula	Nilai Anggaran Menjadi	PD Pengampu
KOTA SURABAYA		**2.019.825.100.759**	**1.983.303.636.595**	Dinas Pendidikan
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.033.810.139.305**	**1.002.110.236.088**	
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.250.660.492	1.279.660.492	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.250.660.492	1.279.660.492	
	2 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	768.925.702	772.896.952	
	3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.741.958.513	1.450.020.141	
	1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	3.741.958.513	1.450.020.141	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Nilai Anggaran Semula	Nilai Anggaran Menjadi	PD Pengampu
			Bangunan Lainnya			
	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6.838.820.075	7.161.909.328	
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.077.001.153	1.987.513.985	
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.761.818.922	5.174.395.343	
	5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.021.209.774.523	991.445.776.175	
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.021.209.774.523	991.445.776.175	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**950.534.899.779**	**981.193.400.507**	
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		452.536.984.268	479.508.864.293	
		1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	24.972.913.803	20.678.920.089	
		2	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	6.427.795.429	4.997.730.455	
		3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	189.681.031.375	224.074.960.927	
		4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3.134.952.000	3.134.952.000	
		5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.088.877.295	1.571.427.576	
		6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	905.075.192	699.176.750	
		7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	127.664.000	124.382.000	
		8	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	208.809.420.000	208.800.420.000	
		9	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	15.918.437.174	14.964.294.496	
		10	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	470.818.000	462.600.000	
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		282.279.907.877	276.939.577.714	
		1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	16.481.625.542	14.276.793.022	
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10.910.917.104	10.769.509.943	
		3	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	7.437.087.208	1.501.062.466	
		4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	118.556.843.410	121.804.510.238	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Nilai Anggaran Semula	Nilai Anggaran Menjadi	PD Pengampu
	5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3.912.957.598	3.770.639.650	
	6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	766.799.895	658.049.895	
	7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	192.123.182	141.462.500	
	8	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	123.637.600.000	123.637.600.000	
	9	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	383.953.938	379.950.000	
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		125.672.884.379	124.819.672.254	
	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	169.898.000	169.898.000	
	2	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	619.928.666	1.516.109.204	
	3	Pengadaan Perlengkapan PAUD	290.979.802	209.086.362	
	4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	4.787.929.917	4.811.634.464	
	5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	50.000.000	50.000.000	
	6	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	53.979.731.654	53.740.012.254	
	7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	4.033.255.500	2.585.155.500	
	8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	846.120.840	842.736.470	
	9	Pengelolaan Dana BOP PAUD	60.895.040.000	60.895.040.000	
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		90.045.123.255	99.925.286.246	
	1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	7.583.216.718	4.203.200.214	
	2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	72.703.075	73.953.075	
	3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	122.630.000	102.430.000	
	4	Pengelolaan Dana BOP Sekolah	4.729.770.000	4.729.770.000	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Nilai Anggaran Semula	Nilai Anggaran Menjadi	PD Pengampu
			Nonformal/Kesetaraan			
		5	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.317.899.652	888.829.787	
		76	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	76.218.903.810	89.927.103.170	
3	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			**35.480.061.675**	**35/481/311/675**	
	1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		35.480.061.675	35/481/311/675	
		1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	644.061.675	645.311.675	
		2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	34.836.000.000	34.836.000.000	

4.2.7.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota terdiri atas:

- Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- Pelayanan kesehatan balita;
- Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan

- Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Penjabaran terkait SPM Urusan Kesehatan ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.13
Indikator SPM Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
Urusan Kesehatan				
1	Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4) sesuai standar	100%	Setiap Tahun
2	Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100%	Setiap Tahun
3	Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%	Setiap Tahun
4	Kesehatan Balita	Cakupan balita usia 0-59 yang mendapat pelayanan kesehatan balita sehat sesuai standar	100%	Setiap Tahun
5	Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%	Setiap Tahun
6	Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase pengunjung usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100%	Setiap Tahun
7	Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100%	Setiap Tahun
8	Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100%	Setiap Tahun
9	Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100%	Setiap Tahun
10	Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerjanya yang mendapat	100%	Setiap Tahun

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
		pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun		
11	Kesehatan Orang dengan TB	Persentase jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100%	Setiap Tahun
12	Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100%	Setiap Tahun

Dalam rangka pendukung pencapaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2024, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan didukung dengan alokasi anggaran semula sebesar **Rp 429.703.406.307** menjadi **Rp 530.472.008.846** dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.14
Alokasi Anggaran Pendukung Pencapaian SPM
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Nilai Anggaran Semula	Nilai Anggaran Menjadi	PD Pengampu
	KOTA SURABAYA			429.703.406.307	530.472.008.846	Dinas Kesehatan
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			429.703.406.307	530.472.008.846	
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		429.703.406.307	530.472.008.846	
		1	Operasional Pelayanan Puskesmas	52.925.357.385	51.900.606.430	
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	5.225.480.335	5.186.725.535	
		3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	495.755.200	495.755.200	
		4	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	1.312.197.100	1.312.197.100	
		5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	112.094.700	103.094.700	
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	133.956.869	133.956.869	
		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	18.086.740.440	14252.025.046	
		8	Pengelolaan pelayanan	1.275.564.498	1.275.564.498	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Nilai Anggaran Semula	Nilai Anggaran Menjadi	PD Pengampu
		kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
	9	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	773.718.678	657.783.718	
	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	15.557.549.518	15.552.838.123	
	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	796.110.557	792.360.557	
	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	460.194.469	348.954.469	
	13	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.221.609.900	7.262.161.600	
	14	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.972.386.340	6.690.169.585	
	15	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	319.486.938.796	421.637.105.400	
	16	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.998.113.900	1,998,113,900	
	17	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	841.879.501	841.879.501	
	18	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	27.758.121	30.716.615	

4.2.7.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/ORT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Miimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

Penerima Pelayanan Dasar pada SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- Rumah Tangga. terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum; dan

- Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota. terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Penjabaran terkait SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.15
Indikator SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap Tahun
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap Tahun

Dalam rangka pendukung pencapaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2024, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga didukung dengan alokasi anggaran semula sebesar **Rp 8.289.105.053** menjadi **Rp 9.740.190.395** dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.16
Alokasi Anggaran Pendukung Pencapaian SPM
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Nilai Anggaran Semula	Nilai Anggaran Menjadi	PD/Instansi Pengampu
	KOTA SURABAYA			8.289.105.053	9.740.190.395	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			8.289.105.053	9.740.190.395	
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		8.289.105.053	9.740.190.395	
		1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	6.134.647.370	6.280.646.942	
		2	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	2.154.457.683	2.693.643.453	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Nilai Anggaran Semula	Nilai Anggaran Menjadi	PD/Instansi Pengampu
		3	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	-	765.900.000	

4.2.7.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/ORT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Mniimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Penerima Pelayanan SPM Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- Penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.
- Penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

Penjabaran terkait SPM Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.17
Indikator SPM Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2	Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat	100%	Setiap Tahun

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
	yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten daerah	program pemerintah daerah kabupaten / kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni		

Dalam rangka pendukung pencapaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2024, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan didukung dengan alokasi anggaran semula sebesar **Rp 111.054.273.791** menjadi **Rp 105.486.387.786** dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.18
Alokasi Anggaran Pendukung Pencapaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Nilai Anggaran Semula	Nilai Anggaran Menjadi	PD Pengampu
	KOTA SURABAYA	**111.054.273.791**	**105.486.387.786**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**111.054.273.791**	**105.486.387.786**	
	1 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	68.702.358.309	68.969.975.293	
	1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	68.702.358.309	68.969.975.293	
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**20.170.315.154**	**17.177.406.720**	
	1 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	20.170.315.154	17.177.406.720	
	1 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	20.170.315.154	17.177.406.720	
3	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**22.181.600.328**	**19.339.005.773**	
	1 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	22.181.600.328	19.339.005.773	
	1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	22.181.600.328	19.339.005.773	

4.2.7.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi:

- Pelayanan kerugian materil;
- Pelayanan pengobatan

Penerima jenis pelayanan dasar sub-urusan Trantibum sebagaimana dimaksud yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda provinsi dan kabupaten/kota serta Perkada.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana Daerah kabupaten/kota meliputi:

- Pelayanan informasi rawan bencana;
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Kriteria penerima pelayanan dasar sub-urusan bencana Daerah kabupaten/kota adalah setiap Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Jenis Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Kriteria penerima pelayanan dasar sub urusan kebakaran yaitu setiap Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah kabupaten/kota.

Penjabaran terkait SPM Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.19
Indikator SPM Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkada	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun

Dalam rangka pendukung pencapaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2024, Pemerintah Kota Surabaya melalui Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah didukung dengan alokasi anggaran semula sebesar **Rp 211.371.226.152** menjadi **Rp 195.215.017.701** dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.20
Alokasi Anggaran Pendukung Pencapaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Nilai Anggaran Semula	Nilai Anggaran Menjadi	PD Pengampu
	KOTA SURABAYA	**211.371.226.152**	**195.215.017.701**	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Nilai Anggaran Semula	Nilai Anggaran Menjadi	PD Pengampu
1	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**82.612.187.852**	**84.698.233.389**	Satuan Polisi Pamong Praja
	1		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	74.821.114.240	76.962.664.729	
		1	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	2.482.574.855	2.720.412.090	
		2	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	762.472.843	1.469.970.170	
		3	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	148.020.000	158.020.000	
		4	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	69.618.710.154	70.276.476.081	
		5	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1.593.595.300	2.121.145.300	
		6	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	215.741.088	216.641.088	
	2		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	7.619.408.012	7.559.088.660	
		1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.538.197.858	1.267.510.858	
		2	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.891.912.654	5.070.280.302	
		3	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.189.297.500	1.221.297.500	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Nilai Anggaran Semula	Nilai Anggaran Menjadi	PD Pengampu
	3		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	171.665.600	176.480.000	
		1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	171.665.600	176.480.000	
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**31.083.729.225**	**30.592.323.861**	
	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.130.967.938	26.586.807.388	
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.130.967.938	26.586.807.388	
	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.505.622.162	1.431.232.287	
		1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.505.622.162	1.431.232.287	
	3		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.447.139.125	2.574.284.186	
		1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.447.139.125	2.574.284.186	
3	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**			**73.721.381.478**	**52.819.774.921**	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	72.740.335.703	51.739.534.374	
		1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.893.355.201	35.105.422.090	
		2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	7.955.882.869	7.528.225.539	
		3	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	1.713.323.255	1.567.207.670	
		4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	32.177.774.378	7.538.679.075	
	2		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	515.940.376	578.905.548	
		1	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	515.940.376	578.905.548	
	3		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	465.105.399	501.335.999	
		1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	465.105.399	501.335.999	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Nilai Anggaran Semula	Nilai Anggaran Menjadi	PD Pengampu
4	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**			**23.953.927.597**	**27.104.685.530**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		2.032.078.488	1.973.089.680	
		1	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	368.981.001	368.981.001	
		2	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	387.785.137	270.522.517	
		3	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1.275.312.350	1.333.586.162	
	2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		21.921.849.109	25.131.595.850	
		1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	19.843.578.031	23.000.324.772	
		2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2.078.271.078	2.131.271.078	

4.2.7.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Pemerintahan Bidang Sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
- Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
- Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
- Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota

Penerima Pelayanan Dasar pada SPM Urusan Pemerintahan Bidang Sosial untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar merupakan warga negara Indonesia dengan ketentuan:

- Penyandang Disabilitas Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;

- Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- Lanjut Usia Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
- Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial;

Korban Bencana daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/ Kota.

Penjabaran terkait SPM Urusan Pemerintahan Bidang Sosial ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.21
Indikator SPM Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial				
1	Pelayanan sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
3	Pelayanan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
4	Pelayanan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
5	Pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun

Dalam rangka pendukung pencapaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2024, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial didukung dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp 39.848.476.604 menjadi Rp 40.464.937.518 dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.22
Alokasi Anggaran Pendukung Pencapaian SPM
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Nilai Anggaran Semula	Nilai Anggaran Menjadi	PD Pengampu
	KOTA SURABAYA			**39.848.476.604**	**40.464.937.518**	Dinas Sosial
1	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**39.848.476.604**	**40.464.937.518**	
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		29.558.712.533	29.190.998.706	
		1	Penyediaan Permakanan	10.609.927.667	10.551.754.677	
		2	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	391.915.029	187.602.086	
		3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	11.079.518.998	11.003.985.145	
		4	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	6.836.958.513	6.763.540.535	
		5	Pemberian Layanan Rujukan	640.392.326	684.116.263	
	2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		10.289.764.071	11.273.938.812	
		1	Pemberian Layanan Kedaruratan	3.707.820.962	4.039.896.909	
		2	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	6.581.943.109	7.234.041.903	

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Dokumen Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 merupakan rencana tahunan yang memuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021- 2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakanlam RPJMD serta evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2024.

5.1 Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024.

Program dan kegiatan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 disusun berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024, yang mempertimbangkan RPJMN 2020-2024 dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, RPJPD Kota Surabaya tahun 2005-2025 serta RPJMD Kota Surabaya 2021-2026, penelaahan atas Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja PD) Tahun 2024, hasil evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2024 serta memperhatikan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 serta Rancangan RPJPD Kota Surabaya Tahun 2025-2045 sebagai bahan pertimbangan dalam proyeksi tahun 2025. Pada Perubahan RKPD Tahun 2024, tidak terdapat penambahan program dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024. Namun terdapat penambahan 1 kegiatan dan 69 subkegiatan baru yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai tindak lanjut atas surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1/1819.A/SJ tanggal 22 April 2024 perihal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK TA. 2024. Program dan kegiatan pada dokumen Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 beserta tolok ukur Perangkat Daerah disampaikan secara detail pada Tabel V.1 :

Tabel V.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2024

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	300 Dokumen	300 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	254 Badan Usaha	254 Badan Usaha	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	48 Pengaduan	48 Pengaduan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	275.86 Ha	275.86 Ha	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	125 Unit	125 Unit	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	143.26 Unit	14 Unit	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	650430 Ton	650430 Ton	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pengangkutan	515238 Ton	515238 Ton	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	230 Unit	230 Unit	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	255 Dokumen	255 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen	3 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50 Unit	50 Unit	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1650 Kawasan	1650 Kawasan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	31 Kawasan	31 Kawasan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	5 Unit	5 Unit	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	11000 Orang	11000 Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	467 Orang	467 Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	10 Orang	10 Orang	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	849 Unit	849 Unit	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	2 Dokumen	2 Dokumen	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	2 Dokumen	2 Dokumen	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	900 Orang	900 Orang	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Penyelamatan
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	12 Dokumen	12 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	1615 Orang	1615 Orang	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	96 Unit	96 Unit	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	50 Rumah Tangga	200 Rumah Tangga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	36 Dokumen	36 Dokumen	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu	30 Kelompok	30 Kelompok	Dinas Ketahanan	Dinas Ketahanan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
		Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			Pangan dan Pertanian	Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	58 Unit	58 Unit	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	60 Unit	60 Unit	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	35 Unit Usaha	35 Unit Usaha	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	180 Pelaku Usaha	180 Pelaku Usaha	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	15 Laporan	15 Laporan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
	dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan	4 Laporan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	16 Laporan	16 Laporan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	2 Unit	2 Unit	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	4 Laporan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	1 Laporan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	12 Laporan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	7 Unit	7 Unit	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1 Unit	1 Unit	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	220 Perusahaan	220 Perusahaan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	12 Laporan	12 Laporan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50 Perkara	50 Perkara	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	110 Perkara	110 Perkara	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan	12 Lembaga	12 Lembaga	Dinas Perindustrian	Dinas Perindustrian

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
		Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja			dan Tenaga Kerja	dan Tenaga Kerja
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	720 Orang	720 Orang	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	50 Perusahaan	50 Perusahaan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	4 Dokumen	4 Dokumen	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja	1950 Orang	1950 Orang	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	1100 Orang	1100 Orang	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	250 Orang	250 Orang	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	250 Orang	250 Orang	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	250 Orang	250 Orang	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	4 Dokumen	4 Dokumen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	270 Pelaku Usaha	270 Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penanaman Modal	2900 Kegiatan Usaha	2900 Kegiatan Usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
		Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			dan Perdagangan	dan Perdagangan
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	83 Unit Usaha	83 Unit Usaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	136 Unit Usaha	136 Unit Usaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	103 Orang	103 Orang	Dinas Koperasi Usaha Kecil	Dinas Koperasi Usaha Kecil

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
	Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			dan Menengah dan Perdagangan	dan Menengah dan Perdagangan
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	415 Unit Usaha	415 Unit Usaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12 Dokumen	12 Dokumen	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	250 Orang	250 Orang	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	60 Orang	60 Orang	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	220 Orang	220 Orang	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					serta Pariwisata	Raga serta Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro	500 Unit Usaha	500 Unit Usaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	5220 UMKM	5220 UMKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	2 Lokasi	2 Lokasi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	60 Laporan	60 Laporan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	1 Lokasi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	611 Dokumen	611 Dokumen	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	2 Dokumen	2 Dokumen	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4 Dokumen	4 Dokumen	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Pelaksanaan Reses	150 Dokumen	100 Dokumen	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	36 Dokumen	36 Dokumen	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Daya Manusia
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1 Laporan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5797 Dokumen	5797 Dokumen	Badan Kepegawaian dan Pengembanga	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					n Sumber Daya Manusia	Daya Manusia
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	5 Laporan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	471 Berkas	471 Berkas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	66 Laporan	66 Laporan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	300 Arsip	300 Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	70 Laporan	70 Laporan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1200 Pengguna	1200 Pengguna	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,	2232 Orang	2232 Orang	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
		Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				Daya Manusia
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	4 Laporan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17 Unit	15 Unit	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	204 Unit	204 Unit	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan	96 Laporan	96 Laporan	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	36 Laporan	16 Laporan	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	142 Dokumen	142 Dokumen	Inspektorat	Inspektorat

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	60 Laporan	60 Laporan	Inspektorat	Inspektorat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	7 Laporan	7 Laporan	Inspektorat	Inspektorat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	10 Laporan	Inspektorat	Inspektorat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	5 Laporan	5 Laporan	Inspektorat	Inspektorat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan	20 Laporan	Inspektorat	Inspektorat
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	880 Arsip	880 Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	Inspektorat	Inspektorat
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	Inspektorat	Inspektorat
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	25 Kegiatan	25 Kegiatan	Inspektorat	Inspektorat

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	Inspektorat	Inspektorat
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	60 perangkat daerah	60 perangkat daerah	Inspektorat	Inspektorat
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	60 perangkat daerah	60 perangkat daerah	Inspektorat	Inspektorat
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	12 Dokumen	12 Dokumen	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	2 Laporan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	2 Laporan	2 Laporan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	2 Laporan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	20 Kasus	20 Kasus	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	60 Dokumen	60 Dokumen	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	60 Dokumen	60 Dokumen	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	2 Laporan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	2 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	322 Unit	306 Unit	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	58 Dokumen	58 Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	2 Unit	2 Unit	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	190 Unit	190 Unit	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	58 Dokumen	58 Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12 Dokumen	12 Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	4 Dokumen	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	244 Dokumen	244 Dokumen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	94731 Dokumen	97.500 Dokumen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	24 Dokumen	24 Dokumen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	19814 Obyek Pajak	19814 Obyek Pajak	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2520 Unit	1.531 Unit	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90 Unit	90 Unit	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5 Paket	5 Paket	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1500 Unit	1500 Unit	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13 Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	58 Perangkat Daerah	58 Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	12 Dokumen	12 Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	4 Dokumen	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16 Laporan	16 Laporan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	300 Orang	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	98 Dokumen	98 Dokumen	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala	4 Laporan	4 Laporan	Badan Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembanguna

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Pembangunan Daerah			Daerah, Penelitian dan Pengembanga n	n Daerah, Penelitian dan Pengembang an
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Benowo	Kec. Benowo
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Bulak	Kec. Bulak
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Genteng	Kec. Genteng
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan	360 Laporan	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Pakal	Kec. Pakal
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan	360 Laporan	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Semampir	Kec. Semampir
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Tandes	Kec. Tandes
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan	360 Laporan	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	11500 Kegiatan Usaha	11500 Kegiatan Usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	12000 Pelaku Usaha	12000 Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit	1 Unit	Kelurahan Asemrowo	Kec. Asemrowo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit	1 Unit	Kelurahan Genting Kalianak	Kec. Asemrowo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit	1 Unit	Kelurahan Tambak Sarioso	Kec. Asemrowo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Asemrowo	Kec. Asemrowo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Genting Kalianak	Kec. Asemrowo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Tambak Sarioso	Kec. Asemrowo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	17 Unit	17 Unit	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	9 Unit	9 Unit	Kelurahan Kandangan	Kec. Benowo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 Unit	3 Unit	Kelurahan Romokalisari	Kec. Benowo

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 Unit	5 Unit	Kelurahan Sememi	Kec. Benowo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 Unit	4 Unit	Kelurahan Tambak Oso Wilangun	Kec. Benowo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Kandangan	Kec. Benowo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Romokalisari	Kec. Benowo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Sememi	Kec. Benowo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Tambak Oso Wilangun	Kec. Benowo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Benowo	Kec. Benowo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Benowo	Kec. Benowo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	26 Unit	26 Unit	Kec. Benowo	Kec. Benowo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 Unit	6 Unit	Kelurahan Alun-Alun Contong	Kec. Bubutan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	9 Unit	9 Unit	Kelurahan Bubutan	Kec. Bubutan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 Unit	10 Unit	Kelurahan Gundih	Kec. Bubutan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	9 Unit	9 Unit	Kelurahan Jepara	Kec. Bubutan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 Unit	10 Unit	Kelurahan Tembok Dukuh	Kec. Bubutan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Alun-Alun Contong	Kec. Bubutan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Bubutan	Kec. Bubutan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Gundih	Kec. Bubutan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Jepara	Kec. Bubutan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Tembok Dukuh	Kec. Bubutan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	6 Laporan	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	44 Unit	44 Unit	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 Unit	3 Unit	Kelurahan Bulak	Kec. Bulak
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 Unit	3 Unit	Kelurahan Kedung Cowek	Kec. Bulak
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 Unit	3 Unit	Kelurahan Kenjeran	Kec. Bulak
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 Unit	3 Unit	Kelurahan Sukolilo Baru	Kec. Bulak
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Kedung Cowek	Kec. Bulak
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	Kelurahan Kenjeran	Kec. Bulak
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Sukolilo Baru	Kec. Bulak
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Bulak	Kec. Bulak
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Bulak	Kec. Bulak
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Bulak	Kec. Bulak
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	21 Unit	21 Unit	Kec. Bulak	Kec. Bulak

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 Unit	3 Unit	Kelurahan Dukuh Kupang	Kec. Dukuh Pakis
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 Unit	1 Unit	Kelurahan Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 Unit	3 Unit	Kelurahan Gunungsari	Kec. Dukuh Pakis
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 Unit	3 Unit	Kelurahan Pradah Kalikendal	Kec. Dukuh Pakis
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Dukuh Kupang	Kec. Dukuh Pakis
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	Kelurahan Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Gunungsari	Kec. Dukuh Pakis
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	Kelurahan Pradah Kalikendal	Kec. Dukuh Pakis
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	31 Unit	31 Unit	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	9 Unit	10 Unit	Kelurahan Dukuh Menanggal	Kec. Gayungan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit	10 Unit	Kelurahan Gayungan	Kec. Gayungan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8 Unit	8 Unit	Kelurahan Ketintang	Kec. Gayungan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 Unit	9 Unit	Kelurahan Menanggal	Kec. Gayungan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Dukuh Menanggal	Kec. Gayungan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Gayungan	Kec. Gayungan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Ketintang	Kec. Gayungan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Menanggal	Kec. Gayungan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	30 Unit	30 Unit	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	66 Unit	8 Unit	Kelurahan Embong Kaliasin	Kec. Genteng
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	24 Unit	3 Unit	Kelurahan Genteng	Kec. Genteng
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	13 Unit	10 Unit	Kelurahan Kapasari	Kec. Genteng
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	27 Unit	5 Unit	Kelurahan Ketabang	Kec. Genteng
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 Unit	4 Unit	Kelurahan Peneleh	Kec. Genteng
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Embong Kaliasin	Kec. Genteng
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Genteng	Kec. Genteng
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Kapasari	Kec. Genteng
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Ketabang	Kec. Genteng
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Peneleh	Kec. Genteng
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Genteng	Kec. Genteng

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Genteng	Kec. Genteng
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	61 Unit	61 Unit	Kec. Genteng	Kec. Genteng
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Unit	1 Unit	Kelurahan Airlangga	Kec. Gubeng
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Unit	9 Unit	Kelurahan Baratajaya	Kec. Gubeng
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit	2 Unit	Kelurahan Gubeng	Kec. Gubeng
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit	2 Unit	Kelurahan Kertajaya	Kec. Gubeng
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 Unit	5 Unit	Kelurahan Mojo	Kec. Gubeng
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit	2 Unit	Kelurahan Pucang Sewu	Kec. Gubeng
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Airlangga	Kec. Gubeng
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Baratajaya	Kec. Gubeng
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Gubeng	Kec. Gubeng

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Kertajaya	Kec. Gubeng
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Mojo	Kec. Gubeng
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Pucang Sewu	Kec. Gubeng
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	52 Unit	52 Unit	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	12 Unit	3 Unit	Kelurahan Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Unit	1 Unit	Kelurahan Gunung Anyar Tambak	Kec. Gunung Anyar
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 Unit	4 Unit	Kelurahan Rungkut Menanggal	Kec. Gunung Anyar
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit	2 Unit	Kelurahan Rungkut Tengah	Kec. Gunung Anyar
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	Kelurahan Gunung Anyar Tambak	Kec. Gunung Anyar
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Rungkut Tengah	Kec. Gunung Anyar
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	Kelurahan Rungkut Menanggal	Kec. Gunung Anyar
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	29 Unit	29 Unit	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	12 Unit	10 Unit	Kelurahan Karah	Kec. Jambangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7 Unit	7 Unit	Kelurahan Jambangan	Kec. Jambangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 Unit	3 Unit	Kelurahan Kebonsari	Kec. Jambangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 Unit	4 Unit	Kelurahan Pagesangan	Kec. Jambangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	Kelurahan Karah	Kec. Jambangan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	Kelurahan Jambangan	Kec. Jambangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Kebonsari	Kec. Jambangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	Kelurahan Pagesangan	Kec. Jambangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	48 Laporan	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	26 Unit	26 Unit	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7 Unit	7 Unit	Kelurahan Karang Pilang	Kec. Karangpilang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	13 Unit	8 Unit	Kelurahan Kebraon	Kec. Karangpilang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	13 Unit	9 Unit	Kelurahan Kedurus	Kec. Karangpilang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 Unit	3 Unit	Kelurahan Waru Gunung	Kec. Karangpilang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Karang Pilang	Kec. Karangpilang

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Kebraon	Kec. Karangpilang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Kedurus	Kec. Karangpilang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Waru Gunung	Kec. Karangpilang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	29 Unit	29 Unit	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	14 Unit	14 Unit	Kelurahan Sidotopo Wetan	Kec. Kenjeran
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	12 Unit	12 Unit	Kelurahan Tanah Kali Kedinding	Kec. Kenjeran
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8 Unit	8 Unit	Kelurahan Bulak Banteng	Kec. Kenjeran
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 Unit	4 Unit	Kelurahan Tambak Wedi	Kec. Kenjeran
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Sidotopo Wetan	Kec. Kenjeran

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Tanah Kali Kedinding	Kec. Kenjeran
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Bulak Banteng	Kec. Kenjeran
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Tambak Wedi	Kec. Kenjeran
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	38 Unit	38 Unit	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 Unit	4 Unit	Kelurahan Kemayoran	Kec. Krembangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 Unit	3 Unit	Kelurahan Dupak	Kec. Krembangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 Unit	2 Unit	Kelurahan Morokrembangan	Kec. Krembangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 Unit	6 Unit	Kelurahan Krembangan Selatan	Kec. Krembangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 Unit	2 Unit	Kelurahan Perak Barat	Kec. Krembangan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	Kelurahan Kemayoran	Kec. Krembangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Dupak	Kec. Krembangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Krembangan Selatan	Kec. Krembangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	Kelurahan Perak Barat	Kec. Krembangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	Kelurahan Morokrembangan	Kec. Krembangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	44 Unit	44 Unit	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	33 Unit	10 Unit	Kelurahan Bangkingan	Kec. Lakarsantri
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 Unit	3 Unit	Kelurahan Jeruk	Kec. Lakarsantri
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Unit	1 Unit	Kelurahan Lakarsantri	Kec. Lakarsantri

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	15 Unit	15 Unit	Kelurahan Lidah Kulon	Kec. Lakarsantri
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 Unit	3 Unit	Kelurahan Lidah Wetan	Kec. Lakarsantri
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Unit	1 Unit	Kelurahan Sumurwelut	Kec. Lakarsantri
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Bangkingan	Kec. Lakarsantri
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Jeruk	Kec. Lakarsantri
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Lidah Kulon	Kec. Lakarsantri
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Lidah Wetan	Kec. Lakarsantri
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Sumurwelut	Kec. Lakarsantri
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	48 Laporan	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	32 Unit	32 Unit	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Unit	1 Unit	Kelurahan Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Unit	1 Unit	Kelurahan Dukuh Sutorejo	Kec. Mulyorejo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Unit	1 Unit	Kelurahan Kalisari	Kec. Mulyorejo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Unit	1 Unit	Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Kec. Mulyorejo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Unit	1 Unit	Kelurahan Manyar Sambangan	Kec. Mulyorejo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Unit	1 Unit	Kelurahan Kalijudan	Kec. Mulyorejo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Dukuh Sutorejo	Kec. Mulyorejo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Kalisari	Kec. Mulyorejo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Kec. Mulyorejo

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Manyar Sambangan	Kec. Mulyorejo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Kalijudan	Kec. Mulyorejo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	53 Unit	53 Unit	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit	2 Unit	Kelurahan Bongkaran	Kec. Pabean Cantian
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit	2 Unit	Kelurahan Krembangan Utara	Kec. Pabean Cantian
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit	2 Unit	Kelurahan Nyamplungan	Kec. Pabean Cantian
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit	2 Unit	Kelurahan Tanjung Perak	Kec. Pabean Cantian
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Bongkaran	Kec. Pabean Cantian
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Krembangan Utara	Kec. Pabean Cantian

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Nyamplungan	Kec. Pabean Cantian
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Tanjung Perak	Kec. Pabean Cantian
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	50 Unit	50 Unit	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	33 Unit	33 Unit	Kelurahan Babat Jerawat	Kec. Pakal
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 Unit	6 Unit	Kelurahan Pakal	Kec. Pakal
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 Unit	3 Unit	Kelurahan Sumberejo	Kec. Pakal
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	20 Unit	20 Unit	Kelurahan Benowo	Kec. Pakal
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	Kelurahan Babat Jerawat	Kec. Pakal
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Pakal	Kec. Pakal

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	Kelurahan Sumberejo	Kec. Pakal
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	Kelurahan Benowo	Kec. Pakal
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Pakal	Kec. Pakal
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	48 Laporan	Kec. Pakal	Kec. Pakal
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	34 Unit	34 Unit	Kec. Pakal	Kec. Pakal
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 Unit	5 Unit	Kelurahan Kalirungkut	Kec. Rungkut
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	12 Unit	12 Unit	Kelurahan Rungkut Kidul	Kec. Rungkut
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 Unit	10 Unit	Kelurahan Kedung Baruk	Kec. Rungkut
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 Unit	4 Unit	Kelurahan Penjaringansari	Kec. Rungkut
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 Unit	4 Unit	Kelurahan Medokan Ayu	Kec. Rungkut
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 Unit	8 Unit	Kelurahan Wonorejo	Kec. Rungkut

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Kalirungkut	Kec. Rungkut
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Rungkut Kidul	Kec. Rungkut
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Kedung Baruk	Kec. Rungkut
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Penjaringansari	Kec. Rungkut
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	Kelurahan Medokan Ayu	Kec. Rungkut
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Wonorejo	Kec. Rungkut
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	74 Unit	74 Unit	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	9 Unit	9 Unit	Kelurahan Lontar	Kec. Sambikerep
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit	2 Unit	Kelurahan Made	Kec. Sambikerep

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7 Unit	7 Unit	Kelurahan Sambikerep	Kec. Sambikerep
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit	2 Unit	Kelurahan Beringin	Kec. Sambikerep
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Lontar	Kec. Sambikerep
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Sambikerep	Kec. Sambikerep
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Made	Kec. Sambikerep
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Beringin	Kec. Sambikerep
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	48 Laporan	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	38 Unit	38 Unit	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit	2 Unit	Kelurahan Pakis	Kec. Sawahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit	2 Unit	Kelurahan Putat Jaya	Kec. Sawahan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit	2 Unit	Kelurahan Kupang Krajan	Kec. Sawahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit	2 Unit	Kelurahan Banyu Urip	Kec. Sawahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit	2 Unit	Kelurahan Sawahan	Kec. Sawahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit	2 Unit	Kelurahan Petemon	Kec. Sawahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	Kelurahan Banyu Urip	Kec. Sawahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Kupang Krajan	Kec. Sawahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	Kelurahan Pakis	Kec. Sawahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	Kelurahan Putat Jaya	Kec. Sawahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Sawahan	Kec. Sawahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Petemon	Kec. Sawahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	72 Unit	72 Unit	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 Unit	5 Unit	Kelurahan Ujung	Kec. Semampir
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit	2 Unit	Kelurahan Sidotopo	Kec. Semampir
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 Unit	3 Unit	Kelurahan Pegirian	Kec. Semampir
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 Unit	4 Unit	Kelurahan Wonokusumo	Kec. Semampir
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit	2 Unit	Kelurahan Ampel	Kec. Semampir
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Ujung	Kec. Semampir
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Wonokusumo	Kec. Semampir
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Ampel	Kec. Semampir
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Sidotopo	Kec. Semampir

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Pegirian	Kec. Semampir
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Semampir	Kec. Semampir
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Semampir	Kec. Semampir
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	70 Unit	70 Unit	Kec. Semampir	Kec. Semampir
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 Unit	5 Unit	Kelurahan Kapasan	Kec. Simokerto
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 Unit	3 Unit	Kelurahan Sidodadi	Kec. Simokerto
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	35 Unit	25 Unit	Kelurahan Simolawang	Kec. Simokerto
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	18 Unit	10 Unit	Kelurahan Tambakrejo	Kec. Simokerto
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit	2 Unit	Kelurahan Simokerto	Kec. Simokerto
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	Kelurahan Kapasan	Kec. Simokerto
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Tambakrejo	Kec. Simokerto

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	Kelurahan Sidodadi	Kec. Simokerto
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Simokerto	Kec. Simokerto
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	Kelurahan Simolawang	Kec. Simokerto
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	48 Unit	48 Unit	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 Unit	4 Unit	Kelurahan Keputih	Kec. Sukolilo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 Unit	4 Unit	Kelurahan Klampis Ngasem	Kec. Sukolilo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 Unit	5 Unit	Kelurahan Medokan Semampir	Kec. Sukolilo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 Unit	5 Unit	Kelurahan Menur Pumpungan	Kec. Sukolilo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 Unit	3 Unit	Kelurahan Nginden Jangkungan	Kec. Sukolilo

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	12 Unit	12 Unit	Kelurahan Semolowaru	Kec. Sukolilo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 Unit	6 Unit	Kelurahan Gebang Putih	Kec. Sukolilo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Gebang Putih	Kec. Sukolilo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Keputih	Kec. Sukolilo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Klampis Ngasem	Kec. Sukolilo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Medokan Semampir	Kec. Sukolilo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Menur Pumpungan	Kec. Sukolilo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	Kelurahan Nginden Jangkungan	Kec. Sukolilo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Semolowaru	Kec. Sukolilo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	67 Unit	67 Unit	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 Unit	4 Unit	Kelurahan Putat Gede	Kec. Sukomanunggal
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7 Unit	6 Unit	Kelurahan Simomulyo	Kec. Sukomanunggal
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 Unit	5 Unit	Kelurahan Simomulyo Baru	Kec. Sukomanunggal
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 Unit	6 Unit	Kelurahan Sonokwijenan	Kec. Sukomanunggal
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 Unit	5 Unit	Kelurahan Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 Unit	4 Unit	Kelurahan Tanjungsari	Kec. Sukomanunggal
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Putat Gede	Kec. Sukomanunggal
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Simomulyo	Kec. Sukomanunggal
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Simomulyo Baru	Kec. Sukomanunggal
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Sonokwijenan	Kec. Sukomanunggal

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Tanjungsari	Kec. Sukomanunggal
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	36 Unit	36 Unit	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7 Unit	7 Unit	Kelurahan Dukuh Setro	Kec. Tambaksari
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	11 Unit	11 Unit	Kelurahan Gading	Kec. Tambaksari
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8 Unit	8 Unit	Kelurahan Kapasmadya Baru	Kec. Tambaksari
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	12 Unit	12 Unit	Kelurahan Pacarkeling	Kec. Tambaksari
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	11 Unit	11 Unit	Kelurahan Pacarkembang	Kec. Tambaksari
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	11 Unit	11 Unit	Kelurahan Ploso	Kec. Tambaksari

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	9 Unit	9 Unit	Kelurahan Rangkah	Kec. Tambaksari
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	9 Unit	9 Unit	Kelurahan Tambaksari	Kec. Tambaksari
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Dukuh Setro	Kec. Tambaksari
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Gading	Kec. Tambaksari
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Kapasmadya Baru	Kec. Tambaksari
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Pacarkeling	Kec. Tambaksari
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Pacarkembang	Kec. Tambaksari
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Ploso	Kec. Tambaksari
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Rangkah	Kec. Tambaksari
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Tambaksari	Kec. Tambaksari
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	78 Unit	78 Unit	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Unit	1 Unit	Kelurahan Tandes	Kec. Tandes
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit	2 Unit	Kelurahan Karangpoh	Kec. Tandes
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit	2 Unit	Kelurahan Balongsari	Kec. Tandes
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Unit	1 Unit	Kelurahan Manukan Wetan	Kec. Tandes
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 Unit	3 Unit	Kelurahan Manukan Kulon	Kec. Tandes
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit	7 Unit	Kelurahan Banjar Sugihan	Kec. Tandes
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Tandes	Kec. Tandes
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Karangpoh	Kec. Tandes
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Balongsari	Kec. Tandes

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Manukan Wetan	Kec. Tandes
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Manukan Kulon	Kec. Tandes
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Banjar Sugihan	Kec. Tandes
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Tandes	Kec. Tandes
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Tandes	Kec. Tandes
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	51 Unit	51 Unit	Kec. Tandes	Kec. Tandes
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	12 Unit	12 Unit	Kelurahan Tegalsari	Kec. Tegalsari
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	36 Unit	9 Unit	Kelurahan Keputran	Kec. Tegalsari
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	18 Unit	12 Unit	Kelurahan Wonorejo	Kec. Tegalsari
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	29 Unit	12 Unit	Kelurahan Kedungdoro	Kec. Tegalsari
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	20 Unit	9 Unit	Kelurahan Dr. Soetomo	Kec. Tegalsari

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Tegalsari	Kec. Tegalsari
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Keputran	Kec. Tegalsari
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Wonorejo	Kec. Tegalsari
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Kedungdoro	Kec. Tegalsari
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Dr. Soetomo	Kec. Tegalsari
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	48 Laporan	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	48 Unit	48 Unit	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Unit	1 Unit	Kelurahan Kutisari	Kec. Tenggilis Mejoyo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Unit	1 Unit	Kelurahan Kendangsari	Kec. Tenggilis Mejoyo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Unit	1 Unit	Kelurahan Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Unit	1 Unit	Kelurahan Panjang Jiwo	Kec. Tenggilis Mejoyo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	Kelurahan Kutisari	Kec. Tenggilis Mejoyo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	Kelurahan Kendangsari	Kec. Tenggilis Mejoyo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	Kelurahan Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	Kelurahan Panjang Jiwo	Kec. Tenggilis Mejoyo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	25 Unit	25 Unit	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 Unit	6 Unit	Kelurahan Jajar Tunggal	Kec. Wiyung
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8 Unit	8 Unit	Kelurahan Balas Klumprik	Kec. Wiyung
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	9 Unit	9 Unit	Kelurahan Wiyung	Kec. Wiyung

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	11 Unit	11 Unit	Kelurahan Babatan	Kec. Wiyung
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Babatan	Kec. Wiyung
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Jajar Tunggal	Kec. Wiyung
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Balas Klumprik	Kec. Wiyung
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Wiyung	Kec. Wiyung
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	34 Unit	34 Unit	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 Unit	6 Unit	Kelurahan Siwalankerto	Kec. Wonocolo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8 Unit	8 Unit	Kelurahan Sidosermo	Kec. Wonocolo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	12 Unit	12 Unit	Kelurahan Bendul Merisi	Kec. Wonocolo

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit	2 Unit	Kelurahan Jemur Wonosari	Kec. Wonocolo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8 Unit	8 Unit	Kelurahan Margorejo	Kec. Wonocolo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	Kelurahan Siwalankerto	Kec. Wonocolo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Jemur Wonosari	Kec. Wonocolo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Bendul Merisi	Kec. Wonocolo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Margorejo	Kec. Wonocolo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Sidosermo	Kec. Wonocolo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	48 Laporan	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	44 Unit	44 Unit	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Unit	7 Unit	Kelurahan Darmo	Kec. Wonokromo

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 Unit	5 Unit	Kelurahan Jagir	Kec. Wonokromo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Unit	12 Unit	Kelurahan Ngagel	Kec. Wonokromo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	12 Unit	3 Unit	Kelurahan Ngagel Rejo	Kec. Wonokromo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	12 Unit	8 Unit	Kelurahan Sawunggaling	Kec. Wonokromo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8 Unit	5 Unit	Kelurahan Wonokromo	Kec. Wonokromo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Darmo	Kec. Wonokromo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Jagir	Kec. Wonokromo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Ngagel	Kec. Wonokromo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Kelurahan Ngagel Rejo	Kec. Wonokromo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Kelurahan Sawunggaling	Kec. Wonokromo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	Kelurahan Wonokromo	Kec. Wonokromo

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	58 Unit	58 Unit	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12 Dokumen	12 Dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	12 Laporan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	12 Dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	12 Dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	2 Dokumen	2 Dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	5 Dokumen	5 Dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	5 Dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	2 Dokumen	2 Dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Asemrowo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Balas Klumprik	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Balongsari	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Bangkingan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Banyu Urip	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Benowo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Bulak Banteng	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Dr. Soetomo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Dukuh Kupang	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Dupak	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Gading	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Gayungan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Gundih	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Gunung Anyar	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Jagir	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Jemursari	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Jeruk	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Kalijudan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Kalirungkut	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Kebonsari	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Kedungdoro	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Kedurus	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Kenjeran	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Keputih	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Ketabang	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Klampis Ngasem	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Krembangan Selatan	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Lidah Kulon	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Lontar	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Made	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Manukan Kulon	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Medokan Ayu	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Menur	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Mojo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Moro Krembangan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Mulyorejo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Ngagel Rejo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Pacar Keling	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Pakis	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Pegirian	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Peneleh	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Perak Timur	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Pucangsewu	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Putat Jaya	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Rangkah	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Sawahan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Sawah Pulo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Sememi	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Sidosermo	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Sidotopo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Sidotopo Wetan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Simolawang	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Simomulyo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Siwalankerto	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Tambakrejo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Tambak Wedi	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Tanjungsari	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Tembok Dukuh	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Tenggilis	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Wiyung	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Wonokromo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Puskesmas Wonokusumo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	4 Unit	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	5 Unit	Kec. Benowo	Kec. Benowo
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	5 Unit	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	Kec. Bulak	Kec. Bulak
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	4 Unit	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	5 Unit	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	5 Unit	Kec. Genteng	Kec. Genteng
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60 Unit	8 Unit	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 Unit	20 Unit	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 Unit	100 Unit	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29 Unit	29 Unit	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	5 Unit	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36 Unit	7 Unit	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	4 Unit	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19 Unit	19 Unit	Kec. Pakal	Kec. Pakal
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Unit	6 Unit	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50 Unit	32 Unit	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Unit	6 Unit	Kec. Semampir	Kec. Semampir
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65 Unit	25 Unit	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34 Unit	34 Unit	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50 Unit	7 Unit	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50 Unit	50 Unit	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60 Unit	60 Unit	Kec. Tandes	Kec. Tandes
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 Unit	7 Unit	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30 Unit	20 Unit	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	5 Unit	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 Unit	100 Unit	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 Unit	7 Unit	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12 Dokumen	87 Dokumen	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	1 Laporan	1 Laporan	Kec. Benowo	Kec. Benowo

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
		Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Benowo	Kec. Benowo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Benowo	Kec. Benowo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Benowo	Kec. Benowo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	15 Dokumen	15 Dokumen	Kec. Benowo	Kec. Benowo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	40 Dokumen	40 Dokumen	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	Kec. Bulak	Kec. Bulak
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Bulak	Kec. Bulak
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Bulak	Kec. Bulak
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Bulak	Kec. Bulak
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	24 Dokumen	24 Dokumen	Kec. Bulak	Kec. Bulak
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12 Dokumen	12 Dokumen	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	48 Dokumen	48 Dokumen	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	Kec. Genteng	Kec. Genteng
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Genteng	Kec. Genteng
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Genteng	Kec. Genteng
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Genteng	Kec. Genteng
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12 Dokumen	12 Dokumen	Kec. Genteng	Kec. Genteng
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
	Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	35 Dokumen	35 Dokumen	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
PROGRAM PENYELENGGARAAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait	625 Dokumen	625 Dokumen	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	178 Laporan	178 Laporan	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4277 Laporan	4277 Laporan	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	16 Dokumen	16 Dokumen	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	48 Dokumen	48 Dokumen	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	100 Dokumen	100 Dokumen	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	24 Dokumen	24 Dokumen	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	6 Laporan	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
PROGRAM PENYELENGGARAAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2923 Laporan	2923 Laporan	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	42 Dokumen	42 Dokumen	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	30 Dokumen	30 Dokumen	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
PROGRAM PENYELENGGARAAN	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	1 Laporan	1 Laporan	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12 Dokumen	12 Dokumen	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	Kec. Pakal	Kec. Pakal
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Pakal	Kec. Pakal
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Pakal	Kec. Pakal

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Pakal	Kec. Pakal
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	10 Dokumen	10 Dokumen	Kec. Pakal	Kec. Pakal
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	30 Dokumen	30 Dokumen	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	38 Dokumen	38 Dokumen	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1 Laporan	1 Laporan	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1 Dokumen	1 Dokumen	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	Kec. Semampir	Kec. Semampir
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30 Laporan	30 Laporan	Kec. Semampir	Kec. Semampir
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Semampir	Kec. Semampir
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Semampir	Kec. Semampir
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	10 Dokumen	10 Dokumen	Kec. Semampir	Kec. Semampir
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
	Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	20 Dokumen	20 Dokumen	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	60 Laporan	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo
PROGRAM PENYELENGGARAAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait	50 Dokumen	50 Dokumen	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	63 Laporan	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	30 Dokumen	30 Dokumen	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	48 Dokumen	48 Dokumen	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	Kec. Tandes	Kec. Tandes
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Tandes	Kec. Tandes
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Tandes	Kec. Tandes
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Tandes	Kec. Tandes
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	35 Dokumen	35 Dokumen	Kec. Tandes	Kec. Tandes

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	125 Laporan	125 Laporan	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4140 Laporan	4140 Laporan	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	4 Dokumen	4 Dokumen	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
PROGRAM PENYELENGGARAAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait	1 Laporan	1 Laporan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1 Dokumen	1 Dokumen	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12 Dokumen	12 Dokumen	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung
PROGRAM PENYELENGGARAAN	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	1 Laporan	1 Laporan	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	48 Dokumen	48 Dokumen	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12 Dokumen	12 Dokumen	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	82 Orang	82 Orang	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 Orang	12 Orang	Kec. Benowo	Kec. Benowo
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Benowo	Kec. Benowo
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	20 Orang	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	33 Orang	46 Orang	Kec. Bulak	Kec. Bulak
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Bulak	Kec. Bulak
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang	160 Orang	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	230 Orang	40 Orang	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	58 Orang	58 Orang	Kec. Genteng	Kec. Genteng
PROGRAM PENYELENGGARAAN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Genteng	Kec. Genteng

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	sesuai Penugasan Kepala Daerah					
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	124 Orang	124 Orang	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	47 Orang	47 Orang	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4 Orang	27 Orang	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	33 Laporan	33 Laporan	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	187 Orang	51 Orang	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	418 Orang	418 Orang	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	35 Orang	35 Orang	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang	160 Orang	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6 Laporan	6 Laporan	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	54 Orang	54 Orang	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
		Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	1 Laporan	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	120 Orang	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	166 Orang	166 Orang	Kec. Pakal	Kec. Pakal
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Pakal	Kec. Pakal
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	120 Orang	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5 Laporan	5 Laporan	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
PROGRAM PENYELENGGARAAN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	80 Orang	80 Orang	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	sesuai Penugasan Kepala Daerah	Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	37 Laporan	37 Laporan	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	93 Orang	93 Orang	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	561 Orang	561 Orang	Kec. Semampir	Kec. Semampir
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Semampir	Kec. Semampir
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	53 Orang	53 Orang	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang	160 Orang	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang	169 Orang	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	663 Orang	663 Orang	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	124 Orang	110 Orang	Kec. Tandes	Kec. Tandes
PROGRAM PENYELENGGARAAN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Tandes	Kec. Tandes

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	sesuai Penugasan Kepala Daerah					
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	94 Orang	47 Orang	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	100 Orang	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	1 Laporan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80 Orang	80 Orang	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	35 Orang	35 Orang	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	88 Laporan	88 Laporan	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	120 Orang	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	450 Dokumen	450 Dokumen	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	60 Dokumen	160 Dokumen	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	24 Dokumen	24 Dokumen	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	24 Dokumen	24 Dokumen	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	40 Dokumen	40 Dokumen	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	23340 Unit	23340 Unit	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	1200 Orang	1200 Orang	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan	2 Laporan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	12 laporan	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	12 Laporan	12 Laporan	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	978 Orang	978 Orang	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	12 Laporan	12 Laporan	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
	(satu) Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	12 Laporan	12 Laporan	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	4 Laporan	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	4 Laporan	4 Laporan	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	17 Orang	17 Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan	44 Laporan	44 Laporan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	60 Orang	60 Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	690 Orang	690 Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7679 Dokumen	7679 Dokumen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30 Laporan	30 Laporan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1000 Unit Rumah	1.500 Unit Rumah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	61 Dokumen	61 Dokumen	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1861 Orang	1861 Orang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	158 Bangunan Gedung	158 Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	139 Bangunan Gedung	142 Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2 Dokumen	2 Dokumen	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	21 Sistem Drainase Perkotaan	30 Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	10000 M	7.500 M	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	8 Sistem Drainase Perkotaan	15 Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	8 Sistem Drainase Perkotaan	15 Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	50 Dokumen	50 Dokumen	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	8 Sistem Drainase Perkotaan	10 Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
	dalam Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	2 Dokumen	2 Dokumen	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	270 Unit	270 Unit	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	110 Lembaga	12 Lembaga	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	240 Unit	240 Unit	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	13 Unit	13 Unit	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	105 Dokumen	109 Dokumen	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12 Laporan	50 Laporan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98 Unit	89 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 Unit	6 Unit	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	73 Unit	73 Unit	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	227 Unit	227 Unit	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	1 KM	1 KM	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	11.4 KM	29.39 KM	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jalan	45 KM	45 KM	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	11.4 KM	11.4 KM	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	70 Dokumen	70 Dokumen	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan	0.8 KM	0.8 KM	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3000 Unit	7.500 Unit	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2500 Unit	2500 Unit	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	9000 Unit	9000 Unit	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	99252 Unit	105.846 Unit	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	12 Unit	14 Unit	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	33 Unit	33 Unit	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	13 Laporan	13 Laporan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	72 Unit	92 Unit	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan	10 Dokumen	6 Dokumen	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTr) Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	3 Dokumen	3 Dokumen	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	2 Dokumen	2 Dokumen	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2 Dokumen	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan	9 Unit Rumah	9 Unit Rumah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
		Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			serta Pertanahan	serta Pertanahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	930 Orang	930 Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	153 Kelompok	153 Kelompok	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	40 Unit	40 Unit	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	6642 Orang	6642 Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	1 Laporan	1 Laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Dokumen	12 Dokumen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Wiyung	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Wonokromo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Wonokusumo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Tenggilis	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Asemrowo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Balas Klumprik	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Balongsari	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
	Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Bangkingan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Banyu Urip	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Benowo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Bulak Banteng	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Dr. Soetomo	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Dukuh Kupang	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Dupak	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Gading	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Gayungan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Gundih	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Gunung Anyar	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Jagir	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Jemursari	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Jeruk	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Kalijudan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Kalirungkut	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Kebonsari	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
	Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Kedungdoro	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Kedurus	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Kenjeran	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Keputih	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Ketabang	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Klampis Ngasem	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Krembangan Selatan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Lidah Kulon	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Lontar	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Made	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Manukan Kulon	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Medokan Ayu	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Menur	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Mojo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Moro Krembangan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Mulyorejo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Ngagel Rejo	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
	Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Pacar Keling	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Pakis	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Pegirian	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Peneleh	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Tambak Wedi	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Tanjungsari	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Tembok Dukuh	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Perak Timur	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Pucangsewu	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Putat Jaya	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Rangkah	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Sawahan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Sawah Pulo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Sememi	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Sidosermo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Sidotopo	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
	Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Sidotopo Wetan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Simolawang	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Simomulyo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Siwalankerto	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Tambakrejo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial	583 Orang	583 Orang	Dinas Sosial	Dinas Sosial

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
	Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Lembaga	8 Lembaga	Dinas Sosial	Dinas Sosial
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	31 Organisasi	31 Organisasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	1 Laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	1 Laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Keluarga Berencana	dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	1 Laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1566 Orang	1566 Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas	1 Laporan	1 Laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
	serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1950 Orang	1950 Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Keluarga Berencana	dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	31 Kampung	31 Kampung	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	200 Perpustakaan	200 Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	30 Perpustakaan	106 Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	1500 Eksemplar	1500 Eksemplar	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1500 Perpustakaan	1500 Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	250 Lokus	250 Lokus	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas	1 Unit	1 Unit	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	1 Unit	1 Unit	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	33 Unit	33 Unit	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	30 Unit	88 Unit	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	5 Paket	5 Paket	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Unit	3 Unit	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	2 Unit	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	12 Unit	12 Unit	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	Laboratorium Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	Instalasi Farmasi Kesehatan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Asemrowo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Balas Klumprik	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Balongsari	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Bangkingan	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Banyu Urip	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Benowo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Bulak Banteng	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Dr. Soetomo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Dukuh Kupang	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Dupak	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Gading	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Gayungan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Gundih	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Gunung Anyar	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Jagir	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Jemursari	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Jeruk	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Kalijudan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Kalirungkut	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Kebonsari	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Kedungdoro	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Kedurus	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Kenjeran	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Keputih	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Ketabang	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Klampis Ngasem	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Krembangan Selatan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Lidah Kulon	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Lontar	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Made	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Manukan Kulon	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Medokan Ayu	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Menur	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Mojo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Moro Krembangan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Mulyorejo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Ngagel Rejo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Pacar Keling	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Pakis	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Pegirian	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Peneleh	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Perak Timur	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Pucangsewu	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Putat Jaya	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Rangkah	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Sawahan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Sawah Pulo	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Sememi	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Sidosermo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Sidotopo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Sidotopo Wetan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Simolawang	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Simomulyo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Siwalankerto	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Tambakrejo	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Tambak Wedi	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Tanjungsari	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Tembok Dukuh	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Tenggilis	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Wiyung	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Wonokromo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Wonokusumo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Wonokusumo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Asemrowo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Balas Klumprik	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Balongsari	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Bangkingan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Banyu Urip	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Benowo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Bulak Banteng	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Dr. Soetomo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Dukuh Kupang	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Dupak	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Gading	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Gayungan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Gundih	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Gunung Anyar	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Jagir	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Jemursari	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Jeruk	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Kalijudan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Kalirungkut	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Kebonsari	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Kedungdoro	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Kedurus	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Kenjeran	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Keputih	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Ketabang	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Klampis Ngasem	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Krembangan Selatan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Lidah Kulon	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Lontar	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Made	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Manukan Kulon	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Medokan Ayu	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Menur	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Mojo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Moro Krembangan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Mulyorejo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Ngagel Rejo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Pacar Keling	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Pakis	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Pegirian	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Peneleh	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Perak Timur	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Pucangsewu	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Putat Jaya	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Rangkah	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Sawahan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Sawah Pulo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Sememi	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Sidosermo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Sidotopo	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Sidotopo Wetan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Simolawang	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Simomulyo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Siwalankerto	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Tambakrejo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Tambak Wedi	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Tanjungsari	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Tembok Dukuh	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Tenggilis	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Wiyung	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Wonokromo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	12 Dokumen	12 Dokumen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Asemrowo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Balas Klumprik	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Balongsari	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Bangkingan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Banyu Urip	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Benowo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Bulak Banteng	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Dr. Soetomo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Dukuh Kupang	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Dupak	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Gading	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Gayungan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Gundih	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Gunung Anyar	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Jagir	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Jemursari	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Jeruk	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Kalijudan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Kalirungkut	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Kebonsari	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Kedungdoro	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Kedurus	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Kenjeran	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Keputih	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Ketabang	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Klampis Ngasem	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Krembangan Selatan	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Lidah Kulon	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Lontar	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Made	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Manukan Kulon	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Medokan Ayu	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Menur	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Mojo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Moro Krembangan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Mulyorejo	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Ngagel Rejo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Pacar Keling	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Pakis	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Pegirian	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Peneleh	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Perak Timur	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Pucangsewu	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Putat Jaya	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Rangkah	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Sawahan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Sawah Pulo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Sememi	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Sidosermo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Sidotopo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Sidotopo Wetan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Simolawang	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Simomulyo	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Siwalankerto	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Tambakrejo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Tambak Wedi	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Tanjungsari	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Tembok Dukuh	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Tenggilis	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Wiyung	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Wonokromo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Wonokusumo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	43725 Orang	37395 Orang	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	742 Orang	668 Orang	Puskesmas Asemrowo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	223 Orang	184 Orang	Puskesmas Balas Klumprik	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	543 Orang	465 Orang	Puskesmas Balongsari	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	220 Orang	204 Orang	Puskesmas Bangkingan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	932 Orang	782 Orang	Puskesmas Banyu Urip	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	828 Orang	724 Orang	Puskesmas Benowo	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	676 Orang	580 Orang	Puskesmas Bulak Banteng	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	763 Orang	687 Orang	Puskesmas Dr. Soetomo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1032 Orang	746 Orang	Puskesmas Dukuh Kupang	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	363 Orang	322 Orang	Puskesmas Dupak	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1289 Orang	1140 Orang	Puskesmas Gading	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	673 Orang	587 Orang	Puskesmas Gayungan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	598 Orang	514 Orang	Puskesmas Gundih	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	972 Orang	796 Orang	Puskesmas Gunung Anyar	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	816 Orang	705 Orang	Puskesmas Jagir	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	280 Orang	248 Orang	Puskesmas Jemursari	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	298 Orang	259 Orang	Puskesmas Jeruk	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	822 Orang	427 Orang	Puskesmas Kalijudan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	849 Orang	710 Orang	Puskesmas Kalirungkut	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	860 Orang	747 Orang	Puskesmas Kebonsari	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	580 Orang	549 Orang	Puskesmas Kedungdoro	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1112 Orang	1043 Orang	Puskesmas Kedurus	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	689 Orang	525 Orang	Puskesmas Kenjeran	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	609 Orang	559 Orang	Puskesmas Keputih	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	295 Orang	263 Orang	Puskesmas Ketabang	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	406 Orang	351 Orang	Puskesmas Klampis Ngasem	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	603 Orang	506 Orang	Puskesmas Krembangan Selatan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	402 Orang	353 Orang	Puskesmas Lidah Kulon	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	701 Orang	578 Orang	Puskesmas Lontar	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	264 Orang	212 Orang	Puskesmas Made	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	851 Orang	798 Orang	Puskesmas Manukan Kulon	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	902 Orang	729 Orang	Puskesmas Medokan Ayu	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	462 Orang	412 Orang	Puskesmas Menur	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1161 Orang	1072 Orang	Puskesmas Mojo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	824 Orang	754 Orang	Puskesmas Moro Krembangan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	619 Orang	527 Orang	Puskesmas Mulyorejo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	847 Orang	796 Orang	Puskesmas Ngagel Rejo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	758 Orang	545 Orang	Puskesmas Pacar Keling	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	536 Orang	447 Orang	Puskesmas Pakis	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	418 Orang	370 Orang	Puskesmas Pegirian	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	613 Orang	536 Orang	Puskesmas Peneleh	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1081 Orang	995 Orang	Puskesmas Perak Timur	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	645 Orang	550 Orang	Puskesmas Pucangsewu	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	787 Orang	680 Orang	Puskesmas Putat Jaya	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	539 Orang	512 Orang	Puskesmas Rangkah	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	706 Orang	550 Orang	Puskesmas Sawahan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	458 Orang	413 Orang	Puskesmas Sawah Pulo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1350 Orang	1204 Orang	Puskesmas Sememi	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	621 Orang	549 Orang	Puskesmas Sidosermo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	791 Orang	422 Orang	Puskesmas Sidotopo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1054 Orang	937 Orang	Puskesmas Sidotopo Wetan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	607 Orang	469 Orang	Puskesmas Simolawang	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1167 Orang	1080 Orang	Puskesmas Simomulyo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	248 Orang	228 Orang	Puskesmas Siwalankerto	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	589 Orang	440 Orang	Puskesmas Tambakrejo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	301 Orang	258 Orang	Puskesmas Tambak Wedi	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	945 Orang	775 Orang	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	357 Orang	334 Orang	Puskesmas Tanjungsari	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	722 Orang	606 Orang	Puskesmas Tembok Dukuh	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	735 Orang	664 Orang	Puskesmas Tenggilis	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	849 Orang	754 Orang	Puskesmas Wiyung	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	616 Orang	537 Orang	Puskesmas Wonokromo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1126 Orang	1018 Orang	Puskesmas Wonokusumo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	10 Orang	10 Orang	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	205 Orang	205 Orang	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	823 Orang	791 Orang	Puskesmas Asemrowo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	249 Orang	199 Orang	Puskesmas Balas Klumprik	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	640 Orang	572 Orang	Puskesmas Balongsari	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	250 Orang	259 Orang	Puskesmas Bangkingan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1416 Orang	1229 Orang	Puskesmas Banyu Urip	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	912 Orang	839 Orang	Puskesmas Benowo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	732 Orang	766 Orang	Puskesmas Bulak Banteng	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	922 Orang	1101 Orang	Puskesmas Dr. Soetomo	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1224 Orang	982 Orang	Puskesmas Dukuh Kupang	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	465 Orang	453 Orang	Puskesmas Dupak	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1420 Orang	1347 Orang	Puskesmas Gading	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	538 Orang	677 Orang	Puskesmas Gayungan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	695 Orang	631 Orang	Puskesmas Gundih	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1109 Orang	939 Orang	Puskesmas Gunung Anyar	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	924 Orang	876 Orang	Puskesmas Jagir	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	333 Orang	336 Orang	Puskesmas Jemursari	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	792 Orang	530 Orang	Puskesmas Jeruk	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	882 Orang	539 Orang	Puskesmas Kalijudan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1217 Orang	967 Orang	Puskesmas Kalirungkut	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	949 Orang	875 Orang	Puskesmas Kebonsari	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2175 Orang	1913 Orang	Puskesmas Kedungdoro	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1287 Orang	1271 Orang	Puskesmas Kedurus	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	696 Orang	647 Orang	Puskesmas Kenjeran	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	664 Orang	711 Orang	Puskesmas Keputih	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	429 Orang	547 Orang	Puskesmas Ketabang	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	462 Orang	442 Orang	Puskesmas Klampis Ngasem	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	718 Orang	617 Orang	Puskesmas Krembangan Selatan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	447 Orang	458 Orang	Puskesmas Lidah Kulon	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	754 Orang	640 Orang	Puskesmas Lontar	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	290 Orang	224 Orang	Puskesmas Made	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1037 Orang	1156 Orang	Puskesmas Manukan Kulon	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	971 Orang	830 Orang	Puskesmas Medokan Ayu	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	718 Orang	565 Orang	Puskesmas Menur	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1430 Orang	1714 Orang	Puskesmas Mojo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	879 Orang	908 Orang	Puskesmas Moro Krembangan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	670 Orang	581 Orang	Puskesmas Mulyorejo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	948 Orang	1101 Orang	Puskesmas Ngagel Rejo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	832 Orang	704 Orang	Puskesmas Pacar Keling	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	592 Orang	639 Orang	Puskesmas Pakis	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	490 Orang	473 Orang	Puskesmas Pegirian	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	687 Orang	632 Orang	Puskesmas Peneleh	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1436 Orang	1377 Orang	Puskesmas Perak Timur	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	700 Orang	737 Orang	Puskesmas Pucangsewu	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	966 Orang	1048 Orang	Puskesmas Putat Jaya	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	803 Orang	640 Orang	Puskesmas Rangkah	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	951 Orang	862 Orang	Puskesmas Sawahan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	578 Orang	547 Orang	Puskesmas Sawah Pulo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1638 Orang	1567 Orang	Puskesmas Sememi	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	686 Orang	638 Orang	Puskesmas Sidosermo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	861 Orang	582 Orang	Puskesmas Sidotopo	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1148 Orang	1099 Orang	Puskesmas Sidotopo Wetan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	666 Orang	578 Orang	Puskesmas Simolawang	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1277 Orang	1269 Orang	Puskesmas Simomulyo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	369 Orang	282 Orang	Puskesmas Siwalankerto	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	613 Orang	576 Orang	Puskesmas Tambakrejo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	350 Orang	319 Orang	Puskesmas Tambak Wedi	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1037 Orang	984 Orang	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	401 Orang	451 Orang	Puskesmas Tanjungsari	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	795 Orang	734 Orang	Puskesmas Tembok Dukuh	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	944 Orang	833 Orang	Puskesmas Tenggilis	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	952 Orang	874 Orang	Puskesmas Wiyung	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	667 Orang	629 Orang	Puskesmas Wonokromo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1235 Orang	1178 Orang	Puskesmas Wonokusumo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	52741 Orang	49485 Orang	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	666 Orang	666 Orang	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	60512 Orang	78502 Orang	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	949 Orang	1253 Orang	Puskesmas Asemrowo	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	283 Orang	384 Orang	Puskesmas Balas Klumprik	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	707 Orang	917 Orang	Puskesmas Balongsari	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	293 Orang	391 Orang	Puskesmas Bangkingan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1293 Orang	1651 Orang	Puskesmas Banyu Urip	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1179 Orang	1579 Orang	Puskesmas Benowo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	712 Orang	949 Orang	Puskesmas Bulak Banteng	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1164 Orang	1492 Orang	Puskesmas Dr. Soetomo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1216 Orang	1563 Orang	Puskesmas Dukuh Kupang	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	463 Orang	596 Orang	Puskesmas Dupak	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1879 Orang	2448 Orang	Puskesmas Gading	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	887 Orang	1143 Orang	Puskesmas Gayungan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	834 Orang	1065 Orang	Puskesmas Gundih	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1203 Orang	1584 Orang	Puskesmas Gunung Anyar	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1273 Orang	1608 Orang	Puskesmas Jagir	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	423 Orang	547 Orang	Puskesmas Jemursari	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	354 Orang	466 Orang	Puskesmas Jeruk	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	917 Orang	1201 Orang	Puskesmas Kalijudan	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1067 Orang	1380 Orang	Puskesmas Kalirungkut	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1065 Orang	1399 Orang	Puskesmas Kebonsari	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	847 Orang	1093 Orang	Puskesmas Kedungdoro	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1514 Orang	1974 Orang	Puskesmas Kedurus	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	917 Orang	1210 Orang	Puskesmas Kenjeran	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	750 Orang	1026 Orang	Puskesmas Keputih	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	391 Orang	502 Orang	Puskesmas Ketabang	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	496 Orang	647 Orang	Puskesmas Klampis Ngasem	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	941 Orang	1199 Orang	Puskesmas Krembangan Selatan	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	593 Orang	784 Orang	Puskesmas Lidah Kulon	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1029 Orang	1352 Orang	Puskesmas Lontar	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	298 Orang	392 Orang	Puskesmas Made	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1163 Orang	1481 Orang	Puskesmas Manukan Kulon	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1323 Orang	1762 Orang	Puskesmas Medokan Ayu	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1010 Orang	1308 Orang	Puskesmas Menur	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1649 Orang	2102 Orang	Puskesmas Mojo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	932 Orang	1219 Orang	Puskesmas Moro Krembangan	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	843 Orang	1089 Orang	Puskesmas Mulyorejo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1137 Orang	1451 Orang	Puskesmas Ngagel Rejo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1268 Orang	1637 Orang	Puskesmas Pacar Keling	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	741 Orang	943 Orang	Puskesmas Pakis	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	630 Orang	819 Orang	Puskesmas Pegirian	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	798 Orang	1033 Orang	Puskesmas Peneleh	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1535 Orang	1967 Orang	Puskesmas Perak Timur	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1115 Orang	1423 Orang	Puskesmas Pucangsewu	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	945 Orang	1220 Orang	Puskesmas Putat Jaya	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1444 Orang	1866 Orang	Puskesmas Rangkah	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1127 Orang	1433 Orang	Puskesmas Sawahan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	680 Orang	872 Orang	Puskesmas Sawah Pulo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1383 Orang	1841 Orang	Puskesmas Sememi	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	840 Orang	1090 Orang	Puskesmas Sidosermo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1018 Orang	1304 Orang	Puskesmas Sidotopo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1246 Orang	1631 Orang	Puskesmas Sidotopo Wetan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	779 Orang	998 Orang	Puskesmas Simolawang	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1562 Orang	2028 Orang	Puskesmas Simomulyo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	354 Orang	452 Orang	Puskesmas Siwalankerto	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1148 Orang	1461 Orang	Puskesmas Tambakrejo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	365 Orang	503 Orang	Puskesmas Tambak Wedi	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1194 Orang	1585 Orang	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	552 Orang	717 Orang	Puskesmas Tanjungsari	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1176 Orang	1503 Orang	Puskesmas Tembok Dukuh	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1186 Orang	1540 Orang	Puskesmas Tenggilis	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1196 Orang	1568 Orang	Puskesmas Wiyung	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	829 Orang	1053 Orang	Puskesmas Wonokromo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1404 Orang	1808 Orang	Puskesmas Wonokusumo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	325983 Orang	378637 Orang	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	2038597 Orang	1923364 Orang	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	747207 Orang	727432 Orang	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Wonokusumo	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Asemrowo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Balas Klumprik	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Balongsari	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Bangkingan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Banyu Urip	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Benowo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Bulak Banteng	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Dr. Soetomo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Dukuh Kupang	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Dupak	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Gading	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Gayungan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Gundih	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Gunung Anyar	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Jagir	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Jemursari	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Jeruk	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Kalijudan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Kalirungkut	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Kebonsari	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Kedungdoro	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Kedurus	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Kenjeran	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Keputih	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Ketabang	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Klampis Ngasem	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Krembangan Selatan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Lidah Kulon	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Lontar	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Made	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Manukan Kulon	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Medokan Ayu	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Menur	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Mojo	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Moro Krembangan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Mulyorejo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Ngagel Rejo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Pacar Keling	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Pakis	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Pegirian	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Peneleh	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Perak Timur	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Pucangsewu	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Putat Jaya	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Rangkah	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Sawahan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Sawah Pulo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Sememi	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Sidosermo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Sidotopo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Sidotopo Wetan	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Simolawang	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Simomulyo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Siwalankerto	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Tambakrejo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Tambak Wedi	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Tanjungsari	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Tembok Dukuh	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Tenggilis	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Wiyung	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Puskesmas Wonokromo	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5 Dokumen	5 Dokumen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	63 Unit	63 Unit	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dokumen	12 Dokumen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	147 Unit	24 Unit	RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Rumah Sakit	1 Unit	1 Unit	RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Unit	1 Unit	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	350 Laporan	350 Laporan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	2 Dokumen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7 Unit	7 Unit	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	259 Satuan Pendidikan	259 Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	73986 Peserta Didik	71.390 Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	33 Paket	33 Paket	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3 Paket	3 Paket	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	587 Satuan Pendidikan	587 Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3135 Orang	3135 Orang	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	38170 Peserta Didik	37.309 Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	649 Satuan Pendidikan	649 Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	155 Unit	155 Unit	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4 Unit	3 Unit	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	256 Satuan Pendidikan	256 Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2122 Peserta Didik	2122 Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2 Paket	2 Paket	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	272 Satuan Pendidikan	272 Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1013 Orang	1013 Orang	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	19139 Peserta Didik	16.260 Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	39248 Satuan Pendidikan	39248 Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	17 Unit	17 Unit	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	2355 Satuan Pendidikan	2355 Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan PAUD	3 Paket	3 Paket	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2479 Satuan Pendidikan	2.217 Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	3092 Orang	3092 Orang	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	209 Peserta Didik	209 Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	88778 Peserta Didik	88778 Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3 Unit	6 Unit	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	153 Satuan Pendidikan	153 Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2 Paket	2 Paket	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	27 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	250 Orang	250 Orang	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	35 Peserta Didik	35 Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	2802 Peserta Didik	33 Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	7 Makam	7 Makam	Dinas Sosial	Dinas Sosial
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	24 Unit	24 Unit	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	661 Orang	661 Orang	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	405 Unit	405 Unit	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	7 Dokumen	7 Dokumen	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	825 Orang	825 Orang	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
	Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	700 Orang	700 Orang	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	3500 Orang	3500 Orang	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	925 Orang	925 Orang	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan	80 Satuan Pendidikan	80 Satuan Pendidikan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
	Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal			Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	976 Unit	636 Unit	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	4 Laporan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100 Orang	100 Orang	Dinas Sosial	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	230 Orang	230 Orang	Dinas Sosial	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	40 Orang	49 Orang	Dinas Sosial	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	795 Orang	1299 Orang	Dinas Sosial	Dinas Sosial

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
	Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	1270 Orang	2171 Orang	Dinas Sosial	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	900 Orang	1810 Orang	Dinas Sosial	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	4716 Orang	8150 Orang	Dinas Sosial	Dinas Sosial
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	150 Unit	150 Unit	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1071 Orang	1071 Orang	Dinas Sosial	Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	59295 Keluarga	42.014 Keluarga	Dinas Sosial	Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	174385 Orang	116.945 Orang	Dinas Sosial	Dinas Sosial

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	59295 Keluarga	42.029 Keluarga	Dinas Sosial	Dinas Sosial
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dokumen	12 Dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Organisasi	30 Organisasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	58 Perangkat Daerah	58 Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	31 Organisasi	31 Organisasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	740 Orang	740 Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
	Kewenangan Kabupaten/Kota				Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Layanan	2 Layanan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	150 Orang	150 Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelindungan Cagar Budaya	275 Objek	275 Objek	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					serta Pariwisata	Raga serta Pariwisata
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	4 Dokumen	4 Dokumen	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	730 Unit	730 Unit	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	8 Unit	8 Unit	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	2 Unit	2 Unit	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	9 Unit	9 Unit	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2 Objek	2 Objek	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
	Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				dan Olah Raga serta Pariwisata	dan Olah Raga serta Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	895 Orang	895 Orang	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10 Entitas	10 Entitas	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	291 Orang	291 Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

5.2 Kerangka Pendanaan Rancangan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024.

Rancangan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi pada Triwulan II tahun 2024. Rencana program Pemerintah Kota Surabaya pada Rancangan Perubahan RKPD beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai dengan Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah disampaikan secara detail sebagaimana pada Tabel V.2.

Tabel V.2
Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2024

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			**26.297.140.002**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**			**34.398.679.073**
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			**26.297.140.002**	**5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**34.398.679.073**
5.03 KEPEGAWAIAN			**21.862.366.129**	**5.03 KEPEGAWAIAN**			**26.232.932.512**
5.03..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%	**16.542.341.670**	**5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%	**17.442.093.597**
5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**15.212.457.298**	**5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**16.215.870.464**
5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	15.212.457.298	5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	16.215.870.464
5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**817.098.913**	**5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**732.170.568**
5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket	817.098.913	5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	732.170.568

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**512.785.459**	**5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**494.052.565**
				5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	512.785.459					5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	494.052.565
5.03..02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah	100%	**5.320.024.459**	**5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**					Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah	100%	**8.790.838.915**
					Persentase pegawai yang berkinerja minimal baik	93%							Persentase pegawai yang berkinerja minimal baik	93%	
					Persentase pegawai yang disiplin	96,74%							Persentase pegawai yang disiplin	96,74%	
					Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen	32,43%							Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen	32,43%	
5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya	92%	**1.960.470.481**	**5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**					Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya	92%	**3.110.112.198**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	258.603.329					5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	279.824.015
					5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1.342.180.234					5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	2.545.184.935
					5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	359.686.918					5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	285.103.248
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah berkas mutasi, promosi dan rotasi jabatan serta penataan administrasi kepegawaian	8555 berkas	**1.199.613.139**				**5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN**		Jumlah berkas mutasi, promosi dan rotasi jabatan serta penataan administrasi kepegawaian	8555 berkas	**1.248.614.560**
					5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	453.701.029					5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	485.921.715

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	340.712.110					5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	337.492.845
					5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	405.200.000					5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	425.200.000
			5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Jumlah intervensi peningkatan kinerja aparatur	2 jenis	**2.159.940.839**				**5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**		Jumlah intervensi peningkatan kinerja aparatur	2 jenis	**4.432.112.157**
						Jumlah Jenis intervensi Disiplin	5 jenis							Jumlah Jenis intervensi Disiplin	5 jenis	
						Jumlah jenis intervensi asesmen pegawai	1 jenis							Jumlah jenis intervensi asesmen pegawai	1 jenis	
					5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5797 Dokumen	579.690.009					5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5797 Dokumen	656.490.090
					5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	880.700.007					5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	2.858.300.000
					5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	699.550.823					5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	917.322.067

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				**4.434.773.873**	**5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**8.165.746.561**
5.04..02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning	95%	**4.434.773.873**	**5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**		Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning	95%	**8.165.746.561**
5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	2232 orang	**2.282.471.734**	**5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis**		Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	2232 orang	**6.101.090.521**
5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2232 Orang	2.282.471.734	5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2232 Orang	6.101.090.521
5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah ASN yang mendapatkan fasilitasi Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	168 orang	**2.152.302.139**	**5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**		Jumlah ASN yang mendapatkan fasilitasi Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	168 orang	**2.064.656.040**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	2.152.302.139	5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	2.064.656.040
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			**154.268.232.789**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**			**155.093.994.772**
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			**154.268.232.789**	**8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**			**155.093.994.772**
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			**154.268.232.789**	**8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**155.093.994.772**
8.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	**12.866.412.066**	**8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	**13.879.726.972**
8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**10.012.959.135**	**8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**10.872.244.666**
8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	10.012.959.135	8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	10.872.244.666
8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	**202.821.390**	**8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	**95.936.578**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	202.821.390					8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	95.936.578
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	**2.650.631.541**					**8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	**2.911.545.728**
					8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2.650.631.541					8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2.911.545.728
			8.01..02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan	92%	**6.159.688.588**				**8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**		Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan	92%	**5.779.652.588**
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Lembaga RW di Kota Surabaya yang Mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	291 Lembaga	**6.159.688.588**				**8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Jumlah Lembaga RW di Kota Surabaya yang Mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	291 Lembaga	**5.779.652.588**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	291 Orang	6.159.688.588					8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	291 Orang	5.779.652.588
			8.01..03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	54%	**123.220.441.400**				**8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	54%	**122.656.528.277**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	30 Lembaga	**123.220.441.400**					**8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	30 Lembaga	**122.656.528.277**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	60 Orang	123.220.441.400						8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	60 Orang	122.656.528.277
			8.01..04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	60%	**90.533.400**				**8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**			Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	60%	**108.533.400**
				8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	31 Lembaga	**90.533.400**					**8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	31 Lembaga	**108.533.400**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan	90.533.400	8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan	108.533.400
8.01..05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina	100%	**767.748.585**	**8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina	100%	**800.998.585**
8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Lembaga yang Berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8 Lembaga	**767.748.585**	**8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Jumlah Lembaga yang Berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8 Lembaga	**800.998.585**

Sebelum Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	690 Orang	767.748.585
8.01..06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti	100%	**11.163.408.750**
	Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti	100%	
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional	14 Lembaga	**11.163.408.750**

Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	690 Orang	800.998.585
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti	100%	**11.868.554.950**
	Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti	100%	
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional	14 Lembaga	**11.868.554.950**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Penanganan Konflik Sosial	17 Lembaga								Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Penanganan Konflik Sosial	17 Lembaga	
					8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	17 Orang	10.639.213.462							8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	17 Orang	11.356.224.862

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	44 Laporan	524.195.288	8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	44 Laporan	512.330.088
Badan Penanggulangan Bencana Daerah			**37.546.105.724**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**			**41.502.902.234**
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**37.546.105.724**	**1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**41.502.902.234**
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			**37.546.105.724**	**1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**41.502.902.234**
1.05..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	94%	**13.592.178.127**	**1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	94%	**14.398.216.704**

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi			Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**9.974.308.398**			**1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**10.996.035.427**		
1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	9.974.308.398			1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	10.996.035.427		
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	**1.758.188.801**			**1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	**2.093.801.671**		
1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	1.758.188.801			1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	2.093.801.671		
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	**1.859.680.928**			**1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	**1.308.379.606**		
1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.859.680.928			1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.308.379.606		
1.05..03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit	100%	**23.953.927.597**			**1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit	100%	**27.104.685.530**		

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana	100%			Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana	100%	
1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	42 Kegiatan	**2.032.078.488**	**1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	42 Kegiatan	**1.973.089.680**
1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	31 Kawasan	368.981.001	1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	31 Kawasan	368.981.001
1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5 Unit	387.785.137	1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5 Unit	270.522.517

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1650 Kawasan	1.275.312.350	1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1650 Kawasan	1.333.586.162
1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jenis kejadian bencana yang ditangani dalam Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10 Jenis	**21.921.849.109**	**1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Jenis kejadian bencana yang ditangani dalam Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10 Jenis	**25.131.595.850**
1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	11000 Orang	19.843.578.031	1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	11000 Orang	23.000.324.772
1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	467 Orang	2.078.271.078	1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	467 Orang	2.131.271.078
Badan Pendapatan Daerah			**64.239.998.150**	**Badan Pendapatan Daerah**			**68.406.182.675**
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			**64.239.998.150**	**5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**68.406.182.675**

Sebelum Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
5.02 KEUANGAN			**64.239.998.150**
5.02..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	92%	**47.354.427.390**
5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**37.689.515.360**
5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	121 Orang/bulan	37.689.515.360
5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	**234.286.014**
5.02.01.2.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	234.286.014
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**9.430.626.016**

Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
5.02 KEUANGAN			**68.406.182.675**
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	92%	**50.115.619.783**
5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**41.033.276.536**
5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang/bulan	41.033.276.536
5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	**253.822.986**
5.02.01.2.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	253.822.986
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**8.828.520.261**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.535.402.852					5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.478.226.717
					5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.895.223.164					5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.350.293.544
			5.02..02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%	**366.137.004**				**5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%	**412.212.409**
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 dokumen	**366.137.004**					**5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 dokumen	**412.212.409**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	366.137.004					5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	412.212.409
			5.02..04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	83%	**16.519.433.756**				**5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	83%	**17.878.350.483**
						Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir	69%						Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir	69%	
						Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	60%						Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	60%	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	**16.519.433.756**				**5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	**17.878.350.483**
						Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan	12 Dokumen						Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan	12 Dokumen	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Pengawasan Pajak Daerah									Pengawasan Pajak Daerah		
						Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan									Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	
						Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	19.814 Objek Pajak									Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	19.814 Objek Pajak	
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan									Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	
					5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	6.005.641.564						5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	6.623.286.766

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	19814 Obyek Pajak	4.638.406.188						5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	19814 Obyek Pajak	4.859.667.147
					5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	3.078.426.984						5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	3.351.611.587
					5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	2.486.072.202						5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	2.711.665.219
					5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	310.886.818						5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	332.119.764
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah								**83.654.579.233**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**								**76.278.873.734**
	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							**83.654.579.233**		**5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**76.278.873.734**
		5.02 KEUANGAN						**83.654.579.233**			**5.02 KEUANGAN**						**76.278.873.734**
			5.02..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	92%	**36.215.675.047**				**5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	92%	**37.358.585.027**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**27.763.414.842**	**5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**29.822.994.940**
				5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan	27.763.414.842					5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/bulan	29.822.994.940
5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Persentase pemenuhan unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	100%	**423.333.106**	**5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					Persentase pemenuhan unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	100%	**216.713.301**
				5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	200 Unit	423.333.106					5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	200 Unit	216.713.301
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**3.292.159.396**	**5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**3.275.059.930**
					Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%							Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	
				5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	12 Laporan	435.179.900					5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	12 Laporan	450.299.678

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Kantor yang Disediakan									Kantor yang Disediakan		
					5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.856.979.496						5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.824.760.252
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketepatan pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%	**4.736.767.703**					**5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketepatan pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%	**4.043.816.856**
					5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2520 Unit	4.736.767.703						5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.531 Unit	4.043.816.856
			5.02..02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	100%	**23.538.455.807**				**5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	100%	**12.114.235.339**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang disusun	7 Dokumen	**3.271.243.115**	**5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**					Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang disusun	7 Dokumen	**3.819.785.917**
5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS					Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	1.214.501.920	5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS					Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	1.224.501.920
5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	356.494.960	5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	373.494.960

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	809.723.820					5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	841.826.906
					5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	890.522.415					5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	1.379.962.131
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani	94731 berkas	**1.718.063.276**				**5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani	97.500 berkas	**1.635.596.856**
						Jumlah Dokumen Laporan dan Perhitungan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola	244 Dokumen						Jumlah Dokumen Laporan dan Perhitungan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola	244 Dokumen	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	244 Dokumen	559.892.619					5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	244 Dokumen	696.963.594
					5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	94731 Dokumen	1.158.170.657					5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	97.500 Dokumen	938.633.262
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	24 Dokumen	**1.049.149.416**				**5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**		Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	24 Dokumen	**1.158.852.566**
					5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	24 Dokumen	1.049.149.416					5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	24 Dokumen	1.158.852.566
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana	100%	**17.500.000.000**				**5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana	100%	**5.500.000.000**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Persentase realisasi dana darurat dan mendesak	25%								Persentase realisasi dana darurat dan mendesak	25%	
					5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	500.000.000						5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	500.000.000
					5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	17.000.000.000						5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	5.000.000.000
			5.02..03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			Persentase tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang	33,3 %	**23.900.448.379**				**5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			Persentase tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang	33,3 %	**26.806.053.368**
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola	100%	**23.900.448.379**					**5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah**		Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola	100%	**26.806.053.368**
						Jumlah dokumen sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	30 Dokumen								Jumlah dokumen sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	30 Dokumen	
					5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	5.832.208.506						5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	5.531.634.966

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30 Laporan	1.704.279.882					5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30 Laporan	1.691.011.733
					5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7679 Dokumen	14.619.719.406					5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7679 Dokumen	18.106.551.320
					5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60 Orang	1.744.240.585					5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60 Orang	1.476.855.349
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan								**35.484.915.993**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan**								**37.535.581.344**
	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							**35.484.915.993**		**5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**37.535.581.344**
		5.01 PERENCANAAN						**34.036.547.439**			**5.01 PERENCANAAN**						**36.172.135.081**
			5.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,55 %	**25.419.639.657**				**5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,55 %	**28.056.879.547**

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**			**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**		
5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis	**225.528.000**			**5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis	**254.904.000**		
5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	225.528.000			5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	254.904.000		
5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**22.424.275.926**			**5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**24.685.481.665**		
5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	22.424.275.926			5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	24.685.481.665		
5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	**2.769.835.731**			**5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	**3.116.493.882**		
5.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	364.901.033			5.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	317.830.451		

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.404.934.698					5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.798.663.431
			5.01..02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	100%	**3.138.311.529**				**5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**		Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	100%	**2.736.063.880**
					Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	100%							Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	100%	
					Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%							Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	6 dokumen	**1.456.417.983**					**5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	6 dokumen	**1.317.310.402**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	1.456.417.983					5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	1.317.310.402
			5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan	58 PD	**1.045.022.183**				**5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**		Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan	58 PD	**832.877.247**
				5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	1.045.022.183					5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	832.877.247
			5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah	58 PD	**636.871.363**				**5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**		Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah	58 PD	**585.876.231**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	636.871.363					5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	585.876.231
			5.01..03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76%	98,43 %	**5.478.596.253**				**5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**		Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76%	98,43 %	**5.379.191.654**
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Laporan	**1.890.752.390**					**5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Laporan	**1.884.635.872**
					5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan	782.705.566					5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan	799.766.682

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	1.108.046.824					5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	1.084.869.190
			5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian dan Bidang SDA yang disusun	4 Laporan	**1.559.105.709**				**5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian dan Bidang SDA yang disusun	4 Laporan	**1.541.876.858**
					5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	773.823.483					5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	773.914.184
					5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	785.282.226					5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	767.962.674

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pembangunan Daerah Bidang SDA									Pembangunan Daerah Bidang SDA			
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dan Bidang Kewilayahan yang disusun	4 Laporan	**2.028.738.154**					**5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dan Bidang Kewilayahan yang disusun	4 Laporan	**1.952.678.924**
					5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	1.070.881.301						5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	1.043.544.024

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	957.856.853					5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	909.134.900
		5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						**1.448.368.554**			**5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**1.363.446.263**
			5.05..02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	100%	**1.448.368.554**				**5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	100%	**1.363.446.263**
				5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi serta pelaksanaan diseminasi yang disusun	4 Dokumen	**1.448.368.554**					**5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi**		Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi serta pelaksanaan diseminasi yang disusun	4 Dokumen	**1.363.446.263**
					5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	678.084.289					5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	652.075.510

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	770.284.265	5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	711.370.753
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata			**176.465.246.346**	**Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata**			**131.319.269.679**
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**161.029.756.218**	**2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**121.166.618.285**
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			**113.008.928.584**	**2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			**80.387.581.891**
2.19..02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	24%	**48.930.194.161**	**2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	24%	**48.088.202.111**
	Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri	24%			Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri	24%	
	Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	47,23 %			Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	47,23 %	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Pemuda Pelopor, Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja dan Pemuda Pasukan Pengibar Bendera	23 jenis	**48.930.194.161**					**2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**		Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Pemuda Pelopor, Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja dan Pemuda Pasukan Pengibar Bendera	23 jenis	**48.088.202.111**
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Kepada Siswa/Siswi SMA/SMK Sederajat dan Mahasiswa/Mahasiswi Berprestasi	1 laporan								Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Kepada Siswa/Siswi SMA/SMK Sederajat dan Mahasiswa/Mahasiswi Berprestasi	1 laporan	
						Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Daya Saing Wira Usaha Pemula	2 jenis								Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Daya Saing Wira Usaha Pemula	2 jenis	
					2.19.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	700 Orang	776.871.360						2.19.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	700 Orang	771.257.564

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					2.19.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	825 Orang	406.097.722					2.19.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	825 Orang	436.107.571
					2.19.02.2.01.0007 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	3500 Orang	46.224.739.050					2.19.02.2.01.0007 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	3500 Orang	45.278.689.945
					2.19.02.2.01.0008 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	925 Orang	1.522.486.029					2.19.02.2.01.0008 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	925 Orang	1.602.147.031
			2.19..03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			Jumlah prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	185 medali	**64.078.734.423**			**2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			Jumlah prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	185 medali	**32.299.379.780**
						Persentase Penambahan dan Peningkatan Fasilitas Olahraga	18%								Persentase Penambahan dan Peningkatan Fasilitas Olahraga	18%	

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah wilayah yang memperoleh penambahan prasarana olahraga	5 kecamatan	**19.851.528.987**	**2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				Jumlah wilayah yang memperoleh penambahan prasarana olahraga	5 kecamatan	**5.199.168.522**
2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota				Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	24 Unit	19.851.528.987	2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota				Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	24 Unit	5.199.168.522
2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina	45 cabang olahraga	**20.494.230.435**	**2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**				Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina	45 cabang olahraga	**10.487.252.235**
2.19.03.2.03.0003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota				Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	661 Orang	20.494.230.435	2.19.03.2.03.0003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota				Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	661 Orang	10.487.252.235
2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan Peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi	4 dokumen	**23.732.975.001**	**2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**				Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan Peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi	4 dokumen	**16.612.959.023**
				Jumlah Prasarana Olahraga yang	405 lokasi						Jumlah Prasarana Olahraga yang	405 lokasi	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Difasilitasi dan Dipelihara									Difasilitasi dan Dipelihara		
					2.19.03.2.05.0001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	7 Dokumen	3.317.787.200						2.19.03.2.05.0001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	7 Dokumen	1.718.298.090
					2.19.03.2.05.0003 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	405 Unit	20.415.187.801						2.19.03.2.05.0003 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	405 Unit	14.894.660.933
		2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						**48.020.827.634**			**2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**40.779.036.394**
			2.22..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	91%	**24.605.596.052**				**2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	91%	**24.637.968.529**
				2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**21.998.906.078**					**2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**22.331.374.769**
					2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan	21.998.906.078						2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/bulan	22.331.374.769

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	**2.606.689.974**	**2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	**2.306.593.760**
	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran.	100%			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran.	100%	
2.22.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	680.122.854	2.22.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	315.407.312
2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.926.567.120	2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.991.186.448
2.22..02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal	80%	**10.558.490.330**	**2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal	80%	**4.230.887.999**
2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan tampilan pemanfaatan budaya daerah	460 kali	**10.558.490.330**	**2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pelaksanaan tampilan pemanfaatan budaya daerah	460 kali	**4.230.887.999**
2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan,	2 Objek	10.558.490.330	2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan,	2 Objek	4.230.887.999

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Pengembangan, Pemanfaatan									Pengembangan, Pemanfaatan		
			2.22..03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	60,00 %	**1.423.166.614**				**2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**			Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	60,00 %	**1.183.997.026**
				2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian tradisional	12 dokumen	**1.423.166.614**					**2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian tradisional	12 dokumen	**1.183.997.026**
					2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	895 Orang	1.423.166.614						2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	895 Orang	1.183.997.026
			2.22..04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			Persentase siswa yang memahami materi sejarah	76%	**1.063.609.302**				**2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**			Persentase siswa yang memahami materi sejarah	76%	**108.425.000**
				2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaksanaan Event yang bertema sejarah dan kepahlawanan	10 kali	**1.063.609.302**					**2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah Pelaksanaan Event yang bertema sejarah dan kepahlawanan	10 kali	**108.425.000**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	4 Dokumen	1.063.609.302					2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	4 Dokumen	108.425.000
			2.22..05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			Persentase cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian	92,04 %	**1.090.714.576**				**2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**		Persentase cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian	92,04 %	**1.173.086.139**
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian	275 lokasi	**1.090.714.576**					**2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian	275 lokasi	**1.173.086.139**
					2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	275 Objek	1.090.714.576						2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	275 Objek	1.173.086.139
			2.22..06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			Persentase museum yang berhasil dikembangkan	100%	**9.279.250.760**				**2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**		Persentase museum yang berhasil dikembangkan	100%	**9.444.671.701**
				2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		Jumlah museum dan bangunan sejarah yang dikelola	9 lokasi	**9.279.250.760**					**2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	Jumlah museum dan bangunan sejarah yang dikelola	9 lokasi	**9.444.671.701**
					2.22.06.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	730 Unit	450.849.060						2.22.06.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	730 Unit	450.849.060

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Koleksi Secara Terpadu									Koleksi Secara Terpadu		
					2.22.06.2.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	8 Unit	807.608.640						2.22.06.2.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	8 Unit	807.608.640
					2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	241.542.300						2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	241.542.300
					2.22.06.2.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	9 Unit	7.779.250.760						2.22.06.2.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	9 Unit	7.944.671.701
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								**15.435.490.128**	**3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								**10.152.651.394**
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							**15.435.490.128**		**3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**10.152.651.394**
		3.26..02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	50%	**7.722.992.401**			**3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**				Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	50%	**6.738.653.497**
			3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			Jumlah lokasi daya tarik wisata yang dikelola	2 lokasi	**6.588.526.466**				**3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**			Jumlah lokasi daya tarik wisata yang dikelola	2 lokasi	**5.588.310.588**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					3.26.02.2.01.0005 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	6.588.526.466					3.26.02.2.01.0005 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	5.588.310.588
			3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	1 lokasi	**1.134.465.935**				**3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**		Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	1 lokasi	**1.150.342.909**
					3.26.02.2.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	144.000.000					3.26.02.2.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	83.000.000
					3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	839.589.935					3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	929.845.819

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
3.26.02.2.03.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	60 Laporan	150.876.000	3.26.02.2.03.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	60 Laporan	137.497.090
3.26..03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata	43,5 %	**5.969.687.179**	**3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata	43,5 %	**1.773.631.472**
3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	2 jenis	**5.969.687.179**	**3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah jenis kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	2 jenis	**1.773.631.472**
3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	5.969.687.179	3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	1.773.631.472
3.26..05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan	80%	**1.742.810.548**	**3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan	80%	**1.640.366.425**
	Persentase peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata	24%			Persentase peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata	24%	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
	Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder pariwisata yang dilaksanakan 20 kesepakatan	60%			Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder pariwisata yang dilaksanakan 20 kesepakatan	60%	
3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah jenis kelompok pemangku kepentingan pariwisata yang dilakukan penjajakan kerjasama	2 jenis	**545.983.656**	**3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Jumlah jenis kelompok pemangku kepentingan pariwisata yang dilakukan penjajakan kerjasama	2 jenis	**486.708.793**
	Jumlah laporan pelaksanaan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat	1 laporan			Jumlah laporan pelaksanaan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat	1 laporan	
3.26.05.2.01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	60 Orang	286.060.044	3.26.05.2.01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	60 Orang	271.915.019
3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	250 Orang	259.923.612	3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	250 Orang	214.793.774

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah produk ekonomi kreatif yang dihasilkan	4 Produk	**1.196.826.892**	**3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	Jumlah produk ekonomi kreatif yang dihasilkan	4 Produk	**1.153.657.632**
3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	220 Orang	1.196.826.892	3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	220 Orang	1.153.657.632
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			**59.042.070.354**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			**61.519.065.417**
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**59.042.070.354**	**2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**61.519.065.417**
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			**59.042.070.354**	**2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			**61.519.065.417**
2.12..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	86,68%	**49.641.478.235**	**2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	86,68%	**51.176.353.668**
2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis	**13.000.000**	**2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis	**13.000.000**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	13.000.000					2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	13.000.000
			2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**41.204.294.003**				**2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**42.714.579.855**
				2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	194 Orang/bulan	41.204.294.003					2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	182 Orang/bulan	42.714.579.855
			2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kebutuhan sekretariat Dinas	100%	**5.641.219.518**				**2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kebutuhan sekretariat Dinas	100%	**5.498.178.006**
				2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.641.219.518					2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.498.178.006
			2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**2.782.964.714**				**2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**2.950.595.807**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.782.964.714					2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.950.595.807
			2.12..02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	95%	**3.353.469.492**				**2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**			Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	95%	**3.930.758.157**
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	156000 berkas	**2.439.930.741**					**2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk**		Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	156000 berkas	**2.859.159.165**
					2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	2.439.930.741					2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	2.859.159.165
				2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	156000 berkas	**913.538.751**					**2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**		Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	295.000 berkas	**1.071.598.992**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	913.538.751					2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	1.071.598.992
			2.12..03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL			Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	95%	**2.534.231.792**				**2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL**			Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	95%	**2.969.149.698**
				2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	36000 berkas	**1.939.657.380**					**2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil**		Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	36000 berkas	**2.272.138.399**
					2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12 Dokumen	1.939.657.380						2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12 Dokumen	2.272.138.399
				2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Jumlah Berkas Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil yang diterbitkan	36000 berkas	**594.574.412**					**2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**		Jumlah Berkas Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil yang diterbitkan	36000 berkas	**697.011.299**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					2.12.03.2.02.0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	594.574.412					2.12.03.2.02.0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	697.011.299
			2.12..04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			Persentase jumlah layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis IT	71%	**3.390.625.835**			**2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**		Persentase jumlah layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis IT	71%	**3.324.288.894**
						Persentase jumlah PD/Lembaga yang Melakukan kerjasama	60%						Persentase jumlah PD/Lembaga yang Melakukan kerjasama	60%	
						Persentase kesesuaian data penduduk antara Data Kementrian Bersih dengan data penduduk layanan	97%						Persentase kesesuaian data penduduk antara Data Kementrian Bersih dengan data penduduk layanan	97%	
				2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Jumlah Data Penduduk yang diidentifikasi	8000 data	**910.514.792**				**2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Jumlah Data Penduduk yang diidentifikasi	13.068 data	**943.592.393**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	910.514.792					2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	943.592.393
			2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Jumlah Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	5 Lembaga	**773.918.653**				**2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		Jumlah Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	5 Lembaga	**842.777.371**
					2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	309.405.355					2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	310.839.410
					2.12.04.2.03.0006 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	5 Dokumen	464.513.298					2.12.04.2.03.0006 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	5 Dokumen	531.937.961
			2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Jumlah unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	32 unit layanan	**1.706.192.390**				**2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		Jumlah unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	32 unit layanan	**1.537.919.130**
					2.12.04.2.04.0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	1.706.192.390					2.12.04.2.04.0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	1.537.919.130

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.12..05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	100%	**122.265.000**	**2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	100%	**118.515.000**
2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah jenis informasi yang dilaporkan dalam dokumen Profil Perkembangan Kependudukan	4 Informasi	**122.265.000**	**2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan**	Jumlah jenis informasi yang dilaporkan dalam dokumen Profil Perkembangan Kependudukan	4 Informasi	**118.515.000**
2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	122.265.000	2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	118.515.000
Dinas Kesehatan			**1.683.263.167.524**	**Dinas Kesehatan**			**1.936.120.829.739**
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**1.683.263.167.524**	**1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.936.120.829.739**
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**1.683.263.167.524**	**1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**1.936.120.829.739**
1.02..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	**626.258.653.547**	**1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	**668.026.061.682**
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji	100%	**362.290.675.873**	**1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji	100%	**336.419.853.682**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					dan Tunjangan ASN								dan Tunjangan ASN		
				1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2744 Orang/bulan	362.290.675.873					1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2253 Orang/bulan	336.419.853.682
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100%	**12.992.728.626**					**1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100%	**17.482.253.864**
				1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	12.992.728.626					1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	17.482.253.864
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**96.035.083.648**					**1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**133.884.217.139**
				1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	96.035.083.648					1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	133.884.217.139
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	3 jenis	**154.940.165.400**					**1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	3 jenis	**180.239.736.997**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						di Puskesmas yang terpenuhi									di Puskesmas yang terpenuhi		
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.651.479.796						1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.934.669.672
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.044.073.840						1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.264.132.646
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.329.615.372						1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4.100.634.882
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.613.253.084						1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4.671.478.259
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4.085.327.216						1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	5.325.491.290
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.663.934.788						1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.171.456.798

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.840.100.248					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.270.521.104
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.475.663.516					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.732.101.407
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	5.069.147.048					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	5.874.802.318
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4.114.199.852					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4.709.353.269
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.219.343.956					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.788.039.591
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.715.934.152					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.004.726.533
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.239.686.388					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.912.859.252

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.919.689.244					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.265.683.767
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.273.411.540					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.605.293.627
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.519.695.428					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.729.774.443
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.301.685.688					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.617.104.183
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.220.015.944					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.551.560.235
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.267.152.084					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.621.924.155
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.071.991.216					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.324.634.127

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.620.805.308					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4.081.033.414
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.708.748.036					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.986.401.581
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.117.109.040					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.635.998.777
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.821.188.272					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.182.072.448
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.498.931.572					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.892.770.279
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.784.223.416					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.077.317.842
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.800.893.272					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.009.611.353

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.379.306.128					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.782.774.446
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.265.825.408					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.553.376.267
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.270.628.116					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.658.343.733
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.932.566.432					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.159.171.070
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.400.725.372					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.781.499.522
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.474.552.616					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.681.416.725
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.999.496.260					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.304.146.975

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.899.921.796					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.393.780.298
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	919.691.144					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.109.528.696
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.167.317.184					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.677.803.453
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.206.502.084					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.473.436.745
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.814.231.360					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.167.664.861
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.153.137.232					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.542.065.600
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.117.382.980					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.330.327.592

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.289.963.852					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.469.983.913
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.577.377.080					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4.002.959.524
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.232.060.216					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.473.135.822
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	891.290.288					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.009.734.414
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.456.426.668					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4.380.641.253
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.653.201.284					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.866.516.491
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.451.759.316					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.882.600.366

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.814.936.260					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.176.545.825
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.976.501.048					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.197.472.604
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.268.825.540					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.474.084.668
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.417.983.460					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.794.068.386
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.224.472.516					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.644.737.781
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.367.256.664					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.589.735.409
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.088.067.804					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.750.952.391

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.408.472.908					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.726.899.081
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.721.843.804					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.000.065.382
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.287.989.188					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.505.019.193
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.332.313.140					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4.042.427.623
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.021.958.608					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.239.081.767
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.536.354.096					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.950.394.301
					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.664.508.772					1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.122.554.805

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.268.019.460	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.983.342.763
1.02..02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100%	**865.390.971.004**	**1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100%	**1.072.121.134.469**
	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	99,05 %			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	99,05 %	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila	82,55 %			Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila	82,55 %	
	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes)	99,19 %			Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes)	99,19 %	
	Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani ≤ 1 x 24 Jam	100%			Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani ≤ 1 x 24 Jam	100%	
	Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar	80,95 %			Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar	80,95 %	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu	100%			Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu	100%	
	Persentase Jaminan Kesehatan	97,30 %			Persentase Jaminan Kesehatan	97,30 %	
	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	100%			Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	100%	
	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	100%			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	100%	
	Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional	100%			Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional	100%	
	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama	56%			Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama	56%	
	Persentase Rumah Sehat	88,20 %			Persentase Rumah Sehat	88,20 %	
	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi	100%			Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi	100%	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,102 %								Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,102 %	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah unit layanan yang terpenuhi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan	64 Unit	**427.829.595.076**				**1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah unit layanan yang terpenuhi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan	64 Unit	**532.432.727.983**
						Jumlah Gedung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibangun dan dipelihara	16 unit								Jumlah Gedung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibangun dan dipelihara	16 unit	
						Jumlah dokumen peningkatan Fasilitas Kesehatan	3 Dokumen								Jumlah dokumen peningkatan Fasilitas Kesehatan	3 Dokumen	
						Jumlah Puskesmas yang terpenuhi pemeliharaan dan pengadaan alat kesehatan	64 Unit								Jumlah Puskesmas yang terpenuhi pemeliharaan dan pengadaan alat kesehatan	64 Unit	
					1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	304.744.400.000						1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	425.257.613.300
					1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat	1 Unit	36.304.293.856						1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat	1 Unit	13.930.951.276

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						(Puskesmas) yang Dibangun									(Puskesmas) yang Dibangun		
														1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5 Unit	2.225.768.000
					1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	2.296.968.000						1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	57.000.000
					1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	12 Unit	8.139.036.013						1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	12 Unit	7.839.691.080

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	447.448.197						1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	340.975.383
					1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30 Unit	68.478.605.954						1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	88 Unit	70.214.776.099
					1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	33 Unit	4.244.536.173						1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	33 Unit	4.218.838.962
					1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket	3.174.306.883						1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket	8.347.113.883

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas, dan bayi baru lahir	63 Unit	**436.404.439.155**	**1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas, dan bayi baru lahir	63 Unit	**537.850.139.324**
	Jumlah lembaga yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	153 Kelurahan			Jumlah lembaga yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	153 Kelurahan	
	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	63 Puskesmas			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	63 Puskesmas	
	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	63 Puskesmas			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	63 Puskesmas	
	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	63 Puskesmas			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	63 Puskesmas	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	Jumlah lokasi kejadian kegawatdaruratan yang dilayani	700 Lokasi			Jumlah lokasi kejadian kegawatdaruratan yang dilayani	700 Lokasi	
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	63 Puskesmas			Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	63 Puskesmas	
	Peningkatan Penerima Jaminan Kesehatan bagi PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda	105 jiwa			Peningkatan Penerima Jaminan Kesehatan bagi PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda	105 jiwa	
	Jumlah dokumen pelaporan akreditasi puskesmas yang disusun	145 Dokumen			Jumlah dokumen pelaporan akreditasi puskesmas yang disusun	145 Dokumen	
	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	4 kegiatan			Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	4 kegiatan	
	Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	63 Puskesmas			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	63 Puskesmas	

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Jumlah kegiatan penyediaan jaminan persalinan pada ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir	1 kegiatan							Jumlah kegiatan penyediaan jaminan persalinan pada ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir	1 kegiatan	
					Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	2 kegiatan							Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	2 kegiatan	
					Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat di puskesmas	2 kegiatan							Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat di puskesmas	2 kegiatan	
					Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif di puskesmas	2 kegiatan							Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif di puskesmas	2 kegiatan	
					Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di puskesmas	3 kegiatan							Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di puskesmas	3 kegiatan	
					Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi di puskesmas	2 kegiatan							Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi di puskesmas	2 kegiatan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	609 Orang	24.400.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	559 Orang	24.400.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	689 Orang	19.520.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	525 Orang	19.520.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1112 Orang	19.520.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1043 Orang	19.520.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	580 Orang	9.760.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	549 Orang	9.760.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	860 Orang	19.520.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	747 Orang	19.520.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	607 Orang	9.760.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	469 Orang	9.760.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	849 Orang	14.640.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	710 Orang	14.640.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	298 Orang	12.460.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	259 Orang	12.460.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1289 Orang	14.640.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1140 Orang	14.640.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	363 Orang	6.100.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	322 Orang	6.100.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	902 Orang	18.300.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	729 Orang	18.300.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1350 Orang	19.520.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1204 Orang	19.520.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	616 Orang	14.640.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	537 Orang	14.640.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	402 Orang	9.760.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	353 Orang	9.760.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	673 Orang	28.320.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	587 Orang	28.320.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	701 Orang	19.520.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	578 Orang	19.520.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	621 Orang	14.640.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	549 Orang	14.640.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	849 Orang	14.640.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	754 Orang	14.640.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	735 Orang	19.520.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	664 Orang	19.520.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	418 Orang	4.880.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	370 Orang	4.880.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	589 Orang	14.640.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	440 Orang	14.640.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1161 Orang	14.640.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1072 Orang	14.640.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	406 Orang	19.520.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	351 Orang	19.520.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	932 Orang	4.880.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	782 Orang	4.880.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	945 Orang	9.760.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	775 Orang	9.760.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	851 Orang	14.640.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	798 Orang	14.640.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	280 Orang	4.880.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	248 Orang	4.880.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	539 Orang	14.640.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	512 Orang	14.640.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	357 Orang	21.960.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	334 Orang	21.960.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	603 Orang	14.640.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	506 Orang	14.640.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	847 Orang	9.760.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	796 Orang	9.760.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	220 Orang	9.760.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	204 Orang	9.760.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	645 Orang	14.640.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	550 Orang	14.640.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	822 Orang	14.640.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	427 Orang	14.640.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	972 Orang	19.520.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	796 Orang	19.520.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1032 Orang	19.520.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	746 Orang	19.520.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	43725 Orang	4.358.980.335						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	37395 Orang	4.320.225.535
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	676 Orang	19.520.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	580 Orang	19.520.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	706 Orang	9.760.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	550 Orang	9.760.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1081 Orang	19.520.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	995 Orang	19.520.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	613 Orang	14.640.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	536 Orang	14.640.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	828 Orang	19.520.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	724 Orang	19.520.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	619 Orang	14.640.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	527 Orang	14.640.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	787 Orang	7.080.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	680 Orang	7.080.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	722 Orang	14.640.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	606 Orang	14.640.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	742 Orang	14.640.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	668 Orang	14.640.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1167 Orang	14.640.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1080 Orang	14.640.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	763 Orang	14.640.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	687 Orang	14.640.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	816 Orang	14.640.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	705 Orang	14.640.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	824 Orang	4.880.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	754 Orang	4.880.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	598 Orang	9.760.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	514 Orang	9.760.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	791 Orang	14.640.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	422 Orang	14.640.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1054 Orang	5.760.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	937 Orang	5.760.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	458 Orang	4.880.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	413 Orang	4.880.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	536 Orang	4.880.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	447 Orang	4.880.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	462 Orang	14.640.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	412 Orang	14.640.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	543 Orang	14.640.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	465 Orang	14.640.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	223 Orang	7.320.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	184 Orang	7.320.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	758 Orang	9.760.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	545 Orang	9.760.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1126 Orang	11.340.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1018 Orang	11.340.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	301 Orang	19.520.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	258 Orang	19.520.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	248 Orang	10.980.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	228 Orang	10.980.000
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	264 Orang	9.760.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	212 Orang	9.760.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	295 Orang	9.760.000						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	263 Orang	9.760.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	256 Orang	8.250.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	210 Orang	8.250.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	824 Orang	8.250.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	724 Orang	8.250.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	458 Orang	8.250.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	410 Orang	8.250.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1112 Orang	8.250.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1066 Orang	8.250.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	506 Orang	2.200.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	445 Orang	2.200.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	617 Orang	5.500.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	542 Orang	5.500.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	248 Orang	4.125.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	227 Orang	4.125.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1146 Orang	9.900.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1075 Orang	9.900.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	643 Orang	2.750.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	577 Orang	2.750.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	273 Orang	2.750.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	246 Orang	2.750.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan	637 Orang	5.500.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan	574 Orang	5.500.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
						Kesehatan Sesuai Standar									Kesehatan Sesuai Standar		
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	412 Orang	2.750.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	368 Orang	2.750.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	626 Orang	8.250.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	548 Orang	8.250.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	807 Orang	11.000.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	721 Orang	11.000.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	629 Orang	5.500.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	556 Orang	5.500.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	545 Orang	8.250.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	509 Orang	8.250.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	804 Orang	8.250.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	707 Orang	8.250.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	401 Orang	18.150.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	350 Orang	18.150.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	455 Orang	2.750.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	411 Orang	2.750.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	2.750.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	932 Orang	2.750.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	582 Orang	5.500.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	467 Orang	5.500.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan	632 Orang	8.250.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan	546 Orang	8.250.000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Kesehatan Sesuai Standar									Kesehatan Sesuai Standar		
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	771 Orang	2.750.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	676 Orang	2.750.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	715 Orang	11.000.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	663 Orang	11.000.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221 Orang	5.500.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	202 Orang	5.500.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	589 Orang	5.500.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	511 Orang	5.500.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	732 Orang	8.250.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	664 Orang	8.250.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	360 Orang	8.250.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	332 Orang	8.250.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	859 Orang	5.500.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	770 Orang	5.500.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	672 Orang	8.250.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	603 Orang	8.250.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	617 Orang	5.500.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	545 Orang	5.500.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	843 Orang	9.075.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	749 Orang	9.075.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan	606 Orang	8.250.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan	533 Orang	8.250.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Kesehatan Sesuai Standar									Kesehatan Sesuai Standar		
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1062 Orang	11.000.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	989 Orang	11.000.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1085 Orang	3.882.700						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1013 Orang	3.882.700
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	771 Orang	12.375.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	700 Orang	12.375.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	920 Orang	11.210.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	791 Orang	11.210.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	602 Orang	4.125.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	534 Orang	4.125.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	292 Orang	4.400.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	257 Orang	4.400.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	664 Orang	11.000.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	583 Orang	11.000.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221 Orang	2.750.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	183 Orang	2.750.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	592 Orang	11.000.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	521 Orang	11.000.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1086 Orang	11.000.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1037 Orang	11.000.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan	501 Orang	8.250.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan	437 Orang	8.250.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Kesehatan Sesuai Standar									Kesehatan Sesuai Standar		
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	817 Orang	8.250.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	750 Orang	8.250.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	622 Orang	5.500.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	546 Orang	5.500.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	585 Orang	8.250.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	524 Orang	8.250.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	527 Orang	8.250.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	463 Orang	8.250.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	784 Orang	12.375.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	424 Orang	12.375.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	869 Orang	8.250.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	795 Orang	8.250.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	295 Orang	11.000.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang	11.000.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	838 Orang	11.000.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	742 Orang	11.000.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	895 Orang	5.500.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	779 Orang	5.500.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1304 Orang	8.250.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1133 Orang	8.250.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan	764 Orang	11.000.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan	683 Orang	11.000.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Kesehatan Sesuai Standar									Kesehatan Sesuai Standar		
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	351 Orang	3.712.500						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	320 Orang	3.712.500
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	580 Orang	5.500.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	419 Orang	5.500.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	840 Orang	11.000.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	743 Orang	11.000.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	844 Orang	11.000.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	791 Orang	11.000.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1320 Orang	11.000.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1198 Orang	11.000.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	293 Orang	10.000.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	257 Orang	10.000.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	574 Orang	12.375.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	504 Orang	12.375.000
					1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	389 Orang	17.600.000						1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	351 Orang	17.600.000
					1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4401 Orang	387.650.000						1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36208 Orang	387.650.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	3874 Orang	6.300.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	3792 Orang	6.300.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan	4449 Orang	4.560.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan	5280 Orang	4.560.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						kesehatan sesuai standar									kesehatan sesuai standar		
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	10240 Orang	5.460.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	12278 Orang	5.460.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2299 Orang	1.440.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2664 Orang	1.440.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6988 Orang	3.420.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	8177 Orang	3.420.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6300 Orang	5.400.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	7405 Orang	5.400.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6896 Orang	2.880.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	8408 Orang	2.880.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2048 Orang	10.760.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2427 Orang	10.760.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	7137 Orang	7.200.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	8835 Orang	7.200.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6072 Orang	16.800.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	7021 Orang	16.800.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2402 Orang	8.048.500						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2971 Orang	8.048.500
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5544 Orang	6.685.800						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6417 Orang	6.685.800
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan	8285 Orang	4.320.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan	9833 Orang	4.320.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						kesehatan sesuai standar									kesehatan sesuai standar		
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4033 Orang	7.200.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4863 Orang	7.200.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	3698 Orang	1.800.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4440 Orang	1.800.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	3893 Orang	5.040.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4534 Orang	5.040.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6772 Orang	9.720.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	8070 Orang	9.720.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5796 Orang	4.560.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6745 Orang	4.560.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5274 Orang	3.000.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6511 Orang	3.000.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	8294 Orang	2.340.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	9713 Orang	2.340.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5718 Orang	11.040.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6935 Orang	11.040.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	3397 Orang	11.340.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4085 Orang	11.340.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4993 Orang	6.300.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5875 Orang	6.300.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan	4512 Orang	11.015.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan	5405 Orang	11.015.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						kesehatan sesuai standar									kesehatan sesuai standar		
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5640 Orang	5.760.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6580 Orang	5.760.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4170 Orang	17.640.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4974 Orang	17.640.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	7599 Orang	3.420.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	8924 Orang	3.420.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5372 Orang	2.520.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6406 Orang	2.520.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2626 Orang	2.400.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	3290 Orang	2.400.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2058 Orang	10.080.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2540 Orang	10.080.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4307 Orang	2.880.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5316 Orang	2.880.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5361 Orang	22.680.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6507 Orang	22.680.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	7997 Orang	2.430.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	10492 Orang	2.430.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5505 Orang	13.417.900						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6786 Orang	13.417.900
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan	6383 Orang	5.580.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan	7637 Orang	5.580.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						kesehatan sesuai standar									kesehatan sesuai standar		
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4530 Orang	840.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5456 Orang	840.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6253 Orang	6.000.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	7296 Orang	6.000.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4331 Orang	4.759.300						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5340 Orang	4.759.300
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5706 Orang	1.800.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6854 Orang	1.800.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4345 Orang	12.000.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5114 Orang	12.000.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6172 Orang	19.320.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	7421 Orang	19.320.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1656 Orang	3.360.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2058 Orang	3.360.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4565 Orang	6.720.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5544 Orang	6.720.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6257 Orang	7.560.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	7520 Orang	7.560.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	8525 Orang	5.400.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	10173 Orang	5.400.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan	5331 Orang	2.250.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan	6301 Orang	2.250.000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						kesehatan sesuai standar									kesehatan sesuai standar		
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	7453 Orang	4.320.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	9121 Orang	4.320.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6600 Orang	7.560.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	7810 Orang	7.560.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1832 Orang	4.980.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2275 Orang	4.980.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	8704 Orang	4.080.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	10389 Orang	4.080.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6006 Orang	9.360.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	7338 Orang	9.360.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1631 Orang	22.680.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1980 Orang	22.680.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2687 Orang	3.600.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	3238 Orang	3.600.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4285 Orang	10.560.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5249 Orang	10.560.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	7354 Orang	2.280.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	8886 Orang	2.280.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4483 Orang	3.780.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5297 Orang	3.780.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan	8152 Orang	10.080.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan	10144 Orang	10.080.000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						kesehatan sesuai standar									kesehatan sesuai standar		
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5973 Orang	6.240.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	7048 Orang	6.240.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2569 Orang	2.504.800						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	3137 Orang	2.504.800
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5976 Orang	7.560.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	7128 Orang	7.560.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6652 Orang	2.430.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	8167 Orang	2.430.000
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4690 Orang	12.960.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5657 Orang	12.960.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1608 Orang	3.960.000						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2025 Orang	3.960.000
					1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2038597 Orang	1.312.197.100						1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1923364 Orang	1.312.197.100
					1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	325983 Orang	112.094.700						1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	378637 Orang	103.094.700
					1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	747207 Orang	133.956.869						1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	727432 Orang	133.956.869
					1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	104362 Orang	1.440.175.490						1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	101979 Orang	1.394.187.310
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	354 Orang	3.600.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	466 Orang	3.600.000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Pelayanan Sesuai Standar									Pelayanan Sesuai Standar		
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1293 Orang	960.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1651 Orang	960.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1535 Orang	4.320.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1967 Orang	4.320.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	843 Orang	750.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1089 Orang	750.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1164 Orang	7.200.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1492 Orang	7.200.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1383 Orang	600.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1841 Orang	600.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	712 Orang	1.980.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	949 Orang	1.980.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1216 Orang	9.450.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1563 Orang	9.450.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1029 Orang	1.530.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1352 Orang	1.530.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	917 Orang	1.800.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1210 Orang	1.800.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1010 Orang	1.500.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1308 Orang	1.500.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	283 Orang	1.800.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	384 Orang	1.800.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Pelayanan Sesuai Standar									Pelayanan Sesuai Standar		
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1018 Orang	7.200.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1304 Orang	7.200.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	60512 Orang	17.867.100.840						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	78502 Orang	14.032.385.446
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	293 Orang	900.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	391 Orang	900.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1179 Orang	1.320.800						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1579 Orang	1.320.800
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1879 Orang	12.960.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2448 Orang	12.960.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	887 Orang	2.400.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1143 Orang	2.400.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	917 Orang	720.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1201 Orang	720.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1065 Orang	990.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1399 Orang	990.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	750 Orang	2.670.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1026 Orang	2.670.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	798 Orang	720.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1033 Orang	720.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	680 Orang	360.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	872 Orang	360.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Pelayanan Sesuai Standar									Pelayanan Sesuai Standar		
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	365 Orang	360.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	503 Orang	360.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1194 Orang	6.000.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1585 Orang	6.000.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1176 Orang	900.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1503 Orang	900.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	593 Orang	2.160.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	784 Orang	2.160.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	298 Orang	12.960.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	392 Orang	12.960.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1323 Orang	7.200.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1762 Orang	7.200.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1186 Orang	1.080.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1540 Orang	1.080.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	829 Orang	3.000.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1053 Orang	3.000.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1404 Orang	4.320.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1808 Orang	4.320.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1067 Orang	900.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1380 Orang	900.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	1115 Orang	810.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	1423 Orang	810.000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Pelayanan Sesuai Standar									Pelayanan Sesuai Standar		
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	423 Orang	2.700.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	547 Orang	2.700.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	834 Orang	720.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1065 Orang	720.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	840 Orang	1.200.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1090 Orang	1.200.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1246 Orang	6.300.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1631 Orang	6.300.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1137 Orang	26.760.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1451 Orang	26.760.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	463 Orang	858.800						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	596 Orang	858.800
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1203 Orang	1.800.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1584 Orang	1.800.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	630 Orang	1.800.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	819 Orang	1.800.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1444 Orang	6.120.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1866 Orang	6.120.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1196 Orang	3.600.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1568 Orang	3.600.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	941 Orang	6.900.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	1199 Orang	6.900.000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Pelayanan Sesuai Standar									Pelayanan Sesuai Standar		
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	932 Orang	1.500.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1219 Orang	1.500.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1562 Orang	960.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2028 Orang	960.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1148 Orang	9.360.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1461 Orang	9.360.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	847 Orang	420.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1093 Orang	420.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	779 Orang	3.600.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	998 Orang	3.600.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	391 Orang	2.520.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	502 Orang	2.520.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1127 Orang	920.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1433 Orang	920.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	949 Orang	3.600.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1253 Orang	3.600.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	496 Orang	2.160.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	647 Orang	2.160.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1273 Orang	720.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1608 Orang	720.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	945 Orang	1.440.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	1220 Orang	1.440.000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Pelayanan Sesuai Standar									Pelayanan Sesuai Standar		
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1649 Orang	1.500.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2102 Orang	1.500.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1268 Orang	11.250.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1637 Orang	11.250.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1163 Orang	1.620.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1481 Orang	1.620.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	741 Orang	2.970.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	943 Orang	2.970.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1514 Orang	1.560.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1974 Orang	1.560.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	552 Orang	2.880.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	717 Orang	2.880.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	354 Orang	3.600.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	452 Orang	3.600.000
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	707 Orang	2.880.000						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	917 Orang	2.880.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1148 Orang	90.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1099 Orang	90.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	52741 Orang	1.194.744.498						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	49485 Orang	1.194.744.498
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan	971 Orang	16.920.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan	830 Orang	16.920.000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Pelayanan Sesuai Standar									Pelayanan Sesuai Standar		
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1217 Orang	240.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	967 Orang	240.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	879 Orang	3.660.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	908 Orang	3.660.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	912 Orang	900.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	839 Orang	900.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	700 Orang	1.260.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	737 Orang	1.260.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1109 Orang	240.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	939 Orang	240.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	922 Orang	9.000.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1101 Orang	9.000.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	951 Orang	1.110.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	862 Orang	1.110.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1416 Orang	210.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1229 Orang	210.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	640 Orang	1.440.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	572 Orang	1.440.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	249 Orang	90.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	199 Orang	90.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan	578 Orang	240.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan	547 Orang	240.000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Pelayanan Sesuai Standar									Pelayanan Sesuai Standar		
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1638 Orang	1.080.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1567 Orang	1.080.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	924 Orang	1.740.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	876 Orang	1.740.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	462 Orang	1.200.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	442 Orang	1.200.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	429 Orang	480.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	547 Orang	480.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1420 Orang	600.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1347 Orang	600.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	401 Orang	750.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	451 Orang	750.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	369 Orang	300.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	282 Orang	300.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	664 Orang	600.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	711 Orang	600.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1430 Orang	150.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1714 Orang	150.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	290 Orang	720.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	224 Orang	720.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan	732 Orang	90.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan	766 Orang	90.000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Pelayanan Sesuai Standar									Pelayanan Sesuai Standar		
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	447 Orang	840.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	458 Orang	840.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	538 Orang	1.020.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	677 Orang	1.020.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1037 Orang	300.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	984 Orang	300.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	666 Orang	900.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	578 Orang	900.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	687 Orang	2.610.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	632 Orang	2.610.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	944 Orang	1.800.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	833 Orang	1.800.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1037 Orang	1.620.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1156 Orang	1.620.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	718 Orang	90.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	617 Orang	90.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	333 Orang	480.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	336 Orang	480.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	465 Orang	90.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	453 Orang	90.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan	882 Orang	90.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan	539 Orang	90.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Pelayanan Sesuai Standar									Pelayanan Sesuai Standar		
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	966 Orang	1.080.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1048 Orang	1.080.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	803 Orang	360.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	640 Orang	360.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	949 Orang	180.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	875 Orang	180.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	695 Orang	90.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	631 Orang	90.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2175 Orang	2.940.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1913 Orang	2.940.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	250 Orang	90.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	259 Orang	90.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	952 Orang	450.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	874 Orang	450.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	754 Orang	780.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	640 Orang	780.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1277 Orang	90.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1269 Orang	90.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	592 Orang	720.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	639 Orang	720.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan	1224 Orang	3.720.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan	982 Orang	3.720.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Pelayanan Sesuai Standar									Pelayanan Sesuai Standar		
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	490 Orang	360.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	473 Orang	360.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	948 Orang	2.040.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1101 Orang	2.040.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	613 Orang	1.200.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	576 Orang	1.200.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	686 Orang	90.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	638 Orang	90.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1235 Orang	90.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1178 Orang	90.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	667 Orang	390.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	629 Orang	390.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	795 Orang	270.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	734 Orang	270.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	350 Orang	720.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	319 Orang	720.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1436 Orang	900.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1377 Orang	900.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1287 Orang	1.950.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1271 Orang	1.950.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan	823 Orang	90.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan	791 Orang	90.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Pelayanan Sesuai Standar									Pelayanan Sesuai Standar		
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	696 Orang	90.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	647 Orang	90.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	670 Orang	720.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	581 Orang	720.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	832 Orang	600.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	704 Orang	600.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	792 Orang	3.960.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	530 Orang	3.960.000
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	861 Orang	1.500.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	582 Orang	1.500.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	718 Orang	2.400.000						1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	565 Orang	2.400.000
					1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	773.718.678						1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	657.783.718
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	137.289.900						1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	137.289.900
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	199.228.000						1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	199.228.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	169.532.000						1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	169.532.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	223.382.000						1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	223.382.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	164.597.600						1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	164.597.600
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	137.912.000						1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	137.912.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	219.785.900						1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	219.785.900
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	346.902.000						1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	346.902.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	161.222.000						1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	161.222.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	172.412.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	172.412.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	200.238.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	200.238.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	159.839.500					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	159.839.500
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	170.432.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	170.432.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	179.078.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	179.078.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	180.741.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	180.741.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	163.091.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	163.091.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	277.766.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	277.766.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	157.892.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	157.892.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	149.372.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	149.372.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	196.886.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	196.886.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	212.648.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	212.648.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	167.273.700					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	167.273.700
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	329.292.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	329.292.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	145.940.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	145.940.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	148.319.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	148.319.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	224.228.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	224.228.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	178.208.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	178.208.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	2.589.898.918						1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	2.585.187.523
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	243.698.000						1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	243.698.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	164.599.000						1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	164.599.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	161.672.000						1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	161.672.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	149.933.000						1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	149.933.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	173.291.000						1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	173.291.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	185.885.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	185.885.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	167.006.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	167.006.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	364.283.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	364.283.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	385.463.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	385.463.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	337.037.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	337.037.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	205.921.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	205.921.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	184.736.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	184.736.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	162.338.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	162.338.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	244.103.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	244.103.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	168.102.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	168.102.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	183.320.200					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	183.320.200
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	149.312.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	149.312.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	148.538.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	148.538.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	421.373.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	421.373.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	393.527.500					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	393.527.500
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	209.770.400					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	209.770.400
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	187.208.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	187.208.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	180.517.300					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	180.517.300

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	157.867.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	157.867.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	316.637.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	316.637.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	167.747.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	167.747.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	165.663.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	165.663.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	166.691.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	166.691.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	188.003.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	188.003.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	153.776.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	153.776.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	169.613.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	169.613.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	360.146.600					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	360.146.600
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	177.782.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	177.782.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	249.731.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	249.731.000
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	164.972.000					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	164.972.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	183.881.000						1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	183.881.000
					1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	796.110.557						1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	792.360.557
					1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	203.057.030						1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	519.406.650
					1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	460.194.469						1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	348.954.469
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	76.701.000						1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	76.701.000
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	114.730.000						1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	114.730.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	105.350.000					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	105.350.000
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	66.942.500					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	66.942.500
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	137.393.500					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	137.393.500
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	70.315.000					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	70.315.000
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	49.185.000					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	49.185.000
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	64.165.000					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	64.165.000
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	61.900.000					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	102.451.700
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	167.790.000					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	167.790.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	202.660.000					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	202.660.000
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	125.750.000					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	125.750.000
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	174.060.000					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	174.060.000
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	62.925.000					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	62.925.000
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	84.398.700					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	84.398.700
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	77.829.200					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	77.829.200
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	101.057.900					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	101.057.900
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	69.465.000					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	69.465.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	74.542.800						1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	74.542.800
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	56.642.800						1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	56.642.800
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	68.745.000						1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	68.745.000
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	137.345.000						1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	137.345.000
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	208.640.000						1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	208.640.000
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	111.250.000						1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	111.250.000
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	211.550.000						1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	211.550.000
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	159.215.000						1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	159.215.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	96.511.800						1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	96.511.800
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	112.267.400						1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	112.267.400
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	183.850.000						1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	183.850.000
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	83.167.100						1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	83.167.100
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	151.630.000						1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	151.630.000
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	80.799.300						1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	80.799.300
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	134.202.400						1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	134.202.400
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	116.635.000						1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	116.635.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	137.080.000					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	137.080.000
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	99.330.000					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	99.330.000
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	203.950.000					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	203.950.000
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	167.787.900					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	167.787.900
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	49.710.400					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	49.710.400
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	186.245.000					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	186.245.000
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	178.840.000					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	178.840.000
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	63.000.000					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	63.000.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	118.785.000					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	118.785.000
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	111.020.000					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	111.020.000
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	59.646.700					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	59.646.700
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	103.576.000					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	103.576.000
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	119.445.000					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	119.445.000
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	189.415.000					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	189.415.000
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	73.849.500					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	73.849.500
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	170.590.000					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	170.590.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	69.825.800						1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	69.825.800
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	83.816.900						1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	83.816.900
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	101.552.300						1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	101.552.300
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	76.095.000						1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	76.095.000
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	50.747.500						1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	50.747.500
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	183.045.000						1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	183.045.000
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	122.269.500						1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	122.269.500
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	48.225.000						1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	48.225.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	127.435.800					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	127.435.800
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	90.388.000					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	90.388.000
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	106.890.000					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	106.890.000
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	124.305.000					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	124.305.000
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	99.406.200					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	99.406.200
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	105.726.000					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	105.726.000
					1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	73 Orang	138.860.905					1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	73 Orang	138.860.905
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	15.870.000					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	15.870.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	18.558.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	18.558.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	27.780.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	27.780.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	28.860.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	28.860.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	49.872.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	49.872.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	10.410.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	10.410.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	11.040.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	11.040.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	30.780.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	30.780.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	16.290.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	16.290.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	40.230.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	40.230.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	7.770.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	7.770.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	10.448.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	10.448.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	21.780.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	21.780.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	27.390.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	27.390.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	25.710.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	25.710.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	39.940.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	39.940.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	64.290.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	64.290.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	21.210.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	21.210.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	32.940.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	32.940.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	48.810.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	48.810.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	29.040.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	29.040.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23.460.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23.460.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	36.570.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	36.570.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	32.010.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	32.010.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	7.146.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	7.146.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	10.350.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	10.350.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	5.580.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	5.580.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	36.750.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	36.750.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	42.399.600						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	42.399.600
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	19.905.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	19.905.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	52.440.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	52.440.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	13.710.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	13.710.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	20.790.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	20.790.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	49.290.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	49.290.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	50.900.400						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	50.900.400
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	31.498.200						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	31.498.200
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	67.080.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	67.080.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23.100.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23.100.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	21.060.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	21.060.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	46.170.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	46.170.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	38.280.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	38.280.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	7.620.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	7.620.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1.081.206.840						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	4.798.990.085

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	29.490.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	29.490.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	21.960.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	21.960.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	85.314.700						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	85.314.700
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	65.343.900						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	65.343.900
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	16.707.900						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	16.707.900
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	87.057.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	87.057.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	7.920.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	7.920.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	13.650.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	13.650.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	9.780.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	9.780.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	8.640.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	8.640.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	30.648.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	30.648.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	6.450.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	6.450.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	46.320.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	46.320.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12.036.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12.036.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	31.001.300						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	31.001.300
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	8.910.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	8.910.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	10.488.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	10.488.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23.070.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23.070.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	22.405.500						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	22.405.500
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	53.640.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	53.640.000
					1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	85.220.000						1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	85.220.000
					1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	319.486.938.796						1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	421.637.105.400
					1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	2 Paket	896.371.203						1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	2 Paket	896.371.203
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	863.136.635						1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	821.785.481

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	834.795.312					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	885.193.312
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.120.168.186					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.082.513.592
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	596.606.604					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	600.097.947
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	763.418.778					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	717.469.460
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	563.273.657					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	531.934.611
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	682.004.515					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	615.625.408
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	766.782.023					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	738.579.523
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	883.312.556					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	917.963.672

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	612.226.147					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	577.401.139
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	684.018.187					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	737.769.610
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	769.928.489					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	765.010.989
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	602.315.364					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	523.801.013
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	836.510.871					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	833.594.636
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	556.629.376					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	547.931.670
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	843.641.478					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	838.578.787
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	915.694.201					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	911.431.042

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	557.572.745					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	641.401.742
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.023.495.198					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	945.110.433
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	810.651.850					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	788.736.315
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	661.282.634					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	611.332.041
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.075.188.223					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.036.019.249
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	593.818.114					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	596.369.698
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.109.722.689					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.043.039.837
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	945.874.641					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	974.250.391

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	894.650.337					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	903.886.670
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.054.873.566					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.036.719.868
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	712.960.750					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	707.002.731
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	754.723.652					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	748.136.412
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.239.093.796					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.212.083.530
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	893.968.734					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	887.365.956
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	752.397.465					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	748.524.522
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.051.340.586					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.033.010.709

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	754.290.358					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	674.111.365
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	895.434.927					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	875.454.974
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	575.811.187					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	559.051.432
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	703.770.454					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	685.336.844
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	864.989.731					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	817.403.851
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	791.723.127					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	781.268.519
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.032.653.445					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.013.503.445
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	769.214.738					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	774.724.638

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	759.031.432					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	728.315.217
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	927.366.950					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	933.242.866
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	983.005.079					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	969.777.891
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	631.620.226					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	596.095.441
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	826.272.382					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	734.006.431
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.007.862.397					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	917.403.481
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	848.547.761					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	895.650.479
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	653.791.149					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	635.690.233

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.091.286.188						1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.069.322.433
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	755.412.246						1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	725.268.858
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	800.039.020						1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	788.801.103
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	988.528.869						1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.033.532.837
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	767.897.049						1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	740.850.656
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	963.211.353						1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	961.073.853
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	819.438.168						1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	773.022.707
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.022.819.022						1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	954.712.356

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.084.258.506						1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.081.258.506
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	729.946.021						1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	729.396.713
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.327.500.024						1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.297.776.308
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	882.041.271						1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	801.519.351
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	980.901.964						1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.102.241.484
					1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	660.614.982						1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	691.120.162
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2.110.000
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas	12 Dokumen	5.137.500

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
														Kesehatan Lainnya		
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3.450.000
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3.000.000
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	8.625.000
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	5.370.000
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1.792.500

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3.000.000
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2.850.000
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	6.450.000
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2.407.500
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2.137.500
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas	12 Dokumen	5.175.000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
														Kesehatan Lainnya		
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4.000.000
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3.000.000
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3.000.000
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3.862.500
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3.187.500

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2.137.500
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	6.450.000
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2.910.000
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2.000.000
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3.210.000
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas	12 Dokumen	2.407.500

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
														Kesehatan Lainnya		
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4.000.000
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4.725.000
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2.137.500
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2.137.500
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4.000.000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	7.725.000
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	5.150.000
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	7.370.000
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	5.150.000
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	5.100.000
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas	12 Dokumen	2.662.500

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
														Kesehatan Lainnya		
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	8.175.000
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2.730.000
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	5.587.500
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2.137.500
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2.990.000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4.312.500
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3.000.000
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4.000.000
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1.875.000
						1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	115.500.000					1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	34.846.190
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas	12 Dokumen	2.137.500

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
														Kesehatan Lainnya		
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2.317.500
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3.090.000
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	5.587.500
					1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	114.525.420						1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	114.525.420
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2.407.500

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	10.300.000
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4.725.000
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4.687.500
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3.000.000
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3.000.000
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas	12 Dokumen	2.137.500

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
														Kesehatan Lainnya		
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2.317.500
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2.137.500
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3.862.500
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4.725.000
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2.137.500

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	5.985.000
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4.687.500
														1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2.137.500
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	8.136.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	8.136.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	666 Orang	977.288.400						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	666 Orang	977.288.400
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.029.500						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.029.500
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	20.340.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	20.340.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16.272.000						1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	11 Orang	16.272.000
					1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	205 Orang	841.879.501						1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	205 Orang	841.879.501
					1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	27.758.121						1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	30.716.615
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	44.782.800						1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	44.782.800
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	55.560.000						1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	55.560.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	32.610.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	32.610.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	17.700.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	17.700.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	50.160.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	50.160.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	46.470.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	46.470.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	61.920.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	61.920.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	62.460.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	62.460.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	70.390.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	70.390.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	52.860.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	52.860.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	53.760.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	53.760.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	32.460.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	32.460.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	46.740.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	46.740.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	45.780.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	45.780.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	18.900.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	18.900.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	31.270.500					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	31.270.500
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	61.230.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	61.230.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	73.290.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	73.290.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	60.480.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	60.480.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	54.420.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	54.420.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	20.687.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	20.687.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	39.240.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	39.240.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	36.381.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	36.381.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	19.380.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	19.380.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	63.310.100					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	63.310.100
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	59.070.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	59.070.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	52.080.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	52.080.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	46.260.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	46.260.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	45.840.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	45.840.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	45.450.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	45.450.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	49.800.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	49.800.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	38.640.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	38.640.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	32.580.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	32.580.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	46.770.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	46.770.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	18.630.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	18.630.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	60.150.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	60.150.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	40.440.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	40.440.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	49.260.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	49.260.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	62.640.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	62.640.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	46.320.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	46.320.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	60.360.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	60.360.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	46.230.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	46.230.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	59.130.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	59.130.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	34.740.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	34.740.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	17.910.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	17.910.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	31.130.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	31.130.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	60.090.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	60.090.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	46.800.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	46.800.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	53.760.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	53.760.000
													1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	243.375.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	77.160.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	77.160.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	53.127.600					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	53.127.600
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	45.900.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	45.900.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	51.300.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	51.300.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	31.300.500					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	31.300.500
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	72.480.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	72.480.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	72.420.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	72.420.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	46.410.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	46.410.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	47.160.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	47.160.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	32.880.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	32.880.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	60.060.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	60.060.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	41.852.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	41.852.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	18.090.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	18.090.000
					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	64.050.000					1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	64.050.000
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang diterapkan	3 Aplikasi	**123.973.202**					**1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang diterapkan	3 Aplikasi	**1.195.241.862**
					1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5 Dokumen	123.973.202					1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5 Dokumen	1.195.241.862
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas		Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau	122 Lembaga	**1.032.963.571**					**1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas**	Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau	122 Lembaga	**643.025.300**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								**Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			
				1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	63 Unit	844.297.978					1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	63 Unit	555.925.300
				1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dokumen	188.665.593					1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dokumen	87.100.000
			1.02..03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas	50,17 %	**2.783.802.537**				**1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**		Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas	50,17 %	**3.177.907.552**
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan	63 Orang	**763.502.537**					**1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan	63 Orang	**1.163.253.598**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	763.502.537					1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1.163.253.598
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	4 Kegiatan	**2.020.300.000**				**1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	4 Kegiatan	**2.014.653.954**
					1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	189 Orang	2.020.300.000					1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	189 Orang	2.014.653.954
			1.02..04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	100%	**476.543.155**				**1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**		Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	100%	**472.793.155**
				1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan		Jumlah PIRT yang dibina	217 PIRT	**476.543.155**					**1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan**	Jumlah PIRT yang dibina	217 PIRT	**472.793.155**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
Minuman Industri Rumah Tangga							**Minuman Industri Rumah Tangga**						
1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	150 Unit	476.543.155		1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	150 Unit	472.793.155	
1.02..05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif	100%	**188.353.197.281**		**1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif	100%	**192.322.932.881**	
1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye GERMAS (CERDIK)	154 Kelurahan	**181.415.081**		**1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye GERMAS (CERDIK)	154 Kelurahan	**177.665.081**	
1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Dokumen	181.415.081		1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Dokumen	177.665.081	

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi			
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	63 Puskesmas	**188.171.782.200**				**1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	63 Puskesmas	**192.145.267.800**			
	Jumlah kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilakukan Puskesmas	6 Kegiatan						Jumlah kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilakukan Puskesmas	6 Kegiatan					
1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	107.625.000				1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	107.625.000			
1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	168.255.000				1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	168.255.000			

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	154.409.300					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	154.409.300
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	203.224.100					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	203.224.100
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	176.727.100					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	176.727.100
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	175.867.900					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	175.867.900

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	149.175.000					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	149.175.000
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	180.618.000					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	180.618.000
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	127.107.000					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	127.107.000
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	49.095.000					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	49.095.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	181.226.700					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	181.226.700
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	98.040.000					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	98.040.000
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	25.245.000					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	25.245.000
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	159.537.700					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	159.537.700

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	174.780.000						1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	174.780.000
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	147.333.500						1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	147.333.500
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	156.561.600						1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	156.561.600
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	111.140.500						1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	111.140.500

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	194.670.000					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	194.670.000
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	173.838.800					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	173.838.800
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	177.645.000					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	177.645.000
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	191.007.000					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	191.007.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	175.850.800					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	175.850.800
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	144.585.000					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	144.585.000
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	140.163.500					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	140.163.500
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	45.030.600					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	45.030.600

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	99.516.000						1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	99.516.000
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	184.760.600						1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	184.760.600
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	134.999.000						1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	134.999.000
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	151.319.700						1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	151.319.700

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	176.132.200					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	176.132.200
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	128.490.000					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	128.490.000
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	164.977.500					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	164.977.500
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	49.624.500					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	49.624.500

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	91.070.000						1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	91.070.000
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	51.858.000						1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	51.858.000
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	149.421.000						1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	149.421.000
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	178.706.100						1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	178.706.100

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	179.007.100					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	179.007.100
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	179.806.900					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	179.806.900
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	185.860.300					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	185.860.300
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	51.930.000					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	51.930.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	158.158.400					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	158.158.400
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	121.707.300					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	121.707.300
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	150.290.800					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	150.290.800
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	153.513.700					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	153.513.700

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	103.980.000						1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	103.980.000
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	160.842.600						1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	160.842.600
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	178.985.656.300						1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	182.959.141.900
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	180.068.400						1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	180.068.400

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	192.883.300					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	192.883.300
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	154.540.500					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	154.540.500
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	180.636.700					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	180.636.700
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	176.345.800					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	176.345.800

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	111.425.000						1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	111.425.000
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	160.050.000						1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	160.050.000
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	165.945.000						1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	165.945.000
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	159.338.700						1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	159.338.700

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	127.258.500					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	127.258.500
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	187.818.000					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	187.818.000
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	180.087.200					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	180.087.200
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	72.840.000					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	72.840.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	156.705.000						1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	156.705.000
					1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	185.453.000						1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	185.453.000
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian								**55.634.384.164**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**								**57.772.025.818**
	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							**26.533.910.477**		**2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**28.232.405.856**
		2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						**26.533.910.477**			**2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**28.232.405.856**
			2.09..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94%	**23.968.790.444**				**2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94%	**25.528.412.880**
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**19.232.769.420**					**2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**21.322.958.798**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	19.232.769.420					2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	21.322.958.798
			2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**4.736.021.024**				**2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**4.205.454.082**
					2.09.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.561.604.058					2.09.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	904.132.588
					2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.174.416.966					2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.301.321.494
			2.09..03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			Indeks Kecukupan Pangan Pokok	1,22	**1.695.037.207**				**2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**		Indeks Kecukupan Pangan Pokok	1,22	**1.780.636.869**
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Jumlah jenis pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	4 Jenis	**641.917.788**					**2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Jumlah jenis pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	4 Jenis	**667.925.482**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	15 Laporan	641.917.788					2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	15 Laporan	667.925.482
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Jenis pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	3 Jenis	**1.053.119.419**				**2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**		Jenis pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	3 Jenis	**1.112.711.387**
					2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan	1.053.119.419					2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan	1.112.711.387
			2.09..05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman	97,89 %	**870.082.826**				**2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**		Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman	97,89 %	**923.356.107**
				2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar	4 Laporan	**870.082.826**				**2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar	4 Laporan	**923.356.107**

Sebelum Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	36 Dokumen	870.082.826
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			**29.100.473.687**
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			**4.703.716.445**
3.25..03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai	40%	**1.531.215.834**
3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan penyediaan sarana usaha perikanan tangkap	1 laporan	**1.531.215.834**
3.25.03.2.01.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	60 Unit	1.531.215.834

Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	36 Dokumen	923.356.107
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			**29.539.619.962**
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			**5.770.810.139**
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai	40%	**2.257.602.697**
3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan penyediaan sarana usaha perikanan tangkap	1 laporan	**2.257.602.697**
3.25.03.2.01.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	60 Unit	2.257.602.697

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
3.25..04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah pembudidaya perikanan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	30 orang/kelompok	**1.363.903.218**	**3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah pembudidaya perikanan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	30 orang/kelompok	**1.449.900.525**
3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan	36 kali	**310.009.000**	**3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan	36 kali	**337.509.000**
3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	30 Kelompok	310.009.000	3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	30 Kelompok	337.509.000
3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah laporan penyediaan sarana budidaya ikan	1 laporan	**1.053.894.218**	**3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Jumlah laporan penyediaan sarana budidaya ikan	1 laporan	**1.112.391.525**
3.25.04.2.04.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	58 Unit	1.053.894.218	3.25.04.2.04.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	58 Unit	1.112.391.525

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
3.25..05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah kasus nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan	NIHIL kasus	**186.551.834**	**3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Jumlah kasus nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan	NIHIL kasus	**184.301.834**
3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap	12 Kali	**186.551.834**	**3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota**	Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap	12 Kali	**184.301.834**
3.25.05.2.01.0001 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	12 Dokumen	186.551.834	3.25.05.2.01.0001 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	12 Dokumen	184.301.834
3.25..06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif	70%	**1.622.045.559**	**3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif	70%	**1.879.005.083**
3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri	Jumlah sentra ikan yang dikelola	2 sentra	**1.622.045.559**	**3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri**	Jumlah sentra ikan yang dikelola	2 sentra	**1.879.005.083**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota								**Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**			
				3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	180 Pelaku Usaha	1.622.045.559					3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	180 Pelaku Usaha	1.879.005.083
		3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					**24.396.757.242**			**3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**					**23.768.809.823**
			3.27..02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	35 Orang	**6.901.825.785**				**3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	35 Orang	**5.338.582.546**
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pembudidaya Pekarangan	10 Jenis	**3.651.510.346**					**3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pembudidaya Pekarangan	10 Jenis	**2.869.211.668**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	520.000.000					3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	520.000.000
					3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	3.131.510.346					3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	2.349.211.668
				3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Jenis Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Jenis	**3.250.315.439**				**3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah Jenis Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Jenis	**2.469.370.878**
					3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	3.250.315.439					3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	2.469.370.878

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
3.27..03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	24 Lokasi	**12.935.180.580**	**3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	24 Lokasi	**13.659.722.720**
	Peningkatan luas taman hutan raya yang dikelola sebagai pendukung cadangan pangan masyarakat	2 Ha			Peningkatan luas taman hutan raya yang dikelola sebagai pendukung cadangan pangan masyarakat	2 Ha	
3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pengelola lahan aset untuk budidaya pertanian	4 Jenis	**6.242.887.155**	**3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian**	Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pengelola lahan aset untuk budidaya pertanian	4 Jenis	**6.628.620.090**
3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	16 Laporan	6.242.887.155	3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	16 Laporan	6.628.620.090
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah laporan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	2 Laporan	**6.692.293.425**	**3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian**	Jumlah laporan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	2 Laporan	**7.031.102.630**
3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	6.692.293.425	3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	7.031.102.630

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
3.27..04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah pembudidaya ternak yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	6 kelompok	**2.249.463.511**	**3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Jumlah pembudidaya ternak yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	6 kelompok	**2.391.558.977**
	Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	89,5 %			Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	89,5 %	
3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan	80%	**1.095.949.582**	**3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan	80%	**1.261.816.448**
3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	1.095.949.582	3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	1.261.816.448
3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pelaksanaan pendampingan unit usaha dan produk asal hewan	35 Unit	**1.153.513.929**	**3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Jumlah pelaksanaan pendampingan unit usaha dan produk asal hewan	35 Unit	**1.129.742.529**

Sebelum Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	35 Unit Usaha	1.153.513.929
3.27..06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perizinan usaha lingkup pertanian yang diproses	100%	**55.288.410**
3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha sektor pertanian dan perikanan	80%	**55.288.410**
3.27.06.2.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	12 Dokumen	55.288.410
3.27..07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh	100%	**2.254.998.956**
	Tingkat Produktivitas Pertanian	5,9 ton/ha	

Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	35 Unit Usaha	1.129.742.529
3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perizinan usaha lingkup pertanian yang diproses	100%	**51.538.410**
3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha sektor pertanian dan perikanan	80%	**51.538.410**
3.27.06.2.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	12 Dokumen	51.538.410
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh	100%	**2.327.407.170**
	Tingkat Produktivitas Pertanian	5,9 ton/ha	

Sebelum Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani	7 kali	**2.254.998.956**
	Jumlah penyuluh yang mengikuti bimtek/pelatihan	25 orang	
3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1.164.031.118
3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Unit	1.090.967.838
Dinas Komunikasi dan Informatika			**102.308.501.662**
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**102.308.501.662**
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			**97.038.628.952**

Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani	7 kali	**2.327.407.170**
	Jumlah penyuluh yang mengikuti bimtek/pelatihan	25 orang	
3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1.228.758.865
3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Unit	1.098.648.305
Dinas Komunikasi dan Informatika			**100.334.374.439**
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**100.334.374.439**
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			**95.253.572.514**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.16..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89,56 %	**17.472.970.136**	**2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89,56 %	**17.821.984.777**
2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**15.036.602.782**	**2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**15.902.738.000**
2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan	15.036.602.782	2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	15.902.738.000
2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**1.654.676.835**	**2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**1.665.111.201**
2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.654.676.835	2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.665.111.201
2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	**781.690.519**	**2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	**254.135.576**
2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	781.690.519	2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	254.135.576

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator** / **Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator** / **Alokasi**
2.16..02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu ≤ 24 jam	87% / **15.137.542.629**	**2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu ≤ 24 jam	87% / **14.974.672.046**
2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan	4 Jenis / **15.137.542.629**	**2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan	4 Jenis / **14.974.672.046**
	Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPID ≤ 17 hari kerja	100%		Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPID ≤ 17 hari kerja	100%
2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen / 12.234.415.523	2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen / 12.030.905.768
2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen / 1.235.619.016	2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen / 1.208.512.081
2.16.02.2.01.0008 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12 Dokumen / 1.667.508.090	2.16.02.2.01.0008 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12 Dokumen / 1.735.254.197

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.16..03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.	100%	**64.428.116.187**	**2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.	100%	**62.456.915.691**
2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO ≤ 1 x 24 jam b. Jaringan FO ≤ 3 x 24 jam	100%	**56.392.512.593**	**2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO ≤ 1 x 24 jam b. Jaringan FO ≤ 3 x 24 jam	100%	**54.077.985.651**
2.16.03.2.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	322 Unit	56.392.512.593	2.16.03.2.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	306 Unit	54.077.985.651
2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi ≤ 1 x 24 jam	100%	**8.035.603.594**	**2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi ≤ 1 x 24 jam	100%	**8.378.930.040**
	Persentase pengelolaan pusat data yang dipelihara dan dimonitoring	100%			Persentase pengelolaan pusat data yang dipelihara dan dimonitoring	100%	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					2.16.03.2.02.0001 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	58 Dokumen	388.292.245					2.16.03.2.02.0001 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	58 Dokumen	390.315.008
					2.16.03.2.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit	3.828.793.292					2.16.03.2.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit	4.296.640.874
					2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	190 Unit	1.396.475.979					2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	190 Unit	1.163.352.008
					2.16.03.2.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	58 Dokumen	2.422.042.078					2.16.03.2.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	58 Dokumen	2.528.622.150
		2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						**400.247.689**			**2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**424.227.584**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.20..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	100%	**400.247.689**	**2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	100%	**424.227.584**
2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sektor yang dianalisa	5 Sektor	**400.247.689**	**2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah sektor yang dianalisa	5 Sektor	**424.227.584**
2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	12 Dokumen	400.247.689	2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	12 Dokumen	424.227.584
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			**4.869.625.021**	**2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**4.656.574.341**
2.21..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	27%	**4.869.625.021**	**2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	27%	**4.656.574.341**
2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi dan Informatika	3 kali/per hari	**3.258.148.439**	**2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi dan Informatika	3 kali/per hari	**3.193.011.818**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	13 Perangkat Daerah	3.258.148.439	2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	13 Perangkat Daerah	3.193.011.818
2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi komunikasi sandi antar PD yang diselenggarakan	6 Kali	**1.611.476.582**	**2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kegiatan koordinasi komunikasi sandi antar PD yang diselenggarakan	6 Kali	**1.463.562.523**
2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	58 Perangkat Daerah	1.611.476.582	2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	58 Perangkat Daerah	1.463.562.523
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan			**47.441.959.702**	**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan**			**51.926.755.082**
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**34.732.081.479**	**2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**37.692.563.651**
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			**34.732.081.479**	**2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**37.692.563.651**
2.17..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	91%	**28.547.825.548**	**2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	91%	**30.989.453.597**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**25.309.323.482**	**2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**27.603.095.482**
	2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/bulan	25.309.323.482		2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99 Orang/bulan	27.603.095.482
2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	**3.238.502.066**	**2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	**3.386.358.115**
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
	2.17.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	522.695.490		2.17.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	365.259.085
	2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.715.806.576		2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.021.099.030
2.17..02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan	30%	**238.444.935**	**2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**				Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan	30%	**278.998.637**

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
	izin usaha simpan pinjam					izin usaha simpan pinjam			
2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan permohonan izin usaha simpan pinjam	30 koperasi	**238.444.935**		**2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah koperasi yang mengajukan permohonan izin usaha simpan pinjam	30 koperasi	**278.998.637**	
2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	30 Unit Usaha	238.444.935		2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	30 Unit Usaha	278.998.637	
2.17..03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)	69%	**691.574.423**		**2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)	69%	**803.651.001**	
2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan	415 koperasi	**691.574.423**		**2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan**	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan	415 koperasi	**803.651.001**	

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota								**Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**			
				2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	415 Unit Usaha	691.574.423					2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	415 Unit Usaha	803.651.001
			2.17..05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.	43%	**370.535.000**				**2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**		Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.	43%	**347.135.000**
				2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah target yang ditetapkan oleh kementerian sebagai penerima manfaat	103 Orang	**370.535.000**					**2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah target yang ditetapkan oleh kementerian sebagai penerima manfaat	103 Orang	**347.135.000**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	103 Orang	370.535.000						2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	103 Orang	347.135.000
			2.17..06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha	60%	**502.559.210**				**2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**			Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha	60%	**548.964.188**
				2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha koperasi	83 koperasi	**502.559.210**					**2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha koperasi	83 koperasi	**548.964.188**
					2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	83 Unit Usaha	502.559.210						2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	83 Unit Usaha	548.964.188

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.17..07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha	29,86 %	**2.386.576.707**	**2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha	29,86 %	**2.654.885.594**
	Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya	100%			Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya	100%	
2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah sentra usaha yang pelaku usaha mikro nya mendapatkan fasilitasi pembinaan	10 sentra	**2.386.576.707**	**2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	Jumlah sentra usaha yang pelaku usaha mikro nya mendapatkan fasilitasi pembinaan	10 sentra	**2.654.885.594**
	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan	136 Orang			Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan	136 Orang	
2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	136 Unit Usaha	250.003.276	2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	136 Unit Usaha	270.556.979

Sebelum Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	
2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	10 Unit Usaha	2.136.573.431	
2.17..08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya	76%	**1.994.565.656**	
2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pembinaan untuk meningkatkan kinerja usaha	500 orang	**1.994.565.656**	
2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	500 Unit Usaha	1.994.565.656	
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			**12.709.878.223**	
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			**12.709.878.223**	
3.30..02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase ketepatan waktu pelayanan	94%	**1.019.654.994**	

Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	
2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	10 Unit Usaha	2.384.328.615	
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya	76%	**2.069.475.634**	
2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pembinaan untuk meningkatkan kinerja usaha	500 orang	**2.069.475.634**	
2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	500 Unit Usaha	2.069.475.634	
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			**14.234.191.431**	
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			**14.234.191.431**	
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase ketepatan waktu pelayanan	94%	**1.072.843.327**	

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan					Jumlah Laporan Pemenuhan Komitmen Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Laporan	**284.084.078**	**3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**					Jumlah Laporan Pemenuhan Komitmen Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Laporan	**306.481.013**
3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	450 Dokumen	284.084.078	3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	450 Dokumen	306.481.013
3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang					Jumlah Laporan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	12 Laporan	**286.758.413**	**3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang**					Jumlah Laporan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	12 Laporan	**315.331.632**
3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang					Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	60 Dokumen	286.758.413	3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang					Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	160 Dokumen	315.331.632

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	12 Laporan	**83.965.777**					**3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri**	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	12 Laporan	**93.907.510**
				3.30.02.2.03.0002 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	24 Dokumen	83.965.777					3.30.02.2.03.0002 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	24 Dokumen	93.907.510
				3.30.02.2.04 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	12 Laporan	**42.600.000**					**3.30.02.2.04 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri**	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	12 Laporan	**38.850.000**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					3.30.02.2.04.0002 Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	24 Dokumen	42.600.000					3.30.02.2.04.0002 Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	24 Dokumen	38.850.000
				3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		Jumlah Laporan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	12 Laporan	**322.246.726**				**3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	12 Laporan	**318.273.172**
					3.30.02.2.05.0001 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	40 Dokumen	322.246.726					3.30.02.2.05.0001 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	40 Dokumen	318.273.172

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
	Terintegrasi Secara Elektronik				Terintegrasi Secara Elektronik		
3.30..03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi	100%	**3.755.736.385**	**3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi	100%	**4.604.118.659**
3.30.03.2.02 Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Laporan	**3.755.736.385**	**3.30.03.2.02 Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Jumlah Laporan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Laporan	**4.604.118.659**
3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	611 Dokumen	3.755.736.385	3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	611 Dokumen	4.604.118.659
3.30..04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase intervensi ketersediaan komoditas	100%	**652.606.741**	**3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase intervensi ketersediaan komoditas	100%	**683.711.900**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	12 Laporan	**652.606.741**	**3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**				Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	12 Laporan	**683.711.900**
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar	12 Laporan						Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar	12 Laporan	
3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	358.254.024	3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	384.594.725
3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	294.352.717	3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	299.117.175
3.30..06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				Persentase pelayanan tera yang tepat waktu	100%	**755.614.780**	**3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**				Persentase pelayanan tera yang tepat waktu	100%	**758.496.837**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal	12 Laporan	**755.614.780**	**3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal	12 Laporan	**758.496.837**
3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	23340 Unit	649.996.355	3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	23340 Unit	643.135.327
3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1200 Orang	105.618.425	3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1200 Orang	115.361.510
3.30..07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	100%	**6.526.265.323**	**3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	100%	**7.115.020.708**
3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah laporan usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	12 laporan	**6.526.265.323**	**3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Jumlah laporan usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	12 laporan	**7.115.020.708**
3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	5220 UMKM	6.526.265.323	3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	5220 UMKM	7.115.020.708

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
Dinas Lingkungan Hidup			**630.591.652.846**	**Dinas Lingkungan Hidup**			**637.642.761.395**
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**630.591.652.846**	**2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**637.642.761.395**
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			**630.591.652.846**	**2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**637.642.761.395**
2.11..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	86%	**56.790.848.534**	**2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	86%	**60.622.664.665**
2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**44.746.949.109**	**2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**50.669.988.172**
2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	196 Orang/bulan	44.746.949.109	2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	193 Orang/bulan	50.669.988.172
2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	**11.591.303.426**	**2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	**9.495.441.083**
2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	11.591.303.426	2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.495.441.083
2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan	100%	**452.595.999**	**2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan	100%	**457.235.410**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
				2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	452.595.999					2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	457.235.410
		2.11..03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik	46%	**3.713.480.740**			**2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik	46%	**3.198.560.732**
					Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	86%							Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	86%	
			2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		jumlah rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	1 kegiatan	**2.571.184.182**				**2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**		jumlah rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	1 kegiatan	**2.091.507.974**
					Jenis kualitas lingkungan yang dimonitoring selama 1 tahun	2 jenis							Jenis kualitas lingkungan yang dimonitoring selama 1 tahun	2 jenis	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen	873.947.002					2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen	833.033.397
					2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1.697.237.180					2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1.258.474.577
				2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yang digunakan untuk menentukan ISPU kota dalam 1 tahun	2 stasiun	**1.142.296.558**				**2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**		Jumlah Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yang digunakan untuk menentukan ISPU kota dalam 1 tahun	2 stasiun	**1.107.052.758**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	1.142.296.558					2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	1.107.052.758
			2.11..04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			Persentase kelestarian keanekaragaman hayati	99,49 %	**94.856.230.606**				**2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**			Persentase kelestarian keanekaragaman hayati	99,49 %	**105.716.320.974**
				2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun	3 dokumen	**94.856.230.606**					**2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**		Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun	3 dokumen	**105.716.320.974**
						Pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	2,83 Ha								Pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	2,83 Ha	
					2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	300.780.145					2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	283.988.068
					2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup	275.86 Ha	73.733.061.278					2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup	275.86 Ha	82.680.823.569

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Kewenangan Kabupaten/Kota									Kewenangan Kabupaten/Kota		
					2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	125 Unit	8.240.938.682						2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	125 Unit	8.613.619.008
					2.11.04.2.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	143.26 Unit	12.581.450.501						2.11.04.2.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Unit	14.137.890.329
			2.11..05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	80%	**3.104.933.562**				**2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**			Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	80%	**2.935.499.058**
						Persentase peningkatan jumlah lokasi penanganan limbah B3/Sampah spesifik	90%							Persentase peningkatan jumlah lokasi penanganan limbah B3/Sampah spesifik	90%	
				2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3		Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	250 berkas	**388.989.547**					**2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3**		Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	250 berkas	**366.587.489**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					2.11.05.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	255 Dokumen	388.989.547					2.11.05.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	255 Dokumen	366.587.489
			2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan	1 kegiatan	**2.715.944.015**				**2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan	1 kegiatan	**2.568.911.569**
					2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan	1 Dokumen	2.715.944.015					2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan	1 Dokumen	2.568.911.569

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya									Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya		
			2.11..06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			Persentase ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan	70%	**2.310.589.688**				**2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**			Persentase ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan	70%	**2.039.446.634**
				2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh		Jumlah obyek kegiatan usaha dan titik IPAL yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya	432 obyek	**2.310.589.688**					**2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh**		Jumlah obyek kegiatan usaha dan titik IPAL yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya	432 obyek	**2.039.446.634**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
				Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketepatan waktu persetujuan lingkungan yang diterbitkan	80%						**Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase ketepatan waktu persetujuan lingkungan yang diterbitkan	80%	
					2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	300 Dokumen	1.332.942.203						2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	300 Dokumen	1.054.577.350
					2.11.06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	254 Badan Usaha	977.647.485						2.11.06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	254 Badan Usaha	984.869.284

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.11..08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	61,04 %	**3.015.190.760**	**2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	61,04 %	**2.293.825.526**
	Persentase peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan	59,77 %			Persentase peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan	59,77 %	
2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang dibutuhkan	12 kali	**3.015.190.760**	**2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang dibutuhkan	12 kali	**2.293.825.526**
	Jumlah jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1 jenis			Jumlah jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1 jenis	
2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 Dokumen	1.852.683.818	2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 Dokumen	1.394.401.117

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1615 Orang	1.162.506.942					2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1615 Orang	899.424.409
			2.11..09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat	71,20 %	**4.602.407.552**				**2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat	71,20 %	**4.366.658.830**
				2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang di usulkan	4 penghargaan	**4.602.407.552**					**2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang di usulkan	4 penghargaan	**4.366.658.830**
					2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	10 Entitas	4.602.407.552					2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	10 Entitas	4.366.658.830

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.11..10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah penyelesaian permasalahan lingkungan hidup melalui upaya pemberian sanksi administrasi dan non sanksi administrasi	48 obyek	**472.431.732**	**2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Jumlah penyelesaian permasalahan lingkungan hidup melalui upaya pemberian sanksi administrasi dan non sanksi administrasi	48 obyek	**485.141.924**
2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	**472.431.732**	**2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	**485.141.924**
2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	48 Pengaduan	472.431.732	2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	48 Pengaduan	485.141.924
2.11..11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik	5,12 %	**461.725.539.672**	**2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik	5,12 %	**455.984.643.052**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Persentase pengangkutan sampah ke TPA ≤ 1 hari	88,01 %								Persentase pengangkutan sampah ke TPA ≤ 1 hari	88,01 %	
						Persentase pengolahan sampah di TPS 3R	51%								Persentase pengolahan sampah di TPS 3R	51%	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah		Jumlah jenis kegiatan pemanfaatan sampah yang dilakukan	3 jenis	**461.725.539.672**					**2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah**		Jumlah jenis kegiatan pemanfaatan sampah yang dilakukan	3 jenis	**455.984.643.052**
						Jumlah jenis sarana dan prasarana persampahan yang disediakan dan dikelola	4 jenis								Jumlah jenis sarana dan prasarana persampahan yang disediakan dan dikelola	4 jenis	
						Jumlah jenis kegiatan penanganan sampah yang dilakukan	2 jenis								Jumlah jenis kegiatan penanganan sampah yang dilakukan	2 jenis	
					2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	230 Unit	75.493.158.529						2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	230 Unit	59.077.360.245

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	515238 Ton	167.797.294.796					2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	515238 Ton	177.206.972.443
													2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	365.000 ton	65.827.750.000
					2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	650430 Ton	218.435.086.347					2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	650430 Ton	153.872.560.364
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan								**107.546.613.562**	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**							**88.807.649.658**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**107.546.613.562**	**1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**88.807.649.658**
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			**107.546.613.562**	**1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**88.807.649.658**
1.05..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	88%	**33.825.232.084**	**1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	88%	**35.987.873.737**
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**28.745.071.155**	**1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**31.732.970.392**
1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	131 Orang/bulan	28.745.071.155	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	129 Orang/bulan	31.732.970.392
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 laporan	**822.800.528**	**1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 laporan	**350.788.802**
1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	822.800.528	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	350.788.802

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator** / **Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator** / **Alokasi**
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	3 paket / **4.257.360.401**	**1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah paket penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	3 paket / **3.904.114.543**
1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan / 4.257.360.401	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan / 3.904.114.543
1.05..04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	47 / **73.721.381.478**	**1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	47 / **52.819.775.921**
	Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	100%		Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	100%
1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilatih	656 Petugas / **72.740.335.703**	**1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan**	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilatih	656 Petugas / **51.739.534.374**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang berfungsi baik	100%						**Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang berfungsi baik	100%	
					1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	30.893.355.201						1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	35.105.422.090
					1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	2 Dokumen	7.955.882.869						1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	2 Dokumen	7.528.225.539

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 Orang	1.713.323.255						1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 Orang	1.567.207.670
					1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	849 Unit	32.177.774.378						1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	849 Unit	7.538.679.075
			1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			Jumlah berkas pemeriksaan sistem proteksi kebakaran bangunan/gedung	480 Berkas	**515.940.376**				**1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**			Jumlah berkas pemeriksaan sistem proteksi kebakaran bangunan/gedung	480 Berkas	**578.905.548**
					1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	2 Dokumen	515.940.376						1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	2 Dokumen	578.905.548

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator** / **Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator** / **Alokasi**
1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi	90 Kegiatan / **465.105.399**	**1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi	90 Kegiatan / **501.335.999**
1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	900 Orang / 465.105.399	1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	900 Orang / 501.335.999
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		**54.226.070.415**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**55.597.156.159**
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		**54.226.070.415**	**2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		**55.597.156.159**
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		**23.080.584.140**	**2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		**24.350.138.766**
2.08..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100% / **14.715.206.022**	**2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100% / **15.614.792.346**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**11.823.431.775**	**2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**12.936.845.824**
				2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	11.823.431.775					2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	12.936.845.824
2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	**2.333.072.543**	**2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**					Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	**2.297.284.175**
				2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.333.072.543					2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.297.284.175
2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	**558.701.704**	**2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	**380.662.347**
				2.08.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	558.701.704					2.08.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	380.662.347

Sebelum Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.08..02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud	100%	**1.778.957.090**
	Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender	100%	
2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah	3 Dokumen	**495.430.300**
2.08.02.2.01.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	58 Perangkat Daerah	495.430.300

Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud	100%	**1.798.416.433**
	Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender	100%	
2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah	3 Dokumen	**532.348.204**
2.08.02.2.01.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	58 Perangkat Daerah	532.348.204

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	**317.307.190**					**2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	**363.748.629**
				2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Organisasi	317.307.190					2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Organisasi	363.748.629
				2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Kegiatan	**966.219.600**					**2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Kegiatan	**902.319.600**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	740 Orang	966.219.600					2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	740 Orang	902.319.600
			2.08..03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%	**1.186.011.015**				**2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%	**1.119.674.537**
						Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan	64,51%								Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan	64,51%	
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	20 kasus	**896.843.826**					**2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	20 kasus	**784.065.908**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	20 Orang	896.843.826					2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	20 Orang	784.065.908
			2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	20 kecamatan	**289.167.189**			**2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	20 kecamatan	**335.608.629**
					2.08.03.2.03.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	289.167.189					2.08.03.2.03.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	335.608.629
		2.08..04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	246	**1.156.169.064**			**2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**			Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	246	**1.216.530.049**
			2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah laporan penyediaan layanan keluarga oleh Ruang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	12 laporan	**1.156.169.064**			**2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah laporan penyediaan layanan keluarga oleh Ruang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	12 laporan	**1.216.530.049**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.08.04.2.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Layanan	1.156.169.064	2.08.04.2.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Layanan	1.216.530.049
2.08..05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	100%	**224.115.546**	**2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	100%	**253.873.238**
2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data gender dan anak	58 Lembaga	**224.115.546**	**2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data gender dan anak	58 Lembaga	**253.873.238**
2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	224.115.546	2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	253.873.238
2.08..06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kelurahan Layak Anak	79,87%	**3.028.688.950**	**2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Persentase Kelurahan Layak Anak	79,87%	**3.214.630.025**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak	1 kegiatan	**550.051.310**	**2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**					Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak	1 kegiatan	**576.051.310**
				2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 Organisasi	550.051.310					2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 Organisasi	576.051.310
2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator Kota Layak Anak	3 kegiatan	**2.478.637.640**	**2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**					Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator Kota Layak Anak	3 kegiatan	**2.638.578.715**
				2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	1.483.141.298					2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	1.577.103.963

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	995.496.342						2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.061.474.752
			2.08..07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%	**991.436.453**				**2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%	**1.132.222.138**
						Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	64,51%								Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	64,51%	
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	150 kasus	**991.436.453**					**2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	150 kasus	**1.132.222.138**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Jumlah lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	20 lembaga								Jumlah lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	20 lembaga	
					2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	150 Orang	938.546.453						2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	150 Orang	1.079.332.138
					2.08.07.2.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	150 Orang	52.890.000						2.08.07.2.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	150 Orang	52.890.000
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								**1.721.155.024**	**2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								**1.747.395.024**
		2.13..05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				Persentase Implementasi Program Pokok PKK dimasyarakat	100%	**1.721.155.024**			**2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**						Persentase Implementasi Program Pokok PKK dimasyarakat	100%	**1.747.395.024**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	53 Kegiatan	**1.721.155.024**	**2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**					Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	53 Kegiatan	**1.747.395.024**
2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dokumen	1.721.155.024	2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dokumen	1.747.395.024
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**29.424.331.251**	**2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**29.499.622.369**
2.14..02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	63,06%	**551.607.269**	**2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**					Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	63,06%	**563.256.967**
2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan					Jumlah peserta sosialisasi pembentukan	160 Orang	**167.164.500**	**2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan**					Jumlah peserta sosialisasi pembentukan	160 Orang	**193.164.500**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
				Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Sekolah Siaga Kependudukan							**Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	Sekolah Siaga Kependudukan		
				2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	80 Satuan Pendidikan	167.164.500					2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	80 Satuan Pendidikan	193.164.500
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan	58 Perangkat Daerah	**384.442.769**					**2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan	58 Perangkat Daerah	**370.092.467**
				2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	63.600.000					2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	63.600.000
				2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	180.000.000					2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	180.000.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	140.842.769					2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	126.492.467
			2.14..03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi	18,10%	**8.806.891.036**				**2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi	18,10%	**8.671.234.267**
						Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	84%								Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	84%	
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Mini Lokakarya	31 Kecamatan	**795.000.000**					**2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**		Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Mini Lokakarya	31 Kecamatan	**795.000.000**
					2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	80.000.000					2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	80.000.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	465.000.000						2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	465.000.000
					2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	100.000.000						2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	100.000.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	31 Organisasi	150.000.000						2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	31 Organisasi	150.000.000
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah Pertemuan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB) bersama dengan kader IMP	12 Kali	**1.264.431.779**				**2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**		Jumlah Pertemuan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB) bersama dengan kader IMP	12 Kali	**1.147.798.757**
					2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1566 Orang	459.000.000						2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1566 Orang	459.000.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	805.431.779					2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	688.798.757
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR)	417003 Orang	**6.379.209.257**					**2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR)	417003 Orang	**6.360.185.510**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	528.641.257					2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	699.612.510
					2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1950 Orang	5.621.373.000					2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1950 Orang	5.621.373.000
					2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Unit	189.995.000								
					2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	39.200.000					2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	39.200.000

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan di Kampung KB	4 Laporan	**368.250.000**	**2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**				Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan di Kampung KB	4 Laporan	**368.250.000**
2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	3.750.000	2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	3.750.000
2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas				Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	31 Kampung	364.500.000	2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas				Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	31 Kampung	364.500.000
2.14..04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				Median usia kawin pertama perempuan	21 tahun	**20.065.832.946**	**2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**				Median usia kawin pertama perempuan	21 tahun	**20.265.131.135**
				Persentase balita yang mengikuti PAUD	41,56%						Persentase balita yang mengikuti PAUD	41,56%	

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
	Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial	47,50%				Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial	47,50%		
	Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	42%				Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	42%		
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	**20.065.832.946**		**2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Jumlah laporan pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	**11.730.221.135**	
	Jumlah laporan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan				Jumlah laporan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan		
	Jumlah laporan kegiatan penyediaan biaya operasional bagi kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (DAK)	1 Laporan				Jumlah laporan kegiatan penyediaan biaya operasional bagi kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (DAK)	1 Laporan		
	Jumlah kelompok kegiatan UPPKA yang didampingi	10 Kelompok				Jumlah kelompok kegiatan UPPKA yang didampingi	10 Kelompok		

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1.618.235.451					2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1.667.296.165
					2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	40 Unit	480.000.000					2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	40 Unit	480.000.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	930 Orang	660.665.117					2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	930 Orang	688.098.115
					2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	6642 Orang	13.948.200.000					2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	6642 Orang	5.413.290.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					2.14.04.2.01.0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	153 Kelompok	3.358.732.378						2.14.04.2.01.0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	153 Kelompok	3.481.536.855
													2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	jumlah Tim Pendamping Keluarga yang berpartisipasi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6642 Orang	**8.534.910.000**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan	4.123.800.000
				2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 laporan	4.411.110.000
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			**20.028.344.222**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**			**22.148.249.254**
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**20.028.344.222**	**2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**22.148.249.254**
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			**20.028.344.222**	**2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**22.148.249.254**
2.18..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	91%	**14.689.708.836**	**2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	91%	**16.133.069.825**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**10.656.389.964**	**2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**11.961.632.999**
				2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	10.656.389.964					2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	11.961.632.999
2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	**4.033.318.872**	**2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	**4.171.436.826**
					Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100%							Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100%	
				2.18.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	136.986.900					2.18.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	141.141.725
				2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.896.331.972					2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.030.295.101
2.18..02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					Jumlah Investor PMA/PMDN	190 Perusahaan	**489.288.095**	**2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**					Jumlah Investor PMA/PMDN	190 Perusahaan	**561.071.334**
			2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta	74%	**489.288.095**				**2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**		Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta	74%	**561.071.334**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Potensi dan Peluang Usaha								Potensi dan Peluang Usaha		
				2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4 Dokumen	489.288.095					2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4 Dokumen	561.071.334
			2.18..03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	55%	**639.854.708**				**2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**		Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	55%	**703.622.653**
				2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	250 Calon Investor / Investor	**639.854.708**					**2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	250 Calon Investor / Investor	**703.622.653**
				2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	639.854.708					2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	703.622.653
			2.18..04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100%	**3.298.629.003**				**2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**		Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100%	**3.788.254.727**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan	90.000 berkas	**3.298.629.003**					**2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**		jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan	110.000 berkas	**3.788.254.727**
						Jumlah kegiatan usaha yang ijin usahanya dilakukan pemantauan	11.500 Kegiatan usaha								Jumlah kegiatan usaha yang ijin usahanya dilakukan pemantauan	11.500 Kegiatan usaha	
					2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	12000 Pelaku Usaha	2.620.860.314						2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	12000 Pelaku Usaha	2.980.953.597

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	11500 Kegiatan Usaha	677.768.689					2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	11500 Kegiatan Usaha	807.301.130
			2.18..05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis	44%	**705.537.405**				**2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**			Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis	44%	**810.991.493**
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek	1.300 perusahaan	**705.537.405**				**2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek	1.300 perusahaan	**810.991.493**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	270 Pelaku Usaha	174.441.962					2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	270 Pelaku Usaha	174.441.962
					2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	2900 Kegiatan Usaha	531.095.443					2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	2900 Kegiatan Usaha	636.549.531
			2.18..06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	20 lembaga	**205.326.175**				**2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**		jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	20 lembaga	**151.239.222**

Sebelum Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	400 perusahaan	**205.326.175**
2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	205.326.175
Dinas Pendidikan			**2.019.825.100.759**
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**2.019.825.100.759**
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			**2.019.825.100.759**
1.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	92,54%	**1.033.810.139.305**

Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	400 perusahaan	**151.239.222**
2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	151.239.222
Dinas Pendidikan			**2.018.784.975.270**
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**2.018.784.975.270**
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			**2.018.784.975.270**
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	92,54%	**1.002.110.263.088**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam rangka Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 kegiatan	**1.250.660.492**	**1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam rangka Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 kegiatan	**1.279.660.492**
1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	1.250.660.492	1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	1.279.660.492
1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**1.021.209.774.523**	**1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**991.445.776.175**
1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9216 Orang/bulan	1.021.209.774.523	1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8621 Orang/bulan	991.445.776.175
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	**768.925.702**	**1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	**772.896.952**
1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	768.925.702	1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	772.896.952

Sebelum Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	**3.741.958.513**
1.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	976 Unit	3.741.958.513
1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**6.838.820.075**
1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	2.077.001.153
1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.761.818.922
1.01..02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	**950.534.899.779**
	Angka Kelulusan SMP/MTS	100%	
	Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%	

Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	**1.450.020.141**
1.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	636 Unit	1.450.020.141
1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**7.161.909.328**
1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1.987.513.985
1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.174.395.343
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	**981.193.400.507**
	Angka Kelulusan SMP/MTS	100%	
	Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%	

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Persentase guru PAUD yang kompeten	100%							Persentase guru PAUD yang kompeten	100%	
					Persentase guru yang mendapat pengembangan karir	38%							Persentase guru yang mendapat pengembangan karir	38%	
					Persentase lembaga PAUD berkualitas	84,58 %							Persentase lembaga PAUD berkualitas	84,58 %	
					Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan	89,21 %							Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan	89,21 %	
					Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan	90%							Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan	90%	
					Persentase SD terakreditasi minimal B	94,14 %							Persentase SD terakreditasi minimal B	94,14 %	
					Persentase SMP terakreditasi minimal B	96,79 %							Persentase SMP terakreditasi minimal B	96,79 %	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah laporan pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah dasar	4 laporan	**452.536.984.268**					**1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Jumlah laporan pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah dasar	4 laporan	**479.508.864.293**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Jumlah lembaga pendidikan dasar yang mendapatkan peningkatan mutu	692 Lembaga							Jumlah lembaga pendidikan dasar yang mendapatkan peningkatan mutu	692 Lembaga	
						Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan							Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan	
						Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%							Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%	
						Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan							Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan	
					1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	7 Unit	24.972.913.803					1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	7 Unit	20.678.920.089
					1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	6.427.795.429					1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	4.997.730.455
					1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	38170 Peserta Didik	189.681.031.375					1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	37.309 Peserta Didik	224.074.960.927
					1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	33 Paket	3.134.952.000					1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	33 Paket	3.134.952.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	73986 Peserta Didik	2.088.877.295						1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	71.390 Peserta Didik	1.571.427.576
					1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3135 Orang	905.075.192						1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3135 Orang	699.176.750
					1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	259 Satuan Pendidikan	127.664.000						1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	259 Satuan Pendidikan	124.382.000
					1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	587 Satuan Pendidikan	208.809.420.000						1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	587 Satuan Pendidikan	208.800.420.000
					1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	155 Unit	15.918.437.174						1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	155 Unit	14.964.294.496

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	649 Satuan Pendidikan	470.818.000					1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	649 Satuan Pendidikan	462.600.000
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah menengah tepat waktu	4 laporan	**282.279.907.877**					**1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah menengah tepat waktu	4 laporan	**276.939.577.714**
						Jumlah lembaga pendidikan menengahyang mendapatkan peningkatan mutu	305 Lembaga							Jumlah lembaga pendidikan menengahyang mendapatkan peningkatan mutu	305 Lembaga	
						Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan							Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan	
						Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%							Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%	
						Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan							Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan	
					1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	16.481.625.542					1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	14.276.793.022

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17 Unit	10.910.917.104					1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17 Unit	10.769.509.943
					1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	7.437.087.208					1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	1.501.062.466
					1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	19139 Peserta Didik	118.556.843.410					1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	16.260 Peserta Didik	121.804.510.238
					1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2122 Peserta Didik	3.912.957.598					1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2122 Peserta Didik	3.770.639.650
					1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1013 Orang	766.799.895					1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1013 Orang	658.049.895

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	256 Satuan Pendidikan	192.123.182					1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	256 Satuan Pendidikan	141.462.500
					1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	272 Satuan Pendidikan	123.637.600.000					1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	272 Satuan Pendidikan	123.637.600.000
					1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	39248 Satuan Pendidikan	383.953.938					1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	39248 Satuan Pendidikan	379.950.000
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik PAUD	12 laporan	**125.672.884.379**					**1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik PAUD	12 laporan	**124.819.672.254**
						Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan							Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan	
						Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan							Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan	
					1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 unit	169.898.000					1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 unit	169.898.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.01.02.2.03.0004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	619.928.666						1.01.02.2.03.0004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	1.516.109.204
					1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	3 Paket	290.979.802						1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	3 Paket	209.086.362
					1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	209 Peserta Didik	4.787.929.917						1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	209 Peserta Didik	4.811.634.464
					1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	1 paket	50.000.000						1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	1 paket	50.000.000
					1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	88778 Peserta Didik	53.979.731.654						1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	88778 Peserta Didik	53.740.012.254
					1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3092 Orang	4.033.255.500						1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3092 Orang	2.585.155.500

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2355 Satuan Pendidikan	846.120.840					1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2355 Satuan Pendidikan	842.736.470
					1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	2479 Satuan Pendidikan	60.895.040.000					1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	2.217 Satuan Pendidikan	60.895.040.000
			1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik kesetaraan	12 laporan	**90.045.123.255**				**1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**		Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik kesetaraan	12 laporan	**99.925.286.246**
						Penanganan anak rentan putus sekolah dan putus sekolah	3-5 hari							Penanganan anak rentan putus sekolah dan putus sekolah	3-5 hari	
						Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan							Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan	
					1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	35 Peserta Didik	7.583.216.718					1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	35 Peserta Didik	4.203.200.214

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang	72.703.075					1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang	73.953.075
					1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	153 Satuan Pendidikan	122.630.000					1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	153 Satuan Pendidikan	102.430.000
					1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	27 Satuan Pendidikan	4.729.770.000					1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	25 Satuan Pendidikan	4.729.770.000
					1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	1.317.899.652					1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	888.829.787
					1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2802 Peserta Didik	76.218.903.810					1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	33 Peserta Didik	89.927.103.170
			1.01..04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			Rasio Guru/ Murid jenjang SD	01.20	**35.480.061.675**				**1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**		Rasio Guru/ Murid jenjang SD	01.20	**35.481.311.675**
						Rasio Guru/ Murid jenjang SMP	01.20							Rasio Guru/ Murid jenjang SMP	01.20	

Sebelum Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	12685 orang	**35.480.061.675**
	Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah	7725 orang	
1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	644.061.675
1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	350 Laporan	34.836.000.000
Dinas Perhubungan			**561.574.488.816**

Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	12685 orang	**35.481.311.675**
	Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah	7725 orang	
1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	645.311.675
1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	350 Laporan	34.836.000.000
Dinas Perhubungan			**576.853.288.605**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**561.574.488.816**	**2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**576.853.288.605**
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			**561.574.488.816**	**2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**576.853.288.605**
2.15..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	92%	**81.234.345.313**	**2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	92%	**81.169.777.713**
2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**55.876.664.422**	**2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**58.960.055.514**
2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	272 Orang/bulan	55.876.664.422	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	258 Orang/bulan	58.960.055.514
2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	100%	**6.729.789.704**	**2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	100%	**4.490.599.399**
2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	6.729.789.704	2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	4.490.599.399
2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Umum	100%	**9.210.268.343**	**2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Umum	100%	**8.790.056.169**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	9.210.268.343					2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	8.790.056.169
			2.15.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD Parkir Tepi Jalan Umum	12 Laporan	**9.417.622.844**				**2.15.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD**		Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD Parkir Tepi Jalan Umum	12 Laporan	**8.929.066.631**
						Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD Pengelolaan Transportasi Umum	12 Laporan							Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD Pengelolaan Transportasi Umum	12 Laporan	
					2.15.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	6.684.000.000					2.15.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	6.684.000.000
					2.15.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.733.622.844					2.15.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.245.066.631
			2.15..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	45 km/jam	**472.395.994.400**				**2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**		Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	45 km/jam	**488.701.850.320**
						Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	48,70 %							Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	48,70 %	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
	Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya	80%			Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya	80%	
	Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	80%			Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	80%	
2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Prasarana Jalan di Kota Surabaya	15 Lokasi	**274.112.494.091**	**2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Penyelenggaraan Prasarana Jalan di Kota Surabaya	9 Lokasi	**261.953.100.130**
	Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	31 Kawasan			Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	31 Kawasan	
2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	3000 Unit	99.845.241.975	2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	7.500 Unit	97.829.081.828
2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2500 Unit	11.711.174.722	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2500 Unit	5.126.246.163

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	99252 Unit	135.319.097.069						2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	105.846 Unit	138.209.443.129
					2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	9000 Unit	27.236.980.325						2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	9000 Unit	20.788.329.010
				2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan	14 Lokasi	**19.087.306.554**					**2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**		Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan	14 Lokasi	**51.993.491.099**
					2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	12 Unit	19.087.306.554						2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	14 Unit	51.993.491.099
				2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	60 Berkas	**25.249.470.994**					**2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**		Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	60 Berkas	**27.842.935.135**
					2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	25.249.470.994						2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	27.842.935.135

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR	134.525 Unit	**9.717.776.860**	**2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**					Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR	134.525 Unit	**9.930.416.360**
				2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	33 Unit	9.717.776.860					2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	33 Unit	9.930.416.360
2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	10 Lokasi	**35.591.062.903**	**2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**					Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	10 Lokasi	**36.191.055.436**
					Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasai dan Dikendalikan	7 Jenis							Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasai dan Dikendalikan	7 Jenis	
				2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	32.044.292.582					2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	32.771.773.726
				2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan	13 Laporan	3.546.770.321					2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan	13 Laporan	3.419.281.710

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Kabupaten/Provinsi									Kabupaten/Provinsi		
				2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya	3 Koridor	**105.272.952.059**					**2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya	8 Koridor	**98.981.626.442**
						Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Abdi Yasa Teladan	75 Orang								Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Abdi Yasa Teladan	75 Orang	
					2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	50.743.530.587						2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	32.881.191.861

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	72 Unit	54.529.421.472						2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	92 Unit	66.100.434.581
				2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan	1 Jaringan	**3.364.930.939**				**2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan	1 Jaringan	**1.809.225.718**
					2.15.02.2.11.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	3.364.930.939						2.15.02.2.11.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	1.809.225.718
			2.15..03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan	100%	**2.669.837.211**				**2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**		Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan	100%	**1.471.201.864**
				2.15.03.2.04 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan	2 Kali	**2.669.837.211**				**2.15.03.2.04 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan	2 Kali	**1.471.201.864**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.15.03.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2.669.837.211	2.15.03.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	1.471.201.864
2.15..05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian	100%	**5.274.311.892**	**2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian	100%	**5.510.458.708**
2.15.05.2.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Kegiatan Pengembangan, Penetapan Kebijakan, dan Sosialisasi Keselamatan serta Rencana Induk Perkeretaapian	2 Kali	**5.274.311.892**	**2.15.05.2.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**	Jumlah Kegiatan Pengembangan, Penetapan Kebijakan, dan Sosialisasi Keselamatan serta Rencana Induk Perkeretaapian	2 Kali	**5.510.458.708**
2.15.05.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	2 Dokumen	5.274.311.892	2.15.05.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	2 Dokumen	5.510.458.708
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			**28.525.182.239**	**Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**			**30.031.469.520**
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**27.304.948.236**	**2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**28.936.807.395**

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi			Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			**27.304.948.236**			**2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**28.936.807.395**		
2.07..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%	**15.176.161.498**			**2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%	**16.716.123.142**		
2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**13.569.615.992**			**2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**15.057.020.965**		
2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	13.569.615.992			2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	15.057.020.965		
2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	**1.606.545.506**			**2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	**1.659.102.177**		
	Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan					Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan			
2.07.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	186.165.658			2.07.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	157.674.400		

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.420.379.848					2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.501.427.777
			2.07..03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten	81,02 %	**8.587.304.752**				**2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**		Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten	81,02 %	**8.825.545.001**
						Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	90,5 %							Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	90,5 %	
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi	4 Laporan	**5.604.020.248**					**2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi	4 Laporan	**5.656.020.248**
						Jumlah laporan pelaksanaan pemagangan	1 Laporan							Jumlah laporan pelaksanaan pemagangan	1 Laporan	
					2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	720 Orang	5.310.284.528					2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	720 Orang	5.310.284.528

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	12 Lembaga	293.735.720					2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	12 Lembaga	345.735.720
				2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas yang disusun	1 Dokumen	**240.621.600**				**2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**		Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas yang disusun	1 Dokumen	**281.221.600**
					2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	50 Perusahaan	240.621.600					2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	50 Perusahaan	281.221.600
				2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi	4 Laporan	**2.742.662.904**				**2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah laporan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi	4 Laporan	**2.888.303.153**
					2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	4 Dokumen	2.742.662.904					2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	4 Dokumen	2.888.303.153
			2.07..04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja	3%	**2.085.356.108**				**2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja	3%	**1.891.324.142**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi			
	yang dapat diinformasikan							yang dapat diinformasikan					
2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis	9 laporan	**1.467.905.778**				**2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis	9 laporan	**1.400.235.368**			
2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	1950 Orang	122.450.000				2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	1950 Orang	92.518.000			
2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	1100 Orang	512.490.247				2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	1100 Orang	531.678.045			
2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	250 Orang	832.965.531				2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	250 Orang	776.039.323			
2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Jobfair/Bursa Kerja	5 Laporan	**227.204.200**				**2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Jobfair/Bursa Kerja	5 Laporan	**90.287.100**			
2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	250 Orang	227.204.200				2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	250 Orang	90.287.100			

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	5 Laporan	**390.246.130**					**2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah laporan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	5 Laporan	**400.801.674**
				2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	250 Orang	390.246.130					2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	250 Orang	400.801.674
			2.07..05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama	13,77 %	**1.456.125.878**				**2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**		Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama	13,77 %	**1.503.815.110**
					Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan	40%							Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan	40%	

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	12 Laporan	**792.500.387**	**2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**					Jumlah Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	12 Laporan	**893.199.517**
				2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	220 Perusahaan	45.550.000					2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	220 Perusahaan	44.050.000
				2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	746.950.387					2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	849.149.517

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	**663.625.491**	**2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**					Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	**610.615.593**
				2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara	307.407.188					2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara	231.648.629

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	110 Perkara	356.218.303						2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	110 Perkara	378.966.964
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								**1.220.234.003**	**3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								**1.094.662.125**
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							**1.220.234.003**		**3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**1.094.662.125**
		3.31..02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				Persentase pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan	20%	**670.299.736**			**3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**				Persentase pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan	20%	**551.197.379**
			3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			Jumlah laporan pemberdayaan pelaku usaha	12 Laporan	**670.299.736**				**3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**			Jumlah laporan pemberdayaan pelaku usaha	12 Laporan	**551.197.379**
				3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	117.840.932					3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	117.840.932

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
				3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 Dokumen	552.458.804					3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 Dokumen	433.356.447
			3.31..03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya	85%	**310.334.267**				**3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**		Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya	85%	**255.614.746**
				3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan izin usaha	12 Laporan	**310.334.267**					**3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah laporan hasil pengawasan izin usaha	12 Laporan	**255.614.746**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	12 Dokumen	310.334.267					3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	12 Dokumen	255.614.746
			3.31..04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung kebijakan perencanaan Industri	100%	**239.600.000**				**3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**			Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung kebijakan perencanaan Industri	100%	**287.850.000**
				3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Laporan penyusunan dokumen data pelaku usaha dan analisis sektor industri, yang berlokasi di Kota surabaya	1 Laporan	**239.600.000**					**3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	Laporan penyusunan dokumen data pelaku usaha dan analisis sektor industri, yang berlokasi di Kota surabaya	1 Laporan	**287.850.000**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12 Dokumen	239.600.000					3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12 Dokumen	287.850.000
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan								**36.022.144.844**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**								**41.713.893.489**
	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							**36.022.144.844**		**2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**41.713.893.489**
		2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						**33.185.864.582**			**2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**37.409.801.125**
			2.23..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,04 %	**19.190.756.277**				**2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,04 %	**20.276.748.190**
				2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**16.937.802.342**					**2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**17.861.876.071**
					2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	16.937.802.342						2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	17.861.876.071

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	**230.769.861**	**2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**					Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	**142.804.634**
				2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	230.769.861					2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	142.804.634
2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	**358.130.340**	**2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	**260.735.707**
				2.23.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17 Unit	358.130.340					2.23.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	260.735.707
2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	**1.664.053.734**	**2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	**2.011.331.778**
				2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 Laporan	320.279.999					2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 Laporan	292.765.714

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						dan Listrik yang Disediakan									dan Listrik yang Disediakan		
					2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.343.773.735						2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.718.566.064
			2.23..02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			Persentase event literasi yang diselenggarakan	58,8 %	**13.995.108.305**				**2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**			Persentase event literasi yang diselenggarakan	58,8 %	**17.133.052.935**
						Persentase pemenuhan koleksi buku baru sesuai dengan hasil analisis kebutuhan	59,92 %								Persentase pemenuhan koleksi buku baru sesuai dengan hasil analisis kebutuhan	59,92 %	
						Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	78,14%								Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	78,14%	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jenis buku yang disediakan	2 Jenis	**13.531.722.024**					**2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jenis buku yang disediakan	2 Jenis	**16.676.788.417**
						Tingkat Kepuasan Pemustaka	82,5 nilai								Tingkat Kepuasan Pemustaka	82,5 nilai	
						Jumlah perpustakaan / layanan baca yang dibina	200 Lembaga								Jumlah perpustakaan / layanan baca yang dibina	306 Lembaga	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					2.23.02.2.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1500 Perpustakaan	11.787.099.200						2.23.02.2.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1500 Perpustakaan	15.304.831.895
					2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	30 Perpustakaan	56.875.000						2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	106 Perpustakaan	56.875.000
					2.23.02.2.01.0005 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	200 Perpustakaan	285.442.600						2.23.02.2.01.0005 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	200 Perpustakaan	310.531.430

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Orang	220.373.394					2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Orang	236.320.028
					2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1500 Eksemplar	1.181.931.830					2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1500 Eksemplar	768.230.064
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah bibit penulis dan pendongeng	5461 orang	**463.386.281**				**2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah bibit penulis dan pendongeng	5461 orang	**456.264.518**
					2.23.02.2.02.0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	250 Lokus	463.386.281					2.23.02.2.02.0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	250 Lokus	456.264.518
		2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						**2.836.280.262**			**2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**4.304.092.364**

Sebelum Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.24..02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	28,84 %	**2.752.627.430**
	Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	76,21 %	
	Persentase jumlah jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	14,07 %	
2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsipnya	9000 item	**653.118.315**
	Jumlah PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup	54 lembaga	
2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	471 Berkas	437.530.335
2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	66 Laporan	215.587.980

Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	28,84 %	**4.240.869.031**
	Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	76,21 %	
	Persentase jumlah jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	14,07 %	
2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsipnya	9000 item	**1.846.610.659**
	Jumlah PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup	54 lembaga	
2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	471 Berkas	1.574.182.466
2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	66 Laporan	272.428.193

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi			
2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Arsip yang dialih mediakan	8640 Lembar	**1.534.963.781**				**2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	Arsip yang dialih mediakan	8640 Lembar	**1.777.255.980**			
2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	300 Arsip	1.534.963.781				2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	300 Arsip	1.777.255.980			
2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	7200 item	**564.545.334**				**2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	7200 item	**617.002.392**			
	PD, Unit Kerja, BUMD yang mendapatkan evaluasi sistem kearsipan	70 Lembaga						PD, Unit Kerja, BUMD yang mendapatkan evaluasi sistem kearsipan	70 Lembaga				
2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1200 Pengguna	390.676.742				2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1200 Pengguna	412.133.800			
2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	70 Laporan	173.868.592				2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	70 Laporan	204.868.592			

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.24..03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang dinilai dan direkomendasikan untuk dimusnahkan	59,97 %	**83.652.832**	**2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Persentase arsip yang dinilai dan direkomendasikan untuk dimusnahkan	59,97 %	**63.223.333**
2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Dokumen proses penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang disusun	2 Dokumen	**83.652.832**	**2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**	Dokumen proses penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang disusun	2 Dokumen	**63.223.333**
2.24.03.2.01.0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	880 Arsip	83.652.832	2.24.03.2.01.0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	880 Arsip	63.223.333
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan			**496.393.712.889**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan**			**478.969.392.218**
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**414.093.457.986**	**1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**424.847.878.138**
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			**264.085.539.008**	**1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**280.218.887.816**
1.03..08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan yang ber IMB	2,35 %	**253.753.276.672**	**1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase bangunan yang ber IMB	2,35 %	**273.338.450.381**

Sebelum Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
	Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik	90,73 %	
	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan yang diselesaikan	85%	
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun/direhabilitasi dan dilakukan pemeliharaan	244 Bangunan	**253.753.276.672**
	Jumlah berkas Perizinan dan Non Perizinan Bidang Tata Bangunan yang diproses	1747 Berkas	
	Jumlah dokumen penataan bangunan yang terbit dan disahkan	2 Dokumen	
	Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan dan pengawasan bangunan yang dilaksanakan	1882 Lokasi	

Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
	Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik	90,73 %	
	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan yang diselesaikan	85%	
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun/direhabilitasi dan dilakukan pemeliharaan	244 Bangunan	**273.338.450.381**
	Jumlah berkas Perizinan dan Non Perizinan Bidang Tata Bangunan yang diproses	1747 Berkas	
	Jumlah dokumen penataan bangunan yang terbit dan disahkan	2 Dokumen	
	Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan dan pengawasan bangunan yang dilaksanakan	1882 Lokasi	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	139 Bangunan Gedung	207.260.641.728						1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	142 Bangunan Gedung	221.174.989.585
					1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	158 Bangunan Gedung	36.903.927.170						1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	158 Bangunan Gedung	40.932.835.269
					1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2 Dokumen	444.412.500						1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2 Dokumen	309.662.500
					1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	61 Dokumen	5.201.167.400						1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	61 Dokumen	7.201.167.400

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	1861 Orang	1.416.314.585						1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	1861 Orang	1.496.975.380
					1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen	2.526.813.289						1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen	2.222.820.247
			1.03..11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas perusahaan jasa konstruksi	95%	**557.922.074**				**1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**			Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas perusahaan jasa konstruksi	95%	**551.025.299**

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**		**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	
1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jenis kelembagaan konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	5 jenis	**557.922.074**		**1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Jenis kelembagaan konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	5 jenis	**551.025.299**	
1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	110 Lembaga	557.922.074		1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Lembaga	551.025.299	
1.03..12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pelayanan penataan ruang	95%	**9.774.340.262**		**1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase pelayanan penataan ruang	95%	**6.329.412.136**	
1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTr) Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau Kajian teknis pendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RrTR) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	3 dokumen	**3.337.921.213**		**1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTr) Kabupaten/Kota**	Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau Kajian teknis pendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RrTR) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	3 dokumen	**3.136.334.235**	

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3.337.921.213					1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3.136.334.235
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota dan informasi penataan ruang kota yang disusun	3 dokumen	**6.436.419.049**				**1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota dan informasi penataan ruang kota yang disusun	3 dokumen	**3.193.077.901**
					1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	2 Dokumen	728.718.788					1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	2 Dokumen	794.049.247
					1.03.12.2.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	5.707.700.261					1.03.12.2.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	2.399.028.654
		1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						**150.007.918.978**			**1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**144.628.990.322**
			1.04..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	88,5 %	**37.699.466.600**			**1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	88,5 %	**37.831.608.235**
				1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis	**42.488.000**				**1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis	**42.488.000**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	42.488.000					1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	42.488.000
			1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**27.864.615.314**				**1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**29.451.321.879**
				1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang/bulan	27.864.615.314					1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/bulan	29.451.321.879
			1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	**7.159.976.750**				**1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	**6.771.527.185**
				1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	7.159.976.750					1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	6.771.527.185
			1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah jenis pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis	**2.632.386.536**				**1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Jumlah jenis pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis	**1.566.271.171**
				1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98 Unit	2.632.386.536					1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89 Unit	1.566.271.171

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
1.04..02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penghuni rusunawa yang sesuai dengan kriteria	100%	**20.170.315.154**	**1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase penghuni rusunawa yang sesuai dengan kriteria	100%	**17.177.406.720**
1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Unit Hunian rumah susun Pemerintah Kota Surabaya	5157 Unit Hunian	**20.170.315.154**	**1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	Jumlah Unit Hunian rumah susun Pemerintah Kota Surabaya	5.233 Unit Hunian	**17.177.406.720**
1.04.02.2.05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	105 Dokumen	20.170.315.154	1.04.02.2.05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	109 Dokumen	17.177.406.720
1.04..03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni	95%	**68.702.358.309**	**1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni	95%	**68.969.975.293**
1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jenis perbaikan rumah tapak tidak layak huni	2 jenis	**68.702.358.309**	**1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	Jenis perbaikan rumah tapak tidak layak huni	2 jenis	**68.969.975.293**
1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1000 Unit Rumah	68.702.358.309	1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1.500 Unit Rumah	68.969.975.293
1.04..04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa	100%	**22.181.600.328**	**1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa	100%	**19.339.005.773**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah lokasi pelaksanaan pencegahan permukiman kumuh	8 lokasi	**22.181.600.328**	**1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**					Jumlah lokasi pelaksanaan pencegahan permukiman kumuh	8 lokasi	**19.339.005.773**
				1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	9 Unit Rumah	22.181.600.328					1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	9 Unit Rumah	19.339.005.773
1.04..05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik	60%	**1.254.178.587**	**1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**					Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik	60%	**1.310.994.301**
			1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara administrasi yang diproses	12 dokumen	**1.254.178.587**				**1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**		Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara administrasi yang diproses	62 dokumen	**1.310.994.301**

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator** / **Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator** / **Alokasi**
1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12 Laporan / 1.254.178.587	1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	50 Laporan / 1.310.994.301
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		**82.300.254.903**	**2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		**54.121.514.080**
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		**82.300.254.903**	**2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**		**54.121.514.080**
2.10..05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum / 43.886,90 M2 / **82.300.254.903**		**2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum / 43.886,90 M2 / **54.121.514.080**	
2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengadaan/pembelian tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum / 1 lokasi / **82.300.254.903**		**2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah lokasi pengadaan/pembelian tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum / 2 lokasi / **54.121.514.080**	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	82.300.254.903	2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	54.121.514.080
Dinas Sosial			**120.497.867.907**	**Dinas Sosial**			**110.766.230.607**
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**120.497.867.907**	**1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**110.766.230.607**
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			**120.497.867.907**	**1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**110.766.230.607**
1.06..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	88%	**18.809.207.595**	**1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	88%	**20.291.005.663**
1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**15.730.319.119**	**1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**17.499.882.999**
1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	15.730.319.119	1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	17.499.882.999

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**		**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	
1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor	100%	**1.764.245.082**		**1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor	100%	**1.281.106.803**	
1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.764.245.082		1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.281.106.803	
1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Pelayanan Umum Kantor	100%	**1.314.643.394**		**1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pelayanan Pelayanan Umum Kantor	100%	**1.510.015.861**	
1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.314.643.394		1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.510.015.861	
1.06..02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	88,24%	**4.870.554.550**		**1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	88,24%	**5.067.764.202**	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	86,96%			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	86,96%	
1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis PSKS perorangan yang dibina	6 jenis	**4.870.554.550**	**1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah jenis PSKS perorangan yang dibina	6 jenis	**5.067.764.202**
	Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS kelembagaan	363 orang			Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS kelembagaan	852 orang	
1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	583 Orang	4.097.622.915	1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	583 Orang	4.312.632.393

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Lembaga	772.931.635	1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Lembaga	755.131.809
1.06..04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%	**34.464.331.604**	**1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%	**40.464.937.518**
	Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%			Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%	
	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%			Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%	
	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%			Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%	

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi			
1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah kegiatan pelayanan reunifikasi bagi PMKS	12 kali	**25.061.507.134**				**1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	Jumlah kegiatan pelayanan reunifikasi bagi PMKS	12 kali	**29.190.998.706**			
	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Anak	12 kali						Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Anak	12 kali				
	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Lanjut Usia	12 kali						Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Lanjut Usia	12 kali				
	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas	12 kali						Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas	12 kali				
1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1270 Orang	10.609.927.667				1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	2171 Orang	10.551.754.677			
1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	795 Orang	391.915.029				1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1299 Orang	187.602.086			

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	230 Orang	8.286.917.328						1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	230 Orang	11.003.985.145
					1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	5.132.354.784						1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	6.763.540.535
					1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	640.392.326						1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	49 Orang	684.116.263
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah laporan pemberian layanan kedaruratan	12 laporan	**9.402.824.470**				**1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**		Jumlah laporan pemberian layanan kedaruratan	12 laporan	**11.273.938.812**
						Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial	12 kali							Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial	12 kali	
					1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	4716 Orang	2.820.881.361						1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	8150 Orang	4.039.896.909

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Orang	6.581.943.109						1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1810 Orang	7.234.041.903
			1.06..05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87%	**60.596.786.700**				**1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**			Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87%	**43.109.294.383**
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR	12 laporan	**60.596.786.700**					**1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR	12 laporan	**43.109.294.383**
						Jumlah laporan koordinasi dan monitoring intervensi sosial	12 laporan								Jumlah laporan koordinasi dan monitoring intervensi sosial	12 laporan	
					1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	174385 Orang	4.017.010.580						1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	116.945 Orang	4.793.618.345
					1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	59295 Keluarga	576.918.171						1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	42.029 Keluarga	701.784.886

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	59295 Keluarga	48.074.447.125	1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	42.014 Keluarga	29.687.145.328
1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1071 Orang	7.928.410.824	1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1071 Orang	7.926.745.824
1.06..07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik	100%	**1.756.987.458**	**1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik	100%	**1.833.228.841**
1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	3 Jenis	**1.756.987.458**	**1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	3 Jenis	**1.833.228.841**
1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	7 Makam	1.756.987.458	1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	7 Makam	1.833.228.841
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			**1.676.432.548.577**	**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga**			**1.691.660.494.155**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**1.676.432.548.577**	**1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.691.660.494.155**
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			**1.676.432.548.577**	**1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**1.691.660.494.155**
1.03..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	93%	**121.896.141.802**	**1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	93%	**137.371.226.504**
	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	86,25 %			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	86,25 %	
1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%	**96.945.920**	**1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%	**78.745.920**
1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	96.945.920	1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	78.745.920
1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji	100%	**45.834.822.238**	**1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji	100%	**50.723.105.460**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					dan Tunjangan ASN								dan Tunjangan ASN		
				1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	206 Orang/bulan	45.834.822.238					1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	202 Orang/bulan	50.723.105.460
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100%	**5.337.353.504**					**1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pengelolaan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100%	**5.506.904.429**
				1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.337.353.504					1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.506.904.429
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	300 unit	**70.627.020.140**					**1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	300 unit	**81.062.470.695**
					Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak operasional	100%							Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak operasional	100%	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	227 Unit	13.700.032.856						1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	227 Unit	13.302.569.381
					1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	73 Unit	15.232.891.652						1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	73 Unit	13.986.180.424
					1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	41.694.095.632						1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	53.773.720.890
			1.03..02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			Persentase rumah pompa yang beroperasi	100%	**45.485.385.843**				**1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**			Persentase rumah pompa yang beroperasi	100%	**59.293.772.989**
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah pompa dan kelengkapannya yang dipelihara	62 unit	**45.485.385.843**					**1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah rumah pompa dan kelengkapannya yang dipelihara	62 unit	**59.293.772.989**
					1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	270 Unit	45.485.385.843						1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	270 Unit	59.293.772.989

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
1.03..05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman	100%	**8.289.105.053**	**1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman	100%	**9.740.190.395**
	Volume kapasitas operasional pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya	911 m3			Volume kapasitas operasional pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya	911 m3	
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun	2 kelurahan	**8.289.105.053**	**1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun	1 kelurahan	**9.740.190.395**
	Jumlah jenis lokasi IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik	4 Jenis			Jumlah jenis lokasi IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik	4 Jenis	
				1.03.05.2.01.0037 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	1 Unit	765.900.000
1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	96 Unit	6.134.647.370	1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	96 Unit	6.280.646.942

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	50 Rumah Tangga	2.154.457.683					1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	200 Rumah Tangga	2.693.643.453
			1.03..06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	100%	**776.459.678.139**				**1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**		Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	100%	**788.502.298.413**
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase	1170 lokasi	**776.459.678.139**				**1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase	1170 lokasi	**788.502.298.413**
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun	80 dokumen						Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun	80 dokumen	
						Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan	150 lokasi						Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan	50 lokasi	
					1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	10000 M	81.538.673.591					1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	7.500 M	98.095.906.295
					1.03.06.2.01.0025 Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang	8 Sistem Drainase Perkotaan	10.907.665.734					1.03.06.2.01.0025 Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang	15 Sistem Drainase Perkotaan	10.840.964.877

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Dibina secara Teknis									Dibina secara Teknis		
					1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	8 Sistem Drainase Perkotaan	104.428.273.233					1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	10 Sistem Drainase Perkotaan	100.809.453.173
					1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	8 Sistem Drainase Perkotaan	499.424.209.401					1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	15 Sistem Drainase Perkotaan	482.015.359.917
					1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	50 Dokumen	9.697.923.483					1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	50 Dokumen	8.504.575.091
					1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	21 Sistem Drainase Perkotaan	70.462.932.697					1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	30 Sistem Drainase Perkotaan	88.236.039.060
			1.03..07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain	9%	**2.613.089.472**				**1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**			Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain	9%	**2.707.549.014**
						Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu	100%								Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu	100%	

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator** / **Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator** / **Alokasi**
1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah permohonan masuk yang sudah diproses	240 berkas / **2.613.089.472**	**1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah permohonan masuk yang sudah diproses	240 berkas / **2.707.549.014**
	Jumlah SK Walikota tentang penetapan formulasi sewa tanah yang ditetapkan	13 Dokumen		Jumlah SK Walikota tentang penetapan formulasi sewa tanah yang ditetapkan	13 Dokumen
1.03.07.2.01.0018 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	240 Unit / 1.779.897.330	1.03.07.2.01.0018 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	240 Unit / 1.822.559.040
1.03.07.2.01.0030 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	13 Unit / 833.192.142	1.03.07.2.01.0030 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	13 Unit / 884.989.974
1.03..10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Luas jalan yang diperbaiki	170.000 m2 / **721.689.148.268**	**1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Luas jalan yang diperbaiki	170.000 m2 / **694.045.456.840**
	Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun	11.400 meter		Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun	11.400 meter

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun	200 lokasi	**721.689.148.268**					**1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun	200 lokasi	**694.045.456.840**
					Jumlah lokasi pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur	2 lokasi							Jumlah lokasi pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur	5 lokasi	
					Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	137 dokumen							Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	137 dokumen	
					Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dipelihara	1.201 lokasi							Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dipelihara	1.201 lokasi	
					1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	70 Dokumen	9.470.303.471					1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	70 Dokumen	10.249.628.646

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	11.4 KM	9.232.003.850	1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	11.4 KM	10.343.636.739
1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	11.4 KM	302.973.252.306	1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	29.39 KM	365.546.244.916
1.03.10.2.01.0041 Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	1 KM	316.734.469.723	1.03.10.2.01.0041 Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	1 KM	210.738.978.592
1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.8 KM	5.127.688.688	1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.8 KM	4.744.220.224
1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	45 KM	78.151.430.230	1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	45 KM	92.422.747.723
Inspektorat			**25.287.663.650**	**Inspektorat**			**27.661.610.227**
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			**25.287.663.650**	**6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**			**27.661.610.227**
6.01 INSPEKTORAT DAERAH			**25.287.663.650**	**6.01 INSPEKTORAT DAERAH**			**27.661.610.227**
6.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	**22.250.825.569**	**6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	**24.498.210.227**
6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji	100%	**20.386.216.233**	**6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji	100%	**22.882.031.280**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					dan Tunjangan ASN								dan Tunjangan ASN		
				6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	20.386.216.233					6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	22.882.031.280
			6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	**434.165.612**				**6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	**246.275.250**
				6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	434.165.612					6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	246.275.250
			6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	**1.430.443.724**				**6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	**1.369.903.697**
				6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.430.443.724					6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.369.903.697
			6.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi	100%	**1.570.396.481**				**6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**		Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi	100%	**1.617.800.000**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
	Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu	100%			Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu	100%	
	Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	100%			Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	100%	
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan internal	60 lembaga	**987.539.881**	**6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan internal	60 lembaga	**1.020.600.000**
	Jumlah hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Surabaya yang ditindaklanjuti oleh PD dan dilakukan monev	142 Rekomendasi			Jumlah hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Surabaya yang ditindaklanjuti oleh PD dan dilakukan monev	142 Rekomendasi	
	Jumlah dokumen hasil reviu laporan kinerja dan keuangan	17 Dokumen			Jumlah dokumen hasil reviu laporan kinerja dan keuangan	17 Dokumen	
6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	60 Laporan	232.892.600	6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	60 Laporan	244.800.000
6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	245.898.400	6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	247.400.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	7 Laporan	245.883.100					6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	7 Laporan	248.700.000
					6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	142 Dokumen	262.865.781					6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	142 Dokumen	279.700.000
			6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan dengan tujuan tertentu	20 lembaga	**582.856.600**				**6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**		Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan dengan tujuan tertentu	20 lembaga	**597.200.000**
					6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan	291.285.100					6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan	291.800.000
					6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan	291.571.500					6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan	305.400.000
			6.01..03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi	100%	**1.466.441.600**				**6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**		Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi	100%	**1.545.600.000**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
	Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah	100%			Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah	100%	
	Persentase rumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti	100%			Persentase rumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	
6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan	4 dokumen	**515.008.200**	**6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Jumlah Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan	4 dokumen	**536.500.000**
6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	264.643.000	6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	280.600.000
6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	250.365.200	6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	255.900.000
6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan yang dihasilkan dalam hal pendampingan dan asistensi	60 Laporan	**951.433.400**	**6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi**	Jumlah laporan yang dihasilkan dalam hal pendampingan dan asistensi	60 Laporan	**1.009.100.000**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Urusan Pemerintahan Daerah									Urusan Pemerintahan Daerah		
						Jumlah frekuensi yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Reformasi Birokasi, Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Integritas	45 Kali								Jumlah frekuensi yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Reformasi Birokasi, Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Integritas	45 Kali	
					6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	60 perangkat daerah	273.187.400					6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	60 perangkat daerah	306.400.000
					6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	60 perangkat daerah	240.449.500					6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	60 perangkat daerah	236.400.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	25 Kegiatan	218.747.000					6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	25 Kegiatan	232.500.000
					6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 perangkat daerah	219.049.500					6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 perangkat daerah	233.800.000
Kec. Asemrowo								**25.178.137.154**	**Kec. Asemrowo**								**26.382.438.640**
	7 UNSUR KEWILAYAHAN							**25.178.137.154**		**7 UNSUR KEWILAYAHAN**							**26.382.438.640**
		7.01 KECAMATAN						**25.178.137.154**			**7.01 KECAMATAN**						**26.382.438.640**
			7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99,77%	**17.260.092.454**				**7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99,77%	**18.453.139.940**
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**14.659.425.958**					**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**15.479.707.586**
					7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	14.659.425.958					7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	15.479.707.586

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**2.477.949.396**	**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**2.862.619.361**
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	2.477.949.396	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	2.862.619.361
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**122.717.100**	**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**110.812.993**
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	122.717.100	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	110.812.993
7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**32.811.093**	**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**33.561.693**
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	27,27 %			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	27,27 %	
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**3.450.000**	**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**3.450.000**
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3.450.000	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3.450.000
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	139 Lembaga	**7.506.000**	**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	139 Lembaga	**8.256.600**
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	7.506.000	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	8.256.600

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi			
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**21.855.093**				**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**21.855.093**			
	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan				
	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan				
7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	2.920.357				7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	87 Dokumen	2.920.357			
7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	13.545.076				7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	13.545.076			

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	5.389.660						7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	5.389.660
			7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**7.739.323.407**				**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**7.750.079.307**
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**7.676.903.907**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**7.676.903.907**
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	3 kelurahan								jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	3 kelurahan	
					7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.340.000						7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.340.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2.525.420.510						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2.525.420.510
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1.098.008.917						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1.098.008.917
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1.098.008.917						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1.098.008.917
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	706.505.945						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	706.505.945
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	695.005.945						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	695.005.945
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.548.613.673						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.548.613.673
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	288 Unit Usaha	**62.419.500**					**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga**		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	174 Unit Usaha	**73.175.400**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	17 Lembaga						**Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	17 Lembaga	
				7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	17 Unit	53.779.500					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	17 Unit	64.535.400
				7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	8.640.000					7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	8.640.000
			7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**130.719.200**				**7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**130.466.700**
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	5 Lokasi	**130.719.200**					**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	5 Lokasi	**130.466.700**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	130.719.200	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	130.466.700
7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**15.191.000**	**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**15.191.000**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus	**15.191.000**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus	**15.191.000**
	Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	82 Orang	4.460.000	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	82 Orang	4.460.000
7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	10.731.000	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	10.731.000
Kec. Benowo			**30.752.916.350**	**Kec. Benowo**			**32.193.040.595**
7 UNSUR KEWILAYAHAN			**30.752.916.350**	**7 UNSUR KEWILAYAHAN**			**32.193.040.595**
7.01 KECAMATAN			**30.752.916.350**	**7.01 KECAMATAN**			**32.193.040.595**
7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,91%	**19.176.699.277**	**7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,91%	**20.585.083.731**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**16.462.970.968**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**17.474.232.068**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	16.462.970.968					7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	17.474.232.068
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**2.617.598.309**				**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**3.009.576.576**
					7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	2.617.598.309					7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	3.009.576.576
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**96.130.000**				**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**101.275.087**
					7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	96.130.000					7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	101.275.087
			7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**30.884.319**				**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**32.968.719**

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**		**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	34,45%				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	34,45%		
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	**5.192.424**		**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	**5.192.424**	
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	5.192.424		7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	5.192.424	
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	193 lembaga	**10.422.000**		**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	193 lembaga	**12.506.400**	

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10.422.000					7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12.506.400
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**15.269.895**				**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**15.269.895**
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	15 Dokumen	2.489.175						7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	15 Dokumen	2.489.175
					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	5.088.240						7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	5.088.240
					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	7.692.480						7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	7.692.480
			7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**11.371.600.485**				**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**11.388.050.685**
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**11.273.644.005**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**11.273.644.005**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan							jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	
					7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	4.800.000					7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	4.800.000
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	2.218.247.271					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	2.218.247.271
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2.153.297.978					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2.583.563.780
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	2.226.289.563					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2.226.289.563
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1.102.346.846					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1.102.346.846
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	3 Pokmas / Ormas	868.028.367					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	3 Pokmas / Ormas	868.028.367

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Masyarakat di Kelurahan									Masyarakat di Kelurahan		
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	677.225.802						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	246.960.000
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.313.740.162						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.313.740.162
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	709.668.016						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	709.668.016
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Potensi usaha	**97.956.480**					**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Potensi usaha	**114.406.680**
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	26 Lembaga								Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	26 Lembaga	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	26 Unit	82.251.000						7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	26 Unit	98.701.200
					7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	15.705.480						7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	15.705.480
			7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**149.066.789**				**7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**162.271.980**
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi	**149.066.789**					**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi	**162.271.980**
					7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	149.066.789						7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	162.271.980

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**24.665.480**	**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**24.665.480**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	**24.665.480**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	**24.665.480**
	Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 Orang	8.960.000	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 Orang	8.960.000

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	15.705.480	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	15.705.480
Kec. Bubutan			**42.926.388.909**	**Kec. Bubutan**			**44.623.790.912**
7 UNSUR KEWILAYAHAN			**42.926.388.909**	**7 UNSUR KEWILAYAHAN**			**44.623.790.912**
7.01 KECAMATAN			**42.926.388.909**	**7.01 KECAMATAN**			**44.623.790.912**
7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,06%	**22.099.470.101**	**7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,06%	**23.789.381.704**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**18.094.692.095**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**19.170.686.430**
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan	18.094.692.095	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	19.170.686.430
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**3.930.608.506**	**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4.528.251.138**
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	36 Paket	3.930.608.506	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	23 Paket	4.528.251.138

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Kantor yang Disediakan									Kantor yang Disediakan		
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**74.169.500**					**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**90.444.136**
					7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	74.169.500						7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	90.444.136
			7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**60.858.612**				**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**65.329.812**
						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%							Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
						Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24,37%							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24,37%	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**4.500.000**					**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**4.500.000**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4.500.000					7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4.500.000
			7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	414 Lembaga	**22.356.000**				**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	414 Lembaga	**26.827.200**
				7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	22.356.000					7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	26.827.200
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**34.002.612**				**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**34.002.612**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	
					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	40 Dokumen	14.400.000					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	40 Dokumen	14.400.000
					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12.000.000					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12.000.000
					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	7.602.612					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	7.602.612

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**20.631.443.716**	**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**20.631.443.716**
	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	**20.450.010.916**	**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	**20.450.010.916**
	jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 Kelurahan			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 Kelurahan	
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	32.840.000	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	32.840.000
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	2.487.029.806	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	2.487.029.806
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	3.184.225.860	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	3.184.225.860

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	2.168.567.612						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	2.168.567.612
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	1.727.193.143						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	1.727.193.143
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	2.992.074.300						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	2.992.074.300
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.670.254.749						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.670.254.749
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2.018.817.240						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2.018.817.240
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.259.211.741						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.259.211.741
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	3 Pokmas / Ormas	1.817.716.200						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	3 Pokmas / Ormas	1.817.716.200

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
						Masyarakat di Kelurahan									Masyarakat di Kelurahan		
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.092.080.265						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.092.080.265
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	440 Lembaga	**181.432.800**					**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	440 Lembaga	**181.432.800**
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga	
					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit	167.032.800						7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit	167.032.800
					7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	14.400.000						7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	14.400.000

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**112.524.000**	**7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**115.543.200**
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	**112.524.000**	**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	**115.543.200**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	112.524.000	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	115.543.200
7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**22.092.480**	**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**22.092.480**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	29 Kasus	**22.092.480**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	29 Kasus	**22.092.480**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik								Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
					7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	14.400.000					7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Orang	14.400.000
					7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	7.692.480					7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	7.692.480
Kec. Bulak								**29.725.760.687**	**Kec. Bulak**								**30.962.766.575**
7 UNSUR KEWILAYAHAN								**29.725.760.687**	**7 UNSUR KEWILAYAHAN**								**30.962.766.575**
7.01 KECAMATAN								**29.725.760.687**	**7.01 KECAMATAN**								**30.962.766.575**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,90%	**20.326.397.893**	**7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,90%	**21.561.999.081**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**16.135.629.459**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**16.800.940.321**
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	16.135.629.459	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	16.800.940.321
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24 paket	**4.088.101.651**	**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 paket	**4.659.261.250**
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	4.088.101.651	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	4.659.261.250
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	**102.666.783**	**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	**101.797.510**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	102.666.783					7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	101.797.510
			7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**41.524.833**				**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**43.231.233**
						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%							Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
						Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23,91%							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23,91%	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	**2.417.760**					**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	**2.417.760**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2.417.760					7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2.417.760
			7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	158 Lembaga	**30.507.317**			**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	158 Lembaga	**32.213.717**
				7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	30.507.317					7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	32.213.717
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha Yang DilaksanakanBidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	24 Dokumen	**8.599.756**			**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha Yang DilaksanakanBidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	24 Dokumen	**8.599.756**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
						Jumlah Pelayanan non perizinan yang ditangani	11 Layanan							Jumlah Pelayanan non perizinan yang ditangani	11 Layanan	
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	4 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	4 Bidang Urusan	
					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen	1.173.856					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen	1.173.856
					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	3.396.600					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	3.396.600
					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	4.029.300					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	4.029.300

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**9.273.272.261**	**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**9.273.272.261**
	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**9.191.152.061**	**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**9.191.152.061**
	jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga			jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga	
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5.075.520	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5.075.520
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1.894.065.383	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1.894.065.383
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1.381.128.571	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1.381.128.571

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1.098.008.917						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1.098.008.917
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1.564.662.707						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1.708.425.189
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.178.210.255						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.178.210.255
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	422.386.291						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	422.386.291
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	684.005.945						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	684.005.945
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	963.608.472						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	819.845.990
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	440 Lembaga	**82.120.200**					**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga**		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	440 Lembaga	**82.120.200**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	21 Lembaga						**Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	21 Lembaga	
				7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	21 Unit	79.720.200					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	21 Unit	79.720.200
				7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	2.400.000					7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	2.400.000
			7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**79.324.100**				**7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**79.022.400**
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 Laporan	**79.324.100**					**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 Laporan	**79.022.400**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	79.324.100	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	79.022.400
7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**5.241.600**	**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**5.241.600**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Laporan	**5.241.600**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah laporan potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Laporan	**5.241.600**
	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,k Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	33 Orang			Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,k Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	33 Orang	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	33 Orang	2.380.000	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	46 Orang	2.380.000
7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	2.861.600	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	2.861.600
Kec. Dukuh Pakis			**33.286.185.842**	**Kec. Dukuh Pakis**			**34.521.793.653**
7 UNSUR KEWILAYAHAN			**33.286.185.842**	**7 UNSUR KEWILAYAHAN**			**34.521.793.653**
7.01 KECAMATAN			**33.286.185.842**	**7.01 KECAMATAN**			**34.521.793.653**
7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,30%	**19.397.531.754**	**7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,30%	**20.607.758.215**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**16.140.545.167**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**17.011.666.343**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	16.140.545.167					7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	17.011.666.343
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**3.140.298.587**				**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**3.482.032.151**
				7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.140.298.587					7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.482.032.151
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**116.688.000**				**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**114.059.721**
				7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	116.688.000					7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	114.059.721
			7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**147.544.004**				**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**148.602.404**

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi			Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%					Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26,32%					Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26,32%			
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga	**3.600.000**			**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga	**3.600.000**		
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3.600.000			7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3.600.000		
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	196 Lembaga	**100.056.071**			**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	196 Lembaga	**101.114.471**		

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	100.056.071					7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	101.114.471
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**43.887.933**			**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**43.887.933**
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	4.734.460						7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	4.734.460
					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	23.642.472						7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	23.642.472
					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	15.511.001						7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	15.511.001
			7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**13.568.777.739**				**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**13.588.391.439**
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	4 Kelurahan	**13.456.709.239**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	4 Kelurahan	**13.456.709.239**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan							jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan	
					7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	9.600.000					7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	9.600.000
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3.434.191.386					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	3.434.191.386
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1.699.873.299					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1.699.873.299
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1.894.065.383					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1.894.065.383
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2.502.258.810					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2.696.677.867
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	3 Pokmas / Ormas	876.019.057					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	2 Pokmas / Ormas	681.600.000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Masyarakat di Kelurahan									Masyarakat di Kelurahan		
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.050.595.399						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1.050.595.399
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	681.395.650						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	681.395.650
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.308.710.255						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1.308.710.255
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	25 Lembaga	**112.068.500**				**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	25 Lembaga	**131.682.200**
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	31 Lembaga							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	31 Lembaga	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	31 Unit	98.068.500					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	31 Unit	117.682.200
					7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	14.000.000					7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	14.000.000
			7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**148.871.700**				**7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**153.580.950**
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	**148.871.700**					**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	**153.580.950**
					7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	148.871.700					7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	153.580.950

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**23.460.645**	**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**23.460.645**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	36 Kasus	**23.460.645**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	36 Kasus	**23.460.645**
	Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang	14.875.845	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang	14.875.845

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	8.584.800	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	8.584.800
Kec. Gayungan			**35.067.129.028**	**Kec. Gayungan**			**36.262.390.391**
7 UNSUR KEWILAYAHAN			**35.067.129.028**	**7 UNSUR KEWILAYAHAN**			**36.262.390.391**
7.01 KECAMATAN			**35.067.129.028**	**7.01 KECAMATAN**			**36.262.390.391**
7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,81%	**21.296.542.106**	**7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,81%	**22.466.123.420**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**18.000.971.947**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**18.839.719.706**
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	18.000.971.947	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	18.839.719.706
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**3.141.517.559**	**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**3.500.179.214**
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	22 Paket	3.141.517.559	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	22 Paket	3.500.179.214

Sebelum Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**		
	Kantor yang Disediakan				
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**154.052.600**		
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	154.052.600		
7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**39.769.228**		
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	30,15%			
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**1.650.000**		

Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
	Kantor yang Disediakan		
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**126.224.500**
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	126.224.500
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**40.833.028**
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	30,15%	
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**1.650.000**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1.650.000					7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1.650.000
			7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	197 Lembaga	**10.638.000**			**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	197 Lembaga	**11.701.800**
				7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10.638.000					7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	11.701.800
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**27.481.228**			**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**27.481.228**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	
					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	9.230.364						7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	9.230.364
					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	11.050.864						7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	11.050.864
					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	7.200.000						7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	7.200.000

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**13.556.136.468**	**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**13.575.117.468**
	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**13.449.711.468**	**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**13.449.711.468**
	jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	3.600.000	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	3.600.000
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	3.259.013.235	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	3.259.013.235
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2.713.291.113	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	2.713.291.113

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1.869.856.709						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1.869.856.709
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	1.894.065.383						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	1.894.065.383
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	668.769.090						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	668.769.090
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.172.491.213						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.172.491.213
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	672.914.470						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	672.914.470
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.195.710.255						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.195.710.255
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	120 Lembaga	**106.425.000**					**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga**			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	120 Lembaga	**125.406.000**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	30 Lembaga						**Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	30 Lembaga	
				7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	30 Unit	94.905.000					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	30 Unit	113.886.000
				7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	11.520.000					7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	11.520.000
			7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**163.678.800**				**7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**169.314.049**
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi	**163.678.800**					**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi	**169.314.049**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	163.678.800	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	169.314.049
7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**11.002.426**	**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**11.002.426**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	45 Kasus	**11.002.426**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	45 Kasus	**11.002.426**
	Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 topik			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 topik	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	230 Orang	3.850.936	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40 Orang	3.850.936
7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	7.151.490	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	7.151.490
Kec. Genteng			**38.158.370.538**	**Kec. Genteng**			**39.557.773.338**
7 UNSUR KEWILAYAHAN			**38.158.370.538**	**7 UNSUR KEWILAYAHAN**			**39.557.773.338**
7.01 KECAMATAN			**38.158.370.538**	**7.01 KECAMATAN**			**39.557.773.338**
7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,50%	**22.691.940.261**	**7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,50%	**24.110.626.020**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**18.303.419.021**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**19.476.610.368**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	18.303.419.021					7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	19.476.610.368
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4.272.119.332**				**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4.568.525.601**
					7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	4.272.119.332					7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	4.568.525.601
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**116.401.908**				**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**65.490.051**
					7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	116.401.908					7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	65.490.051
			7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**383.791.891**				**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**383.791.891**

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi			Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%					Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
	Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	23,38%					Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	23,38%			
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**10.000.000**			**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**10.000.000**		
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	10.000.000			7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	10.000.000		
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	364 Lembaga	**320.137.074**			**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	364 Lembaga	**320.137.074**		

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
				7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	320.137.074					7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	320.137.074
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**53.654.817**				**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**53.654.817**
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	24.696.660						7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	24.696.660
					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	11.322.000						7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	11.322.000
					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	17.636.157						7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	17.636.157
			7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**14.906.931.186**				**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**14.906.931.186**
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**14.654.272.986**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**14.654.272.986**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan								jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	
					7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	16.400.000						7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	16.400.000
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit	1.516.161.348						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1.516.161.348
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	2.057.611.913						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	2.100.170.043
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit	1.537.573.183						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	1.537.573.183
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1.000.387.046						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1.000.387.046
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	66 Unit	2.256.947.003						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	2.256.947.003

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.017.109.831						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.017.109.831
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.220.415.582						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.177.857.452
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	959.697.996						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	959.697.996
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.995.638.220						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.995.638.220
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.076.330.864						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.076.330.864
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	15 Lembaga	**252.658.200**					**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga**		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	15 Lembaga	**252.658.200**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	61 Lembaga						**Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	61 Lembaga	
				7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	61 Unit	231.568.200					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	61 Unit	231.568.200
				7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	21.090.000					7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	21.090.000
			7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**141.186.000**				**7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**121.903.041**
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	**141.186.000**					**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	**121.903.041**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	141.186.000	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	121.903.041
7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**34.521.200**	**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**34.521.200**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	9 Kasus	**34.521.200**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	9 Kasus	**34.521.200**
	Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	58 Orang	14.000.000	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	58 Orang	14.000.000
7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	20.521.200	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	20.521.200
Kec. Gubeng			**45.417.731.874**	**Kec. Gubeng**			**46.923.872.469**
7 UNSUR KEWILAYAHAN			**45.417.731.874**	**7 UNSUR KEWILAYAHAN**			**46.923.872.469**
7.01 KECAMATAN			**45.417.731.874**	**7.01 KECAMATAN**			**46.923.872.469**
7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,97%	**25.266.594.978**	**7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,97%	**26.729.158.509**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**20.238.167.055**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**21.000.137.110**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	20.238.167.055					7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	21.000.137.110
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4.904.938.923**				**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**5.613.524.399**
				7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	4.904.938.923					7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5.613.524.399
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**123.489.000**				**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**115.497.000**
				7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	123.489.000					7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	115.497.000
			7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**59.072.214**				**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**64.256.214**

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**		**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	30,77%				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	30,77%		
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**3.000.000**		**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**3.000.000**	
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3.000.000		7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3.000.000	
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	480 Lembaga	**25.920.000**		**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	480 Lembaga	**31.104.000**	

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
				7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	25.920.000					7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	31.104.000
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**30.152.214**				**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**30.152.214**
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	35 Dokumen	15.038.776						7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	35 Dokumen	15.038.776
					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	11.921.146						7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	11.921.146
					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	3.192.292						7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	3.192.292
			7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**19.931.867.716**				**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**19.964.768.116**
						Persentase potensi usaha yang difasilitasi	100%								Persentase potensi usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	**19.752.665.716**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	**19.752.665.716**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan								jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	
					7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	9.000.000						7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	9.000.000
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2.058.766.720						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	2.058.766.720
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2.771.551.956						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2.771.551.956
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1.891.183.017						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1.898.160.477
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2.912.960.434						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2.912.960.434
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2.285.779.417						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2.285.779.417

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1.111.835.300						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1.111.835.300
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.056.479.998						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.056.479.998
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	907.571.520						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	907.571.520
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.276.511.147						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.276.511.147
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.701.004.395						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.701.004.395
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	645.588.162						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	638.610.702

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.124.433.650					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.124.433.650
			7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	90 Unit Kerja	**179.202.000**			**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	90 Unit Kerja	**212.102.400**
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	52 Lembaga							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	52 Lembaga	
					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	52 Unit	164.502.000					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	52 Unit	197.402.400
					7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	14.700.000					7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	14.700.000
			7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**138.771.486**				**7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**144.264.150**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi	**138.771.486**	**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi	**144.264.150**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	138.771.486	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	144.264.150
7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**21.425.480**	**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**21.425.480**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	**21.425.480**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	**21.425.480**
	Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan	2 Topik			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan	2 Topik	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						ketahanan nasional									ketahanan nasional		
					7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	124 Orang	5.720.000						7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	124 Orang	5.720.000
					7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	15.705.480						7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	15.705.480
Kec. Gunung Anyar								**28.047.552.108**	**Kec. Gunung Anyar**								**29.551.044.761**
	7 UNSUR KEWILAYAHAN							**28.047.552.108**		**7 UNSUR KEWILAYAHAN**							**29.551.044.761**
		7.01 KECAMATAN						**28.047.552.108**			**7.01 KECAMATAN**						**29.551.044.761**
			7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,03%	**19.094.481.044**				**7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,03%	**20.549.058.213**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**14.928.715.684**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**15.745.297.614**
				7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	14.928.715.684					7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	15.745.297.614
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	29 Paket	**4.112.958.660**	**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**					Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	29 Paket	**4.751.068.599**
				7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket	4.112.958.660					7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket	4.751.068.599
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	20 Unit	**52.806.700**	**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	20 Unit	**52.692.000**
				7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	52.806.700					7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	52.692.000

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**50.197.420**	**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**50.197.420**
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50%			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50%	
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkaitt	2 laporan	**2.400.000**	**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkaitt	2 laporan	**2.400.000**
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2.400.000	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2.400.000

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	219 Lembaga	**14.191.200**	**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**					Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	219 Lembaga	**14.191.200**
				7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	14.191.200					7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	14.191.200
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					Jumlah Dokumen non perijinan usaha yang dilaksanakan	625 Dokumen	**33.606.220**	**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**					Jumlah Dokumen non perijinan usaha yang dilaksanakan	625 Dokumen	**33.606.220**
					Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan	12 laporan							Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan	12 laporan	
					Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 laporan							Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 laporan	
				7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	625 Dokumen	10.192.536					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	625 Dokumen	10.192.536

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	13.902.434					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	13.902.434
					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	9.511.250					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	9.511.250
			7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**8.810.261.094**				**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**8.828.609.397**
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%							Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**8.712.759.597**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**8.712.759.597**
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan							jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	22.436.400					7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	22.436.400
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1.372.511.147					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1.372.511.147
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1.235.260.032					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1.235.260.032
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1.744.308.288					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1.744.308.288
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1.555.993.638					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1.555.993.638
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	804.007.431					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	804.007.431
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	1 Pokmas / Ormas	746.506.688					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	1 Pokmas / Ormas	746.506.688

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
						Masyarakat di Kelurahan									Masyarakat di Kelurahan		
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	688.775.311					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	688.775.311
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	542.960.662					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	542.960.662
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	**97.501.497**				**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	**115.849.800**
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	29 Lembaga							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	29 Lembaga	
					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	29 Unit	91.741.497					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	29 Unit	110.089.800

Sebelum Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	5.760.000
7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**74.914.200**
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	**74.914.200**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	74.914.200
7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**17.698.350**

Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	5.760.000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**97.606.631**
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	**97.606.631**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	97.606.631
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**25.573.100**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 kasus	**17.698.350**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 kasus	**25.573.100**
	Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	47 Orang	5.000.000	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	47 Orang	5.000.000
7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12.698.350	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	20.573.100
Kec. Jambangan			**32.305.613.260**	**Kec. Jambangan**			**33.739.714.132**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7 UNSUR KEWILAYAHAN			**32.305.613.260**	**7 UNSUR KEWILAYAHAN**			**33.739.714.132**
7.01 KECAMATAN			**32.305.613.260**	**7.01 KECAMATAN**			**33.739.714.132**
7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,39%	**20.748.131.566**	**7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,39%	**22.170.389.821**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**17.774.225.369**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**18.774.075.877**
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan	17.774.225.369	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan	18.774.075.877
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**2.852.824.448**	**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**3.286.643.238**
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	2.852.824.448	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	3.286.643.238
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**121.081.749**	**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**109.670.706**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	121.081.749					7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	109.670.706
			7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**85.998.625**				**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**95.977.825**
						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%							Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
						Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	27,76 %							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	27,76 %	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**2.160.000**					**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**2.160.000**
					7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	178 Laporan	2.160.000					7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	178 Laporan	2.160.000

Sebelum Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	168 Lembaga	**9.072.000**
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	9.072.000
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**74.766.625**
	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain	6 Bidang Urusan	

Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	168 Lembaga	**19.051.200**
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	19.051.200
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**74.766.625**
	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain	6 Bidang Urusan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						yang dilimpahkan kepada Camat									yang dilimpahkan kepada Camat		
					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	16 Dokumen	32.345.250						7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	16 Dokumen	32.345.250
					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4277 Laporan	18.057.375						7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4277 Laporan	18.057.375
					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	24.364.000						7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	24.364.000
			7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**11.263.043.719**				**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**11.263.043.719**
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi			
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**11.152.342.519**				**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**11.152.342.519**			
	jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan				
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	1.500.000				7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	1.500.000			
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1.729.364.045				7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1.863.060.057			
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1.532.140.307				7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1.532.140.307			
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	2.632.787.896				7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	3.113.795.976			
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1.696.662.622				7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1.696.662.622			

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	521.376.785						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	521.376.785
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	1.051.909.363						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	918.213.351
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	1.618.247.031						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	1.137.238.951
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	368.354.470						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	368.354.470
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	100 Lembaga	**110.701.200**					**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	100 Lembaga	**110.701.200**
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	26 Lembaga							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	26 Lembaga	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	26 Unit	98.701.200					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	26 Unit	98.701.200
					7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	12.000.000					7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	12.000.000
			7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**179.339.750**				**7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**181.203.167**
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi	**179.339.750**					**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi	**181.203.167**
					7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan	179.339.750					7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan	181.203.167

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**29.099.600**	**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**29.099.600**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	33 Kasus	**29.099.600**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	33 Kasus	**29.099.600**
	Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4 Orang	11.930.000	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	27 Orang	11.930.000

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	33 Laporan	17.169.600	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	33 Laporan	17.169.600
Kec. Karangpilang			**32.363.875.045**	**Kec. Karangpilang**			**33.921.100.887**
7 UNSUR KEWILAYAHAN			**32.363.875.045**	**7 UNSUR KEWILAYAHAN**			**33.921.100.887**
7.01 KECAMATAN			**32.363.875.045**	**7.01 KECAMATAN**			**33.921.100.887**
7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,78%	**20.522.193.215**	**7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,78%	**22.054.587.157**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**16.498.912.274**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**17.590.587.477**
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	16.498.912.274	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	17.590.587.477
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**3.892.734.081**	**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4.347.485.349**
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	19 Paket	3.892.734.081	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	19 Paket	4.347.485.349

Sebelum Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**		
	Kantor yang Disediakan				
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**130.546.860**		
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	130.546.860		
7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**38.980.268**		
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	89,10%			
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**4.200.000**		

Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
	Kantor yang Disediakan		
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**116.514.331**
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	116.514.331
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**40.135.868**
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	89,10%	
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**4.200.000**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4.200.000					7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4.200.000
			7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	220 Lembaga	**11.880.000**				**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	220 Lembaga	**13.035.600**
				7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	11.880.000					7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	13.035.600
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**22.900.268**				**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**22.900.268**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	
					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	11.618.228					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	11.618.228
					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	333.000					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	333.000
					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	10.949.040					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	10.949.040

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**11.615.637.362**	**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**11.633.985.662**
	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**11.520.295.862**	**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**11.520.295.862**
	jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	7.200.000	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	7.200.000
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2.958.098.807	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2.958.098.807
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1.309.133.141	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1.309.133.141

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	2.177.032.395						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	2.266.774.603
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	1.665.772.476						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	1.693.236.051
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	485.881.721						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	485.881.721
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.367.497.330						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.277.755.122
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.053.250.561						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.025.786.986
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	496.429.431						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	496.429.431
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Lembaga	**95.341.500**					**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga**		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Lembaga	**113.689.800**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**				**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**			
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	29 Lembaga					**Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	29 Lembaga				
7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	29 Unit	91.741.500				7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	29 Unit	110.089.800			
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	3.600.000				7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	3.600.000			
7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**148.471.200**				**7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**153.799.200**			
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi	**148.471.200**				**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi	**153.799.200**			

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	148.471.200	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	153.799.200
7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**38.593.000**	**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**38.593.000**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	73 Kasus	**38.593.000**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	73 Kasus	**38.593.000**
	Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	187 Orang	6.400.000	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	51 Orang	6.400.000
7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	32.193.000	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	32.193.000
Kec. Kenjeran			**36.086.079.615**	**Kec. Kenjeran**			**36.797.537.715**
7 UNSUR KEWILAYAHAN			**36.086.079.615**	**7 UNSUR KEWILAYAHAN**			**36.797.537.715**
7.01 KECAMATAN			**36.086.079.615**	**7.01 KECAMATAN**			**36.797.537.715**
7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,72%	**19.982.149.910**	**7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,72%	**20.682.837.310**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**15.383.052.505**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**15.915.919.715**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	15.383.052.505					7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	15.915.919.715
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4.457.026.741**				**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4.655.748.295**
				7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.457.026.741					7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.655.748.295
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**142.070.664**				**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**111.169.300**
				7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	142.070.664					7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	111.169.300
			7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**66.863.415**				**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**71.831.415**

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**		**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	33,33%				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	33,33%		
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	**2.220.000**		**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	**2.220.000**	
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2.220.000		7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2.220.000	
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	460 Lembaga	**24.840.000**		**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	460 Lembaga	**29.808.000**	

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
				7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	24.840.000					7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	29.808.000
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**39.803.415**				**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**39.803.415**
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100 Dokumen	8.085.240					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100 Dokumen	8.085.240
					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	24.524.965					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	24.524.965
					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	7.193.210					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	7.193.210
			7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**15.884.068.990**				**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**15.884.068.990**
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%							Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**15.712.383.390**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**15.712.383.390**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan								jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	
					7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000						7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	3.177.728.258						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	3.265.542.358
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1.661.330.363						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1.846.380.419
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1.841.400.579						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1.841.400.579
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	3.466.894.087						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	3.466.894.087
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	3 Pokmas / Ormas	1.801.814.100						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	3 Pokmas / Ormas	1.714.000.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Masyarakat di Kelurahan									Masyarakat di Kelurahan		
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.340.694.903						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.155.644.847
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	672.370.600						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	672.370.600
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.747.150.500						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.747.150.500
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha	**171.685.600**				**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha	**171.685.600**
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	38 Lembaga							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	38 Lembaga	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	38 Unit	144.255.600					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	38 Unit	144.255.600
					7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	27.430.000					7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	27.430.000
			7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**132.732.500**				**7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**138.535.200**
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	10 Lokasi	**132.732.500**					**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	10 Lokasi	**138.535.200**
					7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	132.732.500					7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	138.535.200

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**20.264.800**	**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**20.264.800**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	**20.264.800**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	**20.264.800**
	Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	418 Orang	11.680.000	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	418 Orang	11.680.000

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	8.584.800	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	8.584.800
Kec. Krembangan			**41.506.318.658**	**Kec. Krembangan**			**42.758.141.045**
7 UNSUR KEWILAYAHAN			**41.506.318.658**	**7 UNSUR KEWILAYAHAN**			**42.758.141.045**
7.01 KECAMATAN			**41.506.318.658**	**7.01 KECAMATAN**			**42.758.141.045**
7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,34%	**21.548.380.194**	**7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,34%	**22.765.655.143**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**16.200.887.052**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**17.069.979.931**
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	16.200.887.052	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	17.069.979.931
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**5.099.647.803**	**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**5.581.306.841**
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	24 Paket	5.099.647.803	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	24 Paket	5.581.306.841

Sebelum Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sesudah Perubahan Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	Kantor yang Disediakan				Kantor yang Disediakan		
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**247.845.339**	**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**114.368.371**
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit	247.845.339	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	114.368.371
7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**57.981.236**	**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**60.308.636**
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37,11 %			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37,11 %	
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	2 Laporan	**4.200.000**	**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	2 Laporan	**4.200.000**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	4.200.000					7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	4.200.000
			7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	431 Lembaga	**23.274.000**				**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	431 Lembaga	**25.601.400**
				7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	23.274.000					7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	25.601.400
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**30.507.236**				**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**30.507.236**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	
					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen	7.056.092					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen	7.056.092
					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	14.906.020					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	14.906.020
					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	8.545.124					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	8.545.124

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**19.732.755.628**	**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**19.760.594.428**
	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**19.573.161.628**	**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**19.573.161.628**
	jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 Lembaga			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 Lembaga	
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	13.250.000	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	13.250.000
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2.047.151.349	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2.047.151.349
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	1.130.019.923	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1.130.019.923

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2.097.501.352						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2.331.390.766
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1.972.154.480						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1.972.154.480
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4.493.536.830						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4.493.536.830
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.765.752.742						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1.765.752.742
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.250.876.146						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.250.876.146
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	1.439.028.373						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.205.138.959
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	4 Pokmas / Ormas	2.411.381.933						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	4 Pokmas / Ormas	2.411.381.933

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
						Masyarakat di Kelurahan									Masyarakat di Kelurahan		
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	952.508.500						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	952.508.500
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	**159.594.000**					**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	**187.432.800**
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga								Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga	
					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit	139.194.000						7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit	167.032.800
					7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	20.400.000						7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	20.400.000

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**146.115.000**	**7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**150.496.238**
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Laporan	**146.115.000**	**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Laporan	**150.496.238**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	146.115.000	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	150.496.238
7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**21.086.600**	**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**21.086.600**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Laporan	**21.086.600**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Laporan	**21.086.600**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	35 Orang								Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	35 Orang	
					7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	35 Orang	14.648.000						7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	35 Orang	14.648.000
					7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	6.438.600						7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	6.438.600
Kec. Lakarsantri								**41.678.500.011**	**Kec. Lakarsantri**								**43.635.500.329**
	7 UNSUR KEWILAYAHAN							**41.678.500.011**		**7 UNSUR KEWILAYAHAN**							**43.635.500.329**
		7.01 KECAMATAN						**41.678.500.011**			**7.01 KECAMATAN**						**43.635.500.329**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,24%	**25.476.790.885**	**7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,24%	**27.407.312.901**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**21.443.324.257**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**22.958.609.986**
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	21.443.324.257	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	22.958.609.986
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**3.950.158.076**	**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4.364.637.115**
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	3.950.158.076	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	4.364.637.115
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**83.308.552**	**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**84.065.800**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	83.308.552					7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	84.065.800
			7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**36.392.850**				**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**38.282.852**
						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%							Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
						Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23,91%							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23,91%	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**2.250.000**					**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**2.250.000**
					7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	2.250.000					7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	2.250.000

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	205 Lembaga	**11.070.000**	**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	205 Lembaga	**12.960.002**
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	11.070.000	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12.960.002
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**23.072.850**	**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**23.072.850**
	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain	6 Bidang Urusan			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain	6 Bidang Urusan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						yang dilimpahkan kepada Camat									yang dilimpahkan kepada Camat		
					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	42 Dokumen	2.068.861						7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	42 Dokumen	2.068.861
					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2923 Laporan	11.388.389						7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2923 Laporan	11.388.389
					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	9.615.600						7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	9.615.600
			7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**15.971.896.196**				**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**15.992.142.596**
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**15.861.881.160**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**15.861.881.160**
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan								jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	
					7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000					7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit	1.352.717.862					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1.352.717.862
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1.002.191.497					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1.002.191.497
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	3.698.421.386					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	3.698.421.386
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	1.894.065.383					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	1.894.065.383

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1.826.944.396						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1.826.944.396
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2.345.115.427						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2.345.115.427
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	426.797.000						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	426.797.000
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	787.823.365						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	787.823.365
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	294.611.311						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	294.611.311
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.174.210.255						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.174.210.255

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	503.574.925					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	503.574.925
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	549.408.353					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	549.408.353
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	124 Lembaga	**110.015.036**				**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	124 Lembaga	**130.261.436**
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	32 Lembaga							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	32 Lembaga	
					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	32 Unit	101.232.000					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	32 Unit	121.478.400
					7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	8.783.036					7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	8.783.036

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**178.617.600**	**7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**182.959.500**
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	**178.617.600**	**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	**182.959.500**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	178.617.600	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	182.959.500
7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**14.802.480**	**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**14.802.480**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	44 Kasus	**14.802.480**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	44 Kasus	**14.802.480**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik								Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
					7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang	7.110.000					7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang	7.110.000
					7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6 Laporan	7.692.480					7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6 Laporan	7.692.480
Kec. Mulyorejo								**47.036.789.316**	**Kec. Mulyorejo**								**48.798.623.121**
	7 UNSUR KEWILAYAHAN							**47.036.789.316**		**7 UNSUR KEWILAYAHAN**							**48.798.623.121**
		7.01 KECAMATAN						**47.036.789.316**			**7.01 KECAMATAN**						**48.798.623.121**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,96%	**25.945.162.739**	**7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,96%	**27.675.287.151**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**20.887.623.221**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**22.045.348.119**
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	20.887.623.221	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan	22.045.348.119
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4.858.725.809**	**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**5.469.185.197**
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	4.858.725.809	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	5.469.185.197
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**198.813.709**	**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**160.753.835**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	198.813.709					7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	160.753.835
			7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**89.221.410**				**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**91.089.810**
						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%							Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
						Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	40,51 %							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	40,51 %	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**3.600.000**					**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**3.600.000**
					7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3.600.000					7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3.600.000

Sebelum Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	346 Lembaga	**18.684.000**
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	18.684.000
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**66.937.410**
	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain	6 Bidang Urusan	

Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	346 Lembaga	**20.552.400**
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	20.552.400
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**66.937.410**
	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain	6 Bidang Urusan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						yang dilimpahkan kepada Camat									yang dilimpahkan kepada Camat		
					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	8.096.400						7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	8.096.400
					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	49.338.445						7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	49.338.445
					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	9.502.565						7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	9.502.565
			7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**20.824.704.560**				**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**20.858.237.660**
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**20.635.979.060**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**20.635.979.060**
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan								jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	
					7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6.060.000					7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6.060.000
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1.352.048.232					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1.352.048.232
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	3.235.320.550					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	3.235.320.550
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1.624.771.162					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1.624.771.162
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2.058.766.720					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2.058.766.720

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	3.901.167.185						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	3.901.167.185
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2.005.787.492						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2.005.787.492
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.707.227.406						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.707.227.406
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.281.215.863						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.281.215.863
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	716.248.159						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	716.248.159
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.269.511.146						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.269.511.146

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	586.119.600						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	586.119.600
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	891.735.545						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	891.735.545
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	**188.725.500**					**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	**222.258.600**
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	53 Lembaga							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	53 Lembaga	
					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	53 Unit	167.665.500						7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	53 Unit	201.198.600
					7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	21.060.000						7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	21.060.000

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**158.001.107**	**7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**154.309.000**
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	26 Lokasi	**158.001.107**	**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	26 Lokasi	**154.309.000**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	158.001.107	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	154.309.000
7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**19.699.500**	**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**19.699.500**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	**19.699.500**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	**19.699.500**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik								Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
					7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	54 Orang	7.180.000						7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	54 Orang	7.180.000
					7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	12.519.500						7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	12.519.500
Kec. Pabean Cantian								**35.059.720.667**	**Kec. Pabean Cantian**								**36.552.668.296**
	7 UNSUR KEWILAYAHAN							**35.059.720.667**		**7 UNSUR KEWILAYAHAN**							**36.552.668.296**
		7.01 KECAMATAN						**35.059.720.667**			**7.01 KECAMATAN**						**36.552.668.296**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,80 %	**20.574.748.448**	**7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,80 %	**22.012.648.028**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**15.862.239.615**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**16.903.563.517**
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	15.862.239.615	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	16.903.563.517
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4.551.554.333**	**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4.998.147.554**
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	4.551.554.333	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	4.998.147.554
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**160.954.500**	**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**110.936.957**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**				**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**			
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	160.954.500				7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	110.936.957			
7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**57.076.948**				**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**79.114.348**			
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%				
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	17%						Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	17%				
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**2.100.000**				**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**2.100.000**			
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2.100.000				7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2.100.000			

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	371 Lembaga	**20.034.000**	**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	371 Lembaga	**42.071.400**
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	20.034.000	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	42.071.400
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**34.942.948**	**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**34.942.948**
	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain	6 Bidang Urusan			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain	6 Bidang Urusan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						yang dilimpahkan kepada Camat									yang dilimpahkan kepada Camat		
					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	3.485.999						7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	3.485.999
					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	26.672.667						7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	26.672.667
					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4.784.282						7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4.784.282
			7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**14.303.110.470**				**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**14.334.745.470**
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**14.097.069.270**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**14.097.069.270**
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan								jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	
					7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	7.200.000						7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	7.200.000
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1.958.553.891						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1.958.553.891
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	879.205.473						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	879.205.473
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2.584.215.914						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2.584.215.914
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2.133.754.504						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2.226.845.638

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2.436.984.008					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2.436.984.008
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	861.809.388					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	861.809.388
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2.316.324.958					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2.316.324.958
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	919.021.134					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	825.930.000
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	50 Lembaga	**206.041.200**				**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	50 Lembaga	**237.676.200**
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	50 Lembaga							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	50 Lembaga	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	50 Unit	158.175.000					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	50 Unit	189.810.000
					7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	47.866.200					7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	47.866.200
			7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**108.600.001**				**7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**109.975.650**
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	**108.600.001**					**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	**109.975.650**
					7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	108.600.001					7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	109.975.650

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**16.184.800**	**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**16.184.800**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus	**16.184.800**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus	**16.184.800**
	Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	7.600.000	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	7.600.000

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	8.584.800	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	8.584.800
Kec. Pakal			**35.326.494.546**	**Kec. Pakal**			**36.324.852.631**
7 UNSUR KEWILAYAHAN			**35.326.494.546**	**7 UNSUR KEWILAYAHAN**			**36.324.852.631**
7.01 KECAMATAN			**35.326.494.546**	**7.01 KECAMATAN**			**36.324.852.631**
7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,40 %	**20.190.401.439**	**7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,40 %	**21.181.471.123**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**16.002.477.440**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**16.499.041.339**
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	16.002.477.440	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	16.499.041.339
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4.042.697.305**	**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4.532.124.884**
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	501 Paket	4.042.697.305	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	501 Paket	4.532.124.884

Sebelum Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**		
	Kantor yang Disediakan				
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**145.226.694**		
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	145.226.694		
7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**75.855.992**		
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	53,19%			
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**2.700.000**		

Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
	Kantor yang Disediakan		
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**150.304.900**
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	150.304.900
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**72.173.192**
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	53,19%	
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**2.700.000**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2.700.000					7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2.700.000
			7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	229 Lembaga	**12.366.000**			**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	229 Lembaga	**8.683.200**
					7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12.366.000					7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	8.683.200
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**60.789.992**			**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**60.789.992**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	
					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen	1.680.540					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen	1.680.540
					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	51.352.868					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	51.352.868
					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	7.756.584					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	7.756.584

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**14.932.096.363**	**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**14.932.096.363**
	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**14.781.871.243**	**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**14.781.871.243**
	jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan	
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	3.012.403.238	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	3.012.403.238
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3.646.400.655	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3.675.971.055

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	2.408.151.796						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	2.624.547.638
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit	2.687.510.609						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit	2.790.971.312
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	424.625.000						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	424.625.000
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	557.382.900						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	527.812.500
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	696.623.842						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	480.228.000
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.342.773.203						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.239.312.500
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha	**150.225.120**					**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga**			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha	**150.225.120**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	34 Lembaga						**Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	34 Lembaga	
				7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	34 Unit	129.070.800					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	34 Unit	129.070.800
				7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	21.154.320					7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	21.154.320
			7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**111.625.152**				**7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**122.596.353**
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	**111.625.152**					**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	**122.596.353**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	111.625.152	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	122.596.353
7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**16.515.600**	**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**16.515.600**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Kasus	**16.515.600**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Kasus	**16.515.600**
	Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	166 Orang	6.900.000	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	166 Orang	6.900.000
7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	9.615.600	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	9.615.600
Kec. Rungkut			**44.155.788.664**	**Kec. Rungkut**			**46.369.378.248**
7 UNSUR KEWILAYAHAN			**44.155.788.664**	**7 UNSUR KEWILAYAHAN**			**46.369.378.248**
7.01 KECAMATAN			**44.155.788.664**	**7.01 KECAMATAN**			**46.369.378.248**
7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,06 %	**26.070.149.840**	**7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,06 %	**28.279.695.424**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**20.421.734.803**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**22.016.757.652**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan	20.421.734.803					7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	22.016.757.652
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**5.546.848.651**				**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**6.181.688.223**
					7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	5.546.848.651					7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	6.181.688.223
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**101.566.386**				**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**81.249.549**
					7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	101.566.386					7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	81.249.549
			7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**44.683.835**				**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**47.259.635**

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**			**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**		
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%					Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37,16 %					Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37,16 %			
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	**1.050.000**			**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	**1.050.000**		
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1.050.000			7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1.050.000		
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	497 Lembaga	**26.946.000**			**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	497 Lembaga	**29.521.800**		

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	26.946.000					7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	29.521.800
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	**16.687.835**			**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	**16.687.835**
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	
					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	777.000					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	777.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	8.218.355						7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	8.218.355
					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	7.692.480						7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	7.692.480
			7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**17.871.523.789**				**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**17.871.523.789**
						Persentase potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	**17.581.604.989**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	**17.581.604.989**
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	3.300.000						7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	3.300.000
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2.196.017.835						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2.374.475.310
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1.483.767.974						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1.483.767.974
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1.729.364.045						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1.729.364.045
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1.786.582.881						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1.786.582.881
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2.168.567.612						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2.168.567.612
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1.212.957.352						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1.212.957.352

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.321.511.890						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.143.054.415
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.285.505.434						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.285.505.434
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.071.909.363						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.071.909.363
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.218.442.385						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.218.442.385
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	1.350.868.850						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	1.350.868.850
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	2 Pokmas / Ormas	752.809.368						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	2 Pokmas / Ormas	752.809.368

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Masyarakat di Kelurahan									Masyarakat di Kelurahan		
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	110 Unit Usaha	**289.918.800**					**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	110 Unit Usaha	**289.918.800**
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	74 Lembaga								Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	74 Lembaga	
					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	74 Unit	280.918.800						7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	74 Unit	280.918.800
					7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	9.000.000						7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	9.000.000
			7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**153.615.600**				**7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**155.083.800**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	22 Lokasi	**153.615.600**	**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	22 Lokasi	**155.083.800**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	153.615.600	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	155.083.800
7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**15.815.600**	**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**15.815.600**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	150 Kasus	**15.815.600**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	150 Kasus	**15.815.600**
	Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan	2 Topik			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan	2 Topik	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						ketahanan nasional									ketahanan nasional		
					7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	6.200.000						7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	6.200.000
					7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5 Laporan	9.615.600						7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5 Laporan	9.615.600
Kec. Sambikerep								**33.426.841.571**	**Kec. Sambikerep**								**34.728.303.869**
	7 UNSUR KEWILAYAHAN							**33.426.841.571**		**7 UNSUR KEWILAYAHAN**							**34.728.303.869**
		7.01 KECAMATAN						**33.426.841.571**			**7.01 KECAMATAN**						**34.728.303.869**
			7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,94 %	**19.817.599.232**				**7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,94 %	**21.093.692.130**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**15.271.923.316**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**16.326.335.911**
				7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	15.271.923.316					7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	16.326.335.911
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	29 Paket	**4.422.186.834**	**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**					Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	22 Paket	**4.665.414.449**
				7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket	4.422.186.834					7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	4.665.414.449
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**123.489.082**	**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**101.941.770**
				7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	123.489.082					7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit	101.941.770

Sebelum Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**33.767.524**
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24,37%	
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**5.448.840**
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	5.448.840
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	261 Lembaga	**14.094.000**

Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**35.176.924**
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24,37%	
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**5.448.840**
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	5.448.840
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	261 Lembaga	**15.503.400**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
				7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	14.094.000					7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	15.503.400
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**14.224.684**				**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**14.224.684**
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	38 Dokumen	9.102.768						7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	38 Dokumen	9.102.768
					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	3.166.766						7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	3.166.766
					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	1.955.150						7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	1.955.150
			7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**13.408.283.135**				**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**13.432.325.735**
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**13.273.418.525**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**13.273.418.525**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan							jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	
					7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.807.800					7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.807.800
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	3.355.925.030					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	3.355.925.030
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2.346.600.460					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2.384.197.605
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1.082.478.577					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1.082.478.577
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3.389.999.591					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3.397.634.062
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	3 Pokmas / Ormas	1.223.363.240					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	3 Pokmas / Ormas	1.223.363.240

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Masyarakat di Kelurahan									Masyarakat di Kelurahan		
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.056.040.001						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.056.040.001
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	529.923.320						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	492.326.175
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	284.280.506						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	276.646.035
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	148 Lembaga	**134.864.610**					**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	148 Lembaga	**158.907.210**
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	38 Lembaga								Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	38 Lembaga	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	38 Unit	120.213.000					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	38 Unit	144.255.600
					7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	14.651.610					7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	14.651.610
			7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**150.299.200**				**7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**150.216.600**
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	**150.299.200**					**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	**150.216.600**
					7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan	150.299.200					7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan	150.216.600

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**16.892.480**	**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**16.892.480**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	37 Kasus	**16.892.480**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	37 Kasus	**16.892.480**
	Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80 Orang	9.200.000	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80 Orang	9.200.000

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	37 Laporan	7.692.480	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	37 Laporan	7.692.480
Kec. Sawahan			**52.737.686.217**	**Kec. Sawahan**			**54.780.441.571**
7 UNSUR KEWILAYAHAN			**52.737.686.217**	**7 UNSUR KEWILAYAHAN**			**54.780.441.571**
7.01 KECAMATAN			**52.737.686.217**	**7.01 KECAMATAN**			**54.780.441.571**
7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,70 %	**25.643.738.062**	**7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,70 %	**27.624.657.716**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**20.073.214.554**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**21.308.159.648**
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	20.073.214.554	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	21.308.159.648
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**5.449.964.308**	**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**6.212.590.102**
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	19 Paket	5.449.964.308	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	19 Paket	6.212.590.102

Sebelum Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sesudah Perubahan					
				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	Kantor yang Disediakan				Kantor yang Disediakan		
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**120.559.200**	**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**103.907.966**
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	120.559.200	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	103.907.966
7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**141.799.522**	**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**148.506.322**
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	58,44 %			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	58,44 %	
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	**2.916.732**	**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	**2.916.732**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2.916.732					7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2.916.732
			7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	627 lembaga	**110.035.990**			**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	627 lembaga	**116.742.790**
				7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	110.035.990					7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	116.742.790
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**28.846.800**			**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**28.846.800**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	
					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	9.615.600						7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	9.615.600
					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	9.615.600						7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	9.615.600
					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	9.615.600						7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	9.615.600

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**26.793.858.901**	**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**26.839.413.301**
	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	**26.556.855.925**	**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	**26.556.855.925**
	jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	10.384.848	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	10.384.848
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3.039.452.376	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3.039.452.376
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3.966.535.001	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3.966.535.001

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2.790.034.248						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2.790.034.248
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3.254.545.534						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3.254.545.534
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2.032.189.095						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2.032.189.095
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2.955.374.990						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2.955.374.990
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	988.505.871						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	988.505.871
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.647.913.280						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1.647.913.280
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.560.335.894						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1.560.335.894

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.138.490.879						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.138.490.879
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.896.344.345						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.896.344.345
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.276.749.564						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1.276.749.564
			7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	288 Lembaga	**237.002.976**				**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	288 Lembaga	**282.557.376**
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	72 Lembaga							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	72 Lembaga	
					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	72 Unit	227.772.000						7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	72 Unit	273.326.400

Sebelum Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	9.230.976	
7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**115.459.200**	
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi	**115.459.200**	
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	115.459.200	
7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**42.830.532**	

Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	9.230.976
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**125.033.700**
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi	**125.033.700**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	125.033.700
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**42.830.532**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	144 Kasus	**42.830.532**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	144 Kasus	**42.830.532**
	Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	93 Orang	23.204.100	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	93 Orang	23.204.100
7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	19.626.432	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	19.626.432
Kec. Semampir			**42.516.795.529**	**Kec. Semampir**			**43.941.521.205**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7 UNSUR KEWILAYAHAN			**42.516.795.529**	**7 UNSUR KEWILAYAHAN**			**43.941.521.205**
7.01 KECAMATAN			**42.516.795.529**	**7.01 KECAMATAN**			**43.941.521.205**
7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,42 %	**22.790.747.859**	**7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,42 %	**24.150.504.123**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**18.148.206.141**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**18.849.864.608**
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	18.148.206.141	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	18.849.864.608
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4.362.720.438**	**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**5.089.634.135**
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	4.362.720.438	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	5.089.634.135
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**279.821.280**	**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**211.005.380**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	279.821.280					7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	211.005.380
			7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**89.257.750**				**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**89.257.750**
						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%							Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
						Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23,91%							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23,91%	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga	**4.500.000**					**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga	**4.500.000**
					7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4.500.000					7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4.500.000

Sebelum Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	636 Lembaga	**43.502.400**
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30 Laporan	43.502.400
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**41.255.350**
	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain	6 Bidang Urusan	

Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	636 Lembaga	**43.502.400**
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30 Laporan	43.502.400
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**41.255.350**
	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain	6 Bidang Urusan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						yang dilimpahkan kepada Camat									yang dilimpahkan kepada Camat		
					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen	25.840.000						7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen	25.840.000
					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	5.841.600						7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	5.841.600
					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	9.573.750						7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	9.573.750
			7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**19.464.139.600**				**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**19.508.428.600**
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	**19.225.414.600**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	**19.225.414.600**
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan								jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	
					7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	9.000.000						7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	9.000.000
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1.900.616.640						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1.900.616.640
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2.171.887.305						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2.171.887.305
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2.168.567.612						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2.168.567.612
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2.933.816.188						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2.933.816.188

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2.085.068.670					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2.085.068.670
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.763.396.507					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.763.396.507
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2.003.967.000					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2.003.967.000
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.319.410.855					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.319.410.855
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.264.711.741					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.264.711.741
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.604.972.082					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.604.972.082

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	140 Unit Usaha	**238.725.000**	**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	140 Unit Usaha	**283.014.000**
	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	70 Lembaga			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	70 Lembaga	
7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	70 Unit	221.445.000	7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	70 Unit	265.734.000
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	17.280.000	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	17.280.000
7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**134.285.520**	**7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**154.965.932**
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	16 Lokasi	**134.285.520**	**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	16 Lokasi	**154.965.932**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	134.285.520	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	154.965.932
7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**38.364.800**	**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**38.364.800**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	210 Kasus	**38.364.800**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	21 Kasus	**38.364.800**
	Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	561 Orang	15.000.000	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	561 Orang	15.000.000
7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	23.364.800	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	23.364.800
Kec. Simokerto			**38.459.057.893**	**Kec. Simokerto**			**39.267.928.220**
7 UNSUR KEWILAYAHAN			**38.459.057.893**	**7 UNSUR KEWILAYAHAN**			**39.267.928.220**
7.01 KECAMATAN			**38.459.057.893**	**7.01 KECAMATAN**			**39.267.928.220**
7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,50 %	**21.310.084.271**	**7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,50 %	**22.115.675.493**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**17.725.376.350**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**18.256.623.631**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	17.725.376.350					7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	18.256.623.631
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**3.445.839.152**				**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**3.763.740.249**
					7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	3.445.839.152					7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	3.763.740.249
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**138.868.769**				**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**95.311.613**
					7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	65 Unit	138.868.769					7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	95.311.613
			7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**35.524.736**				**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**37.447.136**

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi			Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%					Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	67,53 %					Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	67,53 %			
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	5 lembaga	**6.000.000**			**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	5 lembaga	**6.000.000**		
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	6.000.000			7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	6.000.000		
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	356 lembaga	**19.846.710**			**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	356 lembaga	**21.769.110**		

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	19.846.710					7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	21.769.110
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**9.678.026**			**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**9.678.026**
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	20 Dokumen	3.196.800					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	20 Dokumen	3.196.800
					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	3.284.426					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	3.284.426
					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	3.196.800					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	3.196.800
			7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**16.973.058.050**				**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**16.973.058.050**
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%							Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**16.774.040.450**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**16.774.040.450**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan								jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	
					7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	13.400.000						7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	13.400.000
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2.223.468.058						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2.223.468.058
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2.223.468.058						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2.728.369.191
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	35 Unit	1.774.227.516						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	2.114.255.089
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	2.482.387.095						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	2.482.387.095
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1.866.615.160						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1.866.615.160

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1.401.812.039						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1.401.812.039
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	796.140.400						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	796.140.400
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	1.404.812.039						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	899.910.906
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.100.410.106						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.100.410.106
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.487.299.979						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1.147.272.406
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Lembaga	**199.017.600**					**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga**		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Lembaga	**199.017.600**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	48 Lembaga						**Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	48 Lembaga	
				7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	48 Unit	182.217.600					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	48 Unit	182.217.600
				7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	16.800.000					7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	16.800.000
			7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**131.917.380**				**7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**133.274.085**
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi	**131.917.380**					**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi	**133.274.085**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	131.917.380	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	133.274.085
7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**8.473.456**	**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**8.473.456**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	7 Kasus	**8.473.456**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	7 Kasus	**8.473.456**
	Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	53 Orang	6.400.000	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	53 Orang	6.400.000
7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	2.073.456	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	2.073.456
Kec. Sukolilo			**50.487.401.184**	**Kec. Sukolilo**			**52.984.381.387**
7 UNSUR KEWILAYAHAN			**50.487.401.184**	**7 UNSUR KEWILAYAHAN**			**52.984.381.387**
7.01 KECAMATAN			**50.487.401.184**	**7.01 KECAMATAN**			**52.984.381.387**
7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,11 %	**28.926.712.958**	**7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,11 %	**31.376.692.461**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**23.026.219.616**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**24.677.748.588**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan	23.026.219.616					7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	24.677.748.588
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**5.673.297.364**				**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**6.494.000.441**
				7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	5.673.297.364					7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	6.494.000.441
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**227.195.978**				**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**204.943.432**
				7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 Unit	227.195.978					7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 Unit	204.943.432
			7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**273.780.201**				**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**273.780.201**

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi			Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%					Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26,71 %					Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26,71 %			
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**6.300.000**			**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**6.300.000**		
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	6.300.000			7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	6.300.000		
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	441 Lembaga	**28.576.800**			**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	441 Lembaga	**28.576.800**		

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
				7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	28.576.800					7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	28.576.800
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**238.903.401**				**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**238.903.401**
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	50 Dokumen	8.948.798						7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	50 Dokumen	8.948.798
					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	227.963.818						7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	227.963.818
					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	1.990.785						7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	1.990.785
			7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**21.080.273.161**				**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**21.122.664.061**
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	**20.845.924.261**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	**20.845.924.261**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	7 kelurahan								jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	7 kelurahan	
					7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	10.500.000						7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	10.500.000
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2.058.766.720						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2.058.766.720
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2.740.838.449						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2.740.838.449
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2.540.008.078						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2.540.008.078
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1.098.034.843						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1.098.034.843
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1.500.949.489						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1.500.949.489

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2.218.042.655						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2.218.042.655
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1.894.065.383						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1.894.065.383
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	929.071.318						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	929.071.318
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	385.978.895						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	385.978.895
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.214.210.255						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.214.210.255
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.288.011.147						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.288.011.147

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	828.691.276					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	828.691.276
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	786.269.789					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	786.269.789
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1.352.485.964					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1.352.485.964
			7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Pelaku Usaha	**234.348.900**			**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Pelaku Usaha	**276.739.800**
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	67 Lembaga							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	67 Lembaga	
					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	67 Unit	211.954.500					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	67 Unit	254.345.400

Sebelum Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	22.394.400
7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**172.702.815**
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	11 Lokasi	**172.702.815**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	172.702.815
7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**33.932.049**

Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	22.394.400
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**177.312.615**
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	11 Lokasi	**177.312.615**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	177.312.615
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**33.932.049**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	2 Kasus	**33.932.049**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**					Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	2 Kasus	**33.932.049**
					Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik							Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
					7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang	10.620.855					7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang	10.620.855
					7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	23.311.194					7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	23.311.194
Kec. Sukomanunggal							**44.214.146.039**	**Kec. Sukomanunggal**							**45.762.257.224**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7 UNSUR KEWILAYAHAN			**44.214.146.039**	**7 UNSUR KEWILAYAHAN**			**45.762.257.224**
7.01 KECAMATAN			**44.214.146.039**	**7.01 KECAMATAN**			**45.762.257.224**
7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,88 %	**25.074.052.774**	**7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,88 %	**26.611.828.359**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**19.369.325.836**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**20.372.870.690**
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	19.369.325.836	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	20.372.870.690
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**5.507.878.074**	**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**6.078.762.172**
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	5.507.878.074	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	6.078.762.172
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**196.848.864**	**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**160.195.497**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**				**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**			
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	196.848.864				7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	160.195.497			
7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**72.537.981**				**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**76.026.381**			
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%				
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	51%						Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	51%				
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**5.400.000**				**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**5.400.000**			
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	5.400.000				7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	5.400.000			

Sebelum Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	323 Lembaga	**17.442.000**
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	17.442.000
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**49.695.981**
	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain	6 Bidang Urusan	

Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	323 Lembaga	**20.930.400**
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	63 Laporan	20.930.400
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**49.695.981**
	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain	6 Bidang Urusan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						yang dilimpahkan kepada Camat									yang dilimpahkan kepada Camat		
					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	31.380.000						7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	31.380.000
					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	8.504.693						7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	8.504.693
					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	9.811.288						7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	9.811.288
			7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**18.901.071.684**				**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**18.923.848.884**
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**18.769.585.684**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**18.769.585.684**
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan								jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	
					7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	9.180.000					7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	9.180.000
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2.398.381.665					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2.398.381.665
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1.221.615.244					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2.696.277.867
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1.190.839.915					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2.282.279.355
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2.502.262.261					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2.502.262.261

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	1.715.530.356						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	1.715.530.356
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1.701.395.501						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1.701.395.501
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	778.144.344						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	778.144.344
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2.141.162.623						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	666.500.000
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2.305.439.438						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.213.999.998
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	584.513.377						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	584.513.377

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	848.740.823						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	848.740.823
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.372.380.137						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.372.380.137
			7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	**131.486.000**				**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	**154.263.200**
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	36 Lembaga							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	36 Lembaga	
					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	36 Unit	113.886.000						7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	36 Unit	136.663.200
					7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	17.600.000						7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	17.600.000

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**152.553.600**	**7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**136.623.600**
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi	**152.553.600**	**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi	**136.623.600**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	152.553.600	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	136.623.600
7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**13.930.000**	**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**13.930.000**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama babinsa/babinkamtibmas	24 kasus	**13.930.000**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama babinsa/babinkamtibmas	24 kasus	**13.930.000**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik								Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
					7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang	9.430.000					7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	169 Orang	9.430.000
					7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	4.500.000					7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	4.500.000
Kec. Tambaksari								**63.297.472.273**	**Kec. Tambaksari**								**65.808.614.248**
7 UNSUR KEWILAYAHAN								**63.297.472.273**	**7 UNSUR KEWILAYAHAN**								**65.808.614.248**
7.01 KECAMATAN								**63.297.472.273**	**7.01 KECAMATAN**								**65.808.614.248**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,67 %	**32.130.488.983**	**7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,67 %	**34.549.127.108**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**25.298.158.579**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**26.853.534.754**
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/bulan	25.298.158.579	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 Orang/bulan	26.853.534.754
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**6.599.350.664**	**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**7.487.439.121**
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	6.599.350.664	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	7.487.439.121
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**232.979.740**	**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**208.153.233**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	232.979.740					7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	208.153.233
			7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**65.768.973**				**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**73.987.773**
						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%							Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
						Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	47,02 %							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	47,02 %	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**3.000.000**					**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**3.000.000**
					7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3.000.000					7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3.000.000

Sebelum Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	751 Lembaga	**40.446.000**
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	40.446.000
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**22.322.973**
	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain	6 Bidang Urusan	

Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	751 Lembaga	**48.664.800**
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	48.664.800
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**22.322.973**
	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain	6 Bidang Urusan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						yang dilimpahkan kepada Camat									yang dilimpahkan kepada Camat		
					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	6.000.000						7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	6.000.000
					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	4.830.677						7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	4.830.677
					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	11.492.296						7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	11.492.296
			7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**30.854.257.517**				**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**30.903.608.117**
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 kelurahan	**30.582.004.517**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 kelurahan	**30.582.004.517**
					jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	8 kelurahan							jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	8 kelurahan	
				7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000					7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000
				7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	2.471.520.113					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	2.471.520.113
				7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	1.839.164.937					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	1.839.164.937
				7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	2.257.937.952					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	2.434.466.552
				7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	2.281.888.082					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	2.281.888.082

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	3.407.629.584						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	3.423.509.912
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	2.800.310.702						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	2.817.087.126
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	1.763.702.754						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	2.127.223.784
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	3.657.476.213						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	3.657.476.213
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	828.507.382						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	828.507.382
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.237.609.958						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.237.609.958
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.381.341.401						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.204.812.801

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.533.643.872						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.533.643.872
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.382.660.916						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.366.780.588
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.200.473.110						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.183.696.686
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.020.070.654						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	656.549.624
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.512.066.887						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.512.066.887
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	150 pelaku usaha	**272.253.000**					**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga**		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	150 pelaku usaha	**321.603.600**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	78 Lembaga						**Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	78 Lembaga	
				7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	78 Unit	246.753.000					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	78 Unit	296.103.600
				7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	25.500.000					7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	25.500.000
			7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**201.196.800**				**7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**236.131.250**
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	17 lokasi	**201.196.800**					**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	17 lokasi	**236.131.250**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	201.196.800	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	236.131.250
7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**45.760.000**	**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**45.760.000**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	2 kasus	**45.760.000**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	2 kasus	**45.760.000**
	Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	663 Orang	20.560.000	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	663 Orang	20.560.000
7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	25.200.000	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	25.200.000
Kec. Tandes			**45.941.781.258**	**Kec. Tandes**			**47.687.703.693**
7 UNSUR KEWILAYAHAN			**45.941.781.258**	**7 UNSUR KEWILAYAHAN**			**47.687.703.693**
7.01 KECAMATAN			**45.941.781.258**	**7.01 KECAMATAN**			**47.687.703.693**
7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,88 %	**26.472.287.623**	**7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,88 %	**28.222.699.360**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**21.519.764.577**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**22.760.299.237**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	21.519.764.577					7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	22.760.299.237
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4.802.878.433**				**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**5.362.642.586**
					7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	4.802.878.433					7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5.362.642.586
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**149.644.613**				**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**99.757.537**
					7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	149.644.613					7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	99.757.537
			7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**111.408.265**				**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**99.117.865**

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi			Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%					Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50,51%					Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50,51%			
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	**12.000.000**			**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	**12.000.000**		
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	12.000.000			7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	12.000.000		
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	371 lembaga	**24.040.800**			**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	371 lembaga	**11.750.400**		

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
				7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	24.040.800					7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	11.750.400
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**75.367.465**				**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**75.367.465**
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	35 Dokumen	22.822.918						7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	35 Dokumen	22.822.918
					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	31.767.567						7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	31.767.567
					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	20.776.980						7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	20.776.980
			7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**19.104.613.370**				**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**19.104.613.370**
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	**18.889.007.170**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	**18.889.007.170**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan								jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	
					7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	27.100.000						7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	27.100.000
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2.645.375.487						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3.058.583.563
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2.431.553.931						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2.403.820.692
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1.500.466.720						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1.500.466.720
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2.635.221.402						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2.635.221.402
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2.206.068.803						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	2.481.478.814

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1.568.614.334					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1.568.614.334
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.237.406.838					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	824.198.762
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	661.721.707					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	689.454.946
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	508.800.000					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	508.800.000
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.592.314.268					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.592.314.268
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.176.209.064					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	900.799.053

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	698.154.616					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	698.154.616
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	**215.606.200**				**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	**215.606.200**
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	51 Lembaga							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	51 Lembaga	
					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	51 Unit	193.606.200					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	51 Unit	193.606.200
					7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	22.000.000					7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	22.000.000
			7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**223.017.600**				**7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**230.818.698**

Sebelum Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 lokasi	**223.017.600**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	223.017.600
7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**30.454.400**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus	**30.454.400**
	Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan	2 Topik	

Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 lokasi	**230.818.698**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	230.818.698
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**30.454.400**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus	**30.454.400**
	Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan	2 Topik	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						ketahanan nasional									ketahanan nasional		
					7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	124 Orang	4.700.000						7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	110 Orang	4.700.000
					7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	25.754.400						7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	25.754.400
Kec. Tegalsari								**41.979.783.085**	**Kec. Tegalsari**								**43.002.131.840**
	7 UNSUR KEWILAYAHAN							**41.979.783.085**		**7 UNSUR KEWILAYAHAN**							**43.002.131.840**
		7.01 KECAMATAN						**41.979.783.085**			**7.01 KECAMATAN**						**43.002.131.840**
			7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,15 %	**21.866.400.328**				**7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,15 %	**22.876.128.383**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**17.387.184.880**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**18.179.454.089**
				7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	17.387.184.880					7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	18.179.454.089
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4.234.693.082**	**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**					Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4.581.593.194**
				7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	4.234.693.082					7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	4.581.593.194
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**244.522.366**	**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**115.081.100**
				7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	244.522.366					7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	115.081.100

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**79.641.913**	**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**81.607.513**
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23,25%			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23,25%	
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**9.000.000**	**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**9.000.000**
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	125 Laporan	9.000.000	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	125 Laporan	9.000.000
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	364 Lembaga	**19.656.000**	**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	364 Lembaga	**21.621.600**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
				7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	19.656.000					7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	21.621.600
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**50.985.913**				**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**50.985.913**
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen	16.593.901						7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen	16.593.901
					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4140 Laporan	18.195.525						7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4140 Laporan	18.195.525
					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	16.196.487						7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	16.196.487
			7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**19.774.540.744**				**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**19.804.910.344**
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**19.600.162.744**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**19.600.162.744**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan								jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	
					7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	7.500.000						7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	7.500.000
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	2.018.145.546						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	2.018.145.546
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Unit	2.168.475.713						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	2.168.475.713
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	2.054.336.952						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	2.156.116.953
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29 Unit	3.725.719.924						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	3.725.719.924
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	1.659.774.651						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	1.725.659.725

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.073.130.092					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.073.130.092
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.470.304.384					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.470.304.384
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.215.690.543					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.113.910.542
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.216.820.948					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.216.820.948
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2.990.263.991					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2.924.378.917
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	192 Lembaga	**174.378.000**					**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga**	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	192 Lembaga	**204.747.600**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	48 Lembaga						**Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	48 Lembaga	
				7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	48 Unit	151.848.000					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	48 Unit	182.217.600
				7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	22.530.000					7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	22.530.000
			7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**244.617.600**				**7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**224.903.100**
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	21 Lokasi	**244.617.600**					**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	21 Lokasi	**224.903.100**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	244.617.600	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	224.903.100
7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**14.582.500**	**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**14.582.500**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	62 Kasus	**14.582.500**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	62 Kasus	**14.582.500**
	Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	94 Orang	5.640.000	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	47 Orang	5.640.000
7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	8.942.500	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	8.942.500
Kec. Tenggilis Mejoyo			**31.876.624.443**	**Kec. Tenggilis Mejoyo**			**33.361.522.984**
7 UNSUR KEWILAYAHAN			**31.876.624.443**	**7 UNSUR KEWILAYAHAN**			**33.361.522.984**
7.01 KECAMATAN			**31.876.624.443**	**7.01 KECAMATAN**			**33.361.522.984**
7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,98 %	**19.211.175.293**	**7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,98 %	**20.678.258.334**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**15.349.852.091**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**16.589.467.698**

Sebelum Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	15.349.852.091
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	**3.715.766.634**
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	3.715.766.634
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	**145.556.568**
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	145.556.568
7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**50.534.700**

Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	16.589.467.698
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	**3.977.401.540**
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	3.977.401.540
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	**111.389.096**
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	111.389.096
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**52.532.700**

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**			**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**		
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%					Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
	Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	24,73 %					Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	24,73 %			
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	**1.950.000**			**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	**1.950.000**		
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1.950.000			7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1.950.000		
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	185 Lembaga	**9.990.000**			**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	185 Lembaga	**11.988.000**		

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	9.990.000						7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	11.988.000
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Laporan	**38.594.700**				**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Laporan	**38.594.700**
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan							Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	
					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	3.016.980						7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	3.016.980
					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	17.788.860						7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	17.788.860

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	17.788.860	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	17.788.860
7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**12.482.330.050**	**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**12.498.147.550**
	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	**12.386.802.550**	**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	**12.386.802.550**
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	7.200.000					7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	7.200.000
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2.388.169.395					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2.388.169.395
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1.352.632.276					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1.352.632.276
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1.666.393.523					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1.666.393.523
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2.783.178.029					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2.812.650.489
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1.517.112.930					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1.517.112.930
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	1 Pokmas / Ormas	932.136.674					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	1 Pokmas / Ormas	932.136.674

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
						Masyarakat di Kelurahan									Masyarakat di Kelurahan		
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	623.875.427						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	623.875.427
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1.116.104.296						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1.086.631.836
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	**95.527.500**					**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	60 Pelaku Usaha	**111.345.000**
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	25 Lembaga							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	25 Lembaga	
					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	25 Unit	79.087.500						7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	25 Unit	94.905.000

Sebelum Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	16.440.000
7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**113.353.200**
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14 lokasi	**113.353.200**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	113.353.200
7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**19.231.200**

Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	16.440.000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**113.353.200**
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14 lokasi	**113.353.200**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	113.353.200
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**19.231.200**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi			
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	24 kasus	**19.231.200**				**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	24 kasus	**19.231.200**			
	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan						Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan				
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	9.615.600				7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	9.615.600			

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	9.615.600	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	9.615.600
Kec. Wiyung			**33.034.000.320**	**Kec. Wiyung**			**34.129.881.787**
7 UNSUR KEWILAYAHAN			**33.034.000.320**	**7 UNSUR KEWILAYAHAN**			**34.129.881.787**
7.01 KECAMATAN			**33.034.000.320**	**7.01 KECAMATAN**			**34.129.881.787**
7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,41 %	**19.833.406.812**	**7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,41 %	**20.899.313.354**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**15.883.931.922**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**16.623.702.734**
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	15.883.931.922	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	16.623.702.734
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**3.807.343.424**	**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4.162.024.991**
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	8 Paket	3.807.343.424	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	8 Paket	4.162.024.991

Sebelum Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**		
Kantor yang Disediakan					
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**142.131.466**		
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	142.131.466		
7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**33.597.144**		
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	55,81 %			
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	**2.250.000**		

Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
Kantor yang Disediakan			
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**113.585.629**
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	113.585.629
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**34.736.544**
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	55,81 %	
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	**2.250.000**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2.250.000					7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2.250.000
			7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	211 lembaga	**11.394.000**				**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	211 lembaga	**12.533.400**
				7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	11.394.000					7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12.533.400
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**19.953.144**				**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**19.953.144**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	
					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	9.615.600						7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	9.615.600
					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	9.615.600						7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	9.615.600
					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	721.944						7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	721.944

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**13.005.468.089**	**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**13.026.979.889**
	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**12.886.389.089**	**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**12.886.389.089**
	jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan	
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.282.080	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.282.080
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1.279.095.680	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1.386.777.610
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	2.223.468.058	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	2.223.468.058

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2.854.744.239						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2.854.744.239
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	2.223.640.323						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	2.223.640.323
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	722.671.040						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	614.989.110
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.418.812.039						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.418.812.039
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1.043.387.172						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.043.387.172
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.119.288.458						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.119.288.458
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	20 unit usaha	**119.079.000**					**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga**			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	20 unit usaha	**140.590.800**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**				**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**			
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	34 Lembaga					**Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	34 Lembaga				
7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	34 Unit	107.559.000				7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	34 Unit	129.070.800			
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	11.520.000				7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	11.520.000			
7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**147.620.275**				**7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**154.944.000**			
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 lokasi	**147.620.275**				**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 lokasi	**154.944.000**			

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	147.620.275	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	154.944.000
7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**13.908.000**	**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**13.908.000**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 kasus	**13.908.000**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 kasus	**13.908.000**
	Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80 Orang	9.615.600	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80 Orang	9.615.600
7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	4.292.400	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	4.292.400
Kec. Wonocolo			**38.928.776.503**	**Kec. Wonocolo**			**40.523.539.912**
7 UNSUR KEWILAYAHAN			**38.928.776.503**	**7 UNSUR KEWILAYAHAN**			**40.523.539.912**
7.01 KECAMATAN			**38.928.776.503**	**7.01 KECAMATAN**			**40.523.539.912**
7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,30 %	**22.642.828.642**	**7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,30 %	**24.185.470.537**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**18.507.084.589**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**19.527.352.520**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	18.507.084.589					7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	19.527.352.520
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**3.977.141.285**				**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4.538.969.918**
				7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	3.977.141.285					7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	4.538.969.918
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**158.602.768**				**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**119.148.099**
				7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	158.602.768					7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	119.148.099
			7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**49.630.502**				**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**49.630.502**

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi			Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%					Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	32,34%					Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	32,34%			
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat Kecamatan	6 Lembaga	**1.800.000**			**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat Kecamatan	6 Lembaga	**1.800.000**		
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1.800.000			7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1.800.000		
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	281 Lembaga	**26.316.316**			**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	281 Lembaga	**26.316.316**		

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
				7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	26.316.316					7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	26.316.316
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**21.514.186**				**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**21.514.186**
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	13.201.066						7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	13.201.066
					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	1.923.120						7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	1.923.120
					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	6.390.000						7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	6.390.000
			7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**16.096.038.655**				**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**16.123.877.455**
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**15.911.032.275**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**15.911.032.275**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan								jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	
					7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	5.400.000						7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	5.400.000
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1.399.961.370						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1.420.601.854
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2.917.357.970						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2.917.357.970
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1.399.961.370						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1.522.743.370
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	3.046.974.746						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	3.327.089.933
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1.537.212.484						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1.537.212.484

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1.007.924.355						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1.007.924.355
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	903.808.323						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	903.808.323
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.962.816.497						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.682.701.310
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	861.307.580						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	840.667.096
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	868.307.580						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	745.525.580
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	156 Lembaga	**185.006.380**					**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga**		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	156 Lembaga	**212.845.180**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga						**Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga	
				7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit	139.194.000					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit	167.032.800
				7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	45.812.380					7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	45.812.380
			7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**107.278.704**				**7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**131.561.418**
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi	**107.278.704**					**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi	**131.561.418**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan	107.278.704	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan	131.561.418
7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**33.000.000**	**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**33.000.000**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	88 Kasus	**33.000.000**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	88 Kasus	**33.000.000**
	Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	35 Orang	20.000.000	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	35 Orang	20.000.000
7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	88 Laporan	13.000.000	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	88 Laporan	13.000.000
Kec. Wonokromo			**51.871.088.989**	**Kec. Wonokromo**			**53.549.438.701**
7 UNSUR KEWILAYAHAN			**51.871.088.989**	**7 UNSUR KEWILAYAHAN**			**53.549.438.701**
7.01 KECAMATAN			**51.871.088.989**	**7.01 KECAMATAN**			**53.549.438.701**
7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,10 %	**27.149.721.649**	**7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,10 %	**28.781.979.061**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**21.502.371.639**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**22.387.885.591**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/bulan	21.502.371.639					7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	22.387.885.591
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**5.496.300.206**				**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**6.283.782.070**
					7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	5.496.300.206					7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	6.283.782.070
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**151.049.804**				**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**110.311.400**
					7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	151.049.804					7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	110.311.400
			7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**43.912.610**				**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**50.047.010**

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi			Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%					Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	35,29%					Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	35,29%			
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga	**3.589.824**			**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga	**3.589.824**		
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3.589.824			7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3.589.824		
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	568 Lembaga	**30.672.000**			**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	568 Lembaga	**36.806.400**		

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
				7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	30.672.000					7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	36.806.400
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**9.650.786**				**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	**9.650.786**
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	2.221.286						7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	2.221.286
					7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	3.829.500						7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	3.829.500
					7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	3.600.000						7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	3.600.000
			7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**24.540.965.130**				**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62,50%	**24.577.661.730**
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	4 Kelurahan	**24.348.842.130**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	4 Kelurahan	**24.348.842.130**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan							jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	
					7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	2.640.000					7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	2.640.000
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1.697.184.416					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1.697.184.416
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	1.729.607.339					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	1.729.607.339
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2.603.384.628					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	2.603.384.628
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	3.269.510.479					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3.269.510.479
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	2.745.481.627					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	3.229.246.782

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	3.550.902.754						7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	3.550.902.754
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.826.845.309						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.826.845.309
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.001.415.698						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.001.415.698
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	769.393.239						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	769.393.239
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.756.031.879						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.756.031.879
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.802.054.786						7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.318.289.631

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.594.389.976					7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.594.389.976
			7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Unit Usaha	**192.123.000**				**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Unit Usaha	**228.819.600**
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	58 Lembaga							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	58 Lembaga	
					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	58 Unit	183.483.000					7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	58 Unit	220.179.600
					7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	8.640.000					7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	8.640.000
			7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**107.197.200**				**7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**110.458.500**

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**		**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	20 Lokasi	**107.197.200**		**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	20 Lokasi	**110.458.500**	
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	107.197.200		7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	110.458.500	
7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**29.292.400**		**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**29.292.400**	
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Kasus	**29.292.400**		**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Kasus	**29.292.400**	
	Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan	2 Topik				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan	2 Topik		

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						ketahanan nasional									ketahanan nasional		
					7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	25.000.000					7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	25.000.000
					7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	4.292.400					7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	4.292.400
RSUD Bhakti Dharma Husada								**333.179.107.231**	**RSUD Bhakti Dharma Husada**								**293.672.760.882**
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								**333.179.107.231**	**1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								**293.672.760.882**
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							**333.179.107.231**		**1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**293.672.760.882**

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
1.02..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Bhakti Dharma Husada yang mencapai target	82%	**241.851.578.350**	**1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Bhakti Dharma Husada yang mencapai target	82%	**273.318.519.381**
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%	
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**72.721.196.875**	**1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**68.322.386.889**
1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	528 Orang/bulan	72.721.196.875	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	478 Orang/bulan	68.322.386.889
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	**1.210.000.000**	**1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	**1.436.000.000**
1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.210.000.000	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.436.000.000

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD					Persentase Jenis Kebutuhan Operasional Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS yang terpenuhi	100%	**167.920.381.475**	**1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD**					Persentase Jenis Kebutuhan Operasional Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS yang terpenuhi	100%	**203.560.132.492**
	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	167.920.381.475		1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	203.560.132.492
1.02..02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kelas rumah sakit	98%	**91.327.528.881**	**1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kelas rumah sakit	98%	**20.354.241.501**
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100%	**91.327.528.881**	**1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**					Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100%	**20.354.241.501**
	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	147 Unit	80.588.392.825		1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	24 Unit	3.555.370.406

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	10.739.136.056	1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	16.798.871.095
RSUD dr. Mohamad Soewandhie			**424.870.874.700**	**RSUD dr. Mohamad Soewandhie**			**438.715.098.890**
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**424.870.874.700**	**1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**438.715.098.890**
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**424.870.874.700**	**1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**438.715.098.890**
1.02..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang mencapai target	82,90 %	**423.242.747.425**	**1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang mencapai target	82,90 %	**438.656.922.891**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	87,90 %			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	87,90 %	
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**129.521.161.484**	**1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**120.154.130.241**
1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1068 Orang/bulan	129.521.161.484	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	811 Orang/bulan	120.154.130.241
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	**1.405.413.966**	**1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	**1.642.702.764**
1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.405.413.966	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.642.702.764
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di rumah sakit yang terpenuhi	100%	**292.316.171.975**	**1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di rumah sakit yang terpenuhi	100%	**316.860.089.886**
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	1 Unit Kerja	292.316.171.975	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	1 Unit Kerja	316.860.089.886

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Penunjang Pelayanan									Penunjang Pelayanan		
			1.02..02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit	98,08 %	**1.628.127.275**				**1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit	98,08 %	**58.175.999**
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUD Mohamad Soewandhie	100%	**1.628.127.275**					**1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUD Mohamad Soewandhie	100%	**58.175.999**
					1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	1.628.127.275						1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	58.175.999
Satuan Polisi Pamong Praja								**113.695.917.077**	**Satuan Polisi Pamong Praja**								**115.290.557.250**
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							**113.695.917.077**		**1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**115.290.557.250**
		1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN						**113.695.917.077**			**1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN**						**115.290.557.250**

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				**KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			
1.05..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97%	**31.083.729.225**	**1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97%	**30.592.323.861**
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**25.130.967.938**	**1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**26.586.807.388**
1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	109 Orang/bulan	25.130.967.938	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/bulan	26.586.807.388
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	**3.505.622.162**	**1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	**1.431.232.287**
1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	3.505.622.162	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	1.431.232.287
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	**2.447.139.125**	**1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	**2.574.284.186**
1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.447.139.125	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.574.284.186

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
1.05..02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	**82.612.187.852**	**1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	**84.698.233.389**
	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%			Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%	
	Persentase PPNS yang dibina	100%			Persentase PPNS yang dibina	100%	
	Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya	100%			Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya	100%	
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi penertiban pelanggaran Perda dan Perkada	104 Titik/Lokasi	**74.821.114.240**	**1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah lokasi penertiban pelanggaran Perda dan Perkada	104 Titik/Lokasi	**76.962.664.729**
	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	192 Kali			Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	192 Kali	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Jumlah lembaga yang berkerjasama dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	11 Lembaga							Jumlah lembaga yang berkerjasama dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	11 Lembaga	
						Jumlah Warga Sekitar lokasi penegakan Perda/Perkada yang berpotensi terkena dampak penegakan Perda/Perkada yang mendapatkan layanan	1280 Orang							Jumlah Warga Sekitar lokasi penegakan Perda/Perkada yang berpotensi terkena dampak penegakan Perda/Perkada yang mendapatkan layanan	1280 Orang	
					1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	978 Orang	2.482.574.855					1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	978 Orang	2.720.412.090

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	762.472.843						1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	1.469.970.170
					1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	12 Dokumen	148.020.000						1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	12 Dokumen	158.020.000
					1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	69.618.710.154						1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	70.276.476.081

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**					**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	1.593.595.300					1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	2.121.145.300
					1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	215.741.088					1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	216.641.088
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang diselidiki, dilakukan penyidikan, dan diselesaikan	94 Objek	**7.619.408.012**				**1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang diselidiki, dilakukan penyidikan, dan diselesaikan	94 Objek	**7.559.088.660**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang ditindak dan diselesaikan	4230 Objek							Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang ditindak dan diselesaikan	4230 Objek	
				1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	1.538.197.858					1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	1.267.510.858
				1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	4.891.912.654					1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	5.070.280.302
				1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	1.189.297.500					1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	1.221.297.500
			1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan kapasitas	75 Orang	**171.665.600**				**1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**		Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan kapasitas	75 Orang	**176.480.000**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	4 Laporan	171.665.600	1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	4 Laporan	176.480.000
Sekretariat Daerah			**334.549.551.748**	**Sekretariat Daerah**			**398.090.255.667**
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			**334.549.551.748**	**4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**398.090.255.667**
4.01 SEKRETARIAT DAERAH			**334.549.551.748**	**4.01 SEKRETARIAT DAERAH**			**398.090.255.667**
4.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	**212.911.206.907**	**4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	**278.390.608.125**
	Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%			Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses ≤ 30 Hari Kerja	94%			Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses ≤ 30 Hari Kerja	94%	
	Persentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan	85%			Persentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan	85%	
	Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A	69,44 %			Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A	69,44 %	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	
	Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar.	100%			Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar.	100%	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
	Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100%			Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100%	
	Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik	98%			Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik	98%	
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100%			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100%	
4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**64.418.503.114**	**4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**76.470.603.610**
4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	203 Orang/bulan	64.418.503.114	4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	197 Orang/bulan	76.470.603.610
4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 laporan	**860.057.025**	**4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 laporan	**820.184.850**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	860.057.025					4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	820.184.850
			4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 laporan	**14.418.604.346**				**4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 laporan	**20.803.287.554**
				4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1500 Unit	14.418.604.346					4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1500 Unit	20.803.287.554
			4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**102.902.292.749**				**4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**149.952.362.123**
					Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran	100%							Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran	100%	
					Perentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan PD	100%							Perentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan PD	100%	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.051.672.734						4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.263.672.734
					4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.831.427.780						4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.008.143.630
					4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	97.019.192.235						4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	143.680.545.759
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah	100%	**9.424.255.124**					**4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah	100%	**9.424.255.124**
					4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	186.165.013						4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	186.165.013
					4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	9.238.090.111						4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	9.238.090.111

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						dan Wakil Kepala Daerah									dan Wakil Kepala Daerah		
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi		Jumlah perangkat daerah yang didampingi penyusunan evaluasi kelembagaan dan/atau analisis jabatan/analisis beban kerja sesuai kelembagaan yang berlaku	58 instansi	**2.565.505.643**					**4.01.01.2.13 Penataan Organisasi**		Jumlah perangkat daerah yang didampingi penyusunan evaluasi kelembagaan dan/atau analisis jabatan/analisis beban kerja sesuai kelembagaan yang berlaku	58 instansi	**2.794.804.703**
						Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penerapan SAKIP	58 instansi								Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penerapan SAKIP	58 instansi	
						Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang didampingi untuk peningkatan kualitas layanan	253 unit								Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang didampingi untuk peningkatan kualitas layanan	253 unit	
					4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	952.977.810						4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	969.071.639
					4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	902.658.046						4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	1.014.309.575

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	709.869.787					4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	811.423.489
			4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	**18.321.988.906**				**4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**		Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	**18.125.110.161**
						Jumlah laporan pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12 laporan							Jumlah laporan pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12 laporan	
					4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	17.542.202.394					4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	17.434.055.311
					4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	779.786.512					4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	691.054.850
			4.01..02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			Kecepatan waktu pelaporan outreach	2 hari	**103.192.091.427**				**4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		Kecepatan waktu pelaporan outreach	2 hari	**100.835.814.621**
						Kecepatan waktu rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat	14 hari							Kecepatan waktu rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat	14 hari	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	SIMPROLAMAS yang di laporkan				SIMPROLAMAS yang di laporkan		
	Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi	95%			Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi	95%	
	Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan	85%			Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan	85%	
	Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	100%			Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	100%	
	Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya	58,37 %			Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya	58,37 %	
	Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan	98,5 %			Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan	98,5 %	
	Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	83,87 %			Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	83,87 %	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
	Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100%			Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100%	
	Persentase produk hukum yang disebarluaskan	100%			Persentase produk hukum yang disebarluaskan	100%	
	Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100%			Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100%	
	Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan	100%			Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan	100%	
4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah pendataan batas wilayah kecamatan	26 Kecamatan	**7.094.849.209**	**4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan**	Jumlah pendataan batas wilayah kecamatan	26 Kecamatan	**5.674.231.993**
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan	2 Dokumen			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan	2 Dokumen	
	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah memahami materi pembinaan	108 Lembaga			Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah memahami materi pembinaan	108 Lembaga	
4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	2.184.082.527	4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	2.176.686.058

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	2.139.743.973						4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1.219.561.074
					4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	2.771.022.709						4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	2.277.984.861
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Jumlah kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan pelayanan masyarakat pada Aplikasi SIMPROLAMAS	1 Kegiatan	**86.737.547.479**					**4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**		Jumlah kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan pelayanan masyarakat pada Aplikasi SIMPROLAMAS	1 Kegiatan	**87.477.748.698**
						Jumlah kegiatan pelaksanaan outreach	1 Kegiatan								Jumlah kegiatan pelaksanaan outreach	1 Kegiatan	
						Jumlah dokumen hasil pelaksanaan evaluasi pengelolaan bina mental spiritual	1 Dokumen								Jumlah dokumen hasil pelaksanaan evaluasi pengelolaan bina mental spiritual	1 Dokumen	
					4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	30.709.176.214						4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	31.722.886.668

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	748.842.362						4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	907.656.605

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**						**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
					4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	55.279.528.903				4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	54.847.205.425
			4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun	60 rancangan produk hukum	**7.244.306.191**				**4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**		Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun	60 rancangan produk hukum	**6.099.110.477**
						Jumlah permasalahan hukum yang ditangani	20 permasalahan hukum							Jumlah permasalahan hukum yang ditangani	20 permasalahan hukum	
						Jumlah produk hukum yang dipublikasi	60 produk hukum							Jumlah produk hukum yang dipublikasi	60 produk hukum	
					4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	60 Dokumen	3.694.779.542				4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	60 Dokumen	2.682.933.994
					4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20 Kasus	1.974.623.534				4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20 Kasus	1.979.560.933

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	60 Dokumen	1.574.903.115					4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	60 Dokumen	1.436.615.550
			4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah			Jumlah kerjasama luar negeri yang difasilitasi	11 Lembaga	**2.115.388.548**				**4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah**		Jumlah kerjasama luar negeri yang difasilitasi	11 Lembaga	**1.584.723.453**
						Jumlah kerjasama dalam negeri yang difasilitasi	20 Lembaga							Jumlah kerjasama dalam negeri yang difasilitasi	20 Lembaga	
						Jumlah evaluasi kerjasama yang dilakukan	31 Lembaga							Jumlah evaluasi kerjasama yang dilakukan	31 Lembaga	
					4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	688.355.009					4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	595.436.420
					4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1.096.871.339					4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	766.558.989
					4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	330.162.200					4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	222.728.044
			4.01..03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	100%	**18.446.253.414**				**4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	100%	**18.863.832.921**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
	Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%	85%			Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%	85%	
	Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD	85%			Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD	85%	
4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian	12 laporan	**3.318.120.705**	**4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian	12 laporan	**5.786.554.334**
4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	1.111.199.997	4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	1.177.049.997
4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	1.622.404.708	4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	3.927.210.027
4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	584.516.000	4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	682.294.310

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan					Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan yang disusun	2 Dokumen	**10.822.866.695**	**4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**					Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan yang disusun	2 Dokumen	**9.022.798.677**
	4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	3.911.209.850		4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	3.006.708.668
	4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16 Laporan	6.911.656.845		4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16 Laporan	6.016.090.009
4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					Presentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**4.263.718.626**	**4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**					Presentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**4.012.932.522**
					Persentase dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	94%							Persentase dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	94%	
	4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	98 Dokumen	3.932.518.626		4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	98 Dokumen	3.700.423.002

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	331.200.000						4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	312.509.520
				4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Jumlah laporan pemantauan kebijakan sumber daya alam	1 laporan	**41.547.388**					**4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**		Jumlah laporan pemantauan kebijakan sumber daya alam	1 laporan	**41.547.388**
					4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	41.547.388						4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	41.547.388
Sekretariat DPRD								**252.595.039.093**	**Sekretariat DPRD**								**239.027.562.391**
	4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							**252.595.039.093**		**4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**239.027.562.391**
		4.02 SEKRETARIAT DPRD						**252.595.039.093**			**4.02 SEKRETARIAT DPRD**						**239.027.562.391**
			4.02..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%	**187.976.596.547**				**4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%	**174.889.119.845**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**14.243.606.853**	**4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**14.280.193.594**
				4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	14.243.606.853					4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	14.280.193.594
4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**35.690.135.877**	**4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**					Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**33.841.628.704**
				4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	35.690.135.877					4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	33.841.628.704
4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rata-rata waktu penyiapan Kelengkapan sarana dan prasarana rapat	≤ 1 Hari	**6.509.997.996**	**4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					Rata-rata waktu penyiapan Kelengkapan sarana dan prasarana rapat	≤ 1 Hari	**6.099.953.746**
				4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	204 Unit	6.509.997.996					4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	204 Unit	6.099.953.746
4.02.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					Rata-rata waktu Penyiapan kelengkapan administrasi perjalanan Dinas	≤ 1 Hari	**85.215.577.525**	**4.02.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**					Rata-rata waktu Penyiapan kelengkapan administrasi perjalanan Dinas	≤ 1 Hari	**74.650.065.505**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					4.02.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	96 Laporan	85.215.577.525					4.02.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	96 Laporan	74.650.065.505
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	100%	**45.146.688.296**					**4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	100%	**45.146.688.296**
					4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	45.146.688.296					4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	45.146.688.296
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD		Rata-rata Waktu Penyelesaian Laporan Perjalanan Dinas	≤ 2 Hari	**1.170.590.000**					**4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD**	Rata-rata Waktu Penyelesaian Laporan Perjalanan Dinas	≤ 2 Hari	**870.590.000**
					4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	36 Laporan	1.170.590.000					4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	16 Laporan	870.590.000
			4.02..02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	100%	**64.618.442.546**				**4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	100%	**64.138.442.546**
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas	6 Dokumen	**3.294.368.763**					**4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas	6 Dokumen	**3.294.368.763**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 Dokumen	3.294.368.763					4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 Dokumen	3.294.368.763
			4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD			Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	50 Orang	**24.716.887.810**				**4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD**		Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	50 Orang	**24.236.887.810**
					4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dokumen	1.200.000.000					4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dokumen	720.000.000
					4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4 Dokumen	23.516.887.810					4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4 Dokumen	23.516.887.810
			4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			Jumlah dokumen pelaksanaan reses	3 Dokumen	**31.925.482.144**				**4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		Jumlah dokumen pelaksanaan reses	2 Dokumen	**31.925.482.144**
					4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150 Dokumen	31.925.482.144					4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	100 Dokumen	31.925.482.144
			4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD			Rata rata waktu penyelesaian risalah rapat paripurna dan notulensi rapat	≤ 2 Hari	**4.681.703.829**				**4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD**		Rata rata waktu penyelesaian risalah rapat paripurna dan notulensi rapat	≤ 2 Hari	**4.681.703.829**
					4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi	36 Dokumen	4.681.703.829					4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi	36 Dokumen	4.681.703.829

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
Pelaksanaan Tugas DPRD	Pelaksanaan Tugas DPRD			Pelaksanaan Tugas DPRD	Pelaksanaan Tugas DPRD		
TOTAL			**10.984.338.989.794**	**TOTAL**			**11.287.046.034.022**

Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 terdapat penyesuaian terhadap target outcome dan output pada beberapa level sebagai berikut :

Tabel V.3 Hubungan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan						
Misi	**Tujuan**	**Indikator**	**Target**	**Sasaran**	**Indikator**	**Target**
Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung nasional dan internasional	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,1%	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	4,01%
			5,6 – 6,1%*			**5,49%***
		Indeks Gini	0,319		Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan	3,96%
			0,319-0,388*		Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum	5,37%
						7,9%*
					Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak	5,26%
					Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	24,90%
	Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,5%	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	6,30%
						7,67%*
		Persentase Penduduk Miskin	4,01%		Persentase tenaga kerja yang terserap	22,01%
						22,67%*
					Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,81
						0,7*
Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya	Indeks Pembangunan Manusia	83,50	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Indeks Pendidikan	79,33
					Angka Harapan Hidup	74,53
						75,97*
					Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk	2,22%
						1,46%*
					Skor Pola Pangan Harapan	95,20
				Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	93,75
			84,2*			**95,76***

Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan						
Misi	**Tujuan**	**Indikator**	**Target**	**Sasaran**	**Indikator**	**Target**
	Pembentukan karakter Masyarakat	Indeks Harmoni Sosial	82,13	Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	Indeks Budaya Lokal	89,70
						90*
					Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	64,94
					Indeks Kepedulian Sosial	89,30
			83*			**97,96***
Misi 3 : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan	Terpenuhinya penataan kota yang terintegrasi didukung infrastruktur berkualitas untuk mendorong konektivitas sosial dan ekonomi masyarakat	Indeks Infrastruktur Kota	0,734	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	0,820
					Indeks Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,625
						0,78*
					Indeks Penyelenggaraan Transportasi	0,728
			0,78*			**0,743***
	Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, nyaman dan indah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	68,75	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	56,09
						57,58*
					Indeks Kualitas Udara	90,34
					Indeks Kualitas Lahan	42,72
					Indeks Persampahan	78,13
			71,04*			**83,8***
Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan public	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	84,21	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	84,02
					Opini BPK	WTP
					Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,3 (Baik)
						4,49*
			97*	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Nilai Kepuasan Masyarakat	90,16%
						95,90%*
Misi 5 : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,87	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,88
						0,94*
			0,935*	Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat	Indeks Penanggulangan Bencana	0,864
						0,92*

Keterangan : *) penyesuaian target pada Perubahan RKPD 2024 dengan berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi Tahun 202

Pada perubahan RKPD Kota Surabaya terdapat penyesuaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 dengan mempertimbangkan :

a. Hasil Evaluasi terhadap capaian RPJMD sampai dengan tahun 2023;
b. Hasil Evaluasi terhadap RKPD Kota Surabaya Triwulan II tahun 2024;

Penyesuaian terhadap perubahan target dalam Indikator Tujuan dan Sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Laju pertumbuhan ekonomi semula ditargetkan sebesar 6,1% menjadi 5,6%-6,1% berdasarkan realisasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 sebesar 5,7%;
2. Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor semula ditargetkan sebesar 4,01% menjadi 5,49% berdasarkan realisasi persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di tahun 2023 sebesar 5,48%;
3. Indeks Gini semula ditargetkan sebesar 0,319 menjadi 0,319-0,388 berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi Indeks Gini di tahun 2023 sebesar 0,423;
4. Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum semula ditargetkan sebesar 5,37% menjadi 7,9% berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum di tahun 2023 sebesar 7,84%;
5. Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah semula ditargetkan sebesar 6,30% menjadi 7,67% berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah di tahun 2023 sebesar 7,67%;
6. Persentase tenaga kerja yang terserap semula ditargetkan sebesar 22,01% menjadi 22,67% berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi Persentase tenaga kerja yang terserap di tahun 2023 sebesar 22,67%;

7. Indeks Kedalaman Kemiskinan semula ditargetkan sebesar 0,81 menjadi 0,7 berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi Indeks Kedalaman Kemiskinan di tahun 2023 sebesar 0,71;
8. Indeks Pembangunan Manusia semula ditargetkan sebesar 83,50 menjadi 84,2 berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi Indeks Pembangunan Manusia di tahun 2023 sebesar 83,99%;
9. Angka Harapan Hidup semula ditargetkan sebesar 74,53 menjadi 75,97 berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi Angka Harapan Hidup di tahu 2023 sebesar 75,82;
10. Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk semula ditargetkan sebesar 2,22% menjadi 1,46% berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk di tahun 2023 sebesar 1,47%;
11. Indeks Pembangunan Gender semula ditargetkan sebesar 93,75 menjadi 95,76 berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi Indeks Pembangunan Gender di tahun 2023 sebesar 95,56;
12. Indeks Harmoni Sosial semula ditargetkan sebesar 82,13 menjadi 83 berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi Indeks Harmoni Sosial di tahun 2023 sebesar 82,7;
13. Indeks Budaya lokal semula ditargetkan sebesar 89,70 menjadi 90 berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi Indeks Budaya lokal ditahun 2023 sebesar 89,99;
14. Indeks Kepedulian Sosial semula ditargetkan sebesar 89,30 menjadi 97,96 berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi Indeks Kepedulian Sosial di tahun 2023 sebesar 97,86;
15. Indeks Infrastruktur Kota semula ditargetkan sebesar 0,734 menjadi 0,78 berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi Indeks Infrastruktur Kota di tahun 2023 sebesar 0,75;
16. Indeks Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan semula ditargetkan sebesar 0,625 menjadi 0,78 berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi Indeks Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan di tahun 2023 sebesar 0,67;

17. Indeks Penyelenggaraan Transportasi semula ditargetkan sebesar 0,728 menjadi 0,743 berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi Indeks Penyelenggaraan Transportasi di tahun 2023 sebesar 0,74;
18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS) semula ditargetkan sebesar 68,75 menjadi 71,04 berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS) di tahun 2023 sebesar 70,35;
19. Indeks Kualitas Air semula ditargetkan sebesar 56,09 menjadi 57,58 berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi Indeks Kualitas Air ditahun 2023 sebesar 58,5 serta mempertimbangkan hasil pemeriksaan kualitas air sampai dengan triwulan II tahun 2024;
20. Indeks Persampahan semula ditargetkan sebesar 78,13 menjadi 83,8 berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi Indeks Persampahan di tahun 2023 sebesar 83,79;
21. Indeks Reformasi Birokrasi semula ditargetkan sebesar 84,21 menjadi 97 berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi Indeks Reformasi Birokrasi di tahun 2023 sebesar 95,12;
22. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik semula ditargetkan sebesar 3,3 (Baik) menjadi 4,49 berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebesar 4,49;
23. Nilai Kepuasan Masyarakat semula ditargetkan sebesar 90,16% menjadi 95,90% berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi Nilai Kepuasan Masyarakat di tahun 2023 sebesar 95,82%;
24. Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota semula ditargetkan sebesasr 0,87 menjadi 0,935 berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota di tahun 2023 sebesar 0,93;
25. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota semula ditargetkan sebesar 0,88 menjadi 0,94 berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota di tahun 2023 sebesar 0,93;

26. Indeks Penanggulangan Bencana semula ditargetkan sebesar 0,864 menjadi 0,92 berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi Indeks Penanggulangan Bencana di tahun 2023 sebesar 0,92.

Selain penyesuaian dalam target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Surabaya Tahun 2024, terdapat penambahan atau pengurangan anggaran tanpa menyebabkan adanya perubahan dalam target output baik pada level program, kegiatan dan subkegiatan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pada Satuan Polisi Pamong Praja terdapat penambahan anggaran berupa anggaran operasional kegiatan yang tidak mempengaruhi pada perubahan target output.
2. Pada Sekretariat Daerah terdapat penyesuaian pada gaji dan tunjangan untuk menyesuaikan terhadap mutasi/promosi di lingkungan Sekretariat Daerah.
3. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat penambahan anggaran berupa anggaran operasional kegiatan yang tidak mempengaruhi pada perubahan target output.
4. Pada Inspektorat terdapat penambahan anggaran berupa anggaran operasional kegiatan yang tidak mempengaruhi pada perubahan target output.
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah tidak terdapat penambahan anggaran namun terdapat penambahan output dikarenakan pada tahap pelaksanaan pekerjaan terdapat perubahan terhadap jangkauan dari sistem pengelolaan air limbah yang dibangun.
6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase terdapat pengurangan alokasi anggaran disebabkan karena adanya efisiensi anggaran.
7. Program Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus terdapat pengurangan alokasi anggaran dikarenakan jumlah unit hunian rumah susun sebagian telah dibangun pada tahun 2023 sehingga dapat dilakukan efisiensi dan dengan anggaran tersebut dapat mencakup pembangunan yang lebih banyak menjadi 5.233 unit hunian.

8. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh terdapat pengurangan pada alokasi anggaran dikarenakan adanya efisiensi namun hal tersebut tidak mempengaruhi capaian output pada akhir tahun 2024.
9. Program Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan terdapat pengurangan siginifikan terhadap alokasi anggaran yang disebabkan karena disesuaikan dengan pembayaran yang dilakukan pada tahun 2024.
10. Program Kawasan Permukiman tidak terdapat penambahan anggaran yang signifikan namun terdapat penambahan output semula 1.000 unit rumah menjadi 1500 unit rumah dikarenakan adanya efisiensi pelaksanaan sehingga dengan anggaran tersebut dapat menjangkau output yang lebih besar.
11. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota terdapat penambahan anggaran operasional penyelenggaraan parkir yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap indikator output “Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota”.
12. Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) terdapat penambahan anggaran untuk operasional pada Pembangunan *tunnel* pada terminal Joyoboyo, selain itu terdapat perbaikan data jumlah Terminal Tipe C yang dikelola oleh Pemerintah Kota semula 12 unit diperbaiki menjadi 14 unit.

Kerangka pendanaan disusun berdasarkan hasil analisa keuangan dengan mempertimbangkan regulasi dan kondisi terkini. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif belanja Daerah disajikan dalam tabel V.4 tentang Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Kota Surabaya Tahun 2024.

Tabel V.4
Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Kota Surabaya Tahun 2024

NO	URAIAN	APBD 2024	Ranc. P-RKPD 2024
A	**PENDAPATAN**	**10,770,314,467,863**	**11,089,095,886,292**
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**6,420,892,151,293**	**6,560,507,984,130**
	a Pajak Daerah	5,061,651,201,188	5,151,326,806,350
	b Retribusi Daerah	393,470,465,818	405,033,091,681
	c Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	222,512,698,894	190,042,923,841
	d Lain-Lain PAD yang sah	743,257,785,393	814,105,162,258
2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**4,349,422,316,570**	**4,528,587,902,162**
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	**2,727,367,254,000**	**2,727,367,254,000**
	a 1) Dana Perimbangan	2,704,974,440,000	2,704,974,440,000
	b 2) Dana Insentif Daerah	22,392,814,000	22,392,814,000
	Transfer Antar - Daerah	**1,622,055,062,570**	**1,801,220,648,162**
	a 1) Pendapatan Bagi Hasil	1,618,211,748,791	1,797,377,334,383
	b 2) Bantuan Keuangan	3,843,313,779	3,843,313,779
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**-**	**-**
	a Pendapatan Hibah		
	b Pendapatan Dana Darurat		
	c Pendapatan Lainnya		
B	**BELANJA**	**10,984,338,989,794**	**11,287,046,034,022**
	BELANJA OPERASI + BELANJA MODAL	**10,966,838,989,794**	**11,281,546,034,022**
1	**BELANJA OPERASI**	**8,297,504,122,263**	**8,709,452,178,909**
	a Belanja Pegawai	2,969,669,114,959	3,016,269,454,678
	b Belanja Barang dan Jasa	4,856,709,908,235	5,207,747,281,772
	c Belanja Bunga	-	-
	d Belanja Subsidi	-	33,283,565,696
	e Belanja Hibah	442,862,699,069	443,147,476,763
	f Belanja Bantuan Sosial	28,262,400,000	9,004,400,000
2	**BELANJA MODAL**	**2,669,334,867,531**	**2,572,093,855,113**
	a Belanja Modal Tanah	394,207,182,390	258,132,525,094
	b Belanja Modal Peralatan dan Mesin	390,350,817,090	236,096,009,718
	c Belanja Modal Gedung dan Bangunan	613,657,726,699	745,753,086,703
	d Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1,261,528,774,335	1,324,289,135,899
	e Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9,590,367,017	1,377,566,401
	f Belanja Modal Aset Lainnya	-	6,445,531,298
3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**17,000,000,000**	**5,000,000,000**
	a Belanja Tidak Terduga	17,000,000,000	5,000,000,000
4	**BELANJA TRANSFER**	**500,000,000**	**500,000,000**
	a Belanja Bagi Hasil	-	-
	b Belanja Bantuan Keuangan	500,000,000	500,000,000

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (diolah tahun 2024).

BAB VI
PENUTUP

Dokumen Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik.

Perubahan RKPD Kota Surabaya tahun 2024 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2024, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2024 yang mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Dalam rangka menjamin substansi dokumen Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 yang mendorong terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak, selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024.

WALIKOTA SURABAYA

ERI CAHYADI